PT Mandiri Utama Finance

mandiri utama finance

Laporan Tahunan
Annual Report
2022

PENAFIAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Selamat datang di Laporan Tahunan Mandiri Utama Finance Tahun 2022 dengan tema "Meningkatkan Optimisme, Tumbuh Lebih Kuat". Laporan Tahunan ini diterbitkan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Mandiri Utama Finance, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis di mana Mandiri Utama Finance menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, mengingat kinerja aktual di masa depan dapat berbeda dengan pernyataan pada Laporan Tahunan ini karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Mandiri Utama Finance.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Mandiri Utama Finance" "MUF" dan "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai Mandiri Utama Finance yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan. Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITIES

Welcome to Mandiri Utama Finance's 2022 Annual Report with the theme "Increasing Optimism, Growing Stronger". This Annual Report is published in accordance with Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.05/2020 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.

This Annual Report contains statements of financial condition, operating results, projections, plans, strategies, policies and objectives of Mandiri Utama Finance, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws and regulations, except for historical matters. These statements have prospects of risk, uncertainty, and may result in actual developments that are materially different from those reported.

Prospective statements in this Annual Report are stated based on various assumptions regarding current and future conditions as well as the business environment which Mandiri Utama Finance carries out its business activities. The statements contained in this Annual Report are not a guarantee of future performance, considering that actual performance in the future may differ from the statements in this Annual Report because they may be influenced by several factors beyond Mandiri Utama Finance's control.

This Annual Report contains the words "Mandiri Utama Finance" "MUF" and "Company" which are defined as Mandiri Utama Finance which carries out business activities in the field of financing. The mention of the currency unit "Rupiah", "Rp" or IDR refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or USD refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah.

PENJELASAN TEMA
THEME DESCRIPTION

INCREASING OPTIMISM, GROWING STRONGER
Meningkatkan Optimisme, Tumbuh Lebih Kuat

Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional, Mandiri Utama Finance mengusung optimisme yang tinggi untuk dapat mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Perusahaan berupaya untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya untuk menjangkau nasabah yang lebih luas dengan meningkatkan jumlah jaringan kantor dan melakukan sinergi dengan Mandiri Group serta memperkuat hubungan dengan *dealer, showroom* dan mitra.

Mandiri Utama Finance menjadikan tahun 2022 sebagai momentum untuk dapat tumbuh lebih kuat dan sehat pada segmen pembiayaan Konvensional dan Syariah. Selain itu, di tahun 2022 Mandiri Utama Finance juga terus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, khususnya dengan pengembangan layanan digital yang menawarkan berbagai kemudahan bagi nasabah.

Di samping itu, di tahun 2022 MUF juga memperkuat penerapan manajemen risiko dan pengendalian operasional agar Perusahaan dapat tumbuh dengan sehat. Melalui penerapan strategi tersebut, di tahun 2022 Mandiri Utama Finance dapat tumbuh lebih kuat yang sekaligus juga menjadi pondasi yang kuat untuk meraih pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang.

In line with the improvement in national economic growth, Mandiri Utama Finance carries high optimism to be able to achieve sustainable business growth. The Company seeks to optimize its capacity to reach larger customers by increasing the number of office networks and synergizing with the Mandiri Group and strengthening relationships with dealers, showrooms and partners.

Mandiri Utama Finance made the year of 2022 as a momentum to grow stronger and healthily in the Conventional and Sharia financing segments. In addition, in 2022, Mandiri Utama Finance also continued the improvement of service quality for customers, especially by developing digital services offering the various conveniences for customers.

Furthermore, in 2022, MUF also strengthen the implementation of risk management and operational control so that the Company is able to grow healthily. Through the implementation of this strategy, in 2022, Mandiri Utama Finance grows stronger which is also a strong foundation for achieving sustainable growth in the future.

TEMA LAPORAN SEBELUMNYA
PREVIOUS THEME

2021

KREATIF MEMANFAATKAN PELUANG DAN MENCIPTAKAN INOVASI DIGITAL UNTUK TUMBUH BERKELANJUTAN

Creative in Seizing Opportunity While Creating Digital Innovation for Sustainable Growth

Pada tahun 2021, di tengah kondisi perekonomian yang masih dibayangi ketidakpastian, Mandiri Utama Finance berupaya menumbuh kembangkan kemampuannya dan memanfaatkan celah peluang yang ada. Salah satunya adalah pertumbuhan bisnis Pembiayaan Syariah yang cukup signifikan. Meskipun secara komposisi belum sebesar Pembiayaan Konvensional, kenaikan pendapatan Pembiayaan Syariah yang menggunakan Akad *Murabahah* mencapai di atas 200% dan hal ini menjadi salah satu langkah kreatif Perusahaan dalam memanfaatkan peluang.

Tak hanya itu, Mandiri Utama Finance terus berupaya mendorong pertumbuhan pembiayaan yang sehat dengan melanjutkan langkah-langkah inovasi digital yang telah dimulai sejak Juni 2020. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin lekat dengan teknologi informasi dan dunia digital. Inisiatif digital ini akan terus diperkuat sejalan dengan ekspansi Perusahaan.

In 2021, in the midst of economic conditions that are still overshadowed by the uncertainty, Mandiri Utama Finance seeks to develop its capabilities and take advantage of the existing opportunities. One of them is the quite significant growth of the Sharia Financing business. Despite the composition it is not as large as Conventional Financing, the increase of Sharia Financing using the Murabahah contract above 200% is one of the Company's creative steps in seizing opportunities.

Not only that, Mandiri Utama Finance continues to strive to encourage the sound financing growth by continuing digital innovation steps that have been started since June 2020. This is conducted to anticipate changes in people lifestyles which are increasingly attached to information technology and the digital world. This digital initiative will continue to be strengthened in line with the Company expansion.

PENCAPAIAN PENTING 2022

SIGNIFICANT ACHIEVEMENT 2022

Tahun 2022, MUF membukukan kinerja yang sangat membanggakan dan secara umum lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
In 2022, MUF booked a very proud performance and generally better than the previous year.

Total Aset MUF tahun 2022 tercatat sebesar Rp7.567 miliar, meningkat 24,10% dari tahun sebelumnya sebesar Rp6.097 miliar.
MUF's Total Assets in 2022 were recorded at IDR7,567 billion, an increase of 24.10% from the previous year of IDR6,097 billion.

Total Piutang yang dikelola oleh MUF tahun 2022 mencapai Rp25.082 Miliar, meningkat 46,73% dari tahun sebelumnya sebesar Rp17.095 miliar.
Total Receivables value managed by MUF in 2022 reached IDR 25,082 billion, an increase of 46.73% from the previous year of IDR 17,095 billion.

Total Piutang Pembiayaan *Murabahah* - Dikelola oleh MUF tahun 2022 mencapai Rp2.743 miliar, naik 266,49% dari tahun 2021 sebesar Rp748 miliar.
Total Receivables of Murabahah Financing - Managed by MUF in 2022 reached IDR 2,743 billion, an increase of 266.49% from 2021 of IDR 748 billion.

Total Ekuitas MUF tahun 2022 tercatat sebesar Rp956 miliar, naik 54,18% dari tahun sebelumnya sebesar Rp620 miliar.
MUF's total equity in 2022 was recorded at IDR956 billion, an increase of 54.18% from the previous year of IDR620 billion.

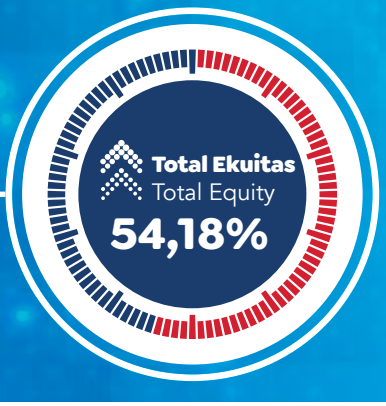

Tahun 2022, MUF membukukan Pendapatan sebesar Rp2.213 miliar, naik 43,06% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.547 miliar.

In 2022, MUF booked revenue of IDR2,213 billion, an increase of 43.06% compared to 2021 of IDR1,547 billion.

Tahun 2022, MUF membukukan Laba Bersih sebesar Rp333 miliar, melonjak signifikan 225,32% dari tahun sebelumnya Rp102 miliar.

In 2022, MUF recorded a Net Profit of IDR333 billion, a significant increase of 225.32% from the previous year of IDR102 billion.

***Return on Asset* MUF tahun 2022 mencapai 6,52%, naik signifikan dari tahun sebelumnya 2,42%.**

MUF's Return on Assets in 2022 reached 6.52%, a significant increase from 2.42% in the previous year's.

***Return on Equity* MUF tahun 2022 mencapai 44,50%, naik dari tahun sebelumnya 18,29%.**

MUF's Return on Equity in 2022 reached 44.50%, increased from 18.29% in the previous year.

Kualitas pembiayaan MUF tahun 2022 semakin membaik. Hal ini tercermin dari Piutang Pembiayaan Bermasalah Kelolaan MUF tahun 2022 yang sebesar 0,97%, turun dari tahun sebelumnya 1,05%.

The quality of MUF financing in 2022 is getting better. It is reflected in the 2022 MUF Troubled Financing Receivables Managed of 0.97%, decreased from 1.05% in the previous year.

TESTIMONI
TESTIMONY

EKO IRWANTO

Mobil Baru Xpander Cross
Tenor 3 Tahun
Nasabah Bank Mandiri - Desember 2022
Xpander Cross New Car
3 Year Tenor
Bank Mandiri Customers - December 2022

Nasabah BANK MANDIRI
BANK MANDIRI Customers

Saya Nasabah Bank Mandiri merasakan Pengalaman yang memuaskan mengajukan fasilitas pembiayaan bersama Mandiri Utama Finance. Sejak awal ingin memiliki kendaraan sudah didampingi dan diarahkan oleh MUF terkait *dealer*, hingga proses pengajuan. MUF sangat informatif dan dengan fasilitas autodebet melalui Bank Mandiri, saya tidak perlu repot dan buang waktu ketika jatuh tempo. Sangat memuaskan.

I am a customer of Bank Mandiri, I feel the satisfied experience in applying for a financing facility with Mandiri Utama Finance. Since the beginning of willing to own a vehicle, the MUF team has accompanied and directed me to the dealer until the submission process. The MUF team is very informative and with the autodebit facility through Bank Mandiri, I don't need to bother and waste time when it is due. I am greatly satisfied.

RINA PURWOKO

Domisili: Duri Kosambi
Unit dengan BSI OTO: Xpander, Pajero, dll.
Domicile: Duri Kosambi
Units with BSI OTO: Xpander, Pajero, etc.

Nasabah MUF Syariah & BSI OTO
MUF Sharia & BSI OTO Customers

Nama saya Rina Purwoko, saya pengusaha kelengkapan olahraga di daerah Duri Kosambi, Jakarta Barat. Saya nasabah setia MUF Syariah dan BSI OTO, sudah 3 Unit saya melakukan pembiayaan di MUF Syariah dan BSI OTO. Dari unit Mitsubishi Pajero, Xpander, dan motor Honda Vario. Selama pembiayaan OTO di MUF Syariah dan BSI terasa berkah dan lancar usaha saya. BSI OTO dan MUF Syariah memberikan pelayanan yang cepat dan komunikatif, sukses selalu BSI OTO dan MUF Syariah.

My name is Rina Purwoko, I am a sports equipment entrepreneur in the Duri Kosambi area, West Jakarta. I am a loyal customer of MUF Syariah and BSI OTO, I have financed 3 units at MUF Syariah and BSI OTO. From Mitsubishi Pajero units, Xpander, and Honda Vario motorbikes. While financing OTO at MUF Syariah and BSI, I feel blessed and my business running smoothly. BSI OTO and MUF Syariah provide a fast and communicative service. May success be always with BSI OTO and MUF Syariah.

JOHNNY ALIMAN

Nama Dealer : PT. Jujur Jaya Sakti
Bermitra dengan MUF sejak : 2017
Dealer Name : PT. Jujur Jaya Sakti
Partnered with MUF since : 2017

Mitra Dealer – NCAR (Mobil Baru)

Dealer Partner – NCAR (New Car)

Saya sudah bekerja sama dengan Mandiri Utama Finance sejak 2017. Sejauh ini kerja sama berjalan dengan baik. Mandiri Utama Finance memberikan layanan serta proses ke *dealer* dan *customer* cukup baik, paket dan *pricing* ke *dealer* cukup bersaing, jaringan *network* cukup luas untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta hubungan dan komunikasi antara *dealer* dan MUF sudah berjalan dengan baik. Harapannya kita dapat bekerja sama dengan baik serta dapat bertumbuh dan berkembang bersama.

I have been cooperating with Mandiri Utama Finance since 2017. So far, the cooperation has been running well. Mandiri Utama Finance provides a good services and processes to dealers and customers, a competitive packages and pricing to dealers, a wide network for the South Sulawesi and West Sulawesi regions and the relationship and communication between dealers and MUF has been running well. We hope that we can cooperate well and can grow and develop together.

SETIAWAN BUDIANTO

Nama Showroom : Forza Mobilindo
Bermitra dengan MUF sejak : 2019
Showroom name: Forza Mobilindo
Partnered with MUF since : 2019

Mitra Showroom – UCAR (Mobil Bekas)

Showroom Partners - UCAR (Used Cars)

Kami bermitra dengan Mandiri Utama Finance sejak 2019. Banyak kemajuan yang kami dapatkan setelah bermitra dengan Mandiri Utama Finance karena mereka memberikan kemudahan kepada kami untuk para konsumen kami membeli mobil secara kredit dengan proses yang relatif mudah, cepat, serta *rate* yang kompetitif. Di samping itu Mandiri Utama Finance memberikan *support* dengan berbagai macam bentuk untuk kemajuan mitra *dealer* dan beberapa fasilitas yang sangat membantu kami untuk terus tumbuh. Terima kasih Mandiri Utama Finance !

We have partnered with Mandiri Utama Finance since 2019. We have made a lot of progress after partnering with Mandiri Utama Finance because they provide the conveniences for us, for our consumers in purchasing cars on credit with a relatively easy process, fast, and with a competitive rates. Furthermore, Mandiri Utama Finance provides the support in various forms for the progress of dealer partners and several facilities that really help us to continue growing. Thank you, Mandiri Utama Finance!

VISI DAN MISI
VISION AND MISSION

VISI
VISION

To be the most reputable Company in offering innovative financing solutions and enabling value creation for our ecosystem through digitalization

PENJELASAN VISI
Hal tersebut bermakna Perusahaan didirikan untuk dikenal dengan reputasi baiknya dalam menawarkan solusi pembiayaan yang inovatif dan memungkinkan terciptanya nilai bagi ekosistem Perusahaan melalui digitalisasi.

VISION EXPLANATION
It means that the Company was established to be known for its good reputation in offering innovative financing solutions and enabling the creation of value for the Company's ecosystem through digitalization.

MISI
MISSION

Brings Tomorrow Today

Misi tersebut memiliki maksud dan harapan agar konsumen dapat memiliki kendaraan saat ini juga tanpa menunggu hari esok melalui pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan. Adapun misi Perusahaan secara lengkap adalah sebagai berikut:
- **Memberikan peningkatan nilai investasi kepada *shareholder* dan manfaat yang optimal kepada seluruh *stakeholder*.**
- **Memenuhi kebutuhan pembiayaan khususnya otomotif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.**
- **Memberdayakan komunitas masyarakat untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kelestarian alam dan lingkungan.**

This mission has the purpose and hope that consumers can own a vehicle today without waiting for tomorrow through financing provided by the Company. The complete mission of the Company is as follows:
- Providing the increase of investment value to shareholders and optimal benefits for all stakeholders.
- Fulfilling the financing needs, especially for automotive, so that it can improve the welfare for the community.
- Empowering the communities to care and responsible more for nature and environmental preservationv

Persetujuan Manajemen Kunci atas Visi dan Misi serta Kajian Periodik Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian atas visi dan misi di atas, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Tahunan (RBT) periode 2022. Melalui dokumen RBT tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi memandang visi dan misi di atas masih relevan dengan operasi dan bisnis Perusahaan.

Approval from Key Management to the Vision and Mission as well as the Periodic Review of the Vision and Mission by the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Board of Commissioners and the Board of Directors had reviewed the above vision and mission, as stated in the 2022 Annual Business Plan (RBT). Through the RBT document, the Board of Commissioners and the Board of Directors view that the vision and mission above are still relevant to the Company's operations and business.

PENGHARGAAN 2022
2022 AWARDS

The Best Public Relation in Company Management on Integration of Digital Products and Services, Category: Multifinance

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia Corporate PR Awards 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Warta Ekonomi
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
27 Januari 2022 | January 27, 2022

The Best IT Category: Multifinance

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia Information Technology Award 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Economic Review
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
25 Februari 2022 | February 25, 2022

The Best Sales Marketing Category: Multifinance

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia Sales & Marketing Award 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Economic Review
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
18 Maret 2022 | March 18, 2022

2nd Rank
Financing Company

Acara Penghargaan | Award Event :
Digital Brand Awards 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
InfoBank
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
07 April 2022 | April 7, 2022

The Most Innovative Multifinance Company for The Marvelous Development of Digital Financing Services

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia Digital Innovation Awards 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Warta Ekonomi
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
31 Maret 2022 | March 31, 2022

Indonesia Best Sharia Finance 2022 with Outstanding Sharia Financing Services Development – MUF Syariah

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia Sharia Finance Awards 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Warta Ekonomi
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
21 April 2022 | April 21, 2022

Indonesia Top Digital PR Award 2022 for Achievement in Building Digital Public Relations

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia Top Digital PR Award 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Suara Pemerintah
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
22 April 2022 | April 22, 2022

Marketeers Omni Brands of The Year 2022 – MUF Online Autoshow (MOAS)

Acara Penghargaan | Award Event :
Marketeers Omni Brands of The Year 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Marketeers
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
21 Juni 2022 | June 21, 2022

The Best Global Company 2022

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia-Turkiye Business Forum 2022 – 2nd Global Leaders Award
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Economic Review
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
06 Juni 2022 | June 6, 2022

The Most Committed GRC Leader 2022
Mr. Stanley Setia Atmadja

Acara Penghargaan | Award Event :
Top GRC Award 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Top Business
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
06 September 2022 | September 6, 2022

Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 - In Recognition of Building a Popular Brand Based On Search Engine, Social Media and Website Category: Fleet Financing

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia Digital Popular Brand Award 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
InfoBrand
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
28 Juli 2022 | July 28, 2022

Grand Digital Marketing Company 2022 for The Accessible and Applicative Digital Financial Solutions

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia Grand Digital Marketing Awards 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Warta Ekonomi
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
04 Agustus 2022 | August 4, 2022

Stellar Workplace Recognition In Employee Commitment & Satisfaction

Acara Penghargaan | Award Event :
Stellar Workplace Award 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Kontan & GML Performance Konsulting
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
29 September 2022 | September 29, 2022

Brand Equity: Brand Image (Rank1) Cateory: Multifinance

Acara Penghargaan | Award Event :
4th Anniversary BUMN Award 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
The Iconomics
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
26 Oktober 2022 | October 26, 2022

Indonesia Human Capital Award 2022

Acara Penghargaan | Award Event :
1st The Best Human Capital 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Economic Review
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
31 Agustus 2022 | August 31, 2022

The Fastest Business Recovery of the Year

Acara Penghargaan | Award Event :
Mandiri Subsidiaries Awards
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Bank Mandiri
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
22 Februari 2022 | February 22, 2022

Top Omni Channel Marketing in Multifinance Company

Acara Penghargaan | Award Event :
CNBC Indonesia Awards 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
CNBC Indonesia
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
08 Desember 2022 | December 8, 2022

Corporate Communication Material Award:
Best Print Company Profile in Multifinance Category

Acara Penghargaan | Award Event :
5th Anniversary BUMN Award 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
The Iconomics
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
26 Oktober 2022 | October 26, 2022

Best Multifinance 2022
Category of Assets Above IDR 5-10 Trillion

Acara Penghargaan | Award Event :
Best Indonesian & SOE Financial Leader Award 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Investor Magazine
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
09 Desember 2022 | December 9, 2022

Best Leader for Business Sustainability Through Development of Digital-Based Financing Services
Mr. Stanley Setia Atmadja

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia Financial Top Leader Awards 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Warta Ekonomi
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
31 Mei 2022 | May 31, 2022

Indonesia Best CEO 2021
Category: The Best CEO 2021 with Distinction
Mr. Stanley Setia Atmadja

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia Best CEO 2021
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
SWA
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
16 Februari 2022 | February 16, 2022

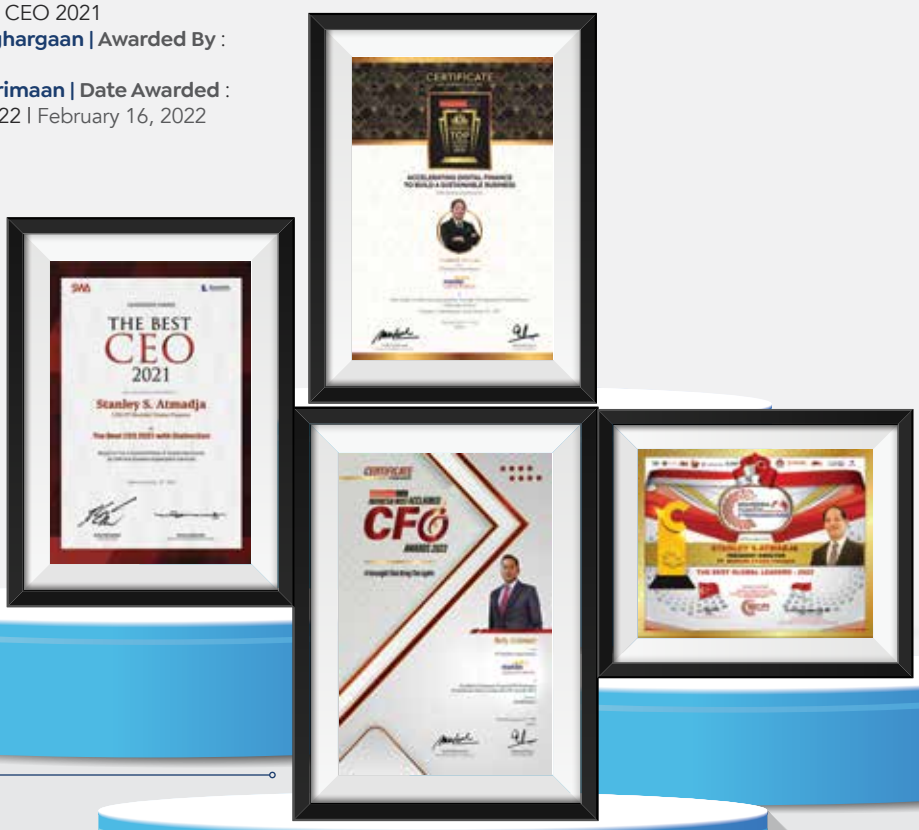

Indonesia Most Acclaimed CFO
Mr. Rully Setiawan

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia Most Acclaimed CFO Award 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Warta Ekonomi
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
27 Januari 2022 | January 27, 2022

The Best Global Leaders
Mr. Stanley Setia Atmadja

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia-Turkiye Business Forum 2022 – 2nd Global Leaders Award
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Economic Review
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
06 Juni 2022 | June 6, 2022

Indonesia *Most Acclaimed CEO 2022*
Mr. Stanley Setia Atmadja

Acara Penghargaan | Award Event :
Indonesia Most Acclaimed CEO 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Warta Ekonomi
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
16 Desember 2022 | December 16, 2022

Top Public Relations Leader for Innovative Financing Business Segmentation Development Category: 4 Stars

Acara Penghargaan | Award Event :
IndonesiaTop PR Leader Awards 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Warta Ekonomi
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
29 September 2022 | September 29, 2022

TOP 200 THE NEXT LEADERS 2022
Mr. Rully Setiawan

Acara Penghargaan | Award Event :
The Next Top 200 Leaders
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Infobank Magazine
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
24 November 2022 | November 24, 2022

The Most Committed GRC Leader 2022
Mr. Stanley Setia Atmadja

Acara Penghargaan | Award Event :
Top GRC Award 2022
Pemberi Penghargaan | Awarded By :
Top Business
Tanggal Penerimaan | Date Awarded :
06 September 2022 | September 6, 2022

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

Penafian dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limitation of Liabilities 2

Penjelasan Tema
Theme Description 4

Tema Laporan Sebelumnya
Previous Theme 5

Pencapaian Penting 2022
Significant Achievement 2022 6

Testimoni
Testimony 8

Visi Dan Misi
Vision and Mission 10

Penghargaan 2022
2022 Awards 12

Daftar Isi
Table of Contents 20

Ihktisar Kinerja
Performance Highlights

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights 24

Ikhtisar Operasional
Operations Overview 29

Ikhtisar Organisasi
Organization Overview 31

Ikhtisar Saham
Shares Overview 32

Aksi Korporasi
Corporate Actions 33

Ikhtisar Efek Lainnya
Other Securities Overview 33

Peristiwa Penting
Event Highlights 34

Laporan Manajemen
Management Report

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report 40

Laporan Direksi
Board of Directors Report 50

Pernyataan Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Tahunan 2022
Responsibility Statement by the Board of Directors for 2022 Annual Report 60

Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan 2022
Responsibility Statement by the Board of Commissioners for 2022 Annual Report 61

Profil Prusahaan
Company Profile

Identitas Perusahaan
Identitas Perusahaan 64

Sejarah Singkat
Brief History 65

Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan
Corporate Culture and Values 66

Makna Logo Perusahaan
The Meaning of Company Logo 68

Bidang Usaha
Business Fields 69

Wilayah Operasional dan Daftar Alamat Kantor
Operational Area and List of Office Address 76

Keanggotaan dalam Asosiasi
Association Membership 85

Struktur Organisasi
Organization Structure 86

Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners 90

Profil Direksi
Profile of the Board of Directors 96

Profil Dewan Pengawas Syariah
Profile of the Sharia Supervisory Board 102

Pejabat Eksekutif
Executive Officer 108

Demografi Karyawan
Employee Demography 114

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Structure and Composition of Shareholders 118

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham
Chronology of Share Issuance And Listing 123

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Issuance and Listing Other Securities 123

Informasi Tentang Struktur Grup dan Kelompok Usaha, Entitas Anak, Entitas Asosiasi Serta *Joint Venture* (Jv) Dan *Special Purpose Vehicle* (Spv)
Information about the Structure of the Group and Business Group, Subsidiaries, Entities Association and Joint Venture (JV) and Special Purpose Vehicle (SPV) 123

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Institutions and Supporting Professions of Capital Market 124

***Website* Perusahaan**
Company Websites 126

Analisis & Pembahasan Manajemen
Management Discussion & Analysis

Tinjauan Ekonomi dan Industri
Economic and Industry Overview 130

Inisiatif dan Kebijakan Strategis Tahun 2022
Initiatives and Strategic Policy in 2022 134

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operations Overview per Business Segment 136

Aspek Pemasaran
Market Share 145

Tinjauan Keuangan
Financial Overview 148

Perbandingan Target dan Realisasi
Comparison of Targets and Realization 163

Kontribusi Terhadap Negara
Contribution to the State 168

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir
Amendments to Laws and Regulations Against Companies in the Last Fiscal Year 176

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir
Changes in Accounting Policies Implemented by Company in the Last Fiscal Year 177

Tentang *Bussines Continuity Management* (BCM)
About Business Continuity Management (BCM) 178

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Komitmen Penerapan Tata Kelola
Commitment of Governance Implementation 182

Kerangka Kerja Tata Kelola
Governance Framework 190

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders 195

Dewan Komisaris
Board of Commissioners 210

Komisaris Independen
Independent Commissioner 216

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board 220

Direksi
Board of Directors 229

Independensi Dan Transparansi Informasi Dewan Komisaris Dan Direksi
Independence and Information Transparency of Board of Commissioners and Directors 243

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Meetings of Board of Commissioners And Board of Directors 250

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Performance Assessment of Board of Commissioners and Directors 261

Manajemen Risiko
Risk Management 361

Permasalahan Hukum
Legal Issues 369

Sanksi Administratif
Administrative Sanctions 370

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Information And Company Data 372

Kode Etik
Code of Conducts 374

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Policy 381

Kebijakan Anti-korupsi dan Gratifikasi
Anti-Corruption and Gratification Policies 386

***Whistleblowing System*/Sistem Pelaporan Pelanggaran**
Whistleblowing System 387

Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance 388

Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Evaluation, Monitoring and Increasing the Implementation of Good Corporate Governance 391

Kepatuhan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan
Compliance with Corporate Governance Guidelines for Financing 396

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG Di Lingkup MUF Dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
Conformity of the Development of the Implementation of GCG in the Scope of MUF with OJK Regulation No. 29/POJK.05/2020 Concerning Amendments to OJK Regulations No. 30/POJK.05/2014 Concerning Good Corporate Governance for Financing Companies 397

Keterbukaan Praktik *Bad Governance*
Bad Governance Practice Disclosure 416

Referensi Silang SEOJK No. 16 / SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies 418

Laporan Keuangan
Financial Report 488

01

IKHTISAR KINERJA

Performance Highlights

IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	2020
Pendapatan Revenues			
Pembiayaan Konsumen Consumer Financing	**1.799.841**	1.289.741	968.278
Pembiayaan *Murabahah* Murabahah Financing	**144.829**	58.494	19.030
Sewa Pembiayaan Finance Lease	**10.626**	2.192	-
Bunga dan Marjin Interest and Margin	**6.110**	3.291	5.820
Lain-lain Others	**252.060**	193.533	158.603
Total Pendapatan Total Revenues	**2.213.466**	1.547.251	1.151.731
Beban Expenses			
Gaji dan Tunjangan Salaries and Benefits	**(580.816)**	(321.852)	(274.543)
Umum dan Administrasi General and Administrative	**(269.495)**	(221.796)	(201.819)
Beban Keuangan Finance Charges	**(409.100)**	(385.885)	(376.413)
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses			
Pembiayaan Konsumen Consumer Financing	**(303.350)**	(295.628)	(242.721)
Pembiayaan *Murabahah* Murabahah Financing	**(33.358)**	(14.143)	(5.394)
Sewa Pembiayaan Finance Lease	**(1.222)**	(175)	-
Jumlah Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Total Allowance for Impairment Losses	**(337.930)**	(309.946)	(248.114)
Pemasaran Marketing	**(148.838)**	(96.875)	(35.866)
Lain-lain Others	**(36.150)**	(78.270)	(25.681)
Total Beban Total Expenses	**(1.782.329)**	(1.414.624)	(1.162.436)

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	**2022**	**2021**	**2020**
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Final dan Beban Pajak Penghasilan Income (Loss) before Final Tax Expense and Income Tax Expenses	**431.137**	132.627	(10.705)
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	**(1.222)**	(658)	(1.164)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan Income (Loss) before Income Tax Expenses	**429.915**	131.969	(11.869)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	**(96.912)**	(29.608)	(747)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income (Loss) for the Year	**333.003**	102.361	(12.616)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Setelah Pajak Other Comprehensive Income (Loss) – Net of Tax	**3.135**	2.435	(5.747)
Total Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for the Year	**336.138**	104.796	(18.363)
Laba (Rugi) per Saham (Rupiah penuh) Earnings (Loss) per Share (in full Rp)	**66,60**	20,47	(2,52)

PENDAPATAN
Revenue

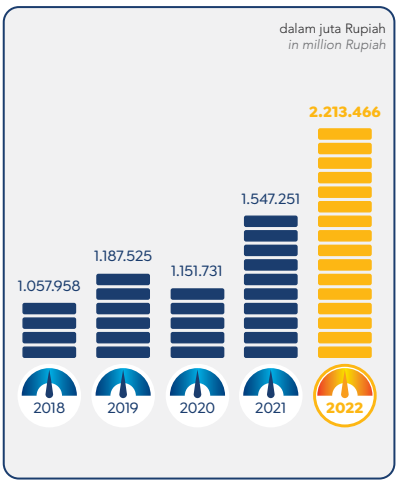

BEBAN
Expenses

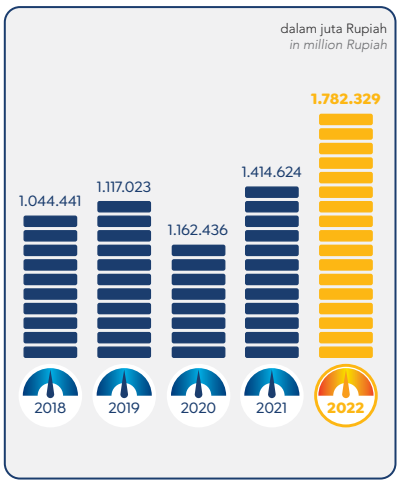

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
Income (Loss) for the Year

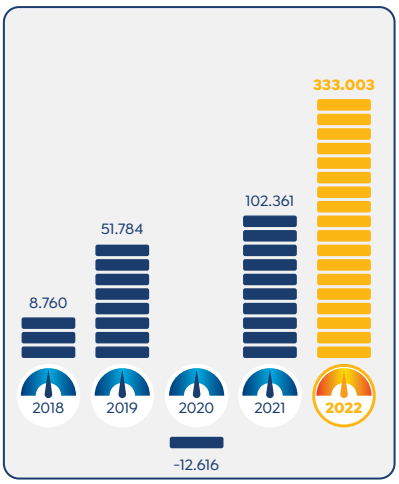

POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION

dalam juta Rupiah

in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	2020
ASET ASSETS			
Kas dan Kas di Bank Cash on Hands and Cash in Banks	**336.941**	188.432	129.821
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih Consumer Financing Receivables - Net	**6.121.238**	5.139.102	4.537.142
Piutang Pembiayaan *Murabahah* - Bersih Murabahah Financing Receivables - Net	**659.982**	439.490	182.080
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih Finance Lease Receivables - Net	**89.727**	40.409	-
Piutang Lain-lain Other Receivables	**105.400**	59.026	71.293
Beban Dibayar di Muka Prepaid Expenses	**63.863**	42.463	42.145
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	**67.888**	52.352	29.221
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets – Net	**36.062**	36.279	42.838
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	**61.877**	77.378	65.248
Aset Lain-lain Other Assets	**23.786**	22.343	14.049
Jumlah Aset Total Assets	**7.566.764**	**6.097.274**	**5.113.837**
LIABILITAS LIABILITIES			
Utang Usaha Trade Payables	**302.819**	224.584	177.176
Utang Lain-lain Other Payables	**30.050**	18.465	12.522
Utang Pajak Tax Payables	**80.799**	49.172	12.136
Beban yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	**205.127**	177.044	87.228
Pinjaman Bank Bank Loans	**5.808.488**	4.859.307	4.199.330
Liabilitas Sewa Pembiayaan Finance Lease Liabilities	**26.104**	42.234	26.364
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Employee Benefits Obligations	**156.841**	106.069	83.479
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**6.610.228**	**5.476.875**	**4.598.235**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	2020
EKUITAS EQUITY			
Modal Saham Share Capital	**500.000**	500.000	500.000
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti - Bersih Remeasurement of Defined Benefit Obligation - Net	**1.761**	(1.373)	(3.809)
LABA DITAHAN RETAINED EARNINGS			
Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated	**15.852**	5.616	5.616
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	**438.923**	116.156	13.795
Jumlah Ekuitas Total Equity	**956.536**	**620.399**	**515.602**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**7.566.764**	**6.097.274**	**5.113.837**

ASET
Asset

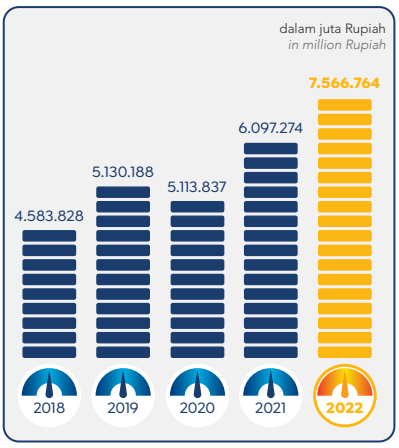

LIABILITAS
Liabilities

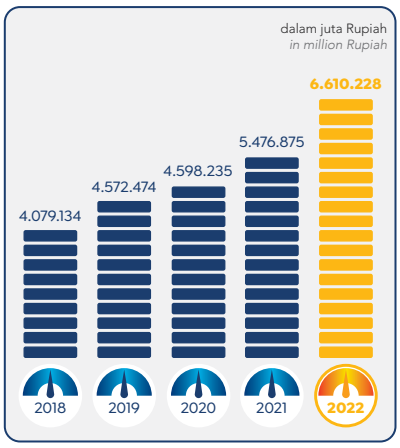

EKUITAS
Equity

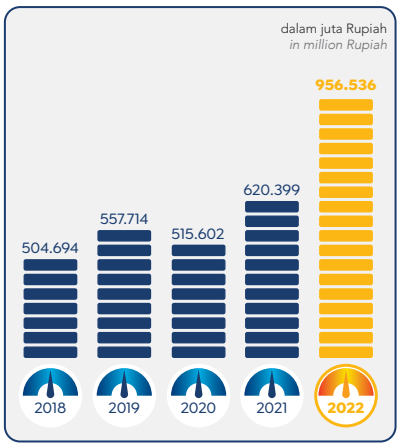

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIOS

dalam %

in %

Uraian Description	2022	2021	2020
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio			
Return on Asset (%)	**6,52**	2,42	(0,25)
Return on Equity (%)	**44,50**	18,29	(2,55)
Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%) Operating Expenses to Operating Income (%)	**83,02**	91,32	100,93
Net Interest Margin (NIM) (%)	**7,63**	6,89	5,10
Rasio Pembiayaan Financing Ratio			
Financing to Asset Ratio (%)	**90,80**	92,16	92,28
Rasio Piutang Bermasalah Kelolaan (%) Managed Non Performing Financing (NPF) (%)	**0,97**	1,05	0,60
Rasio Permodalan dan Likuiditas Capital and Liquidity Ratio			
Capital Ratio (%)	**14,48**	12,32	13,09
Gearing Ratio (kali)	**6,08**	7,85	8,16
Coverage Ratio (%)	**375,80**	264,21	318,22
Rasio Pertumbuhan Growth Ratio			
Pendapatan (%) Revenues (%)	**43,06**	32,60	(3,01)
Beban (%) Expenses (%)	**25,99**	19,97	(4,07)
Laba Tahun Berjalan (%) Income for the Year (%)	**225,32**	911,35	(124,36)
Aset (%) Assets (%)	**24,10**	19,23	(0,32)
Liabilitas (%) Liabilities (%)	**20,69**	19,11	(0,56)
Ekuitas (%) Equity (%)	**54,18**	20,33	(7,55)

IKHTISAR OPERASIONAL
OPERATIONS OVERVIEW

NILAI PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS PRODUK

FINANCING VALUE BY TYPE OF PRODUCT

dalam juta Rupiah

in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	2020
Nilai Pembiayaan Baru Amount Financing			
Mobil Car	**14.062.532**	8.589.702	4.380.419
Motor Motorcycle	**3.834.901**	3.005.768	1.487.364
Jumlah Total	**17.897.433**	**11.595.470**	**5.867.783**
Saldo Piutang Pembiayaan Dikelola Managed Outstanding AR			
Mobil Car	**20.394.499**	13.534.831	10.136.407
Motor Motorcycle	**4.687.952**	3.559.773	2.510.829
Jumlah Total	**25.082.451**	**17.094.604**	**12.647.236**

NILAI PEMBIAYAAN BARU
Amount Financing

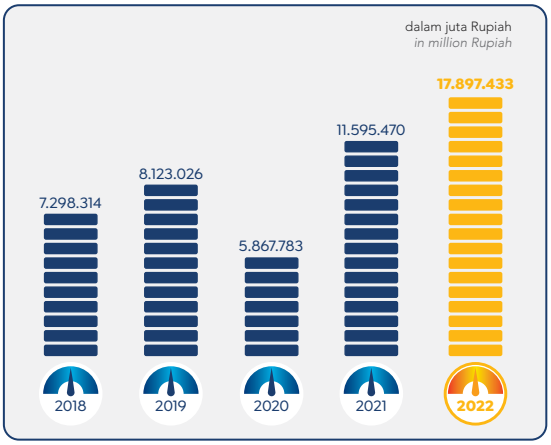

SALDO PIUTANG PEMBIAYAAN DIKELOLA
Managed Outstanding AR

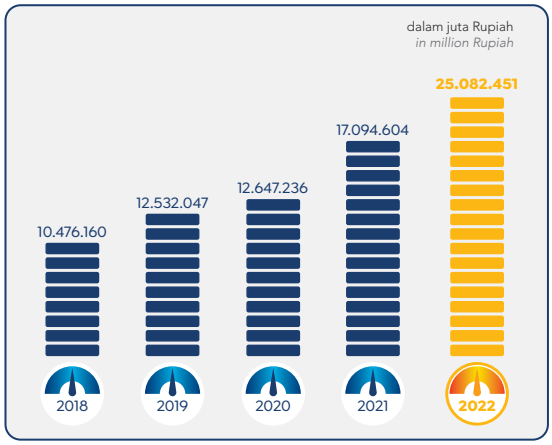

NILAI PEMBIAYAAN BERDASARKAN SEBARAN GEOGRAFIS

FINANCING VALUE BY GEOGRAPHIC DISTRIBUTION

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	2020
Nilai Pembiayaan Baru Amount Financing			
Jabodetabekser	**5.667.846**	4.050.303	1.600.253
Jawa Barat West Java	**2.234.799**	1.603.350	871.409
Jawa Tengah Central Java	**2.195.121**	1.571.970	862.389
Jawa Timur dan Bali Nusa Tenggara East Java and Bali Nusa Tenggara	**2.682.150**	1.619.040	1.001.178
Sumatera	**2.697.583**	1.419.713	733.219
Sulawesi	**1.447.587**	857.271	572.709
Kalimantan	**972.347**	473.824	226.627
Jumlah Total	**17.897.433**	**11.595.470**	**5.867.783**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	2020
Saldo Piutang Pembiayaan Outstanding AR			
Jabodetabekser	**8.198.924**	5.240.785	3.047.750
Jawa Barat West Java	**3.145.318**	2.395.131	1.950.559
Jawa Tengah Central Java	**3.135.898**	2.526.319	2.210.081
Jawa Timur dan Bali Nusa Tenggara East Java and Bali Nusa Tenggara	**3.786.783**	2.666.418	2.318.693
Sumatera	**3.484.739**	2.051.104	1.411.775
Sulawesi	**2.169.551**	1.568.776	1.272.359
Kalimantan	**1.161.238**	646.071	436.019
Jumlah Total	**25.082.451**	**17.094.604**	**12.647.236**

IKHTISAR ORGANISASI
ORGANIZATION OVERVIEW

Uraian Description	2022	2021	2020
Jumlah karyawan (orang) Number of Employees (person)	**7.695**	6.330	5.072
Jumlah Jaringan Kantor Cabang Konvensional (Unit) Total Network of Conventional Branch Offices (Unit)	**67**	64	63
Jumlah Jaringan Kantor Selain Kantor Cabang Konvensional (Unit) Total Office Network Brand Representative from Conventional Branch Offices (Unit)	**75**	52	47
Jumlah Jaringan Kantor Cabang Unit Syariah (Unit)* Total Network of Sharia Unit Branch Offices (Unit)*	**68**	62	22
Jumlah Jaringan Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah (Unit)* Total Office Network Brand Representative from Sharia Unit Branch Offices (Unit)*	**77**	47	30
Jumlah Kantor Cabang Total of Branch Offices	**67**	65	63
Kantor Selain Kantor Cabang Offices other than branch offices	**75**	54	47

* Jaringan kantor UUS menggunakan premis yang sama dengan jaringan kantor Konvensional kecuali kantor cabang Banda Aceh.
* UUS office network uses the same premise as Conventional office n etwork, except for Banda Aceh Branch Office.

IKHTISAR SAHAM
SHARES OVERVIEW

JUMLAH SAHAM

Jumlah saham Mandiri Utama Finance sebanyak 5.000.000.000 lembar saham, dengan kepemilikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 2.550.000.000 lembar saham atau 51%, PT Asco Investindo sebanyak 1.850.000.000 lembar saham atau 37%, dan PT Tunas Ridean Tbk sebanyak 600.000.000 lembar saham atau 12%.

NUMBER OF SHARES

The amount of Mandiri Utama Finance shares is 5,000,000,000 shares, with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ownership of 2,550,000,000 shares or 51%, PT Asco Investindo of 1,850,000,000 shares or 37%, and PT Tunas Ridean Tbk of 600,000,000 shares or 12%.

INFORMASI TENTANG PERDAGANGAN SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK

Hingga 31 Desember 2022, Mandiri Utama Finance tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; termasuk informasi tentang penghentian sementara perdagangan saham.

INFORMATION ON STOCK TRADING AND PUBLIC SHARE OWNERSHIP

As of December 31, 2022 Mandiri Utama Finance did not trade its shares to the public. Therefore, there is no information related to stock trading that includes market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed; the highest, lowest, and closing share price based on the price on the Stock Exchange where the shares are listed; the volume of share trading at the Stock Exchange where the shares are listed; information in graphic form containing at least the closing price based on the price on the Stock Exchange where the shares are listed and the trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed; including information on the temporary suspension of stock trading.

AKSI KORPORASI
CORPORATE ACTIONS

Di sepanjang tahun 2022, Mandiri Utama Finance tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

Throughout 2022, Mandiri Utama Finance did not take corporate actions such as stock splits, reverse stock, bonus shares, or the decrease in the nominal value of shares.

IKHTISAR EFEK LAINNYA
OTHER SECURITIES OVERVIEW

Hingga akhir tahun 2022, MUF tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya, serta bentuk pendanaan lainnya selain pendanaan dari modal saham serta skema perbankan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, maupun pendanaan lainnya.

As of the end of 2022, MUF did not issue bonds, sukuk, convertible bonds, and other securities, as well as other financing forms apart from the financing from share capital and banking scheme. Therefore, there is no information related to bonds/sukuk/outstanding convertible bonds, and other financing.

PERISTIWA PENTING
EVENT HIGHLIGHTS

18-21 Januari | January 18 - January 21

Kick Off Nasional
National Kick Off
Nusa Dua - Bali

12 - 20 Maret | March 12 - March 20

Bank Mandiri Chinese New Year Golf
Pondok Indah - Jakarta

12 - 20 Maret | March 12 - March 20

Jakarta AUTO Week
Jakarta

21 April | April 21

Launching Program Nakes/ Health Workers - Marketing Program
Jakarta

25 April | April 25

Buka Puasa SMAC dan MSC
SMAC and MSC Breakfasting
Jakarta

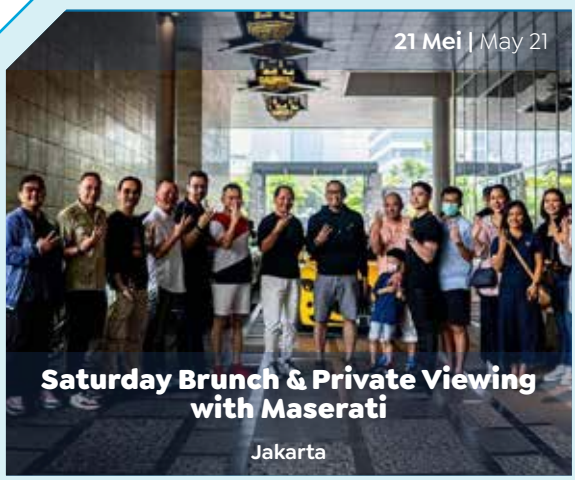

21 Mei | May 21

Saturday Brunch & Private Viewing with Maserati
Jakarta

19 Mei | May 19
GENBA Employee Gathering 2022
Taman Safari Bogor - Bogor

2 Juni | June 2
FOCI, A Night with Love
Jakarta

7 Juni | June 7
MUF IDEA
Sentul - Jabar

11 Juni | June 11
Get Your Dream Car with MUF Premium (BSI OTO) - 11 Juni 2022
Jakarta

18 Juni | June 18
Coffee & Drive with MUF Premium
Jakarta

20-23 Juni | June 20-23
MidYear Meeting
Kuta - Bali

25 Juni | June 25

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Desa Panglipuran
Social and Environmental Responsibility Penglipuran Village
Bangli – Bali

24 – 27 Juni | June 24-27

MUF FEST 2022
Bali

1 Jul – 6 Agustus | July 1 – August 6

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ASIK
Jabodetabek

5 September | September 5

Balanced Speed and Quality
Cisarua - Bogor

8-10 September | September 8-10

Planning Cycle Corporate 2022
Ciawi - Jabar

29 Oktober | October 29

Bank Mandiri 24th Anniversary Golf
Surabaya-Jatim

9 - 11 November | November 9-11
FUTURE INVESTMENT
Pameran Event Wealth Management Group
Wealth Management Group Event Exhibition
Jakarta

15 - 20 & 22 - 27 November | November 15-20 & 22-27
MUF AUTO FEST
Jakarta

1 Desember | December 1
TOGETHER WE CREATE BETTER
Fleet Gathering
PIK, Jakarta

02

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

IGNATIUS SUSATYO WIJOYO
Komisaris Utama
President Commissioner

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga Mandiri Utama Finance dapat melalui tahun 2022 yang penuh tantangan dengan kinerja yang membanggakan.
Praise and gratitude, let us pray to the presence of God Almighty for His abundance of favors and gifts so that Mandiri Utama Finance can go through full of challenges 2022 with proud performance.

Sepanjang tahun, Dewan Komisaris secara intensif memberikan saran dan arahan kepada Direksi, terutama dalam upaya memitigasi risiko yang disebabkan oleh kondisi perekonomian sepanjang tahun 2022.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan yang ketat atas strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris juga memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasional Perusahaan.

Bersama ini, perkenankan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku 2022.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Dewan Komisaris memandang pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2022 yang mulai membaik seiring dengan keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19 melalui berbagai upaya Pemerintah Indonesia seperti melakukan intensifikasi booster vaksin I COVID-19 dan booster vaksin II bagi tenaga kesehatan, disiplin penerapan 5M, mengakselerasi *testing* dan *tracing* serta mengintensifkan *screening* melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi, sehingga mendukung kinerja keuangan Perusahaan semakin meningkat dan membaik.

Kondisi tersebut mempengaruhi kinerja keuangan Perusahaan pada semester 2 tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sehubungan dengan upaya Perusahaan yang masif tetapi tetap selektif dalam menyalurkan pembiayaan baru dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan inisiatif pengendalian biaya yang dilaksanakan secara berkelanjutan di semua lini bisnis Perusahaan.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai Perusahaan memiliki kemampuan ketahanan yang baik di tahun 2022, di tengah kondisi ekonomi dan industri pembiayaan yang cukup menantang. Hal ini menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Direksi. Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada indikator penilaian yang dirumuskan oleh pemegang saham. Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui rapat rutin triwulanan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku entitas induk sekaligus pemegang

Throughout the year, Board of Commissioners intensively provided advice and directions to the Board of Directors, especially in efforts to mitigate risks caused by economic conditions throughout 2022.

Board of Commissioners carried out a strict supervisory function over the strategies and policies implemented by the Board of Directors in managing the Company as mandated in the Articles of Association and applicable regulations. In carrying out the duties, Board of Commissioners also ensures the implementation of Good Corporate Governance and compliance with laws and regulations related to the Company's operations.

Herewith, please allow us to submit the accountability report of the Board of Commissioners on the implementation of the oversight function on the management of the Company for the 2022 fiscal year.

ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE REGARDING COMPANY MANAGEMENT

The Board of Commissioners views that the economic growth throughout 2022 started improving in line with the success in controlling the COVID-19 pandemic through various efforts by the Government of Indonesia such as intensifying the COVID-19 vaccine booster I and vaccine booster II for health workers, discipline in implementing 5M, accelerating testing and tracing. as well as intensifying screening through the use of the PeduliLindungi application, thereby supporting the Company's financial performance to increase and improve.

These conditions affected the Company's financial performance in semester 2 of 2022 which increased due to the massive Company's efforts but remained selective in disbursing new financing while considering the precautionary principle and cost control initiatives which were carried sustainably in all of the Company's business lines.

Overall, Board of Commissioners considers the Company to have good resilience in 2022, amidst quite challenging economic conditions and the financing industry. This is a consideration in evaluating the performance of Board of Directors. Board of Directors' performance appraisal is based on assessment indicators formulated by the shareholders. Assessment of the performance of Board of Directors is carried out through regular quarterly meetings with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the parent entity as

saham pengendali dengan sepengetahuan pemegang saham lainnya. Penilaian kinerja di akhir tahun dilakukan berdasarkan kontrak manajemen yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses penilaian, Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai organ Dewan Komisaris berperan dalam memantau realisasi atas indikator penilaian tersebut.

Terhadap inisiatif strategis yang dijalankan Direksi di tahun 2022, Dewan Komisaris menilai telah sejalan dengan rencana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Tahunan (RBT) 2022, terutama terkait upaya untuk pertumbuhan pembiayaan dan program digitalisasi. Selain itu, Dewan Komisaris juga menilai Direksi juga telah menjalankan manajemen risiko dengan baik, sehingga mampu membukukan pertumbuhan pembiayaan yang sehat.

Melihat kondisi keuangan dan non-keuangan Perusahaan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa langkah-langkah yang diambil Direksi sudah tepat.

Melalui berbagai inisiatif strategis yang dijalan sepanjang tahun 2022, Perusahaan membukukan kinerja yang sangat membanggakan. Seluruh indikator kinerja keuangan Perusahaan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pencapaian kinerja Perusahaan juga secara umum berada di atas target yang ditetapkan dengan membukukan laba bersih sebesar Rp333,00 miliar yang setara dengan 251% dari target yang ditetapkan.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi dalam proses implementasi strategi untuk pencapaian target dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, industri dan bisnis. Dewan Komisaris juga memastikan strategi yang dijalankan Direksi telah sesuai dengan RBT 2022.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada RBT yang sebelumnya telah disampaikan Direksi dan telah mendapat persetujuan pemegang saham. Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan reviu terhadap setiap inisiatif strategis yang dijalankan Direksi dan menilai kesesuaiannya dengan RBT tersebut.

well as the controlling shareholder with the knowledge of other shareholders. Performance appraisal at the end of the year is carried out based on the management contract done previously. In the assessment process, Nomination & Remuneration Committee as an organ of Board of Commissioners played a role in monitoring the realization of assessment indicators.

Regarding the strategic initiatives carried out by Board of Directors in 2022, Board of Commissioners considers that they are in line with the plans set out in the 2022 Annual Business Plan (RBT), especially related to efforts for financing growth and digitalization programs. In addition, Board of Commissioners also assesses that the Board of Directors has carried out risk management properly, so that they are able to record healthy financing growth.

Viewing the financial and non-financial conditions of the Company, Board of Commissioners argued that the steps taken by Board of Directors are appropriate.

Through various strategic initiatives carried out throughout 2022, the Company recorded a very encouraging performance. All of the Company's financial performance indicators have increased compared to the previous year. In addition, the Company's performance achievement in general was above the set target by posting a net profit of IDR333.00 billion which is equivalent to 251% of the set target.

SUPERVISORY OF STRATEGY IMPLEMENTATION

Board of Commissioners supervises and provides direction to the Board of Directors in the process of implementing strategies to achieve targets by considering developments in economic, industrial and business conditions. Board of Commissioners also ensures that the strategy implemented by the Board of Directors is in accordance with the 2022 RBT.

In carrying out its supervisory function, Board of Commissioners adheres to the RBT which has previously been submitted by the Board of Directors and has received approval from the shareholders. The Board of Commissioners monitors and reviews every strategic initiative carried out by Board of Directors and assesses its suitability with the RBT.

Dewan Komisaris menyambut baik strategi Direksi untuk terus mendorong peningkatan jumlah jaringan kantor baik Konvensional maupun Syariah. Hal tersebut adalah untuk meningkatkan jangkauan Perusahaan kepada nasabah. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan profil risiko Perusahaan untuk memastikan pembiayaan Perusahaan tumbuh dengan sehat.

Di sisi lain, Dewan Komisaris juga mendukung strategi Direksi untuk menerapkan kebijakan dan strategi keberlanjutan sejalan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Hal ini merupakan salah satu respons Perusahaan terhadap tantangan dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

Hal lain yang juga tidak kalah penting, Dewan Komisaris memastikan bahwa Perusahaan telah dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan Komisaris telah memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan telah sesuai dengan visi dan misi Perusahaan serta aspirasi pemegang saham dengan tetap memperhatikan seluruh pemangku kepentingan.

MEKANISME DAN FREKUENSI PENGAWASAN

Dewan Komisaris membangun hubungan kerja yang erat dengan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap operasional Perusahaan, termasuk dalam implementasi strategi yang dijalankan Direksi.

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris juga melibatkan komite di bawah Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite. Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat meminta dan memeriksa laporan dari Direksi terkait hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin mengadakan rapat bersama setidaknya 1 kali dalam 3 bulan. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 11 kali rapat bersama dengan Direksi. Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Perusahaan dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris juga menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal tersebut. Salah satu rekomendasi

Board of Commissioners welcomes the Board of Directors' strategy to continue to encourage an increase in the number of office networks, both Conventional and Sharia. This is to increase the Company's outreach to customers. In addition, the Board of Commissioners also pays great attention to the development of the Company's risk profile to ensure that the Company's financing grows healthily.

On the other hand, Board of Commissioners also supports the Board of Directors' strategy to implement sustainability policies and strategies in line with the Sustainable Finance Action Plan (RAKB). This is one of the Company's responses to challenges in implementing sustainable finance.

Another thing that is no less important, Board of Commissioners ensures that the Company has been managed in accordance with applicable laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance (GCG). Board of Commissioners has ensured that the management of the Company is in accordance with the vision and mission of the Company and the aspirations of the shareholders while taking into account all stakeholders.

SUPERVISION MECHANISM AND FREQUENCY

Board of Commissioners builds a close working relationship with the Board of Directors in accordance with the applicable laws and regulations. Board of Commissioners supervises the Company's operations, including the implementation of the strategy implemented by the Board of Directors.

In carrying out supervision, Board of Commissioners also involves committees under Board of Commissioners which carry out supervision in accordance with the duties and responsibilities of each committee. In addition, Board of Commissioners may also request and examine reports from the Board of Directors regarding matters of concern to the Board of Commissioners.

Board of Commissioners and Board of Directors routinely hold joint meetings at least 1 time in 3 months. Throughout 2022, the Board of Commissioners has held 11 joint meetings with the Board of Directors. In this forum, Board of Commissioners may request an explanation from the Board of Directors regarding the achievement of the Company's performance and the various obstacles faced. Board of Commissioners also conveys views and provides advice to the Directors regarding this matter. One of the

yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi adalah mengenai pengendalian gratifikasi di Perusahaan. Dalam rangka menjalankan amanat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Komisaris mendorong Perusahaan membentuk Unit Kerja Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 004/SK-DIR/MUF/VIII/2022 yang berlaku sejak 22 Agustus 2022. Selain itu, Dewan Komisaris juga mengarahkan Perusahaan untuk membentuk Unit Kerja Perlindungan Konsumen dan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam SKD 006/SK-DIR/MUF/X/2022 yang berlaku sejak 10 Oktober 2022.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Gejolak perekonomian global diprediksi masih belum akan mereda di tahun 2023. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global hanya akan tumbuh 2,9%. Di lain pihak, Bank Indonesia memprediksi ekonomi Indonesia masih akan tumbuh cukup kondusif pada kisaran 4,7%–5,3%. Hal ini ditopang oleh permintaan domestik, investasi dan kinerja ekspor. Inflasi juga diprediksi menurun pada 2023, seiring dengan terkendalinya inflasi harga impor dengan nilai tukar rupiah yang stabil.

Dewan Komisaris menilai, tahun 2023 masih akan menjadi tahun yang menantang bagi Perusahaan. Kendati demikian, Dewan Komisaris meyakini bahwa Perusahaan memiliki peluang yang besar untuk terus meraih pertumbuhan usaha di tahun 2023.

Kebutuhan akan produk otomotif masih sangat tinggi di Indonesia. Bank dan lembaga keuangan juga terus melakukan inovasi untuk melahirkan produk-produk pembiayaan otomotif yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perusahaan harus dapat mengambil peluang dari pertumbuhan sektor pembiayaan otomotif tersebut.

Dewan Komisaris memandang Perusahaan dapat menjalankan strategi tahun 2023 dengan baik tema Tahun 2023 yaitu "*Managing The Uncertainties Thru Focus On Results Oriented*" dengan menargetkan nilai pembiayaan baru pada tahun 2023 tumbuh menjadi sebesar Rp18,5 triliun. Berdasarkan asumsi nilai pembiayaan tersebut, nilai Total Aset Perusahaan Tahun 2023 diproyeksi pada kisaran ±Rp8 triliun dan *Net Profit After Tax* (NPAT) diproyeksikan dapat mencapai ±Rp345 miliar.

recommendations given by the Board of Commissioners to the Board of Directors is regarding gratuity control in the Company. In order to carry out the mandate of the Corruption Eradication Commission (KPK) in accordance with Law Number 31 of 1999 juncto Law Number 20 of 2021 and support the Corruption Eradication Commission, the Board of Commissioners encourages the Company to form a Gratification Control Work Unit as stated in the Directors Decree Number 004/SK-DIR/MUF/VIII/2022 which took effect on August 22, 2022. In addition, the Board of Commissioners also directed the Company to form a Consumer and Community Protection Work Unit as stated in SKD 006/SK-DIR/MUF/X/2022 which has been effective since October 10, 2022.

VIEW ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

It was predicted that global economic turmoil will not subside in 2023. The IMF predicted global economic growth will only grow 2.9%. On the other hand, Bank Indonesia predicted that the Indonesian economy still grow quite conducive in the range of 4.7%–5.3%. This is supported by domestic demand, investment and export performance. Inflation is also predicted to decline in 2023, in line with controlled import price inflation with a stable rupiah exchange rate.

The Board of Commissioners considers that 2023 will still be a challenging year for the Company. Nevertheless, the Board of Commissioners believes that the Company has a great opportunity to continue to achieve business growth in 2023.

The need for automotive products is still very high in Indonesia. Banks and financial institutions also continue to innovate to produce automotive financing products that meet consumer needs. Companies must be able to take advantage of the growth in the automotive financing sector.

Board of Commissioners views that the Company can carry out the 2023 strategy well with the theme for 2023, namely "Managing The Uncertainties Thru Focus On Results Oriented" targeting the value of new financing in 2023 to grow to IDR18.5 trillion. Based on this financing assumption, the Company's Total Assets in 2023 are projected to be in the range of ± IDR8 trillion and Net Profit After Tax (NPAT) is projected to reach ± IDR345 billion.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris sangat memperhatikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang sangat penting dalam membantu Perusahaan untuk mempertahankan kinerja positif dan mencapai tujuan bisnis. Secara khusus, Perusahaan menggunakan prinsip-prinsip GCG sebagai acuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari benturan kepentingan, optimalisasi kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Mekanisme tata kelola yang dijalankan Perusahaan juga terus menunjukkan peningkatan, di mana masing-masing organ tata kelola telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan dan *best practices* penerapan GCG.

Adapun rencana pengembangan yang akan dilakukan antara lain seperti peningkatan pengawasan untuk menjaga pelaksanaan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya kelengkapan dan pelaksanaan organ Perusahaan. Pengembangan lainnya dilakukan dengan meningkatkan efektivitas proses aspek tata kelola, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya yang berperan penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Pengembangan pada aspek struktur dan proses ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Berdasarkan *review* Dewan Komisaris atas penerapan GCG Perusahaan pada semester 2 Tahun 2022, Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan GCG telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil *self-assessment* per posisi 31 Desember 2022 yang sudah dilaporkan pada rapat Komite Pemantau Risiko atas 12 (dua belas) indikator faktor penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan POJK No.29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan POJK No.30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan jo. POJK No.28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Board of Commissioners is very concerned about the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, which are very important in assisting the Company to maintain positive performance and achieve business goals. In particular, the Company uses GCG principles as a reference for making responsible decisions, avoiding conflicts of interest, optimizing performance and increasing accountability.

The governance mechanism implemented by the Company also continued to show improvement, in which each governance organ has carried out its functions and duties properly in accordance with statutory provisions and GCG implementation best practices.

The development plans that will be carried out include increasing supervision to maintain compliance with regulations, especially the completeness and implementation of the Company's organs. Other developments are carried out by increasing the effectiveness of the process of governance aspects, as well as training and developing resources that play an important role in the implementation of corporate governance. It is hoped that the development of the structure and process aspects will improve the results of the implementation of corporate governance.

Based on the review of Board of Commissioners on the implementation of the Company's GCG in second half of 2022, the Board of Commissioners believes that the implementation of GCG has been carried out very well. This is shown from the results of the self-assessment as of December 31, 2022 which was reported at the Risk Monitoring Committee meeting on 12 (twelve) indicators of Good Corporate Governance assessment factors based on POJK No.29/POJK.05/2020 concerning Amendments to POJK No. 30/POJK.05/2014 Concerning Good Corporate Governance for Financing Companies jo. POJK No.28/POJK.05/2020 concerning Soundness Rating of Non-Bank Financial Services Institutions.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Perusahaan. Namun demikian, Dewan Komisaris juga terus mengingatkan Direksi agar upaya tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan agar kualitas penerapan GCG dapat terus meningkat serta meningkatkan penerapan aspek *Governance, Risk, & Compliance* (GRC) sesuai arahan dari OJK.

Board of Commissioners appreciates the Board of Directors for the efforts made to continuously improve the quality of GCG implementation within the Company. However, the Board of Commissioners also continues to remind the Board of Directors that these efforts can be carried out on an ongoing basis so that the quality of GCG implementation can continue to improve and improve the implementation of Governance, Risk & Compliance (GRC) aspects according to directions from OJK.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN DAN PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

Perusahaan telah memiliki sistem pelaporan dugaan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) sebagai upaya pencegahan dan deteksi terjadinya *fraud* yang melibatkan Insan Perusahaan. Penerapan WBS merupakan salah satu wujud dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan Perusahaan dan telah berjalan secara memadai. Perusahaan juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan WBS dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan secara berkesinambungan.

Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk meningkatkan sosialisasi terhadap keberadaan WBS yang dimiliki Perusahaan mengingat sistem yang sudah sangat baik tersebut belum berfungsi secara optimal. Dewan Komisaris melalui Komite Audit terus melakukan *review* terhadap penerapan WBS di lingkungan Perusahaan.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT OF WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

The Company has a system for reporting suspected violations or a whistleblowing system (WBS) as an effort to prevent and detect fraud involving Company personnel. The implementation of the WBS is a manifestation of the implementation of the principles of Good Corporate Governance within the Company and has been running adequately. The Company also continues to strive to improve the quality of WBS implementation by continuously disseminating information to all employees.

Board of Commissioners also encourages the Board of Directors to increase socialization of the existence of WBS owned by the Company considering that the system which is already very good has not functioned optimally. Board of Commissioners through the Audit Committee continues to review the implementation of the WBS within the Company.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dan implementasi proses-proses bisnis.

Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik sepanjang tahun 2022.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is assisted by several committees, namely the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee in carrying out their duties and responsibilities to supervise the management of the Company and the implementation of business processes.

Board of Commissioners considers that these committees have carried out their duties properly throughout 2022.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam hal-hal terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2022.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi tata kelola risiko Perusahaan, *risk appetite* dan batasan-batasan (*limit*) Perusahaan serta untuk mengawasi bahwa risiko-risiko tersebut dikelola secara efektif di dalam keseluruhan kerangka tata kelola risiko. Komite telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali pada tahun 2022.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris terkait aspek remunerasi dan nominasi. Pada tahun 2022, Komite telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat untuk membahas kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengembangan organisasi Perusahaan yang sejalan dengan pengembangan bisnis.

Untuk menjaga kesinambungan kinerja, Dewan Komisaris mengharapkan seluruh anggota komite dapat terus meningkatkan keterampilan mereka di bidang-bidang masing-masing dan tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya dengan dedikasi dan integritas.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Tahun 2022, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan tidak mengalami perubahan, yaitu dengan komposisi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ignatius Susatyo Wijoyo
Komisaris : Erida
Komisaris Independen : Mansyur S. Nasution

The Audit Committee has the duty and responsibility to assist and facilitate the Board of Commissioners in matters related to the quality of financial information, internal control systems and compliance with applicable laws and regulations. The Audit Committee has held 7 (seven) meetings during 2022.

The Risk Monitoring Committee has the duty and responsibility to oversee the Company's risk governance, risk appetite and Company limits and to oversee that these risks are managed effectively within the overall risk governance framework. The Committee has held 8 (eight) meetings in 2022.

The Nomination & Committee Remuneration has duties and responsibilities to assist the Board of Commissioners regarding remuneration and nomination aspects. In 2022, the Committee has held 3 (three) meetings to discuss remuneration policies for the Board of Commissioners and Directors, as well as the development of the Company's organization in line with business development.

To maintain continuity of performance, the Board of Commissioners expects that all committee members will continue to improve their skills in their respective fields and remain consistent in carrying out their duties with dedication and integrity.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

In 2022, the composition of the Company's Board of Commissioners did not change with the following composition:

President Commissioner : Ignatius Susatyo Wijoyo
Commissioner : Erida
Independent Commissioner : Mansyur S. Nasution

APRESIASI

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah, pemegang saham, pemangku kepentingan dan mitra bisnis, atas kepercayaan, kerja sama dan hubungan kerja yang baik dengan kami. Dengan dukungan mereka, Perusahaan mampu memberikan kinerja bisnis yang membanggakan di tahun 2022.

Kami juga menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Direksi dan karyawan atas kerja keras dan dedikasinya selama tahun 2022 yang penuh tantangan.

Dewan Komisaris yakin bahwa Perusahaan akan tetap tangguh dengan penerapan kebijakan strategis yang tepat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola.

Dewan Komisaris secara aktif mendorong manajemen dan seluruh karyawan untuk bekerja sama dan bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya, untuk memberikan layanan yang melampaui harapan seluruh pemangku kepentingan.

APPRECIATION

On behalf of the Board of Commissioners, we deliver our highest appreciation and gratitude to all customers, shareholders, stakeholders and business partners, for the trust, cooperation and good working relationship with us. Through this support, the Company is able to provide a proud business performance in 2022.

We also express our greatest appreciation to the Board of Directors and employees for their hard work and dedication during 2022 which was full of challenges.

Board of Commissioners believes that the Company will remain resilient with the implementation of the right strategic policies and adherence to governance principles.

Board of Commissioners actively encourages management and all employees to work together and synergize with other stakeholders, to provide services that exceed the expectations of all stakeholders.

Jakarta, 20 Maret 2023
Jakarta, March 20, 2023

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of Board of Commissioners

IGNATIUS SUSATYO WIJOYO

Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

STANLEY S. ATMADJA
Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Shareholders and Stakeholders,

Tidak ada kalimat yang lebih pantas untuk diucapkan untuk mengawali laporan ini selain mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantang, Mandiri Utama Finance dapat membukukan kinerja yang solid dan tumbuh secara berkelanjutan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan kami untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku 2022 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*Ernst* & *Young Global Limited*) dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

There is no word that is more appropriate to say to start this report than giving thanks to God Almighty. In the midst of quite challenging economic conditions, Mandiri Utama Finance was able to record solid performance and grow sustainably. On this very good opportunity, allow us to submit an accountability report on the management of the Company for the 2022 financial year along with financial statements that have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (*Ernst* & *Young Global Limited*) and obtain a fair opinion in all matters relating to material.

TANTANGAN DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN TAHUN 2022

Tahun 2022 masih menjadi tahun yang sangat menatang. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya berakhir, ekonomi nasional harus menghadapi tantangan yang tidak ringan yang salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang diwarnai ketidakpastian akibat konflik geopolitik.

Kendati secara umum ekonomi Indonesia tumbuh cukup kuat, yaitu sebesar 5,31% di tahun 2022, namun sejatinya terdapat sejumlah tantangan yang tidak ringan, salah satunya adalah tekanan inflasi sebesar 5,51% yang meningkat cukup tinggi dibandingkan inflasi tahun 2021 sebesar 1,87%. Merespons hal tersebut, Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sejak September hingga Desember 2022 menjadi 5,50% atau meningkat 200bps.

Selain itu, di tahun 2022 juga terjadi kelangkaan *chip* semi konduktor yang menyebabkan terganggunya produksi kendaraan bermotor baru. Selain itu, kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) juga telah berakhir pada September 2022, sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan No.5/PMK.010/2022. Beruntung hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap penjualan kendaraan bermotor di tanah air. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan kendaraan roda empat tahun 2022 mencapai sebanyak 1.013.582 unit atau naik 17,4% dibandingkan periode sama 2021 sebanyak 863.358 unit. Demikian juga dengan penjualan kendaraan roda dua yang berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 5.221.470 unit. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 5.057.516 unit.

Di sisi industri, berdasarkan data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Saldo Piutang Pembiayaan untuk seluruh perusahaan pembiayaan nasional sebesar Rp415,86 triliun, meningkat dari Saldo Piutang Pembiayaan di akhir tahun 2021 sebesar Rp364,23 triliun.

Menghadapi tantangan di tahun 2022, Perusahaan telah menetapkan sejumlah strategi untuk menjaga dan memastikan pencapaian target. Fokus strategi Perusahaan tahun 2022 antara lain:

CORPORATE STRATEGIC CHALLENGES AND POLICIES FOR 2022

2022 was still a very challenging year. In the midst of the COVID-19 pandemic that has not completely ended, the national economy must face formidable challenges, one of which is caused by global economic conditions which are tinged by uncertainty due to geopolitical conflicts.

Even though in general the Indonesian economy is growing quite strong, namely by 5.31% in 2022, there are actually a number of severe challenges, one of which is inflationary pressure of 5.51% which has increased quite high compared to inflation in 2021 of 1.87%. In response to this, Bank Indonesia adopted a policy to increase the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) from September to December 2022 to 5.50% or an increase of 200 bps.

Apart from that, in 2022 there was also a shortage of semiconductor chips which disrupt the production of new motorized vehicles. In addition, the policy on Sales Tax on Luxury Goods Borne by the Government (PPnBM DTP) has also ended in September 2022, as stated in Minister of Finance Regulation No.5/PMK.010/2022. Luckily, this did not have a big impact on sales of motorized vehicles in the country. Based on data from the Association of Indonesian Automotive Industries (Gaikindo), sales of four-wheeled vehicles in 2022 reached 1,013,582 units, an increase of 17.4% compared to the same period in 2021 of 863,358 units. Likewise with sales of two-wheeled vehicles, based on data from the Indonesian Motorcycle Industry Association (AISI), motorcycle sales throughout 2022 were recorded at 5,221,470 units. This achievement was higher than the previous year of 5,057,516 units.

On the industry side, based on data released by the Financial Services Authority (OJK), the balance of financing receivables for all national financing companies is IDR415.86 trillion, an increase from the balance of financing receivables at the end of 2021 of IDR364.23 trillion.

Facing the challenges in 2022, the Company has established a number of strategies to maintain and ensure target achievement. The focus of the Company's strategy for 2022 includes:

1. Mendorong pertumbuhan pembiayaan yang antara lain dilakukan dengan:
   a. Melakukan pengembangan jaringan kantor dan penambahan izin jaringan kantor, baik Konvensional maupun Syariah agar dapat menjangkau nasabah yang lebih luas.
   b. Intensifikasi kerja sama dengan *dealer* dan *showroom* serta mitra bisnis guna meningkatkan *booking sales* untuk meraih momentum *economic recovery* di tahun 2022.
   c. Meningkatkan produktivitas penjualan multi produk pembiayaan (termasuk pembiayaan Syariah) dari jaringan sumber *order* pembiayaan yang dimiliki Perusahaan dan kerja sama sinergi bisnis dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku induk Perusahaan dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selain itu, dukungan pendanaan *Joint Finance* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk semakin memperkuat sumber dana Perusahaan.
   d. Melaksanakan perluasan dan pengembangan program *marketing* dengan tujuan segmen tertentu.
2. Perkuatan Manajemen Risiko yang dilakukan dengan cara:
   a. Melanjutkan pelaksanaan Program Restrukturisasi COVID-19 secara selektif untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan melaksanakan Program Restrukturisasi Berulang (Re-Restrukturisasi) COVID-19 untuk akun yang pernah melakukan Restrukturisasi COVID-19 demi menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan Total Aset Perusahaan, dengan tetap memperhatikan POJK Nomor 30/P0JK.05/2021.
   b. Melakukan kegiatan pembiayaan dengan lebih selektif, sehingga kualitas portofolio Perusahaan tetap terjaga melalui peningkatan utilitas informasi calon Debitur melalui data Pefindo Biro Kredit, data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan *Credit Scoring*.
   c. Disiplin *collection management* dari penagihan hingga penyelesaian kewajiban.
3. Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas
   a. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki secara berkesinambungan melalui program pelatihan yang efektif melalui media *online*.
   b. Peningkatan produktivitas unit kerja dan karyawan.
   c. Prioritas pada biaya yang mendukung pertumbuhan.

1. Encouraging the growth of financing which among other things is done by:
   a. Developing office networks and adding Conventional and Sharia office network licenses in order to reach a wider range of customers.
   b. Intensification of cooperation with dealers and showrooms as well as business partners to increase booking sales to achieve economic recovery momentum in 2022.
   c. Increasing sales productivity of multi financing products (including Sharia financing) from the financing order source network owned by the Company and business synergy cooperation with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the parent Company and PT Bank Syariah Indonesia Tbk. In addition, Joint Finance funding support from PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Syariah Indonesia Tbk further strengthened the Company's sources of funds.
   d. Carry out expansion and development of marketing programs with specific target segments
2. Strengthening Risk Management by:
   a. Continuing the implementation of the COVID-19 Restructuring Program selectively to maintain the quality of the financing portfolio and implementing the COVID-19 Restructuring Program for accounts that have carried out the COVID-19 Restructuring in order to maintain the quality of the financing portfolio and the Company's Total Assets, while taking into account POJK Number 30/P0JK.05/2021.
   b. Carrying out financing activities more selectively, so that the quality of the Company's portfolio is maintained through increasing the information utility of prospective Debtors through Pefindo Credit Bureau data, Directorate General of Population and Civil Registry data (DUKCAPIL), Financial Information Service System (SLIK) data and Credit Scoring.
   c. Discipline in collection management from billing to settlement of obligations.
3. Increase Efficiency and Productivity
   a. Improving the capabilities and competencies of human resources on an ongoing basis through effective training programs through online media.
   b. Increased work unit and employee productivity.
   c. Priority on costs that support growth.

4. Pengembangan Akses Digital
   a. Mengembangkan fitur-fitur MONA dalam bentuk *virtual assistant* yang dapat memberikan lebih banyak layanan kepada konsumen, sehingga dapat menjadi alternatif konsumen dalam menentukan kebutuhan kendaraan bermotor melalui berbagai promosi dan rekomendasi terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang dimiliki MUF. Selain itu, MUF juga terus melakukan penyempurnaan fitur-fitur layanan pada program *digital marketing* yaitu MOAS (MUF Online AutoShow) untuk Pembiayaan Konvensional dan MOS (MUF Online Autoshow Sharia) untuk Pembiayaan Syariah.
   b. Mengoptimalkan pengelolaan aktivitas dan media komunikasi digital untuk memberikan layanan dan informasi program serta produk pembiayaan kepada masyarakat luas dengan konten yang menarik dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.

Perusahaan memadukan seluruh inisiatif tersebut dengan strategi permodalan yang tepat, yaitu dengan memantau gearing ratio pada posisi yang baik. Dengan langkah tersebut, Perusahaan dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai komposisi nilai bersih pinjaman dan ekuitas atau modal sendiri. Dengan strategi tersebut, Perusahaan dapat mengoptimalkan nilai bersih pinjaman untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan.

KINERJA MUF TAHUN 2022

Melalui berbagai inisiatif yang dijalankan sepanjang tahun 2022, Perusahaan dapat meraih kinerja yang optimal di tahun 2022. Nilai Pembiayaan Baru yang dibukukan Perusahaan tahun 2022 mencapai Rp17,90 triliun, meningkat 54,35% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11,59 triliun. Pembiayaan mobil mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 63,71% menjadi Rp14,06 triliun, sedangkan pembiayaan motor tumbuh 22,57% menjadi Rp3,83 triliun. Hal ini berdampak terhadap Saldo Piutang Pembiayaan, di mana Piutang Pembiayaan Konsumen meningkat 19,11%, sedangkan Piutang Pembiayaan *Murabahah* sesuai prinsip Syariah mencatat kenaikan hingga 50,17% dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan kinerja pembiayaan tersebut memberikan dampak yang sangat baik terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Sepanjang tahun 2022, Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp2,21 triliun, meningkat 43,06% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,5 triliun, yang terdiri dari pendapatan pembiayaan konsumen sebesar Rp1,80 triliun, tumbuh 39,55% dari tahun 2021 dan margin *Murabahah* yang meningkat 147,60% menjadi Rp252,06 miliar.

4. Development of Digital Access
   a. Developing MONA features in the form of virtual assistants that can provide more services to consumers, so that they can become an alternative for consumers in determining their needs for motorized vehicles through various promotions and recommendations for financial products and services owned by MUF. In addition, MUF also continues to improve service features in digital marketing programs, namely MOAS (MUF Online AutoShow) for Conventional Financing and MOS (MUF Online Autoshow Sharia) for Sharia Financing.
   b. Optimizing the management of activities and digital communication media to provide services and information on programs and financing products to the wider community with interesting content while taking into account the applicable provisions of the Financial Services Authority (OJK).

The company combines all of these initiatives with the right capital strategy, namely by monitoring the gearing ratio in a good position. With this step, the Company can obtain a complete illustration of the composition of the net loan value and equity or own capital. With this strategy, the Company can optimize the net loan value to optimize the Company's performance.

MUF PERFORMANCE IN 2022

Through various initiatives carried out throughout 2022, the Company was able to achieve optimal performance in 2022. The value of New Financing that the Company posted in 2022 reached IDR17.90 trillion, an increase of 54.35% compared to the previous year of IDR11.59 trillion. Car financing experienced a significant increase, namely by 63.71% to IDR14.06 trillion, while motorcycle financing grew 22.57% to IDR3.83 trillion. This had an impact on the balance of Financing Receivables, where Consumer Financing Receivables increased by 19.11%, while Murabahah Financing Receivables According to Sharia principles recorded an increase of up to 50.17% compared to the previous year.

The increase in financing performance has had a very good impact on the Company's financial performance. Throughout 2022, the Company posted revenue of IDR2.21 trillion, an increase of 43.06% from the previous year of IDR1.5 trillion, consisting of consumer financing income of IDR1.80 trillion, growing 39.55% from 2021 and a Murabahah margin which increased 147.60% to IDR252.06 billion.

Selain itu, Perusahaan juga dapat beroperasi dengan lebih efisien yang tercermin dari penurunan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dari 91,32% di tahun 2021 menjadi 83,02% di tahun 2022. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan laba bersih Perusahaan menjadi Rp333,00 miliar atau naik 225,32% dari tahun sebelumnya sebesar Rp102,36 miliar. Pencapaian laba bersih tersebut merupakan yang terbaik sejak Perusahaan berdiri.

Tahun 2022 Perusahaan juga berhasil mencatat pertumbuhan aset yang sangat baik, yaitu sebesar 24,10% menjadi Rp7,57 triliun dan pertumbuhan ekuitas sebesar 54,18% menjadi Rp956,54 miliar.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022

Tahun 2022, Perusahaan mencatat kinerja yang sangat membanggakan. Hampir seluruh indikator kinerja Perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, kinerja Perusahaan tahun 2022 juga secara umum berada di atas target yang ditetapkan pada Rencana Bisnis Tahunan (RBT) 2022.

Pembiayaan baru yang dibukukan Perusahaan tahun 2022 setara dengan 141% dari target yang ditetapkan. Demikian juga dengan saldo piutang yang mencapai 122% dari target. Dengan kinerja target pembiayaan tersebut, realisasi pendapatan dan laba bersih masing-masing tercapai sebesar 116% dan 251% terhadap target tahun 2022.

Perusahaan juga dapat mengelola likuiditas dengan sangat baik. Hal ini dilihat dari jumlah pinjaman yang diterima Perusahaan yang berada di bawah target, yaitu 98,9% dari target. Hal ini menjadi pencapaian yang sangat baik mengingat di tahun 2022 Perusahaan mencatat pertumbuhan pembiayaan yang sangat baik.

PROSPEK USAHA TAHUN 2023

Kendati ekonomi global diprediksi akan mengalami perlambatan, namun Bank Indonesia memprediksi ekonomi Indonesia masih akan tumbuh cukup kuat di tahun 2023 pada kisaran 4,7%–5,3%. Selain ditopang oleh konsumsi domestik, pertumbuhan ekonomi tersebut juga ditunjang oleh kinerja ekspor dan investasi yang akan semakin membaik.

In addition, the Company was also able to operate more efficiently as reflected in a decrease in the ratio of Operating Expenses to Operating Income (BOPO) from 91.32% in 2021 to 83.02% in 2022. This is one of the factors driving an increase in profit The Company's net net became IDR333.00 billion, an increase of 225.32% from the previous year of IDR102.36 billion. This net profit achievement was the best since the Company was established.

In 2022 the Company also managed to record very good asset growth, which was 24.10% to IDR7.57 trillion and equity growth of 54.18% to IDR956.54 billion.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION IN 2022

In 2022, the Company recorded a very proud performance. Almost all of the Company's performance indicators have increased compared to the previous year. Not only that, the Company's performance in 2022 is also generally above the target set in the 2022 Annual Business Plan (RBT).

The new financing recorded by the Company in 2022 is equivalent to 141% of the set target. Likewise with the balance of receivables which reached 122% of the target. With the performance of these financing targets, the realization of revenue and net profit was achieved by 116% and 251% respectively of the 2022 target.

Companies can also manage liquidity very well. It can be seen from the number of loans received by the Company which were below the target, namely 98.9% of the target. It is a very good achievement considering that in 2022 the Company recorded very good financing growth.

BUSINESS PROSPECTS FOR 2023

Even though the global economy is predicted to experience a slowdown, Bank Indonesia predicted that the Indonesian economy will still grow quite strongly in 2023 in the range of 4.7%–5.3%. Apart from being supported by domestic consumption, this economic growth will also be supported by export and investment performance which will continue to improve.

Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut, daya beli masyarakat diprediksi akan semakin menguat.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan peran dalam perekonomian Indonesia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat khususnya otomotif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam mengantisipasi beberapa isu krisis yang mungkin terjadi di Tahun 2023, Perusahaan mencanangkan tema "*Managing the Uncertainties Thru Focus on Results Oriented*" yang mengandung makna bahwa Perusahaan senantiasa mengelola kondisi ekonomi yang menantang dengan fokus menjalankan "MUF *Winning Strategies*" untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

Adapun "MUF *Winning Strategies*" adalah sebagai berikut:
1. *Mastering 5 Key Success Factors.*
2. *Inventing & Optimizing Engines of Growth.*
3. *Developing Effective MUF Automotive SuperApps.*
4. *Nurturing Culture and Living The Value.*
5. *Building Best & Strongest MUF Brand Equity.*

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN TARGET DAN STRATEGI SERTA LANGKAH *MONITORING* YANG DILAKUKAN

Perumusan target dan strategi (RBT) merupakan turunan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Di dalam penyusunan RBT, Perusahaan selalu mengacu dengan kondisi makro dan industri terkini.

Dalam penyusunan target dan strategi, Direksi memberikan arahan mengenai visi, misi dan tujuan Perusahaan. Setiap divisi menyusun target dan strategi sesuai dengan arahan tersebut. Target dan strategi tersebut disahkan dalam bentuk kick off yang dihadiri dan ditandatangani oleh jajaran Manajemen dan Kepala Divisi.

Untuk memastikan target dan strategi berjalan sesuai rencana, Direksi melakukan *monitoring* dalam bentuk BOD *Meeting* yang dilaksanakan setiap bulan untuk mendapatkan *update* atas *performance* Perusahaan. Dalam *meeting* tersebut Direksi juga memberikan arahan-arahan yang perlu dijalankan untuk mencapai hasil yang di targetkan.

In line with the improving economic growth, people's purchasing power is predicted to strengthen.

In line with these conditions, the Company is committed to playing a role in the Indonesian economy within the framework of sustainable development by meeting the financing needs of the community, especially automotive, so that it can improve welfare for the community.

In anticipating several crisis issues that may occur in 2023, the Company launched the theme "Managing the Uncertainties Thru Focus on Results Oriented" which implies that the Company always manages challenging economic conditions with a focus on implementing "MUF Winning Strategies" to achieve the set results.

The "MUF Winning Strategies" are as follows:
1. Mastering 5 Key Success Factors.
2. Inventing & Optimizing Engines of Growth.
3. Developing Effective MUF Automotive SuperApps.
4. Nurturing Culture and Living The Value.
5. Building Best & Strongest MUF Brand Equity.

ROLE OF BOARD OF DIRECTORS IN THE FORMULATION OF TARGETS AND STRATEGIES AS WELL AS THE MONITORING STEPS TAKEN

The formulation of targets and strategies (RBT) is a derivative of the Company's Long-Term Plan. In preparing the RBT, the Company always refers to the latest macro and industry conditions.

In preparing targets and strategies, the Board of Directors provides direction regarding the vision, mission and objectives of the Company. Each division sets targets and strategies in accordance with these directives. The targets and strategies were ratified in the form of a kick off which was attended and signed by the Management and Division Heads.

To ensure that targets and strategies are going according to plan, the Board of Directors monitors them in the form of BOD Meetings which are held every month to get updates on the Company's performance. In meeting, Board of Directors also provided directions needed to be carried out to achieve the targeted results.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara konsisten dalam setiap aktivitas operasional Perusahaan. Penerapan GCG mengikat dan berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan, tak terkecuali bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Dalam menerapkan GCG, Perusahaan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebagai bagian dari kelompok usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tentunya Perusahaan memiliki *benchmark* penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan standar yang cukup tinggi.

Secara berkala Perusahaan me-*review* kebijakan internal Perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga jasa keuangan, Perusahaan terikat oleh berbagai regulasi, sehingga Perusahaan perlu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada perangkat kebijakan, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun berbagai pedoman dan kebijakan yang dapat memberikan batasan tanggung jawab pada setiap organ Perusahaan. Batasan ini menjadi penting agar pola hubungan antarorgan dapat terjalin dengan harmonis, dan mampu mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Secara periodik, Manajemen melakukan tinjauan dan pengkinian atas perangkat kebijakan yang dimiliki, agar terus memiliki relevansinya baik terhadap perkembangan Perusahaan, perkembangan regulasi yang diberlakukan, maupun pertumbuhan industri pembiayaan di Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG, tahun 2022 Perusahaan kembali melaksanakan *self-assessment* atas penerapan GCG di lingkup Perusahaan berdasarkan Peraturan OJK No. 28/ POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company is committed to consistently implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every operational activity of the Company. The implementation of GCG is binding and applies to all Company personnel, including the Board of Commissioners and Directors of the Company.

In implementing GCG, the Company refers to the applicable laws and regulations. In addition, as part of the PT Bank Mandiri (Persero) Tbk business group, of course the Company has a benchmark for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) with a fairly high standard.

The Company periodically reviews the Company's internal policies to ensure compliance with the applicable laws and regulations. As a financial services institution, the Company is bound by various regulations, so the Company needs to ensure compliance with laws and regulations.

In terms of policy tools, the Board of Directors together with the Board of Commissioners develop various guidelines and policies that can limit the responsibilities of each organ of the Company. This boundary is important so that the pattern of relationships between organs can be harmoniously established, and is able to support the achievement of the vision and mission that has been set. Management periodically reviews and updates its policy tools, so that they continue to have relevance to the development of the Company, the development of regulations in force, and the growth of the financing industry in Indonesia.

As part of efforts to continuously improve the quality of GCG implementation, in 2022 the Company will again carry out a self-assessment of GCG implementation within the scope of the Company based on OJK Regulation No. 28/ POJK.05/2020 concerning Soundness Rating of Non-Bank Financial Services Institutions and OJK Circular Letter No. 11/SEOJK.05/2020 concerning Assessment of Soundness Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Tahun 2022, komposisi Direksi MUF tidak mengalami perubahan, yaitu dengan komposisi sebagai berikut:
Direktur Utama : Stanley S. Atmadja
Direktur : Rita Mustika
Direktur : Rully Setiawan

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

In 2022, the composition of the MUF Board of Directors did not change with the following composition:
President Director : Stanley S. Atmadja
Director : Rita Mustika
Director : Rully Setiawan

PENUTUP DAN APRESIASI

Direksi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pelanggan atas kepercayaan, loyalitas, dan dukungannya, sehingga Perusahaan dapat mencatatkan kinerja yang membanggakan di tahun 2022. Direksi juga berterima kasih kepada seluruh karyawan yang telah bekerja keras menghadapi kondisi tahun 2022 yang dinamis.

Direksi mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas dukungan dan bimbingannya yang sangat membantu manajemen dalam mencapai target. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk OJK.

Ke depan, Direksi berkomitmen untuk senantiasa melayani kebutuhan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya, sejalan dengan nilai-nilai Perusahaan serta prinsip-prinsip GCG.

CLOSING AND APPRECIATION

The Board of Directors expresses the highest appreciation to customers for their trust, loyalty and support, so that the Company can record a proud performance in 2022. The Board of Directors also send the gratitude to all employees who have worked hard to face the dynamic conditions of 2022.

Board of Directors would like to thank the Board of Commissioners for their support and guidance which has greatly assisted management in achieving targets. We also thank all stakeholders, including OJK.

Going forward, Board of Directors is committed to always serving the needs of customers and other stakeholders, in line with the Company's values and GCG principles.

Jakarta, 20 Maret 2023
Jakarta, March 20, 2023

Atas Nama Direksi
On Behalf of Board of Directors

STANLEY S. ATMADJA
Direktur Utama
President Director

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022

RESPONSIBILITY STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2022 ANNUAL REPORT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Mandiri Utama Finance Tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenarnya.

Jakarta, 20 Maret 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Mandiri Utama Finance Tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenarnya.

Jakarta, March 20, 2023

DIREKSI
Board of Director

Stanley S. Atmadja
Direktur Utama
President Director

Rita Mustika
Direktur
Director

Rully Setiawan
Direktur
Director

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022

RESPONSIBILITY STATEMENT BY THE BOARD OF COMMISSIONERS FOR 2022 ANNUAL REPORT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Mandiri Utama Finance Tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Maret 2023

We, the undersigned, declare that all information in 2022 Annual Report of Mandiri Utama Finance has been presented completely and we are fully responsible for the contents accuracy of the Company's annual report.

This statement was actually made

Jakarta, March 20, 2023

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Ignatius Susatyo Wijoyo
Komisaris Utama
President Commissioner

Erida
Komisaris
Commissioner

Mansyur S. Nasution
Komisaris Independen
Independent Commissioner

03

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

IDENTITAS PERUSAHAAN

IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan
Company Name

Mandiri Utama Finance

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp500.000.000.000,-

Modal Disetor
Issued Capital

Rp500.000.000.000,-

Jumlah Karyawan **7.695 orang**
Total Employees 7,695 orang

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

21 Januari 2015
January 21, 2015

Status Hukum
Legal Status

Perseroan Terbatas (PT)

Dasar Hukum Pendirian
Basic Law of Establishment

Akta Pendirian No. 19 Tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0003452.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015.
Deed of Establishment No. 19 dated January 21, 2015 made before Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn, Notary in Jakarta, and had been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0003452.AH.01.01 of 2015 dated January 26, 2015.

Kegiatan Usaha
Business Activities

- **Melakukan Kegiatan Usaha Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Konvensional**
- **Melakukan Kegiatan Usaha Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah**
- Conducting Financing Business Activities Based on Conventional Principles
- Conducting Financing Business Activities Based on Sharia Principles

Kepemilikan
Shareholdings

- **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (51%)**
- **PT Asco Investindo (37%)**
- **PT Tunas Ridean Tbk (12%)**

Alamat Kantor Pusat
Head Office

Menara Mandiri 1 Lantai 26-27
Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan 12190 - DKI Jakarta, Indonesia
Telepon : +62 21 5278038
Faksimili : +62 21 5278039
Situs web : www.muf.co.id
Surel : mufcare@muf.co.id
***Call Center* : 1500824**

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Zakaria Halim

Hubungan Investor
Investor Relations

Divisi Corporate Secretary
Menara Mandiri 1 Lantai 26
Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan 12190 - DKI Jakarta, Indonesia
Telepon : +62 21 5278034 (Ext. 206)
Surel : mailto:investor.relations@muf.co.id
investor.relations@muf.co.id

Jumlah Jaringan Kantor
Number of Office Network

67 **Kantor Cabang (KC)**
Branch Office
75 **Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC)**
Branch Representative from Branch Office
68 **Kantor Cabang Unit Syariah (KC-US)**
Sharia Unit Branch Office
77 **Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah (KSKC-US)**
Branch Representative from Sharia Unit Branch Offices

Media Sosial
Social Media

@mandiriutamafinance
@muf_Syariah
@MU_Finance
@mandiriutamafinance
MUFinance
MUFSyariah

SEJARAH SINGKAT
BRIEF HISTORY

PT Mandiri Utama Finance, selanjutnya disebut "Mandiri Utama Finance", "MUF" atau "Perusahaan" didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 Tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0003452.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015.

MUF merupakan anak usaha dari bank terbesar di Indonesia yaitu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bersama PT Asco Investindo dan PT Tunas Ridean Tbk. Orientasi bisnis MUF adalah peningkatan jumlah nasabah beserta pembiayaan yang signifikan, dengan dukungan otomatisasi sistem yang terintegrasi serta dengan mengedepankan pengelolaan risiko yang *prudent*.

MUF bergerak di sektor pembiayaan multiguna untuk melayani masyarakat Indonesia dengan cara pembayaran secara cicilan (angsuran) per bulan. MUF telah terdaftar serta diawasi oleh Regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Orientasi bisnis MUF adalah peningkatan jumlah nasabah beserta pembiayaan yang signifikan, dengan dukungan otomatisasi sistem yang terintegrasi.

PT Mandiri Utama Finance, also referred to "MUF", "Mandiri Utama Finance", or the "Company", was officially established on January 21, 2015 with the Deed of Establishment No. 19 dated January 21, 2015 made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, and had been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU- 0003452. AH.01.01 Year 2015 dated January 26, 2015.

MUF is a subsidiary of the largest bank in Indonesia, namely PT Bank Mandiri (Persero) Tbk together with PT Asco Investindo and PT Tunas Ridean Tbk. MUF business orientation is a significant increasing customer number and financing, with the support of an integrated automation system and by prioritizing prudent risk management.

MUF is engaged in the multipurpose financing sector to serve Indonesian people by monthly installment payment. MUF had been registered and supervised by the Financial Services Authority (FSA) Regulator through FSA Regulation No.29/POJK.05/2014 concerning the Implementation of Financing Company Business. MUF business orientation is a significant increasing customer volume and financing, with the support of an integrated automation system.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA
Name Changes Information

Sejak berdiri pada 21 Januari 2015, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama maupun perubahan status badan hukum.

Since its establishment on January 21, 2015, the Company has never changed its name or legal entity status.

BUDAYA DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

CORPORATE CULTURE AND VALUES

A — AMANAH

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

TRUSTWORTHY

Uphold the trust given.

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung-jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan hingga tuntas.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

- Fulfilling promises and commitments.
- Being responsibility for tasks, decisions, and actions implemented.
- Adhering to moral and ethical values.

K — KOMPETEN

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

COMPETENT

Continue to learn and develop capabilities.

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain untuk belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

- Improving self-competence to respond to ever-changing challenges.
- Assisting others to learn.
- Completing tasks with the best quality.

H — HARMONIS

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

HARMONIUS

Mutual care and respect for differences.

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Saling membantu dan mendukung untuk kepentingan Perusahaan.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- Respecting everyone regardless of their background.
- Love to help others.
- Building a conducive work environment.

Budaya Perusahaan merupakan panduan bertindak dan berperilaku sehari-hari bagi Manajemen dan seluruh Insan MUF dalam menjalankan tugas dan kewajibannya guna mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan. Nilai-nilai budaya perusahaan yang dikembangkan MUF yaitu nilai budaya "AKHLAK" sesuai yang tercantum pada Surat Edaran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KPS.HCE/PCE.235/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penerapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara "AKHLAK" di Lingkungan Mandiri *Group*. Nilai-nilai budaya AKHLAK tersebut diyakini bersama dan dianggap sebagai pedoman utama bagi setiap Insan MUF.

Nilai-nilai "AKHLAK" memberikan arah (*direction*) mengenai mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak, mana yang harus didorong dan diprioritaskan dan mana yang tidak. Di samping itu, nilai-nilai budaya juga harus menjadi "sumber energi" yang tak ada habisnya. Ia harus mampu memberikan motivasi bagi karyawan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Agar bisa menjadi fondasi yang kokoh bagi terbentuknya *behavior* karyawan, *values* tersebut harus mudah dihafal dan dipahami oleh seluruh karyawan, mulai dari level manajemen puncak hingga para pelaksana di level terbawah. Nilai-nilai budaya perusahaan, sebagus apapun, tidak akan bisa dijalankan secara optimal jika tidak bisa dipahami dan dimengerti oleh seluruh karyawan di bawahnya.

L

LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

LOYAL

Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State.

- Menjaga nama baik sesama pekerja, pimpinan, BUMN dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

- Maintaining the good name of fellow employees, leaders of SOE, and the state
- Willing to sacrifice to achieve larger goals.
- Obeying the leadership as long as it is not against the law and ethics.

A

ADAPTIF

Terus berinovasi & antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

ADAPTIVE

Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change.

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti. perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif.

- Quickly adapting to be better.
- Continuous improvement following technological developments
- Acting proactively.

K

KOLABORATIF

Membangun kerja sama yang sinergis.

COLLABORATIVE

Build synergistic cooperation.

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

- Providing opportunities for various parties to contribute.
- Open in working together to generate added values.
- Mobilizing the use of various resources for common goals.

Corporate Culture is a guide for daily actions and behavior for the Management and all MUF Personnel in running their duties and obligations in order to achieve goals based on Vision and Mission of the Company. The corporate cultural values developed by MUF are "AKHLAK" cultural values as stated in the Circular Letter of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KPS.HCE/PCE.235/2020 dated August 5, 2020 regarding the Implementation of the Core Values "AKHLAK" of Human Resources for State-Owned Enterprises within Mandiri Group. AKHLAK cultural values are jointly believed and considered as the main guidelines for every MUF Personnel.

"AKHLAK" values provide direction regarding what is right and what is wrong; what to do and what not to; which ones should be encouraged and prioritized as well as which ones should not. Furthermore, cultural values are also required to be an inexhaustible "source of energy". It must be able to provide motivation for employees in carrying out their daily activities. In order to become a solid foundation for the formation of employee behavior, these values are required to be easily memorized and understood by the entire employees, from the top management level to the implementers at the lowest level. Corporate cultural values, no matter how good they are, will not be able to be carried out optimally in case they are unable to be understood by all employees under them.

MAKNA LOGO PERUSAHAAN
THE MEANING OF COMPANY LOGO

Mandiri Utama Finance merupakan anak usaha dari Bank Mandiri. Dalam penerapan logo perusahaan, MUF menggunakan logo entitas induk, Bank Mandiri yang menyiratkan:

Mandiri Utama Finance is a subsidiary of Bank Mandiri. In applying the Company logo, MUF uses the logo of the parent Company, Bank Mandiri which implies the following:

mandiri
utama finance

GELOMBANG EMAS CAIR

Lambang identitas dirancang dalam bentuk gelombang emas cair yang bermakna harapan sejahtera bagi nasabah bersama Mandiri. Posisi lambang identitas di atas lambang tulisan bersamaan dengan bentuk gelombang menyiratkan arti kemajuan dan kemakmuran.

LIQUID GOLD WAVE

Identity symbol is designed in the form of a liquid gold wave which means the hope of prosperity for the customers with Mandiri. The position of the identity symbol above the written symbol along with the wave shape implies the meaning of progress and prosperity.

mandiri

LOGO "MANDIRI"

Logo "mandiri" terdiri dari *logotype* dan *logomark*. Pemilihan huruf kecil pada lambang tulisan Mandiri mencerminkan pribadi yang ramah dan aspirasi lebih dekat kepada nasabah serta tetap sederhana.

"MANDIRI" LOGO

"mandiri" logo consists of logotype and logomark. The choice of lowercase letters on the Mandiri writing symbol reflects a friendly personality and aspirations to be closer to the customers while remaining simple.

utama finance

LOGO "UTAMA FINANCE"

Logo atau tulisan "utama finance" sebagai nama perusahaan anak dengan menggunakan *font type* yang sama. Warna merah dipilih untuk mengisyaratkan semangat dan fokus dalam mengejar tujuan-tujuan Perusahaan.

"UTAMA FINANCE" LOGO

"utama finance" logo or writing as the name of the subsidiary Company using the same font type. The red color was chosen to indicate passion and focus in pursuing goals of the Company.

BIDANG USAHA
BUSINESS FIELDS

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR SERTA KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar yang terakhir diubah melalui Akta No 30 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk melakukan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Untuk itu, Perusahaan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:

1. Melakukan Kegiatan Usaha Pembiayaan berdasarkan prinsip Konvensional:
   a. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara:
      - Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
      - Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*) yang dilaksanakan dengan cara sewa pembiayaan (*Finance Lease*);
      - Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring, With Recourse*);

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND BUSINESS ACTIVITIES UNDERTAKEN

Based on Article 3 of the Articles of Association which was last amended through Deed No. 30 dated March 20, 2021, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company purposes and objectives are to finance the procurement of goods and/or services. Therefore, the Company performs business activities based on the Articles of Association as follows:

1. Conducting financing business activities based on Conventional principles:
   a. Investment Financing is conducted by:
      - Finance Lease;
      - Sale and Leaseback conducted by Finance Lease;
      - Factoring by Providing Guarantees from the Seller of Receivables (Factoring, With Recourse);

- Pembiayaan Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
- Pembiayaan Proyek;
- Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau;
- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan cara:
- Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*) yang dilaksanakan dengan cara sewa pembiayaan (*Finance Lease*);
- Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
- Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
- Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

c. Pembiayaan Multiguna yang dilakukan dengan cara:
- Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
- Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
- Fasilitas Dana; dan/atau
- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Melakukan Kegiatan Usaha Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah:

a. Kegiatan Pembiayaan Jual Beli dengan menggunakan akad:
- *Murabahah*;
- *Salam*; dan/atau
- *Istishna*.

b. Kegiatan Pembiayaan Investasi dengan menggunakan akad:
- *Mudharabah*;
- *Musyarakah*;
- *Mudharabah Musyarakah*; dan/atau
- *Musyarakah Mutanaqisho*.

c. Kegiatan Pembiayaan Jasa dengan menggunakan akad:
- *Ijarah*;
- *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*;
- *Hawalah* atau *Hawalah Bil Ujrah*;
- *Wakalah* atau *Wakalah Bil Ujrah*;
- *Kafalah* atau *Kafalah bil Ujrah*;
- *Ju'alah*; dan/atau
- *Qardh*.

- Financing with installment payments;
- Project Financing;
- Infrastructure Financing; and/or;
- Other financing after first obtaining approval from the Financial Services Authority.

b. Working Capital Financing is conducted by:
- Sale and Leaseback conducted by Finance Lease;
- Factoring by Providing Guarantees from the Seller of Receivables (Factoring, With Recourse);
- Factoring Without Recourse;
- Business Capital Facility; and/or
- Other financing after first obtaining approval from the Financial Services Authority.

c. Multipurpose Financing which is done by:
- Finance Lease;
- Purchases with Installment Payments;
- Funding Facility; and/or
- Other financing after first obtaining approval from the Financial Services Authority.

2. Conducting Financing Business Activities based on Sharia principles:

a. Buying and selling financing activities using contracts:
- Murabahah;
- Salam; and/or
- Istishna.

b. Investment Financing Activities using contracts:
- Mudharabah;
- Musyarakah;
- Mudharabah Musyarakah; and/or
- Musyarakah Mutanaqisho.

c. Service Financing activities by using a contract:
- Ijarah;
- Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
- Hawalah or Hawalah Bil Ujrah;
- Wakalah or Wakalah Bil Ujrah;
- Kafalah or Kafalah bil Ujrah;
- Ju'alah; and/or
- Qardh.

3. Pembiayaan lain di luar kegiatan dalam butir 1 dan 2 setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Perusahaan Pembiayaan Konvensional, mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara Konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan Konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
5. Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, mencakup kegiatan unit kerja dari kantor pusat perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan Syariah.

3. Other financing outside of the activities in points 1 and 2 after obtaining prior approval from the Financial Services Authority.
4. Conventional Financing Companies, includes Conventionally held financing Company businesses, with business activities covering the financing of goods and/or services, namely: investment financing; working capital financing; multipurpose financing; and/or other financing business activities based on the approval of the Financial Services Authority. In addition to these business activities, Conventional finance companies in this group may carry out operating leases and/or fee-based activities as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations in the financial services sector.
5. Financing Company Sharia Business Unit, includes the activities of work units from the finance Company head office that carry out Sharia financing activities and/or function as the main office of the office that carries out Sharia financing.

PRODUK DAN JASA

PRODUCT AND SERVICES

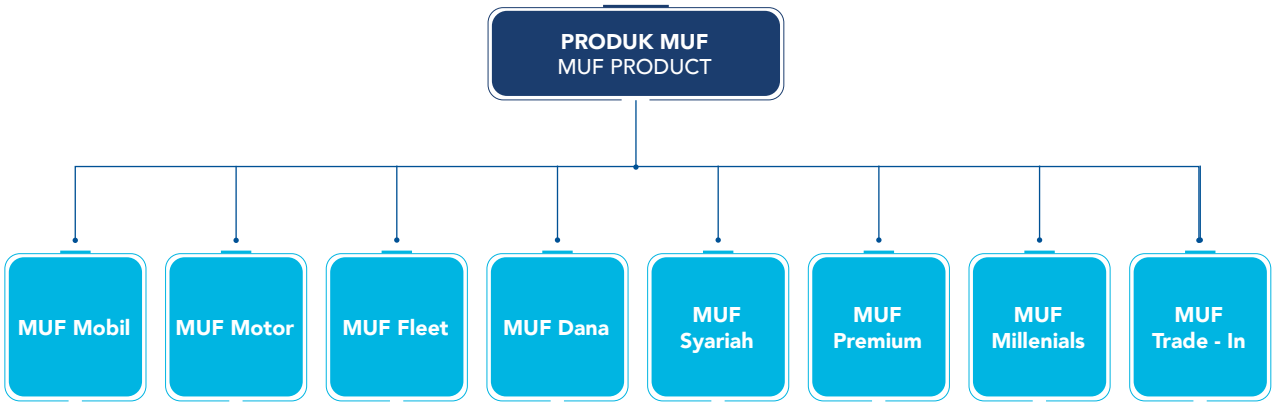

MUF merupakan salah satu perusahaan pembiayaan dengan produk terlengkap di pasar pembiayaan otomotif, serta jaringan distribusi yang luas. Lini produk MUF meliputi pembiayaan mobil dan motor, baik baru maupun bekas, serta dana, pembiayaan Syariah dan pembiayaan *fleet*. Jaringan distribusi MUF yang luas meliputi *dealer*, *showroom* dan mitra rekanan jaringan Bank Mandiri group, jaringan Bank Syariah Indonesia serta jaringan pemasaran dan mitra digital MUF.

MUF is one of the multi-finance companies with the most complete products in the automotive financing market, as well as an extensive distribution network. MUF product line includes car and motorcycle financing, both new and used, as well as fund financing, Sharia financing, and fleet financing. MUF extensive distribution network includes dealers, showrooms and partners of Mandiri group network, Bank Syariah Indonesia network, as well as digital marketing network and muf digital partners.

Produk Products	**Keterangan** Description
Pembiayaan Mobil Baru New Car Financing	Industri otomotif Indonesia, khususnya mobil baru memiliki pasar yang sangat luas dan bertumbuh. MUF mendukung perkembangan Industri ini dengan menghadirkan produk Pembiayaan Mobil Baru yang mencakup mayoritas merek otomotif di Indonesia, membiayai mobil penumpang maupun mobil niaga. MUF hadir dengan syarat kredit yang mudah, angsuran yang ringan serta proses yang cepat. Indonesian automotive industry, especially new cars, has highly broad and growing market. MUF supports the development of this industry by presenting New Car Financing products that cover the majority of automotive brands in Indonesia, financing both passenger and commercial cars. MUF is here with easy credit terms, light installments and fast process.
Pembiayaan Mobil Bekas Used Car Financing	MUF menghadirkan Pembiayaan Mobil Bekas untuk menjawab kebutuhan masyarakat untuk pembelian mobil bekas. MUF membiayai mayoritas merek otomotif yang hadir di Indonesia, dengan usia kendaraan sampai 12 tahun. MUF memberikan kemudahan bagi calon konsumen melalui persyaratan kredit yang mudah, proses yang cepat serta suku bunga yang bersaing. MUF presents Used Car Financing to answer people's needs for buying used cars. MUF finances the majority of automotive brands present in Indonesia, with vehicle age of up to 12 years. MUF facilitates potential customers through easy credit terms, fast process and competitive interest rates.
Pembiayaan Motor Baru New Motorcycles Financing	Sepeda motor menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki masyarakat saat ini. Aneka model dan varian motor terus bermunculan di Indonesia. MUF menghadirkan Pembiayaan Motor Baru sebagai solusi, dengan cakupan mayoritas merek otomotif motor di Indonesia, membiayai baik sepeda motor regular maupun sepeda motor besar. MUF memberikan keuntungan berupa syarat kredit yang mudah, angsuran yang ringan serta proses yang cepat. Motorcycles are a must-have for current society. Various models and variants of motorcycles continue to appear in Indonesia. MUF presents New Motorcycle Financing as solution covering the majority of automotive motorcycle brands in Indonesia, financing both regular motorcycles and large motorcycles. MUF provides benefits in the form of easy credit terms, light installments and fast process.
Pembiayaan Motor Bekas Used Motorcycles Financing	MUF menghadirkan Pembiayaan Motor Bekas untuk menjawab kebutuhan masyarakat untuk pembelian motor bekas. MUF membiayai kendaraan motor bekas dengan usia sampai dengan 8 tahun, membiayai baik motor regular maupun motor besar. MUF memberikan kemudahan dalam proses kredit melalui persyaratan kredit yang ringan, angsuran ringan serta proses yang cepat. MUF presents Used Motorcycle Financing to answer people's need for buying used motorcycles. MUF finances used motorbikes up to 8 years old, financing both regular motorbikes and large motorbikes. MUF provides convenience in the credit process through light credit terms, light installments and fast process.
Pembiayaan Dana Fund Financing	MUF menghadirkan pembiayaan multiguna berupa dana tunai dengan jaminan BPKB sebagai solusi kebutuhan dana bagi konsumen. Berlaku baik untuk jaminan kendaraan mobil ataupun kendaraan motor, dengan usia kendaraan sampai 12 tahun untuk mobil dan 8 tahun untuk motor. Pembiayaan dana dari MUF memberikan persyaratan yang ringan, proses yang cepat serta suku bunga yang bersaing. MUF presents multipurpose financing in the form of cash funds with BPKB guarantees as solution to consumer funding needs. Valid for both car and motorcycle guarantees, with vehicle age of up to 12 years for cars and 8 years for motorcycles. Fund financing from MUF provides light requirements, fast processing and competitive interest rates.

Produk Products	**Keterangan** Description
Mandiri KKB	Mandiri Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) adalah fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang dihadirkan khusus untuk Nasabah Bank Mandiri. Mandiri KKB disalurkan secara eksklusif melalui jaringan cabang Bank Mandiri di seluruh Indonesia. Produk mencakup pembiayaan mobil baru, mobil bekas, motor baru, motor bekas serta pembiayaan dana. Keunggulan dari produk ialah suku bunga yang sangat ringan, proses yang cepat dan mudah. Mandiri KKB dapat dinikmati nasabah Bank Mandiri melalui jaringan cabang Bank Mandiri serta melalui aplikasi digital Livin yang dimiliki Bank Mandiri. Mandiri Motor Vehicle Credit (KKB) is motor vehicle financing facility that is specially presented forBank Mandiri customers. Mandiri KKB is distributed exclusively through Bank Mandiri branch network throughout Indonesia. Products include financing for new cars, used cars, new motorcycles, used motorcycles and fund financing. Products advantages are very low interest rates, fast and easy processes. Mandiri KKB can be enjoyed by Bank Mandiri customers through Bank Mandiri branch network and through Livin digital application owned by Bank Mandiri
Pembiayaan Syariah Sharia Financing	MUF Syariah merupakan produk Pembiayaan Syariah MUF. MUF Syariah menyalurkan pembiayaan, baik barang maupun jasa dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah yang terhindar dari *riba* (sistem bunga), *maisir* (transaksi spekulatif), *gharar* (ketidakpastian dan ketidakjelasan akad) serta objek transaksi yang diharamkan syariat Islam. MUF Syariah membiayai mobil dan motor baik baru maupun bekas untuk konsumen dengan akad *Murabahah*. MUF Syariah akan menegaskan harga beli (harga perolehan) kepada konsumen serta marjin sebagai keuntungan MUF Syariah. Selanjutnya konsumen melakukan pembayaran secara angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati. MUF Syariah is MUF Sharia Financing product. MUF Syariah distributes financing for both goods and services using Sharia principles that are protected from usury (interest system), maisir (speculative transactions), gharar (uncertainty and ambiguity of contracts) and transaction objects that are forbidden by Islamic law. MUF Syariah finances both new and used cars and motorcycles for consumers under a Murabahah contract. MUF Syariah will confirm the purchase price (acquisition price) to the consumers and the margin as profit for MUF Syariah. Furthermore, consumers make payments in installments according to the agreed time period.
Pembiayaan *Fleet* Fleet Financing	Pembiayaan *Fleet* adalah pembiayaan otomotif yang diberikan untuk segmen korporasi dengan jumlah unit pembelian yang besar atau nilai pinjaman yang besar. Pembiayaan *Fleet* dapat membiayai mobil dan motor baik baru maupun bekas. MUF memberikan suku bunga yang kompetitif serta proses yang cepat. Fleet financing is automotive financing provided for the corporate segment with a large number of purchasing units or a large loan amount. Fleet financing can finance both new and used cars and motorbikes. MUF provides competitive interest rates and fast processing
BSI OTO	BSI OTO merupakan produk Pembiayaan Syariah berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI OTO disalurkan kepada konsumen BSI di seluruh Indonesia, melalui jaringan cabang BSI. BSI OTO membiayai mobil baru, mobil bekas serta motor baru dengan prinsip Syariah. Prinsip Syariah tersebut adalah terhindar dari *riba* (sistem bunga), *maisir* (transaksi spekulatif), *gharar* (ketidakpastian dan ketidakjelasan akad) serta objek transaksi yang diharamkan syariat Islam. Keunggulan BSI OTO ialah marjin yang sangat bersaing, serta proses yang cepat. BSI OTO is Sharia Financing product in collaboration with Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI OTO is distributed to BSI consumers throughout Indonesia, through the BSI branch network. BSI OTO finances new cars, used cars and new motorcycles with Sharia principles. The Sharia principle is to avoid usury (interest system), maisir (speculative transactions), gharar (uncertainty and ambiguity) of contracts and transaction objects that are forbidden by Islamic law. BSI OTO advantages are greatly competitive margins, as well as fast process.

Produk Products	**Keterangan** Description
Program Khusus MUF Premium MUF Premium Special Program	MUF Premium merupakan program pemasaran khusus yang dihadirkan MUF untuk menyasar segmen konsumen kendaraan premium. MUF Premium membiayai mobil baik baru maupun bekas yang berkategori premium, serta mencakup mayoritas merek kendaraan premium di Indonesia. Program MUF Premium memberikan kemudahan dalam bentuk skema pembiayaan *smart payment*, yaitu skema pembiayaan, di mana konsumen hanya perlu mencicil sebagian pokok hutang, dan sisanya dibayarkan di akhir periode angsuran. Program MUF Premium juga memberikan penawaran bunga yang sangat ringan, proses yang cepat, serta bonus layanan darurat 24 jam bagi konsumen. MUF Premium is special marketing program presented by MUF to target premium vehicle consumer segment. MUF Premium finances both new and used cars in the premium category, and covers the majority of premium vehicle brands in Indonesia. MUF Premium program provides convenience in the form of smart payment financing scheme, which is financing scheme where consumers only need to repay a portion of the principal debt, and the rest is paid at the end of the installment period. MUF Premium program also offers very low interest rates, fast process, and 24-hours emergency service bonus for consumers.
Program Khusus MUF Millennials MUF Millennials Special Program	MUF Millennials merupakan program pemasaran khusus yang dihadirkan MUF untuk memberikan solusi bagi segmen konsumen milenial di Indonesia. MUF Millennials memberikan kemudahan berupa skema pembiayaan *stepping payment* yaitu skema pembiayaan, di mana angsuran dimulai lebih ringan di masa awal tenor, dan meningkat secara bertahap sampai akhir tenor. MUF Millennials juga memberikan kemudahan berupa tenor yang lebih panjang yaitu 5 tahun untuk motor dan 7 tahun untuk mobil. MUF Millennials is special marketing program presented by MUF to provide solutions for millennial consumer segment in Indonesia. MUF Millennials provides convenience in the form of a stepping payment financing scheme as financing scheme in which the installments start at lighter rate at the beginning of the tenor, and increase gradually until the end of the tenor. MUF Millennials also provides convenience in the form of longer tenor, namely 5 years for motorbikes and 7 years for cars.

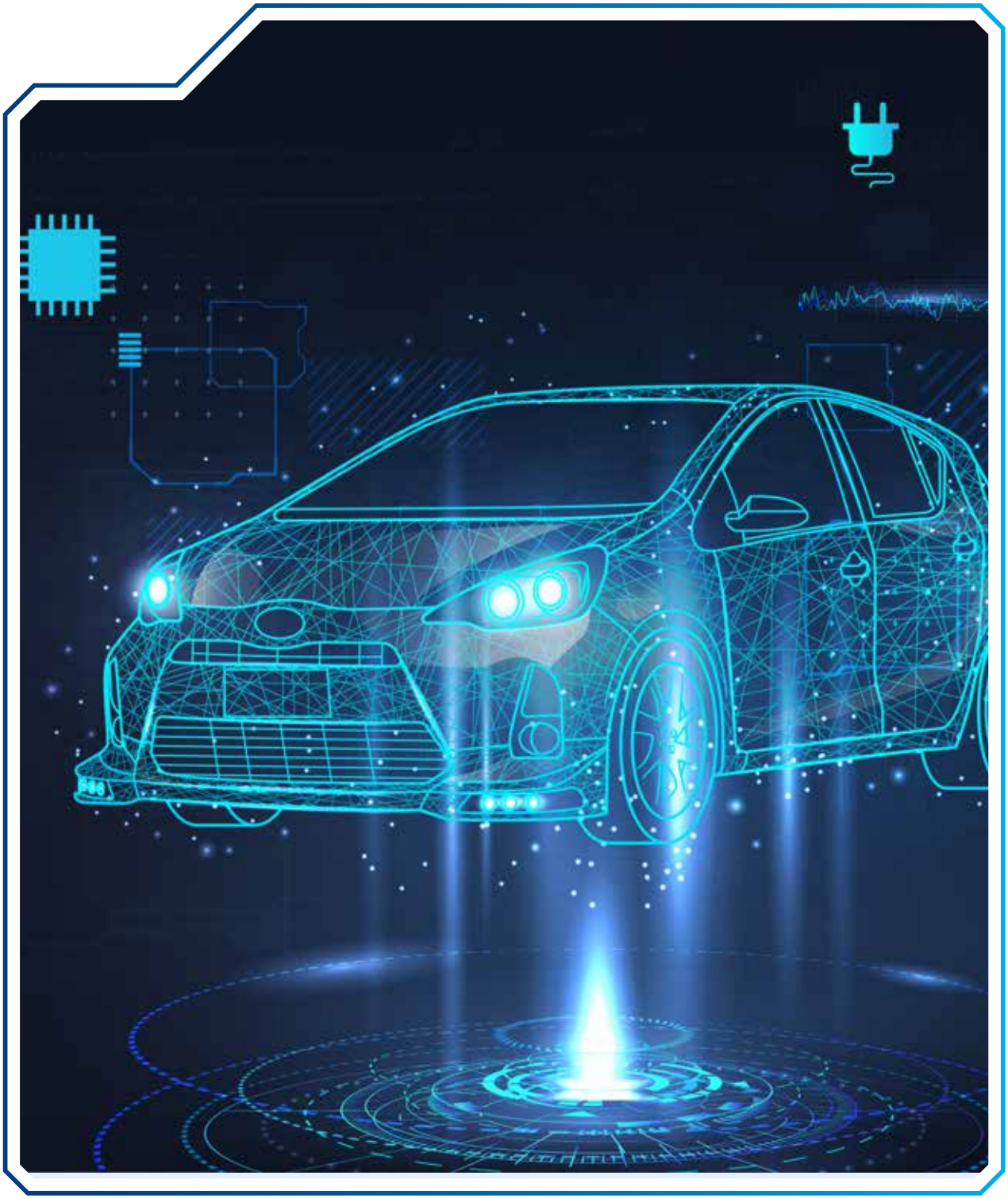

WILAYAH OPERASIONAL DAN DAFTAR JARINGAN KANTOR

OPERATIONAL AREAS AND LIST OF OFFICE NETWORKS

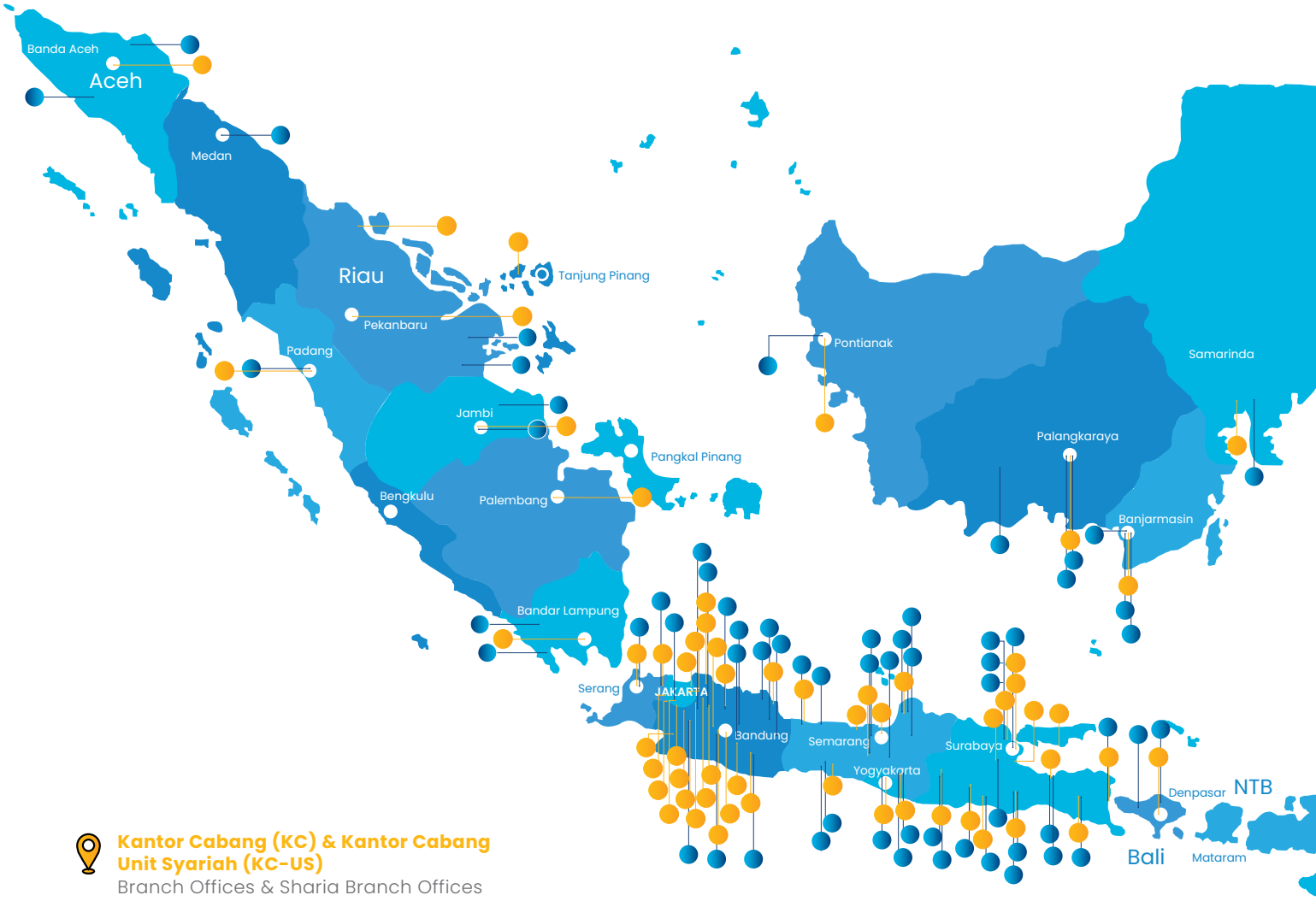

Kantor Cabang (KC) & Kantor Cabang Unit Syariah (KC-US)
Branch Offices & Sharia Branch Offices

Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC) & Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah (KSKC-US)
Branch Representative from The Branch Offices & Branch Representative from The Sharia Branch Offices

Hingga akhir tahun 2022, Mandiri Utama Finance memiliki izin usaha Konvensional sebanyak 67 Kantor Cabang (KC) dan 75 Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC) dan izin usaha dengan prinsip Syariah sebanyak 68 Kantor Cabang Unit Syariah (KC-US) dan 77 kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah (KSKC-US).

Until the end of 2022, Mandiri Utama Finance has Conventional business licenses for 67 Branch Offices (KC) and 75 Offices Other than Branch Offices (KSKC) and business licenses with Sharia principles for 68 Sharia Unit Branch Offices (KC-US) and 77 offices other than Offices Sharia Unit Branch (KSKC-US).

No.	Wilayah Region	Nama Kantor Office Name	Konvensional Conventional	Syariah Sharia
			Jenis Kantor Office Type	Jenis Kantor Office Type
1	Jabodetabekser	Kota Jakarta Utara (Kelapa Gading) North Jakarta City (Kelapa Gading)	KC	KC-US
2	Jabodetabekser	Kota Jakarta Selatan (Duren Tiga) South Jakarta City (Duren Tiga)	KC	KC-US
3	Jabodetabekser	Kab. Bekasi (Cikarang) Regency. Bekasi (Cikarang)	KC	KC-US
4	Jabodetabekser	Kota Tangerang Tangerang City	KC	KC-US
5	Jabodetabekser	Kab. Tangerang - Kab. Tangerang (Cikupa) Tangerang District-Tangerang District (Cikupa)	KSKC	KSKC-US
6	Jabodetabekser	Kota Bogor Bogor City	KC	KC-US
7	Jabodetabekser	Kota Bekasi Bekasi City	KC	KC-US
8	Jabodetabekser	Kota Depok Depok City	KC	KC-US
9	Jabodetabekser	Kota Serang Serang City	KC	KC-US
10	Jabodetabekser	Kota Serang - Kota Cilegon Serang City- City of Cilegon	KSKC	KSKC-US
11	Jabodetabekser	Kota Jakarta Barat (Kebon Jeruk) West Jakarta City (Kebon Jeruk)	KC	KC-US
12	Jabodetabekser	Kab. Bogor (Cibubur) Bogor District (Cibubur)	KC	KC-US
13	Jabodetabekser	Kota Tangerang II (Ciledug) Tangerang City II (Ciledug)	KC	KC-US
14	Jabodetabekser	Kota Tangerang Selatan (Ciputat) South Tangerang City (Ciputat)	KC	KC-US
15	Jabodetabekser	Kota Bekasi II (Pondok Gede) Bekasi City II (Pondok Gede)	KC	KC-US
16	Jabodetabekser	Kota Jakarta Timur (Matraman) East Jakarta City (Matraman)	KC	KC-US
17	Jabodetabekser	Kab. Bekasi II (Cibitung) Bekasi II District (Cibitung)	KC	KC-US
18	Jabodetabekser	Kab. Bogor II (Cibinong) Bogor II District (Cibinong)	KC	KC-US
19	Jawa Barat West Java	Kota Bandung Bandung City	KC	KC-US
20	Jawa Barat West Java	Kota Bandung - Kab. Bandung (Cileunyi/Rancaekek) Bandung City - Bandung (Cileunyi/Rancaekek) Disctrict	KSKC	KSKC-US
21	Jawa Barat West Java	Kota Bandung - Kab. Sumedang Bandung City – Sumedang Disctrict	KSKC	KSKC-US

No.	Wilayah Region	Nama Kantor Office Name	Konvensional Conventional	Syariah Sharia
			Jenis Kantor Office Type	Jenis Kantor Office Type
22	Jawa Barat West Java	Kota Cirebon Cirebon city	KC	KC-US
23	Jawa Barat West Java	Kota Cirebon - Kab. Kuningan Cirebon City – Kuningan District	KSKC	KSKC-US
24	Jawa Barat West Java	Kota Cirebon - Ciledug Cirebon City - Ciledug	KSKC	KSKC-US
25	Jawa Barat West Java	Kota Cirebon - Kab. Indramayu (Jatibarang) Cirebon City- Indramayu District (Jatibarang)	KSKC	KSKC-US
26	Jawa Barat West Java	Kota Cirebon - Kab. Majalengka Cirebon City– Majalengka District	KSKC	KSKC-US
27	Jawa Barat West Java	Kab. Karawang Karawang District	KC	KC-US
28	Jawa Barat West Java	Kota Tasikmalaya Tasikmalaya City	KC	KC-US
29	Jawa Barat West Java	Kota Tasikmalaya - Kab. Ciamis Tasikmalaya City- Ciamis District	KSKC	KSKC-US
30	Jawa Barat West Java	Kota Tasikmalaya - Kab. Pangandaran Tasikmalaya City- Pangandaran District	KSKC	KSKC-US
31	Jawa Barat West Java	Kota Sukabumi Sukabumi City	KC	KC-US
32	Jawa Barat West Java	Kab. Karawang II (Cikampek) Karawang II District (Cikampek)	KC	KC-US
33	Jawa Barat West Java	Kab. Karawang II (Cikampek) - Kab. Purwakarta Karawang II District (Cikampek) - Purwakarta District	KSKC	KSKC-US
34	Jawa Barat West Java	Kab. Subang Subang District	KC	KC-US
35	Jawa Barat West Java	Kab. Subang - Kab. Subang (Pamanukan) Subang District – Subang District (Pamanukan)	KSKC	KSKC-US
36	Jawa Barat West Java	Kota Cimahi Cimahi City	KC	KC-US
37	Jawa Barat West Java	Kab. Bandung (Cimahi/Bandung 2) - Soreang Bandung District (Cimahi/Bandung 2) - Soreang	KSKC	KSKC-US
38	Jawa Barat West Java	Kota Garut Garut City	KC	KC-US
39	Jawa Barat West Java	Kab. Cianjur Cianjur District	KC	KC-US
40	Jawa Barat West Java	Kab. Cianjur - Kab. Cianjur (Sukanagara) Cianjur District - Cianjur District (Sukanagara)	KSKC	KSKC-US
41	Jawa Tengah Central Java	Kota Semarang Semarang City	KC	KC-US
42	Jawa Tengah Central Java	Kota Semarang - Kab. Grobogan (Purwodadi) Semarang City - Grobogan District (Purwodadi)	KSKC	KSKC-US

No.	Wilayah Region	Nama Kantor Office Name	Konvensional Conventional Jenis Kantor Office Type	Syariah Sharia Jenis Kantor Office Type
43	Jawa Tengah Central Java	Kota Semarang - Kota Salatiga Semarang City- Salatiga City	KSKC	KSKC-US
44	Jawa Tengah Central Java	Kota Semarang - Kab. Kendal Semarang City- Kendal District	KSKC	KSKC-US
45	Jawa Tengah Central Java	Kota Yogyakarta Yogyakarta City	KC	KC-US
46	Jawa Tengah Central Java	Kota Yogyakarta - Gunung Kidul (Wonosari) Yogyakarta City – Gunung Kidul (Wonosari)	KSKC	KSKC-US
47	Jawa Tengah Central Java	Kab. Kudus Kudus District	KC	KC-US
48	Jawa Tengah Central Java	Kab. Kudus - Kab. Rembang Kudus District - Rembang District	KSKC	KSKC-US
49	Jawa Tengah Central Java	Kab. Kudus - Kab. Jepara Kudus District - Jepara District	KSKC	KSKC-US
50	Jawa Tengah Central Java	Kota Pekalongan Pekalongan City	KC	KC-US
51	Jawa Tengah Central Java	Kota Pekalongan - Pemalang Pekalongan City - Pemalang	KSKC	KSKC-US
52	Jawa Tengah Central Java	Kota Tegal Tegal City	KC	KC-US
53	Jawa Tengah Central Java	Kota Tegal - Kab. Brebes (Ketanggungan) Tegal City - Brebes District (Ketanggungan)	KSKC	KSKC-US
54	Jawa Tengah Central Java	Kab. Sukoharjo (Solo) Sukoharjo District (Solo)	KC	KC-US
55	Jawa Tengah Central Java	Kab. Sukoharjo (Solo) - Kab. Klaten Sukoharjo District (Solo) – Klaten District	KSKC	KSKC-US
56	Jawa Tengah Central Java	Kab. Sukoharjo (Solo) - Kab. Sragen Sukoharjo District (Solo) – Sragen District	KSKC	KSKC-US
57	Jawa Tengah Central Java	Kab. Banyumas (Purwokerto) Banyumas District (Purwokerto)	KC	KC-US
58	Jawa Tengah Central Java	Kab. Banyumas (Purwokerto) - Kab. Cilacap Banyumas District (Purwokerto) -Cilacap District	KSKC	KSKC-US
59	Jawa Tengah Central Java	Kab. Banyumas (Purwokerto) - Kab. Banjarnegara Banyumas District (Purwokerto) - Banjarnegara District	KSKC	KSKC-US
60	Jawa Tengah Central Java	Kota Magelang Magelang City	KC	KC-US
61	Jawa Tengah Central Java	Kota Magelang - Kab. Purworejo Magelang City – Purworejo District	KSKC	KSKC-US
62	Jawa Timur East Java	Kota Surabaya 1 Surabaya 1 City	KC	KC-US
63	Jawa Timur East Java	Surabaya - Kab. Bangkalan Surabaya – Bangkalan District	KSKC	KSKC-US

No.	Wilayah Region	Nama Kantor Office Name	Konvensional Conventional	Syariah Sharia
			Jenis Kantor Office Type	Jenis Kantor Office Type
64	Jawa Timur East Java	Kota Madiun Madiun City	KC	KC-US
65	Jawa Timur East Java	Kota Madiun - Kab. Ponorogo Madiun City – Ponorogo District	KSKC	KCKC-US
66	Jawa Timur East Java	Kota Madiun - Kab. Pacitan Madiun City – Pacitan District	KSKC	KSKC-US
67	Jawa Timur East Java	Kab. Jember Jember District	KC	KC-US
68	Jawa Timur East Java	Kab. Jember - Kab. Situbondo Jember District – Situbondo District	KSKC	KSKC-US
69	Jawa Timur East Java	Kota Malang Malang City	KC	KC-US
70	Jawa Timur East Java	Kota Malang - Kab. Malang (Kepanjen) Malang City- Malang District (Kepanjen)	KSKC	KSKC-US
71	Jawa Timur East Java	Kota Malang - Kota Batu Malang City - Batu City	KSKC	KSKC-US
72	Jawa Timur East Java	Kab. Kediri Kediri District	KC	KC-US
73	Jawa Timur East Java	Kab. Kediri - Kab. Nganjuk Kediri District – Nganjuk District	KSKC	KSKC-US
74	Jawa Timur East Java	Kab. Mojokerto Mojokerto District	KC	KC-US
75	Jawa Timur East Java	Kab. Mojokerto - Kab. Jombang Mojokerto District – Jombang District	KSKC	KSKC-US
76	Jawa Timur East Java	Kota Surabaya 2 Surabaya 2 City	KC	KC-US
77	Jawa Timur East Java	Kab. Gresik Gresik District	KC	KC-US
78	Jawa Timur East Java	Kab. Gresik - Kab. Bojonegoro Gresik District - Bojonegoro District	KSKC	KSKC-US
79	Jawa Timur East Java	Kab. Gresik - Kab. Tuban Gresik Disctrict- Tuban Disctrict	KSKC	KSKC-US
80	Jawa Timur East Java	Kab. Gresik - Kab. Lamongan Gresik Disctrict – Lamongan Disctrict	KSKC	KSKC-US
81	Jawa Timur East Java	Kab. Sidoarjo Sidoarjo Disctrict	KC	KC-US
82	Jawa Timur East Java	Kab. Banyuwangi Banyuwangi Disctrict	KC	KC-US
83	Jawa Timur East Java	Kab. Banyuwangi - Kab. Banyuwangi (Genteng) Banyuwangi District -.Banyuwangi (Genteng) District	KSKC	KSKC-US
84	Jawa Timur East Java	Kota Blitar Blitar City	KC	KC-US

No.	Wilayah Region	Nama Kantor Office Name	Konvensional Conventional Jenis Kantor Office Type	Syariah Sharia Jenis Kantor Office Type
85	Jawa Timur East Java	Kota Blitar - Tulung Agung Blitar City - Tulung Agung	KSKC	KSKC-US
86	Jawa Timur East Java	Kab. Probolinggo Probolinggo District	KC	KC-US
87	Jawa Timur East Java	Kab. Probolinggo - Kab. Lumajang Probolinggo District- Lumajang District	KSKC	KSKC-US
88	Jawa Timur East Java	Kab. Probolinggo - Kota Pasuruan Probolinggo District – Pasuruan City	KSKC	KSKC-US
89	Jawa Timur East Java	Kota Pamekasan Pamekasan City	KC	KC-US
90	BNT	Kota Denpasar (Bali) Denpasar (Bali) City	KC	KC-US
91	BNT	Kota Denpasar (Bali) - Kab. Gianyar Denpasar (Bali) City – Gianyar District	KSKC	KSKC-US
92	BNT	Kota Denpasar (Bali) - Kab. Mataram Denpasar (Bali) City – Mataram District	KSKC	KSKC-US
93	Sumatera	Kota Palembang Palembang City	KC	KC-US
94	Sumatera	Kota Palembang - Kab Musi Banyuasin (Sekayu) Palembang City – Musi Banyuasin District (Sekayu)	KSKC	KSKC-US
95	Sumatera	Kota Palembang - Kab. Ogan Komering Ulu (Baturaja) Palembang City - Ogan Komering Ulu District (Baturaja)	KSKC	KSKC-US
96	Sumatera	Kota Palembang - Kab. Muara Enim Palembang City - Muara Enim District	KSKC	KSKC-US
97	Sumatera	Kota Medan Medan City	KC	KC-US
98	Sumatera	Kota Medan - Kota Pematang Siantar Medan City - Pematang Siantar City	KSKC	KSKC-US
99	Sumatera	Kota Medan - Kab. Labuhanbatu (Rantau Selatan) Medan City – Labuhanbatu (South Rantau)	KSKC	KSKC-US
100	Sumatera	Kota Pekanbaru Pekanbaru City	KC	KC-US
101	Sumatera	Kota Pekanbaru - Kab. Rokan Hulu (Ujung Batu) Pekanbaru City – Rokan District (Ujung Batu)	KSKC	KSKC-US
102	Sumatera	Kota Pekanbaru - Kab. Pelalawan (Pangkalan Kerinci Timur) Pekanbaru City – Pelalawan District Pangkalan Kerinci Timur)	KSKC	KSKC-US
103	Sumatera	Kota Pekanbaru - Kab. Indragiri Hulu (Rengat Barat) Pekanbaru City - Indragiri Hulu District (West Rengat)	KSKC	KSKC-US
104	Sumatera	Kota Banda Aceh Banda Aceh City	N/A	KC-US
105	Sumatera	Kota Banda Aceh - Kab. Meulaboh Banda Aceh City – Meulaboh District	N/A	KSKC-US

No.	Wilayah Region	Nama Kantor Office Name	Konvensional Conventional Jenis Kantor Office Type	Syariah Sharia Jenis Kantor Office Type
106	Sumatera	Kota Banda Aceh - Kota Lhokseumawe Banda Aceh City - Lhokseumawe City	N/A	KSKC-US
107	Sumatera	Kota Padang Padang City	KC	KC-US
108	Sumatera	Kota Padang - Kab. Agam (Bukit Tinggi) Padang City - Agam District (Bukit Tinggi)	KSKC	KSKC-US
109	Sumatera	Kota Dumai Dumai City	KC	KC-US
110	Sumatera	Kota Dumai - Kab. Bengkalis (Duri) Dumai City - Bengkalis District (Duri)	KSKC	KSKC-US
111	Sumatera	Kota Dumai - Kab. Rokan Hilir (Bagan Batu) Dumai City- Rokan Hilir District (Bagan Batu)	KSKC	KSKC-US
112	Sumatera	Kota Bandar Lampung Bandar Lampung City	KC	KC-US
113	Sumatera	Kota Bandar Lampung - Kab. Lampung Tengah (Bandar Jaya) Bandar Lampung City – Central Lampung District (Bandar Jaya)	KSKC	KSKC-US
114	Sumatera	Kota Bandar Lampung - Kab. Pringsewu Bandar Lampung City – Pringsewu District	KSKC	KSKC-US
115	Sumatera	Kota Jambi Jambi City	KC	KC-US
116	Sumatera	Kota Jambi - Kab. Merangin (Bangko) Jambi City- Merangin District (Bangko)	KSKC	KSKC-US
117	Sumatera	Kota Jambi - Kab. Tanjung Jabung Barat (Merlung) Jambi City- West Tanjung Jabung District (Merlung)	KSKC	KSKC-US
118	Sumatera	Kota Batam Batam City	KC	KC-US
119	Sulawesi	Kota Makassar Makassar City	KC	KC-US
120	Sulawesi	Kota Kendari Kendari City	KC	KC-US
121	Sulawesi	Kota Kendari - Kota Baubau Kendari City – Baubau City	KSKC	KSKC-US
122	Sulawesi	Kota Kendari - Kab. Kolaka Kendari City – Kolaka District	KSKC	KSKC-US
123	Sulawesi	Kota Kendari - Kab. Morowali Kendari City – Morowali District	KSKC	KSKC-US
124	Sulawesi	Kota Parepare Parepare City	KC	KC-US
125	Sulawesi	Kota Parepare - Kab. Wajo (Sengkang) Parepare City – Wajo District (Sengkang)	KSKC	KSKC-US
126	Sulawesi	Kab. Bone Bone District	KC	KC-US

No.	Wilayah Region	Nama Kantor Office Name	Konvensional Conventional Jenis Kantor Office Type	Syariah Sharia Jenis Kantor Office Type
127	Sulawesi	Kab. Bone - Kota Bulukumba Bone District – Bulukumba City	KSKC	KSKC-US
128	Sulawesi	Kota Palopo Palopo City	KC	KC-US
129	Sulawesi	Kota Palopo - Kab. Luwu Timur (Mangkutana) Palopo City – East Luwu District (Mangkutana)	KSKC	KSKC-US
130	Sulawesi	Kab. Mamuju Mamuju District	KC	KC-US
131	Sulawesi	Kab. Mamuju - Kota Polewali Mandar Mamuju District - Polewali Mandar City	KSKC	KSKC-US
132	Sulawesi	Kota Gorontalo Gorontalo City	KC	KC-US
133	Sulawesi	Kota Gorontalo - Kota Kotamobagu Gorontalo City – Kotamobagu City	KSKC	KSKC-US
134	Kalimantan	Kota Samarinda Samarinda City	KC	KC-US
135	Kalimantan	Kota Samarinda - Kab. Kutai Timur (Sangatta) Samarinda City – East Kutai District (Sangatta)	KSKC	KSKC-US
136	Kalimantan	Kota Banjarmasin Banjarmasin City	KC	KC-US
137	Kalimantan	Kota Banjarmasin - Kab. Tanah Bumbu (Batulicin) Banjarmasin City – Tanah Bumbu (Batulicin)	KSKC	KSKC-US
138	Kalimantan	Kota Banjarmasin - Kab. Banjar (Martapura) Banjarmasin City – Banjar District (Martapura)	KSKC	KSKC-US
139	Kalimantan	Kota Banjarmasin – Kab. Tabalong (Murung Pudak) Banjarmasin City – Tabalong District (Murung Pudak)	KSKC	KSKC-US
140	Kalimantan	Kota Balikpapan Balikpapan City	KC	KC-US
141	Kalimantan	Kota Balikpapan - Kab. Paser (Tanah Grogot) Balikpapan City - Paser District (Tanah Grogot)	KSKC	KSKC-US
142	Kalimantan	Kota Balikpapan - Kota Pontianak Balikpapan City – Pontianak City	KSKC	KSKC-US
143	Kalimantan	Kota Palangkaraya Palangkaraya City	KC	KC-US
144	Kalimantan	Kota Palangkaraya - Kab. Kota Waringin Timur (Sampit) Palangkaraya City – East Waringin District (Sampit)	KSKC	KSKC-US
145	Kalimantan	Kota Palangkaraya - Kota Waringin Barat (Pangkalan Bun) Palangkaraya City – West Waringin District (Pangkalan Bun)	KSKC	KSKC-US

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI
ASSOCIATION MEMBERSHIP

Untuk memperluas jaringan bisnis serta menjalin komunikasi yang lebih luas dengan sesama pelaku di industri pembiayaan, MUF tergabung dalam beberapa asosiasi profesional dan organisasi lainnya. Sebagai anggota yang berpartisipasi secara aktif, keanggotaan MUF dalam asosiasi dan organisasi ini juga menjadi bagian dari upaya pelibatan pemangku kepentingan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan operasional.

To expand its business network and establish wider communication with fellow players in the financing industry, MUF is affiliated with several professional associations and other organizations. As an actively participating member, MUF's membership in these associations and organizations is also part of efforts to involve stakeholders in solving any problems encountered in carrying out operational activities.

Hingga 2022, MUF tergabung dalam asosiasi sebagai berikut:

Until 2022, MUF is incorporated in the following associations:

Nama Asosiasi Association	**Lingkup** Scope	**Peran dan Kontribusi** Role and Contribution
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Association of Indonesian Financing Companies (APPI)	Nasional National	Anggota Member
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS)	Nasional National	Anggota Member
Pefindo Biro Kredit	Nasional National	Anggota Member
PT Rapi Utama Indonesia	Nasional National	Anggota Member

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATION STRUCTURE

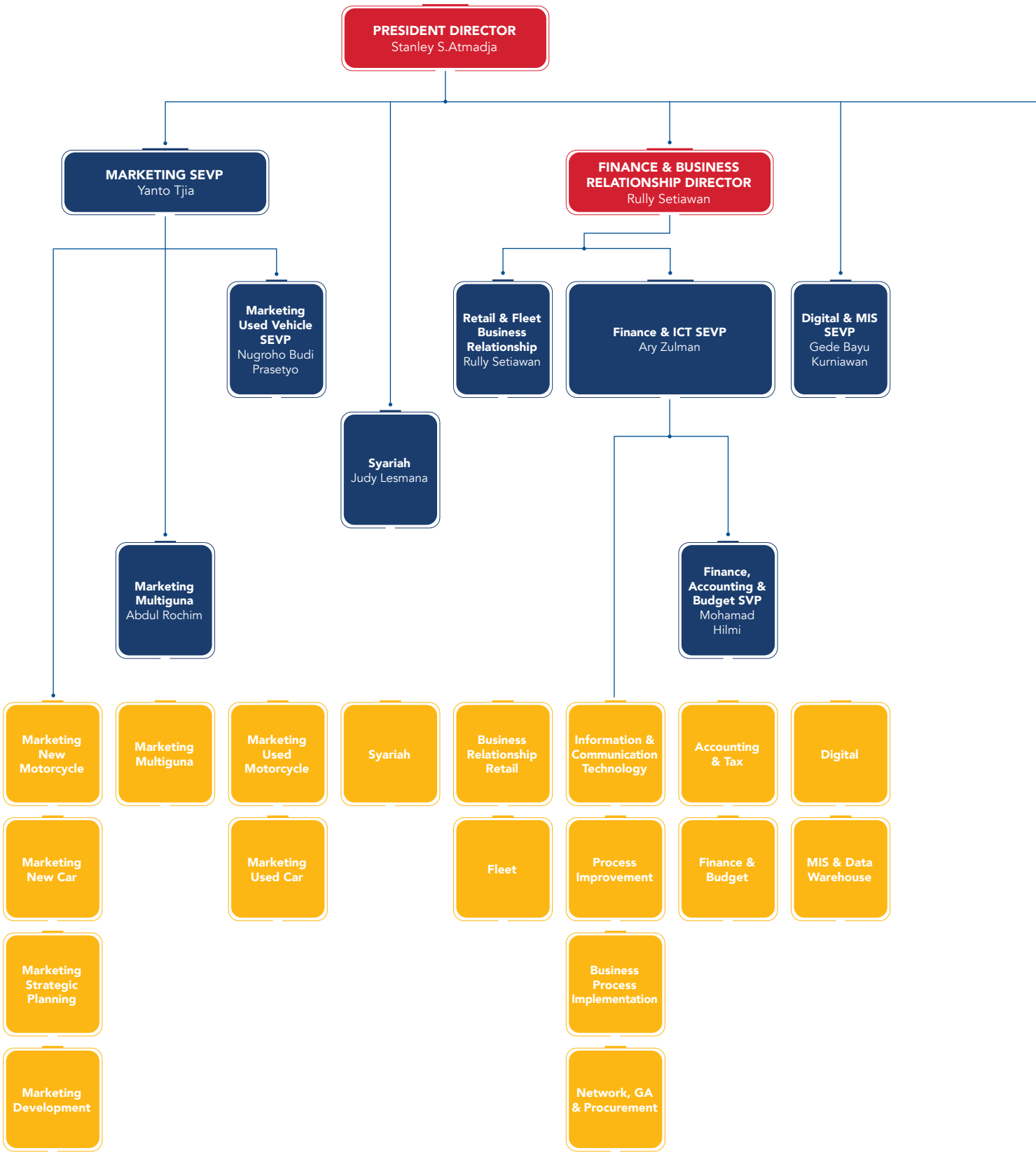

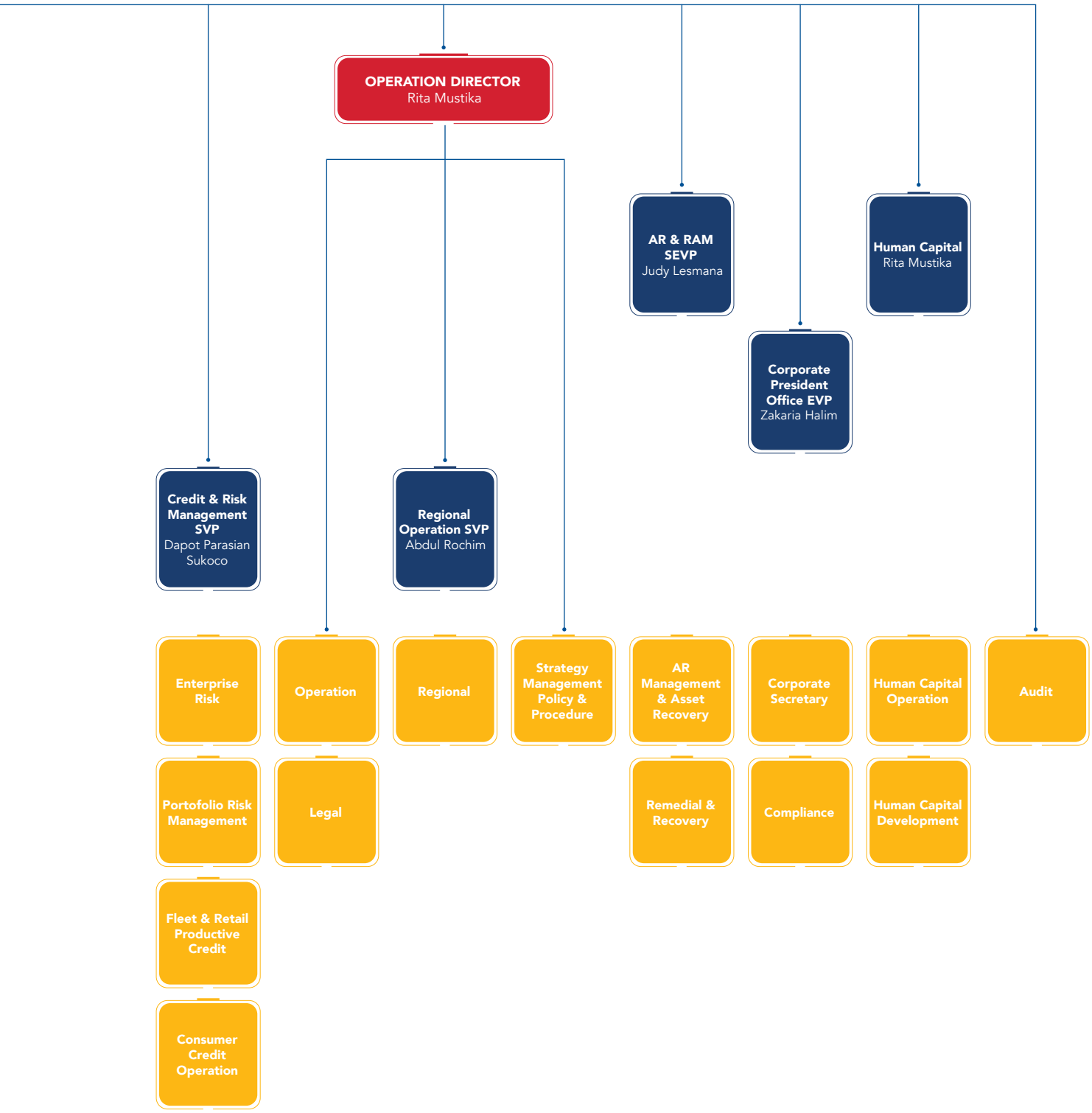
OPERATION DIRECTOR
Rita Mustika
AR & RAM SEVP
Judy Lesmana
Human Capital
Rita Mustika
Corporate President Office EVP
Zakaria Halim
Credit & Risk Management SVP
Dapot Parasian Sukoco
Regional Operation SVP
Abdul Rochim
Enterprise Risk
Operation
Regional
Strategy Management Policy & Procedure
AR Management & Asset Recovery
Corporate Secretary
Human Capital Operation
Audit
Portofolio Risk Management
Legal
Remedial & Recovery
Compliance
Human Capital Development
Fleet & Retail Productive Credit
Consumer Credit Operation

PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pada tahun 2022, komposisi Dewan Komisaris MUF tidak mengalami perubahan.
In 2022, the composition of MUF Board of Commissioners did not change.

IGNATIUS SUSATYO WIJOYO
Komisaris Utama
President Commissioner

Tempat Tanggal Lahir
Yogyakarta, 23 Maret 1969

Usia
53 tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Periode Jabatan
30 Maret 2021 s.d RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2024.

Riwayat Penunjukan
1. Akta No. 100 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance
2. Akta No. 29 tanggal 30 Maret 2021 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Place and Date of Birth
Yogyakarta, March 23, 1969

Age
53 years old

Citizenship
Indonesia

Domicile
Bekasi, West Java, Indonesia

Term of Office
March 30, 2021 until the Annual GMS to be held in 2024

Appointment History
1. Deed No. 100 dated July 30, 2019 regarding Statement of Decisions Outside the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance
2. Deed No. 29 March 30, 2021 about Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders

Pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dengan Surat No. KEP-389/NB.11/2019

Riwayat Pendidikan
1. Magister (S2) Manajemen Internasional dari Universitas Prasetya Mulya, Jakarta (2006)
2. Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1993)

Riwayat Pekerjaan
1. PT Toyota Astra Motor (1993 – 1994)
2. PT Astra Sedaya Finance (1995 – 2005)
3. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2006 – 2009)
4. PT Mandiri Tunas Finance (2009 – 2018) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama
5. *Executive Vice President – Consumer Loans Group* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 – 2022)
6. Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (2022 – sekarang)

Sertifikasi Profesi yang Masih Berlaku
1. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
2. Sertifikasi Dasar Pembiayaan, PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)

Rangkap Jabatan
1. Anggota Komite Audit Mandiri Utama Finance
2. Anggota Komite Pemantau Risiko Mandiri Utama Finance
3. *Executive Vice President – Consumer Loans Group* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 – 2022)
4. Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (2022 – sekarang)

Kepemilikan Saham
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lain dan Direksi. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/pengendali.

Ratification from the Financial Services Authority (FSA)
The results of the fit and proper test from FSA with Letter No. KEP-389/NB.11/2019

Educational Background
1. Masters (S2) in International Management from Prasetiya Mulya University, Jakarta (2006)
2. Bachelor (S1) in Economics from Gajah Mada University, Yogyakarta (1993)

Work Experience
1. PT Toyota Astra Motor (1993 – 1994)
2. PT Astra Sedaya Finance (1995 – 2005)
3. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2006 – 2009)
4. PT Mandiri Tunas Finance (2009 – 2018) with his last position as President Director
5. Executive Vice President – Consumer Loans Group at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 – 2022)
6. Vice Chancellor of Gadjah Mada University (2022 – present)

Valid Professional Certificate
1. Risk Management Certification for Financing Companies, Risk Management Certification Agency (BSMR)
2. Financing Basic Certification, PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)

Concurrent Position
1. Members of Audit Committee at Mandiri Utama Finance
2. Member of Risk Monitoring Committee at Mandiri Utama Finance
3. Executive Vice President – Consumer Loans Group at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 – 2022)
4. Vice Chancellor of Gadjah Mada University (2022 – Present)

Shareholding
None

Affiliation
Has no affiliation with Other Commissioners and Directors. He has an affiliation relationship with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as major/controlling shareholder.

ERIDA
Komisaris
Commissioner

Tempat Tanggal Lahir
Jakarta, 28 November 1966

Usia
56 tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan
30 Maret 2021 s.d RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2024

Riwayat Penunjukan
1. Akta No. 19 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Mandiri Utama Finance
2. Akta No. 01 tanggal 2 April 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance
3. Akta No. 29 tanggal 30 Maret 2021 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Place and Date of Birth
Jakarta, November 28, 1966

Age
56 years old

Citizenship
Indonesia

Domicile
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Term of Office
March 30, 2021 until the Annual GMS to be held in 2024

Appointment History
1. Deed No. 19 dated January 21, 2015 concerning the Establishment of a Limited Liability Company Mandiri Utama Finance
2. Deed No. 01 dated April 2, 2018 concerning the Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance
3. Deed No. 29 March 30, 2021 about Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders

Pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dengan Surat No. KEP-305/NB.11/2015

Riwayat Pendidikan
Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Trisakti Jakarta (1990)

Riwayat Pekerjaan
1. PT Inti Salim Corporation sebagai Internal Auditor (1989 – 1991)
2. PT Sarana Perdana Engineering sebagai Group Financial Controller (1991 – 1995)
3. PT Jaya Real Property Tbk sebagai Finance Division Head (1995-2000) dan Marketing Division Head (2000-2001)
4. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai Finance and Operation Director (2001 – 2005) dan Chief Operating Officer (2006 – 2011)
5. Direktur PT Trikirana Investindo Prima (2011 – sekarang)
6. Chief Financial Officer PT Triputra Agro Persada (2012 – sekarang)

Sertifikasi Profesi yang Masih Berlaku
Sertifikasi Dasar Pembiayaan, PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)

Rangkap Jabatan
1. Anggota Komite Audit Mandiri Utama Finance
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Mandiri Utama Finance
3. Anggota Komite Pemantau Risiko Mandiri Utama Finance
4. *Director & Chief Financial Officer* – PT Triputra Investindo Arya (2011 – sekarang)

Kepemilikan Saham
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham hingga ke entitas pemilik akhir

Ratification from the Financial Services Authority (FSA)
The results of the fit and proper test from FSA with Letter No. KEP-305/NB.11/2015

Educational Background
Bachelor (S1) in Accounting from Trisakti University, Jakarta (1990)

Work Experience
1. PT Inti Salim Corporation as Internal Auditor (1989 – 1991)
2. PT Sarana Perdana Engineering as Group Financial Controller (1991 – 1995)
3. PT Jaya Real Property Tbk as Finance Division Head (1995-2000) and Marketing Division Head (2000-2001)
4. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk as Finance and Operation Director (2001 – 2005) and Chief Operating Officer (2006 – 2011)
5. Director PT Trikirana Investindo Prima (2011 – present)
6. Chief Financial Officer PT Triputra Agro Persada (2012 – present)

Valid Professional Certificate
Financing Basic Certification, PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)

Concurrent Position
1. Member of Audit Committee at Mandiri Utama Finance
2. Member of Nomination and Remuneration Committee at Mandiri Utama Finance
3. Member of Risk Monitoring Committee at Mandiri Utama Finance
4. Director & Chief Financial Officer – PT Triputra Investindo Arya (2011 – Present)

Shareholding
None

Affiliation
Having no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with shareholders to the ultimate owner name

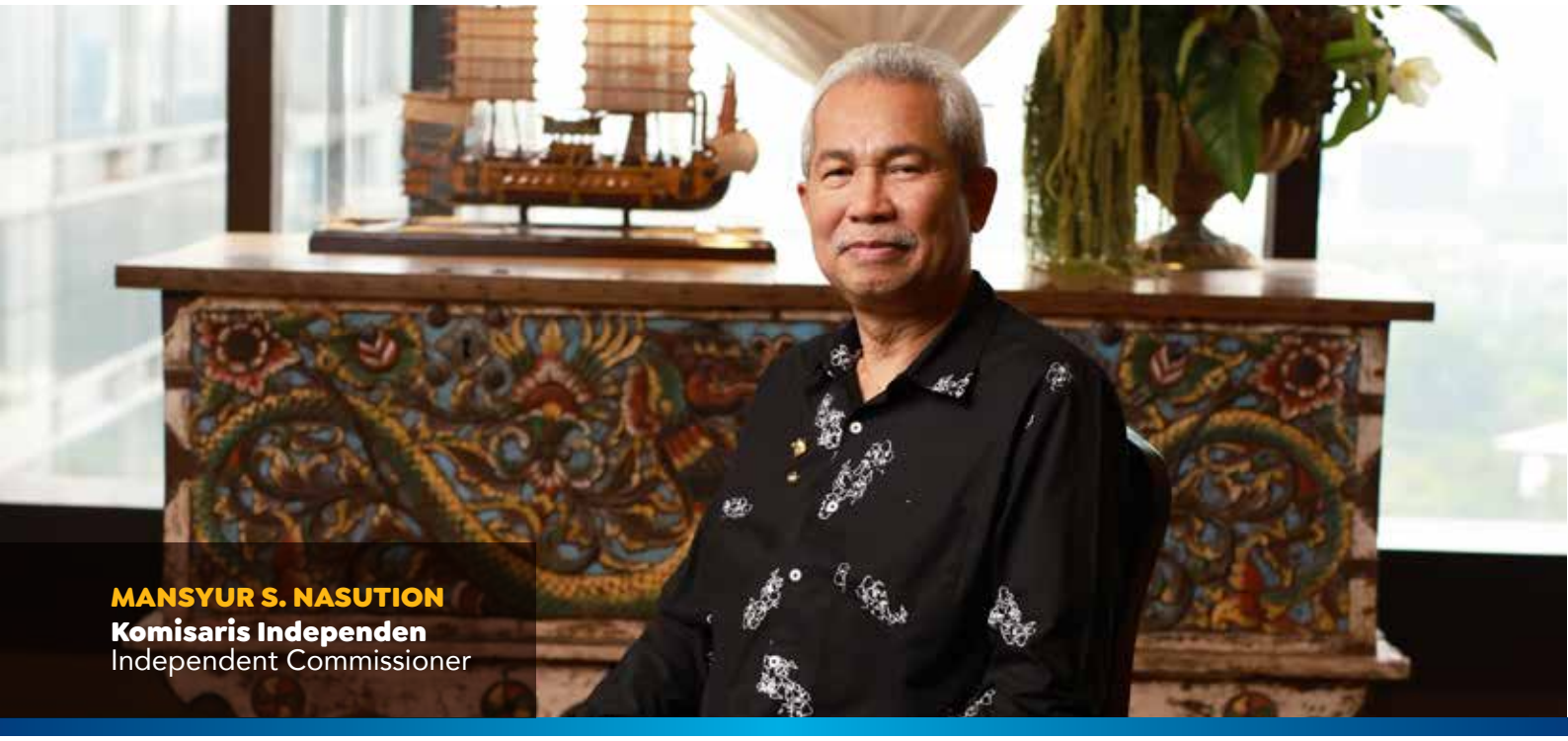

MANSYUR S. NASUTION
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Tempat Tanggal Lahir
Penyabungan, 23 Agustus 1958

Usia
64 tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan
17 Februari 2020 s.d RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2023

Riwayat Penunjukan
1. Akta No. 59 tanggal 24 November 2017 tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Mandiri Utama Finance
2. Akta No. 33 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance

Place and Date of Birth
Penyabungan, August 23, 1958

Age
64 years old

Citizenship
Indonesia

Domicile
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Term of Office
February 17, 2020 until the Annual GMS to be held in 2023

Appointment History
1. Deed No. 59 dated November 24, 2017 concerning Statements of Decisions Outside the General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance
2. Deed No. 33 dated February 17, 2020 concerning Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance

Pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dengan Surat No. KEP-600/NB.11/2017

Riwayat Pendidikan
1. Master (S2) *Resources Economics* dari Colorado State University, Amerika Serikat (1991)
2. Sarjana (S1) Peternakan dari Institut Pertanian Bogor (1990)

Riwayat Pekerjaan
1. PT Bank Bumi Daya (Persero) (1983)
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999 – 2012) dengan jabatan terakhir sebagai *Executive Vice President Coordinator Consumer Finance*
3. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2012 – 2017)

Sertifikasi Profesi yang Masih Berlaku
1. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
2. Sertifikasi Dasar Pembiayaan, PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)

Rangkap Jabatan
1. Ketua Komite Audit Mandiri Utama Finance
2. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Mandiri Utama Finance
3. Ketua Komite Pemantau Risiko Mandiri Utama Finance

Kepemilikan Saham
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham hingga ke entitas pemilik akhir

Ratification from the Financial Services Authority (FSA)
The results of the fit and proper test from FSA with Letter No. KEP-600/NB.11/2017

Educational Background
1. Master (S2) in Resources Economics from Colorado State University, United States (1991)
2. Bachelor (S1) Animal Husbandry from Bogor Agricultural University (1990)

Work Experience
1. PT Bank Bumi Daya (Persero) (1983)
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999 – 2012) with his last position as Executive Vice President Coordinator of Consumer Finance
3. Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2012 – 2017)

Valid Professional Certificate
1. Risk Management Certification for Financing Companies, Risk Management Certification Agency (BSMR)
2. Financing Basic Certification, PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)

Concurrent Position
1. Chairman of Audit Committee at Mandiri Utama Finance
2. Chairman of Nomination and Remuneration Committee at Mandiri Utama Finance
3. Chairman of Risk Monitoring Committee at Mandiri Utama Finance

Shareholding
None

Affiliation
Having no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with shareholders to the ultimate owner name

PROFIL DIREKSI
PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pada tahun 2022, komposisi Direksi MUF tidak mengalami perubahan.
In 2022, the composition of the MUF Board of Directors will not change.

STANLEY S. ATMADJA
Direktur Utama
President Director

Tempat Tanggal Lahir
Jakarta, 24 Agustus 1956

Usia
66 tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan
30 Maret 2021 s.d RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2024

Place and Date of Birth
Jakarta, August 24, 1956

Age
66 years old

Citizenship
Indonesia

Domicile
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Term of Office
March 30, 2021 to Annual GMS to be held in 2024

Riwayat Penunjukan

1. Akta No. 19 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Mandiri Utama Finance
2. Akta No. 01 tanggal 2 April 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dengan Surat No. KEP-302/NB.11/2015

Riwayat Pendidikan

1. *Master* (S2) of *Business Administration* dari University of La Verne, Amerika Serikat (1984)
2. Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta (1982)

Riwayat Pekerjaan

1. Citibank, NA (1984 – 1987)
2. PT Citicorp Leasing Indonesia (1988 – 1990) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur
3. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (1991 – 2012) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama
4. Komisaris PT Rajawali Greenland Utama (2012 – sekarang)
5. Komisaris Utama Asco Capital (2019 – sekarang).

Sertifikasi Profesi yang Masih Berlaku

1. Sertifikasi Ahli Pembiayaan
2. Sertifikasi *Management* Risiko

Rangkap Jabatan

1. Komisaris PT Rajawali Greenland Utama (2012 – sekarang)
2. Komisaris Utama Asco Capital (2019 – sekarang)

Kepemilikan Saham

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham yakni PT Asco Investindo dalam bentuk hubungan keluarga dengan Alvina Amanda Danu Atmadja selaku Direktur PT Asco Investindo

Appointment History

1. Deed No. 19 dated January 21, 2015 concerning the Establishment of a Limited Liability Company Mandiri Utama Finance
2. Deed No. 01 dated April 2, 2018 concerning the Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance
3. Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders

Ratification from the Financial Services Authority (FSA)

The results of the fit and proper test from FSA with Letter No. KEP-302/NB.11/2015

Educational Background

1. Master (S2) of Business Administration from the University of La Verne, United States (1984)
2. Bachelor (S1) of Management Economics from Trisakti University, Jakarta (1982)

Work Experience

1. Citibank, NA (1984 – 1987)
2. PT Citicorp Leasing Indonesia (1988 – 1990) with his last position as Director.
3. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (1991 – 2012) with his last position as President Director.
4. Commissioner PT Rajawali Greenland Utama (2012 – present)
5. Commissioner Utama Asco Capital (2019 – present)

Valid Professional Certificate

1. Financing Expert Certification
2. Risk Management Certification

Concurrent Position

1. Commissioner PT Rajawali Greenland Utama (2012 – present)
2. President Commissioner of Asco Capital (2019 – present)

Shareholding

None

Affiliation

Having no affiliation with other Board of Commissioners and Board of Directors. He has affiliation with the Shareholders, namely PT Asco Investindo in form of family relationship with Alvina Amanda Danu Atmadja as Director of PT Asco Investindo

RITA MUSTIKA
Direktur
Director

Tempat Tanggal Lahir
Malang, 14 Juli 1970

Usia
52 tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan
30 Maret 2021 s.d RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2024

Riwayat Penunjukan
1. Akta No. 46 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mandiri Utama Finance
2. Akta No. 29 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pernyataan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance

Place and Date of Birth
Malang, July 14, 1970

Age
52 years old

Citizenship
Indonesia

Domicile
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Term of Office
March 30, 2021 to Annual GMS to be held in 2024

Appointment History
1. Deed No. 46 dated August 20, 2019 concerning Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance
2. Deed No. 29 dated March 30, 202 concerning Statement of Deed of Statement of Decision Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance

Pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dengan Surat No. KEP-427/NB.11/2019

Riwayat Pendidikan
1. Magister (S2) *Strategic Management* dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2012)
2. Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Manajemen dari Universitas Brawijaya Malang (1994)

Riwayat Pekerjaan
1. PT Astra International Tbk (1998 – 2011) dengan jabatan terakhir sebagai *Business Operation System Manager*
2. PT Central Sentosa Finance (2011 – 2015) dengan jabatan terakhir sebagai *Operation Board of Manajemen*

Sertifikasi Profesi yang Masih Berlaku
1. Sertifikasi Ahli Pembiayaan
2. Sertifikasi Syariah
3. Sertifikasi *Management* Risiko

Rangkap Jabatan
Tidak ada

Kepemilikan Saham
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham hingga ke entitas pemilik akhir

Ratification from the Financial Services Authority (FSA)
The results of the fit and proper test from FSA with Letter No. KEP-427/NB.11/2019

Educational Background
1. Masters (S2) of Strategic Management from Gajah Mada University, Yogyakarta (2012)
2. Bachelor (S1) Management from Economic Faculty of Brawijaya University, Malang (1994)

Work Experience
1. PT Astra International Tbk (1998 – 2011) with last position as Business Operation System Manager
2. PT Central Sentosa Finance (2011 – 2015) with last position as Operation Board of Management

Valid Professional Certificate
1. Financing Expert Certification
2. Sharia Certification
3. Risk Management Certification

Concurrent Position
None

Shareholding
None

Affiliation
Having no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with shareholders to the ultimate owner name

RULLY SETIAWAN
Direktur
Director

Tempat Tanggal Lahir
Bandung, 09 Juli 1977

Usia
45 tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan
26 Juli 2021 s.d RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2024

Riwayat Penunjukan
Akta No. 45 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham

Pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dengan Surat No. KEP-415/NB.11/2021

Place and Date of Birth
Bandung, July 9, 1977

Age
45 years old

Citizenship
Indonesia

Domicile
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Term of Office
July 26, 2021 to Annual GMS to be held in 2024

Appointment History
Deed No. 45 dated July 26, 202 concerning Statements of Decisions Outside the General Meeting of Shareholders

Ratification from the Financial Services Authority (FSA)
The results of the fit and proper test from FSA with Letter No. KEP-415/NB.11/2021

Riwayat Pendidikan
Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi dari STIE Bandung (1999)

Riwayat Pekerjaan
1. *Officer Development Program* (ODP) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (2001)
2. *Regional* SVP (*Senior Vice President*) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (2018 – 2020)
3. *Group Head Corporate Secretary (Senior Vice President)* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (2020)

Sertifikasi Profesi yang Masih Berlaku
1. Sertifikasi Ahli Pembiayaan
2. Sertifikasi *Management* Risiko

Rangkap Jabatan
Tidak ada

Kepemilikan Saham
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham hingga ke entitas pemilik akhir

Educational Background
Bachelor (S1) Economics and Accounting from STIE Bandung (1999)

Work Experience
1. Officer Development Program (ODP) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (2001)
2. Regional SVP (Senior Vice President) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (2018 – 2020)
3. Group Head Corporate Secretary (Senior Vice President) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (2020)

Valid Professional Certificate
1. Financing Expert Certification
2. Risk Management Certification

Concurrent Position
None

Shareholding
None

Affiliation
Having no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with shareholders to the ultimate owner name

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PROFILE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Tahun 2022, komposisi Dewan Pengawas Syariah MUF mengalami perubahan dengan diangkatnya Abdul Ghofarrozin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.

In 2022, the composition of MUF Sharia Supervisory Board changed with the appointment of Abdul Ghofarrozin as Chairman of Sharia Supervisory Board.

ABDUL GHOFARROZIN
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

Tempat Tanggal Lahir
Pati, 31 Juli 1976

Usia
46 tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Pati, Jawa Tengah, Indonesia

Periode Jabatan
30 Maret 2021 s.d RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2024

Riwayat Penunjukan
Akta No. 72 tanggal 28 April 2022 tentang Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS

Pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dengan Surat No. KEP-11/NB.21/2022

Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
Hasil rekomendasi dari DSN MUI dengan Surat No. U-494/DSN-MUI/VII/2017 tanggal 14 Juli 2021

Place and Date of Birth
Pati, July 31, 1976

Age
46 years old

Citizenship
Indonesia

Domicile
Pati, Central Java, Indonesia

Term of Office
March 30, 2021 to the Annual GMS to be held in 2024

Appointment History
Deed No. 72 dated April 28, 2022 concerning Shareholders' Decisions Outside the GMS

Ratification from the Financial Services Authority (FSA)
The results of the fit and proper test from OJK with Letter No. KEP-11/NB.21/2022

Recommendation from the National Sharia Council of Indonesian Ulema Council (DSN MUI)
The recommendation results from DSN MUI with Letter No. U-494/DSN-MUI/VII/2017 dated July 14, 2021

Riwayat Pendidikan

1. *Master Of Education, Leadership Policy and Change* Monash University (2004)
2. Sarjana Agama Institut Agama Islam Al-Aqidah (2001)

Riwayat Pekerjaan

1. Pengasuh Pesantren Maslakul Huda Pati (2004 – sekarang)
2. Komisaris Utama PT BPRS Artha Mas Abadi (2006 – 2018)
3. Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PWNU Jawa Tengah (2013 – 2015)
4. Ketua Umum Yayasan Pesantren Maslakul Huda (2012 – sekarang)
5. Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU Jakarta (2015 – sekarang)
6. Anggota Dewan Ketahanan Pangan Nasional (2017 – sekarang)
7. Staff Khusus Presiden RI Kementerian Sekretariat Negara RI (2017 – 2019)
8. Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast (2017 – 2022)
9. Rektor Institut Pesantren Mathaliul Falah (2019 – 2022)
10. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Maslakul Huda tahun (2022 – sekarang)
11. Anggota Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara RI (2021 – sekarang)
12. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2020 – sekarang)
13. Dewan pengarah Badan Artbitrase Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2020 – sekarang)
14. Dewan Pakar Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syari'ah (2021 – Sekarang)

Sertifikasi Profesi yang Masih Berlaku

Sertifikasi Pengawas Syariah

Rangkap Jabatan

- Anggota Dewan Ketahanan Pangan Nasional sejak (2017 – sekarang)
- Dewan Pengarah Badan Arbi Erase Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2020 – sekarang)
- Dewan Pengarah Badan Arbi Erase Syari'ah Nasdonal Majelis Ulama Indonesia(2020 – sekarang)
- Dewan Pakar Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (2021 – sekarang)

Kepemilikan Saham

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham hingga ke entitas pemilik akhir

Educational Background

1. Master Of Education, Leadership Policy and Change Monash University (2004)
2. Bachelor of Religion Al-Aqidah Islamic Institute (2001)

Work Experience

1. Caretaker of Maslakul Huda Pati Islamic Boarding School (2004 – present)
2. President Commissioner of PT BPRS Artha Mas Abadi (2006 – 2018)
3. Chairman of Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PWNU Central Java (2013 – 2015)
4. Chairman of the Maslakul Huda Islamic Boarding School Foundation (2012 – present)
5. Chairman of Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU Jakarta (2015 – present)
6. Member of the National Food Security Council (2017 – present)
7. Special Staff of the President of the Republic of Indonesia Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia (2017 – 2019)
8. Independent Commissioner of PT Waskita Beton Precast (2017 – 2022)
9. Chancellor of the Mathaliul Falah Islamic Boarding School Institute (2019 – 2022)
10. Chairman of the Board of Supervisors of the Maslakul Huda Islamic Boarding School Foundation (2022 – present)
11. Member of the Selection Committee for Candidates for Members of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia (2021 – present)
12. Deputy Secretary General of the Central Executive of the Indonesian Ulema Council (MUI) (2020 – present)
13. Board of directors of the National Sharia Artbitration Board of the Indonesian Ulema Council (MUI) (2020 – present)
14. Central Management Council of the Syari'ah Economic Community (2021 – Present)

Valid Professional Certificate

Sharia Supervisor Certification

Concurrent Position

- Member of the National Food Security Council since (2017 – present)
- Deputy Secretary General of the Central Executive of the Indonesian Ulema Council (2020 – present)
- Steering Committee for the Indonesian Ulema Council (2020 – present)
- Board of Experts at the Center for the Sharia Economic Community (2021 – present)

Shareholding

None

Affiliation

Having no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with shareholders to the ultimate owner name

M. ZIYADULHAQ
Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Tempat Tanggal Lahir
Tuban, 5 Januari 1979

Usia
44 tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Periode Jabatan
30 Maret 2021 s.d RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2024

Riwayat Penunjukan
1. Akta No. 24 tanggal 12 Maret 2018 tentang keputusan RUPS Tahunan Mandiri Utama Finance
2. Akta No. 29 tanggal 30 Maret 2021 tentang Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS

Pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dengan Surat No. KEP-18/NB.22/2017

Place and Date of Birth
Tuban, January 5, 1978

Age
44 years old

Citizenship
Indonesia

Domicile
South Tangerang, Banten, Indonesia

Term of Office
March 30, 2021 to Annual GMS to be held in 2024

Appointment History
1. Deed No. 24 dated March 12, 2018 regarding the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance
2. Deed No. 29 dated March 30, 2021 concerning Shareholders' Decisions Outside the GMS

Ratification from the Financial Services Authority (FSA)
The results of the fit and proper test from FSA with Letter No. KEP-18/NB.22/2017

Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

Hasil rekomendasi dari DSN MUI dengan Surat No. U0648/DSN-MUI/X/2017 tanggal 14 November 2017

Riwayat Pendidikan

1. *Phd Program, Quran and Sunnah Studies*, Faculty of Islamic Revealed Knowledge and Human Science (IRKHS), International Islamic University Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur, Malaysia (2013 – 2017)
2. Program Internasional, Pasca Sarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ), Konsentrasi 'Ulumul Quran/Tafsir (2007 – 2008)
3. Syari'ah Economic Banking Institute (SEBI), Jurusan Muamalah (Manajemen Lembaga Keuangan Syari'ah), Konsentrasi Manajemen Perbankan Syari'ah (2002–2005)
4. Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal As Syakhsiyyah, Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ), Jakarta (2000–2004)

Riwayat Pekerjaan

1. Advisor PT Global Outsourching Services (GOS) Jakarta (2013)
2. Dosen Tetap di Fakultas Syariah, Prodi Muamalah, Hukum Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al – Quran (IIQ) Jakarta (2012)
3. Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Fakultas Syariah Institut Ilmu AlQuran (IIQ) Jakarta (2015 – 2018)
4. Kepala Program Study (Kaprodi) Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Institut Ilmu Al – Quran (IIQ) Jakarta (2016 – 2018)
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Mandiri Utama Finance (MUF) Syariah (2021)

Sertifikasi Profesi yang Masih Berlaku

Sertifikasi Pengawas Syariah, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia Bidang Ekonomi Syariah

Rangkap Jabatan

Dosen Tetap Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu AlQuran dan Tafsir (IAT) Institut ilmu AlQuran (IIQ) Jakarta (2018-sekarang)

Kepemilikan Saham

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham hingga ke entitas pemilik akhir

Recommendation from the National Sharia Council of Indonesian Ulema Council (DSN MUI)

Recommendation result from the MUI DSN with Letter No. U0648/DSN-MUI/X/2017 dated November 14, 2017

Educational Background

1. Phd Program, Quran and Sunnah Studies, Faculty Of Islamic Revealed Knowledge and Human Science (IRKHS), International Islamic University Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur, Malaysia (2013 – 2017)
2. International Program, Post -Graduate Institute of Al-Quran Science (IIQ), Concentration of 'Ulumul Quran/Tafsir (2007 – 2008)
3. Sharia Economic Banking Institute (SEBI), Department of Muamalah (Management of Sharia Financial Institutions), Concentration of Sharia Banking Management (2002 – 2005)
4. Bachelor (S1) from Faculty of Sharia, Department of Al Ahwal As Syakhsiyyah, College of Al- Quran Science (PTIQ), Jakarta (2000–2004)

Work Experience

1. Advisor PT Global Outsourcing Services (GOS) Jakarta (2013)
2. Permanent Lecturer at the Faculty of Sharia, Muamalah Study Program, Islamic Economic Law, Institute of Al-Quran Science (IIQ) Jakarta (2012)
3. Head of Islamic Economics Law Study Program (HES) at the Faculty of Sharia, Institute of Al-Quran (IIQ) Jakarta (2015 – 2018)
4. Head of Study Program (Kaprodi) Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, Institute of Al-Quran (IIQ) Jakarta (2016 – 2018)
5. Sharia Supervisory Board (DPS) at Mandiri Utama Finance (MUF) Syariah (2021)

Valid Professional Certificate

Sharia Supervisory Certification, National Board for Professional Certification of Indonesian Ulema Council in the Field of Sharia Economics

Concurrent Position

Postgraduate Permanent Lecturer, Study Program of Al-Quran and Tafsir (IAT) at Institute of Al-Quran Science (IIQ) Jakarta (2018-present)

Shareholding

None

Affiliation

Having no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with shareholders to the ultimate owner name

PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICER

YANTO TJIA
***Marketing Senior Executive Vice President* (SEVP)**

Usia 57 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Bergabung di MUF sejak 4 Mei 2015
57 years old
Indonesia Citizen
Joined MUF since May 4, 2015

NUGROHO BUDI PRASETYO
***Marketing Used Vehicle Senior Executive Vice President* (SEVP)**

Usia 57 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Bergabung di MUF sejak 4 Mei 2015
57 years old
Indonesia Citizen
Joined MUF since May 4, 2015

ARY ZULMAN

***Finance & ICT Senior Executive Vice President* (SEVP)**

Usia 50 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Bergabung di MUF sejak 1 Juni 2015
50 years old
Indonesia Citizen
Joined MUF since June 1, 2015

GEDE BAYU KURNIAWAN

Digital & MIS Senior Executive Vice President (SEVP)

Usia 52 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Bergabung di MUF sejak 1 Februari 2018
52 years old
Indonesia Citizen
Joined MUF since February 1, 2018

JUDY LESMANA

***Syariah & AR Management Senior Executive Vice President* (SEVP)**

Usia 52 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Bergabung di MUF sejak 21 Januari 2015
52 years old
Indonesia Citizen
Joined MUF since January 21, 2015

ZAKARIA HALIM

***Corporate President Office* (CPO) *Executive Vice President* (EVP)**

Usia 53 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Bergabung di MUF sejak 21 Januari 2015
53 years old
Indonesia Citizen
Joined MUF since January 21, 2015

ABDUL ROCHIM

***Regional Operation, Credit & Collection Senior Vice President* (SVP)**

Usia 62 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Bergabung di MUF sejak 6 Mei 2015
62 years old
Indonesia Citizen
Joined MUF since May 6, 2015

MOHAMAD HILMI

***Finance, Accounting & Budget Senior Vice President* (SVP)**

Usia 48 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Bergabung di MUF sejak 17 Juni 2015
48 years old
Indonesia Citizen
Joined MUF since June 17, 2015

DAPOT PARASIAN SUKOCO SINAGA
***Credit & Risk Management Senior Vice President* (SVP)**

Usia 43 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Bergabung di MUF sejak 15 Juli 2022
43 years old
Indonesia Citizen
Joined MUF since July 15, 2022

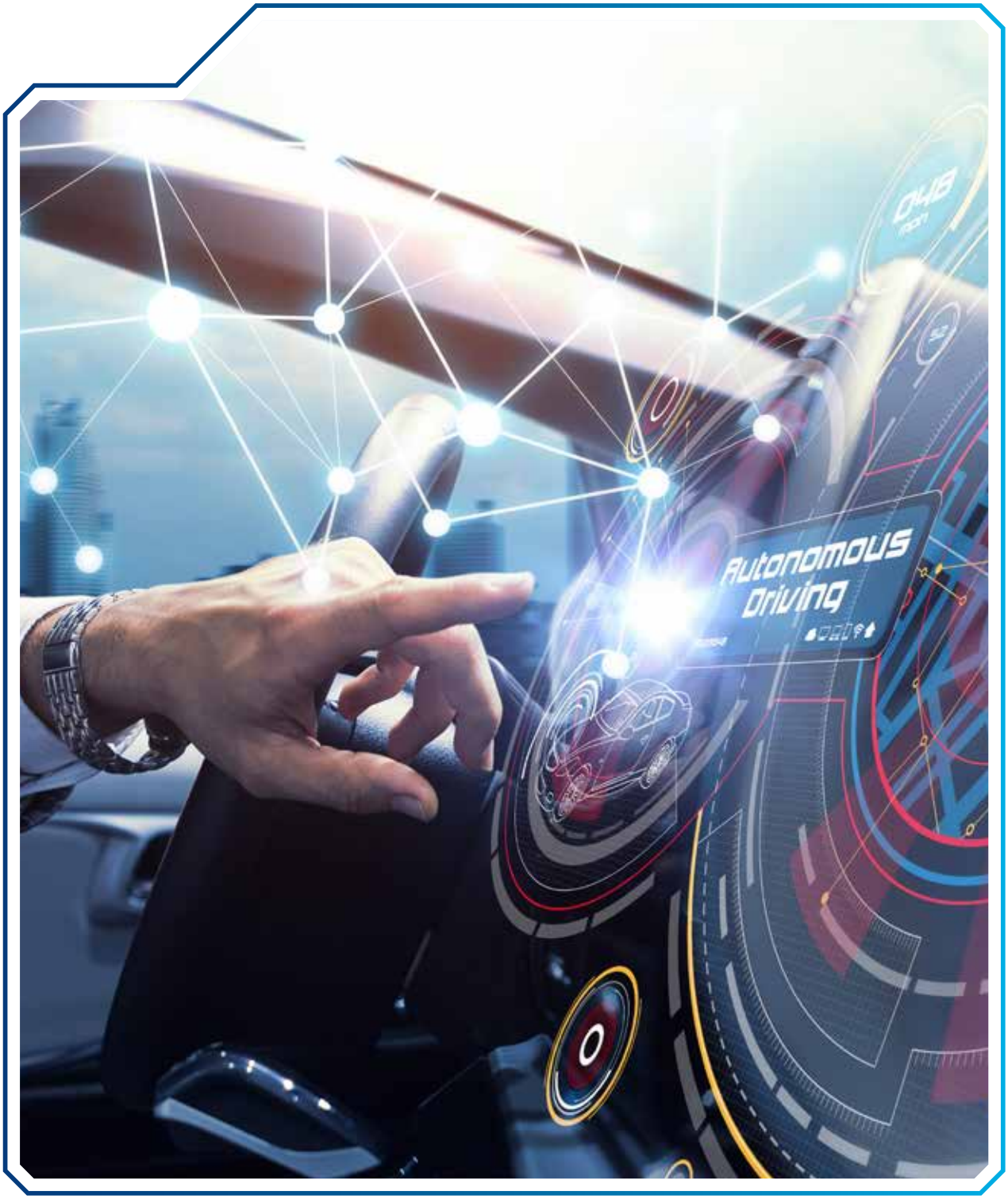
Autonomous
Driving

DEMOGRAFI KARYAWAN
EMPLOYEE DEMOGRAPHY

MUF berupaya menciptakan organisasi yang efektif dan efisien. Karena itu, penambahan jumlah karyawan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Perusahaan dengan tetap menimbang kondisi keuangan Perusahaan. Tahun 2022, jumlah karyawan MUF menjadi 7.695 orang, dari 6.331 orang di akhir tahun 2021.

MUF seeks to create an effective and efficient organization. Therefore, the addition of the number of employees is carried out in accordance with the needs and development of the Company's business while still considering the Company's financial condition. In 2022, the number of MUF employees to 7,695 people, from 6,331 people at the end of 2021.

JUMLAH KARYAWAN MUF 2018 – 2022
Number of MUF Employees 2018 - 2022

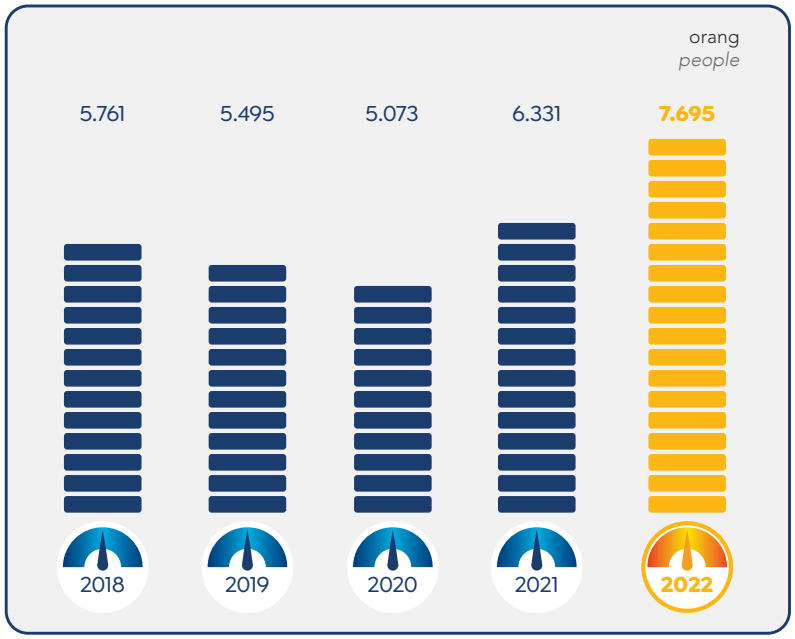

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI/JABATAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHY BY ORGANIZATIONAL LEVEL/POSITION

orang | person

Level Organisasi/ Jabatan Organizational/ Position Level	2022				2021			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition
Direktur Utama President Director	1	-	1	0,01	1	-	1	0,02
Komisaris Commissioner	2	1	3	0,04	2	1	3	0,05
Direktur Director	3	1	4	0,05	1	1	2	0,03
Jajaran Manajemen Board of Management	7	-	7	0.09	8	-	8	0,13
Kepala Divisi Division Level	8	4	12	0.15	32	6	38	0,60
Kepala Departemen Department Level	167	20	187	2,43	181	22	203	3,21
Asisten Manajer Assistant Manager	138	27	165	2,14	85	23	108	1,71
Kepala Seksi Section Head	1.168	247	1.415	18,39	951	189	1.140	18,01
Staf Staff	4.777	1.065	5.842	75,92	3.926	902	4.828	76,26
Jumlah Total	**6.321**	**1.374**	**7.695**	**100,00**	**5.187**	**1.144**	**6.331**	**100,00**

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KETENAGAKERJAAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHY BY EMPLOYMENT STATUS

orang | person

Status Ketenagakerjaan Employment Status	2022				2021			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition
Kontrak Contract	4.667	953	5.620	73.03	3.728	794	4.522	71.43
Tetap Permanent	1.641	411	2.052	26,67	1.459	350	1.809	28,57
Jumlah Total	**6.321**	**1.374**	**7.695**	**100,00**	**5.187**	**1.144**	**6.331**	**100,00**

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN USIA

EMPLOYEE DEMOGRAPHY BY AGE

orang | person

Rentang Usia Age Range	2022				2021			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition
<20 Tahun I years	28	-	28	0,37	12	-	12	0,19
20 s.d 30 Tahun I years	3.902	1.007	4.909	64,09	3.004	842	3.846	60,75
31 s.d 40 Tahun I years	1.948	325	2.273	29,68	1.782	266	2.048	32,35
41 s.d 50 Tahun I years	414	39	453	5,89	368	33	401	6,33
51 s.d 70 Tahun I years	29	3	32	0,42	21	3	24	0,38
Jumlah Total	6.321	1.374	7.695	100,00	5.187	1.144	6.331	100,00

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHY BY EDUCATION LEVEL

orang | person

Tingkat Pendidikan Education Level	2022				2021			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition
Doktor (S3) Doctoral	1	-	1	0,01	-	-	-	-
Pasca Sarjana (S2) Postgraduate	19	12	31	0,40	16	12	28	0,44
Sarjana (S1) Bachelor	4.482	1.149	5.631	73,52	3.648	952	4.600	72,66
Diploma (D1-D3) Diploma	821	210	1.031	13,46	734	178	912	14,41
SMA Sederajat High School Equivalent	998	3	1.001	13,07	789	2	791	12,49
Jumlah Total	6.321	1.374	7.695	100,00	5.187	1.144	6.331	100,00

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

EMPLOYEE DEMOGRAPHY BY WORKING PERIOD

Orang | person

Masa Kerja Working Period	2022				2021			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition
>3 Tahun I Years	2.649	618	3.267	42,46	2.283	510	2.793	44,12
1 s.d 3 Tahun I Years	3.672	756	4.428	57,54	2.904	634	3.538	55,88
Jumlah Total	6.321	1.374	7.695	100,00	2.283	510	2.793	44,12

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN *GENDER*/JENIS KELAMIN

EMPLOYEE DEMOGRAPHY BY GENDER

Orang | person

Jenis Kelamin Gender	2022		2021	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
Laki-laki Male	6.321	82,14	5.187	81,93
Perempuan Female	1.374	17,86	1.144	18,07
Jumlah Total	7.695	100,00	6.331	100,00

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM MANDIRI UTAMA FINANCE PER 31 DESEMBER 2022

SHAREHOLDERS COMPOSITION OF MANDIRI UTAMA FINANCE AS OF DECEMBER 31, 2022

No	Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2022 January 1, 2022			31 Desember 2022 December 31, 2022		
		Jumlah Saham (Juta Lembar) Number of Shares (million shares)	Persentase Kepemilikan Saham (%) Ownership Percentage (%)	Nilai (Rp juta) Value (Rp million)	Jumlah Saham (Juta Lembar) Number of Shares (million shares)	Persentase Kepemilikan Saham (%) Ownership Percentage (%)	Nilai (Rp juta) Value (Rp million)
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.550	51	255.000	2.550	51	255.000
2	PT Asco Investindo	1.850	37	185.000	1.850	37	185.000
3	PT Tunas Ridean Tbk	600	12	60.000	600	12	60.000
	Jumlah Total	**5.000**	**100**	**500.000**	**5.000**	**100**	**500.000**

Komposisi Pemegang Saham Mandiri Utama Finance per 31 Desember 2022

Shareholders Composition of Mandiri Utama Finance as of December 31, 2022

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; 51%
- PT Asco Investindo; 37%
- PT Tunas Ridean Tbk; 12%

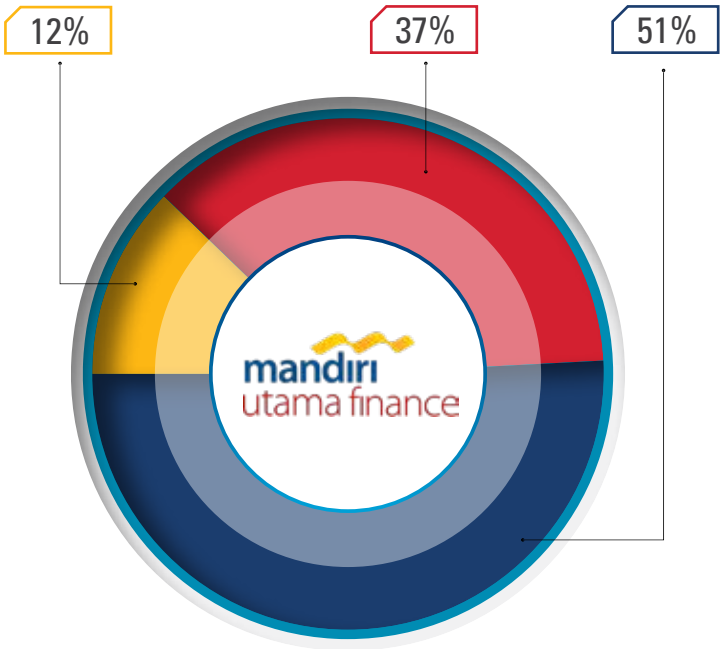

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN OLEH MANAJEMEN KUNCI DAN KARYAWAN

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tidak memiliki saham secara langsung di Mandiri Utama Finance.

INFORMATION ON COMPANY'S SHARE OWNERSHIP BY KEY MANAGEMENT AND EMPLOYEES

All members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors do not own shares directly in Mandiri Utama Finance.

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memiliki saham Perusahaan sebanyak 51%. Berikut disampaikan struktur kepemilikan saham hingga nama pemilik akhir.

INFORMATION ON MAJOR SHAREHOLDERS AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

The Company's Major/Controlling Shareholder is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk which owns 51% of the Company's shares. The following is the structure of share ownership up to the ultimate shareholders name.

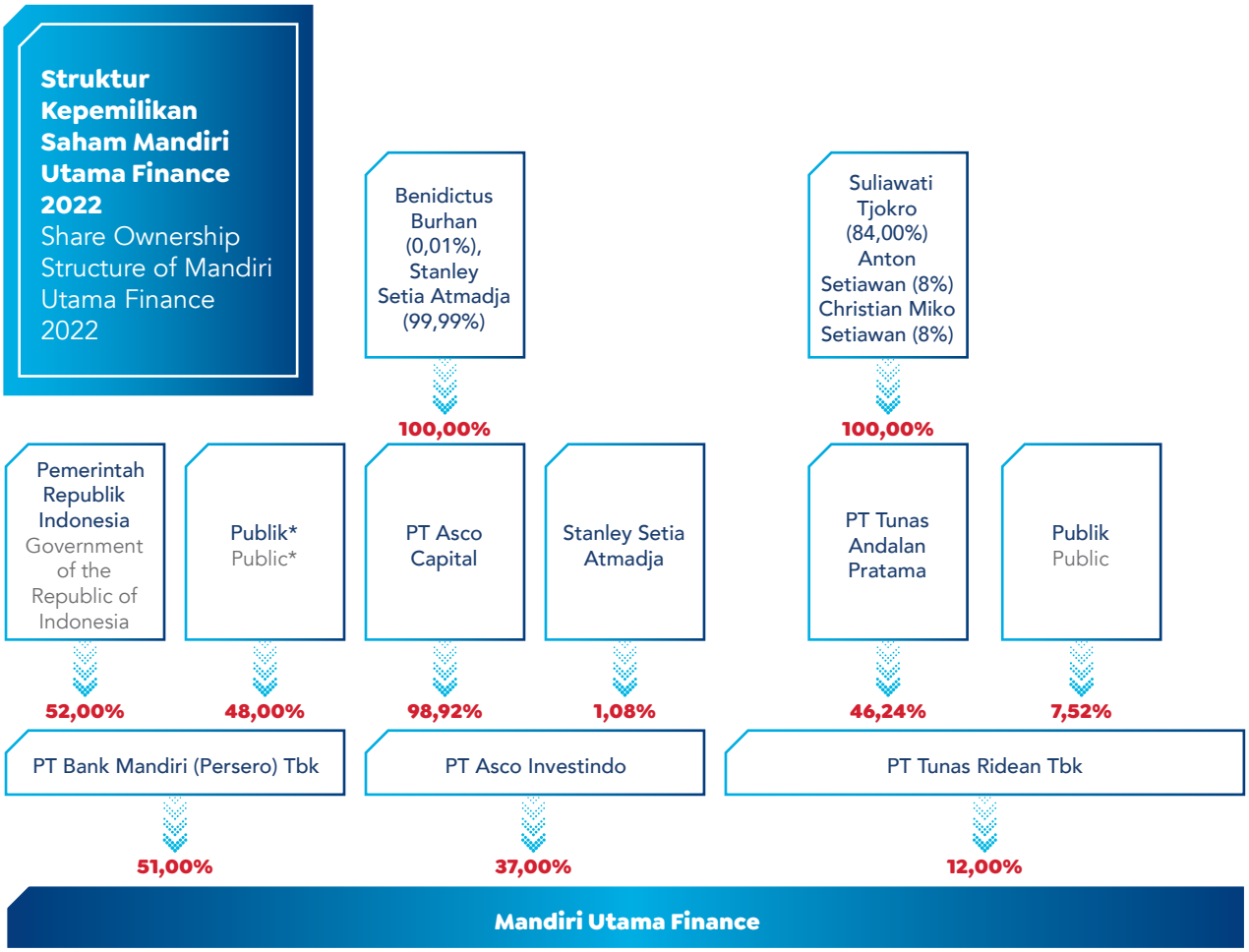

*) Perseorangan, Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perseroan Terbatas, Reksa Dana, Pemegang Saham Lainnya
*) Individuals, Cooperatives, Foundations, Pension Funds, Insurance, Banks, Limited Liability Companies, Mutual Funds, Other Shareholders

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "Bank Mandiri", didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 (empat) bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Saat ini Bank Mandiri tercatat sebagai bank dengan aset terbesar di Tanah Air dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, hereinafter referred to as "Bank Mandiri", was established on October 2, 1998 as part of the banking restructuring program implemented by the Indonesian government. In July 1999, 4 (four) state banks, namely Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Export Import Indonesia and Bank Pembangunan Indonesia, were merged into Bank Mandiri, each of which has an integral role in Indonesian economy development. Currently, Bank Mandiri is listed as the bank with the largest assets in the country and makes a very large contribution to the economy in Indonesia.

Informasi Umum PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

General Information of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Nama Perusahaan Company Name	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tanggal Pendirian Date of Establishment	2 Oktober 1998 October 2, 1998
Bidang Usaha Business Line	Perbankan Banking
Pencatatan Saham Share Listing	Bursa Efek Indonesia, 14 Juli 2003, kode saham "BMRI" Indonesia Stock Exchange, July 14, 2003, stock code "BMRI"
Alamat Kantor Pusat Headquarter Address	Plaza Mandiri Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38; Jakarta 12190 Indonesia Telp : +6221 5265045 Fax : +6221 5274477,527557 Email : corporate.secretary@bankmandiri.co.id
Situs Web Website	www.bankmandiri.co.id
Total Aset tahun 2022 Total Assets 2022	Rp1.992,54 triliun IDR1,992.54 trillion

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk per 31 Desember 2022

Composition of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as of December 31, 2022

Dewan Komisaris | Board of Commissioners	
Komisaris Utama/Komisaris Independen | President Commissioner/Independent Commissioner	Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen | Vice President Commissioner/Independent	Andrinof A. Chaniago
Komisaris Independen | Independent Commissioner	Boedi Armanto
Komisaris Independen | Independent Commissioner	Loeke Larasati Agoestina
Komisaris Independen | Independent Commissioner	Muliadi Rahardja

Komisaris I Commissioner	Rionald Silaban
Komisaris I Commissioner	Nawal Nely
Komisaris I Commissioner	Faried Utomo
Komisaris I Commissioner	Arif Budimanta
Komisaris I Commissioner	Muhammad Yusuf Ateh

Direksi I Board of Director	
Direktur Utama I President Director	Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama I Vice President Director	Alexandra Askandar
Direktur Manajemen Risiko I Director of Risk Management	Ahmad Siddik Badruddin
Direktur *Information Technology* I Director of Information Technology	Timothy Utama
Direktur Kepatuhan dan SDM I Director of Compliance and HR	Agus Dwi Handaya
Direktur *Treasury* & *International Banking* I Director of Treasury and International Banking	Panji Irawan
Direktur *Commercial Banking* I Director of Commercial Banking	Riduan
Direktur Jaringan & *Retail Banking* I Director of Network and Retail Banking	Aquarius Rudianto
Direktur *Operation* I Director of Operation	Toni Eko Boy Subari
Direktur *Corporate Banking* I Director of Corporate Banking	Susana Indah K. Indriarti
Direktur Hubungan Kelembagaan I Director of Institutional Relations	Rohan Hafas
Direktur Keuangan & Strategi I Director of Finance and Strategy	Sigit Prastowo

PT ASCO INVESTINDO

Informasi Umum PT Asco Investindo

PT ASCO INVESTINDO

General Information of PT Asco Investindo

Nama Perusahaan Company Name	PT Asco Investindo
Tanggal Pendirian Date of Establishment	1989
Bidang Usaha Business Line	*Capital Investment*
Alamat Kantor Pusat Headquarter Address	Jl. Raya Pasar Minggu No. 8 RT/RW 001/007 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Situs Web Website	www.asco.co.id

PT TUNAS RIDEAN TBK

Informasi Umum PT Tunas Ridean Tbk

PT TUNAS RIDEAN TBK

General Information of PT Tunas Ridean Tbk

Nama Perusahaan Company Name	PT Tunas Ridean Tbk
Tanggal Pendirian Date of Establishment	24 Juli 1980 July 24, 1980
Bidang Usaha Business Line	Keagenan, Penyaluran, Industri, Perdagangan, dan Pengangkutan Agency, Distribution, Industry, Trade and Transportation
Pencatatan Saham Share Listing	Bursa Efek Indonesia, 16 Mei 1995, kode saham "TURI" Indonesian Stock Exchange, May 16, 1995, stock code "TURI"
Jaringan Usaha Business Network	161 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia 161 outlets spread all over Indonesia
Alamat Kantor Pusat Headquarter Address	Jl. Raya Pasar Minggu No. 7 Jakarta 12740, Indonesia Telp : +6221 794 4788, 799 5621 Fax : +6221 150 0798 Email : info@tunasgroup.com
Situs Web Website	www.tunasgroup.com

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING

Perusahaan tidak mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi tentang kronologis penerbitan dan pencatatan saham.

The Company does not list and trade its shares on any stock exchange. Therefore, there is no information on the chronology of the issuance and listing of shares.

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF ISSUANCE AND LISTING OTHER SECURITIES

Perusahaan tidak menerbitkan dan mencatatkan obligasi maupun efek di bursa efek manapun. Perusahaan juga tidak menerbitkan surat utang efek dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi tentang kronologis penerbitan dan pencatatan obligasi serta efek lainnya.

The Company does not issue and list bonds or securities on any stock exchange. The Company also does not issue securities in any form. Therefore, there is no information concerning the chronology of the issuance and listing of bonds and other securities.

INFORMASI TENTANG STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA, ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI SERTA *JOINT VENTURE* (JV) DAN *SPECIAL PURPOSE VEHICLE* (SPV)

INFORMATION ABOUT THE STRUCTURE OF THE GROUP AND BUSINESS GROUP, SUBSIDIARIES, ENTITIES ASSOCIATION AND JOINT VENTURE (JV) AND SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

Perusahaan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, maupun Kerja Sama Operasi (KSO) atau bentuk *Special Purpose Vehicle* (SPV) lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang nama entitas anak dan/atau asosiasi, persentase kepemilikan saham, keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi, dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi. Selain itu, Perusahaan juga tidak memiliki struktur grup dan kelompok usaha. Informasi terkait korporasi pemegang saham hingga ke entitas pemilik akhir telah disampaikan pada bagian informasi tentang pemegang saham.

The Company has no subsidiaries, associates, or Joint Operations (KSO) or other forms of Special Purpose Vehicle (SPV). Therefore, there is no information on the names of subsidiaries and/or associates, percentage of share ownership, information on the business fields of subsidiaries and/or associates, and information on the operating status of subsidiaries and/or associates. In addition, the Company also has no group and business group structure. Information related to the shareholders corporation to the ultimate owner name has been submitted in the information on shareholders section.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

INSTITUTIONS AND SUPPORTING PROFESSIONS OF CAPITAL MARKET

AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTING FIRM	
Nama Perusahaan Company Name	Purwantono, Sungkoro & Surja (*Ernst & Young Global Limited*)
Alamat Address	Gedung Indonesia Stock Exchange Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 Telp. (021) 52895000
Jasa yang Diberikan Services Provided	Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 31 Desember 2022 Audit Services for the Company's Financial Statements for the Fiscal Year December 31, 2022
Periode Penugasan Assignment Period	2022
Biaya Fee	Rp840.000.000 (belum termasuk PPN) IDR840,000,000 (not including VAT)

WEBSITE PERUSAHAAN

COMPANY WEBSITES

Situs web merupakan sumber informasi yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Perusahaan memiliki situs web dengan alamat www.muf.co.id sebagai situs web korporasi yang memberikan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Situs web ini tersedia dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perusahaan secara berkala memperbarui situs web untuk senantiasa memberikan informasi terbaru kepada para pemangku kepentingan.

The website is the most accessible information source for general public. The Company has website with the address www.muf.co.id as a corporate website that provides information disclosure to all stakeholders. This website is available in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. The Company regularly updates the website to always provide the latest information to the stakeholders.

No	**Cakupan Informasi** Information Coverage	**Ketersediaan di Situs MUF** Availability on MUF Website
1	Struktur grup perusahaan dan informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Company group structure and information on shareholders up to individual ultimate shareholders	√
2	Isi Kode Etik Content of the Code of Conducts	√
3	Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information concerning the General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes material on agendas discussed in the GMS, a summary of the GMS minutes, and information on important dates, namely the date of the GMS announcement, the GMS invitation to the GMS date, the date on which the summary of the GMS minutes is announced	√
4	Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) Annual financial statement (the last 5 years)	√
5	Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors	√
6	Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Unit Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Internal Audit	√
7	Produk dan jasa/layanan yang diberikan oleh Perusahaan Products and services/services provided by the Company	√

04

Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

ECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW

ANALISIS EKONOMI

Konflik geopolitik yang terjadi beberapa kawasan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian global di tahun 2022. Puncaknya, invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina yang dilancarkan sejak Februari 2022 dan belum berakhir hingga saat ini.

Salah satu dampak terbesar dari perang Rusia dan Ukraina adalah menurunnya pasokan gas dan minyak bumi sehingga harga komoditas energi tersebut melonjak sangat tinggi. Lonjakan harga tersebut terjadi saat sebagian besar negara di dunia tengah gencar melakukan pemulihan ekonomi setelah dihantam krisis akibat pandemi COVID-19.

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya disrupsi pada rantai pasok global, karena banyak negara memilih untuk membatasi ekspor agar dapat memenuhi kebutuhan domestiknya. Disrupsi rantai pasok global ini mengerek harga komoditas, sehingga menyebabkan inflasi tinggi di banyak negara.

ECONOMIC ANALYSIS

The geopolitical conflicts that occurred in several regions had a huge impact on the global economy in 2022. The climax was the Russian invasion of Ukraine which was launched in February 2022 and has not ended to date.

One of the biggest impacts of the war between Russia and Ukraine was the decline in the supply of gas and oil so that the price of these energy commodities soared very high. This price spike occurred when most countries in the world were intensively recovering their economies after being hit by the crisis due to the COVID-19 pandemic.

This resulted in disruption to global supply chains, because many countries chose to limit exports in order to meet their domestic needs. This global supply chain disruption has driven up commodity prices, causing high inflation in many countries.

Merespons kondisi tersebut, bank sentral di berbagai negara mengambil kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan. Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), misalnya, sepanjang tahun 2022 (hingga November 2022) tercatat telah menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut menjadi 4,50%. Hal tersebut dilakukan untuk menekan tingkat inflasi di Amerika Serikat yang telah mendekati level tertinggi sejak awal 1980-an. Kendati tidak seekstrim The Fed, Bank Sentral Eropa (ECB) juga mengambil kebijakan yang sama di tahun 2022.

Kebijakan tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia, khususnya pada negara-negara miskin dan negara berkembang, karena menguatnya nilai tukar Dolar AS terhadap mata uang negara lainnya.

Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) melalui laporan *World Economic Outlook* beberapa kali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022 dengan tren yang terus menurun. Terakhir pada laporan yang dipublikasikan pada Oktober 2022, IMF memprediksi ekonomi dunia hanya akan tumbuh 3,2% di tahun 2022 dan akan kembali turun menjadi 2,7% di tahun 2023, padahal di tahun 2021 ekonomi dunia tumbuh sebesar 6,0%.

Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh dengan cukup baik. Fundamental ekonomi yang cukup kuat dan didukung pasar yang besar serta kekayaan alam yang melimpah, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh dengan cukup baik di tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 salah satunya didukung oleh kinerja ekspor yang sangat baik sehingga secara umum neraca perdagangan indonesia tahun 2022 mengalami surplus USD50,59 miliar (hingga November 2022). Pencapaian tersebut bahkan telah melampaui surplus neraca perdagangan pada puncak periode *boom* komoditas di tahun 2011 yang sebesar USD22,2 miliar.

Dengan kinerja ekspor yang sangat baik tersebut, tahun 2022 ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,31%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di 2022 terutama dikontribusikan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang sebelumnya tertahan selama COVID-19.

Responding to these conditions, central banks in various countries adopted policies to raise their benchmark interest rate. The United States Central Bank (The Fed) for example, throughout 2022 (until November 2022) was recorded as having raised interest rates 7 (seven) times in a row to 4.50%. This was done to reduce the inflation rate in the United States which has been approaching its highest level since the early 1980s. Although not as extreme as the Fed, the European Central Bank (ECB) will also adopt the same policy in 2022.

This policy had a huge impact on the world economy, especially in poor and developing countries, due to the strengthening of the US Dollar exchange rate against other countries' currencies.

The International Monetary Fund (IMF) through the World Economic Outlook report has revised its projections for global economic growth in 2022 several times with a downward trend. Finally, in a report published in October 2022, the IMF predicts that the world economy will only grow 3.2% in 2022 and will fall again to 2.7% in 2023, even though in 2021 the world economy will grow by 6.0%.

Amidst these conditions, the Indonesian economy was still able to grow quite well. Economic fundamentals are quite strong and supported by a large market and abundant natural wealth, the Indonesian economy can still grow quite well in 2022.

One of the reasons for Indonesia's economic growth in 2022 is the excellent export performance so that in general, Indonesia's trade balance in 2022 will experience a surplus of USD50.59 billion (until November 2022). This achievement has even exceeded the trade balance surplus at the peak of the commodity boom period in 2011 which amounted to USD22.2 billion.

With this excellent export performance, in 2022 the Indonesian economy can still grow better than the previous year, which was 5.31%. The relatively high economic growth in 2022 was mainly contributed by an increase in household consumption which was previously restrained during COVID-19.

Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada kinerja berbagai lapangan usaha dan seluruh wilayah yang tetap baik. Hal tersebut didorong oleh perbaikan permintaan domestik sejalan dengan terus meningkatnya mobilitas dan berlanjutnya penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN).

Namun demikian, tingkat inflasi Indonesia tahun 2022 meningkat cukup signifikan menjadi 5,51% dari tahun sebelumnya sebesar 1,87%. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan Pemerintah pada September 2022 akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Selain itu, ketergantungan Indonesia pada impor gandum, kedelai, daging, farmasi, energi, dan mesin berteknologi tinggi juga berdampak pada naiknya inflasi.

Untuk menekan laju inflasi, Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) dengan cukup agresif dari 3,50% di akhir tahun 2021 menjadi 5,50% di akhir tahun 2022 untuk memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3±1%.

Pemerintah terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran PEN menjadi Rp455,6 triliun yang dibagi dalam 3 kluster, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi. Dari ketiga program itu, penguatan ekonomi memiliki pos anggaran terbesar, yakni Rp178,3 triliun yang sebagian peruntukannya untuk dukungan UMKM.

Tahun 2022, UMKM diarahkan untuk mempercepat pemulihan dan penyerapan tenaga kerja, mitigasi dampak *scarring effect* dari pandemi dan menciptakan pemulihan ekonomi yang inklusif. Kinerja tersebut akan ditopang penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat.

Improvement in the national economy is also reflected in the performance of various business fields and all regions which remain good. This was driven by improving domestic demand in line with the continued increase in mobility and the continued completion of the National Strategic Program (PSN).

However, Indonesia's inflation rate in 2022 will increase significantly to 5.51% from 1.87% in the previous year. This was partly due to the increase in the price of subsidized fuel oil by the Government in September 2022 due to the soaring world crude oil prices as a result of the war between Russia and Ukraine. In addition, Indonesia's dependence on imports of wheat, soybeans, meat, pharmaceuticals, energy, and high-tech machinery also has an impact on rising inflation.

To reduce the inflation rate, Bank Indonesia (BI) took a policy to raise the benchmark interest rate or BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) quite aggressively from 3.50% at the end of 2021 to 5.50% at the end of 2022 to ensure that future core inflation returns to within the 3±1% target.

The government continues to strive to maintain national economic growth, one of them is through the National Economic Recovery (PEN) program. In 2022, The government has allocated a PEN budget of IDR455.6 trillion which is divided into 3 clusters, namely handling health, social protection and strengthening the economy. Of the three programs, strengthening the economy has the largest budget item, namely IDR178.3 trillion, a portion of which is allocated for MSME support.

In 2022, MSMEs are directed to accelerate recovery and employment, mitigate the scarring effect of the pandemic and create an inclusive economic recovery. This performance will be supported by strengthening investment and exports as well as the continued recovery of public consumption.

ANALISIS INDUSTRI PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional, industri pembiayaan juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan data Statistik Lembaga Pembiayaan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tahun 2022 (hingga November 2022) jumlah piutang pembiayaan-net mencapai Rp409,49 triliun, tumbuh 12,96% (yoy). Piutang pembiayaan utamanya masih dari pembiayaan Konvensional yang mencapai Rp391,12 triliun, sedangkan piutang pembiayaan Syariah hanya sebesar Rp18,37 triliun.

Pertumbuhan industri pembiayaan juga tercermin dari total aset industri yang meningkat menjadi Rp478,26 triliun (November 2022) dari tahun sebelumnya sebesar Rp432,82 triliun. Namun demikian, di tengah kondisi pertumbuhan tersebut, industri pembiayaan justru mengalami konsolidasi. Jumlah pemain di industri pembiayaan berkurang dari 162 perusahaan pada (November) 2021 menjadi 153 perusahaan pada (November) 2022.

Pembiayaan kendaran bermotor, roda dua dan roda empat, baik kendaraan baru maupun bekas, masih menjadi kontributor terbesar bagi industri pembiayaan. Total piutang pembiayaan kendaraan bermotor – bruto tahun (November) 2022 mencapai Rp273,68 triliun, tumbuh 11,16% (yoy) dari tahun sebelumnya Rp246,21 triliun.

Pertumbuhan piutang pembiayaan kendaraan bermotor tersebut sejalan dengan tumbuhnya penjualan otomotif di Indonesia di tahun 2022. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 5.221.470 unit. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 5.057.516 unit. Namun demikian, volume ekspor sepeda motor tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebanyak 743.551 unit dari tahun sebelumnya 803.931 unit.

Demikian juga halnya dengan penjualan kendaran roda empat yang berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencapai sebanyak 1.013.582 unit atau naik 17,4% dibandingkan periode sama 2021 sebanyak 863.358 unit.

ANALYSIS OF MOTOR VEHICLE FINANCING INDUSTRY

In line with the improvement in national economic growth, the financing industry has also grew quite well. Based on Financing Institution Statistics data published by the Financial Services Authority (OJK), in 2022 (until November 2022) total net-financing receivables reached IDR409.49 trillion, growing 12.96% (yoy). The main financing receivables were still from Conventional financing which reached IDR391.12 trillion, while Sharia financing receivables were only IDR18.37 trillion.

The growth of financing industry was also reflected in the industry's total assets which increased to IDR478.26 trillion (November 2022) from the previous year of IDR432.82 trillion. However, in the midst of these growth conditions, the financing industry experienced consolidation. The number of players in the financing industry has decreased from 162 companies in (November) 2021 to 153 companies in (November) 2022.

Financing for motorized, two-wheeled and four-wheeled vehicles, both new and used vehicles, is still the largest contributor to the financing industry. Total motor vehicle financing receivables - gross for the year (November) 2022 reached IDR273.68 trillion, growing 11.16% (yoy) from IDR246.21 trillion the previous year.

The growth in motor vehicle financing receivables is in line with the growth in automotive sales in Indonesia in 2022. Based on data from the Indonesian Motorcycle Industry Association (AISI), motorcycle sales throughout 2022 were recorded at 5,221,470 units. This achievement was higher than the previous year of 5,057,516 units. However, the export volume of motorcycles in 2022 decreased by 743,551 units from the previous year's 803,931 units.

Likewise, sales of four-wheeled vehicles, which based on data from the Association of Indonesian Automotive Industries (Gaikindo), reached 1,013,582 units, an increase of 17.4% compared to the same period in 2021 of 863,358 units.

INISIATIF DAN KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2022

INITIATIVES AND STRATEGIC POLICY IN 2022

Menghadapi tantangan di tahun 2022, Perusahaan telah menetapkan sejumlah strategi untuk menjaga dan memastikan pencapaian target. Fokus strategi Perusahaan tahun 2022 antara lain:

1. Melanjutkan pelaksanaan Program Restrukturisasi COVID-19 secara selektif untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan melaksanakan Program Restrukturisasi Berulang (Re-Restrukturisasi) COVID-19 untuk akun yang pernah melakukan Restrukturisasi COVID-19 demi menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan Total Aset Perusahaan, dengan tetap memperhatikan POJK No. 30/P0JK.05/2021.
2. Melakukan kegiatan pembiayaan dengan lebih selektif, sehingga kualitas portofolio Perusahaan tetap terjaga melalui peningkatan utilitas informasi calon Debitur melalui data Pefindo Biro Kredit, data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan *Credit Scoring*.

Facing the challenges in 2022, the Company has established a number of strategies to maintain and ensure target achievement. The focus of the Company's strategy for 2022 includes:

1. Continuing the implementation of the COVID-19 Restructuring Program selectively to maintain the quality of the financing portfolio and implementing the COVID-19 Restructuring Program for accounts that have carried out the COVID-19 Restructuring in order to maintain the quality of the financing portfolio and the Company's Total Assets, while still taking into account to POJK No. 30/P0JK.05/2021.
2. Carry out financing activities more selectively, so that the quality of the Company's portfolio is maintained through increasing the utility of information on prospective Debtors through Pefindo Credit Bureau data, Directorate General of Population and Civil Registry (DUKCAPIL) data, Financial Information Service System (SLIK) data and Credit Scoring.

3. Memastikan risiko likuiditas terkelola dengan baik.
4. Mengembangkan fitur-fitur MONA dalam bentuk *virtual assistant* yang dapat memberikan lebih banyak layanan kepada konsumen, sehingga dapat menjadi alternatif konsumen dalam menentukan kebutuhan kendaraan bermotor melalui berbagai promosi dan rekomendasi terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang dimiliki MUF. Selain itu, MUF juga terus melakukan penyempurnaan fitur-fitur layanan pada program *digital marketing* yaitu MOAS (MUF *Online AutoShow*) untuk Pembiayaan Konvensional dan MOS (MUF *Online Autoshow Sharia*) untuk Pembiayaan Syariah.
5. Mengoptimalkan pengelolaan aktivitas dan media komunikasi digital untuk memberikan layanan dan informasi program serta produk pembiayaan kepada masyarakat luas dengan konten yang menarik dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.
6. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki secara berkesinambungan melalui program pelatihan yang efektif melalui media *online*.
7. Meningkatkan produktivitas penjualan multi produk pembiayaan (termasuk pembiayaan Syariah) dari jaringan sumber *order* pembiayaan yang dimiliki Perusahaan dan kerja sama sinergi bisnis dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku induk Perusahaan dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selain itu, dukungan pendanaan *Joint Finance* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk semakin memperkuat sumber dana Perusahaan.
8. Membangun dan memperluas kerja sama yang kuat dengan rekanan *dealer* dan *showroom* serta mitra bisnis yang bekerja sama dengan Perusahaan guna meningkatkan *booking sales* untuk meraih momentum *economic recovery* di tahun 2022.
9. Melaksanakan perluasan dan pengembangan program *marketing* dengan tujuan segmen tertentu.
10. Melakukan pengembangan dan izin jaringan Kantor Cabang (KC), Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC), Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC-US), dan Kantor Selain Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KSKC-US).

3. Ensuring liquidity risk is well managed.
4. Developing MONA features in the form of virtual assistants that can provide more services to consumers, so that they can become an alternative for consumers in determining their needs for motorized vehicles through various promotions and recommendations for financial products and services owned by MUF. In addition, MUF also continues to improve service features in digital marketing programs, namely MOAS (MUF Online AutoShow) for Conventional Financing and MOS (MUF Online Autoshow Sharia) for Sharia Financing.
5. Optimizing the management of activities and digital communication media to provide services and information on programs and financing products to the wider community with interesting content while taking into account the applicable provisions of the Financial Services Authority (OJK).
6. Improving the capabilities and competencies of human resources on an ongoing basis through effective training programs through online media.
7. Increasing the sales productivity of multi-finance products (including Sharia financing) from the financing order source network owned by the Company and business synergy cooperation with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the parent Company and PT Bank Syariah Indonesia Tbk. In addition, Joint Finance funding support from PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Syariah Indonesia Tbk further strengthened the Company's sources of funds.
8. Build and expand strong partnerships with dealer and showroom partners and business partners who work with the Company to increase booking sales to achieve economic recovery momentum in 2022.
9. Carry out the expansion and development of marketing programs with specific segment objectives.
10. Develop and permit network branch offices (KC), offices other than branch offices (KSKC), Sharia business unit branch offices (KC-US), and offices other than Sharia business unit branch offices (KSKC-US).

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

OPERATIONS OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Laporan keuangan Mandiri Utama Finance yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja belum memisahkan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 (lima) (Revisi 2015) tentang Segmen Operasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perusahaan memiliki segmen usaha tunggal.

Untuk dapat memberikan gambaran tentang operasi dan bisnis Perusahaan, segmen dibagi berdasarkan struktur pendapatan, yang terbagi ke dalam 5 (lima) kelompok besar, yaitu Pembiayaan Konsumen, Pembiayaan *Murabahah*, Sewa Pembiayaan, Bunga dan Marjin, serta Lain-lain.

The financial statements of Mandiri Utama Finance which have been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja have not separated from applying Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 (five) (Revised 2015) regarding Operating Segments, so it can be concluded that the Company has a single business segment.

In order to provide an overview of the Company's operations and business, segments are divided based on income structure, which are divided into 5 (five) major groups, namely Consumer Financing, Murabaha Financing, Finance Leases, Interest and Margin, and Others.

Segmen Operasi MUF Sesuai Struktur Pendapatan

MUF Operating Segment According to Revenue Structure

Untuk dapat memberikan gambaran awal tentang skala bisnis masing-masing segmen dan kontribusinya terhadap Perusahaan, berikut disampaikan struktur pendapatan yang menggambarkan masing-masing segmen.

To be able to provide an initial picture of the business scale of each segment and its contribution to the Company, the following is a revenue structure that describes each segment.

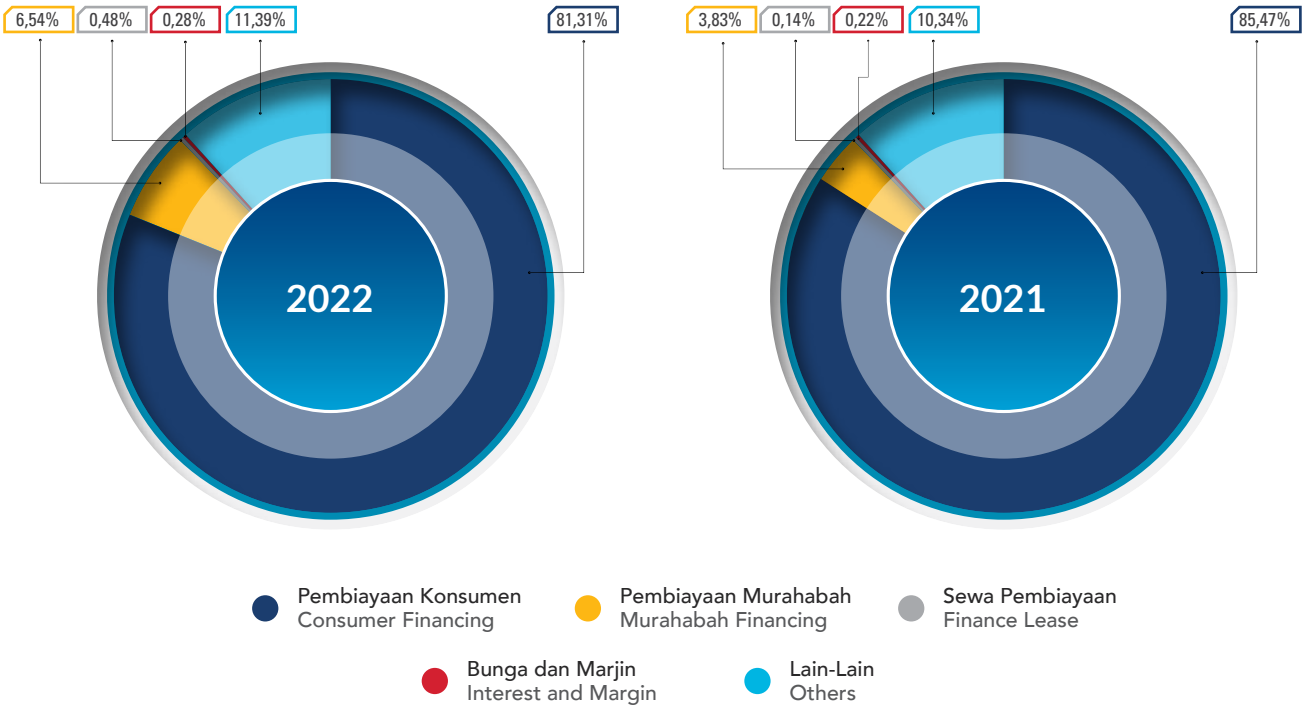

Tahun 2022, segmen pembiayaan konsumen masih menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan Perusahaan, yaitu mencapai 81,31%. Komposisi pendapatan Perusahaan tahun 2022 relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2022, the consumer financing segment will still be the largest contributor to the Company's revenue, reaching 81.31%. The composition of the Company's revenue in 2022 remained relatively unchanged compared to the previous year.

PEMBIAYAAN KONSUMEN
CONSUMER FINANCING

KEGIATAN OPERASI DAN USAHA PEMBIAYAAN KONSUMEN

OPERATIONS AND BUSINESS ACTIVITIES OF CONSUMER FINANCING

Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Saat ini produk yang dapat dibiayai oleh Mandiri Utama Finance dalam pembiayaan konsumen adalah kepemilikan motor dan mobil.

Consumer financing is a financing activity for the procurement of goods based on consumer needs with an installment or periodic payment system by the consumer. Currently, products that can be financed by Mandiri Utama Finance in consumer financing are motorcycle and car ownership.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA SEGMEN PEMBIAYAAN KONSUMEN TAHUN 2022

Sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional dan meningkatnya kemampuan dan daya beli masyarakat, MUF berupaya untuk mengembangkan pembiayaan konsumen dengan stabilitas yang kuat, melalui strategi sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas layanan: Kualitas layanan yang baik akan memberikan kepuasan pelanggan dan membantu menjaga loyalitas pelanggan. MUF saat ini melakukan peningkatan kualitas produk dan layanan, memberikan solusi kebutuhan finansial yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta memberikan pelayanan yang cepat dan responsif.
2. Memperluas jaringan kantor cabang: Memperluas jaringan kantor cabang dapat membantu memperluas cakupan bisnis dan meningkatkan penetrasi pasar.
3. Memperkenalkan program baru: program baru yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar dapat membantu meningkatkan daya tarik bisnis dan menarik minat pelanggan baru. MUF membuat 2 program baru yakni *Selected Segment* dan *Product Collaboration*.
4. Peningkatan kolaborasi dengan *digital channel* dalam pemasaran pembiayaan.

BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY FOR CONSUMER FINANCING SEGMENT IN 2022

In line with the improvement in the national economy and the increasing ability and purchasing power of the people, MUF seeks to develop consumer financing with strong stability, through the following strategies:

1. Maintaining the service quality: Good service quality will provide customer satisfaction and assisted in maintaining customer loyalty. MUF is currently improving product and service quality, providing solutions to financial needs that suit customer needs, and providing fast and responsive service.
2. Expanding the branch network: Expanding the branch network can assist in expanding business coverage and increase market penetration.
3. Introducing new programs: innovative new programs and following the market needs can assist in increasing business attractiveness and attract new customers. MUF created 2 new programs namely Selected Segment and Product Collaboration.
4. Increasing collaboration with digital channels in financing marketing.

Kinerja Segmen Pembiayaan Konsumen
Consumer Financing Segment Performance

dalam juta Rupiah — in million Rupiah

Uraian Description	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (decrease)	
	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Piutang Pembiayaan Konsumen Net Net Consumer Financing Receivables	**6.121.238**	**100,00**	5.139.102	100,00	982.136	19,11
Motor Motorcycle	**1.546.354**	**25,26**	1.473.025	28,66	73.329	4,98
Mobil Car	**4.574.884**	**74,74**	3.666.077	71,34	908.807	24,79

Tahun 2022, total piutang pembiayaan konsumen tercatat sebesar Rp6,12 triliun, meningkat Rp982,136 triliun atau 19,11% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp5,14 triliun. Piutang pembiayaan konsumen utamanya masih berasal dari pembiayaan mobil yang pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp4,57 triliun, meningkat 24,79% dari tahun sebelumnya Rp3,67 triliun. Sedangkan pembiayaan motor tahun 2022 tercatat sebesar Rp1,54 triliun, meningkat 4,98% dari tahun sebelumnya Rp1,47 triliun.

In 2022, total consumer financing receivables are recorded at IDR6.12 trillion, an increase of IDR982.136 trillion or 19.11% compared to 2021 of IDR5.14 trillion. The main consumer financing receivables still come from car financing which in 2022 was recorded at IDR4.57 trillion, an increase of 24.79% from IDR3.67 trillion in the previous year. Meanwhile, motorcycle financing in 2022 was recorded at IDR1.54 trillion, an increase of 4.98% from the previous year of IDR1.47 trillion.

Pendapatan Segmen Pembiayaan Konsumen
Revenue of Consumer Financing Segment

dalam juta Rupiah — in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Pembiayaan Konsumen Consumer Financing Income	**1.799.841**	1.289.742	510.100	39,55%

Segmen pembiayaan konsumen tahun 2022 membukukan pendapatan sebesar Rp1,80 triliun, meningkat Rp510,10 miliar atau 39,55% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,29 triliun. Peningkatan pendapatan segmen pembiayaan konsumen di tahun 2022 utamanya disebabkan meningkatnya nilai pembiayaan konsumen.

The consumer financing segment in 2022 recorded revenue of IDR1.80 trillion, an increase of IDR510.10 billion or 39.55% compared to 2021 of IDR1.29 trillion. The increase in the consumer financing segment revenue in 2022 was mainly due to the increase in the value of consumer financing.

PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

MURABAHA FINANCING

KEGIATAN OPERASI DAN USAHA PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang disalurkan berdasarkan prinsip Syariah dengan menggunakan akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA SEGMEN PEMBIAYAAN MURABAHAH TAHUN 2022

Strategi pengembangan usaha segmen pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan Tahun 2022 yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi pemahaman masyarakat tentang konsep pembiayaan *Murabahah*: Pemahaman yang lebih baik tentang konsep pembiayaan *Murabahah* dapat membantu meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkannya.
2. Peningkatan kontribusi nilai pembiayaan *Murabahah* dari *Captive* Bank Syariah Indonesia.
3. Memperluas jaringan kantor cabang: Memperluas jaringan kantor cabang dapat membantu memperluas cakupan bisnis dan meningkatkan penetrasi pasar.

OPERATIONS AND BUSINESS ACTIVITIES OF MURABAHAH FINANCING

Murabahah financing is financing channeled based on Sharia principles using a Murabahah contract. Murabaha contract is a contract of sale and purchase of goods at a price equal to the cost price plus the agreed profit.

BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY FOR MURABAHAH FINANCING SEGMENT IN 2022

The business development strategy for the Murabahah financing segment to be carried out in 2022 is as follows:

1. Increasing socialization of public understanding of the concept of Murabahah financing: A better understanding of the concept of Murabahah financing can assist in increasing public interest and trust in utilizing it.
2. Increasing the value contribution of Murabahah financing from Captive Bank Syariah Indonesia.
3. Expanding the branch network: Expanding the branch network can help expand business coverage and increase market penetration

Kinerja Operasi Segmen Pembiayaan *Murabahah*
Murabahah Financing Segment Performance

dalam juta Rupiah — in million Rupiah

Uraian Description	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Piutang Pembiayaan *Murabahah Net* Net Murabahah Financing Receivables	**659.982**	**100,00**	439.490	100,00	220.492	50,17
Motor Motorcycle	**170.641**	**25,86**	89.521	20,37	81.120	90,62
Mobil Car	**489.340**	**74,14**	349.969	79,63	139.371	39,82

Total piutang pembiayaan *Murabahah* tahun 2022 tercatat sebesar Rp659,98 miliar, meningkat Rp220,49 miliar atau 50,17% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp439,49 miliar. Pembiayaan motor dengan skema pembiayaan *Murabahah* tahun 2022 tercatat sebesar Rp170,64 miliar, meningkat 90,62% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp89,52 miliar. Sedangkan pembiayaan mobil dengan skema pembiayaan *Murabahah* di tahun 2022 mencapai Rp489,34 miliar, meningkat 39,82% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp349,97 miliar.

Total Murabahah financing receivables in 2022 were recorded at IDR659.98 billion, an increase of IDR220.49 billion or 50.17% compared to the previous year of IDR439.49 billion. Motorcycle financing under the Murabahah financing scheme in 2022 was recorded at IDR170.64 billion, an increase of 90.62% compared to the previous year of IDR89.52 billion. Meanwhile, car financing with a Murabahah financing scheme in 2022 reached IDR489.34 billion, an increase of 39.82% compared to the previous year of IDR349.97 billion.

Pendapatan Segmen Pembiayaan *Murabahah*
Murabahah Financing Segment Revenue

dalam juta Rupiah — in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* Murabahah Financing Income	**144.829**	58.494	86.335	147,60

Segmen pembiayaan *Murabahah* tahun 2022 membukukan pendapatan sebesar Rp144,83 miliar, meningkat Rp86,34 miliar atau 147,60% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp58,49 miliar. Peningkatan pendapatan segmen pembiayaan *Murabahah* di tahun 2022 utamanya disebabkan peningkatan kolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia sehingga nilai pembiayaan Sharia dapat meningkat.

Murabahah financing segment in 2022 posted revenue of IDR144.83 billion, increase IDR86.34 billion or 147,60% compared to 2021 of IDR58.49 billion. The increase in Murabahah financing segment revenue in 2022 is mainly due to increased collaboration with Bank Syariah Indonesia so that the value of Sharia financing increased.

SEWA PEMBIAYAAN
FINANCING LEASE

KEGIATAN OPERASI DAN USAHA SEWA PEMBIAYAAN

OPERATIONS AND BUSINESS ACTIVITIES OF FINANCE LEASE

Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, di mana secara berkala *lessor* menerima pembayaran dari *lessee* dan di akhir masa sewa terdapat hak opsi bagi *lessee* untuk mengambil alih aset atau barang modal tersebut.

Finance Lease is a financing activity in the form of providing capital goods, whereby the lessor periodically receives payments from the lessee and at the end of the lease term there is an option right for the lessee to take over the assets or capital goods.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA SEGMEN SEWA PEMBIAYAAN TAHUN 2022

Strategi yang digunakan dalam pengembangan bisnis Sewa Pembiayaan adalah dengan melakukan pemasaran lebih lanjut dengan menargetkan nasabah korporasi yang memerlukan investasi barang modal, dengan menitikberatkan pembiayaan ke nasabah yang bergerak di sektor ekonomi potensial yang sedang mengalami pertumbuhan bagus.

BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY OF FINANCE LEASE SEGMENT FOR 2022

The strategy used in developing the Finance Lease business is to carry out further marketing by targeting corporate customers who require capital goods investment, with an emphasis on financing to customers engaged in potential economic sectors that are experiencing good growth.

Kinerja Operasi Segmen Sewa Pembiayaan
Operational Performance of Finance Lease Segment

dalam juta Rupiah — in million Rupiah

Uraian Description	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Piutang Sewa Pembiayaan Financing Lease Receivables	**89.727**	**100,00**	40.409	100,00	49.318	122,05
Motor Motorcycle	**-**	**-**	-	-	-	-
Mobil Car	**89.727**	**100,00**	40.409	100,00	49.318	122,05

Di tahun keduanya beroperasi, segmen sewa pembiayaan mencatat kinerja yang cukup baik dengan membukukan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp89,73 miliar, meningkat Rp49,32 miliar atau 122,05% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp40,41 miliar.

In its second year of operation, the finance lease segment recorded a fairly good performance by recording finance lease receivables of IDR89.73 billion, increase IDR49.32 billion or 122.05% compared to 2021 of IDR40.41 billion.

Pendapatan Segmen Sewa Pembiayaan
Finance Lease Segment Revenue

dalam juta Rupiah — in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Sewa Pembiayaan Financing Lease Income	**10.626**	2.192	8.434	384,76

Segmen sewa pembiayaan tahun 2022 membukukan pendapatan sebesar Rp10,63 miliar, meningkat Rp8,43 miliar atau 384,76% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,19 miliar. Peningkatan pendapatan segmen sewa pembiayaan di tahun 2022 utamanya disebabkan meningkatnya piutang sewa pembiayaan.

The finance lease segment in 2022 posted revenue of IDR10.63 billion, increase IDR8.43 billion or 384.76% compared to 2021 of IDR2.19 billion. The increase in revenue from the finance lease segment in 2022 was mainly due to an increase in finance lease receivables.

LAIN-LAIN
OTHERS

KEGIATAN OPERASI DAN USAHA LAIN-LAIN
OPERATIONAL ACTIVITIES AND OTHER BUSINESSES

Merupakan pendapatan yang diperoleh selain dari Pendapatan Pembiayaan, baik Pembiayaan Konsumen, *Murabahah*, Sewa Guna dan Bunga dan Marjin. Komponen pendapatan lain-lain adalah pendapatan pengurusan asuransi, denda dan penalti pelunasan dipercepat.

Represents income earned apart from Financing Income, both Consumer Financing, Murabahah, Leasing and Interest and Margin. Other components of income are income from insurance processing, fines and early repayment penalties.

Pendapatan Segmen Lain-lain
Other Segment Income

dalam juta Rupiah / in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Pendapatan atas *Handling Fee* Revenue from Handling Fees	**103.866**	71.708	32.158	44,85
Denda keterlambatan Late charge	**46.715**	45.251	1.464	3,24
Penalti pelunasan pembiayaan Financing repayment penalty	**59.136**	37.592	21.544	57,31
Lain-lain Others	**3.841**	3.302	539	16,32
Pendapatan atas aset tarikan dan penghapusbukuan Recorvery and repossessed and written off	**38.502**	35.680	2.822	7,91
Total Pendapatan lain-lain Total Other Income	**252.060**	**193.533**	**58.527**	**30,24**

Tahun 2022, segmen lain-lain membukukan pendapatan sebesar Rp252,06 miliar, meningkat Rp58,53 miliar atau 30,24% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp193,53 miliar. Peningkatan pendapatan segmen lain-lain di tahun 2022 utamanya disebabkan peningkatan pada *Handling Fee* dan Penalti pelunasan pembiayaan. *Handling Fee* yang meningkat karena meningkatnya jumlah nasabah yang dikelola dan dilakukannya pengurusan asuransi. Meningkatnya *penalty* pelunasan pembiayaan disebabkan karena membaiknya keadaan ekonomi pasca pandemi.

In 2022, the other segment was recorded revenue of IDR252.06 billion, an increase of IDR58.53 billion or 30.24% compared to 2021 of IDR193.53 billion. The increase in other segment revenue in 2022 was mainly due to an increase in Handling Fees and Penalties for repayment of financing. Handling Fee which increased due to the increasing number of customers being managed and insurance arrangements being carried out. The increase in the penalty for repayment of financing was due to the improving post-pandemic economic situation.

ASPEK PEMASARAN
MARKET SHARE

Seiring dengan berhasil ditekannya pandemi COVID-19 hingga Triwulan I Tahun 2022, melalui berbagai upaya oleh Pemerintah, sangat mendukung terciptanya suasana yang kondusif dan berputarnya roda perekonomian secara bertahap dan konsisten menuju keseimbangan ekonomi yang baru pasca pandemi COVID-19.

Berdasarkan hal tersebut, di tahun 2022, Manajemen Perusahaan berkomitmen untuk menjaga penyaluran pembiayaan baru dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan strategi antara lain:

1. Penyaluran Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Mandiri secara lebih efektif kepada Nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Penyaluran Pembiayaan BSI OTO secara lebih efektif kepada Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai tindak lanjut atas penandatanganan kerja sama *Joint Finance* tanggal 14 September 2021.
3. Pengajuan penambahan fisik maupun Izin Kantor Cabang (KC), Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC), Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC-US) dan Kantor Selain Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KSKC-US) untuk mendukung pencapaian target pembiayaan baru Perusahaan.
4. Penyaluran pembiayaan Konvensional dan pembiayaan Syariah juga dilakukan secara lebih selektif kepada konsumen umum.
5. Penyusunan program pemasaran yang atraktif dan tematik, termasuk kegiatan pembiayaan pada sektor produktif dengan target sebesar >10% yang mengacu pada ketentuan Rasio Piutang Pembiayaan Pasal 86 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang "Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan".
6. Optimalisasi *database* nasabah Perusahaan untuk ekspansi pasar melalui penawaran produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
7. Meningkatkan program dan komunikasi pemasaran secara digital (digitalisasi).
8. Mengembangkan fitur-fitur MONA (MUF *Online Assistant*) dalam bentuk *virtual assistant* yang dapat memberikan lebih banyak layanan kepada konsumen, sehingga dapat menjadi alternatif bagi konsumen dalam menentukan kebutuhan kendaraan bermotor melalui berbagai promosi dan rekomendasi terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang dimiliki Perusahaan. Perusahaan juga terus melakukan penyempurnaan fitur-fitur layanan pada program *digital marketing* yaitu MOAS (MUF *Online AutoShow*) untuk Pembiayaan Konvensional dan BSI OTO untuk Pembiayaan Syariah.

Along with the successful suppression of the COVID-19 pandemic until Quarter I of 2022, through various efforts by the Government, it really supports the creation of a conducive atmosphere and the gradual and consistent rotation of the wheels of the economy towards a new economic balance after the COVID-19 pandemic.

Based on this, in 2022, the Company's Management is committed to maintaining the distribution of new financing by implementing the precautionary principle with strategies including:

1. More effective distribution of Mandiri Motor Vehicle Loans (KKB) to customers of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Distribution of BSI OTO Financing more effectively to PT Bank Syariah Indonesia Tbk Customers as a follow-up to the signing of the Joint Finance collaboration on September 14, 2021.
3. Submission of physical additions and permits for Branch Offices (KC), Offices Other than Branch Offices (KSKC), Sharia Business Unit Branch Offices (KC-US) and Offices other than Sharia Business Unit Branch Offices (KSKC-US) to support the achievement of new financing targets Company.
4. Distribution of Conventional financing and Sharia financing is also carried out more selectively to general consumers.
5. Preparation of attractive and thematic marketing programs, including financing activities in the productive sector with a target of >10% which refers to the provisions of Article 86 POJK POJK Number 35/POJK.05/2018 concerning "Financing Company Business Implementation".
6. Optimizing the Company's customer database for market expansion through offering financing products that suit consumer needs.
7. Improving digital marketing programs and communications (digitalization).
8. Developing MONA (MUF Online Assistant) features in the form of virtual assistants that can provide more services to consumers, so that they can become an alternative for consumers in determining their needs for motorized vehicles through various promotions and recommendations for financial products and services owned by the Company . The Company also continues to make improvements to service features in the digital marketing program, namely MOAS (MUF Online).

PANGSA PASAR

MARKET SHARE

Pangsa Pasar MUF di Industri Pembiayaan
MUF Market Share in Financing Industry

dalam miliar Rupiah

in billion Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Berdasarkan Piutang Pembiayaan Konvensional Based on Conventional Financing Receivables				
Industri Pembiayaan Nasional* National Financing Industry*	**397.120**	350.557	46.563	13,28
MUF	**6.121**	5.139	982	19,11
Pangsa Pasar MUF (%) MUF Market Share (%)	**1,54**	1,47	0,07	
Berdasarkan Piutang Pembiayaan Syariah Based on Sharia Financing Receivables				
Industri Pembiayaan Nasional* National Financing Industry*	**18.745**	13.674	5.071	37,08
MUF	**660**	439	221	50,34
Pangsa Pasar MUF (%) MUF Market Share (%)	**3,52**	3,21	0,31	
Berdasarkan Aset By Assets				
Industri Pembiayaan Nasional* National Financing Industry*	**487.919**	433.108	54.811	12,66
MUF	**7.567**	6.097	1.470	24,11
Pangsa Pasar MUF (%) MUF Market Share (%)	**1,55**	1,41	0,14	

*) Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia Desember 2022
*) Source: Financial Services Authority (OJK), Statistics of Indonesian Financial Institutions December 2022

Pangsa Pasar MUF di Segmen Pembiayaan Otomotif
MUF's Market Share in Automotive Financing Segment

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Pembiayaan Produk Mobil Car Product Financing				
Nilai Pembiayaan Baru Industri Industry New Financing Value	**250.540**	182.816	67.724	37,05
Nilai Pembiayaan Baru oleh MUF Value of New Financing by MUF	**14.063**	8.590	5.473	63,71
Pangsa Pasar MUF (%) MUF Market Share (%)	**5,61%**	4,70	0,0091	19,46
Pembiayaan Produk Motor Motorcycle Product Financing				
Nilai Pembiayaan Baru Industri Industry New Financing Value	**88.592**	78.076	10.516	13,47
Nilai Pembiayaan Baru oleh MUF Value of New Financing by MUF	**3.835**	3.006	829	27,58
Pangsa Pasar MUF (%) MUF Market Share (%)	**4,33%**	3,85	0,0048	12,43
Jumlah Pembiayaan Produk Mobil dan Motor Number of Car and Motorcycle Product Financing				
Nilai Pembiayaan Baru Industri Industry New Financing Value	**339.133**	260.892	78.241	29,99
Nilai Pembiayaan Baru oleh MUF Value of New Financing by MUF	**17.897**	11.595	6.302	54,35
Pangsa Pasar MUF (%) MUF Market Share (%)	**5,28%**	4,44	0,008	18,74

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

The analysis and discussion of financial performance in this annual report refers to the Financial Statements. The presentation and disclosure of the Company's financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which include Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants.

POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION

dalam juta Rupiah / in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Jumlah Aset Total assets	**7.566.764**	6.097.274	1.469.490	24,10
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**6.610.228**	5.476.875	1.133.353	20,69
Jumlah Ekuitas Total Equity	**956.536**	620.399	336.137	54,18

Posisi keuangan MUF tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Aset Perusahaan tumbuh 24,10%, liabilitas meningkat 20,69% dan sedangkan ekuitas tumbuh cukup signifikan 54,18%.

MUF's financial position in 2022 shows quite good growth compared to the previous year. The Company's assets grew 24.10%, liabilities increased 20.69% and while equity grew quite significantly 54.18%.

ASET
ASSET

dalam juta Rupiah / in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Kas dan Kas di Bank Cash on Hands and Cash in Banks	**336.941**	188.432	148.509	78,81
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih Consumer Financing Receivables - Net	**6.121.238**	5.139.102	982.136	19,11
Piutang Pembiayaan *Murabahah* - Bersih Murabahah Financing Receivables - Net	**659.982**	439.490	220.492	50,17
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih Finance Lease Receivables - Net	**89.727**	40.409	49.318	122,05
Piutang Lain-Lain Other Receivables	**105.400**	59.026	46.374	78,57
Beban Dibayar di Muka Prepaid Expenses	**63.863**	42.463	21.400	50,40
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	**67.888**	52.352	15.536	29,68
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets – Net	**36.062**	36.279	(217)	(0,60)
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	**61.877**	77.378	(15.501)	(20,03)
Aset Lain-lain Other Assets	**23.786**	22.343	1.443	6,46
Jumlah Aset Total assets	**7.566.764**	**6.097.274**	**1.469.490**	**24,10**

ASET
Asset

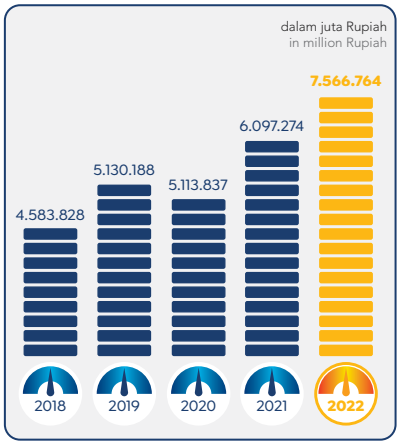

Jumlah aset MUF per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp7,57 triliun, meingkat Rp1,47 triliun atau 24,10% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp6,10 triliun. Peningkatan aset Perusahaan tahun 2022 utamanya disebabkan oleh meningkatnya piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan *Murabahah*.

MUF's total assets as of December 31, 2022 were recorded at IDR7.57 trillion, an increase of IDR1.47 trillion or 24.10% compared to 2021 of IDR6.10 trillion. The increase in the Company's assets in 2022 was mainly due to an increase in finance lease receivables and Murabahah financing receivables.

Kas dan Setara Kas

Jumlah Kas dan Setara Kas MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp336,94 miliar, meningkat Rp148,51 miliar atau 78,81% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp188,43 miliar. Peningkatan jumlah Kas dan Setara Kas tersebut disebabkan karena terjadinya peningkatan pada aktivitas pendanaan, hal ini sejalan dengan meningkatnya pinjaman bank pada tahun 2022.

Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih

Jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp6,12 triliun, meningkat Rp982,14 miliar atau 19,11% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp5,14 triliun. Peningkatan jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih tersebut disebabkan karena penambahan pada nilai pembiayaan konsumen pada tahun 2022 dan kualitas yang terjaga sehingga piutang pembiayaan konsumen dapat tumbuh 19,11%.

Piutang Pembiayaan *Murabahah* - Bersih

Jumlah Piutang Pembiayaan *Murabahah* - Bersih MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp659,98 miliar, meningkat Rp220,49 miliar atau 50,17% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp439,49 miliar. Peningkatan jumlah Piutang Pembiayaan *Murabahah* – Bersih tersebut disebabkan karena seiring dengan sinergi yang dilakukan dengan BSI lebih optimal maka nilai pembiayaan Syariah juga meningkat hal ini tercermin pada peningkatan piutang pembiayaan *Murabahah*.

Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih

Jumlah Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp89,73 miliar, meningkat Rp49,62 miliar atau 122,05% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp40,41 miliar. Peningkatan jumlah Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih tersebut disebabkan karena peningkatan pada nilai sewa pembiayaan tahun 2022.

Piutang Lain-lain

Jumlah Piutang Lain-lain MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp105,40 miliar, meningkat Rp46,37 miliar atau 78,57% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp59,03 miliar. Peningkatan jumlah Piutang Lain-Lain tersebut disebabkan karena naiknya piutang lain-lainya yang terkait dengan operasional Perusahaan.

Cash and Cash Equivalents

Total Cash and Cash Equivalents of MUF at the end of 2022 was recorded at IDR336.94 billion, an increase of IDR148.51 billion or 78.81% compared to the same period in 2021 of IDR188.43 billion. The increase in cash and cash equivalents was due to an increase in funding activities, It is in line with the increase in bank loans in 2022.

Consumer Financing Receivables – Net

Total MUF Consumer Financing Receivables - Net at the end of 2022 was recorded at IDR6.12 trillion, an increase of IDR982.14 billion or 19.11% compared to the same period in 2021 of IDR5.14 trillion. The increase in the number of Consumer Financing Receivables - Net was due to the addition to the value of consumer financing in 2022 and the quality was maintained so that consumer financing receivables could grow 19.11%.

Murabahah Financing Receivables - Net

Total MUF - Net Murabahah Financing Receivables at the end of 2022 was recorded at IDR659.98 billion, an increase of IDR220.49 billion or 50.17% compared to the same period in 2021 of IDR439.49 billion. The increase in the number of Receivables of Murabahah Financing - Net was due to the fact that along with the more optimal synergies carried out with BSI, the value of Sharia financing also increased, this was reflected in the increase in Murabahah financing receivables.

Finance Lease Receivables - Net

Total Finance Lease Receivables - Net MUF at the end of 2022 was recorded at IDR89.73 billion, an increase of IDR49.62 billion or 122.05% compared to the same period in 2021 of IDR40.41 billion. The increase in the amount of Finance Lease Receivables - Net was due to an increase in the value of finance leases in 2022.

Other Receivables

Total MUF Other Receivables at the end of 2022 was recorded at IDR105.40 billion, an increase of IDR46.37 billion or 78.57% compared to the same period in 2021 of IDR59.03 billion. The increase in the number of Other Receivables was due to an increase in other receivables related to the Company's operations.

Beban Dibayar di Muka

Jumlah Beban Dibayar di Muka MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp63,86 miliar, meningkat Rp21,40 miliar atau 50,40% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp42,46 miliar. Peningkatan jumlah Beban Dibayar di Muka tersebut disebabkan karena Biaya dibayar di muka untuk pemeliharaan dan perbaikan serta Fasilitas pinjaman pembiayaan Bersama (*Joint Financing*).

Prepaid Expenses

Total MUF Prepaid Expenses at the end of 2022 were recorded at IDR63.86 billion, an increase of IDR21.40 billion or 50.40% compared to the same period in 2021 of IDR42.46 billion. The increase in the amount of Prepaid Expenses was due to Prepaid expenses for maintenance and repairs as well as Joint Financing loan facilities.

Aset Pajak Tangguhan

Jumlah Aset Pajak Tangguhan MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp67,89 miliar, meningkat Rp15,54 miliar atau 29,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp52,35 miliar. Peningkatan jumlah Aset Pajak Tangguhan tersebut disebabkan karena pembayaran pajak yang lebih besar dibandingkan dengan nilai pajak yang sesungguhnya.

Deferred Tax Assets

Total MUF's deferred tax assets at the end of 2022 were recorded at IDR67.89 billion, an increase of IDR15.54 billion or 29.68% compared to the same period in 2021 of IDR52.35 billion. The increase in the amount of Deferred Tax Assets was due to more tax payment compared to the actual tax value.

Aset Tetap - Bersih

Jumlah Aset Tetap - Bersih MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp36,06 miliar, turun Rp0,22 miliar atau 0,60% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp36,28 miliar. Penurunan jumlah Aset Tetap - Bersih tersebut disebabkan meningkatnya nilai akumulasi penyusutan aset tetap Perusahaan yang terdiri dari perabotan dan peralatan kantor serta kendaraan, pada tahun 2022.

Fixed Assets - Net

Total Fixed Assets - Net MUF at the end of 2022 was recorded at IDR36.06 billion, decreased by IDR0.22 billion or 0.60% compared to the same period in 2021 of IDR36.28 billion. The decrease in the number of Fixed Assets - Net was due to an increase in the value of the accumulated depreciation of the Company's Fixed Assets, which consist of furniture and office equipment and vehicles, in 2022.

Aset Hak Guna

Jumlah Aset Hak Guna MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp61,88 miliar, turun Rp15,50 miliar atau 20,03% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp77,38 miliar. Penurunan jumlah Aset Hak Guna tersebut disebabkan meningkatnya nilai akumulasi penyusutan aset hak guna Perusahaan yang terdiri kendaraan bermotor dan bangunan, pada tahun 2022.

Right-of-use assets

Total MUF Right-of-use Assets at the end of 2022 were recorded at IDR61.88 billion, a decrease of IDR15.50 billion or 20.03% compared to the same period in 2021 of IDR77.38 billion. The decrease in the number of usufructuary assets was due to an increase in the accumulated depreciation value of the Company's Right-of-use assets, which consist of motorized vehicles and buildings, in 2022.

Aset Lain-Lain

Jumlah Aset Lain-Lain MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp23,79 miliar, meningkat Rp1,44 miliar atau 6,46% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp22,34 miliar. Peningkatan jumlah Aset Lain-Lain tersebut disebabkan karena penambahan pada uang muka guna menunjang operasional Perusahaan.

Other Assets

Total Other Assets of MUF at the end of 2022 was recorded at IDR23.79 billion, an increase of IDR1.44 billion or 6.46% compared to the same period in 2021 of IDR22.34 billion. The increase in the number of Other Assets was due to the addition of advances to support the Company's operations.

LIABILITAS
LIABILITY

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Utang Usaha Trade Payable	**302.819**	224.584	78.235	34,84
Utang Lain-lain Other Payables	**30.050**	18.465	11.585	62,74
Utang Pajak Tax Payables	**80.799**	49.172	31.627	64,32
Beban yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	**205.127**	177.044	28.083	15,86
Pinjaman Bank Bank Loans	**5.808.488**	4.859.307	949.181	19,53
Liabilitas Sewa Pembiayaan Finance Lease Liabilities	**26.104**	42.234	(16.130)	(38,19)
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Employee Benefits Obligations	**156.841**	106.069	50.772	47,87
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**6.610.228**	**5.476.875**	**1.133.353**	**20,69**

LIABILITAS
Liabilities

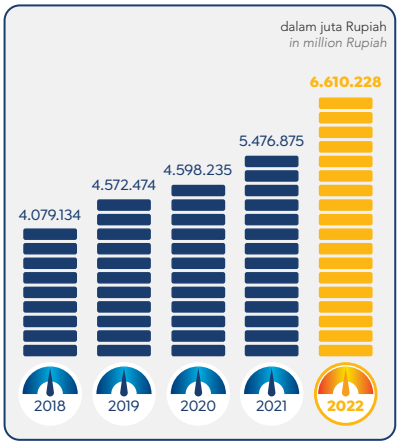

Jumlah Liabilitas MUF per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp6,61 triliun, meningkat Rp1,13 triliun atau 20,69% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp5,48 triliun. Peningkatan jumlah Liabilitas Perusahaan tahun 2022 utamanya disebabkan peningkatan pada pinjaman bank sebesar Rp949 miliar, peningkatan ini terjadi karena meningkatnya nilai pembiayaan tahun 2022.

MUF's total liabilities as of December 31, 2022 were recorded at IDR6.61 trillion, an increase of IDR1.13 trillion or 20.69% compared to 2021 of IDR5.48 trillion. The increase in the number of Company Liabilities in 2022 was mainly due to an increase in bank loans of IDR949 billion, the increase was due to the increase in the value of financing in 2022.

Utang Usaha

Jumlah Utang Usaha MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp302,82 miliar, meningkat Rp75,23 miliar atau 34,84% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp224,58 miliar. Peningkatan jumlah Utang Usaha tersebut disebabkan karena utang pembiayaan konsumen seiring dengan meningkatnya nilai pembiayaan konsumen.

Trade Payable

Total MUF Trade Payables at the end of 2022 were recorded at IDR302.82 billion, an increase of IDR75.23 billion or 34.84% compared to the same period in 2021 of IDR224.58 billion. The increase in the number of Trade Payables was due to consumer financing debt in line with the increasing value of consumer financing.

Utang Lain-lain

Jumlah Utang Lain-lain MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp30,05 miliar, meningkat Rp11,58 miliar atau 62,74% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp18,46 miliar. Peningkatan jumlah Utang Lain-lain tersebut disebabkan meningkatnya nilai utang lain-lain Perusahaan pada pihak ketiga pada tahun 2022, terutama yang berkaitan dengan penerimaan lelang.

Other Payables

Total Other Payables of MUF at the end of 2022 was recorded at IDR30.05 billion, an increase of IDR11.58 billion or 62.74% compared to the same period in 2021 of IDR18.46 billion. The increase in the number of Other Payables was due to an increase in the value of the Company's other payables to third parties in 2022, especially those related to auction receipt.

Utang Pajak

Jumlah Utang Pajak MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp80,80 miliar, meningkat Rp31,63 miliar atau 64,32% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp224,58 miliar. Peningkatan jumlah Utang Pajak tersebut disebabkan karena peningkatan pada Utang Pajak PPH.

Tax Debt

Total MUF Taxes Payable at the end of 2022 was recorded at IDR80.80 billion, an increase of IDR31.63 billion or 64.32% compared to the same period in 2021 of IDR224.58 billion. The increase in the amount of Taxes Payable was due to an increase in PPH Taxes Payable.

Beban yang Masih Harus Dibayar

Jumlah Beban yang Masih Harus Dibayar MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp205,13 miliar, meningkat Rp28,08 miliar atau 15,86% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp177,04 miliar. Peningkatan jumlah Beban yang Masih Harus Dibayar tersebut disebabkan karena peningkatan pada beban yang masih harus dibayar untuk gaji.

Accrued Expenses

Total Accrued Expenses that MUF had to pay at the end of 2022 was recorded at IDR205.13 billion, an increase of IDR28.08 billion or 15.86% compared to the same period in 2021 of IDR177.04 billion. The increase in Accrued Expenses was due to an increase in accrued expenses for salaries.

Pinjaman Bank

Jumlah Pinjaman Bank MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp5,81 triliun, meningkat Rp949,18 miliar atau 19,53% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp4,86 triliun. Peningkatan jumlah Pinjaman Bank tersebut disebabkan karena peningkatan nilai pembiayaan konsumen yang tidak bisa dibiayai pembiayaan bersama dan sejalan dengan kenaikan pada piutang pembiayaan netto.

Bank Loans

The amount of Bank MUF Loans at the end of 2022 was recorded at IDR5.81 trillion, an increase of IDR949.18 billion or 19.53% compared to the same period in 2021 of IDR4.86 trillion. The increase in the number of bank loans was due to an increase in the value of consumer financing which not be financed by joint financing and in line with the increase in net financing receivables.

Liabilitas Sewa Pembiayaan

Jumlah Liabilitas Sewa Pembiayaan MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp26,10 miliar, turun Rp16,13 miliar atau 38,19% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp42,23 miliar. Penurunan jumlah Liabilitas Sewa Pembiayaan tersebut disebabkan tidak ada penambahan sewa untuk tahun 2022.

Finance Lease Liabilities

Total MUF Finance Lease Liabilities at the end of 2022 were recorded at IDR26.10 billion, a decrease of IDR16.13 billion or 38.19% compared to the same period in 2021 of IDR42.23 billion. The decrease in the amount of Finance Lease Liabilities was due to no additional leases for 2022.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan MUF pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp156,84 miliar, meningkat Rp50,77 miliar atau 47,87% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp106,07 miliar. Peningkatan jumlah Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan tersebut disebabkan karena naiknya jumlah karyawan MUF pada tahun 2022.

Employee Benefits Obligation

The total MUF Employee Benefits Obligation at the end of 2022 was recorded at IDR156.84 billion, an increase of IDR50.77 billion or 47.87% compared to the same period in 2021 of IDR106.07 billion. The increase in the total Employee Benefits Liability was due to an increase in the number of MUF employees in 2022.

EKUITAS
EQUITY

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Modal Saham Share Capital	**500.000**	500.000	0	0,00
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti -Bersih Remeasurement of Defined Benefit Obligation -Net	**1.761**	(1.373)	3.134	228,26
Laba Ditahan Retained Earning				
Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated	**15.852**	5.616	10.236	182,26
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	**438.923**	116.156	322.767	277,87
Jumlah Ekuitas Total Equity	**956.536**	**620.399**	**336.137**	**54,18**

EKUITAS
Equity

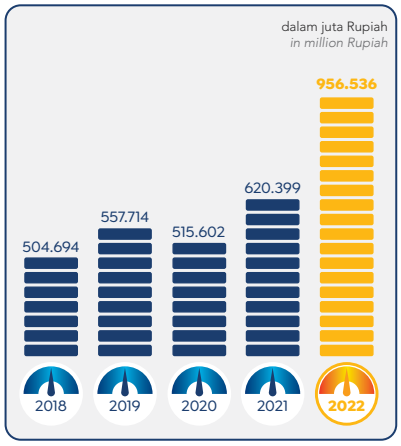

Jumlah Ekuitas MUF per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp956,54 miliar, meningkat Rp336,14 miliar atau 54,18% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp620,40 miliar. Peningkatan jumlah Ekuitas Perusahaan tahun 2022 utamanya disebabkan karena meningkatnya laba yang dibukukan Perusahaan di tahun 2022.

Total MUF Equity as of December 31, 2022 was recorded at IDR956.54 billion, an increase of IDR336.14 billion or 54.18% compared to 2021 of IDR620.40 billion. The increase in the amount of the Company's Equity in 2022 was mainly due to the increase in the profit recorded by the Company in 2022.

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

dalam juta Rupiah

in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Revenues	**2.213.466**	1.547.251	666.215	43,06
Beban Expenses	**(1.782.329)**	(1.414.624)	367.705	25,99
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Final dan Beban Pajak Penghasilan Income (Loss) Before Final Tax Expense and Income Tax Expense	**431.137**	132.627	298.510	225,07
Beban Pajak Final Final Tax Expense	**(1.222)**	(658)	564	85,71
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan Income (Loss) Before Income Tax Expense	**429.915**	131.969	297.946	225,77
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	**(96.912)**	(29.608)	67.304	227,32
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income (Loss) for The Year	**333.003**	102.361	230.642	225,32
Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income/(Expenses)	**3.135**	2.435	700	28,74
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for the Year	**336.138**	**104.796**	**231.342**	**220,75**
Laba (Rugi) per Saham (Rupiah penuh) Profit (Loss) per Share (in Full Rupiah)	**66,60**	20,47	46,13	225,35%

PENDAPATAN
REVENUES

Jumlah Pendapatan yang dibukukan Perusahaan sepanjang tahun 2022 tercatat sebesar Rp2,21 triliun, jumlah tersebut meningkat Rp666,21 miliar atau 43,06% dibandingkan Pendapatan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp1,55 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut utamanya disebabkan pendapatan pembiayaan konsumen pada tahun 2022 sebesar Rp1,80 triliun, tumbuh 39,55% dari tahun 2021. Selain itu margin *Murabahah* dan pendapatan lain-lain juga berpengaruh pada peningkatan Pendapatan tahun 2022, Margin *Murabahah* yang meningkat 147,60% dari tahun 2021 menjadi Rp144,83 miliar dan pendapatan lain-lain yang meningkat 30,24% dari tahun 2021 menjadi Rp252,06 miliar.

Total Revenues recorded by the Company throughout 2022 was recorded at IDR2.21 trillion, this amount increased by IDR666.21 billion or 43.06% compared to Revenue in 2021 which was recorded at IDR1.55 trillion. The increase of revenue was mainly due to consumer financing income in 2022 of IDR1.80 trillion, growing 39.55% from 2021. In addition, murabaha margins and other revenue also had an effect on increasing revenue in 2022, murabaha margin which increased 147.60 % from 2021 to IDR144.83 billion and other revenue which increased 30.24% from 2021 to IDR252.06 billion.

PENDAPATAN
Revenue

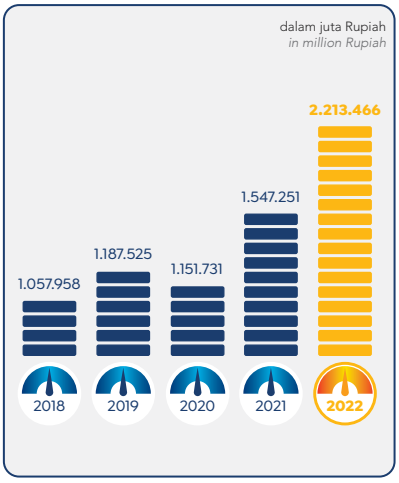

BEBAN
EXPENSES

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Gaji dan Tunjangan Salaries and Benefits	**580.816**	321.852	258.964	80,46
Umum dan Administrasi General and Administration	**269.495**	221.796	47.699	21,51
Beban Keuangan Financial Charges	**409.100**	385.885	23.215	6,02
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	**337.930**	309.946	27.984	9,03
Pemasaran Marketing	**148.838**	96.875	51.963	53,64
Lain-Lain Others	**36.150**	78.270	(42.120)	(53,81)
Jumlah Beban Load Amount	**1.782.329**	**1.414.624**	**367.705**	**26,00**

Jumlah Beban MUF tahun 2022 meningkat Rp367,70 miliar atau 26,00% menjadi Rp1,78 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,41 triliun. Peningkatan Beban tersebut disebabkan karena meningkatnya biaya yang terkait dengan kenaikan nilai pembiayaan.

Total MUF Expenses in 2022 increased by IDR367.70 billion or 26.00% to IDR1.78 trillion from the previous year of IDR1.41 trillion. The increase in expenses was due to increased costs related with an increase in the value of financing.

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Sejalan dengan meningkatnya Pendapatan Perusahaan di tahun 2022, jumlah Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan yang dibukukan MUF juga meningkat 225,77% menjadi Rp429,91 miliar, dari tahun sebelumnya sebesar Rp131,97 miliar.

PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE

In line with the increase in Company Revenue in 2022, the Profit Before Income Tax Expense recorded by MUF also increased by 225.77% to IDR429.91 billion, from the previous year of IDR131.97 billion.

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Beban Pajak Penghasilan MUF tahun 2022 tercatat sebesar Rp96,91 miliar, meningkat 227,32% dari tahun sebelumnya sebesar Rp29,61 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya Laba sebelum pajak, sehingga beban pajak ikut meningkat.

INCOME TAX EXPENSE

MUF's 2022 income tax expense was recorded at IDR96.91 billion, an increase of 227.32% from the previous year of IDR29.61 billion. The increase was due to the increase in profit before tax, so that the tax expense also increased.

LABA TAHUN BERJALAN

Laba Tahun Berjalan yang dibukukan Perusahaan tahun 2022 tercatat sebesar Rp333,00 miliar, meningkat 225,32% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp102,36 miliar.

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Tahun 2022, MUF membukukan Penghasilan Komprehensif sebesar Rp3,13 miliar, sehingga Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang dibukukan Perusahaan tahun 2022 meningkat menjadi Rp336,14 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp104,80 miliar.

LABA PER SAHAM

Seiring dengan meningkatnya Laba Tahun Berjalan Perusahaan di tahun 2022, nilai Laba per Saham MUF juga meningkat menjadi Rp66,60 per saham dari tahun sebelumnya sebesar Rp20,47 per saham.

PROFIT FOR THE YEAR

The profit for the year recorded by the Company in 2022 was recorded at IDR333.00 billion, an increase of 225.32% compared to the previous year of IDR102.36 billion.

COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

In 2022, MUF posted a Comprehensive Income of IDR3.13 billion, so that the Comprehensive Profit for the Year that the Company recorded in 2022 increased to IDR336.14 billion from the previous year of IDR104.80 billion.

PROFIT PER SHARE

In line with the increase in the Company's Profit for the Year in 2022, the value of MUF's Earnings per Share also increased to IDR66,60 per share from the previous year of IDR20,47 per share.

ARUS KAS

CASH FLOW

dalam juta Rupiah

in million Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	**(747.507)**	(550.481)	197.025	35,79
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	**(54.024)**	(52.090)	1.934	3,71
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from FInancing Activities	**950.040**	661.182	288.858	43,69
(Penurunan)/Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas Net (Decrease) Increase in Cash and Cash Equivalents	**148.509**	58.611	89.898	153,38
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	**188.432**	129.821	58.611	45,15
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	**336.941**	188.432	148.509	78,81

Jumlah Kas dan Setara Kas Perusahaan pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp336.941 miliar, meningkat dibandingkan posisi awal tahun sebesar Rp188,43 miliar. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya arus kas dari aktivitas pendanaan seiring naiknya utang bank.

Total Cash and Cash Equivalents of the Company at the end of 2022 was recorded at IDR336,941 billion, an increase compared to the position at the beginning of the year of IDR188.43 billion. It is due to the increase in cash flows from financing activities, which often results in increased bank loans.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2022 tercatat sebesar Rp747,51 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dimana Perusahaan menggunakan kas untuk aktivitas operasi sebesar Rp550,48 miliar. Arus kas masuk utamanya diperoleh dari penerimaan kas dan penerimaan terkait pembiayaan bersama *without recourse*. Sedangkan arus kas keluar utamanya digunakan untuk pembayaran kepada penyalur kendaraan dan pembiayaan bersama *without recourse*.

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Net cash flow used for operating activities in 2022 was recorded at IDR747.51 billion, an increase compared to the previous year where the Company used cash for operating activities of IDR550.48 billion. The main cash inflows are obtained from cash receipts and receipts related to joint financing without recourse. Meanwhile, the main cash outflows are used for payments to vehicle dealers and joint financing without recourse.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2022 tercatat sebesar Rp54,02 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dimana Perusahaan menggunakan kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp52,09 miliar. Arus kas masuk diperoleh dari penjualan aset tetap. Sedangkan arus kas keluar digunakan untuk pembelian aset tetap dan pembayaran atas aset hak guna.

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

Net cash flow used for investing activities in 2022 was recorded at IDR54.02 billion, an increase compared to the previous year where the Company used cash for investing activities of IDR52.09 billion. Cash inflows are obtained from the sale of fixed assets. Meanwhile, cash outflows are used to purchase fixed assets and payment of usufructuary assets.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2022 tercatat sebesar Rp950,04 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dimana Perusahaan memperoleh kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp661,18 miliar. Arus kas masuk diperoleh dari penerimaan pinjaman bank. Sedangkan arus kas keluar digunakan untuk pembayaran pinjaman bank.

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

Net cash flow obtained from financing activities in 2022 was recorded at IDR950.04 billion, an increase compared to the previous year where the Company obtained cash from financing activities of IDR661.18 billion. Cash inflows are obtained from receiving bank loans. Meanwhile, cash outflows are used to repay bank loans.

KEMAMPUAN PERUSAHAAN DALAM MENGHASILKAN LABA ATAU KEUNTUNGAN

Tingkat profitabilitas Perusahaan tergambar dari rasio-rasio berikut:

COMPANY ABILITY IN GENERATING PROFIT OR GAIN

The Company's profitability level is reflected in the following ratios:

dalam % / in %

Uraian Description	2022	2021	Selisih Difference
Return on Asset	**6,52**	2,42	4,10
Return on Equity	**44,50**	18,29	26,21
Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operational Cost Against Operating Income (BOPO)	**83,02**	91,32	(8,30)
Net Interest Margin (NIM)	**7,63**	6,89	0,74

Tahun 2022, Perusahaan mencatat peningkatan kinerja yang sangat baik. *Return on Asset* dan *Return on Equity* naik signifikan seiring dengan melonjaknya laba bersih Perusahaan. MUF juga dapat menekan rasio BOPO menjadi 83,02% sehingga NIM yang dibukukan Perusahaan juga meningkat menjadi 7,63% di tahun 2022.

In 2022, the Company recorded a very good increase in performance. Return on Assets and Return on Equity increased significantly in line with the soaring net profit of the Company. MUF was also able to reduce the BOPO ratio to 83.02% so that the NIM recorded by the Company also increased to 7.63% in 2022.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perusahaan untuk melunasi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang tercermin dari rasio-rasio keuangan berikut:

SOLVENCY

The Company's solvency, both short term and long term is reflected in the following financial ratios:

dalam % / In %

Uraian Description	2022	2021	Selisih Difference
Financing to Asset Ratio	**90,80**	92,16	(1,36)
Capital Ratio	**14,48**	12,32	2,16
Coverage Ratio	**375,80**	264,21	111,59

Financing Asset Ratio (FAR) tahun 2022 sedikit mengalami penurunan karena disebabkan meningkatnya piutang pembiayaan bersama. *Capital Ratio* naik menjadi 14,48% karena meningkatnya ekuitas disesuaikan. Peningkatan *Coverage Ratio* tahun 2022 menjadi 375,8% disebabkan karena membaiknya kualitas.

The Financing Asset Ratio (FAR) in 2022 has decreased slightly due to an increase in joint financing receivables. Capital Ratio rose to 14.48% due to increased adjusted equity. The increase in Coverage Ratio in 2022 to 375.8% is due to improved quality.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG PEMBIAYAAN

Perusahaan mampu menunjukkan kapasitas terbaiknya dalam memenuhi seluruh kewajiban sesuai dengan masa jatuh tempo yang telah ditentukan. Hal ini terlihat pada profil jatuh tempo aset keuangan dibandingkan liabilitas keuangan yang menunjukkan kondisi surplus.

Namun, sebagai bentuk kehati-hatian yang sekaligus juga bagian dari strategi untuk menekan risiko, Perusahaan mencadangkan sejumlah dana dengan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap piutang yang masuk kategori semua kategori piutang sesuai dengan PSAK 71.

Hingga akhir tahun 2022, sebagian besar piutang Perusahaan masuk dalam kategori lancar. Hal ini tercermin dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,97%. Dibandingkan tahun sebelumnya, NPF Perusahaan mengalami penurunan yang disebabkan berhasilnya strategi peningkatan kolektibilitas sehingga piutang bermasalah lebih terkendali.

COLLECTIBILITY OF FINANCING RECEIVABLES

The Company is able to demonstrate its best capacity in fulfilling all obligations according to predetermined maturity dates. This can be seen in the maturity profile of financial assets compared to financial liabilities which shows a surplus condition.

However, as a form of prudence which is also part of the strategy to reduce risk, the Company reserves a number of funds by establishing a Allowance for Impairment Losses (CKPN) for receivables that are including the all categories of receivables in accordance with PSAK 71.

Until the end of 2022, most of the Company's receivables are in the current category. This is reflected in the Non Performing Financing (NPF) ratio which in 2022 was recorded at 0,97%. Compared to the previous year, the Company's NPF decreased due to the successful strategy of increasing collectibility so that non-performing receivables were more controlled.

dalam % / In %

Uraian Description	2022	2021	Selisih Difference
Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah Kelolaan Ratio of Managed Non-Performing Financing Receivables	**0,97**	1,05	(0,08)

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN

KEBIJAKAN PERMODALAN PERUSAHAAN

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, serta memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

CAPITAL POLICY OF THE COMPANY

The Company's goal in managing its capital is to maintain business continuity to be able to provide results to shareholders and benefits to other stakeholders, as well as to maintain the optimization of the capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital returns to shareholders or issue new shares to reduce debt.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perusahaan memantau permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, jumlah maksimum *gearing ratio* adalah sebesar 10 kali dari total modal. Perusahaan senantiasa menjaga jumlah maksimum *gearing ratio* lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan melalui analisis alternatif pembiayaan, baik melalui pinjaman bank. Perusahaan juga menghitung biaya dana dari pembiayaan yang dipilih untuk memastikan biaya dana tersebut dapat menghasilkan pendapatan maksimum bagi Perusahaan.

Consistent with other industry players, the Company monitors capital based on the gearing ratio. This ratio is calculated from the net loan value divided by the total capital. The amount of capital is taken from the equity listed in the statement of financial position.

Based on OJK Regulation No. 35/POJK.05/2018 concerning the Implementation of Finance Company Business, the maximum gearing ratio is 10 times the total capital. The Company always maintains that the maximum gearing ratio is smaller than the provisions stipulated through an analysis of alternative financing, either through bank loans. The Company also calculates the cost of funds from the selected financing to ensure that the cost of funds can generate maximum revenue for the Company.

RINCIAN STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE DETAILS

dalam juta Rupiah / in million Rupiah

Uraian Description	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Pinjaman yang Diterima Debt Borrowings	**5.819.210**	**85,88**	4.869.170	88,70	950.040	19,51
Ekuitas/Modal Sendiri Equity/Own Capital	**956.536**	**14,12**	620.399	11,30	336.137	54,18
Jumlah Total	**6.775.746**	**100,00**	**5.489.569**	**100,00**	**1.286.177**	**23,43**
Gearing Ratio (kali) Gearing Ratio (times)	**6,08**		7,85		(1,77)	

DASAR KEBIJAKAN MANAJEMEN DALAM PEMILIHAN STRUKTUR MODAL

Gearing ratio Perusahaan tahun 2022 tercatat sebesar 6,08 kali, turun dari tahun sebelumnya sebesar 7,85 kali. *Gearing ratio* tersebut memenuhi jumlah maksimum *gearing ratio* adalah sebesar 10 kali dari total modal sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Penurunan *gearing ratio* tersebut disebabkan peningkatan ekuitas lebih besar dari peningkatan utang bank, peningkatan ekuitas tersebut tercermin dari besarnya laba tahun berjalan 2022.

BASIC MANAGEMENT POLICY IN THE SELECTION OF CAPITAL STRUCTURE

The Company's gearing ratio in 2022 was recorded at 6.08 times, down from the previous year of 7.85 times. The gearing ratio meets the maximum gearing ratio of 10 times the total capital as required in OJK Regulation No. 35/POJK.05/2018 concerning Implementation of Financing Company Business.

The decrease in the gearing ratio was due to the increase in equity which was more than the increase in bank loans, the increase in equity was reflected in the large profit for the year 2022.

Besarnya komposisi pinjaman yang diterima dalam struktur modal Perusahaan justru menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengoptimalkan kinerjanya. *Leveraging capability* MUF mampu menghasilkan *financing income* atau pendapatan pembiayaan lebih dari 4 (empat) kali nilai ekuitas/modal sendiri, yang diiringi dengan dengan kualitas aset yang terjaga dengan baik.

The size of the composition of loans received in the Company's capital structure actually shows the Company's ability to optimize its performance. MUF's leverage capability is capable of generating financing income of more than 4 (four) times the value of its own equity/capital, accompanied by well-maintained asset quality.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2022 Perusahaan tidak memiliki ikatan yang material dengan pihak manapun terkait investasi barang modal.

MATERIAL COMMITMENTS FOR INVESTMENTS IN CAPITAL GOODS

Throughout 2022 the Company has no material ties with any parties related to investment in capital goods.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Jenis Barang Modal Types of Capital Goods	**Tujuan Investasi** Investment Purpose	**Nilai (Rp juta)** Mark (Rp million)
Perabot dan peralatan kantor Furniture and office equipments	Menunjang Operasional Perusahaan Supporting the Company's operations	**19.517**
Kendaraan Vehicle	Menunjang Operasional Perusahaan Supporting the Company's operations	**450**
Jumlah Total		**19.967**

Tahun 2022, MUF merealisasi investasi barang modal sebesar Rp19,97 miliar yang utamanya digunakan untuk menunjang kegiatan operasi Perusahaan.

In 2022, MUF realized a capital goods investment of IDR19.97 billion which was mainly used to support the Company's operational activities.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCURRED AFTER THE ACCOUNTANT REPORTING DATE

There is no material information and facts that occurred after the date of the accountant's report.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
COMPARISON OF TARGETS AND REALIZATION

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

in billion Rupiah, unless stated otherwise

Uraian	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement (%)	Description
Pemasaran				Marketing
Nilai Pembiayaan Baru				Amount Financing
Mobil	9.226	**14.062**	152	Car
Motor	3.447	**3.835**	111	Motorcycle
Jumlah	**12.672**	**17.897**	**141**	Amount
Saldo Piutang Pembiayaan Dikelola				Managed Financing Receivable Balance
Mobil	16.272	**20.394**	125	Car
Motor	3.877	**4.688**	121	Motorcycle
Jumlah	**20.150**	**25.082**	**246**	Amount
Pendapatan	1.801	**2.097**	116	Income
Laba Tahun Berjalan	133	**333**	251	Current Year Profit
Aset	7.101	**7.567**	107	Asset
Struktur Modal				Capital Structure
Pinjaman yang Diterima	5.743	**5.808**	98,9	Debt Borrowings
Ekuitas	753,01	**956,54**	127	Equity
ROE (%)	19,33	**44,52**	230	ROE (%)
ROA (%)	2,56	**6,52**	255	ROA (%)
Jumlah Karyawan (Orang)	7.453	**7.695**	96,7	Number of Employees (Person)

Nilai pembiayaan baru baik mobil dan motor tercapai dengan baik yakni 152,43% dan 111,26% sehingga, total nilai pembiayaan baru tercapai 141,23%. Hal ini tercermin dengan tercapai saldo piutang pembiayaan dikelola baik mobil atau motor.

Pendapatan dan laba tahun berjalan juga tercapai dengan baik yakni 116,40% dan 251,11% sejalan dengan realisasi nilai pembiayaan baru dan piutang yang dikelola tercapai dengan baik.

Pinjaman yang diterima melebihi dari target karena Nilai Pembiayaan Baru yang lebih besar dari target, sehingga kebutuhan pendanaan untuk aktivitas operasi mengalami peningkatan. Ekuitas tercapai dengan baik seiring dengan laba tahun berjalan yang dibukukan.

The value of new financing for both cars and motorbikes was well achieved, namely 152.43% and 111.26% so that the total value of new financing reached 141.23%. This is reflected in the balance of financing receivables managed by either cars or motorbikes.

Revenue and profit for the year were also well achieved, namely 116.40% and 251.11% in line with the realization of the value of new financing and managed receivables which were well achieved.

Loans received exceeded the target because the New Financing Value was greater than the target, so that the need for funding for operating activities has increased. Equity was well achieved in line with the recorded profit for the year.

PROSPEK USAHA DAN PROYEKSI TAHUN 2023

BUSINESS PROSPECTS AND PROJECTIONS FOR 2023

Kondisi Ekonomi yang stabil dapat meningkatkan permintaan akan pembiayaan. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi diprediksi tetap kuat pada kisaran 4,5%-5,3%, sedangkan Inflasi diproyeksikan sebesar 3±1% maka, pertumbuhan industri otomotif diprediksi akan tetap tumbuh pada tahun 2023. Sejak berlakunya ketentuan emisi gas karbon berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya Bab VI mengenai Pajak Karbon Pasal 13 butir 6 yang menetapkan bahwa "Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu" dan Pemerintah yang memberikan subsidi terhadap kendaraan listrik, sehingga diperkirakan akan adanya perubahan pada pola permintaan konsumen untuk kendaraan bermotor.

Stable economic conditions can increase demand for financing. In 2023, economic growth is predicted to remain strong in the range of 4.5% -5.3%, while inflation is projected at 3 ± 1%, so the growth of the automotive industry is predicted to continue to grow in 2023. Since the enactment of the provisions on carbon gas emissions under Law no. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, in particular Chapter VI regarding Carbon Tax, Article 13 point 6 which stipulates that "Carbon taxes are payable on the purchase of goods containing carbon or activities that produce a certain amount of carbon emissions in a certain period" and the Government that provides subsidies to electric vehicles, so it is expected that there will be changes in consumer demand patterns for motorized vehicles.

RENCANA STRATEGIS DAN PROYEKSI KINERJA TAHUN 2023

Perusahaan akan terus mendorong pertumbuhan pembiayaan yang sehat dengan terus melanjutkan langkah-langkah inovasi digital yang telah dimulai sejak Juni 2020, untuk mengantisipasi perubahan pola kerja dan gaya hidup masyarakat yang sedang dan akan memasuki tahapan transisi dari tahapan pandemi COVID-19 2020-2021 menuju tahapan Endemi COVID-19 di tahun 2022. Hal ini selaras dengan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tahap II OJK yaitu untuk mempercepat Keuangan Berkelanjutan dengan mengubah tantangan menjadi peluang (*Transforming Challenges into Opportunities*), di mana dengan penggunaan teknologi diharapkan mampu mengembangkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat arus informasi. Dengan kondisi perekonomian dan industri pembiayaan khususnya pembiayaan otomotif sebagaimana digambarkan di atas, Perusahaan memproyeksikan kinerjanya di tahun 2023 sebagai berikut.

STRATEGIC PLAN AND PERFORMANCE PROJECTION FOR 2023

The Company will continue to encourage healthy financing growth by continuing digital innovation steps that have started since June 2020, to anticipate changes in people's work patterns and lifestyles that are currently and will be entering the transitional stage of the COVID-19 pandemic 2020-2021 towards the COVID-19 Endemic stage in 2022. It is in line with the Phase II OJK Sustainable Finance Road Map, which is to accelerate Sustainable Finance by turning challenges into opportunities (Transforming Challenges into Opportunities), where the use of technology is expected to be able to develop business processes, improve efficiency, and accelerate the flow of information. With the conditions of the economy and the financing industry, especially automotive financing as described above, the Company projects its performance in 2023 as follows.

Uraian Description	Proyeksi 2023 Projection in 2023
Saldo Piutang Pembiayaan Balance of Financing Receivables	Tumbuh > 15% Grow > 15%
Pendapatan Pembiayaan Financing income	Tumbuh > 15% Grow > 15%
Non-Performing Finance	< 1%
Return on Equity	> 35%

Untuk menjaga dan memastikan pencapaian target tersebut, manajemen Perusahaan memfokuskan pada beberapa strategi di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dan hubungan lebih erat dan saling mendukung dengan semua *stakeholder*, termasuk mitra *digital channel*.
2. Meningkatkan dan perluasan jaringan distribusi yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan *digital channel*.
3. Meningkatkan standar *Service Level Agreement* (SLA) kepada semua pihak, sehingga dapat memberikan kepuasan dan pengalaman lebih baik bagi konsumen maupun mitra bisnis melalui implementasi pengembangan *Strengthening the Core*.
4. Pengembangan dan penguatan *core system* dan *system support* yang mendukung efisiensi dan efektivitas dalam upaya transformasi digital dan meningkatkan *brand equity*.
5. Melanjutkan pelaksanaan Program Restrukturisasi COVID-19 dan Program Restrukturisasi Berulang (Re-Restrukturisasi) COVID-19 untuk akun yang pernah melakukan Restrukturisasi COVID-19 secara selektif sampai dengan 17 April 2023, untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan, menjaga *cash flow* Perusahaan dan menjaga Total Aset Perusahaan POJK Nomor 30/POJK.05/2021.
6. Melakukan kegiatan pembiayaan dengan lebih selektif, sehingga kualitas portofolio Perusahaan tetap terjaga melalui peningkatan utilitas informasi calon Debitur melalui data Pefindo Biro Kredit, data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan *Credit Scoring*.
7. Memastikan risiko likuiditas terkelola dengan baik.
8. Mengembangkan fitur-fitur MUF *Online Assistant* (MONA) dalam bentuk *virtual assistant* yang dapat memberikan lebih banyak layanan kepada konsumen, sehingga dapat menjadi alternatif konsumen dalam menentukan kebutuhan kendaraan bermotor melalui berbagai promosi dan rekomendasi terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang dimiliki Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga terus melakukan penyempurnaan fitur-fitur layanan pada layanan digital *marketing* yaitu MOAS (MUF *Online AutoShow*) untuk Pembiayaan Konvensional dan MOS (MUF *Online Autoshow Sharia*) untuk Pembiayaan Syariah.

To maintain and ensure the achievement of these targets, the Company's management focuses on several strategies in 2023 as follows:

1. Increasing cooperation and closer and mutually supportive relationships with all stakeholders, including digital channel partners.
2. Improving and expanding the distribution network that supports the growth and development of digital channels.
3. Improving Service Level Agreement (SLA) standards for all parties, so as to provide satisfaction and a better experience for consumers and business partners through the implementation of Strengthening the Core development.
4. Developing and strengthening of core systems and support systems that support efficiency and effectiveness in digital transformation efforts and increase brand equity.
5. Continuing the implementation of the COVID-19 Restructuring Program and the COVID-19 Restructuring Program for accounts that have previously carried out a selective COVID-19 Restructuring until April 17, 2023 to maintain the quality of the financing portfolio, maintain the Company's cash flow and maintain POJK Total Assets of the Company Number 30/POJK.05/2021.
6. Carry out financing activities more selectively, so that the quality of the Company's portfolio is maintained through increasing the information utility of prospective Debtors through Pefindo Credit Bureau data, Directorate General of Population and Civil Registry (DUKCAPIL) data, Financial Information Service System (SLIK) data and Credit Scoring.
7. Ensuring liquidity risk is well managed.
8. Developing MUF Online Assistant (MONA) features in the form of virtual assistants that can provide more services to consumers, so that they can become an alternative for consumers in determining their needs for motorized vehicles through various promotions and recommendations for financial products and services owned by the Company. In addition, the Company also continues to improve service features in digital marketing services, namely MOAS (MUF Online AutoShow) for Conventional Financing and MOS (MUF Online Autoshow Sharia) for Sharia Financing.

9. Mengoptimalkan pengelolaan aktivitas dan media komunikasi digital untuk memberikan layanan dan informasi program serta produk pembiayaan kepada masyarakat luas dengan *content* yang menarik dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.
10. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki termasuk nilai dan budaya Perusahaan secara berkesinambungan melalui program pelatihan yang efektif melalui media *offline* dan *online*.
11. Meningkatkan produktivitas penjualan multi produk pembiayaan (termasuk pembiayaan Syariah) dari jaringan sumber order pembiayaan yang dimiliki Perusahaan dan kerja sama sinergi bisnis dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku induk Perusahaan dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selain itu, dukungan pendanaan *Joint Finance* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk semakin memperkuat sumber dana Perusahaan.
12. Membangun dan memperluas kerja sama yang kuat dengan rekanan *dealer* dan *showroom* serta mitra bisnis yang bekerja sama dengan Perusahaan dalam upaya peningkatan *booking sales* di Tahun 2023.
13. Mendukung Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 Tahun 2022 tentang "Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah" dengan menyalurkan produk pembiayaan kendaraan listrik yang telah diseleksi melalui mitigasi risiko yang terkontrol.
14. Melakukan pengembangan dan izin jaringan Kantor Cabang (KC), Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC), Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC-US), dan Kantor Selain Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KSKC-US) untuk memperluas cakupan pasar dan meningkatkan layanan

9. Optimizing the management of activities and digital communication media to provide services and information on programs and financing products to the wider community with interesting content while taking into account the applicable provisions of the Financial Services Authority (OJK).
10. Improving the capabilities and competencies of human resources, including the Company's values and culture, on an ongoing basis through effective training programs through offline and online media.
11. Increasing the sales productivity of multi financing products (including Sharia financing) from the financing order source network owned by the Company and business synergy cooperation with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the parent Company and PT Bank Syariah Indonesia Tbk. In addition, Joint Finance funding support from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Syariah Indonesia Tbk has further strengthened the Company's sources of funds.
12. Building and expanding solid partnerships with dealer and showroom partners and business partners who work with the Company in an effort to increase booking sales in 2023.
13. Support Presidential Instruction (Inpres) number 7 of 2022 concerning "Use of Battery Electric Vehicles as Operational Service Vehicles and/or Individual Vehicles for Central Government Agencies and Regional Governments" by channeling electric vehicle financing products that have been selected through controlled risk mitigation.
14. Developing and managing permissions of network branch offices (KC), offices other than branch offices (KSKC), Sharia business unit branch offices (KC-US), and offices other than Sharia business unit branch offices (KSKC-US) to expand market coverage and service improvement.

DIVIDEN
DIVIDEND

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan, khususnya Pasal 19 menyebutkan bahwa laba bersih Perusahaan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, akan dibagikan menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut antara lain untuk dividen bagi pemegang saham dari jumlah laba bersih, kecuali ditentukan jumlah lain dalam RUPS.

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut akan tetap dicatat secara berkelanjutan dan dimasukkan secara kumulatif dalam perhitungan laba rugi dan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, dalam tahun buku selanjutnya, Perusahaan tidak dapat membagikan dividen.

DIVIDEND POLICY

In accordance with Law no. 40 of 2007 concerning limited liability companies and the Company's Articles of Association, in particular Article 19 states that the Company's net profit in a financial year as stated in the balance sheet and profit and loss calculation which has been approved by the annual GMS and constitutes a positive profit balance, will be distributed according to the way it is used. determined by the GMS among others for dividends for shareholders from the amount of net profit, unless another amount is determined in the GMS.

If the profit and loss calculation in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, the loss will still be recorded on an ongoing basis and included cumulatively in the profit and loss calculation and as long as the loss recorded and included in the profit and loss calculation has not been completely covered. in the next financial year, the Company cannot distribute dividends.

KRONOLOGIS PEMBAGIAN DIVIDEN

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan secara sirkuler pada 14 Juni 2022, pemegang saham memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Sejumlah 10% (sepuluh persen) dari laba bersih Perusahaan tahun buku 2021 ditetapkan sebagai cadangan wajib, dan sejumlah 90% (sembilan puluh persen) dari laba bersih Perusahaan tahun buku 2021 ditetapkan sebagai laba ditahan.

Dengan demikian, dalam 2 (dua) tahun terakhir, Perusahaan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

DIVIDEND DISTRIBUTION CHRONOLOGY

Based on the decision of the Annual GMS which was held circularly on June 14, 2022, the shareholders decided not to distribute dividends to the shareholders. 10% (ten percent) of the Company's net profit for the 2021 financial year is designated as a mandatory reserve, and 90% (ninety percent) of the Company's net profit for the 2021 financial year is designated as retained earnings.

Thus, in the last 2 (two) years, the Company has not distributed dividends to shareholders.

KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA
CONTRIBUTION TO THE STATE

Perusahaan berkomitmen untuk dapat memberikan kontribusi kepada negara, melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. Kontribusi pajak dari Perusahaan tahun 2022 mencapai Rp206,24 miliar, meningkat 110,65% atau setara dengan Rp108,83 miliar dari pembayaran pajak di tahun 2021 sebesar Rp97,90 miliar. Berikut disampaikan kontribusi pajak Perusahaan.

The Company is committed to being able to contribute to the state, through fulfilling tax obligations. The tax contribution from the Company in 2022 reached IDR206.24 billion, an increase of 110.65% or the equivalent of IDR108.83 billion from tax payments in 2021 of IDR97.90 billion. The following is the Company's tax contribution.

dalam juta Rupiah / in million Rupiah

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	**Persentase** Percentage **(%)**
Pajak Penghasilan Pasal 21 Income Tax Article 21	**76.576**	51.351	25.225	49,12
Pajak Penghasilan Pasal 23 Income Tax Article 23	**10.630**	6.707	3.923	58,49
Pajak Penghasilan Pasal 4(2) Income Tax Article 4(2)	**7.900**	6.145	1.755	28,56
Pajak Penghasilan Pasal 25 Income Tax Article 25	**46.050**	13.380	32.670	244,17
Pajak Pertambahan Nilai Value-Added Tax	**28.591**	19.936	8.655	43,41
Pajak Penghasilan Pasal 29 Income Tax Article 29	**36.490**	385	36.105	9.377,92
Jumlah Kontribusi kepada Negara Melalui Perpajakan Total Contribution to the State Through Taxation	**206.237**	**97.903**	**108.333**	**110,65**

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Hingga akhir tahun 2022, Perusahaan belum pernah melakukan penawaran umum saham dan surat berharga di bursa manapun.

Until the end of 2022, the Company has never made a public offering of shares and securities on any exchange.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Tahun 2022, tidak terdapat informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal.

In 2022, there was no material information on investments, expansion, divestment, merger, acquisition, and/or debt/capital restructuring.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

KEBIJAKAN TENTANG PIHAK BERELASI

Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak Berelasi" adalah, suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

a. orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
b. suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
   ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
   vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

POLICY ON RELATED PARTIES

The Company has transactions with related parties. The definition of a related party used is in accordance with PSAK No. 7 (Revised 2015) regarding "Related Party Disclosures", a party is considered related to the Company if:

a. the person or close family member has a relationship with the reporting entity if the person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. are key management personnel of the reporting entity or parent entity of the reporting entity.
b. an entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
   i. the entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning that each parent, subsidiary and subsequent subsidiary are related to each other);
   ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a business group, of which the other entity is a member);
   iii. the two entities are joint ventures of the same third party;
   iv. one entity is a joint venture of the third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   v. the entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity administering the program, then the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
   vi. the entity that is controlled or jointly controlled by the person identified in letter (a);
   vii. the person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a key management personnel of the entity (or the parent of the entity).

Dalam kegiatan usaha normalnya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" termasuk entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir melalui Menteri Keuangan.

In its normal business activities, the Company conducts transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2015) regarding, "Related Party Disclosures" includes entities that are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government of Indonesia as the ultimate owner entity through the Minister of Finance.

Nama Pihak Bertransaksi dan Sifat Hubungan Afiliasi
Name of Transaction Party and Nature of Affiliate Relations

Pihak Berelasi Related Parties	**Sifat Hubungan** Nature of Relationship	**Sifat Transaksi** Transaction Nature
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemegang saham mayoritas Majority shareholder	Penempatan dana, penyaluran pembiayaan dan pembiayaan bersama, pinjaman modal kerja Placement of funds, distribution of financing and joint financing, working capital loans
PT Asco Investindo	Pemegang saham minoritas Minority shareholders	Penyaluran pembiayaan Financing disbursement
PT Tunas Ridean Tbk	Pemegang saham minoritas Minority shareholders	Penyaluran pembiayaan Financing disbursement
PT Mandiri AXA General Insurance	Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Mostly owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Asuransi Kendaraan Bermotor Motor Vehicle Insurance
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State Owned Enterprises (BUMN)	Penempatan dana, penyaluran pembiayaan dan pembiayaan bersama Placement of funds, distribution of financing and co-financing
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State Owned Enterprises (BUMN)	Penempatan dana, pinjaman modal kerja Placement of funds, working capital loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State Owned Enterprises (BUMN)	Penempatan dana, pinjaman modal kerja Placement of funds, working capital loans
PT Bumi Daya Plaza	Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Mostly owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan dana, pinjaman modal kerja Placement of funds, working capital loans
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Board of Commissioners and Board of Directors of the Company	Personel manajemen kunci Perusahaan Key management personnel of the Company	Beban gaji dan tunjangan Salaries and benefits expense

ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Transaksi Perusahaan dengan Pihak Berelasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis Perusahaan, serta prinsip saling membutuhkan antara Perusahaan dengan Pihak Berelasi.

Dalam kegiatan normal usaha, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan, termasuk di dalamnya adalah transaksi pembiayaan bersama, transaksi pengalihan sebagian porsi piutang pembiayaan konsumen ("transaksi CAP"), transaksi penempatan deposito, utang dan piutang asuransi dan pinjaman bank.

REASON FOR THE TRANSACTION

The Company's transactions with Related Parties are carried out in line with the Company's operational and business development needs, as well as the principle of mutual need between the Company and Related Parties.

In the normal course of business, the Company enters into transactions with related parties due to ownership and/or management relationships, including joint financing transactions, transactions for the transfer of a portion of consumer financing receivables ("CAP transactions"), transactions for placement of deposits, insurance payables and receivables and bank loans.

PENJELASAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-Pihak Berelasi/Berafiliasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan persyaratan, tingkat harga, dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Tidak ada perbedaan kebijakan harga dan syarat transaksi antara pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga.

EXPLANATION REGARDING THE FAIRNESS OF THE TRANSACTION

The fairness of all transactions conducted by the Company with Related/Affiliated Parties has been disclosed in the financial statements, and is in accordance with PSAK No. 7 (Revised 2015) regarding "Related Party Disclosures". All transactions with related parties are carried out under normal terms, price levels and conditions as those done with third parties and have been disclosed in the financial statements. There are no differences in pricing policies and transaction terms between related parties and third parties.

REALISASI SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Realisasi saldo dan transaksi Pihak-Pihak Berelasi terhadap kinerja keuangan Perusahaan dapat disampaikan sebagai berikut.

REALIZATION OF BALANCES AND TRANSACTIONS OF RELATED PARTIES

Realization of balances and transactions of Related Parties to the Company's financial performance can be presented as follows.

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset
Related Party Balances in Assets

dalam juta Rupiah / in million Rupiah

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Related Party Balances in Assets	2022	2021	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			2022	2021	Nominal	Persentase Percentage
Kas dan kas di bank Cash on hands and cash in banks	**257.308**	145.649	**3,40**	2,39	111.659	76,66
Piutang lain-lain Other receivables	**2.485**	4.620	**0,03**	0,08	-2.135	-46,21
Beban dibayar di muka Expenses paid in advance	**35.303**	20.682	**0,47**	0,34	14.621	70,69

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset
Related Party Balances in Assets

dalam juta Rupiah — in million Rupiah

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Related Party Balances in Assets	2022	2021	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			2022	2021	Nominal	Persentase Percentage
Aset hak guna Right of use assets	**15.867**	23.800	**0,21**	0,39	-7.933	-33,33
Total Aset dari Pihak-Pihak Berelasi Total assets of related parties	**310.963**	194.751	**4,11**	3,19	116.212	59,67
Total Aset Total Assets	**7.566.764**	**6.097.274**			**1.469.490**	**24,10**

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas
Balance of Related Parties in Liabilities

dalam juta Rupiah — in million Rupiah

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas Balance of Related Parties in Liabilities	2022	2021	Persentase dari Jumlah Liabilitas (%) Percentage of Total Liabilities (%)		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			2022	2021	Nominal	Persentase Percentage
Utang usaha Trade payable	**2.304**	2.816	**0,03**	0,05	(512)	(18,18)
Beban yang masih harus dibayar Accrued expenses	**6.007**	4.692	**0,09**	0,09	1.315	28,03
Pinjaman bank Bank loans	**2.385.574**	1.626.000	**36,09**	29,69	759.574	46,71
Liabilitas sewa pembiayaan Finance lease liabilities	**16.589**	23.800	**0,25**	0,43	(7.211)	(30,30)
Total Liabilitas dari Pihak-Pihak Berelasi Total Liabilities of Related Parties	**2.410.474**	1.657.308	**36,47**	30,26	753.166	45,45
Total Liabilitas Total Liabilities	**6.610.228**	**5.476.875**			**1.133.353**	**20,69**

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan
Related Party Transactions in Revenue

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Related Party Transactions in Revenue	2022	2021	Persentase dari Jumlah Pendapatan (%) Percentage of Total Revenue (%)		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			2022	2021	Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Pembiayaan Konsumen Consumer Financing Income	-	0,88		0,0001	(0,88)	-100,00
Bunga dan Marjin Interest and Margin	5.728	3.079	0,25	0,20	2.649	86,03
Total Pendapatan dari Pihak-Pihak Berelasi Total Revenue from Related Parties	5.728	3.080	0,25	0,19	2.648	85,97
Total Pendapatan Total Income	**2.213.466**	**1.547.251**			**666.215**	**43,06**

Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban
Related Party Transactions in Expenses

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Related Party Transactions in Expenses	2022	2021	Persentase dari Jumlah Beban (%) Percentage of Total Load (%)		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			2022	2021	Nominal	Persentase Percentage
Beban Keuangan Financial Charges	137.476	134.631	7,71	10,75	2.845	2,11
Beban Gaji dan Tunjangan (Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi) Salaries and Benefits Expenses (Compensation for the Board of Commissioners and Directors)	23.787	26.506	1,33	1,90	(2.719)	(10,26)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	7.933	11.407	0,45	0,82	(3.474)	(30,45)
Total Beban dari Pihak-Pihak Berelasi Total Expenses from Related Parties	169.196	172.544	9,49	12,19	(3.348)	(1,94)
Total Beban Total Load	**1.782.329**	**1.414.624**			**367.705**	**25,99**

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME *REVIEW* ATAS TRANSAKSI SERTA PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kewajaran transaksi pihak berelasi terlihat dari seluruh transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan persyaratan, tingkat harga, dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Tidak ada perbedaan kebijakan harga dan syarat transaksi antara pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga.

Pada tahun 2021 dan 2022, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berstatus sebagai entitas induk.

COMPANY POLICY REGARDING THE REVIEW MECHANISM OF TRANSACTIONS AND COMPLIANCE WITH RELATED REGULATIONS AND PROVISIONS

As explained above, the fairness of related party transactions can be seen from all transactions with related parties, carried out with normal terms, price levels and conditions as those done with third parties and have been disclosed in the financial statements. There are no differences in pricing policies and transaction terms between related parties and third parties.

In 2021 and 2022, the Company will conduct transactions with affiliated parties PT Bank Mandiri (Persero) Tbk which has the status of a parent entity.

dalam juta Rupiah / in million Rupiah

Uraian Description	**2022**	**2021**
Biaya Bunga Pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Loan Interest Costs to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	**103.304**	106.957
Biaya Administrasi & Provisi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Administration & Provision Fees to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	**23.915**	17.111

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

AMENDMENTS TO LAWS AND REGULATIONS AGAINST COMPANIES IN THE LAST FISCAL YEAR

No	**Peraturan** Regulation	**Tanggal Berlaku** Effective date
1	Perjanjian dan dok FAPP ada perubahan mengikuti POJK Perlinkos 6/22 dan UU PDP No 27 tahun 2022 FAPP agreement and docs have changes following POJK Perlinkos 6/22 and UU PDP No 27 of 2022	18 April 2022 April 18, 2022

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES IMPLEMENTED BY COMPANY IN THE LAST FISCAL YEAR

No	Kebijakan Akuntansi Accounting Policy	Penjelasan Explanation	Pengaruh Terhadap Laporan Keuangan MUF Influence on MUF Financial Statements
1	Amandemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 persen" untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan" Amendments to PSAK No. 71, "Financial Instruments - Yield under the "10 percent" test for derecognizing a financial liability"	Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli. The amendments clarify the costs that are included in the entity when assessing whether the terms of a new or modified financial liability are substantially different from the terms of the original financial liability.	Perusahaan telah menganalisis penerapan standar akuntansi tersebut dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan. The Company has analyzed the application of these accounting standards and has no significant effect on the financial statements
2	Amandemen PSAK No. 73: "Sewa" Amendments to PSAK No. 73: "Rent"	Penggantian perbaikan properti sewaan oleh pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan mengenai perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena cara insentif sewa. Reimbursement of rental property repairs by tenants to address potential confusion regarding the treatment of rental incentives that may arise due to the manner of rental incentives.	
3	Amandemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi tentang Kontrak Merugi-Biaya Memenuhi Kontrak" Amendments to PSAK No. 57: "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets on Loss Contracts-Cost of Fulfilling the Contract"	Amendemen PSAK No. 57 mengatur biaya-biaya untuk memenuhi kontrak merugi terdiri dari biaya yang terkait langsung dengan kontrak, dimana terdiri dari: 1. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan 2. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak Reimbursement of rental property repairs by the lessee to address potential confusion regarding the treatment of rental incentives that may arise due to the way rental incentives are handled. Amendments to PSAK No. 57 regulates the costs of fulfilling loss-making contracts consisting of costs directly related to the contract, which consist of: 1. the incremental costs of fulfilling the contract, and 2. allocation of other costs directly related to fulfilling the contract	

TENTANG BUSSINES CONTINUITY MANAGEMENT (BCM)

ABOUT BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM)

HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA MUF

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat hal yang berpotensi signifikan terhadap kelangsungan usaha MUF. Secara umum, kondisi internal dan eksternal MUF tahun 2020 cukup baik. Kondisi perekonomian telah berangsur membaik dibanding tahun 2021. Akan tetapi masih banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, ketidakpastian ekonomi, kenaikan inflasi, peningkatan suku bunga, berakhirnya kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan kelangkaan *chip* semi konduktor yang menyebabkan terganggunya produksi kendaraan bermotor. Dengan demikian, dengan kondisi saat ini diperlukan efektivitas respon kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar dampak buruk dari faktor-faktor tersebut dapat dihindari atau diminimalisir dampaknya.

THE POTENTIAL MATTERS AFFECTED SIGNIFICANTLY TO MUF'S BUSINESS CONTINUITY

Throughout 2022, there was no potential thing affected significantly to MUF's business continuity. In general, the internal and external conditions of the 2020 MUF were quite good. Economic conditions have gradually improved compared to 2021. However, it was still heavily influenced by several factors such as the ongoing COVID-19 pandemic, economic uncertainty, rising inflation, rising interest rates, the end of the Sales Tax on Luxury Goods Borne by the Government (PPnBM DTP) policy and the scarcity of semi-conductor chips disrupted motor vehicle production. Thus, under current conditions, it is necessary to have an effective policy response by the government so that the adverse effects of these factors can be avoided or their impacts minimized.

ASSESSMENT YANG DILAKUKAN MANAJEMEN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA MUF

Manajemen MUF telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. MUF secara berkala setiap semester melakukan pengukuran terhadap POJK No.28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Selain itu, MUF juga telah menerapkan *Business Continuity Management* (BCM) yang merupakan bagian dari mitigasi risiko. Pengelolaan aspek ini dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko di kantor pusat bersama kantor-kantor wilayah hingga ke seluruh kantor cabang Perusahaan di Indonesia.

MANAGEMENT'S ASSESSMENT OF MUF'S BUSINESS CONTINUITY

MUF management has assessed the Company's ability to continue its business continuity and believes that the Company has the resources to continue its business in the future. MUF periodically every semester measures POJK No.28/POJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness Level of Non-Bank Financial Services Institutions. In addition, MUF has also implemented Business Continuity Management (BCM) which is part of risk mitigation. The management of this aspect is coordinated by the Risk Management Unit at the head office along with regional offices to all of the Company's branch offices in Indonesia.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN DALAM MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Dalam melakukan penilaian kelangsungan usaha MUF, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi Manajemen adalah:

1. Kinerja keuangan,
2. Pangsa pasar,
3. Perkara hukum, dan
4. Tingkat kesehatan MUF.

Manajemen juga menggunakan asumsi bahwa kondisi ekonomi di Indonesia dan secara global tidak akan mengalami perubahan fundamental yang dapat mengganggu jalannya bisnis secara alamiah di industri perbankan.

ASSUMPTIONS USED IN CONDUCTING THE ASSESSMENT

In evaluating MUF's business continuity, the factors considered by Management are:

1. Financial performance,
2. Market share,
3. Legal cases, and
4. MUF health level.

Management also uses the assumption that economic conditions in Indonesia and globally will not experience fundamental changes that could disrupt the natural course of business in the banking industry

05

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA
COMMITMENT OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION

MUF berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, komprehensif, dan berkelanjutan di setiap kegiatan usaha sehari-hari agar mampu bertahan dan terus berkembang di tengah iklim bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis.

MUF is fully committed to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently, comprehensive and sustainable manner in every day-to-day business activity in order to survive and continue to grow in an increasingly competitive and dynamic business climate.

Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG bukan lagi merupakan suatu keharusan atau kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, tetapi sudah menjadi landasan utama dalam menjalankan usaha. Melalui penerapan GCG secara konsisten, MUF dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan menjalankan kegiatan usaha di industri pembiayaan secara sehat sekaligus menjaga kepercayaan pemegang saham, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Praktik GCG terus dikembangkan Perusahaan sebagai komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan implementasi GCG di lingkup keorganisasian Perusahaan, dimana hal ini memberikan kepercayaan diri dalam menghadapi setiap tantangan ke depan dan menjadi entitas usaha dengan kompetensi yang kompetitif kepada Perusahaan.

The Company realizes that the implementation of GCG is no longer a requirement or compliance with laws and regulations, but has become the main basis for running a business. Through the consistent implementation of GCG, MUF can improve the quality of decision making and carry out business activities in financing industry in a healthy manner while maintaining the trust of shareholders, the public and all other stakeholders.

GCG practices are continuously developed by the Company as a commitment to continue to innovate in efforts to improve GCG implementation within the Company's organizational scope, which It gives the confidence in facing any future challenges and becoming a business entity with high competence competitive for the Company.

LANDASAN PENERAPAN GCG

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
   a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
   b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
   d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
   e. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Keputusannya
   a. Surat Menteri BUMN No. S-100/MBU/02/2019 tentang Persetujuan Penetapan Batasan Tindakan Direksi yang Membutuhkan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
   a. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
   b. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
   c. Peraturan OJK No. 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
   d. Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
   e. Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
   f. Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG within the Company refers to several applicable laws and regulations in Indonesia, including:

1. Law of Republic of Indonesia
   a. Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
   b. Law of Republic of Indonesia No. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
   c. Law of Republic of Indonesia No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.
   d. Law of Republic of Indonesia No. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes.
   e. Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law no. 20 of 2001.
2. Regulations of the Minister of State Owned Enterprises and their Decrees
   a. Letter of the Minister of BUMN No. S-100/MBU/02/2019 concerning Approval of the Determination of Limitations on Board of Directors' Actions Requiring Approval of Series A Bicolor Shareholders for Amendments to the Articles of Association of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. Regulations of Financial Services Authority (OJK)
   a. OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.
   b. OJK Regulation No. 10/POJK.05/2019 concerning Business Conduct of Sharia Financing Companies and Sharia Business Units of Financing Companies.
   c. OJK Regulation No. 24/POJK.05/2019 concerning Business Plans for Non-Bank Financial Services Institutions.
   d. OJK Regulation No. 28/POJK.05/2020 concerning Soundness Rating of Non-Bank Financial Services Institutions.
   e. OJK Regulation No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.
   f. OJK Regulation No. 4/POJK.05/2021 concerning Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions.

g. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
h. Surat Edaran OJK No. 23/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
i. Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

4. Anggaran Dasar Perusahaan.
5. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk edisi Tahun 2022.
6. MGPG (Mandiri *Group Principle Guidelines*) dan MSMPG (Mandiri *Subsidiaries Management Principle Guidelines*).

g. OJK Circular No. 15/SEOJK.05/2016 concerning Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Financing Companies.
h. 8.OJK Circular No. 23/SEOJK.05/2019 concerning Business Plans for Financing Companies and Sharia Financing Companies.
i. OJK Circular No. 11/SEOJK.05/2020 concerning Assessment of Soundness Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.

4. Company's Articles of Association.
5. Guidelines for Integrated Governance of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2022 edition.
6. MGPG (Mandiri Group Principle Guidelines) and MSMPG (Mandiri Subsidiaries Management Principle Guidelines).

PRINSIP DASAR DAN PENERAPAN ASAS GCG DI LINGKUP PERUSAHAAN

Perusahaan mengimplementasikan GCG berdasarkan 5 (lima) prinsip, sesuai yang tertuang dalam Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan dan kewajaran yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.

BASIC PRINCIPLES AND IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES WITHIN THE COMPANY

The Company implements GCG based on 5 (five) principles, as stated in OJK Regulation No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies. These principles are transparency, accountability, responsibility, independence, equality and fairness needed to achieve long-term sustainability of the Company's business while taking into account the interests of stakeholders.

Asas-Asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Principles of Good Corporate Governance

Bentuk komitmen nyata Perusahaan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

The form of the Company's real commitment to the implementation of GCG principles is as follows:

PRINSIP KETERBUKAAN (*TRANSPARENCY*)

Penjelasan Sesuai Pedoman GCG MUF

Perusahaan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Penerapan di lingkup MUF

1. Informasi yang relevan mengenai MUF disampaikan secara jelas, akurat, memadai, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Pengungkapan informasi yang dilakukan oleh MUF tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta hubungan keuangan dan keluarga anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Perusahaan, kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sistem pengawasan internal, pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhan dan penerapannya, dan kejadian-kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi Perusahaan secara proporsional.
3. Keterbukaan informasi tersebut tidak mengurangi kewajiban MUF untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan, Manajemen Perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya, sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRINSIP AKUNTABILITAS (*ACCOUNTABILITY*)

Penjelasan Sesuai Pedoman GCG MUF

Perusahaan dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan operasionalnya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan perilaku bisnis dan budaya Perusahaan serta kepentingan para pemangku kepentingan.

THE PRINCIPLE OF DISCLOSURE (TRANSPARENCY)

Explanation According to MUF GCG Guidelines

The Company guarantees the transparency of the decision-making process and transparency in disclosing and providing relevant information about the Company, which is easily accessible to Stakeholders in accordance with laws and regulations in the field of financing as well as standards, principles and practices of conducting a sound financing business.

Implementation within the scope of MUF

1. Relevant information regarding MUF is conveyed clearly, accurately, adequately, easily accessible to Stakeholders in accordance with their rights.
2. Disclosure of information by MUF is not limited to the vision, mission, business objectives, composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board as well as financial and family relations of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or Company Shareholders, shareholding of members of Board of Directors and Board of Commissioners, internal control systems, GCG implementation and the level of compliance and implementation, and important events that can affect the condition of the Company proportionally.
3. Disclosure of this information does not reduce MUF's obligation to protect confidential information regarding the Company, Company Management and other related parties, in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.

PRINCIPLE OF ACCOUNTABILITY (ACCOUNTABILITY)

Explanation According to MUF GCG Guidelines

The Company can account for all operational activities in a transparent and fair manner for the benefit of the Company in accordance with the Articles of Association and the applicable laws and regulations while taking into account business behavior and corporate culture and the interests of the stakeholders.

Penerapan di Lingkup MUF

1. MUF memiliki rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi Perusahaan, sehingga tercipta keseimbangan kegiatan operasional Perusahaan.
2. Masing-masing pihak yang menjabat pada Organ Perusahaan dan Manajemen memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) yang efektif, sehingga dapat menjamin terselenggaranya mekanisme *check and balance* dalam penerapan sistem pengendalian internal MUF.

PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN (*RESPONSIBILITY*)

Penjelasan Sesuai Pedoman GCG MUF

Pertanggungjawaban menjadi dasar utama Organ Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional MUF dan memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Penerapan di Lingkup MUF

1. MUF selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
2. MUF ikut berperan dalam kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

PRINSIP KEMANDIRIAN (*INDEPENDENCY*)

Penjelasan Sesuai Pedoman GCG MUF

Keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Implementation within the Scope of MUF

1. MUF has detailed duties and responsibilities of each of the Company's organs in accordance with the Company's vision and mission so as to create a balance in the Company's operational activities.
2. Each party serving in the Company Organs and Management has competence according to their responsibilities and understands their role in the implementation of Good Corporate Governance.
3. The existence of effective Standard Operating Procedures (SOP), so as to ensure the implementation of a check and balance mechanism in the implementation of the MUF internal control system.

PRINCIPLE OF RESPONSIBILITY (RESPONSIBILITY)

Explanation According to MUF GCG Guidelines

Accountability is the main basis of the Company's Organs in carrying out MUF's operational activities and ensures that the management of the Company complies with laws and regulations in the field of financing and ethical values as well as standards, principles and practices of conducting a sound financing business.

Implementation within the Scope of MUF

1. MUF always uses the principle of prudence and guarantees the implementation of statutory regulations and internal policies that have been stipulated.
2. MUF plays a role in caring for the environment and carrying out social responsibility.

PRINCIPLE OF INDEPENDENCE (INDEPENDENCE)

Explanation According to MUF GCG Guidelines

The condition of a Company that is managed independently and professionally and is free from conflict of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with laws and regulations in the field of financing and ethical values as well as standards, principles and business administration practices sound financing.

Penerapan di Lingkup MUF

1. Seluruh Organ Perusahaan melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan mengutamakan independensi dan objektivitas untuk menghindari terjadinya dominasi oleh pihak mana pun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), sehingga keputusan yang diambil dapat dilakukan secara objektif.
2. Pelaksanaan fungsi dan tugas Organ Perusahaan harus sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga keputusan yang diambil bertujuan untuk kepentingan Perusahaan.

Implementation within the Scope of MUF

1. All Company Organs carry out their functions and responsibilities by prioritizing independence and objectivity to avoid domination by any party, are not influenced by certain interests and are free from conflicts of interest, so that decisions can be made objectively.
2. The implementation of the functions and duties of the Company's Organs must be in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations and mutual respect for the rights, obligations, duties, authorities and responsibilities of each party, so that decisions taken are aimed at the interests of the Company.

PRINSIP KEWAJARAN (*FAIRNESS*)

Penjelasan Sesuai Pedoman GCG MUF

Dalam melakukan kegiatannya, Perusahaan mengutamakan kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, nilai-nilai etika, standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Penerapan di Lingkup MUF

1. MUF memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan dalam memenuhi haknya sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan dalam memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan.

PRINCIPLE OF FAIRNESS (FAIRNESS)

Explanation According to MUF GCG Guidelines

In carrying out its activities, the Company prioritizes equality, balance and fairness in fulfilling the rights of Stakeholders that arise based on agreements, laws and regulations, ethical values, standards, principles and practices of conducting a sound financing business.

Implementation within the Scope of MUF

1. MUF provides equal and fair treatment to Stakeholders in fulfilling their rights in accordance with the benefits and contributions provided to the Company while taking into account the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.
2. Provide opportunities for Stakeholders to provide input and express opinions for the benefit of the Company.

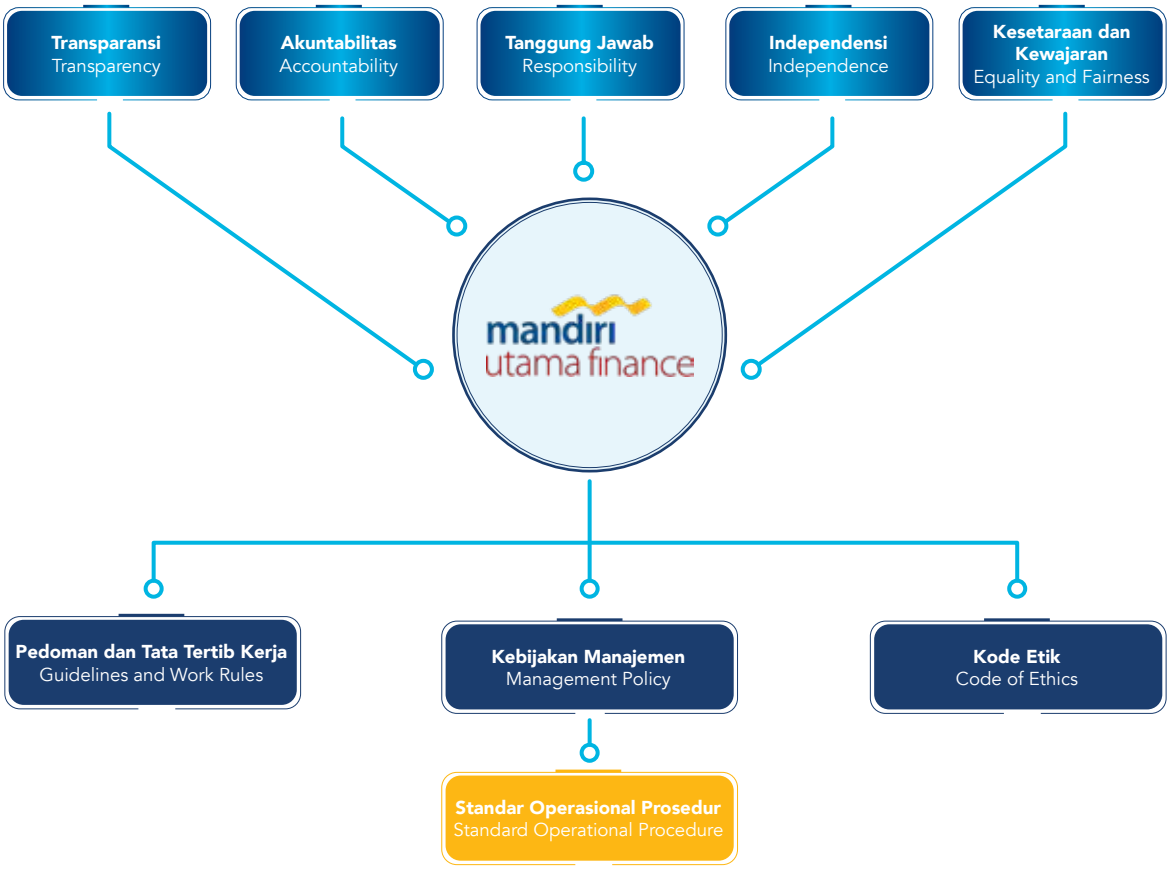

MUF senantiasa melakukan internalisasi seluruh prinsip GCG dalam kebijakan internal Perusahaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan manajemen organisasi MUF yang lebih profesional, terbuka dan efisien.

PERKEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MUF TAHUN 2022

Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG. Sepanjang tahun 2022, terdapat beberapa catatan penting dan pencapaian yang diperoleh Perusahaan dalam penerapan GCG, antara lain:

1. Perusahaan telah melakukan pemenuhan terhadap POJK No. 29/POJK.05/2020 dan POJK No. 30/POJK.05/2014 dalam hal komposisi jabatan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite dibawah Dewan Komisaris, sebagai berikut:

MUF always internalizes all GCG principles in the Company's internal policies, so that it is expected to improve MUF's organizational management to be more professional, open and efficient.

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE WITHIN MUF IN 2022

The Company continues to strive to improve the quality of GCG implementation. Throughout 2022, there were several important records and achievements obtained by the Company in implementing GCG, including:

1. The Company has complied with POJK No. 29/POJK.05/2020 and POJK No. 30/POJK.05/2014 in terms of the composition of the positions of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Committees under the Board of Commissioners, as follows:

a. Dewan Komisaris
   - 2 (dua) Dewan Komisaris
   - 1 (satu) Komisaris Independen

b. Direksi
   - 1 (satu) Direktur Utama
   - 2 (dua) Direktur

c. Dewan Pengawas Syariah
   - 1 (satu) Ketua Dewan Pengawas Syariah
   - 1 (satu) Anggota Dewan Pengawas Syariah

d. Komite dibawah Dewan Komisaris
   - Komite Audit
   - Komite Pemantau Risiko
   - Komite Nominasi dan Remunerasi

2. Pemenuhan terhadap POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang "Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan" pada Pasal 46 disebutkan bahwa *"PUJK wajib memiliki fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat"*, atas dasar tersebut Perusahaan telah membentuk Unit Kerja Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dengan Surat Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/MUF/X/2022 yang berlaku sejak 10 Oktober 2022.
3. Perusahaan telah membentuk Unit Kerja Pengendalian Gratifikasi. Direksi telah membentuk Unit Kerja Pengadilan Gratifikasi dengan Surat Keputusan Direksi No. 004/SK-DIR/MUF/VIII/2022 yang berlaku sejak 22 Agustus 2022. Hal ini diupayakan Perusahaan guna menjalankan amanat sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 dan mendukung Komisi Pemberantas Korupsi.
4. Pelaksanaan rapat baik Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah sesuai dengan ketentuan POJK 30/POJK.05/2014 dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
5. Perusahaan telah memiliki Pihak Independen yang mempunyai keahlian dibidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota Komite, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

a. Board of Commissioners
   - 2 (two) Board of Commissioners
   - 1 (one) Independent Commissioner

b. Directors
   - 1 (one) President Director
   - 2 (two) Directors

c. Sharia Supervisory Board
   - 1 (one) Chairman of the Sharia Supervisory Board
   - 1 (one) Member of the Sharia Supervisory Board

d. Committee under the Board of Commissioners
   - Audit Committee
   - Risk Monitoring Committee
   - Nomination and Remuneration Committee

2. Compliance with POJK No. 6/POJK.07/2022 concerning "Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector" in Article 46 states that "PUJK is required to have a function or unit for implementing Consumer and Community Protection provisions", on this basis the Company has established a "Consumer and Community Protection Work Unit". Society by Decree of the Board of Directors No. 006/SK-DIR/MUF/X/2022 which took effect on October 10, 2022.
3. The Company has established a Gratification Control Work Unit. The Board of Directors has formed a Gratification Court Work Unit with the Board of Directors Decree No. 004/SK-DIR/MUF/VIII/2022 which took effect on August 22, 2022. The Company is trying to do this to carry out the mandate in accordance with Law No. 31 of 1999 juncto Law No. 20 of 2021 and support the Corruption Eradication Commission.
4. Implementation of meetings for the Board of Commissioners, Directors and DPS is in accordance with POJK 30/POJK.05/2014 and POJK provisions No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.
5. The Company already has an Independent Party that has expertise in finance and/or risk management who is a member of the Committee, this is in accordance with the provisions in POJK No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.

KERANGKA KERJA TATA KELOLA
GOVERNANCE FRAMEWORK

Komitmen MUF dalam menerapkan GCG diwujudkan dalam Kerangka Kerja Tata Kelola atau *Governance Framework* yang menjadi landasan utama penerapan GCG di MUF. Dalam *Governance Framework* MUF, visi, misi dan nilai-nilai serta budaya Perusahaan ditempatkan sebagai landasan utama yang melandasi seluruh organisasi Perusahaan untuk dapat bekerja bersama-sama, dan mampu mewujudkan kinerja yang sesuai dengan etika usaha yang berlaku di Indonesia.

Keselarasan aspek-aspek tersebut menghasilkan efektivitas tata kelola atau *governance outcome* yang sesuai dengan harapan Perusahaan maupun seluruh pemangku kepentingan.

MUF's commitment to implement GCG is embodied in Governance Framework which is the main basis for implementing GCG at MUF. In the MUF Governance Framework, the vision, mission and values and culture of the Company are placed as the main foundation that underlies all Company's organizations to be able to work together, and be able to realize performance that is in accordance with the business ethics that apply in Indonesia.

The alignment of these aspects results in governance effectiveness or governance outcomes that are in line with the expectations of the Company and all stakeholders.

STRUKTUR TATA KELOLA

MUF menetapkan struktur tata kelola perusahaan yang mencerminkan prinsip *check and balances* dalam penerapan GCG. Perusahaan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), struktur organ utama GCG Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ Perusahaan tersebut menjadi peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Perusahaan telah memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.

Struktur Tata Kelola yang dimiliki Perusahaan juga mengikutsertakan beberapa aspek penting yang berperan untuk mendukung penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap Perusahaan, Struktur Tata Kelola ini telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia, terdiri dari organ pendukung Direksi meliputi:

- Sekretaris Perusahaan
- Satuan Kerja Kepatuhan,
- Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
- Satuan Kerja Audit Internal
- Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Satuan Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan
- Satuan Kerja Pengendalian Gratifikasi,
- Satuan Kerja Perlindungan Konsumen dan Masyarakat,
- Satuan Kerja Layanan Pengaduan Konsumen,
- Satuan Kerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan,
- Satuan Kerja Anti *Fraud* dan *Whistleblowing System*

Komite pendukung Direksi mencakup:

- Komite Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Pembiayaan Konvensional dan Syariah
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Manajemen Risiko

GOVERNANCE STRUCTURE

MUF establishes a corporate governance structure that reflects the principle of checks and balances in implementing GCG. The Company refers to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT), the structure of the Company's GCG main organs consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company's organs play a key role in the successful implementation of GCG. The management system of a Limited Liability Company adheres to a 2 (two) body model or two tier system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors with clear authorities and responsibilities according to their respective functions as mandated in the laws and regulations as well as the Articles of Association.

The Company has three main organs, namely the GMS, the Board of Commissioners and/or the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors. The Board of Commissioners and/or the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors have the responsibility to maintain the long-term sustainability of the Company's business. Therefore, the Board of Commissioners and/or the Sharia Supervisory Board together with the Board of Directors must have the same perception of the vision, mission and values of the Company.

The Company's Governance Structure also includes several important aspects that play a role in supporting the strengthening of control and management of the Company. This Governance Structure is in accordance with the provisions of regulations in force in Indonesia, consisting of the supporting organs of the Board of Directors including:

- Corporate Secretary
- Compliance Work Unit,
- Anti-Money Laundering and Prevention Work Unit Terrorism Funding (APU PPT)
- Internal Audit Work Unit
- Risk Management Work Unit
- Financial Literacy and Inclusion Work Unit
- Gratification Control Work Unit,
- Consumer and Community Protection Work Unit,
- Consumer Complaint Service Work Unit,
- Sustainable Finance Action Plan Work Unit,
- Anti Fraud and Whistleblowing System Unit

The supporting committee for the Board of Directors includes:

- Committee on Products & Development of Conventional and Sharia Financing Business Activities
- Information Technology Steering Committee
- Risk Management Committee

Organ pendukung Dewan Komisaris meliputi:
- Komite Audit
- Komite Nominasi dan Remunerasi
- Komite Pemantau Risiko

Supporting organs for the Board of Commissioners include:
- Audit Committee
- Nomination & Remuneration Committee
- Risk Monitoring Committee

Struktur Tata Kelola MUF
MUF Governance Structure

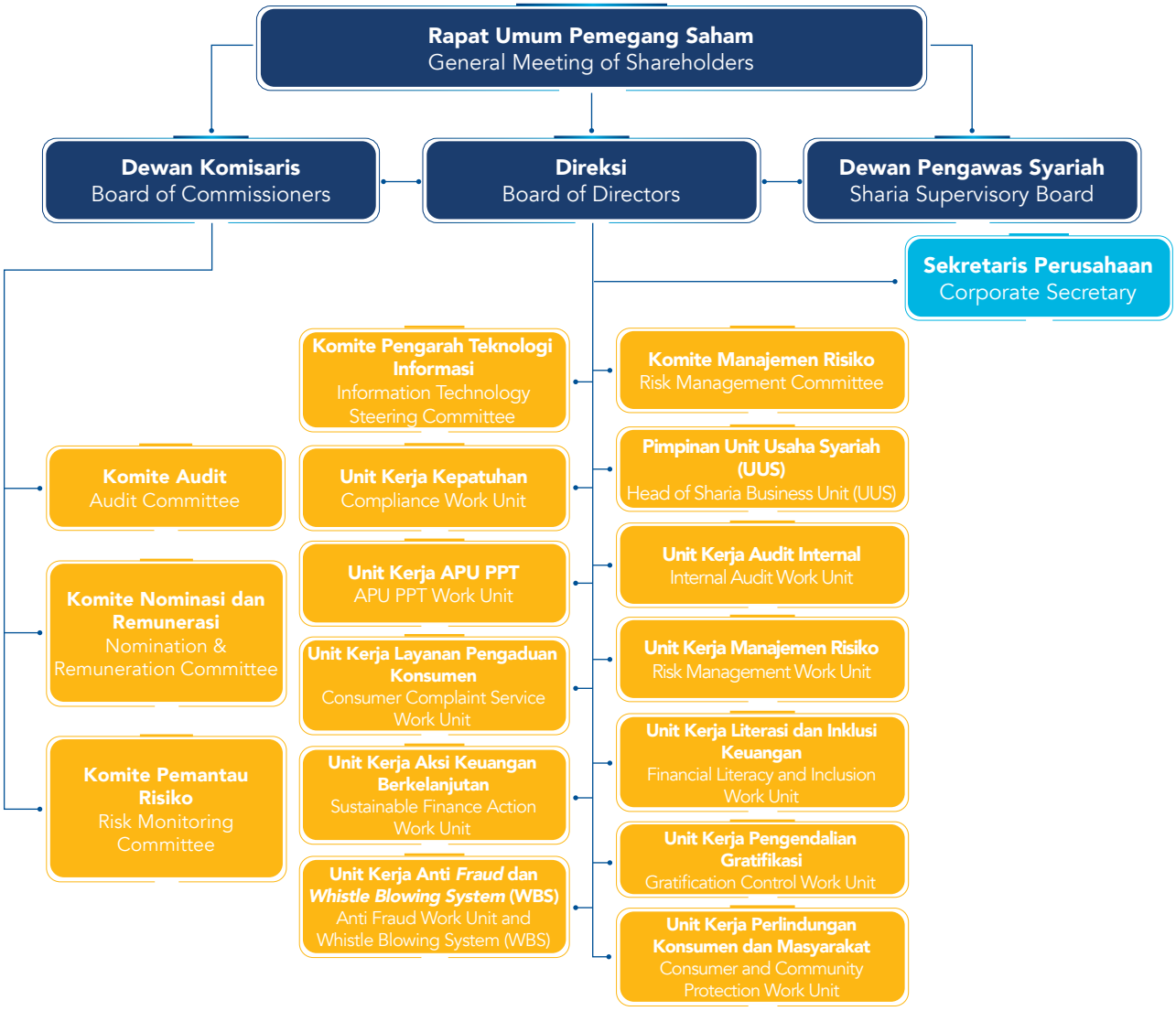

Di samping itu, Perusahaan juga melakukan audit independen terhadap penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Proses ini menjadi penting, di mana laporan keuangan menjadi salah satu informasi fundamental yang mencerminkan kinerja Perusahaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen.

In addition, the Company also conducted an independent audit of the presentation of financial statements by a Public Accountant. This process becomes important, where the financial report is one of the fundamental information that reflects the Company's performance and management carried out by management.

PROSES/MEKANISME TATA KELOLA

Untuk mendukung implementasi GCG agar berjalan dengan baik serta memiliki batasan tanggung jawab masing-masing diperlukan Proses Tata Kelola dan serangkaian aturan internal, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan organisasi Perusahaan berbasis pengelolaan yang akuntabel. Dalam proses tata kelola yang dijalankan Perusahaan juga tetapkan standar prosedur dan hubungan yang jelas antar-Organ dalam Struktur Tata Kelola.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan praktek terbaik prinsip GCG, Perusahaan terus melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap perangkat kebijakan yang dimiliki. Pedoman dan kebijakan tersebut secara jelas mengatur segala aspek pengelolaan Perusahaan, termasuk di antaranya memberikan definisi visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan; menjelaskan kebijakan penyusunan strategi, penyusunan organisasi, kesekretariatan korporasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pengawasan, standar etika, keuangan, akuntansi, pengelolaan SDM, dan sebagainya.

Perkembangan perangkat kebijakan yang dimiliki Perusahaan dapat dilihat di bawah ini.

GOVERNANCE PROCESS/MECHANISM

To support the implementation of GCG so that it runs well and has limits on their respective responsibilities, a Governance Process and a series of internal rules are needed, which are expected to create an organizational environment based on accountable management. In the governance process carried out by the Company, it also establishes standard procedures and clear relationships between Organs in the Governance Structure.

In order to improve the quality of GCG best practice implementation, the Company continues to review and improve its policy tools. These guidelines and policies clearly regulate all aspects of managing the Company, including providing definitions of the vision, mission and values of the Company; explaining policies on strategy formulation, organizational structure, corporate secretariat, risk management, internal control and supervision systems, ethical standards, finance, accounting, HR management, and so on.

The development of the Company's policy tools can be seen below.

Perangkat Kebijakan Policy Tools	**Pengesahan dan Penyempurnaan** Validation and Completion
Anggaran Dasar Perusahaan Company's Articles of Association	Perubahan terakhir ditetapkan melalui Anggaran Dasar yang terakhir diubah melalui Akta No 27 tanggal 8 September 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. The last amendment was stipulated through the Articles of Association which was last amended by Deed No. 27 date September 8, 2022 made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.
Pedoman *Good Corporate Governance*, atau GCG *Code* Guidelines for Good Corporate Governance, or GCG Code	Telah diperbaharui dan disahkan Direksi pada 14 November 2022. It has been updated and approved by the Board of Directors on November 14, 2022.
Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) Code of Conducts Guidelines (Code Of Conduct)	Telah diperbaharui serta disahkan Direksi pada 2 November 2020. It has been updated and approved by the Board of Directors on November 2, 2020.
Piagam atau *Charter* Komite Audit Charter or Audit Committee Charter	Telah diperbaharui dan ditandatangani Dewan Komisaris serta Direksi pada 8 November 2021 dan mulai berlaku per 1 Desember 2021. It has been updated and signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors on November 8, 2021 and will take effect as of December 1, 2021.
Pedoman Manajemen Risiko Risk Management Guidelines	Disahkan oleh Direksi tanggal 1 September 2022. Ratified by the Board of Directors on September 1, 2022.
Pedoman Sistem Pengendalian Internal Internal Control System Guidelines	Disahkan oleh Direksi tanggal 21 Februari 2020 Ratified by the Board of Directors on February 21, 2020

Perangkat Kebijakan Policy Tools	Pengesahan dan Penyempurnaan Validation and Completion
Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Guidelines for Implementing Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU and PPT) Programs	Telah diperbaharui dan disahkan Direktur Utama pada 18 September 2021. It has been updated and approved by the President Director on September 18, 2021.
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Guidelines for Handling Conflicts of Interest	Disahkan oleh Direksi tanggal 2 November 2020. Ratified by the Board of Directors on November 2, 2020.
Kebijakan Gratifikasi Gratification Policy	Kebijakan Gratifikasi khusus *event* dikeluarkan pada Desember 2022 KS Natal & Tahun Baru - KS/001/COMP/XII/2022. Event-specific Gratification Policy issued in December 2022 KS Christmas & New Year - KS/001/COMP/XII/2022
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Whistleblowing System Guidelines (Whistleblowing System)	Disahkan oleh Direksi tanggal 2 November 2020. Ratified by the Board of Directors on November 2, 2020.

HASIL TATA KELOLA

Tujuan dari penerapan tata kelola perusahaan adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Secara teoritis, pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan dan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri serta umumnya tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Governance outcome ditunjukkan melalui berbagai pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik kinerja keuangan, operasional, maupun penghargaan yang diraih. Kualitas pencapaian *governance outcome* ditentukan oleh penegakan GCG di setiap aktivitas pengelolaan Perusahaan. Selain itu, *governance outcome* dapat dimanifestasikan ke dalam nilai-nilai perusahaan dan kinerja MUF yang terus tumbuh secara berkelanjutan.

GOVERNANCE RESULTS

The purpose of implementing corporate governance is to create added value for all stakeholders. Theoretically, the implementation of corporate governance can increase the value of companies by improving their financial performance, reducing possible risks and self-beneficial decisions and generally corporate governance can increase investor confidence.

Governance outcomes are reflected through the various achievements of the Company's overall performance, both financial performance, operations, and the awards achieved. The quality of achieving governance outcomes is determined by the enforcement of GCG in every activity of managing the Company. In addition, governance outcomes can be manifested in MUF's corporate values and performance which continue to grow in a sustainable manner.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Sebagai salah satu organ Perusahaan, RUPS memiliki fungsi sentral dalam mengambil keputusan strategis. Di samping itu, RUPS merupakan wadah perlindungan dan perlakuan kesetaraan bagi seluruh pemegang saham yang diselenggarakan oleh Perusahaan. Melalui forum RUPS, pemegang saham dapat menyalurkan haknya untuk menciptakan nilai optimal bagi Perusahaan, di mana hak tersebut berlaku secara adil dan proporsional berdasarkan prinsip *one share, one vote*.

General Meeting of Shareholders (GMS) is a corporate organ that has authority that is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in Law no. 40 of 2007 and/or the Company's Articles of Association.

As one of the Company's organs, the GMS has a central function in making strategic decisions. In addition, the GMS is a means of protection and equal treatment for all shareholders held by the Company. Through the GMS forum, shareholders can exercise their rights to create optimal value for the Company, where these rights apply fairly and proportionally based on the principle of one share, one vote.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan yang memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Pemegang saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Berikut disampaikan susunan pemegang saham Perusahaan:

SHAREHOLDERS

Shareholders are individuals or legal entities that legally own Company shares and have rights and responsibilities in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association. Shareholders do not intervene in the functions, duties and powers of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Shareholders as owners of capital have rights and responsibilities in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association.

The following is the composition of the Company's shareholders:

Struktur dan Komposisi Kepemilikan Saham MUF per 31 Desember 2022
Structure and Composition of MUF Share Ownership as of December 31, 2022

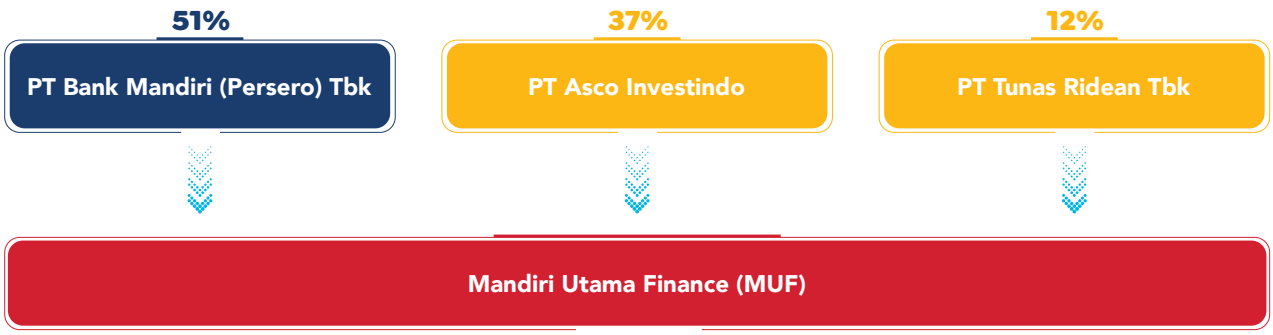

Keterangan | Information

- Pemegang Saham Utama/Pengendali
  Major/Controlling Shareholders
- Pemegang Saham Lainnya
  Other Shareholders

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/pengendali sebagai salah satu pihak utama Perusahaan telah dinyatakan memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagai Pemegang Saham Pengendali di Mandiri Utama Finance sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-390/NB.11/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali Mandiri Utama Finance atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

In accordance with OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the main/controlling shareholder as one of the main parties of the Company has been declared to have fulfilled the fit and proper requirements as the Controlling Shareholder in Mandiri Utama Finance as stated in the decision of the OJK Board of Commissioners No. KEP-390/NB.11/2015 dated June 29, 2015 concerning Determination of Fit and Proper Test Results for Controlling Shareholders of Mandiri Utama Finance on behalf of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

HAK DAN WEWENANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Hak-hak Pemegang Saham/RUPS harus dilindungi, agar pemegang saham dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan teratur, menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan, dan memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, termasuk panggilan untuk RUPS.

Kewenangan pemegang saham melalui RUPS adalah:
1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk agenda rapat yang diumumkan oleh Perusahaan.
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Hak-hak lainnya yang tercatat di Anggaran Dasar Perusahaan.

RIGHTS AND AUTHORITIES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Shareholders/GMS rights must be protected, so that shareholders can exercise their rights based on the Articles of Association and applicable laws and regulations, including attending and voting at a GMS, obtaining material information about the Company in a timely, measurable and regular manner , receive a share of the Company's profits, and obtain a complete explanation and accurate information regarding the implementation of the GMS, including the summons for the GMS.

The authority of shareholders through the GMS is:
1. Attend and vote at the General Meeting of Shareholders (GMS) for the meeting agenda announced by the Company.
2. Receiving dividend payments and the remaining assets resulting from liquidation.
3. Other rights recorded in the Company's Articles of Association.

JENIS RUPS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, terdapat 2 (dua) jenis RUPS di Perusahaan, yaitu:
1. RUPS Tahunan
   diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Agenda dalam RUPS Tahunan ini meliputi:
   a. Pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan yang disampaikan Direksi dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris.

GMS TYPE

In accordance with the Company's Articles of Association, there are 2 (two) types of GMS in the Company, namely:
1. Annual GMS
   held to discuss the Company's annual report and annual calculations and carried out no later than 6 (six) months after the financial year. The agenda in this Annual GMS includes:
   a. Ratification of annual report and financial statement submitted by the Board of Directors and reviewed by the Board of Commissioners.

b. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab mereka sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
c. Penggunaan laba Perusahaan, jika Perusahaan memiliki saldo laba yang positif.
d. Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahun berjalan.
e. Hal-hal lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dapat dibicarakan dan diputuskan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. RUPS Luar Biasa
RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Anggaran Dasar.

RUPS Luar Biasa juga dapat dilakukan melalui mekanisme Keputusan Sirkuler, yaitu pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar mekanisme RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Approval of the annual report and ratification of the financial statements by the Annual GMS means granting full discharge and release of responsibilities to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their responsibilities in connection with the management and supervision that have been carried out during the previous Financial Year, as long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statement.
c. Use of the Company's profit, in the event the Company has positive retained earnings.
d. Appointment and determination of Public Accountant to audit the current year financial statement.
e. Other matters that have been properly proposed can be discussed and decided by considering the Company's Articles of Association as well as the applicable laws and regulations.

2. Extraordinary GMS
Extraordinary GMS which can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, Board of Commissioners or Shareholders to determine matters not to be carried out in the Annual GMS, taking into account the applicable laws and regulations as well as the provisions of the Articles of Association.

Extraordinary GMS can also be carried out through the Circular Decision mechanism, namely decision-making by shareholders outside the GMS mechanism. Circular Decisions have the same legal force as GMS Resolutions, provided that all shareholders provide written approval of the proposals to be decided in terms of Circular Decisions. This is in accordance with Article 91 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

PENYELENGGARAAN RUPS DI SEPANJANG TAHUN 2022 DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
1. RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 14 Juni 2022
2. RUPS Luar Biasa pada 27 April 2022
3. RUPS Luar Biasa pada 30 Agustus 2022.

Adapun agenda dan keputusan RUPS tersebut beserta tindak lanjut yang dilakukan manajemen adalah sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF GMS THROUGHOUT 2022 AND FOLLOW-UP BY MANAGEMENT

Throughout 2022, the Company held 3 (three) GMS, namely:

1. The Annual GMS which was held on June 14, 2022
2. Extraordinary GMS on April 27, 2022
3. Extraordinary GMS August 30, 2022.

The agenda and decisions of the GMS and the follow-up actions taken by management are as follows:

RUPS TAHUNAN 2022

RUPS Tahunan diselenggarakan secara sirkuler pada 14 Juni 2022 yang keputusannya telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance No. 28 tanggal 16 Juni 2022.

Keputusan Agenda 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) dengan opini "menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00023/2.1032/AU.1/09/1174-1/1/I/2022 tanggal 20-1-2022 (dua puluh Januari dua ribu dua puluh dua).
2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) serta disahkannya Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), maka Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).
3. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada Bapak YUSUF BUDI BAIK Sarjana Teknik tersebut, yang menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak tanggal 1-1-2021 (satu Januari dua ribu dua puluh satu) sampai dengan 29-3-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu).

2022 ANNUAL GMS

Annual GMS was held circularly on June 14, 2022, the decision of which was stated in the Deed of Statement of Decisions Outside the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No. 28 of June 16, 2022.

Agenda Resolution 1:

1. Approve the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending 31-12-2021 (thirty-first December two thousand and twenty one) and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending 31-12-2021 (thirty first December two thousand and twenty one) which has been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited) with the opinion "present fairly in all material respects" as stated in report No. 00023/2.1032/AU.1/09/1174-1/1/I/2022 dated 20-1-2022 (twentieth of January two thousand and twenty two).

2. Upon the approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending 31-12-2021 (thirty-first December two thousand and twenty one) and the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 -12-2021 (thirty-first of December two thousand and twenty-one), the Meeting also granted release and full discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in relation to the management and supervision of the Company which has been carried out during book ending on 31-12-2021 (thirty-first of December two thousand and twenty-one), insofar as said action is not a crime and such action is reflected in the Annual Report -and Financial Statements for the financial year ending 31-12 -2021 (thirty-first December two thousand and twenty-one).

3. Also granted release and full discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) were also given to Mr. YUSUF BUDI BAIK, Bachelor of Engineering, who served as Director of the Company from 1-1-2021 (first January two thousand and twenty one) to 29 -3-2021 (twenty nine of March two thousand and twenty one).

Keputusan Agenda 2:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp102.361.012.438,- (seratus dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua belas ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) yaitu sebagai berikut:

   a. Sejumlah 10% (sepuluh persen) dari laba bersih Perusahaan atau sebesar Rp10.236.101.244,- (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus satu ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib Perusahaan.
   b. Sejumlah 90% (sembilan puluh persen) dari laba bersih Perusahaan atau sebesar Rp92.124.911.194 (sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus sembilan -puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perusahaan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk mengatur tata cara pelaksanaan alokasi laba bersih Perusahaan tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Resolution 2:

1. Approve and determine the use of the Company's Net Profit for the Financial Year 2021 (two thousand twenty one) in the amount of IDR102,361,012,438 (one hundred two billion three hundred sixty one million and twelve thousand four hundred thirty eight Rupiah), namely as following:
   a. An amount of 10% (ten percent) of the Company's net profit or IDR10,236,101,244 (ten billion two hundred thirty six million one hundred one thousand two hundred and forty four Rupiah) is determined as the Company's mandatory reserves.
   b. A total of 90% (ninety percent) of the Company's net profit or IDR92,124,911,194 (ninety two billion one hundred twenty four million nine hundred eleven thousand one hundred ninety four Rupiah) is determined as the Company's retained earnings.
2. Granted authority and power to the Board of Directors of the Company to regulate the procedures for implementing the above-mentioned allocation of the Company's net profit in accordance with the applicable laws and regulations.

Keputusan Agenda 3:

1. Menetapkan kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a Member of Ernst & Young Global Limited* dan akuntan publik Arief Somantri) untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dan/atau Akuntan Publik Arief Somantri, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan kepada pemegang saham.

Agenda Resolution 3:

1. Appointed Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (A member of Ernst & Young Global Limited and ARIEF SOMANTRI Public Accountant) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31-12-2022 (thirty-first December two thousand twenty two).
2. Grant authority and power to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the said Public Accountant Office and Public Accountant, as well as determine a replacement Public Accountant Office and/or Public Accountant in the case of Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Office (a member firm of Ernst & Young Global Limited) and/or Public Accountant Arief Somantri, due to any reason cannot complete the audit process of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31-12-2022 (thirty-first of December two thousand and twenty-two). If there is a change in the Public Accounting Firm and/or Public Accountant, the Board of Commissioners will provide a report to the shareholders.

Keputusan Agenda 4:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:
   a. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).
   b. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, *benefit* dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Keputusan Agenda 5:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Seluruh keputusan RUPS Tahunan tersebut telah di tindaklanjuti dan direalisasikan Perusahaan.

RUPS LUAR BIASA

RUPS Lainnya tanggal 27 April 2022

RUPS Lainnya diselenggarakan secara sirkuler pada 27 April 2022 yang keputusannya telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Mandiri Utama Finance No. 72 tanggal 28 April 2022.

Keputusan:

Mengangkat tuan Kyai Haji Abdul Ghofarrozin, *Master of Education* sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak tanggal Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), namun tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.

Agenda Resolution 4:

1. Grant authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining the approval of the Majority Shareholders and known by other Controlling Shareholders to determine:

   a. Tantiem for the performance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ending 31-12-2021 (the thirty-first of December two thousand and twenty one).
   b. Salaries for members of the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners and provision of facilities, benefits and/or other allowances for 2022 (two thousand and twenty two).

Agenda Resolution 5:

To grant authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining the approval of the Majority Shareholders and being known by other Controlling Shareholders to determine the honorarium and/or other allowances for the Sharia Supervisory Board for the financial year 2022 (two thousand and twenty two).

All decisions of the Annual GMS have been followed up and realized by the Company.

EXTRAORDINARY GMS

Another GMS dated April 27, 2022

Another GMS was held circularly on April 27, 2022, the decision of which was stated in the Deed of Statement of Decisions Outside the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No. 72 dated April 28, 2022.

Decision:

Appoint Mr. Kyai Haji Abdul Ghofarrozin, Master of Education as Chairman of the Sharia Supervisory Board as of the date of the Decision Outside the General Meeting of Shareholders and will end at the closing of the third Annual GMS since his appointment, which will be held in 2024 (two thousand and twenty four), but does not reduce the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss it at any time according to the Company's Articles of Association.

RUPS Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2022

RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara sirkuler pada 30 Agustus 2022 yang keputusannya telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Mandiri Utama Finance No. 27 tanggal 8 September 2022.

Keputusan:

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 12 dan Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Mandiri Utama Finance No. 27 tanggal 8 September 2022. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0071927.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Mandiri Utama Finance No. AHU-AH.01.03-0298984 tanggal 5 Oktober 2022.

Extraordinary GMS dated 30 August 2022

Extraordinary GMS was held circularly on August 30 2022, which the resolution was stated in the Deed of Statement of Resolutions Outside the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No. 27 dated September 8, 2022.

Resolution:

Approved the amendments to the Company's Articles of Association Article 12 and Article 3 as stated in the Deed of Statement of Resolution Outside the General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No. 27 dated September 8, 2022. The amendment to the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0071927.AH.01.02. TAHUN 2022 dated October 5, 2022 concerning Approval of Amendment to the Articles of Association of a Limited Liability Company and Letter of Acceptance of Notification of Amendment to the Articles of Association of Mandiri Utama Finance No. AHU-AH.01.03-0298984 dated 5 October 2022.

KEPUTUSAN RUPS TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Perusahaan menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya yang keduanya tidak dilaksanakan secara fisik atau tatap muka, Perusahaan telah mengeluarkan Pernyataan Keputusan di luar RUPS atau Keputusan Sirkuler Pemegang Saham, dengan keterangan sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN 2021

Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tentang Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance Tahun Buku 2020 tanggal 29 Maret 2021, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 29 tanggal 30 Maret 2021.

2021 GMS RESOLUTION

In 2021, the Company has held 2 (two) GMS, namely the Annual GMS and Other GMS, both of which are not held physically or face to face, the Company has issued a Statement of Resolutions outside the GMS or Circular Resolutions of the Shareholders, with the following information:

2021 ANNUAL GMS

Circular Resolution of Shareholders concerning Resolutions of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders to Convene the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance for the Fiscal Year 2020 dated March 29, 2021, as stated in Deed No. 29 of March 30, 2021.

Hasil Keputusan RUPS/Pemegang Saham Resolutions of GMS/Shareholders	Status Status	Keterangan Tindak Lanjut Follow-Up Description
Agenda Pertama First Agenda		
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a Member of the PricewaterhouseCoopers*), dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00050/2.1025/AU.1/09/0222-1/1/II/2021 tanggal 15-2-2021 (lima belas Februari dua ribu dua puluh satu). Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year ending 31-12-2020 (thirty-first December two thousand and twenty) and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31-12 -2020 (thirty first December two thousand and twenty) which has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a Member of the PricewaterhouseCoopers), with the opinion "presents fairly, in all material respects" as stated in report no. 00050/2.1025/AU.1/09/0222-1/1/II/2021 dated 15-2-2021 (the fifteenth of February two thousand and twenty one).	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021
2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) serta disahkannya Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), maka Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan, selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). Upon the approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year ending 31-12-2020 (thirty-first December two thousand and twenty) and the ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31- 12-2020 (thirty-first of December two thousand twenty), the decision outside the Annual General Meeting of Shareholders also granted release and full discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in connection with the management and supervision of the Company that have been carried out, during the Financial Year ending on 31-12-2020 (thirty-first of December two thousand and twenty), insofar as the said action is not a crime and the said action is reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the Financial Year that ended on 31-12-2020 (thirty-first of December two thousand and twenty).	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021

Hasil Keputusan RUPS/Pemegang Saham Resolutions of GMS/Shareholders	Status Status	Keterangan Tindak Lanjut Follow-Up Description
3. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada: tuan Wiweko Probojakti, yang menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak tanggal 1-1-2020 (satu Januari dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal 2-3-2020 (dua Maret dua ribu dua puluh). Also granted release and full discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to: Mr. Wiweko Probojakti, who served as Director of the Company from January 1, 2020 (first January two thousand and twenty) to March 2, 2020 (second March two thousand and twentieth)	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021
Agenda Kedua Second Agenda		
1. Menyetujui dan menetapkan Rugi Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sebesar Rp12.616.149.914,- (dua belas miliar enam ratus enam belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah). Approve and determine the Company's Net Loss for the Fiscal Year ending 31-12-2020 (thirty-first December two thousand and twenty) of IDR12,616,149,914,- (twelve billion six hundred sixteen million one hundred and forty nine thousand nine hundred and fourteen Rupiah).	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021
2. Sehubungan dengan penetapan Rugi Bersih Perusahaan, maka tidak ada pembagian dividen maupun penetapan cadangan wajib yang dilakukan oleh Perusahaan. In connection with the determination of the Company's Net Loss, there is no distribution of dividends or determination of mandatory reserves made by the Company.	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021
Agenda Ketiga Third Agenda		
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) dan Akuntan Publik Arief Somantri untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). Appoint Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited) and Public Accountant Arief Somantri to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending 31-12-2021 (thirty-first December two thousand twenty one).	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No. 29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) dan/atau Akuntan Publik Arief Somantri karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham. Grant authority and power to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the said Public Accountant Office and Public Accountant, as well as determine a replacement Public Accountant Office and/or Public Accountant in the case of the Purwantono, Sungkoro & Surja Office (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited) and/or Public Accountant Arief Somantri for any reason cannot complete the process of auditing the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending 31-12-2021 (thirty-first of December two thousand and twenty-one). If there is a change in the Public Accounting Firm and/or Public Accountant, the Board of Commissioners will provide a report to the Shareholders.	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021

Hasil Keputusan RUPS/Pemegang Saham Resolutions of GMS/Shareholders	Status Status	Keterangan Tindak Lanjut Follow-Up Description
Agenda Keempat Fourth Agenda		
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan: 1. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). 2. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, *benefit* dan/atau tunjangan lainnya untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining the approval of the Majority Shareholders and known by other Controlling Shareholders to determine: 1. Tantiem for the performance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year ending 31-12-2020 (thirty-first of December two thousand and twenty). 2. Salaries for members of the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners and provision of facilities, benefits and/or other allowances for the 2021 (two thousand and twenty one) Fiscal Year.	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021
Agenda Kelima Fifth Agenda		
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining the approval of the Majority Shareholders and being known by other Controlling Shareholders to determine the honorarium and/or other allowances for the Sharia Supervisory Board for the Financial Year 2021 (two thousand and twenty one).	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021
Agenda Keenam Sixth Agenda		
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan pada Pasal 11 ayat (6) dan ayat (9), Pasal 14 ayat (6) dan ayat (8), Pasal 17 ayat (2), ayat (4a), ayat (4b), ayat (5), dan ayat (6). Approve the changes to the Company's Articles of Association in Article 11 paragraph (6) and paragraph (9), Article 14 paragraph (6) and paragraph (8), Article 17 paragraph (2), paragraph (4a), paragraph (4b), paragraph (5), and paragraph (6).	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021
2. Menyetujui menghapus Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perusahaan. Approve to delete Article 11 paragraph (7) and Article 14 paragraph (7) of the Company's Articles of Association.	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021

Hasil Keputusan RUPS/Pemegang Saham Resolutions of GMS/Shareholders	Status Status	Keterangan Tindak Lanjut Follow-Up Description
3. Menyetujui penambahan klausul pada pasal yang mengatur mengenai Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam Anggaran Dasar. Approved the addition of clauses to the articles governing the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board in the Articles of Association.	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021
4. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada salah satu anggota Direksi Perusahaan untuk: • Menyatakan kembali perubahan Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disetujui dalam huruf a, b dan c di atas dan juga untuk menyusun dan menyajikan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perusahaan menjadi satu Akta Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. • Mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Approve to authorize a member of the Company's Board of Directors to: • Restate the amendments to Article 11, Article 14 and Article 17 of the Company's Articles of Association that have been approved in points a, b and c above and also to compile and restate all the articles of the Company's Articles of Association into one Notary Deed in accordance with statutory provisions valid invitation. • Submit an implementation to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain approval and/or receipt of notification of amendments to the Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other agencies, as well as take all necessary actions in accordance with statutory provisions applicable	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021
Agenda Ketujuh Seventh Agenda		
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat tuan Yusuf Budi Baik, Sarjana Teknik tersebut selaku Direktur Perusahaan disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan. Approved to honorably dismiss Yusuf Budi Baik, the Bachelor of Engineering as Director of the Company, accompanied by gratitude for the contribution of his energy and thoughts while serving as a member of the Company's Board of Directors.	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali tuan Ignatius Susatyo Wijoyo (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini) sebagai Komisaris Utama Perusahaan untuk tetap melaksanakan pekerjaannya dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikannya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Approve to reappoint Mr. Ignatius Susatyo Wijoyo (whose identity will be described below) as the Company's President Commissioner to continue carrying out his work with the same duties, authorities and obligations until the closing of the Annual GMS to be held in 2024 (two thousand and two twenty-four), without prejudice to the right of the GMS to terminate it at any time in accordance with the Company's Articles of Association.	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021

Hasil Keputusan RUPS/Pemegang Saham Resolutions of GMS/Shareholders	Status Status	Keterangan Tindak Lanjut Follow-Up Description
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali: • Erida selaku Komisaris Perusahaan; • Stanley Setia Atmadja selaku Direktur Utama Perusahaan; • Rita Mustika selaku Direktur Perusahaan; dan • M.Ziyadulhaq, selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah. Terhitung sejak tanggal Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), namun tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perusahaan. Approve to reappoint: • Erida as the Company's Commissioner; • Stanley Setia Atmadja as the President Director of the Company; • Rita Mustika as Director of the Company; And • M.Ziyadulhaq, as Member of the Sharia Supervisory Board. As of the date of the decision outside the General Meeting of Shareholders and will end at the closing of the third Annual GMS since his appointment, which will be held in 2024 (two thousand twenty four), but does not reduce the right of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time in accordance Company's articles of association.	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021
4. Menyetujui untuk mengangkat: a. Rully Setiawan selaku Direktur Perusahaan; dan b. Muhammad Amin Suma selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Perusahaan terhitung sejak tanggal Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), namun tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perusahaan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kelayakan dan kepatutan *(fit and proper test)*. Approve to appoint: a. Rully Setiawan as the Director of the Company; and b. Muhammad Amin Suma as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board as of the date of the resolution outside the Annual General Meeting of Shareholders and will end at the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders since his appointment, which will be held in 2024 (two thousand twenty four), but does not reduce the right of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time in accordance with the Company's Articles of Association. The appointment above is effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) for the fit and proper test.	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021

Hasil Keputusan RUPS/Pemegang Saham Resolutions of GMS/Shareholders	Status Status	Keterangan Tindak Lanjut Follow-Up Description
5. Terhitung mulai tanggal Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS • Komisaris Utama : Ignatius Susatyo Wijoyo • Komisaris : Erida • Komisaris Independen : Mansyur Syamsuri Nasution DIREKSI • Direktur Utama : Stanley Setia Atmadja • Direktur : Rita Mustika • Direktur : Rully Setiawan DEWAN PENGAWAS Syariah • Ketua : Profesor, Doktor, Haji Muhammad Amin Suma • Anggota : M.Ziyadulhaq Dengan ketentuan masa jabatan: DIREKSI: • Stanley Setia Atmadja dan nyonya Rita Mustika sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perusahaan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat); • Rully Setiawan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian dan kepatutan (*fit and proper test*) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perusahaan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat); DEWAN KOMISARIS: • Ignatius Susatyo Wijoyo sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perusahaan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat); • Erida sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perusahaan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat); • Mansyur Syamsuri Nasution sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). DEWAN PENGAWAS Syariah: • M.Ziyadulhaq sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perusahaan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat); • Muhammad Amin Suma berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian dan kepatutan (*fit and proper test*) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perusahaan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).	√	Telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat No.29 tanggal 30 Maret 2021 Has been followed up as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated March 30, 2021

Hasil Keputusan RUPS/Pemegang Saham Resolutions of GMS/Shareholders	Status Status	Keterangan Tindak Lanjut Follow-Up Description
5. Starting from the date of the resolution outside Annual General Meeting of Shareholders, the composition of the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board is as follows: BOARD OF COMMISSIONERS • President Commissioner: Ignatius Susatyo Wijoyo • Commissioner: Erida • Independent Commissioner: Mansyur Syamsuri Nasution BOARD OF DIRECTORS • President Director: Stanley Setia Atmadja • Director: Rita Mustika • Director: Rully Setiawan Sharia SUPERVISORY BOARD • Chairman: Professor, Doctor, Haji Muhammad Amin Suma • Member: M.Ziyadulhaq With terms of office: BOARD OF DIRECTORS: • Stanley Setia Atmadja and Mrs. Rita Mustika until the closing of the Company's Annual GMS which will be held in 2024 (two thousand and twenty four); • Rully Setiawan is effective since obtaining approval from OJK for the fit and proper test until the closing of the Company's Annual GMS to be held in 2024 (two thousand and twenty four); BOARD OF COMMISSIONERS: • Ignatius Susatyo Wijoyo until the closing of the Company's Annual GMS which will be held in 2024 (two thousand and twenty four); • Erida until the closing of the Company's Annual GMS to be held in 2024 (two thousand and twenty four); • Mansyur Syamsuri Nasution until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023 (two thousand and twenty three). Sharia SUPERVISORY BOARD: • M.Ziyadulhaq until the closing of the Company's Annual GMS which will be held in 2024 (two thousand and twenty four); • Muhammad Amin Suma is effective since obtaining approval from the OJK for the fit and proper test until the closing of the Company's Annual GMS to be held in 2024 (two thousand and twenty four).	√	

RUPS LUAR BIASA

EXTRAORDINARY GMS

Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 22 Juni 2021 Shareholders Circular Resolution dated 22 June 2021	**Status** Status	**Keterangan Tindak Lanjut** Follow-Up Description
1. Pembatalan pengangkatan Sdr, Prof. Dr. H. M. Amin Suma, S.H., M.A., sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perusahaan terhitung sejak tanggal efektif dari Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ini. Cancellation of appointment of Mr. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, S.H., M.A., as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board as of the effective date of this Shareholder Circular Decree.	√	Telah direalisasikan It has been realized
2. Terhitung mulai tanggal efektif Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ini, susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: • Dewan Pengawas Syariah: M.Ziyadulhaq • Hasil Keputusan Sirkuler telah ditindaklanjuti oleh Manajemen As of the effective date of this Shareholders Circular Resolution, the composition of the Sharia Supervisory Board is as follows: • Sharia Supervisory Board: M.Ziyadulhaq • The results of Circular Decisions have been followed up by Management	√	

Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 26 Juni 2021 Shareholders Circular Resolution dated 26 June 2021	**Status** Status	**Keterangan Tindak Lanjut** Follow-Up Description
Menyatakan dengan diperolehnya persetujuan dari OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Rully Setiawan sebagai Direksi Perusahaan, maka Pemegang Saham menyatakan kembali susunan Direksi Perusahaan, dengan susunan sebagai berikut: 1. Direktur Utama: Stanley Setia Atmadja 2. Direktur : Rita Mustika 3. Direktur : Rully Setiawan Dengan masa jabatan seluruhnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Declaring that by obtaining approval from OJK regarding the Fit and Proper Test of Rully Setiawan as a Director of the Company, the Shareholders restate the composition of the Board of Directors of the Company, with the following composition: 1. President Director : Stanley Setia Atmadja 2. Director : Rita Mustika 3. Director : Rully Setiawan With the entire term of office until the closing of the third Annual GMS since his appointment, which will be held in 2024 (two thousand and twenty four).	√	Telah direalisasikan It has been realized

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Keberadaan Dewan Komisaris tersebut, terutama mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

The Board of Commissioners is a Company organ that has collective duties and responsibilities for supervising and providing advice to the Board of Directors and ensuring that the Company implements GCG at all levels or levels of the organization. The existence of the Board of Commissioners mainly refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Perusahaan telah menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman Kerja Dewan Komisaris MUF telah memperbaharui sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Pedoman *Good Corporate Governance*) dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

BOARD OF COMMISSIONERS WORK GUIDELINES

The Company has developed Work Guidelines for the Board of Commissioners which become a reference for the Board of Commissioners in carrying out their functions, duties and responsibilities. The Work Guidelines for the Board of Commissioners of MUF have been updated according to the Guidelines for Good Corporate Governance for Financing Companies (Guidelines for Good Corporate Governance) and POJK No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Anggaran Dasar Perusahaan mengatur masa jabatan Dewan Komisaris, di mana masa jabatan Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya berdasarkan keputusan RUPS, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

TERM OF OFFICE OF BOARD OF COMMISSIONERS

The Company's Articles of Association regulate the term of office of the Board of Commissioners, in which the term of office of the Board of Commissioners appointed by the GMS is for a period up to the closing of the 3rd (three) annual GMS and can be reappointed for the next term of office based on a GMS decision, without prejudice to rights GMS to stop it at any time.

SUSUNAN DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS IN 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure
Ignatius Susatyo Wijoyo	Komisaris Utama President Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance No. 31 tanggal 30 Maret 2021 Deed of Statement of Resolution Outside the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No. 31 of March 30, 2021	30 Maret 2021 s.d RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2024 March 30, 2021 to the Annual GMS to be held in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure
Erida	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance No. 31 tanggal 30 Maret 2021 Deed of Statement of Resolution Outside the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No. 31 of March 30, 2021	30 Maret 2021 s.d RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2024 March 30 2021 to the Annual GMS to be held in 2024
Mansyur S. Nasution	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance No. 33 tanggal 17 Februari 2020 Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No. 33 dated February 17, 2020	17 Februari 2020 s.d RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2023 February 17, 2020 s.d Annual GMS to be held in 2023

Profil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

A brief profile of each member of the Board of Commissioners can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

PERSETUJUAN PENGANGKATAN SERTA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai pihak utama wajib mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Di samping itu, khusus untuk Komisaris Utama harus mendapatkan persetujuan penetapan pengangkatan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana diatur pada Surat Menteri BUMN No. S-100/MBU/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Persetujuan Penetapan Batasan Tindakan Direksi yang Membutuhkan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berikut disampaikan persetujuan pengangkatan dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Dewan Komisaris.

APPROVAL OF APPOINTMENT AND ASSESSMENT OF FIT AND PROPER TEST FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions, the Board of Commissioners and Directors as the main parties must obtain approval from OJK through Fit and Proper Test. In addition, especially for the President Commissioner must obtain approval for the determination of appointment from the Board of Commissioners/Supervisory Board of BUMN as stipulated in the Letter of the Minister of BUMN No. S-100/MBU/02/2019 dated February 6, 2019 concerning Approval of the Determination of Limitations on Board of Directors' Actions Requiring Approval of Series A Dwiwarna Shareholders for Amendments to the Articles of Association of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The following is the approval for the appointment and the results of fit and proper test for Board of Commissioners.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Persetujuan Pengangkatan serta Penilaian Kemampuan dan Kepatutan** Approval of Appointment and Fit and Proper Test
Ignatius Susatyo Wijoyo	Komisaris Utama President Commissioner	1. Persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK melalui Surat No. KEP-389/NB.11/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Ignatius Susatyo Wijoyo Selaku Calon Komisaris Utama Mandiri Utama Finance. 2. Persetujuan Pengangkatan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. TIB.ISM/ BFM.0204/2019 tentang Persetujuan Pengangkatan Komisaris Utama Mandiri Utama Finance. 1. Approval of Fit and Proper Test by OJK through Letter No. KEP-389/NB.11/2019 concerning Results of Fit and Proper Test of Mr. Ignatius Susatyo Wijoyo As Candidate for President Commissioner of Mandiri Utama Finance. 2. Appointment approval from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk through Letter of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. TIB.ISM/ BFM.0204/2019 concerning Approval for the Appointment of the President Commissioner of Mandiri Utama Finance.
Erida	Komisaris Commissioner	Persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK melalui Surat No. KEP-305/NB.11/2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Komisaris Mandiri Utama Finance atas Nama Erida. Approval of Fit and Proper Test by OJK through Letter No. KEP-305/ NB.11/2015 concerning Determination of Fit and Proper Test Results for Commissioners of Mandiri Utama Finance on behalf of Erida.
Mansyur S. Nasution	Komisaris Independen Independent Commissioner	Persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK melalui Surat No. KEP-600/NB.11/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Mansyur Nasution Selaku Calon Komisaris Independen Mandiri Utama Finance. Approval of Fit and Proper Test by OJK through Letter No. KEP-600/ NB.11/2017 concerning Results of Fit and Proper Test of Mr. Mansyur Nasution as a Candidate for Independent Commissioner of Mandiri Utama Finance.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah:

1. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
2. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
3. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
4. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain; dan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

The duties and responsibilities of Board of Commissioners are:

1. Carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors.
2. Supervise the Board of Directors in maintaining a balance of the interests of all parties.
3. Prepare a report on the activities of the Board of Commissioners which is part of the report on the implementation of Good Corporate Governance.
4. Monitoring the effectiveness of Good Corporate Governance implementation.
5. Ensuring that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the work unit of internal auditors, external auditors, results of OJK supervision and/or results of supervision by other authorities; And

6. Komisaris Independen berfungsi melakukan pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, Kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya; dan melaporkannya kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:
   a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DI TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasannya dan penyampaian saran dan nasihat kepada Direksi, baik yang dilakukan secara langsung maupun dalam bentuk surat menyurat. Selain itu, Dewan Komisaris juga menyampaikan persetujuan atas rencana yang diajukan Direksi. Kegiatan yang dilakukan Dewan Komisaris antara lain:

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

Bentuk pengawasan dilakukan antara lain melalui rapat-rapat yang diadakan Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun rapat gabungan bersama Direksi. Di sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris menggelar 15 (limabelas) kali rapat internal dan 11 (sebelas) kali Rapat bersama Direksi. Rapat-rapat tersebut menjadi forum bagi Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi intensif dan mendalam terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), kondisi terkini atas operasi dan perkembangan bisnis Perusahaan, penanganan permasalahan yang muncul, dan perkembangan bisnis Perusahaan.

GCG, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); termasuk tentang restrukturisasi COVID-19 yang dilakukan Perusahaan kepada nasabah terkait kebijakan relaksasi yang diputuskan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi atas dampak pandemi COVID-19.

6. The Independent Commissioner has the function of supervising to voice the interests of Debtors, Creditors and other Stakeholders; and report it to OJK no later than 10 (ten) calendar days from the discovery of:
   a. Violation of laws and regulations in the field of financing; and/or
   b. Circumstances or predictions of circumstances that could jeopardize the continuity of the Company's business.

BRIEF REPORT ON DUTIES IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS IN 2022

Throughout 2022 the Board of Commissioners has carried out its supervisory function and provided suggestions and advice to the Directors, both in person and in the form of correspondence. In addition, the Board of Commissioners also conveys approval of the plan submitted by the Board of Directors. The activities carried out by the Board of Commissioners include:

The Board of Commissioners is tasked with supervising the management of the Company by the Board of Directors, advising the Board of Directors, and ensuring that the Company implements GCG principles.

The form of supervision is carried out, among others, through meetings held by the Board of Commissioners, both internal meetings and joint meetings with the Board of Directors. Throughout 2022, the Board of Commissioners held 15 (fifteen) internal meetings and 11 (eleven) meetings with the Board of Directors. These meetings serve as a forum for the Board of Commissioners to carry out intensive and in-depth evaluations of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), current conditions of the Company's operations and business development, handling of emerging issues, and the Company's business development.

GCG, management of Human Resources (HR); including regarding the COVID-19 restructuring carried out by the Company for customers related to the relaxation policy decided by the Government of Indonesia in the context of economic recovery from the impact of the COVID-19 pandemic.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN BAGI DEWAN KOMISARIS BARU

Perusahaan memiliki mekanisme program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru untuk memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perusahaan. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, per 31 Desember 2022, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris. Dengan demikian, tidak terdapat program pengenalan Perusahaan bagi Dewan Komisaris baru yang dilakukan sepanjang tahun 2022.

COMPANY INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW BOARD OF COMMISSIONERS

The Company has an orientation program mechanism for new members of the Board of Commissioners to ensure that members of the Board of Commissioners can contribute to the Company's performance as soon as possible. Company introduction programs can be in the form of presentations, meetings, visits to business units, Company facilities, review of Company documents or other programs deemed appropriate.

As previously disclosed, as of December 31, 2022, there were no changes to the composition and composition of the membership of the Board of Commissioners. Thus, there is no Company introduction program for new Board of Commissioners conducted throughout 2022.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Perusahaan memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan dan sertifikasi, maupun program peningkatan kompetensi lainnya seperti seminar dan *workshop*.

Berikut disampaikan pelatihan pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2022.

TRAINING AND COMPETENCY IMPROVEMENT FOR BOARD OF COMMISSIONERS

The Company provides opportunities for the Board of Commissioners to be able to develop and improve their own competence through training and certification, as well as other competency improvement programs such as seminars and workshops.

The following is an educational training and/or competency improvement program that will be attended by the Board of Commissioners throughout 2022.

No	Nama Name	*Workshop/Training/Seminar*	Tanggal Date	Penyelenggara - Tempat Organizer - Venue
1.	Ignatius Susatyo	Seminar *Online* "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital" Online Seminar "Challenges to Accelerate Digital Economy Transformation"	31 Mei 2022 May 31, 2022	APPI
2.	Erida	Seminar *Online* "Mengelola Risiko di Tengah Ketidakpastian" Online Seminar "Managing Risk Amidst Uncertainty"	27 Juli 2022 July 27, 2022	APPI
3.	Mansyur Syamsuri N.	Seminar *Online* "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital" Online Seminar "Challenges to Accelerate Digital Economy Transformation"	31 Mei 2022 May 31, 2022	APPI

PENILAIAN KINERJA ORGAN DAN KOMITE PENDUKUNG DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite pendukung sesuai dengan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko.

Ketiga komite pendukung Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam memfasilitasi dan membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan pengawasan terhadap kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Selain itu, ketiga komite pendukung Dewan Komisaris juga telah melaksanakan rapat komite sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi komite dalam membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepengurusan Perusahaan. Di tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, sementara Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, adapun Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF SUPPORTING ORGANS AND COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out the supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) supporting committees in accordance with POJK No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, namely the Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, and Risk Monitoring Committee.

The three supporting committees for the Board of Commissioners have carried out their respective functions and duties in facilitating and assisting the Board of Commissioners in exercising supervisory of the Company's management carried out by the Directors. In addition, the three committees supporting the Board of Commissioners have also held committee meetings as a form of carrying out the committee's duties and functions in assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function over the management of the Company. In 2022, the Audit Committee has held 7 (seven) meetings, while the Nomination & Remuneration Committee has held 3 (three) meetings, and the Risk Monitoring Committee has held 8 (eight) meetings.

KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONER

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Keberadaan Komisaris Independen bertujuan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen serta menjaga "*fairness*". Komisaris Independen diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang memiliki aset lebih dari Rp200 miliar wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen.

PERAN KOMISARIS INDEPENDEN DI LINGKUP MUF

Anggaran Dasar Perusahaan mengatur secara khusus fungsi Komisaris Independen untuk melakukan pengawasan dan menyuarakan kepentingan Debitur, Kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya; serta melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:

1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN

Di akhir tahun 2022, Perusahaan memiliki 1 (satu) Komisaris Independen yang menjabat sejak tahun 2017.

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, shareholding and/or family relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or with a Company that may impede or impede his position to act independently in accordance with the principles GCG principles.

The existence of Independent Commissioners aims to create a climate that is more objective and independent and maintains "fairness". Independent Commissioners are expected to be able to provide a balance between the interests of Shareholders and other Stakeholders.

Based on OJK Regulation No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to POJK No. 30/POJK.05/2014 Concerning Good Corporate Governance for Finance Companies, it is stated that finance companies with assets of more than IDR200 billion must have at least 2 (two) members of the Board of Commissioners and have at least 1 (one) Commissioner Independent.

ROLE OF INDEPENDENT COMMISSIONERS WITHIN MUF SCOPE

The Company's Articles of Association specifically regulate the function of an Independent Commissioner to supervise and voice the interests of Debtors, Creditors and other Stakeholders; as well as report to OJK no later than 10 (ten) calendar days from the discovery of:

1. Violation of laws and regulations in the field of financing; and/or
2. Circumstances or presumed circumstances that may jeopardize the continuity of the Company's business.

COMPOSITION AND MEMBERSHIP OF INDEPENDENT COMMISSIONERS IN COMPOSITION OF COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS

At the end of 2022, the Company has 1 (one) Independent Commissioner who has served since 2017.

Komisaris Independen Independent Commissioner	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan Tenure
Mansyur S. Nasution	1. Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Mandiri Utama Finance No. 59 tanggal 24 November 2017 (Pengangkatan sebagai Komisaris Independen) 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance No. 33 tanggal 17 Februari 2020 (Pengangkatan Kembali sebagai Komisaris Independen) 1. Deed of Statement of Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No. 59 November 24, 2017 (Appointment as Independent Commissioner) 2. Deed of Statement of Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No. 33 Dated February 17, 2020 (Reappointment as Independent Commissioner)	17 Februari 2020 s.d RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2023 (Periode ke-2) February 17, 2020 s.d Annual GMS to be held in 2023 (2nd Period)

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Berdasarkan Pedoman GCG Perusahaan serta Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Komisaris Independen Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah, pada perusahaan yang sama;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
4. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;
5. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan
6. Berdomisili di Indonesia.

CRITERIA FOR DETERMINING INDEPENDENT COMMISSIONERS

Based on the Company's GCG Guidelines and OJK Regulation No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, the Company's Independent Commissioners must meet the following requirements:

1. Has no affiliation with shareholders, members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or members of the Sharia Supervisory Board, in the same Company;
2. Never been a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board, or held a position 1 (one) level below the Board of Directors in the same Company or other Company that has an affiliate relationship with the Company within 6 (six) months final;
3. Understand the laws and regulations in the field of financing and other relevant laws and regulations;
4. Have good knowledge of the financial condition of the Company where the Independent Commissioner is appointed;
5. Have Indonesian citizenship; and
6. Domiciled in Indonesia.

PEMENUHAN ASPEK INDEPENDENSI DARI KOMISARIS INDEPENDEN

INDEPENDENCE ASPECT FULFILLMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONER

Aspek Independensi Independence Aspect	**Mansyur S Nasution**
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah, pada perusahaan yang sama; Has no affiliation with shareholders, members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or members of the Sharia Supervisory Board, in the same Company;	√
Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; Have never been a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board or held a position 1 (one) level below the Board of Directors in the same Company or other Company that has an affiliate relationship with the Company within the last 6 (six) months;	√
Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; Understand laws and regulations in the field of financing and other relevant laws and regulations;	√
Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat; Have good knowledge of financial condition of Company where the Independent Commissioner is appointed;	√
Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan Have Indonesian citizenship; And	√
Berdomisili di Indonesia. Domiciled in Indonesia.	√

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

mandiri utama finance

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Manayar Syamsuri Nasution

Alamat : Komplek Garuda No. 51, RT 013/RW 004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Posisi : Calon Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Memenuhi aspek integritas, meliputi:
   a. cakap melakukan perbuatan hukum;
   b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu tindak pidana pada lembaga jasa keuangan yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, secara lain korupsi; pencucian uang; narkotika/psikotropika; penyelundupan; kepelabuhan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang pidanannya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
   f. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
   g. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan otoritas pemberi dan pengawas LJKNB;
   h. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;
   i. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya.

INDEPENDENCE STATEMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONER

mandiri utama finance

   i. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
   k. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menyelamatkan kewenangannya; dan
   l. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
2. Memenuhi aspek reputasi keuangan, meliputi:
   a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
   b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Pembiayaan yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang menjalani proses pemberian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia diproses di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jakarta, 21 Sept 2017

mandiri utama finance

Manayar Syamsuri Nasution

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
The Sharia Supervisory Board is part of the Company's organs that have the duties and functions of supervising the implementation of the Company's activities in accordance with Sharia Principles.

PERSYARATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Untuk dapat menjadi Dewan Pengawas Syariah Perusahaan, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.
2. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
3. Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi.
4. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
5. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
6. Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah, Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

SHARIA SUPERVISORY BOARD REQUIREMENTS

To become a member of the Company's Sharia Supervisory Board, a person must meet the following requirements:
1. Able to act in good faith, honestly and professionally.
2. Able to act in the interests of the Company and/or other stakeholders.
3. Prioritizing the interests of the Company and/or other stakeholders over personal interests.
4. Able to make decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company and/or other stakeholders.
5. Able to prevent abuse of authority to gain personal advantage that is not appropriate or cause harm to the Company.
6. Every member of the Sharia Supervisory Board, the Company must pass the fit and proper test.

MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya berdasarkan keputusan RUPS, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

TENURE OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

Members of Sharia Supervisory Board are appointed by the GMS for a period up to the closing of the 3rd (three) annual GMS on the recommendation of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN MUI) taking into account the laws and regulations governing this matter, and can be reappointed for a term next position based on the decision of the GMS, without prejudice to the right of the GMS to dismiss him at any time.

SUSUNAN DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2022

COMPOSITION AND BASIS FOR APPOINTMENT OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN 2022

Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure
KH Abdul Ghofarrozin, M.Ed	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance No.72 tanggal 28 April 2022 Statement Deed of Resolutions outside the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No.72 dated April 28, 2022	28 April 2022 s.d RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2024 April 28, 2022 until Annual GMS to be held in 2024
H.M. Ziyadulhaq. SQ., S.Hi., S.Ei., MA., Ph.D	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance No. 31 tanggal 30 Maret 2021 Deed of Statement of Decisions Outside the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No. 31 of March 30, 2021	30 Maret 2021 s.d RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2024 March 30, 2021 to the Annual GMS to be held in 2024

Profil singkat KH Abdul Ghofarrozin, M.Ed dan H.M. Ziyadulhaq. SQ., S.Hi., S.Ei., MA., Ph.D sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat di bagian Profil Dewan Pengawas Syariah, dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Brief profile of H Abdul Ghofarrozin, M.Ed and H.M. Ziyadulhaq. SQ., S.Hi., S.Ei., MA., Ph.D as a member of the Sharia Supervisory Board can be seen in the Sharia Supervisory Board Profile section, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

REKOMENDASI PENGANGKATAN SERTA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu dari pihak utama wajib mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Di samping itu, Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS dengan melalui rekomendasi.

RECOMMENDATIONS FOR THE APPOINTMENT AND FIT AND PROPER TEST OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

In accordance with OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions, the Sharia Supervisory Board as one of the main parties must obtain approval from OJK through Fit and Proper Test. In addition, members of the Sharia Supervisory Board are appointed by the GMS through recommendations.

Rekomendasi pengangkatan dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Dewan Pengawas Syariah

Recommendations for the appointment and results of the fit and proper test of Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Recommendation of National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI)	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Fit and Proper Test from OJK
KH Abdul Ghofarrozin, M.Ed	Surat No. U-494/DSN-MUI/VII/2021 Letter No. U-494/DSN-MUI/VII/2021	Surat No. KEP-11/NB.21/2022 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Abdul Ghofarrozin selaku calon Dewan Pengawas Syariah Mandiri Utama Finance Letter No. EP-11/NB.21/2022. Concerning the Results of the Fit and Proper Test of Mr. Abdul Ghofarrozin as a Candidate for the Sharia Supervisory Board of PT Mandiri Utama Finance
M.Ziyadulhaq SQ., S.Hi., S.Ei., MA., Ph.D	Surat No. U-648/DSN-MUI/X/2017 tentang Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Letter No. U-648/DSN-MUI/X/2017 concerning Recommendations of the Sharia Supervisory Board	Surat No. KEP-18/NB.22/2018. Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. M. Ziyadulhaq selaku Calon Dewan Pengawas Syariah Mandiri Utama Finance Letter No. KEP-18/NB.22/2018. Concerning the Results of the Fit and Proper Test of Mr. M. Ziyadulhaq as a Candidate for the Sharia Supervisory Board of Mandiri Utama Finance

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek Syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

The Sharia Supervisory Board at least has the duty and authority to provide advice and suggestions to the Board of Directors, supervise the Sharia aspects of the operational activities of the Sharia Financing Company or UUS so that they comply with Sharia Principles.

INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki afiliasi ataupun menjabat atas dorongan dan indikasi dari pihak manapun yang terkait dengan Perusahaan.

THE INDEPENDENCE OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

Sharia Supervisory Board does not have an affiliation or take office at the instigation and indication of any party related to the Company.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Program pengembangan kompetensi dimaksudkan sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka peningkatan kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung-jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Perusahaan dan memberikan nasihat strategis pada Direksi dalam hal pengelolaan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

TRAINING AND COMPETENCY IMPROVEMENT OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

The competency development program is intended as a form of program to add insight and knowledge to the Sharia Supervisory Board in order to increase the ability to carry out its duties, functions and responsibilities in supervising the management of the Company and providing strategic advice to the Board of Directors in terms of business management based on Sharia Principles.

No	Nama Name	*Workshop/Training/Seminar*	Tanggal Date	Penyelenggara - Tempat Organizer - Venue
1.	KH Abdul Ghofarrozin, M.Ed	1. Sertifikasi Kompetensi Dewan Pembina Syariah Competency Certification of the Sharia Supervisory Board	13 Januari 2022 January 13, 2022	LSP DSN MUI
		2. *Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS VII tahun 2022 Pre-Ijtima' Sanawi Workshop (Annual Meeting) DPS VII 2022	24 September 2022 September 24, 2022	DSN MUI
2.	H.M. Ziyadulhaq. SQ., S.Hi., S.Ei., MA., Ph.D	1. Seminar *Online* "Mengelola Risiko di Tengah Ketidakpastian" Online Seminar "Managing Risk Amidst Uncertainty"	27 Juli 2022 July 27, 2022	APPI
		2. *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* Dewan Pengawas Syariah XVIII Tahun 2022 Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) XVIII Sharia Supervisory Board 2022	1 – 2 Desember 2022 December 1 – 2, 2022	DSN MUI

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat berhak menerima salinan risalah rapat.

Di tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali. Berikut disampaikan agenda dan rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah dalam rapat-rapat tersebut.

MEETING SHARIA SUPERVISORY BOARD

The Sharia Supervisory Board is required to hold regular meetings at least 6 (six) times in 1 (one) year. The meeting results of Sharia Supervisory Board must be recorded in the minutes of the meeting of the Sharia Supervisory Board and properly documented. Dissenting opinions that occur in the decision of the meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion. Members of the Sharia Supervisory Board who are present or who are not present at the meeting are entitled to receive a copy of the minutes of the meeting.

In 2022, Sharia Supervisory Board held 7 (seven) meetings. The following is the agenda and recapitulation of the attendance level of the Sharia Supervisory Board at these meetings.

Frekuensi Kehadiran
Attendance Frequency

Nama Name	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
KH Abdul Ghofarrozin, M.Ed	5	5	100%
H.M. Ziyadulhaq. SQ., S.Hi., S.Ei., MA., Ph.D	7	7	100%

Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah
Meeting Agenda of Sharia Supervisory Board

No.	Tanggal Date	Materi Rapat	Meeting Material
1	15 Februari 2022 February 15, 2022	1. Laporan *performance* pembiayaan Syariah YTD Januari 2022. 2. *Update* pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan Syariah COVID-19 YTD Januari 2022. 3. *Update* kerja sama rekanan bank Syariah Q4 2021 & *planning* BSI 2022. 4. *Update* rencana/*progress* akad *Ijarah.* 5. *Update* rencana uji petik Dewan Pengawas Syariah (DPS) tahun 2022. 6. *Update* pelaporan hasil audit Syariah tahun 2021 khusus UUS. 7. *Update* pengajuan *fit & proper test* ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS).	1. Sharia financing performance statement in January 2022 YTD. 2. Update on the implementation of the COVID-19 YTD Sharia financing restructuring in January 2022. 3. Update on Sharia bank partner collaboration in Q4 2021 & 2022 BSI planning. 4. Update the plan/progress of the Ijarah contract. 5. Update on the 2022 Sharia Supervisory Board (DPS) sampling plan. 6. Update on the reporting of Sharia audit results for 2021 specifically for UUS. 7. Update on submission of fit & proper test for the chairman of the Sharia Supervisory Board (DPS).
2	24 Maret 2022 March 24, 2022	1. *Update* laporan *performance* pembiayaan Syariah YTD Februari 2022. 2. *Update* program restrukturisasi pembiayaan Syariah COVID-19 YTD Februari 2022. 3. *Update* rencana/*progress* akad *Ijarah.* 4. *Update* rencana kunjungan audit Dewan Pengawas Syariah (DPS) tahun 2022. 5. *Update* rencana uji petik Dewan Pengawas Syariah (DPS) tahun 2022. 6. Laporan evaluasi pemenuhan prinsip Syariah Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 7. *Update* rencana pelatihan pembiayaan Syariah Perusahaan tahun 2022. 8. *Update* pengajuan *fit & proper test* Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS).	1. Update on Sharia financing performance statement in February 2022 YTD. 2. Update on the Sharia financing restructuring program of COVID-19 in February 2022 YTD. 3. Update the plan/progress of the Ijarah contract. 4. Update on the 2022 Sharia Supervisory Board (DPS) audit visit plan. 5. Update on the 2022 Sharia Supervisory Board (DPS) sampling plan. 6. Evaluation report on compliance with the Company's Sharia principles to the Financial Services Authority (OJK). 7. Update on the Company's Sharia financing training plan for 2022. 8. Update on the submission of fit & proper test for the Chairman of Sharia Supervisory Board (DPS).

Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah
Meeting Agenda of Sharia Supervisory Board

No.	Tanggal Date	Materi Rapat	Meeting Material
3	22 April 2022 April 22, 2022	1. *Update* laporan *performance* pembiayaan Syariah YTD Maret 2022. 2. *Update* program restrukturisasi pembiayaan Syariah COVID-19 YTD Maret 2022. 3. *Update* rencana/*progress* akad *Ijarah.* 4. *Update* laporan pengawasan aspek Syariah. 5. *Update* bahan laporan pengawasan aspek Syariah Ketua DPS ke DSN-MUI sebagai berikut: a. *Update summary* kinerja rapat DPS Q1-2022 kepada Ketua DPS; b. *Update* realisasi kunjungan audit DPS Q1-2022; c. Laporan evaluasi pemenuhan prinsip Syariah Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); d. *Update* rencana pelatihan pembiayaan Syariah Perusahaan tahun 2022; e. *Update* Rencana Uji Petik DPS Tahun 2022.	1. Update on Sharia financing performance statement in March 2022 YTD 2. Update on the Sharia financing restructuring program of COVID-19 in March 2022 YTD. 3. Update the plan/progress of the Ijarah contract. 4. Update on Sharia aspect monitoring report. 5. Update the materials for the supervisory report on the Sharia aspects of the Chairman of the DPS to the DSN-MUI as follows: a. Update on the performance summary of DPS Q1-2022 meeting to the Chairman of the DPS; b. Update on realization of DPS audit visit in Q1-2022; c. Evaluation report on compliance with individual Sharia principles to the Financial Services Authority (OJK); d. Update on the Company's Sharia financing training plan for 2022; e. Update on DPS Pick Test Plan for 2022.
4	15 Juli 2022 July 15, 2022	1. *Update* laporan *performance* pembiayaan Syariah YTD juni 2022. 2. *Update* Program restrukturisasi pembiayaan Syariah COVID-19 YTD juni 2022. 3. Pelaporan Ketua DPS atas evaluasi hasil uji petik dewan pengawas Syariah 2022. 4. Realisasi *audit plan* Syariah 2022. 5. *Update* rencana/*progress* akad *Ijarah.*	1. Update on the Sharia financing performance statement June 2022 YTD. 2. Update on the Sharia financing restructuring program of COVID-19 June 2022 YTD. 3. Reporting from the Chairman of the Sharia Supervisory Board on the evaluation of the results of the 2022 Sharia supervisory board test. 4. Realization of the 2022 Sharia audit plan. 5. Update the plan/progress of the Ijarah contract.

Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah
Meeting Agenda of Sharia Supervisory Board

No.	Tanggal Date	Materi Rapat	Meeting Material
5	16 September 2022 September 16, 2022	1. *Update* laporan *performance* pembiayaan Syariah YTD Agustus 2022. 2. *Update* program restrukturisasi pembiayaan Syariah COVID-19 YTD Agustus 2022. 3. Hasil uji petik Dewan Pengawas Syariah 2022. 4. *Update* rencana/*progress* akad *Ijarah*. 5. *Update* rencana kunjungan uji petik pada cabang semester 2 tahun 2022. 6. RKAP MUF Syariah 2023. 7. Arahan Ketua DPS atas keputusan pembahasan hasil rapat Dewan Pengawas Syariah periode sebelumnya: a. Atas seluruh opini yang sudah diterbitkan, termasuk opini pembiayaan Syariah Multiguna Auto Bursa yang berlaku di Aceh. b. *Update* akad yang diberlakukan di Aceh saat pandemi, namun belum ada tanggapan dari DSN-MUI. c. *Update* dan tindak lanjut dari program CAP BSI. d. Hal penting lainnya yang perlu disampaikan.	1. Update on the Sharia financing performance statement in August 2022 YTD. 2. Update on the Sharia financing restructuring program of COVID-19 August 2022 YTD. 3. Results of the 2022 Sharia Supervisory Board test. 4. Update the plan/progress of the Ijarah contract. 5. Update on the plan for picking test visits to branches in semester 2 of 2022. 6. Sharia MUF RKAP 2023. 7. Directions from the DPS Chairman on the decision to discuss the results of the previous Sharia supervisory board meeting: a. On all opinions that have been issued, including the opinion on Multipurpose Auto Exchange Sharia financing that applies in Aceh. b. Update the contract that was enforced in Aceh during the pandemic, but there has been no response from the DSN-MUI. c. Update and follow-up of the BSI CAP program. d. Another important thing that needs to be conveyed.
6	24 Oktober 2022 October 24, 2022	1. *Update* laporan *performance* pembiayaan Syariah YTD September 2022. 2. Hasil uji petik Dewan Pengawas Syariah (DPS) semester 1 tahun 2022. 3. *Update* Rencana kunjungan uji petik pada cabang semester 2 tahun 2022. 4. Arahan Ketua DPS atas keputusan pembahasan hasil rapat dewan pengawas Syariah periode sebelumnya: a. Atas seluruh opini yang sudah diterbitkan, termasuk opini pembiayaan Syariah Multiguna Auto Bursa yang berlaku di Aceh. b. *Update* akad yang diberlakukan di aceh saat pandemi, namun belum ada tanggapan dari DSN-MUI. c. *Update* dan tindak lanjut dari program CAP BSI. d. Hal penting lainnya yang perlu disampaikan.	1. Update on Sharia financing performance statement in September 2022 YTD. 2. Results of the 1st semester 2022 Sharia Supervisory Board (DPS) test. 3. Update on the plan for picking test visits at the 2nd semester branches of 2022. 4. Directions from the DPS Chairman on the decision to discuss the results of the previous Sharia supervisory board meeting: a. On all opinions that have been issued, including the opinion on Multipurpose Auto Exchange Sharia financing that applies in Aceh. b. Update the contract that was enforced in Aceh during the pandemic, but there has been no response from the DSN-MUI. c. Update and follow-up of the BSI CAP program. d. Another important thing that needs to be conveyed.

Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah
Meeting Agenda of Sharia Supervisory Board

No.	Tanggal Date	Materi Rapat	Meeting Material
7	14 Desember 2022 December 14, 2022	1. *Update* laporan *performance* pembiayaan Syariah YTD november 2022. 2. *Update* program restrukturisasi pembiayaan Syariah COVID-19 YTD November 2022. 3. *Update* validasi kelengkapan dan keabsahan opini DPS 2018-2022 terkait restrukturisasi pembiayaan Syariah COVID-19. 4. *Update* hasil uji petik DPS semester 2 tahun 2022. 5. Persetujuan rekomendasi DPS mengenai tanggal kontrak menjadi tanggal BAST. 6. *Update* mengenai kebijakan prosedur pembiayaan Syariah Perusahaan. 7. *Summary* hasil rapat DPS selama tahun 2022.	1. Update on Sharia financing performance statement in November 2022 YTD. 2. Update on the Islamic financing restructuring program of COVID-19 in November 2022. 3. Update on the validation of the completeness and validity of the 2018-2022 Sharia Supervisory Board opinion regarding the restructuring of COVID-19 Sharia financing. 4. Update on the results of the second semester of 2022 DPS picking test. 5. Approval of the DPS recommendation regarding the date of the contract to become the BAST date. 6. Update regarding the Company's Sharia financing procedure policy. 7. Summary of DPS meeting results for 2022.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI TAHUN 2022

Dalam hal meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Prinsip Syariah pada Unit Usaha Syariah (UUS) Perusahaan, Terdapat 4 (empat) fokus pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pelaksanaan pembiayaan dengan Prinsip Syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendanaan dan Pembiayaan Syariah
   a. Kegiatan Pendanaan Syariah
      Pada tahun 2022, pendanaan UUS masih mengandalkan pendanaan dari 3 (tiga) Bank Syariah untuk pendanaan modal kerja dengan Akad *Mudharabah* dan dari 2 (dua) Bank Syariah untuk pembiayaan *joint financing* dengan Akad *Musyarakah*. Dengan memperhatikan pencapaian pembiayaan Syariah Tahun 2022, Dewan Komisaris dan DPS mengarahkan agar Perusahaan mengoptimalkan penambahan ekuitas UUS yang dilakukan pada Semester 2 tahun 2022 dan senantiasa menjalin kerja sama pendanaan pembiayaan dengan Prinsip Syariah serta kolaborasi bisnis dengan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) dan Bank Syariah lainnya di Indonesia dalam pembiayaan *joint financing* untuk menjaga *gearing ratio* agar tidak melewati batas ketentuan yang ditetapkan OJK dan juga agar UUS Perusahaan dapat mencapai target pembiayaan Syariah yang ditetapkan pada tahun 2022.

BRIEF REPORT ON DUTIES IMPLEMENTATION OF SHARIA SUPERVISORY BOARD IN 2022

In terms of increasing the optimization of the implementation of Sharia Principles in the Company's Sharia Business Unit (UUS), there are 4 (four) focuses on the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS) on the implementation of financing with Sharia Principles carried out by the Company, including the following:

1. Sharia Funding and Financing Activities
   a. Sharia Funding Activities
      In 2022, UUS funding still rely on funding from 3 (three) Sharia Banks for working capital funding with Mudharabah Agreements and from 2 (two) Sharia Banks for joint financing with Musyarakah Agreements. Considering the achievement of Sharia financing in 2022, the Board of Commissioners and DPS directed the Company to optimize the addition of UUS equity which was carried out in Semester 2 of 2022 and continue to collaborate in financing financing with Sharia Principles and business collaboration with PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) and Bank Other Sharia in Indonesia in joint financing to maintain the gearing ratio so that it does not exceed the regulatory limits set by the OJK and also so that the Company's UUS can achieve the target of Sharia financing set in 2022.

b. Kegiatan Pembiayaan Syariah
Sepanjang Tahun 2022, UUS Perusahaan telah mengajukan 2 (dua) izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah (KC-US) dan 5 (lima) izin peningkatan status Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah (KSKC-US) menjadi KC-US, sampai dengan Desember 2022 Perusahaan telah menerima sebanyak 6 (enam) izin KC-US baru, sedangkan untuk 1 (satu) pengajuan izin pembukaan KC-US masih dalam proses verifikasi kelengkapan dokumen di OJK.

2. Evaluasi Prosedur Operasional Standar
Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan terhadap prosedur operasional standar pembiayaan dengan Prinsip Syariah pada tahun 2022 melalui kunjungan yang dilaksanakan secara *offline* pada beberapa KC-US yang telah dilakukan audit oleh Divisi Audit Internal Perusahaan Tahun 2022 serta Dewan Pengawas Syariah telah mengambil sampel dokumen pembiayaan yang dilakukan secara langsung pada cabang Batam, Banjarmasin dan Serang. Dari Hasil Uji Petik tersebut, Dewan Pengawas Syariah merekomendasikan agar tertib dalam penerapan administrasi dan dokumentasi pada saat akuisisi calon nasabah baru, sehingga prinsip Syariah dapat dipenuhi dengan baik.

3. Praktik Pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan
Seiring dengan semakin meningkatnya target pertumbuhan pembiayaan Syariah yang dibukukan oleh Perusahaan Tahun 2022, DPS mengarahkan Perusahaan untuk semakin fokus dalam pengembangan aspek pemasaran pembiayaan Syariah melalui pengembangan akad pembiayaan Syariah lainnya (*Ijarah*) dan perluasan jaringan Kantor Unit Syariah sesuai dengan Penyesuaian Perubahan Rencana Bisnis Tahun 2022, sehingga Perusahaan dapat melakukan pengembangan pedoman standar operasional pemasaran pembiayaan Syariah, yang meliputi antara lain perencanaan produk, dokumen legal serta kegiatan operasional pemasaran produk pembiayaan Syariah.

4. Penerapan Akuntansi
Sepanjang tahun 2022, secara berkala DPS melakukan *review* terhadap laporan keuangan UUS. Hasil Pengawasan DPS atas penerapan akuntansi untuk pembiayaan dengan Prinsip Syariah menggunakan Akad *Murabahah* menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi telah dipisahkan dengan pencatatan akuntansi pembiayaan yang bersifat Konvensional dan UUS Perusahaan juga telah melakukan pelaporan secara berkala sesuai dengan POJK dan SEOJK yang berlaku.

b. Sharia Financing Activities
Throughout 2022, the Company's UUS has applied for 2 (two) licenses to open a Sharia Unit Branch Office (KC-US) and 5 (five) permits to increase the status of an Office Other than a Sharia Unit Branch Office (KSKC-US) to become KC-US, until December 2022 The Company has received 6 (six) new KC-US permits, while for 1 (one) application for a permit to open a KC-US is still in the process of verifying the completeness of the documents at the OJK.

2. Evaluation of Standard Operating Procedures
The Sharia Supervisory Board has supervised the standard operational procedures for financing with Sharia Principles in 2022 through offline visits to several KC-US which have been audited by the Company's Internal Audit Division in 2022 and the Sharia Supervisory Board has taken samples of the financing documents carried out directly at the Batam, Banjarmasin and Serang branches. From the results of the picking test, the Sharia Supervisory Board recommends orderly implementation of administration and documentation when acquiring new prospective customers, so that Sharia principles can be fulfilled properly.

3. Sharia Financing Marketing Practices conducted by Financing Companies
Along with the increasing target of Sharia financing recorded by the Company in 2022, DPS directs the Company to focus more on developing the marketing aspects of Sharia financing through the development of other Sharia financing contracts (Ijarah) and expansion of the Sharia Unit Office network in accordance with the Adjustments to Changes in the 2022 Business Plan , so that the Company can develop operational standard guidelines for Sharia financing marketing, which include, among other things, product planning, legal documents and operational activities for marketing Sharia financing products.

4. Accounting Application
Throughout 2022, DPS periodically reviews UUS financial reports. The results of DPS Supervision on the implementation of accounting for financing with Sharia Principles using Murabahah Contracts show that the accounting records have been separated from the Conventional financing accounting records and the Company's UUS has also carried out periodic reports in accordance with the prevailing POJK and SEOJK.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

The Board of Directors is a Company organ that is authorized and fully responsible for managing the Company for the benefit of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company and represents the Company both inside and outside the court in accordance with the articles of association and applicable laws and regulations, the Articles of Association and the Resolutions of the GMS.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Hal ini mencerminkan wujud akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit, auditor eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

The Board of Directors is accountable for carrying out their duties to shareholders through the GMS. This reflects the form of corporate management accountability in accordance with GCG principles. The performance of the Directors is evaluated by the Board of Commissioners and reported to the GMS. The Board of Directors follows up on audit findings and recommendations from Internal Audit, external auditors and/or monitoring results from other authorities.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Perusahaan telah menyusun Pedoman Kerja Direksi yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman Kerja Direksi MUF telah memperbaharui sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Pedoman *Good Corporate Governance*) dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

BOARD OF DIRECTORS WORK GUIDELINES

The Company has developed the Board of Directors' Work Guidelines which serve as a reference for the Board of Commissioners in carrying out their functions, duties and responsibilities. The Work Guidelines for the Board of Directors of MUF have been updated according to the Guidelines for Good Corporate Governance for Financing Companies (Guidelines for Good Corporate Governance) and POJK No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to POJK No. 30/ POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.

MASA JABATAN DIREKSI

Anggaran Dasar Perusahaan mengatur masa jabatan Direksi, di mana masa jabatan Direksi yang diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya berdasarkan keputusan RUPS, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

TENURE OF BOARD OF DIRECTORS

The Company's Articles of Association regulate the term of office of the Board of Directors, in which the term of office of the Board of Directors appointed by the GMS is for a period up to the closing of the 3rd (three) annual GMS and can be reappointed for the next term of office based on a GMS decision, without prejudice to the right of the GMS to stop it at any time.

SUSUNAN DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI TAHUN 2022

COMPOSITION AND BASIS FOR APPOINTMENT OF BOARD OF DIRECTORS IN 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure
Stanley S. Atmadja	Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance No. 31 tanggal 30 Maret 2021 (Pengangkatan Kembali sebagai Direktur) Deed of Statement of Resolution Outside the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No. 31 date March 30, 2021 (Reappointment as Director)	30 Maret 2021 s.d RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2024 March 30, 2021 to the Annual GMS to be held in 2024
Rita Mustika	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance No. 31 tanggal 30 Maret 2021 (Pengangkatan Kembali sebagai Direktur) Deed of Statement of Resolution Outside the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No. 31 date March 30, 2021 (Reappointment as Director)	30 Maret 2021 s.d RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2024 March 30, 2021 to the Annual GMS to be held in 2024
Rully Setiawan	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mandiri Utama Finance No. 45 tanggal 26 Juli 2021 (Pengangkatan sebagai Direktur) Deed of Statement of Resolution Outside the Annual General Meeting of Shareholders of Mandiri Utama Finance No. 45 dated July 26, 2021 (Appointment as Director)	26 Juli 2021 s.d RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2024 July 26, 2021 to the Annual GMS to be held in 2024

Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat di bagian Profil Direksi, dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

A brief profile of each member of the Board of Directors can be seen in the Profile of the Board of Directors section, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

PERSETUJUAN PENGANGKATAN SERTA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai pihak utama wajib mendapatkan persetujuan dari OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Di samping itu, khusus untuk Direktur Utama harus mendapatkan persetujuan penetapan pengangkatan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana diatur pada Surat Menteri BUMN No. S-100/MBU/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Persetujuan Penetapan Batasan Tindakan Direksi yang Membutuhkan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

APPOINTMENT APPROVAL AND ASSESSMENT OF FIT AND PROPER TEST OF BOARD OF DIRECTORS

In accordance with OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions, the Board of Commissioners and Directors as the main parties must obtain approval from OJK through Fit and Proper Test. In addition, specifically for the President Director, approval for the determination of appointment from the Board of Commissioners/Supervisory Board of BUMN as stipulated in the Minister of BUMN Letter No. S-100/MBU/02/2019 dated February 6, 2019 concerning Approval of the Determination of Limitations on Board of Directors' Actions Requiring Approval of Series A Dwiwarna Shareholders for Amendments to the Articles of Association of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Persetujuan Pengangkatan dan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi
Appointment Approval and Results of Fit and Proper Test of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Persetujuan Pengangkatan serta Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Appointment Approval and Fit and Proper Test
Stanley S. Atmadja	Direktur Utama President Director	Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-302/NB.11/2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direktur Utama Mandiri Utama Finance Atas Nama Stanley Setia Atmadja Resolution Copy of Board of Commissioners of Financial Services Authority No. KEP-302/NB.11/2015 concerning Determination of Fit and Proper Test Results for the President Director of Mandiri Utama Finance on Behalf of Stanley Setia Atmadja
Rita Mustika	Direktur Director	Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-427/NB.11/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Rita Mustika selaku Calon Direktur Mandiri Utama Finance Resolution Copy of Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-427/NB.11/2019 regarding Rita Mustika's Fit and Proper Test Results as a Candidate for Director of Mandiri Utama Finance
Rully Setiawan	Direktur Director	Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-415/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Rully Setiawan selaku Calon Direktur *Finance & Business Relationship* Mandiri Utama Finance Resolution Copy of Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-415/NB.11/2021 concerning Results of the Fit and Proper Test of Rully Setiawan as a Candidate for Director of Finance & Business Relationship at Mandiri Utama Finance

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan Pedoman GCG Perusahaan, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya;
2. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
4. Memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, Kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
5. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap;
6. Membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ Perusahaan;
7. Direksi Perusahaan harus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTORS

Based on the Company's GCG Guidelines, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. Comply with laws and regulations, articles of association and other internal regulations of the Company in carrying out their duties;
2. Manage the Company in accordance with their authority and responsibility;
3. To be responsible for carrying out their duties to the GMS;
4. Ensuring that the Company pays attention to the interests of all parties, especially the interests of Debtors, Creditors and/or other Stakeholders;
5. Ensuring that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners in a timely and complete manner;
6. Assist and provide facilities and/or resources for the smooth implementation of the duties and authorities of the Company organs;
7. The Board of Directors of the Company must guarantee effective, appropriate and fast decision-making and can act independently, not having any interests that could interfere with their ability to carry out their duties independently and objectively;

8. Direksi wajib mengambil keputusan pembiayaan secara profesional dan mengoptimalkan nilai tambah kekayaan Perusahaan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Debitur dan kepentingan bagi pemangku kepentingan lainnya.

8. The Board of Directors must make professional financing decisions and optimize the added value of the Company's assets while still paying attention to the protection of Debtors and the interests of other Stakeholders.

PEMBAGIAN LINGKUP KERJA DAN TANGGUNG JAWAB ANTAR DIREKSI

DISTRIBUTION OF WORK SCOPE AND RESPONSIBILITIES AMONG DIRECTORS

Pembagian Lingkup Kerja dan Tanggung Jawab Antar Direksi
Allocation of Work and Responsibilities Among the Board of Directors

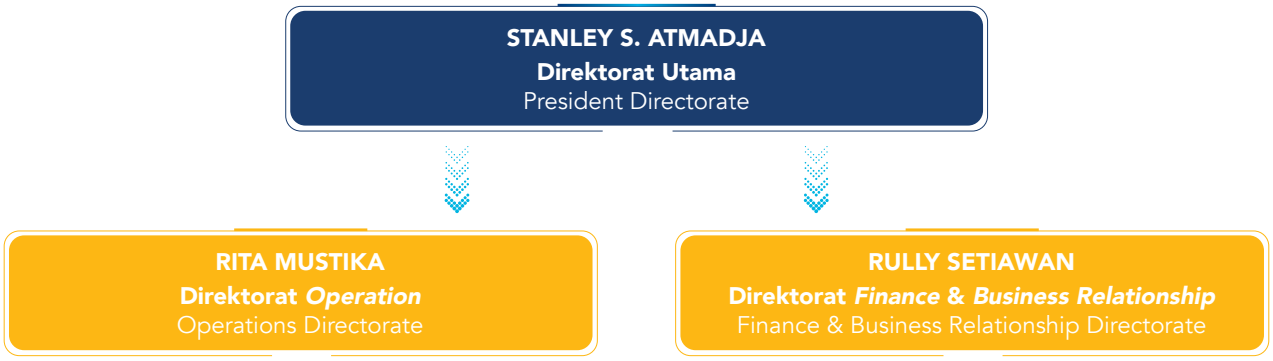

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan, Direksi membagi lingkup tugas dan wewenangnya dengan penjabaran sebagai berikut.

In carrying out the Company's business activities, the Board of Directors divides the scope of duties and authorities with the following description.

Nama/Jabatan Name/Title	Fungsi dan Tujuan Function and Purpose	Tanggung Jawab Responsibility	Wewenang Authority
Stanley S. Atmadja/ Direktur Utama	1. Menentukan kebijakan strategis perusahaan dalam mencapai kinerja yang optimal. 2. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur-prosedur yang dipergunakan. 3. Bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan kualitas keseluruhan kinerja Perusahaan. 4. Membangun kolaborasi, sinergi dan aliansi bisnis dengan perusahaan dalam Mandiri *Group*. 5. Menyelaraskan kebijakan strategis perusahaan dengan Bank Mandiri. 6. Pengelolaan perusahaan mengacu pada prinsip pengelolaan risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Terintegrasi.	1. Membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana kerja perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan/keputusan atas segala pengembangan dan implementasi perusahaan ke arah pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan. 2. Mengarahkan karyawan untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang ada secara optimal bagi kepentingan Perusahaan. 3. Memberikan kemampuan profesional secara optimal bagi kepentingan Perusahaan. 4. Mengatur seluruh sistem manajemen perusahaan bagi perkembangan dan kemajuan Perusahaan. 5. Melakukan pengawasan mengacu pada prinsip risiko dan pengendalian atas seluruh kinerja Perusahaan. 6. Menciptakan suasana tenang, damai dan enerjik terhadap seluruh aktivitas Perusahaan. 7. Mengarahkan seluruh karyawan untuk bekerja secara profesional, efisien dan efektif. 8. Merealisasikan dan melaksanakan rencana-rencana serta prosedur-prosedur yang diterapkan melalui pendelegasian wewenang pada Direktorat/Divisi di bawah tanggung jawabnya. 9. Mengadakan pengawasan terhadap seluruh kinerja Direktorat/Divisi. 10. Menciptakan konsep dasar, kerangka dan prosedur departemental berdasarkan kebutuhan dan konsep yang diajukan oleh Direktorat/divisi. 11. Memastikan dan mengawasi pelaksanaan organisasi dan manajemen sumber daya manusia selaras dengan sasaran strategi perusahaan dan memberikan sumbangan terhadap berhasilnya pencapaian sasaran-sasaran. 12. Membuat strategi kolaborasi, sinergi dan aliansi bisnis dengan perusahaan dalam Mandiri *Group*. 13. Memonitor kinerja keuangan perusahaan dan inisiatif strategis bersama dengan Dewan Komisaris 14. Memastikan Tata Kelola Terintegrasi dijalankan dengan baik dalam rangka pengendalian risiko. 15. Membentuk kultur perusahaan selaras dengan kultur Bank Mandiri, sekaligus memastikan implementasi kultur berjalan dengan baik.	1. Mengarahkan para Direksi untuk mengatur, membuat kebijakan dan peraturan-peraturan perusahaan, melakukan implementasi dan kinerja tak terbatas bagi kepentingan Perusahaan. 2. Melakukan kerja sama dalam bentuk apa pun dengan pihak lain bagi kepentingan Perusahaan. 3. Mempergunakan dan melakukan implementasi keuangan perusahaan bagi kepentingan Perusahaan.

Nama/Jabatan Name/Title	**Fungsi dan Tujuan** Function and Purpose	**Tanggung Jawab** Responsibility	**Wewenang** Authority
Stanley S. Atmadja/ President Director	1. Determine the Company's strategic policies in achieving optimal performance. 2. Responsible for all activities, performance and procedures used. 3. Responsible for research and development related to the overall quality of the Company's performance. 4. Building collaboration, synergy and business alliances with companies within the Mandiri Group. 5. Aligning the Company's strategic policies with Bank Mandiri. 6. The management of the Company refers to the principles of risk management which includes identification, measurement, monitoring and control of risks, by applying the principles of Integrated Governance.	1. Create, formulate, compile, determine the concept and work plan of the Company, direct and provide policies/decisions on all development and implementation of the Company towards the growth and development of the Company. 2. Directing employees to optimize all available resources for the benefit of the Company. 3. Providing optimal professional capabilities for the benefit of the Company. 4. Manage the entire Company management system for the development and progress of the Company. 5. Carry out supervision referring to the principles of risk and control over the entire performance of the Company. 6. Creating a calm, peaceful and energetic atmosphere for all of the Company's activities. 7. Directing all employees to work professionally, efficiently and effectively. 8. Realizing and implementing plans and procedures implemented through delegation of authority to the Directorate/ Division under his responsibility. 9. Carry out supervision of the entire performance of the Directorate/Division. 10. Create basic concepts, frameworks and departmental procedures based on the needs and concepts proposed by the Directorate/division. 11. Ensure and supervise the implementation of the organization and management of human resources in line with the Company's strategic goals and contribute to the successful achievement of these goals. 12. Creating strategies for collaboration, synergy and business alliances with companies within the Mandiri Group. 13. Monitor the Company's financial performance and strategic initiatives together with the Board of Commissioners 14. Ensuring that Integrated Governance is implemented properly in the context of risk control. 15. Establishing a corporate culture in harmony with Bank Mandiri's culture, while ensuring the implementation of the culture goes well.	1. Directing the Board of Directors to regulate, formulate Company policies and regulations, carry out unlimited implementation and performance for the benefit of the Company. 2. Cooperate in any form with other parties for the benefit of the Company. 3. Using and implementing Company finances for the benefit of the Company.

Nama/Jabatan Name/Title	**Fungsi dan Tujuan** Function and Purpose	**Tanggung Jawab** Responsibility	**Wewenang** Authority
Rita Mustika/ Direktur	1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur-prosedur yang dipergunakan, khususnya yang berhubungan dengan aspek operation dan legal. 2. Bertanggung jawab atas proses operasional di seluruh jaringan Mandiri Utama Finance. 3. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan *project* strategis perusahaan. 4. Bertanggung jawab atas pengembangan proses sistem, administrasi dan kontrol operasional dalam lingkup *operation*. 5. Membangun kolaborasi, sinergi dan aliansi bisnis dengan perusahaan dalam Mandiri *Group*.	1. Mengarahkan *Senior Vice President* dan Kepala Divisi di bawah Direktoratnya untuk mengatur, membuat kebijakan dan peraturan-peraturan manajemen Operasional, Legal, serta melakukan implementasi dan kinerja tak terbatas bagi kepentingan perusahaan 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen Operasional, *Legal* dan *strategy* management bagi kepentingan perusahaan. 3. Mengarahkan seluruh karyawan untuk bekerja secara profesional, efisien dan efektif. 4. Merealisasikan dan melaksanakan rencana-rencana serta prosedur-prosedur yang diterapkan melalui pendelegasian wewenang pada Divisi di bawah Direktorat Operasional. 5. Memastikan semua prosedur dan aturan yang diberlakukan di Perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola terintegrasi dan sesuai dengan regulasi.	1. Merekomendasikan dan mengembangkan kebijakan dan prosedur terkait operasional Perusahaan. 2. Bertindak sebagai anggota komite kredit *fleet* dengan batas wewenang memutus kredit yang diatur di dalam memo internal tersendiri. 3. Mempergunakan keuangan Perusahaan dalam batas wewenangnya, bagi kepentingan operasional Perusahaan dalam koridor peraturan yang berlaku. 4. Menentukan keputusan kerja sama dengan Vendor, Asuransi, Biro Jasa, Notaris untuk pengurusan fidusia, *Lawyer* dan Aparat. 5. Melakukan kerja sama dalam bentuk apapun dengan pihak lain bagi kepentingan Perusahaan, atas persetujuan *President Director*.

Nama/Jabatan Name/Title	Fungsi dan Tujuan Function and Purpose	Tanggung Jawab Responsibility	Wewenang Authority
Rita Mustika/ Director	1. Responsible for all activities, performance and procedures used, especially those related to operational and legal aspects. 2. Responsible for operational processes throughout the Mandiri Utama Finance network. 3. Responsible for the smooth implementation of the Company's strategic projects. 4. Responsible for system process development, administration and operational control within the scope of operations. 5. Building collaboration, synergy and business alliances with companies within the Mandiri Group.	1. Directing the Senior Vice President and Division Heads under their Directorate to regulate, formulate operational and legal management policies and regulations, as well as carry out unlimited implementation and performance for the benefit of the Company 2. Supervise and control all operational, legal and strategic management performance for the benefit of the Company. 3. Directing all employees to work professionally, efficiently and effectively. 4. Realizing and implementing plans and procedures implemented through delegation of authority to Divisions under the Operational Directorate. 5. Ensuring that all procedures and rules applied in the Company are in accordance with integrated governance principles and in accordance with regulations.	1. Recommend and develop policies and procedures related to the Company's operations. 2. Acting as a member of the fleet credit committee with the limit of authority to decide on credit which is regulated by a separate internal memo. 3. Using the Company's finances within the limits of its authority, for the benefit of the Company's operations within the corridors of applicable regulations. 4. Determine cooperation decisions with vendors, insurance, service bureaus, notaries for fiduciary management, lawyers and officials. 5. Cooperate in any form with other parties for the benefit of the Company, with the approval of the President Director.

Nama/Jabatan Name/Title	**Fungsi dan Tujuan** Function and Purpose	**Tanggung Jawab** Responsibility	**Wewenang** Authority
Rully Setiawan/ Direktur	1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur-prosedur yang dipergunakan, khususnya yang berhubungan dengan aspek keuangan dan informasi, komunikasi dan Teknologi. 2. Bertanggung jawab terhadap alur informasi keuangan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya investor, lembaga keuangan dan regulator. 3. Bertanggung jawab membangun kolaborasi, sinergi, dan aliansi dengan BMRI dan perusahaan anak lainnya.	1. Mengarahkan *Senior Executive Vice President, Senior Vice President,* dan Kepala Divisi di bawah Direktoratnya untuk mengatur, membuat kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan Rencana Keuangan dan *Captive Bisnis.* 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja dan kegiatan Keuangan, ICT, dan *Captive* Bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. 3. Mengarahkan dan memastikan seluruh karyawan di lingkungan Direktorat *Finance & Business Relationship* bekerja secara efektif, transparan, dan professional. 4. Menjalin dan membina hubungan yang baik dengan BMRI, Bank, Kreditur dan Investor serta Regulator. 5. Memastikan proses perbaikan yang berkesinambungan terhadap kualitas dan efisiensi biaya terhadap kebijakan, proses dan prosedur di dalam ruang lingkup Direktorat *Finance & Business Relationship.* 6. Memastikan semua prosedur dan aturan yang diberlakukan di perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola terintegrasi dan sesuai dengan regulasi.	1. Mengarahkan para Kepala Divisi untuk mengatur, membuat kebijakan dan peraturan-peraturan perusahaan, melakukan implementasi dan kinerja tak terbatas bagi kepentingan perusahaan yang terkait dengan aspek keuangan dan informasi, komunikasi dan pertumbuhan bisnis *captive.* 2. Melakukan kerja sama dalam bentuk apa pun dengan pihak lain bagi kepentingan Perusahaan. 3. Mempergunakan dan melakukan implementasi keuangan perusahaan bagi kepentingan Perusahaan.

Nama/Jabatan Name/Title	Fungsi dan Tujuan Function and Purpose	Tanggung Jawab Responsibility	Wewenang Authority
Rully Setiawan/ Director	1. Responsible for all activities, performance and procedures used, especially those related to financial and information, communication and technology aspects. 2. Responsible for the flow of financial information to the Board of Directors, Board of Commissioners and stakeholders, including investors, financial institutions and regulators. 3. Responsible for building collaborations, synergies and alliances with BMRI and other subsidiary companies.	1. Directing the Senior Executive Vice President, Senior Vice President, and Division Heads under their Directorate to manage, make policies and strategies related to the Financial Plan and Captive Business. 2. Supervise and control all financial, ICT and Captive Business performance and activities carried out by the Company. 3. Directing and ensuring that all employees within the Finance & Business Relationship Directorate work effectively, transparently and professionally. 4. Establish and maintain good relationships with BMRI, Banks, Creditors and Investors and Regulators. 5. Ensuring a process of continuous improvement of quality and cost efficiency of policies, processes and procedures within the scope of the Directorate of Finance & Business Relationship. 6. Ensuring that all procedures and rules applied in the Company are in accordance with integrated governance principles and in accordance with regulations.	1. Directing Division Heads to regulate, make Company policies and regulations, carry out unlimited implementation and performance for the interests of the Company related to financial and information aspects, communication and captive business growth. 2. Cooperate in any form with other parties for the benefit of the Company. 3. Using and implementing Company finances for the benefit of the Company.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN BAGI DIREKSI BARU

Perusahaan memiliki mekanisme program orientasi bagi anggota Direksi yang baru untuk memastikan bahwa anggota Direksi dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perusahaan. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, per 31 Desember 2022, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi keanggotaan Direksi. Dengan demikian, tidak terdapat program pengenalan Perusahaan bagi Direksi baru yang dilakukan sepanjang tahun 2022.

COMPANY INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

The Company has an orientation program mechanism for new members of the Board of Directors to ensure that members of the Board of Directors can contribute to the Company's performance as soon as possible. Company introduction programs can be in the form of presentations, meetings, visits to business units, Company facilities, review of Company documents or other programs deemed appropriate.

As previously disclosed, as of December 31, 2022, there were no changes to the composition and composition of the membership of the Board of Directors. Thus, there is no Company introduction program for new Directors conducted throughout 2022.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

Perusahaan memberikan kesempatan kepada Direksi untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan dan sertifikasi, maupun program peningkatan kompetensi lainnya seperti seminar dan *workshop*.

Berikut disampaikan pelatihan pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2022.

TRAINING AND COMPETENCY IMPROVEMENT OF BOARD OF DIRECTORS

The Company provides opportunities for the Board of Directors to be able to develop and improve their own competence through training and certification, as well as other competency improvement programs such as seminars and workshops.

The following is an educational training and/or competency improvement program that will be attended by the Board of Directors throughout 2022.

No.	Nama Name	*Workshop/Training/Seminar*	Tanggal Date	Penyelenggara - Tempat Organizer - Venue
1.	Stanley Setia Atmadja	1. Seminar *Online* "Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan" Online Seminar "Momentum for the Recovery of the Financing Industry"	1 Maret 2022 March 1, 2022	APPI
		2. Seminar *Online* "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital" Online Seminar "Challenges to Accelerate Digital Economy Transformation"	31 Mei 2022 May 31, 2022	APPI
2.	Rita Mustika	1. Seminar *Online* "Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan" Online Seminar "Momentum for the Recovery of the Financing Industry"	1 Maret 2022 March 1, 2022	APPI
		2. Seminar *Online* "Strategi Penguatan SDM Industri Jasa Keuangan Syariah" Online Seminar "Strategy to Strengthen HR in the Islamic Financial Services Industry"	26 April 2022 April 26, 2022	OJK
		3. *Training Omega Credit Skills Accreditations Workshop*	5–9 Desember 2022 December 5–9, 2022	*Financial Accounting for Lenders & Commercial Loan to Business*
3.	Rully Setiawan	1. Seminar *Online* "Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan" Online Seminar "Momentum for the Recovery of the Financing Industry"	1 Maret 2022 March 1, 2022	APPI
		2. *Refreshment General Banking Level* III Refreshment of General Banking Level III	30 Maret 2022 March 30, 2022	LPPI
		3. Seminar *Online* "Strategi dan Inovasi dalam Memperkuat *Branding* Produk Keuangan Syariah" Online Seminar "Strategy and Innovation in Strengthening Islamic Financial Product Branding"	7 April 2022 April 7, 2022	OJK
		4. *Understanding & Implementing* ISO 37001:2016 *Anti Bribery Management System* (SMAP) Understanding & Implementing ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System (SMAP)	6–7 Juli 2022 July 6–7, 2022	Mutu Institute

No.	Nama Name	*Workshop/Training/Seminar*	Tanggal Date	Penyelenggara - Tempat Organizer - Venue
		5. Seminar *Online* "Peluang dan Tantangan Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)" Online Seminar "Opportunities and Challenges of the Financial Services Industry in Supporting the Financing of Battery-Based Electric Motorized Vehicles (KBLBB)"	17 November 2022 November 17, 2022	OJK
		6. *Training Omega Credit Skills Accreditations Workshop*	5-9 Desember 2022 December 5-9, 2022	*Financial Accounting for Lenders & Commercial Loan to Business*

PENILAIAN KINERJA ORGAN DAN KOMITE PENDUKUNG TATA KELOLA DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan, Direksi didukung oleh beberapa komite dan organ pendukung. Berikut disampaikan penilaian kinerja terhadap komite dan organ pendukung tersebut. Direksi melakukan penilaian terhadap masing-masing komite pendukung melalui penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukan. Di sepanjang tahun 2022 seluruh komite pendukung Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik khususnya dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk mengambil keputusan terkait hal-hal strategis.

1. Penilaian Kinerja Komite Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Pembiayaan Konvensional dan Komite Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah
   Penilaian Kinerja Komite Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Pembiayaan Konvensional dan Komite Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah. Penilaian tersebut berdasarkan pada program *marketing* yang telah diluncurkan dan terdiri dari:

   a. *Holistic Premium CAR Experience*
      Merupakan program *marketing* yang memberikan layanan kepada *segment* debitur premium, dimana selain menyediakan pembiayaan untuk pembelian unit kendaraan premium, debitur akan mendapatkan kecepatan dan bentuk layanan kelas 1.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF GOVERNANCE SUPPORTING ORGANS AND COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

In carrying out the Company's management functions, the Board of Directors is supported by several committees and supporting organs. The following is a performance appraisal of the committees and supporting organs. The Board of Directors evaluates each supporting committee by completing the tasks and responsibilities that have been carried out. Throughout 2022 all supporting committees for the Board of Directors have carried out their duties and responsibilities properly, especially in providing recommendations to the Board of Directors to make decisions regarding strategic matters.

1. Performance Assessment of the Conventional Financing Product & Business Activity Development Committee and the Sharia Financing Product & Business Activity Development Committee
   Performance Assessment of the Committee for Products & Development of Conventional Financing Business Activities and the Committee for Products & Development of Sharia Financing Business Activities. The assessment is based on the marketing program that has been launched and consists of:
   a. Holistic Premium CAR Experience
      It is a marketing program that provides services to the premium debtor segment, where in addition to providing financing for the purchase of premium vehicle units, debtors will get class 1 speed and form of service.

b. MUF *First*
Program yang dibuat khusus untuk Debitur Perusahaan di semua portofolio. Debitur Perusahaan tersebut akan mendapatkan fasilitas khusus saat melakukan transaksi *Repeat Order* (RO)/*Additional Order* (AO).

c. MUF Apresiasi Nakes
Perusahaan membuat dan memasarkan "Program Apresiasi Khusus Tenaga Kesehatan (Nakes)", dimana program ini diperuntukkan bagi tenaga kesehatan atau pegawai yang bekerja di sektor kesehatan.

d. *Captive* Syariah bekerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) dalam menyediakan program pembiayaan unit kendaraan berbasis Syariah.

e. Produk Digital
- MUF *Online Autoshow* (MOAS) adalah program *digital marketing* untuk produk Pembiayaan Konvensional.
- BSI OTO adalah Program digital marketing yang dikembangkan untuk mendukung layanan produk pembiayaan Syariah.

2. Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko secara reguler melakukan pemantauan dan penilaian terhadap tingkat risiko Perusahaan dan dilakukan pembahasan dengan Komite Pemantau Risiko dan Bank Mandiri setiap 3 bulan dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi. Secara keseluruhan hasil pelaksanaan penilaian risiko disampaikan dalam rapat gabungan sebagai bagian dari penilaian kinerja perusahaan.

3. Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan
Mengatur dan melaksanakan rapat Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan komite-komite di bawah Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Hasil pelaksanaan rapat didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat dan telah ditandatangani lengkap untuk ditindaklanjuti pada rapat berikutnya sesuai dengan hasil rapat. Apabila hasil pelaksanaan rapat bersifat keputusan, maka keputusan telah dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan POJK yang berlaku.

b. MUF First
Programs made specifically for the Company's Debtors in all portfolios. The Company's debtors will receive special facilities when conducting Repeat Order (RO)/Additional Order (AO) transactions.

c. MUF Appreciates Health Workers
The Company creates and markets the "Special Appreciation Program for Health Workers (Nakes)", where this program is intended for health workers or employees who work in the health sector.

d. Captive Syariah cooperates with PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) in providing Sharia-based vehicle unit financing programs.

e. Digital Products
- MUF Online Autoshow (MOAS) is a digital marketing program for Conventional Financing products.
- BSI OTO is a digital marketing program developed to support Sharia financing product services.

2. Performance Assessment of the Risk Management Committee
The Risk Management Committee regularly monitors and evaluates the risk level of the Company and holds discussions with the Risk Monitoring Committee and Bank Mandiri every 3 months in the context of implementing integrated risk management. Overall the results of the implementation of the risk assessment are presented in a joint meeting as part of the Company's performance assessment.

3. Performance Assessment of Corporate Secretary
Organize and carry out meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and committees under the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board in accordance with OJK Regulation No. 29/ POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation No. 30/ POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies. The results of the meeting are documented in the form of minutes of meetings and have been signed in full to be followed up at the next meeting in accordance with the results of the meeting. If the meeting result is in the form of a decision, then the decision has been made in writing in accordance with the applicable POJK provisions.

4. Penilaian Kinerja Audit Internal
   Di sepanjang tahun 2022 Audit Internal telah merealisasikan pemeriksaan audit dengan realisasi sebanyak 70 penugasan audit berbanding target sebanyak 66 penugasan audit.

5. Penilaian Kinerja Kepatuhan Penilaian Kinerja Satuan Kerja APU dan PPT

   KEPATUHAN
   Di sepanjang tahun 2022 Unit Kerja Kepatuhan telah melakukan *monitoring* dan tindak lanjut atas pemenuhan kewajiban Perusahaan terhadap Regulator baik dalam bentuk laporan maupun perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   APU dan PPT
   Unit kerja APU dan PPT telah menerapkan program anti pencucian dan pendanaan terorisme dalam bentuk *monitoring* dan analisis transaksi dan penyampaian pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Penilaian Kinerja Satuan Kerja Literasi & Inklusi Keuangan

   Satuan kerja literasi dan inklusi keuangan telah melakukan literasi dalam bentuk pemberian informasi kepada masyarakat umum mengenai jenis dan layanan jasa keuangan perusahaan melalui media yang dimiliki oleh Perusahaan. Dalam hal inklusi keuangan telah melakukan pengembangan jaringan pemasaran dalam bentuk pengembangan jaringan kantor perusahaan maupun rekanan perusahaan (*marketing channel, payment channel,* dan *digital marketing*).

4. Internal Audit Performance Assessment
   Throughout 2022 Internal Audit has carried out audit audits with the realization of 70 audit assignments compared to the target of 66 audit assignments.

5. Compliance Performance Assessment APU and PPT Work Unit Performance Assessment

   COMPLIANCE
   Throughout 2022 the Compliance Work Unit has monitored and followed up on the fulfillment of the Company's obligations to Regulators both in the form of reports and permits in accordance with applicable regulations.

   APU and PPT
   The APU and PPT work unit has implemented an anti-terrorism financing and laundering program in the form of monitoring and analyzing transactions and submitting reports of suspicious financial transactions and cash financial transactions to regulators in accordance with applicable regulations.

6. Performance Assessment of Financial Literacy & Inclusion Unit
   The financial literacy and inclusion work unit has carried out literacy in the form of providing information to the general public regarding the types and services of the Company's financial services through the media owned by the Company. In terms of financial inclusion, it has developed a marketing network in the form of developing a network of Company offices and Company partners (marketing channels, payment channels, and digital marketing).

INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

INDEPENDENCE AND INFORMATION TRANSPARENCY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan harus bersifat independen dan terbebas dari berbagai kepentingan. Berikut pengungkapan independensi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.
In carrying out their duties and responsibilities, the Company's Board of Commissioners and Directors must be independent and free from various interests. The following is a disclosure of the independence of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan di perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga.

Perusahaan tidak memiliki kebijakan terkait program kepemilikan saham bagi manajemen, dengan demikian tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perusahaan.

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS SHAREHOLDING

Shareholding of Board of Commissioners and Directors members of the Company and in other companies is always disclosed periodically through a register of shareholding of members of the Board of Commissioners and Directors. All members of the Board of Commissioners and Board of Directors are required to submit disclosure of securities buying and selling transactions.

The Company does not have a policy related to the shareholding program for management, thus there are no Board of Commissioners and Directors who own the Company's shares.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Kepemilikan Saham** Shareholding	
		MUF	**Perusahaan Lain** Other Companies
Ignatius Susatyo Wijoyo	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Erida	Komisaris Commissioner	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Mansyur S. Nasution	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Stanley S. Atmadja	Direktur Utama President Director	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Rita Mustika	Direktur Director	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Rully Setiawan	Direktur Director	Tidak Ada None	Tidak Ada None

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali Pemegang saham utama/pengendali dari Perusahaan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan kepemilikan sebesar 51%.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Berikut disampaikan pengungkapan hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/pengendali Perusahaan, serta Negara Republik Indonesia selaku entitas pemilik akhir/pengendali Perusahaan.

Hubungan afiliasi yang muncul pada Dewan Komisaris dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Utama/Pengendali adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Ignatius Susatyo Wijoyo memiliki rangkap jabatan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai *Executive Vice President – Consumer Loans Group.*

DISCLOSURE OF AFFILIATED RELATIONS AMONG DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Information of Major/Controlling Shareholder of the Company is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with 51% ownership.

Disclosure of affiliation among Board of Directors, Board of Commissioners and Major/Controlling Shareholders Controlling Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors respect each other in carrying out their respective duties, responsibilities and authorities in accordance with laws and regulations and the Articles of Association. The following is a disclosure of affiliation among Board of Commissioners, Board of Directors, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the main/controlling shareholder of the Company, and the Republic of Indonesia as the ultimate owner/controlling entity of the Company.

The affiliation relationship that appears on the Board of Commissioners with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Major/Controlling Shareholder is as follows: President Commissioner Ignatius Susatyo Wijoyo has concurrent positions at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Executive Vice President - Consumer Loans Group.

Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi

Financial and Family Relations of Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	**Hubungan Keuangan Dengan** Financial Relations With						**Hubungan Keluarga Dengan** Family Relations With					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Major/ Controlling Shareholders		**Dewan Komisaris** Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Major/ Controlling Shareholders	
	Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Dewan Komisaris Board of Commissioners												
Ignatius Susatyo Wijoyo		√		√		√		√		√		√
Erida		√		√		√		√		√		√
Mansyur S. Nasution		√		√		√		√		√		√

Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi
Financial and Family Relations of Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/ Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/ Controlling Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Direksi Directors												
Stanley S. Atmadja		√		√		√		√		√		√
Rita Mustika		√		√		√		√		√		√
Rully Setiawan		√		√		√		√		√		√

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pedoman Tata Kelola yang dimiliki Perusahaan mengatur ketentuan tentang rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain, kecuali:
   a. Anggota Dewan Komisaris *non*-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
   b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. Sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
2. Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan lain. Tidak termasuk rangkap jabatan tersebut apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak Perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak Perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.

DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITIONS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The Company's Governance Guidelines regulate provisions regarding concurrent positions of the Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

1. The Board of Commissioners is prohibited from holding Concurrent Positions as a member of the Board of Commissioners in more than 3 (three) other companies, except:
   a. Non-independent members of Board of Commissioners carry out the functional duties of the Company's shareholders in the form of legal entities in its business group; and/or
   b. Members of Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions. As long as the person concerned does not neglect the implementation of duties and responsibilities as a member of the Company's Board of Commissioners.
2. Directors are prohibited from holding concurrent positions as Directors in other companies except as members of Board of Commissioners in a maximum of 3 (three) other companies. This concurrent position is not included if a member of the Board of Directors who is responsible for supervising participation in a subsidiary that has a business in the financing sector, performs functional duties as a member of the Board of Commissioners in a subsidiary controlled by the Company, as long as the concurrent position does not result in the person concerned neglecting the implementation duties and authorities as a member of the Board of Directors of the Company.

Berikut ini informasi yang menunjukan hubungan Kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain atau institusi lain dalam periode tahun 2022:

The following information shows the relationship between the Management of the Board of Commissioners and Directors in other companies or other institutions in the 2022 period:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jabatan Pada Perusahaan/ Instansi Lain** Position in Other Companies/ Institutions	**Nama Perusahaan/ Instansi Lain** Name of Company/Other Institution
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Ignatius Susatyo Wijoyo	Komisaris Utama President Commissioner	Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada Vice Chancellor of Gadjah Mada University	Universitas Gadjah Mada (2022–sekarang) Gadjah Mada University (2022–present)
Erida	Komisaris Commissioner	*Director & Chief Financial Officer*	PT Triputra Investindo Arya (2011–sekarang) PT Trikirana Investindo Prima (2011–sekarang) Chief Financial Officer PT Triputra Agro Persada (2012–sekarang) PT Triputra Investindo Arya (2011–present) PT Trikirana Investindo Prima (2011–present) Chief Financial Officer PT Triputra Agro Persada (2012–present)
Mansyur S. Nasution	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada None	
Direksi Board of Directors			
Stanley S. Atmadja	Direktur Utama President Director	*Chairman*	PT Rajawali Greenland Utama (2012–sekarang) PT Rajawali Greenland Utama (2012–present)
		Komisaris Utama President Commissioner	Asco Capital (2019–sekarang) Asco Capital (2019–present)
Rita Mustika	Direktur Director	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Rully Setiawan	Direktur Director	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board			
KH Abdul Ghofarrozin, M.Ed	Ketua DPS Head of members	Dosen Tetap Permanent Lecturer	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Institute for Al-Qur'an Studies (IIQ) Jakarta
H.M. Ziyadulhaq. SQ., S.Hi., S.Ei., MA., Ph.D	Anggota DPS DPS members	Dosen Tetap Permanent Lecturer	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Institute for Al-Qur'an Studies (IIQ) Jakarta

Adanya rangkap jabatan di atas tidak melanggar ketentuan yang ada, baik ketentuan terkait tata kelola perusahaan pembiayaan maupun Pedoman Tata Kelola yang dimiliki Perusahaan.

The existence of the concurrent positions above does not violate existing provisions, both provisions related to the governance of finance companies and the Company's Governance Guidelines.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan upaya untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih objektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perusahaan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan telah memenuhi komposisi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi sesuai dengan kompleksitas kegiatan bisnis Perusahaan dan struktur organisasi sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan Perusahaan.

COMPOSITION DIVERSITY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Policy of Composition Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors

Composition diversity of Board of Commissioners and Board of Directors is an effort to encourage a decision-making process that is more objective, comprehensive, optimal, and has a positive impact on the oversight and management of the Company. This diversity is expected to enrich the perspectives and interests in the decision-making process in both the Board of Commissioners and the Board of Directors, so as to be able to provide added value to the Company's operational and business aspects, as well as the implementation of Corporate Governance.

In accordance with OJK Regulation No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, the Company has complied with the composition of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors in accordance with the complexity of the Company's business activities and organizational structure so as to enable effective, appropriate and fast decision-making in the context of achievement of Company goals.

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (year)	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Experience
1	Ignatius Susatyo Wijoyo	Komisaris Utama President Commissioner	53	Laki-laki Male	Magister (S2) Manajemen Internasional Master (S2) International Management	Berkarir di PT Toyota Astra Motor (1993-1994), PT Astra Sedaya Finance (1995-2005), PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2006-2009), PT Mandiri Tunas Finance (2009-2018) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama, dan berkarir di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2022) dengan jabatan sebagai *Executive Vice President-Consumer Loans Group*, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (2022-sekarang). Career at PT Toyota Astra Motor (1993-1994), PT Astra Sedaya Finance (1995-2005), PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2006- 2009), PT Mandiri Tunas Finance (2009-2018) with the last position as President Director, and a career at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2022) with the position of Executive Vice President- Consumer Loans Group, Vice Deputy Chancellor of Gadjah Mada University (2022-present).

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (year)	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Experience
2	Erida	Komisaris Independen Independent Commissioner	56	Perempuan Female	Sarjana (S1) Akuntansi Bachelor (S1) Accounting	Berkarir di PT Sarana Perdana Engineering & Group Co (1990-2001), PT Jaya Real Property Tbk (1995-2001), PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2001-2011), *Director & Chief Financial Officer* PT Triputra Lnvestindo Arya (2011-2012), dan *Director & Chief Financial Officer* PT Triputra Agro Persada (2012-sekarang). Career at PT Sarana Perdana Engineering & Group Co (1990-2001), PT Jaya Real Property Tbk (1995-2001), PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2001-2011), Director & Chief Financial Officer of PT Triputra Investmentindo Arya (2011- 2012), and Director & Chief Financial Officer of PT Triputra Agro Persada (2012-present).
3	Mansyur S. Nasution	Komisaris Commissioner	64	Laki-laki Male	*Master* (S2) *Resources Economics*	Berkarir di PT Bank Bumi Daya (Persero) sejak tahun 1983, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2012), kemudian diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2012-2017 Career at PT Bank Bumi Daya (Persero) since 1983, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2012), then appointed as Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2012-2017)
4	KH Abdul Ghofarrozin, M. Ed	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of Sharia Supervisory Board	46	Laki-laki Male	*Master (S2) Of Education (Leadership Policy and Change)*	
5	H.M. Ziyadulhaq, SQ., S.Hi., S.Ei., MA., Ph.D	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	45	Laki-laki Male	*Phd Program, Quran and Sunnah Studies*	Berkarir di Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (2012), Komisaris PT Tarbia Insan Qurania (TIQ) Jakarta (2013) dan Kepala Program Study (Kaprodi) Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (2016-2018) Career at the Faculty of Sharia, Institute for Al-Qur'an Studies (IIQ) Jakarta (IIQ) Jakarta (2012), Commissioner of PT Tarbia Insan Qurania (TIQ) Jakarta (2013) and Head of the Islamic Economics Law Study Program, Faculty of Sharia, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta (2016 -2018)

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (year)	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Experience
6	Stanley S. Atmadja	Direktur Utama President Director	66	Laki-laki Male	*Master* (S2) *Of Business Administration*	Berkarir Di Citibank, NA (1984-1987), PT Citicorp Leasing Indonesia (1988-1990), dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (1991-2012) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama Career At Citibank, NA (1984-1987), PT Citicorp Leasing Indonesia (1988-1990), and PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (1991-2012) with last position as President Director
7	Rita Mustika	Direktur Director	52	Perempuan Female	*Master* (S2) *Of Business Administration*	Berkarir di PT Astra International Tbk (1998-2011), PT Central Sentosa Finance (2011-2015) dengan jabatan terakhir sebagai *Operation Board of Management*. Pada tahun 2015 bergabung di MUF di tahun 2019 diangkat sebagai Direktur. Career at PT Astra International Tbk (1998-2011), PT Central Sentosa Finance (2011-2015) with last position as Operation Board of Management. In 2015 he joined MUF and in 2019 he was appointed as Director.
8	Rully Setiawan	Direktur Director	45	Laki-laki Male	Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi Bachelor (S1) Accounting Economics	Berkarier di lingkup PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak tahun 2001 dengan jabatan terakhir sebagai *Group Head Corporate Secretary* (*Senior Vice President*), dan di MUF sebagai *Finance & Business Relationship*, *Senior Executive Vice President* (SEVP) pada tahun 2020. Career within PT Bank Mandiri (Persero) Tbk since 2001 with last position as Group Head Corporate Secretary (Senior Vice President), and at MUF as Finance & Business Relationship, Senior Executive Vice President (SEVP) in 2020.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

MEETINGS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.

Di tahun 2022, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 15 (lima belas) kali. Berikut disampaikan agenda, dan rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Based on the Board of Commissioners' Work Guidelines and OJK Regulation No. 29/POJK.05/2020, the Board of Commissioners must hold a meeting of the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 3 (three) months. Members of the Company's Board of Commissioners must attend at least 75% of the Board of Commissioners' meetings in a 1 (one) year period. The results of the Board of Commissioners' meeting must be recorded in the minutes of the Board of Commissioners' meeting and properly documented.

Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Commissioners meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Commissioners meeting along with the reasons for the difference of opinion. Members of the Company's Board of Commissioners who are present or not present at the meeting of the Board of Commissioners are entitled to receive a copy of the minutes of the meeting of the Board of Commissioners.

In 2022, the Board of Commissioners held 15 (fifteen) Board of Commissioners meetings. The following is the agenda, and recapitulation of the level of attendance of the Board of Commissioners at these meetings.

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Kehadiran Presence		
				Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Mansyur S. Nasution
1	13 Januari 2022 January 13, 2022	Pelaporan Ketua Komite Audit 1. *Score Audit Rating* Cabang Tahun 2022. 2. Rencana Audit Tahun 2022. 3. Pemilihan AP/KAP Tahun Buku 2022. 4. *Audit Issues Closing Meeting Audit Year Ended* 31 Desember 2022.	Reporting of Chairman of the Audit Committee 1. 2022 Branch Rating Audit Score. 2. 2022 Audit Plan. 3. Selection of AP/KAP for the 2022 Fiscal Year. 4. Audit Issues Closing Meeting Audit Year Ended December 31, 2022.	√	√	√
2	10 Februari 2022 February 10, 2022	Pelaporan Ketua Komite Pemantau Risiko 1. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Periode Tahun Buku 2021 kepada OJK. 2. *Performance Quality Review* (PQR). 3. Realisasi Restrukturisasi COVID-19. 4. Perbandingan Perusahaan dengan industri dan kompetitor terdekat yaitu ADMF. 5. Tindak lanjut arahan Komite Pemantau Risiko pada rapat tanggal 13 Januari 2022.	Reporting from the Chairman of Risk Monitoring Committee 1. Assessment of the Company's Health Level for the 2021 Fiscal Year Period to the OJK. 2. Performance Quality Review (PQR). 3. Realization of COVID-19 Restructuring. 4. Comparison of the Company with the closest industry and competitor, namely ADMF. 5. Follow up on the direction of the Risk Monitoring Committee at the meeting on January 13, 2022.	√	√	√

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Kehadiran Presence		
				Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Mansyur S. Nasution
3	17 Februari 2022 February 17, 2022	Pelaporan Ketua Komite Audit 1. Usulan KAP dan AP Tahun Buku Perusahaan yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. 2. Rencana Uji Petik Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun Buku 2022.	Reporting of Chairman of the Audit Committee 1. Proposal from KAP and AP for the Company's Fiscal Year ending December 31, 2022. 2. Plan for the 2022 Sharia Supervisory Board (DPS) Pick Test.	√	√	√
4	24 Maret 2022 March 24, 2022	Pelaporan Ketua Komite Pemantau Risiko 1. Laporan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Reporting of Chairman of Risk Monitoring Committee 1. 2021 Corporate Governance Report to Financial Services Authority (OJK)	√	√	√
5	21 April 2022 April 21, 2022	Pelaporan Ketua Komite Audit 1. *Update* dan tindak lanjut laporan hasil internal audit MUF Q1 2022 (Konvensional dan Syariah) 2. *Update* dan tindak lanjut laporan audit KAP dan AP tahun buku 2021 3. Realisasi kunjungan Dewan Komisaris Q1- 2022	Reporting of the Chairman of Audit Committee 1. Update and follow up on the MUF Q1 2022 internal audit report (Conventional and Sharia) 2. Update and follow-up on KAP and AP audit reports for the 2021 fiscal year 3. Realization of the visit of the Board of Commissioners Q1- 2022	√	√	√
6	25 April 2022 April 25, 2022	Pelaporan Ketua Komite Pemantau Risiko 1. *Update* Laporan Penilaian Tingkat Risiko/Laporan Profil Risiko Q1 2022 (Portofolio *Performance*, Restrukturisasi COVID-19) 2. *Update* Penerapan Program APU - PPT Q1 - 2022 3. Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Oktober - Desember 2021.	Reporting from the Chairman of Risk Monitoring Committee 1. Update on Risk Level Assessment Report/Risk Profile Report Q1 2022 (Portfolio Performance, COVID-19 Restructuring) 2. Update on the Implementation of the AML Program - PPT Q1 - 2022 3. Service Report and Settlement of Consumer Complaints October - December 2021.	√	√	√
7	27 Juni 2022 June 27, 2022	Pelaporan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Reporting from the Chair of the Nomination and Remuneration Committee	√	√	√
8	12 Juli 2022 July 12, 2022	Pelaporan Ketua Komite Audit 1. *Sharing Session* atas kinerja *audit scoring* wilayah pada Juni 2022. 2. *Update* dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BMRI Semester 1 Tahun 2022.	Reporting of the Chairman of Audit Committee 1. Sharing Session on regional audit scoring performance in June 2022. 2. Update and Follow-Up of the BMRI Semester 1 2022 Audit Results Report.	√	√	√

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Kehadiran Presence		
				Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Mansyur S. Nasution
9	18 Juli 2022 July 18, 2022	Pelaporan Ketua Komite Pemantau Risiko 1. *Update* Laporan Penilaian Tingkat Risiko/Laporan Profil Risiko Q2 2022 (Portofolio *Performance*, Restrukturisasi COVID-19). 2. *Analisis Run Off* Q2 2022 3. Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Semester 1 Tahun 2022 4. Usulan Komite Pemantau Risiko Kepada Dewan Komisaris untuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada OJK Semester 1 Tahun 2022: 5. Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan 6. Laporan Manajemen Risiko 7. Laporan Restrukturisasi COVID-19 Semester 1 Tahun 2022 8. Laporan Realisasi RAKB Semester 1 Tahun 2022 9. Laporan Tata Kelola Semester 1 Tahun 2022 10. Laporan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah Semester 1 Tahun 2022 11. Laporan Kegiatan Prinsip Syariah Semester 1 Tahun 2022 12. Laporan Evaluasi Prosedur Operasional Standar Semester 1 Tahun 2022 13. Laporan Praktik Pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Semester 1 Tahun 14. Laporan Penerapan Akuntansi Semester 1 Tahun 2022	Reporting of Chairman of Risk Monitoring Committee 1. Update on Risk Level Assessment Report/Risk Profile Report Q2 2022 (Portfolio Performance, COVID-19 Restructuring). 2. Q2 2022 Run Off Analysis 3. Report on Services and Settlement of Consumer Complaints for Semester 1 of 2022 4. Proposal of the Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners for the Supervisory Report of the Board of Commissioners to OJK Semester 1 of 2022: 5. Financial Literacy and Inclusion Report 6. Risk Management Report 7. Report on the 1st Semester of 2022 COVID-19 Restructuring 8. Realization Report of RAKB Semester 1 of 2022 9. 2022 Semester 1 Governance Report 10. Report on Compliance with Sharia Principles Semester 1 of 2022 11. Report on Sharia Principles Activities for Semester 1 of 2022 12. Evaluation Report on Standard Operating Procedures for Semester 1 of 2022 13. Report on Marketing Practices of Sharia Financing conducted by Financing Companies in Semester 1 Year 14. Report on the Implementation of Accounting for Semester 1 of 2022	√	√	√

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Kehadiran Presence		
				Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Mansyur S. Nasution
10	20 September 2022 September 20, 2022	Pelaporan Ketua Komite Audit 1. Laporan Realisasi Audit Cabang Konvensional dan Syariah Agustus 2022 2. *Update progress* Audit Bank Mandiri atau Audit BMRI 3. Rencana Kunjungan Dewan Komisaris pada Cabang Semester 2 Tahun 2022 4. Lain-lain	Reporting of Chairman of Audit Committee 1. August 2022 Conventional and Sharia Branch Audit Realization Report 2. Update on Bank Mandiri Audit progress or BMRI Audit 3. Planned Visit of the Board of Commissioners in Semester 2 of 2022 Branch 4. Etc	√	√	√
11	22 September 2022 September 22, 2022	Pelaporan Ketua Komite Pemantau Risiko 1. *Update* Laporan Penilaian Tingkat Risiko/Laporan Profil Risiko Q3 2022 (Portofolio *Performance*, Restrukturisasi COVID-19). 2. Laporan *Self-Assessment* Pemenuhan Ketentuan Perlindungan Konsumen. 3. *Update* RUPSLB Sirkuler tentang perubahan anggaran dasar Perusahaan	Reporting of Chairman of Risk Monitoring Committee 1. Update of Q3 2022 Risk Level Assessment Report/ Risk Profile Report (Portfolio Performance, COVID-19 Restructuring). 2. Self-Assessment Report on Compliance with Consumer Protection Provisions. 3. Update Circular EGMS regarding changes to the Company's articles of association	√	√	√
12	21 Oktober 2022 October 21, 2022	Pelaporan Ketua Komite Audit 1. Laporan Realisasi Audit Cabang Konvensional dan Syariah September 2022. 2. *Annual Audit Plan* Tahun 2023 3. Rencana Audit Tematik 2023 4. Hasil *Closing* Audit Bank Mandiri atau Audit BMRI	Reporting of the Chairman of Audit Committee 1. Conventional and Sharia Branch Audit Realization Report for September 2022. 2. Annual Audit Plan for 2023 3. Thematic Audit Plan for 2023 4. Bank Mandiri Audit or BMRI Audit Results	√	√	√

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Kehadiran Presence		
				Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Mansyur S. Nasution
13	28 Oktober 2022 October 28, 2022	Pelaporan Ketua Komite Pemantau Risiko 1. *Update* Laporan Penilaian Tingkat Risiko/Laporan Profil Risiko Q3 2022 (Portofolio *Performance*, Restrukturisasi COVID-19). 2. *Update Framework* RAKB Mandiri Group dan Kuesioner Keuangan Berkelanjutan (ESG) dari OJK. 3. Analisis Temuan OJK – Sanksi Administratif Denda Pelaporan SLIK Periode Februari 2022. 4. *Update* Hasil Kuesioner Pemenuhan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. 5. Laporan Pelayananan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan IV kepada OJK 6. Laporan Pengguna Jasa Terpadu Produk Jasa Lembaga Keuangan Triwulan IV kepada PPATK. 7. Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi Triwulan IV kepada BMRI.	Reporting of Chairman of Risk Monitoring Committee 1. Update of Q3 2022 Risk Level Assessment Report/ Risk Profile Report (Portfolio Performance, COVID-19 Restructuring). 2. Update Framework Mandiri Group RAKB and Sustainable Finance Questionnaire (ESG) from OJK. 3. Analysis of OJK Findings – Administrative Sanctions for Fines for Reporting SLIK for the Period of February 2022. 4. Update on the results of the POJK Fulfillment Questionnaire Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector. 5. Quarter IV Consumer Complaint Service and Settlement Report to OJK 6. Report of Integrated Service Users of Financial Institution Service Products Quarter IV to PPATK. 7. Quarter IV Integrated Compliance Implementation Report to BMRI.	√	√	√
14	16 Desember 2022 December 16, 2022	Pelaporan Ketua Komite Audit 1. Laporan Realisasi Audit Cabang Konvensional dan Syariah terhadap audit plan 2022. 2. *Update* Hasil kunjungan Dewan Komisaris ke Cabang Purwokerto termasuk MUF NETnya. 3. *Update* Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Bank Mandiri atau Audit BMRI 2022 4. Lain-lain	Reporting of Chairman of Audit Committee 1. Report on Realization of Conventional and Sharia Branch Audits against the 2022 audit plan. 2. Update on the results of the visit of the Board of Commissioners to the Purwokerto Branch including the MUF NET. 3. Follow-Up Update on Bank Mandiri Audit or BMRI Audit Findings 2022 4. Etc	√	√	√

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Kehadiran Presence		
				Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Mansyur S. Nasution
15	23 Desember 2022 December 23, 2022	Pelaporan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Reporting from the Chair of the Nomination and Remuneration Committee	√	√	√
Jumlah Rapat Total Meetings				15	15	15
Jumlah Kehadiran Total Attendance				15	15	15
Persentase Kehadiran Attendance Percentage				**100%**	**100%**	**100%**

RAPAT DIREKSI

Berdasarkan Pedoman Kerja Direksi dan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020, rapat Direksi diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.

Di sepanjang tahun 2022, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Based on the Board of Directors Work Guidelines and OJK Regulation No. 29/POJK.05/2020, the Board of Directors meetings are held regularly at least 1 (one) time in 1 (one) month. Attend Board of Directors meetings at least 50% of the total number of Board of Directors meetings within 1 (one) year period. The results of the Board of Directors meeting must be stated in the minutes of the Board of Directors meeting and properly documented.

Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Directors meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Directors meeting along with the reasons for the dissenting opinions. Members of the Company's Board of Directors who are present or who are not present at the Board of Directors meeting are entitled to receive a copy of the minutes of the Board of Directors meeting.

Throughout 2022, the Board of Directors held a total of 12 (twelve) meetings. Following is the agenda and minutes of meetings, attendance, and a recapitulation of the level of attendance of the Board of Directors at these meetings.

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Kehadiran Attendance		
				Stanley S. Atmadja	Rita Mustika	Rully Setiawan
1.	09 Januari 2022 January 9, 2022	1. *Summary* Kinerja Desember 2021 2. Tren Kinerja Desember 2021 3. Portofolio Restrukturisasi	1. Performance Summary in December 2021 2. Performance Trends in December 2021 3. Portfolio Restructuring	√	√	√
2	09 Februari 2022 February 9, 2022	1. *Summary* Kinerja Januari 2022 2. Tren Kinerja Januari 2022 3. Nilai Pembiayaan YTD Januari 2022 4. Portofolio Restrukturisasi	1. Performance Summary in January 2022 2. Performance Trends in January 2022 3. Financing Value in January 2022 YTD 4. Restructuring Portfolio	√	√	√
3	23 Maret 2022 March 23, 2022	1. *Market performance* 28 Februari 2022 2. MUF Millennial	1. Market performance in February 28, 2022 2. MUF Millennial	√	√	√
4	13 April 2022 April 13, 2022	1. *Financial Performance* MUF as of 31 Maret 2022 dan prognosa 3 bulan ke depan 2. *Quality Performance* MUF as of 31 Maret 2022 dan prognosa 3 bulan ke depan	1. MUF Financial Performance as of March 31, 2022 and forecast for the next 3 months 2. MUF Quality Performance as of March 31, 2022 and forecast for the next 3 months	√	√	√
5	11 Mei 2022 May 11, 2022	1. *Job Grading Career* MUF 2. *Startup Power Cred* 3. Gemba HO 4. *Market & Sales Performance* MUF *as of* 30 April 2022 dan prognosa 3 bulan ke depan 5. *Update* MOAS dan BSI OTO 6. *Update Project* MUF *Millennial* dan usulan peningkatan *Branding* Perusahaan 7. *Update Calendar of Marketing* MUF 2022 (Nasional & Wilayah) termasuk target & realisasinya 8. *Update Quality Performance* MUF *as of* 30 April 2022 dan prognosa 3 bulan ke depan 9. *Update Financial Performance* MUF *as of* 30 April 2022 dan prognosa 3 bulan ke depan	1. Job Grading Career MUF 2. Startup Power Cred 3. Gemba HO 4. MUF Market & Sales Performance as of April 30, 2022 and forecast for the next 3 months 5. Update MOAS and BSI OTO 6. Update on the MUF Millennial Project and proposals to increase the Company's Branding 7. Update the 2022 MUF Marketing Calendar (National & Regional) including targets & their realization 8. MUF Quality Performance Update as of April 30, 2022 and forecast for the next 3 months 9. MUF Financial Performance Update as of April 30, 2022 and forecast for the next 3 months	√	√	√

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Kehadiran Attendance		
				Stanley S. Atmadja	Rita Mustika	Rully Setiawan
6	13 Juni 2022 June 13, 2022	1. *Quality Performance* MUF *as of* 31 Mei 2022 dan prognosa 3 bulan ke depan 2. *Summary* Kinerja Mei 2022 3. *Performance Used Motorcycle* (UMCY) 4. *Performance* NDF YTD Mei 2022	1. MUF Quality Performance as of May 31, 2022 and forecast for the next 3 months 2. Performance Summary in May 2022 3. Performance Used Motorcycle (UMCY) 4. Performance NDF as of YTD May 2022	√	√	√
7	11 Juli 2022 July 11, 2022	1. *Summary* Kinerja Juni 2022 2. Tren Kinerja Juni 2022 3. Nilai Pembiayaan YTD Juni 2022 4. Portofolio Restrukturisasi	1. Performance Summary in June 2022 2. Performance Trends in June 2022 3. Financing Value in June 2022 YTD 4. Restructuring Portfolio	√	√	√
8	15 Agustus 2022 August 15, 2022	1. *Update Performance* MUF *as of* 31 Juli 2022 dan prognosa 3 bulan ke depan 2. Rencana Trip *Kick Off* 2023	1. MUF Performance Update as of July 31, 2022 and forecast for the next 3 months 2. Kick Off Trip Plan in 2023	√	√	√
9	12 September 2022 September 12, 2022	1. *Summary* Kinerja Agustus 2022 2. Portofolio *performance* Perusahaan Agustus 2022 3. Tren Kinerja Agustus 2022 4. *Booking vs Rundown* 5. Portofolio Restrukturisasi	1. Performance Summary in August 2022 2. Company performance portfolio in August 2022 3. Performance Trends in August 2022 4. Booking vs Rundown 5. Portfolio Restructuring	√	√	√
10	05 Oktober 2022 October 5, 2022	1. *Strategic plan series* 2023 2. RKAP 2023 dan proyeksi keuangan sampai dengan 2026 3. Tren dan proyeksi NCL 4. *Update Booking* baru dan Baki Debet pembiayaan 5. *Update timeline* penyusunan RBT dan RAKB 2023 6. *Update* CGPI	1. Strategic plan series 2023 2. RKAP 2023 and financial projections up to 2026 3. NCL trends and projections 4. Update new bookings and financing debit balances 5. Update the timeline for preparing the 2023 RBT and RAKB 6. Update CGPI	√	√	√

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Kehadiran Attendance		
				Stanley S. Atmadja	Rita Mustika	Rully Setiawan
11	07 November 2022 November 7, 2022	1. *Update* RKAP MUF 2023 2. Persiapan Materi *Board Forum* Q3 2022 3. *Update Summary* Kinerja Q3- 2022 4. *Update* strategi semester 2 Tahun 2022 5. *Update* RKAP 2023 6. Strategi 2023 7. *Update* Rencana *Kick Off Meeting* 2023 8. *Awarding* 9. Persiapan Tutup Tahun 2022 10. Program Asik	1. Update on the 2023 MUF RKAP 2. Preparation of Q3 2022 Board Forum Materials 3. Updated Q3-2022 Performance Summary 4. Strategy update for semester 2 of 2022 5. Update on the 2023 RKAP 6. Strategy 2023 7. Update on the 2023 Kick Off Meeting Plan 8. Awards 9. Preparations to close 2022 10. Asik Program	√	√	√
12	05 Desember 2022 December 5, 2022	1. *Sales Performance* bulan Januari sampai dengan November 2022 versus target prognosa Desember 2022 2. Penyerahan trofi Pemenang MTQ porseni BMRI 2022 3. Portofolio BMRI 4. *Update* rencana teknis pelaksanaan *Kick Off Meeting* 2023	1. Sales Performance from January to November 2022 versus the December 2022 forecast target 2. Submission of the MTQ Porseni 2022 Winner trophy 3. BMRI Portfolio 4. Update on the technical plan for implementing the 2023 Kick Off Meeting	√	√	√
Jumlah Rapat Total Meetings				12	12	12
Jumlah Kehadiran Total Attendances				12	12	12
Persentase Kehadiran Attendance Percentage				**100%**	**100%**	**100%**

RAPAT GABUNGAN

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi merupakan rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi. Rapat Gabungan ini dilakukan setidaknya 3 (tiga) bulan sekali.

Di tahun 2022, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali. Berikut disampaikan agenda dan rekapitulasi kehadiran rapat gabungan.

JOINT MEETING

Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors is a meeting of Board of Commissioners which invites the Board of Directors. The Joint Meeting is held at least once every 3 (three) months.

In 2022, joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors were held 11 (eleven) times. The following is the agenda and recapitulation of joint meeting attendance.

Agenda Rapat
Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1	17 Februari 2022 February 17, 2022	1. *Performance* kinerja bulan Januari 2022. 2. *Board Forum* Bank Mandiri Group Q4-2021. 3. Agenda RUPST Tahun Buku 2021.	1. Performance in January 2022. 2. Board Forum Bank Mandiri Group Q4-2021. 3. AGMS Agenda for Fiscal Year 2021.
2	25 Maret 2022 March 25, 2022	1. *Performance* Perusahaan Kinerja bulan Februari 2022. 2. *Update* RUPST Tahun Buku 2021.	1. Company Performance in February 2022. 2. Update on 2021 AGMS.
3	22 April 2022 April 22, 2022	1. *Performance* kinerja Perusahaan bulan Maret 2022. 2. *Update* Tindak Lanjut Hasil RUPST Tahun Buku 2021.	1. Company Performance in March 2022. 2. Update on the Follow-Up of the Results of the 2021 AGMS.
4	13 Mei 2022 May 13, 2022	1. *Performance* kinerja Perusahaan bulan April 2022. 2. *Update* Bahan *Board Forum* (BF) MUF periode Q1-2022	1. Company Performance in April 2022. 2. Update on MUF Board Forum (BF) materials for the Q1-2022 period
5	27 Juni 2022 June 27, 2022	1. *Performance* kinerja Perusahaan bulan Mei 2022. 2. *Update* perubahan rencana bisnis tahunan (RBT) Perusahaan 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3. *Update* RUPST Sirkuler Perusahaan Tahun Buku 2021. 4. *Update* POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.	1. Company Performance in May 2022. 2. Update on changes to the Company's 2022 annual business plan (RBT) to Financial Services Authority (OJK). 3. Update on the Company's Circular AGMS for the 2021 Fiscal Year. 4. Update POJK No. 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.
6	22 Juli 2022 July 22, 2022	1. *Performance* kinerja Perusahaan bulan Juni 2022. 2. *Update* Rencana RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.	1. Company Performance in June 2022. 2. Update on EGMS Plan for Amending the Company's Articles of Association.
7	16 Agustus 2022 August 16, 2022	1. Laporan *Performance* Kinerja Perusahaan bulan Juli 2022 termasuk *Performance* Kinerja Syariah bulan Juli 2022. 2. *Update* Bahan *Board Forum* (BF) Q2 2022. 3. *Update* RUPSLB Sirkuler tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.	1. Company Performance Report in July 2022 including Sharia Performance in July 2022. 2. Board Forum Material Update (BF) Q2 2022. 3. Update Circular EGMS on Amendments to Company's Articles of Association.
8	23 September 2022 September 23, 2022	1. Laporan *Performance* Kinerja Perusahaan bulan Juli 2022 termasuk *Performance* Kinerja Syariah bulan Agustus 2022. 2. *Update* RUPSLB Sirkuler tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. 3. Usulan Rencana Agenda RUPST 2023 termasuk agenda khusus yaitu pembagian Dividen Perusahaan dan Pengangkatan Kembali Pak Mansyur selaku Komisaris Independen.	1. Company Performance Report in July 2022 including Sharia Performance in August 2022. 2. Update Circular EGMS on Amendments to the Company's Articles of Association. 3. The proposed agenda for the 2023 AGMS includes a special agenda, namely the distribution of Company dividends and the reappointment of Mr. Mansyur as Independent Commissioner.

Agenda Rapat
Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda
9	28 Oktober 2022 October 28, 2022	1. Laporan *Performance* Kinerja Perusahaan bulan September 2022 termasuk *Performance* Kinerja Syariah bulan September 2022. 2. *Update* RKAP MUF Tahun 2023. 3. *Update* KPI *Corporate* MUF 2022 dari BMRI.	1. Company Performance Report in September 2022 including Sharia Performance in September 2022. 2. Update on the 2023 MUF RKAP. 3. Update on Corporate MUF KPI 2022 from BMRI.
10	17 November 2022 November 17, 2022	1. Laporan *Performance* Kinerja Perusahaan bulan September 2022 termasuk *Performance* Kinerja Syariah bulan Oktober 2022. 2. *Update Board Forum* Q3 Tahun 2022.	1. Company Performance Report in September 2022 including Sharia Performance in October 2022. 2. Update Board Forum Q3 2022.
11	23 Desember 2022 December 23, 2022	1. Laporan *Performance* Kinerja Perusahaan bulan November 2022 termasuk Syariah. 2. Lain-lain.	1. Company Performance Report in November 2022 including Sharia. 2. Others.

Kehadiran Rapat
Meeting Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Presence
Ignatius Susatyo Wijoyo	Komisaris Utama President Commissioner	11	11	100%
Erida	Komisaris Commissioner	11	11	100%
Mansyur S. Nasution	Komisaris Independen Independent Commissioner	11	11	100%
Stanley S. Atmadja	Direktur Utama President Director	11	11	100%
Rita Mustika	Direktur Director	11	11	100%
Rully Setiawan	Direktur Director	11	11	100%

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dievaluasi secara berkala oleh pemegang saham, sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pemegang saham dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang memiliki kinerja yang tidak sesuai dengan yang diharapkan melalui mekanisme RUPS.

The performance of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is evaluated regularly by the shareholders, according to predetermined performance indicators. Shareholders can dismiss members of the Board of Commissioners or Directors who have performance that is not as expected through the GMS mechanism.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris didasarkan pada indikator penilaian yang dirumuskan oleh pemegang saham. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku entitas induk sekaligus Pemegang Saham Pengendali dengan sepengetahuan pemegang saham lainnya, di mana salah satu indikator penilaian adalah pemenuhan laporan pengawasan kepada regulator. Dalam proses penilaian, Komite Nominasi dan Remunerasi berperan dalam menyusun realisasi atas indikator penilaian yang telah dirumuskan oleh pemegang saham.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS

The performance assessment of Board of Commissioners is based on the assessment indicators formulated by the shareholders. The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the parent entity as well as the Controlling Shareholder with the knowledge of other shareholders, where one of the indicators for the assessment is the fulfillment of supervisory reports to regulators. In the appraisal process, the Remuneration and Nomination Committee plays a role in compiling the realization of the assessment indicators that have been formulated by the shareholders.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada indikator penilaian yang dirumuskan oleh pemegang saham. Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui rapat rutin triwulanan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku entitas induk sekaligus Pemegang Saham Pengendali dengan sepengetahuan pemegang saham lainnya. Penilaian kinerja di akhir tahun dilakukan berdasarkan kontrak manajemen yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses penilaian, Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai organ Dewan Komisaris berperan dalam memantau realisasi atas indikator penilaian tersebut.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors' performance appraisal is based on assessment indicators formulated by the shareholders. Assessment of the performance of the Board of Directors is carried out through regular quarterly meetings with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the parent entity as well as the Controlling Shareholder with the knowledge of other shareholders. Performance appraisal at the end of the year is carried out based on the management contract that has been done previously. In the assessment process, the Remuneration and Nomination Committee as an organ of the Board of Commissioners plays a role in monitoring the realization of the assessment indicators.

KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERATION AND NOMINATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Pengangkatan dan pemberhentian serta penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan wewenang pemegang saham yang dilakukan melalui mekanisme RUPS.

Appointment and dismissal as well as determining the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is the authority of the shareholders which is carried out through the GMS mechanism.

KEBIJAKAN NOMINASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU DIREKSI

Nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dapat berasal dari internal Perusahaan atau dari pemegang saham serta dari pihak luar selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

PERSYARATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Calon Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
   a. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
   b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu tindak pidana pada lembaga jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   c. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   d. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi; pencucian uang; narkotika/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   e. Tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
   f. Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

NOMINATION POLICY FOR MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR DIRECTORS

Nominations for members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors can come from internal companies or from shareholders as well as from outside parties as long as they meet predetermined requirements.

REQUIREMENTS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Candidates for the Board of Commissioners must meet the following requirements:

1. Integrity, which at least includes:
   a. Proficient in carrying out legal actions;
   b. Never been punished for being proven guilty of committing a crime in the financial services sector, namely a crime against a financial service institution whose sentence has been completed within the last 20 (twenty) years before being nominated;
   c. Never been convicted for committing a crime, namely a crime listed in the Criminal Code (KUHP) and/or a similar Criminal Code abroad with the threat of imprisonment for 1 (one) year or more whose sentence has been completed within the last 10 (ten) years before being nominated;
   d. Never been punished for being proven guilty of committing other criminal acts with the threat of imprisonment for 1 (one) year or more, including corruption; money laundering; narcotics/psychotropics; smuggling; customs; excise; human trafficking; illegal arms trade; terrorism; counterfeiting money; in the field of taxation; in the forestry sector; in the environmental field; in the field of maritime affairs and fisheries whose sentence has been completed within the last 20 (twenty) years prior to nomination;
   e. Never violate the principle of prudence in the financial services sector;
   f. Never violate laws and regulations in the financial services sector;

g. Tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas LJKNB;
h. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;
i. Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada Pemegang Saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak Kreditur, Debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya;
j. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
k. Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
l. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
m. Tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

2. Memenuhi aspek reputasi keuangan, meliputi:
   a. Tidak pernah memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
   b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan Pemegang Saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Bagi calon Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
2. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
3. Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi;
4. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan Debitur, Kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;

g. Never violate commitments that have been agreed with the NBFI supervisory and supervisory agencies;
h. Have a commitment not to commit and/or repeat actions and/or actions that cause the person concerned to be listed in the list of prohibited parties as the Main Party, for candidates who have been listed in the list of prohibited parties as the Main Party;
i. Never commit an act that gives unfair advantage to Shareholders, Main Parties, employees, and/or other parties that can harm or reduce the rights of Creditors, Debtors, policyholders, insured, participants, guarantee recipients, and/or other consumers;
j. Never commit an act that is not in accordance with his authority or outside his authority;
k. Have never been declared unable to exercise their authority; And
l. Not included as a party prohibited from becoming a Main Party;
m. Not currently undergoing the process of fit and proper test at a financial service institution.

2. Fulfilling aspects of financial reputation, including:
   a. Never had bad credit and/or financing; And
   b. Never been declared bankrupt and never been a Controlling Shareholder of an Insurance Company who was not a Shareholder, member of the Board of Directors, or member of the Board of Commissioners, who was found guilty of causing a Company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.

Candidates for the Board of Directors must meet the following requirements:
1. Able to act in good faith, honestly and professionally;
2. Able to act for the benefit of the Company and/or other Stakeholders;
3. Prioritizing the interests of the Company and/or other Stakeholders over personal interests;
4. Able to make decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company and Debtors, Creditors and/or other Stakeholders;

5. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan;
6. Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.

PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Proses nominasi Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh pemegang saham. Komite Nominasi dan Remunerasi berperan dalam melakukan kajian atas proses pencalonan hingga pengusulan calon Dewan Komisaris. Pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Proses nominasi Direksi Perusahaan dilakukan melalui usulan dari Direksi untuk nama-nama calon Direksi. Atas usulan tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian diputuskan oleh Dewan Komisaris. Hasil keputusan pencalonan tersebut menjadi dasar bagi Direksi untuk mengirimkan surat pengajuan kepada pemegang saham. Pengangkatan Direksi ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Setelah RUPS melakukan pengangkatan dan penetapan, Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang baru wajib melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada surat keputusan RUPST oleh Pemegang Saham yang diawali dengan pengajuan usulan remunerasi pengurus oleh Mandiri Utama Finance tahun 2022.

5. Able to prevent abuse of authority to gain improper personal gain or cause harm to the Company;
6. All members of the Company's Board of Directors must have knowledge relevant to their position.

PROPOSAL PROCEDURE UNTIL APPOINTMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The nomination process for the Company's Board of Commissioners is based on the provisions imposed by the shareholders. The Remuneration and Nomination Committee plays a role in reviewing the nomination process and proposing candidates for the Board of Commissioners. The appointment of the Board of Commissioners is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS).

The nomination process for the Company's Board of Directors is carried out through proposals from the Board of Directors for the names of candidates for the Board of Directors. Based on this proposal, the Remuneration and Nomination Committee provides recommendations to the Board of Commissioners to be decided by the Board of Commissioners. The result of the nomination decision becomes the basis for the Board of Directors to send a letter of submission to the shareholders. The appointment of the Board of Directors is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS).

After the GMS has made appointments and appointments, the new Board of Commissioners and/or Board of Directors must carry out a Fit and Proper Test in accordance with OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 dated July 22, 2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions.

PROCEDURES FOR DETERMINING REMUNERATION FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Determination of the remuneration for the Board of Commissioners and Directors refers to the AGMS decision letter by the Shareholders which begins with the submission of a management remuneration proposal by Mandiri Utama Finance in 2022.

PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Mandiri Utama Finance mengajukan usulan penetapan remunerasi pengurus Perusahaan kepada pemegang saham;
2. Usulan penetapan remunerasi dibawa ke dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perusahaan dengan pernyataan: Pemberian Wewenang ke Dewan Komisaris Dengan Persetujuan Pemegang Saham;
3. Penetapan Remunerasi mengacu kepada keputusan Pemegang Saham melalui Surat Keputusan kepada Perusahaan.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari gaji dan tantiem.

PENGUNGKAPAN INDIKATOR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesuai kebijakan remunerasi yang tertuang dalam Pedoman Tata Kelola yang dimiliki Perusahaan, penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi memperhatikan paling sedikit hal-hal di bawah ini:

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Prestasi kerja individual;
3. Kewajaran dengan Perusahaan dan/atau level jabatan yang setara (*peer group*); dan
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

PENETAPAN BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2022

Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2022 ditetapkan oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan.

PROPOSAL PROCEDURE UP TO DETERMINATION OF REMUNERATION FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

1. Mandiri Utama Finance submits a proposal to determine the remuneration of the Company's management to the shareholders;
2. The proposal for determining the remuneration is brought to the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) with a statement: Granting of Authority to the Board of Commissioners With the Approval of the Shareholders;
3. Determination of Remuneration refers to the decision of the Shareholders through a Decree to the Company.

REMUNERATION STRUCTURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The remuneration structure for the Board of Commissioners and Board of Directors consists of salaries and bonuses.

DISCLOSURE OF INDICATORS FOR DETERMINING THE REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the remuneration policy set out in the Company's Corporate Governance Guidelines, the determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors takes into account at least the following matters:

1. Financial performance and fulfillment of the Company's obligations as stipulated in the applicable laws and regulations;
2. Individual work performance;
3. Fairness with the Company and/or equivalent position level (peer group); and
4. Consideration of the Company's long-term goals and strategies.

DETERMINATION OF THE REMUNERATION AMOUNT FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2022

The amount of remuneration for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for 2022 is determined by the shareholders through the Company's Annual General Meeting of Shareholders.

TRANSPARANSI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2022

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan surat keputusan di atas adalah sebagai berikut:

TRANSPARENCY OF REMUNERATION FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN 2022

Information on the nominal amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors based on the above decree is as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Total Remuneration for Board of Commissioners and the Board of Directors for 2022

Dalam juta Rupiah / In million Rupiah

Keterangan Information	2022	2021
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022 Total Remuneration for Board of Commissioners and the Board of Directors for 2022	23.786	26.505

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
SUPPORTING ORGANS OF BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian saran serta rekomendasi, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite organ pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko.

In carrying out supervisory duties and responsibilities, providing advice and recommendations, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) supporting organ committees, namely the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Risk Monitoring Committee.

KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Penetapan pembentukan Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Perusahaan telah menyusun Pedoman Kerja Komite Audit yang menjadi acuan bagi Komite Audit dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman Kerja Komite Audit MUF telah diperbaharui sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Pedoman *Good Corporate Governance*) dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

AUDIT COMMITTEE

The Board of Commissioners has formed an Audit Committee to assist the Board of Commissioners' duties in encouraging the implementation of Good Corporate Governance, establishing an adequate internal control structure, improving the quality of financial disclosure and reporting, and reviewing the scope, accuracy, independence and objectivity of public accountants and compliance with regulations. applicable laws and regulations, in particular the regulations issued by OJK. Determination of the establishment of the Audit Committee is carried out through a Board of Commissioners Decree and chaired by an Independent Commissioner appointed by the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE WORK GUIDELINES

The Company has developed an Audit Committee Work Guideline which is a reference for the Audit Committee in carrying out its functions, duties and responsibilities. The MUF Audit Committee Work Guidelines have been updated according to the Guidelines for Good Corporate Governance for Financing Companies (Guidelines for Good Corporate Governance) and POJK No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.

SUSUNAN KOMITE AUDIT TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Komite Audit, dengan demikian susunan Komite Audit per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE IN 2022

Throughout 2022, there were no changes to the composition and composition of the Audit Committee, thus the composition of the Audit Committee as of December 31, 2022 was as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Mansyur Syamsuri Nasution	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022
Ignatius Susatyo Wijoyo	Anggota/Komisaris Utama Main Member/Commissioner	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022
Erida	Anggota/Komisaris Member/Commissioner	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022
Zakaria Halim	Anggota/*Board of Management* bidang *Corporate President Office* Member/Board of Management in the field of Corporate President Office	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022
Deddy Zulfachrie	Anggota/Kepala Divisi Audit Internal Member/Head of Internal Audit Division	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022
Ary Andana	Anggota/Wakil Kepala Divisi *Corporate Secretary* Member/Deputy Head of Corporate Secretary Division	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022
R. Ine Srikandini	Anggota/Pihak Independen Members/Independent Parties	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

PROFILE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

Nama Name	Mansyur Syamsuri Nasution
Jabatan Position	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022

Profil beliau dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan pada laporan ini.
His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this report.

Nama Name	Ignatius Susatyo Wijoyo
Jabatan Position	Anggota Komite Audit Audit Committee Member
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022

Profil beliau dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan pada laporan ini.
His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this report.

Nama Name	Erida
Jabatan Position	Anggota Komite Audit Audit Committee Member
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022

Profil beliau dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan pada laporan ini.
His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this report.

Nama Name	Zakaria Halim
Jabatan Position	Anggota Komite Audit Audit Committee Member
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022

Profil beliau dapat dilihat di bagian Sekretaris Perusahaan di bab Tata Kelola Perusahaan pada laporan ini.
His profile can be seen in the Corporate Secretary section of the Corporate Governance chapter of this report.

Nama Name	Deddy Zulfachrie
Jabatan Position	Anggota Komite Audit Audit Committee Member
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	56 tahun 56 Years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational background	Sarjana Ekonomi, jurusan/bidang Ekonomi Manajemen, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta Bachelor of Economics, majoring/field of Management Economics, Prof. University. Dr. Moestopo, Jakarta
Riwayat Profesi Professional History	1. 1990 – 1998 Bank Dagang Negara 2. 1998 – sekarang PT Bank Mandiri, Tbk (Penugasan sebagai Audit Division Head di Mandiri Utama Finance) 1. 1990 – 1998 Bank Dagang Negara 2. 1998 – now PT Bank Mandiri, Tbk (Assigned as Audit Division Head at Mandiri Utama Finance)
Sertifikasi profesi yang masih berlaku Valid professional certification	1. Sertifikasi *Qualified Internal Audit* 2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 3. Sertifikasi Profesi sebagai Auditor Internal 4. Sertifikasi *Fraud Examiner* (CFE) 1. Certification of Qualified Internal Audit 2. Level 2 Risk Management Certification 3. Professional Certification as Internal Auditor 4. Fraud Examiner Certification (CFE)

Nama Name	Ary Andana
Jabatan Position	Anggota Komite Audit Audit Committee Member
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	34 tahun 34 Years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational background	Master of Business Administration, Universitas Gadjah Mada Master of Business Administration, Gadjah Mada University
Riwayat Profesi Professional History	1. 2010 – 2015 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2. 2015 – 2016 PT Unilever Indonesia Tbk 3. 2016 – sekarang Mandiri Utama Finance 1. 2010 – 2015 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2. 2015 – 2016 PT Unilever Indonesia Tbk 3. 2016 – now Mandiri Utama Finance
Sertifikasi profesi yang masih berlaku Valid professional certification	Sertifikasi Dasar Pembiayaan APPI APPI Funding Basic Certification

Nama Name	R. Ine Srikandini
Jabatan Position	Anggota Komite Audit Audit Committee Member
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022 Decree of Board of Commissioners No. 001/SK-KOM/MUF/I/2022
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	58 tahun 58 Years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana jurusan Biologi Universitas Padjadjaran Bachelor's degree in Biology, Padjadjaran University
Riwayat Profesi Professional History	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1. 2015 – 2021 Lead Investigator - Senior Investigator, Direktorat Internal Audit 2. 2012 – 2015 Lead Auditor - Wholesale & Corporate Center Audit Group, Direktorat Internal Audit 3. 2001 – 2012 Inspector - Special Audit Department, Internal Audit Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1. 2015 – 2021 Lead Investigator - Senior Investigator, Internal Audit Directorate 2. 2012 – 2015 Lead Auditor - Wholesale & Corporate Center Audit Group, Internal Audit Directorate 3. 2001 – 2012 Inspector - Special Audit Department, Internal Audit Group
Sertifikasi profesi yang masih berlaku Valid professional certification	BSMR – Eksekutif *Certified Fraud Examiner* (*Associate*) *Qualified Internal Audit*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI POKOK KOMITE AUDIT

Fungsi pokok sebagai rumusan tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan serta pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal termasuk kesesuaian terhadap POJK/SEOJK yang berlaku pada Perusahaan Pembiayaan termasuk Unit Usaha Syariah Perusahaan;
2. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik (audit eksternal) dengan standar audit;
3. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
5. Pengambilan keputusan dalam Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan asas Musyawarah untuk Mufakat dan untuk selanjutnya diputuskan oleh Ketua Komite Audit dalam bentuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam RUPS.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES MAIN FUNCTIONS OF AUDIT COMMITTEE

The main functions as a formulation of the duties and responsibilities of the Audit Committee are:

1. Monitor and evaluate the planning and implementation of the duties of the internal audit work unit, including compliance with POJK/SEOJK that apply to Financing Companies, including the Company's Sharia Business Unit;
2. Monitor and evaluate the conformity of the implementation of the audit by a public accounting firm (external audit) with auditing standards;
3. Monitor and evaluate the conformity of financial reports with financial accounting standards;
4. Monitor and evaluate the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal audit work unit, public accountants, and OJK supervision results, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners;
5. Decision making at the Audit Committee Meeting is carried out based on the principle of Deliberation for Consensus and to be subsequently decided by the Chair of the Audit Committee in the form of recommendations to the Board of Commissioners.
6. Monitor and evaluate the follow-up implementation of internal and external audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process;
7. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a public accountant and a public accounting firm to be determined in the GMS.

Transparansi Independensi Anggota Komite Audit

Transparency Independence of Audit Committee Members

Aspek Independensi Independence Aspect	Mansyur Syamsuri Nasution	Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Zakaria Halim	Deddy Zulfachrie	Ary Andana	R. Ine Srikandini
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Is a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Office or other parties who provide insurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	X	X	X	X	X	X	X

Transparansi Independensi Anggota Komite Audit

Transparency Independence of Audit Committee Members

Aspek Independensi Independence Aspect	Mansyur Syamsuri Nasution	Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Zakaria Halim	Deddy Zulfachrie	Ary Andana	R. Ine Srikandini
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen Is a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioner	X	X	X	X	X	X	X
Mempunyai saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut Owns shares of the Company either directly or indirectly. In the event that a member of the Audit Committee obtains shares of the Company either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the acquisition of the shares.	X	X	X	X	X	X	X
Mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama. Has affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders.	X	X	X	X	X	X	X
Mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Have a direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	X	X	X	X	X	X	X

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite Audit agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit.

COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM

The competency improvement program is carried out by the Audit Committee so that it can always follow and update information on the latest developments in the Company's business activities and other knowledge related to the implementation of the Audit Committee's duties.

No	Nama Name	*Workshop / Training/Seminar*	Tanggal Date	Penyelenggara - Tempat Organizer - Venue
1.	Ignatius Susatyo	Seminar *Online* "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital" Online Seminar "Challenges to Accelerate Digital Economy Transformation"	31 Mei 2022 May 31, 2022	APPI
2.	Erida	Seminar *Online* "Mengelola Risiko di Tengah Ketidakpastian" Online Seminar "Managing Risk Amidst Uncertainty"	27 Juli 2022 July 27, 2022	APPI
3.	Mansyur Syamsuri N.	Seminar *Online* "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital" Online Seminar "Challenges to Accelerate Digital Economy Transformation"	31 Mei 2022 May 31, 2022	APPI
4	Zakaria Halim	1. PDCA: *Strategy Execution Review* (Regional) Q1 2022 PDCA 2. *Branch Leader's Forum* 2022	1. 14 Maret 2022 2. 05 September 2022 1. March 14, 2022 2. September 05, 2022	1. SMPP & Magelang 2. Human Capital (HO) & Swissbell PIK Avenue
5	Ary Andana	1. *Training* Analisis Laporan Keuangan Industri 2. *Webinar* PPATK 3. *Towards Financial Stability Through the Use of Digital Technology, ESG, and the Green Economy* 1. Industrial Financial Report Analysis Training 2. PPATK webinar 3. Towards Financial Stability Through the Use of Digital Technology, ESG, and the Green Economy	1. 25 Agustus 2022 2. 03 Oktober 2022 3. 01 Desember 2022 1. August 25, 2022 2. October 03, 2022 3. December 01, 2022	1. Mandiri University & Online Zoom 2. APUPPT , HC Development & Artotel Mangkuluhur 3. OJK & Online Zoom
6	Deddy Zulfachrie	1. Sosialisasi Penilaian Akhir Tahun 2021 2. *Webinar* PPATK 3. *Towards Financial Stability Through the Use of Digital Technology, ESG, and the Green Economy* 1. Socialization of 2021 End of Year Assessment 2. PPATK webinar 3. Towards Financial Stability Through the Use of Digital Technology, ESG, and the Green Economy	1. 12 Januari 2022 2. 03 Oktober 2022 3. 01 Desember 2022 1. January 12, 2022 2. October 03, 2022 3. December 01, 2022	1. HC Development & *Online Zoom* 2. APUPPT , HC Development & Artotel Mangkuluhur 3. OJK & *Online Zoom*

No	Nama Name	*Workshop / Training/Seminar*	Tanggal Date	Penyelenggara - Tempat Organizer - Venue
9	R. Ine Srikandini	Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Satu Level di bawah Direksi yang membawahi Manajemen Risiko pada Perusahaan Pembiayaan Executive Program Risk Management Certification for the Board of Directors, Board of Commissioners and Officers One Level under the Board of Directors in charge of Risk Management in Financing Companies	18 Mei 2022 May 18, 2022	BSMR

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Di tahun 2022, Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali. Berikut disampaikan agenda, dan rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat-rapat tersebut.

AUDIT COMMITTEE MEETING

The Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.

In 2022, Audit Committee held 7 (seven) meetings. Following is the agenda, and recapitulation of the attendance level of the Audit Committee at these meetings.

No	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Presence						
			Mansyur Syamsuri N.	Ignatius Susatyo	Erida	Zakaria Halim	Deddy Zulfachrie	Ary Andana	R. Ine Srikandini
1	13 Januari 2022 January 13, 2022	1. *Score Audit Rating* Cabang Tahun 2022 2. Rencana Audit Tahun 2022 3. Pemilihan AP/KAP Tahun Buku 2022 4. *Audit Issues Closing Meeting Audit Year Ended* 31 Desember 2022 1. 2022 Branch Rating Audit Score 2. 2022 Audit Plan 3. Selection of AP/KAP for the 2022 Fiscal Year 4. Audit Issues Closing Meeting Audit Year Ended 31 December 2022	√	√	√	√	√	√	√
2	17 Februari 2022 February 17, 2022	1. Usulan KAP dan AP Tahun Buku Perusahaan yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 2. Rencana Uji Petik Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun Buku 2022 1. Proposal from KAP and AP for the Company's Fiscal Year ending December 31, 2022 2. Plan for the 2022 Sharia Supervisory Board (DPS) Pick Test	√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Presence						
			Mansyur Syamsuri N.	Ignatius Susatyo	Erida	Zakaria Halim	Deddy Zulfachrie	Ary Andana	R. Ine Srikandini
3	21 April 2022 April 21, 2022	1. *Update* dan tindak lanjut laporan hasil Audit Internal MUF Q1 2022 (Konvensional dan Syariah) 2. *Update* dan tindak lanjut laporan audit KAP dan AP tahun buku 2021 3. Realisasi kunjungan Dewan Komisaris Q1- 2022. 1. Update and follow up on the MUF Q1 2022 Internal Audit report (Conventional and Sharia) 2. Update and follow-up on KAP and AP audit reports for the 2021 fiscal year 3. Realization of the visit of the Board of Commissioners Q1- 2022.	√	√	√	√	√	√	√
4	12 Juli 2022 July 12, 2022	1. *Sharing Session* atas kinerja audit *scoring* wilayah pada Juni 2022. 2. *Update* dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BMRI Semester 1 Tahun 2022. 1. Sharing Session on regional audit scoring performance in June 2022. 2. Update and Follow-Up of the BMRI Semester 1 2022 Audit Results Report.	√	√	√	√	√	√	√
5	20 September 2022 September 20, 2022	1. Laporan Realisasi Audit Cabang Konvensional dan Syariah Agustus 2022 2. *Update Progress* Audit Bank Mandiri 3. Rencana Kunjungan Dewan Komisaris pada Cabang Semester 2 Tahun 2022 4. Lain-lain 1. August 2022 Conventional and Sharia Branch Audit Realization Report 2. Bank Mandiri Audit Progress Update 3. Planned Visit of the Board of Commissioners in Semester 2 of 2022 Branch 4. Etc	√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Presence						
			Mansyur Syamsuri N.	Ignatius Susatyo	Erida	Zakaria Halim	Deddy Zulfachrie	Ary Andana	R. Ine Srikandini
6	21 Oktober 2022 October 21, 2022	1. Laporan Realisasi Audit Cabang Konvensional dan Syariah September 2022. 2. *Annual Audit Plan* Tahun 2023 3. Rencana Audit Tematik 2023 4. Hasil *Closing* Audit Bank Mandiri 1. September 2022 Conventional and Sharia Branch Audit Realization Report. 2. Annual Audit Plan for 2023 3. 2023 Thematic Audit Plan 4. Bank Mandiri Closing Audit Results	√	√	√	√	√	√	√
7	16 Desember 2022 December 16, 2022	1. Laporan Realisasi Audit Cabang Konvensional dan Syariah terhadap audit *plan* 2022. 2. *Update* Hasil kunjungan Dewan Komisaris ke Cabang Purwokerto termasuk MUF NETnya. 3. *Update* Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Bank Mandiri 2022 4. Lain-lain 1. Report on Realization of Conventional and Sharia Branch Audits against the 2022 audit plan. 2. Update on the results of the visit of the Board of Commissioners to the Purwokerto Branch including the MUF NET. 3. Follow-Up Update on Bank Mandiri Audit Findings 2022 4. Etc	√	√	√	√	×	√	√
Jumlah Rapat Total Meetings			7	7	7	7	6	7	7
Jumlah Kehadiran Total Attendance			7	7	7	7	6	7	7
Persentase Kehadiran Attendance Percentage			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Note:
Bpk Deddy Zulfachrie menjabat sebagai Kepala Divisi Internal Audit terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2022
Mr. Deddy Zulfachrie has served as Head of the Internal Audit Division since October 1, 2020 to October 31, 2022

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, di sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit. Pemantauan atas tidak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, yang terdiri dari rekomendasi penunjukan AP KAP, evaluasi AP KAP, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

AUDIT COMMITTEE WORK IMPLEMENTATION REPORT

In accordance with OJK Regulation No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, throughout 2022, the Audit Committee has carried out monitoring and evaluation of audit planning and implementation. Monitoring the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process, which consists of recommending the appointment of AP KAP, evaluating AP KAP, and providing recommendations to the Board of Commissioners.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan terhadap Perusahaan, terutama memastikan bahwa sistem/kebijakan Nominasi dan Remunerasi di lingkup Perusahaan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan transparansi.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Remuneration and Nomination Committee was formed by and is responsible to the Board of Commissioners to carry out supervisory duties on the Company, especially ensuring that the Remuneration and Nomination system/policy within the scope of the Company has been prepared and implemented based on the principles of fairness and transparency.

PEDOMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perusahaan telah menyusun Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjadi acuan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi MUF telah memperbaharui sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Pedoman *Good Corporate Governance*) dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

WORK GUIDELINES FOR THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Company has developed the Remuneration and Nomination Committee Work Guidelines which serve as a reference for the Remuneration and Nomination Committee in carrying out its functions, duties and responsibilities. The MUF Remuneration and Nomination Committee Work Guidelines have been updated according to the Guidelines for Good Corporate Governance for Financing Companies (Guidelines for Good Corporate Governance) and POJK No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.

SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan demikian susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE FOR 2022

Throughout 2022, there were no changes to the composition and composition of the Remuneration and Nomination Committee, thus the composition of the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2022 was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure
Mansyur Syamsuri Nasution	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	SK Dewan Komisaris No. 003/SK-KOM/MUF/VII/2019 Decree of the Board of Commissioners No. 003/SK-KOM/MUF/VII/2019	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as the Board of Commissioners
Erida	Anggota/Komisaris Member/Commissioner	SK Dewan Komisaris No. 003/SK-KOM/MUF/VII/2019 Decree of the Board of Commissioners No. 003/SK-KOM/MUF/VII/2019	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as the Board of Commissioners
Andi Naimah	Anggota/Wakil Kepala Divisi *Human Capital* Member/Deputy Head of Human Capital Division	SK Dewan Komisaris No. 003/SK-KOM/MUF/VII/2019 Decree of the Board of Commissioners No. 003/SK-KOM/MUF/VII/2019	Mengikuti masa jabatan sebagai Wakil Kepala Divisi *Human Capital* Following his tenure as Deputy Head of the Human Capital Division

PROFIL ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEMBER PROFILES

Nama Name	Mansyur Syamsuri Nasution
Jabatan Position	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Remuneration and Nomination Committee
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 003/SK KOM/MUF/VII/2019 Decree of the Board of Commissioners No. 003/SK-KOM/MUF/VII/2019

Profil beliau dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan pada laporan ini.
His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this report.

Nama Name	Erida
Jabatan Position	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Remuneration and Nomination Committee
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 003/SK KOM/MUF/VII/2019 Decree of the Board of Commissioners No. 003/SK-KOM/MUF/VII/2019

Profil beliau dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan pada laporan ini.
His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this report.

Nama Name	Andi Naimah
Jabatan Position	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Remuneration and Nomination Committee
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 003/SK KOM/MUF/VII/2019 Decree of the Board of Commissioners No. 003/SK-KOM/MUF/VII/2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia

Usia Age	45 tahun 45 Years Old
Domisili Domicile	Makassar
Riwayat Pendidikan Educational background	SE,Ak, Jurusan : Akuntansi, Universitas Hasanudin Makassar (2001) SE,Ak, Department : Accounting, Hasanudin University Makassar (2001)
Riwayat Profesi Professional History	1. (2003–2014) *Human Resource Regional Manager* PT Adira Dinamika Multi Finance 2. (2014–2015) *Human Resource Division Head* PT Bima Multi Finance 3. (2015–sekarang) *Human Capital Operation Deputy Division Head* Mandiri Utama Finance 1. (2003–2014) Human Resource Regional Manager PT Adira Dinamika Multi Finance 2. (2014–2015) Human Resource Division Head of PT Bima Multi Finance 3. (2015–present) Human Capital Operation Deputy Division Head Mandiri Utama Finance
Rangkap Jabatan Double job	Wakil Kepala Divisi *Human Capital* Deputy Head of Human Capital Division
Sertifikasi profesi yang masih berlaku Valid professional certification	1. *Certified Professional Human Resources Management* (CPHRM) 2. Sertifikat Dasar Manajerial Perusahaan Pembiayaan (APPI) 3. *Certified Business Development Executive Program for Finance Company* 1. Certified Professional Human Resources Management (CPHRM) 2. Funding Company Managerial Fundamental Certificate (APPI) 3. Certified Business Development Executive Program for Finance Companies

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI POKOK KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Fungsi pokok sebagai rumusan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat di bawah ini:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES MAIN FUNCTIONS OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The main functions as a formulation of the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee can be seen below:

No.	Fungsi Nominasi Nomination Function	Fungsi Remunerasi Remuneration Function
1	Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, mengenai: 1. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris. 2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi. Prepare and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding: 1. Position composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. 2. Policies and criteria needed in the nomination process.	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, mengenai: 1. Struktur remunerasi. 2. Kebijakan atas remunerasi. 3. Besaran atas remunerasi. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding: 1. Remuneration structure. 2. Policy on remuneration. 3. Amount of remuneration.
2	Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors and/ or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation material.	Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Assist the Board of Commissioners in evaluating performance according to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

No.	Fungsi Nominasi Nomination Function	Fungsi Remunerasi Remuneration Function
3	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity building programs for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.	-
4	Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.	-

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-KOM/MUF/VII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi di Bawah Dewan Komisaris yang Menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi di Mandiri Utama Finance. Transparansi Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Di bawah ini disajikan transparansi independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perusahaan/pihak independen.

DISTRIBUTION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEMBERSHIP

The division of Duties and Responsibilities in the Membership of the Remuneration and Nomination Committee has been regulated based on the Decree of the Board of Commissioners No. 003/SK-KOM/MUF/VII/2019 dated August 28, 2019 concerning the Establishment and Appointment of the Remuneration and Nomination Committee under the Board of Commissioners which carries out the Nomination & Remuneration Function at Mandiri Utama Finance. Transparency of Independence of Remuneration and Nomination Committee Members Below is presented transparency of the independence of members of the Remuneration and Nomination Committee who come from outside the Company/independent parties.

Aspek Independensi Independence Aspect	Mansyur Syamsuri Nasution	Erida	Andi Noimah
Mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama. Has an affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Major Shareholders.	X	X	X
Merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perusahaan. Concurrent positions as a member of other committees owned by the Company.	√	√	X

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.

COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM

The competency improvement program is carried out by the Remuneration and Nomination Committee so that it can always follow and update information on the latest developments in the Company's business activities and other knowledge related to the implementation of the duties of the Remuneration and Nomination Committee.

No	Nama Name	*Workshop/Training/Seminar*	Tanggal Date	Penyelenggara - Tempat Organizer - Venue
1	Erida	Seminar *Online* "Mengelola Risiko di Tengah Ketidakpastian" Online Seminar "Managing Risk Amidst Uncertainty"	27 Juli 2022 July 27, 2022	APPI
2	Mansyur Syamsuri N.	Seminar *Online* "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital" Online Seminar "Challenges to Accelerate Digital Economy Transformation"	31 Mei 2022 May 31, 2022	APPI
3	Andi Naimah	Sertifikasi Dasar *managerial by* APPI 2022 Managerial Basic Certification by APPI 2022	20 September 2022 September 20, 2022	APPI

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Di tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Berikut disampaikan agenda, dan rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat-rapat tersebut.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEETING

The Remuneration and Nomination Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.

In 2022, the Remuneration and Nomination Committee held meeting of 3 (three) times. The following is the agenda, and a recapitulation of the attendance level of the Remuneration and Nomination Committee at these meetings.

No	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Presence		
			Mansyur Syamsuri N.	Erida	Andi Noimah
1	12 Februari 2022 February 12, 2022	Persiapan Pengajuan Remunerasi Perusahaan Tahun 2022 Preparation for Submission of the Company's Remuneration Year 2022	√	√	√
2	27 Juni 2022 June 27, 2022	Usulan Pengangkatan Kembali atas Nominasi Komisaris Independen Perusahaan Periode Jabatan 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ke - 3 (tiga). Proposal for Re-appointment of Nomination Independent Commissioner of the Company Term of Office 2023 until the closing of the General Meeting 3rd (three) Annual Shareholders (AGMS).	√	√	√
3	23 Desember 2022 December 23, 2022	Usulan Remunerasi Tahun 2023 Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perusahaan. Proposed 2023 Remuneration for the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board (DPS) of the Company.	√	√	√
Jumlah Rapat Total Meetings			3	3	3
Jumlah Kehadiran Total Attendance			3	3	3
Persentase Kehadiran Attendance Percentage			**100%**	**100%**	**100%**

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, di sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan fungsi nominasi dan fungsi remunerasi melalui berbagai rekomendasi yang diberikan pada Dewan Komisaris, termasuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

REPORT ON WORK IMPLEMENTATION OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

In accordance with OJK Regulation No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, throughout 2022, the Nomination & Remuneration Committee has carried out the nomination and remuneration functions through various recommendations that given to the Board of Commissioners, including assisting the Board of Commissioners in conducting performance appraisals according to the suitability of the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal pengawasan dan pemantauan penerapan manajemen risiko, dan menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko MUF.

RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners stipulated based on the Decree of Board of Commissioners, to support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in terms of supervision and monitoring of the implementation of risk management, and assessing the effectiveness of risk management including assessing MUF's risk tolerance .

PEDOMAN KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perusahaan telah menyusun Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang menjadi acuan bagi Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko MUF telah memperbaharui sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Pedoman *Good Corporate Governance*) dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

RISK MONITORING COMMITTEE WORK GUIDELINES

The Company has developed a Risk Monitoring Committee Work Guideline which is a reference for the Risk Monitoring Committee in carrying out its functions, duties and responsibilities. The Work Guidelines for the MUF Risk Monitoring Committee have been updated according to the Guidelines for Good Corporate Governance for Financing Companies (Guidelines for Good Corporate Governance) and POJK No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.

SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Komite Pemantau Risiko, dengan demikian susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF RISK MONITORING COMMITTEE IN 2022

Throughout 2022, there were no changes to the structure and composition of the Risk Monitoring Committee, thus the composition of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2022 was as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Mansyur Syamsuri Nasution	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ignatius Susatyo Wijoyo	Anggota/Komisaris Utama Member/President Commissioner	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022
Erida	Anggota/Komisaris Member/Commissioner	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022
Dapot Parasian Sukoco	Anggota/*Board of Management* bidang *Credit & Risk Management* Member/Board of Management in the field of Credit & Risk Management	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022
Zakaria Halim	Anggota/*Board of Management* bidang *Corporate President Office* Member/Board of Management in the field of Corporate President Office	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022
Iwan Adhi Pramana	Anggota/Wakil Kepala Divisi *Enterprise Risk* Member/Deputy Head of Enterprise Risk Division	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022
Ary Andana	Anggota/Wakil Kepala Divisi *Corporate Secretary* Member/Deputy Head of Corporate Secretary Division	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022
R. Ine Srikandi	Anggota/Pihak Independen Members/Independent Parties	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022

PROFIL ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

PROFILE OF RISK MONITORING COMMITTEE MEMBERS

Nama Name	Mansyur Syamsuri Nasution
Jabatan Position	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman Risk Monitoring Committee
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022

Profil beliau dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan pada laporan ini.
His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this report.

Nama Name	Ignatius Susatyo Wijoyo
Jabatan Position	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022

Profil beliau dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan pada laporan ini.
His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this report.

Nama Name	Erida
Jabatan Position	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022

Profil beliau dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan pada laporan ini.
Her profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this report.

Nama Name	Dapot Parasian Sukoco
Jabatan Position	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022

Nama Name	Zakaria Halim
Jabatan Position	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022

Profil beliau dapat dilihat di bagian Sekretaris Perusahaan di bab Tata Kelola Perusahaan pada laporan ini.
His profile can be seen in the Corporate Secretary section of the Corporate Governance chapter of this report.

Nama Name	Iwan Adhi Pramana
Jabatan Position	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022

Nama Name	R. Ine Srikandi
Jabatan Position	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022 Decree of the Board of Commissioners No. 002/SK-KOM/MUF/VII/2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB: FUNGSI POKOK KOMITE PEMANTAU RISIKO

Fungsi pokok sebagai rumusan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan; dan
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES: MAIN FUNCTIONS OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

The main functions as the formulation of the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are:

1. Evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of Company policies; And
2. Monitor and evaluate the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko.

COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM

The competency improvement program is carried out by the Risk Monitoring Committee so that they can always follow and update information on the latest developments in the Company's business activities and other knowledge related to the implementation of the duties of the Risk Monitoring Committee.

No	Nama Name	*Workshop/Training/Seminar*	Tanggal Date	Penyelenggara - Tempat Organizer - Venue
1.	Ignatius Susatyo	Seminar *Online* "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital" Online Seminar "Challenges to Accelerate Digital Economy Transformation"	31 Mei 2022 May 31, 2022	APPI
2.	Erida	Seminar *Online* "Mengelola Risiko di Tengah Ketidakpastian" Online Seminar "Managing Risk Amidst Uncertainty"	27 Juli 2022 July 27, 2022	APPI
3.	Mansyur Syamsuri N.	Seminar *Online* "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital" Online Seminar "Challenges to Accelerate Digital Economy Transformation"	31 Mei 2022 May 31, 2022	APPI
4	Dapot Parasian Sukoco	*Branch Leader's Forum* 2022	05 September 2022 September 05, 2022	Human Capital (HO) & Swissbell PIK Avenue
		Webinar PPATK PPATK Webinar	03 Oktober 2022 October 03, 2022	APUPPT , HC Development & Artotel Mangkuluhur
5	Zakaria Halim	PDCA : *Strategy Execution Review* (Regional) Q1 2022 PDCA	14 Maret 2022 March 14, 2022	SMPP & Magelang
		Branch Leader's Forum 2022	05 September 2022 September 05, 2022	Human Capital (HO) & Swissbell PIK Avenue

No	Nama Name	*Workshop/Training/Seminar*	Tanggal Date	Penyelenggara - Tempat Organizer - Venue
6	Iwan Adhi Pramana	*Webinar* Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VIII 2022 Webinar of the 2022 VIII National Risk Management Professional Conference	01 & 02 Desember 2022 December 01 & 02, 2022	LSPMR & *Online Zoom*
		Towards Financial Stability Through the Use of Digital Technology, ESG, and the Green Economy	01 Desember 2022 December 01, 2022	OJK & *Online Zoom*
7	Ary Andana	*Training* Analisis Laporan Keuangan Industri Industrial Financial Report Analysis Training	25 Agustus 2022 August 25, 2022	Mandiri University & *Online Zoom*
		Webinar PPATK PPATK Webinar	03 Oktober 2022 October 03, 2022	APUPPT , HC Development & Artotel Mangkuluhur
		Towards Financial Stability Through the Use of Digital Technology, ESG, and the Green Economy	01 Desember 2022 December 01, 2022	OJK & *Online Zoom*

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Di tahun 2022, Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali. Berikut disampaikan agenda, dan rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam rapat-rapat tersebut.

MEETING OF RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.

In 2022, Risk Monitoring Committee held a meeting of 8 (eight) times. Following is the agenda, and recapitulation of the level of attendance of the Risk Monitoring Committee in these meetings.

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Presence							
			Mansyur Syamsuri Nasution	Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Dapot Parasian Sukoco	Zakaria Halim	Iwan Adhi Pramana	Ary Andana	R. Ine Srikandi
1	13 Januari 2022 January 13, 2022	1. Validasi Atas Temuan Audit Eksternal - EY 2. Penerapan Program APU dan PPT Perusahaan 3. Realisasi Pengkinian Data Debitur 1. Validation of External Audit Findings - EY 2. Implementation of the Company's APU and PPT Program 3. Realization of Debtor Data Updating	√	√	√	X	√	X	√	√

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Presence							
			Mansyur Syamsuri Nasution	Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Dapot Parasian Sukoco	Zakaria Halim	Iwan Adhi Pramana	Ary Andana	R. Ine Srikandi
2	10 Februari 2022 February 10, 2022	1. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Periode Tahun Buku 2021 kepada OJK. 2. *Performance Quality Review* (PQR). 3. Realisasi Restrukturisasi COVID-19. 4. Perbandingan Perusahaan dengan industri dan kompetitor terdekat yaitu ADMF. 5. Tindak lanjut arahan Komite Pemantau Risiko pada rapat tanggal 13 Januari 2022. 1. Assessment of the Company's Health Level for the 2021 Fiscal Year Period to the OJK. 2. Performance Quality Review (PQR). 3. Realization of COVID-19 Restructuring. 4. Comparison of the Company with the closest industry and competitor, namely ADMF. 5. Follow up on the direction of the Risk Monitoring Committee at the meeting on January 13, 2022.	√	√	√	X	√	X	√	√
3	23 Maret 2022 March 23, 2022	Laporan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Corporate Governance Report 2021 to the Financial Services Authority (OJK)	√	√	√	X	√	X	√	√

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Presence							
			Mansyur Syamsuri Nasution	Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Dapot Parasian Sukoco	Zakaria Halim	Iwan Adhi Pramana	Ary Andana	R. Ine Srikandi
4	25 April 2022	1. *Update* Laporan Penilaian Tingkat Risiko/Laporan Profil Risiko Q1 2022 (Portofolio *Performance*, Restrukturisasi COVID-19) 2. *Update* Laporan Kepatuhan Terintegrasi Q1- 2022 3. *Update* Penerapan Program APU - PPT Q1 - 2022. 4. Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Oktober - Desember 2021. 1. Update on Risk Level Assessment Report/Risk Profile Report Q1 2022 (Portfolio Performance, COVID-19 Restructuring) 2. Update on Integrated Compliance Report Q1-2022 3. Update on the Implementation of the AML Program - PPT Q1 - 2022. 4. Service Report and Settlement of Consumer Complaints October - December 2021.	√	√	√	X	√	X	√	√

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Presence							
			Mansyur Syamsuri Nasution	Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Dapot Parasian Sukoco	Zakaria Halim	Iwan Adhi Pramana	Ary Andana	R. Ine Srikandi
5	18 Juli 2022	1. *Update* Laporan Penilaian Tingkat Risiko/Laporan Profil Risiko Q2 2022 (Portofolio *Performance*, Restrukturisasi COVID-19). 2. Analisis *Run Off* Q2 2022 3. Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Semester 1 Tahun 2022 4. Usulan Komite Pemantau Risiko Kepada Dewan Komisaris untuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada OJK Semester 1 Tahun 2022: a. Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan b. Laporan Manajemen Risiko c. Laporan Restrukturisasi COVID-19 Semester 1 Tahun 2022 d. Laporan Realisasi RAKB Semester 1 Tahun 2022 e. Laporan Tata Kelola Semester 1 Tahun 2022 f. Laporan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah Semester 1 Tahun 2022 g. Laporan Kegiatan Prinsip Syariah Semester 1 Tahun 2022 h. Laporan Evaluasi Prosedur Operasional Standar Semester 1 Tahun 2022 i. Laporan Praktik Pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Semester 1 Tahun 2022 j. Laporan Penerapan Akuntansi Semester 1 Tahun 2022	√	√	√	√	√	X	√	√

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Presence							
			Mansyur Syamsuri Nasution	Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Dapot Parasian Sukoco	Zakaria Halim	Iwan Adhi Pramana	Ary Andana	R. Ine Srikandi
	July 18, 2022	1. *Update on Risk Level Assessment Report/Risk Profile Report Q2 2022* (Portfolio Performance, COVID-19 Restructuring). 2. *Q2 2022 Run Off Analysis* 3. *Report on Services and Settlement of Consumer Complaints for Semester 1 of 2022* 4. *Proposal of the Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners for the Supervisory Report of the Board of Commissioners to OJK Semester 1 of 2022:* a. *Financial Literacy and Inclusion Report* b. *Risk Management Report* c. *Report on the Restructuring of* COVID-19 *Semester 1 of 2022* d. *Report on Realization of RAKB Semester 1 of 2022* e. *2022 Semester 1 Governance Report* f. *Report on Compliance with Sharia Principles Semester 1 of 2022* g. *Report on Sharia Principles Activities Semester 1 of 2022* h. *Evaluation Report on Standard Operating Procedures for Semester 1 of 2022* i. *Report on Sharia Financing Marketing Practices conducted by Financing Companies for Semester 1 of 2022* j. *Report on the Implementation of Accounting for Semester 1 of 2022*	√	√	√	√	√	X	√	√

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Presence							
			Mansyur Syamsuri Nasution	Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Dapot Parasian Sukoco	Zakaria Halim	Iwan Adhi Pramana	Ary Andana	R. Ine Srikandi
6	20 September 2022 September 20, 2022	1. *Update* Laporan Penilaian Tingkat Risiko/Laporan Profil Risiko Q3 2022 (Portofolio *Performance*, Restrukturisasi COVID-19). 2. Mengarahkan Perusahaan agar melakukan *review* kembali pada perhitungan ROA Perusahaan yang masih di bawah industri, mengingat bahwa Perusahaan telah melakukan optimalisasi JF. 3. Laporan *Self-Assessment* Pemenuhan Ketentuan Perlindungan Konsumen. 4. *Update* RUPSLB Sirkuler tentang perubahan anggaran dasar Perusahaan. 1. Update on Q3 2022 Risk Level Assessment Report/Risk Profile Report (Portfolio Performance, COVID-19 Restructuring). 2. Directing the Company to review again the calculation of the Company's ROA which is still below the industry, bearing in mind that the Company has carried out JF optimization. 3. Self-Assessment Report on Compliance with Consumer Protection Provisions. 4. Update Circular EGMS regarding changes to the Company's articles of association.	√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Presence							
			Mansyur Syamsuri Nasution	Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Dapot Parasian Sukoco	Zakaria Halim	Iwan Adhi Pramana	Ary Andana	R. Ine Srikandi
7	28 Oktober 2022	1. *Update* Laporan Penilaian Tingkat Risiko/Laporan Profil Risiko Q3 2022 (Portofolio *Performance*, Restrukturisasi COVID-19). 2. *Update Framework* RAKB Mandiri Group dan Kuesioner Keuangan Berkelanjutan (ESG) dari OJK. 3. *Update* Hasil Kuesioner Pemenuhan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. 4. Laporan Pelayananan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan IV kepada OJK 5. Laporan Pengguna Jasa Terpadu Produk Jasa Lembaga Keuangan Triwulan IV kepada PPATK. 6. Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi Triwulan IV kepada BMRI.	√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Presence							
			Mansyur Syamsuri Nasution	Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Dapot Parasian Sukoco	Zakaria Halim	Iwan Adhi Pramana	Ary Andana	R. Ine Srikandi
	October 28, 2022	1. *Update of Q3 2022 Risk Level Assessment Report/Risk Profile Report (Portfolio Performance, COVID-19 Restructuring).* 2. *Update on the Mandiri Group RAKB Framework and the Sustainable Finance Questionnaire (ESG) from OJK.* 3. *Update on POJK Fulfillment Questionnaire Results No. 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.* 4. *Quarter IV Consumer Complaint Service and Settlement Report to OJK* 5. *Report of Integrated Service Users of Financial Institution Service Products Quarter IV to PPATK.* 6. *Quarter IV Integrated Compliance Implementation Report to BMRI.*	√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Presence							
			Mansyur Syamsuri Nasution	Ignatius Susatyo Wijoyo	Erida	Dapot Parasian Sukoco	Zakaria Halim	Iwan Adhi Pramana	Ary Andana	R. Ine Srikandi
8	22 Desember 2022 December 22, 2022	1. *Update* Laporan Penilaian Tingkat Risiko/Laporan Profil Risiko Q3 2022 (Portofolio *Performance*, Restrukturisasi COVID-19). 2. *Update* tindak lanjut Perusahaan atas temuan audit BMRI 3. *Update* dan tindak lanjut temuan OJK: 4. Temuan dan mitigasi SLIK. 5. *Update* Kebijakan Perusahaan atas Debitur Korban Gempa Cianjur 6. *Update* Laporan Gratifikasi 1. Update on Q3 2022 Risk Level Assessment Report/Risk Profile Report (Portfolio Performance, COVID-19 Restructuring). 2. Update on the Company's follow-up on BMRI audit findings 3. Update and follow up on OJK findings: 4. SLIK findings and mitigation. 5. Update on Company Policy for Debtors of Cianjur Earthquake Victims 6. Update on Gratification Report	√	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah Rapat Total Meetings			8	8	8	4	8	3	8	8
Jumlah Kehadiran Total Attendance			8	8	8	4	8	3	8	8
Persentase Kehadiran Attendance Percentage			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Note:
1. Bpk Dapot Parasian Sukoco mulai menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 15 Juli 2022.
2. Bpk Iwan Adhi Pramana mulai bergabung menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 15 Juli 2022.
1. Mr Dapot Parasian Sukoco start serving as a member of the Risk Monitoring Committee on July 15, 2022.
2. Mr. Iwan Adhi Pramana began start serving as a member of the Risk Monitoring Committee since July 15, 2022.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas tanggung jawab, dan fungsinya, sebagai berikut :

1. Membuat proyeksi penilaian tingkat kesehatan perusahaan secara rutin setiap triwulan.
2. Melaksanakan penilaian tingkat kesehatan perusahaan secara rutin setiap triwulan.
3. Melakukan pelaporan tingkat kesehatan perusahaan, dengan detail sbb:

REPORT OF RISK MONITORING COMMITTEE WORK IMPLEMENTATION

During 2022, the Risk Monitoring Committee had carried out activities in the context of running responsibilities and functions, as follows:

1. Drafted projection assessment of the Company soundness level on a regular basis every quarter.
2. Carried out regular quarterly assessments of the Company's soundness level.
3. Reported the Company's soundness level, with details as follows:

Laporan Report	**Periode** Period	**Pelaporan Kepada** Reporting to
Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level Assessment	Triwulan Quarterly	Bank Mandiri
Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level Assessment	Tahunan Annual	OJK
Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan - USS Company Soundness Level Assessment - USS	Tahunan Annual	OJK

4. Melaksanakan Rapat Komite Pemantau Risiko secara berkala dengan Dewan Komisaris.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

4. Conduct regular Risk Monitoring Committee meetings with the Board of Commissioners.
5. Provide recommendations to the Board of Commissioners.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' SUPPORT ORGANS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk organ pendukung baik yang bersifat struktural maupun *ad-hoc*, untuk membantu Direksi terkait pelaksanaan dan penerapan GCG.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors may form supporting organs, both structural and ad-hoc, to assist the Board of Directors with regard to the implementation and implementation of GCG.

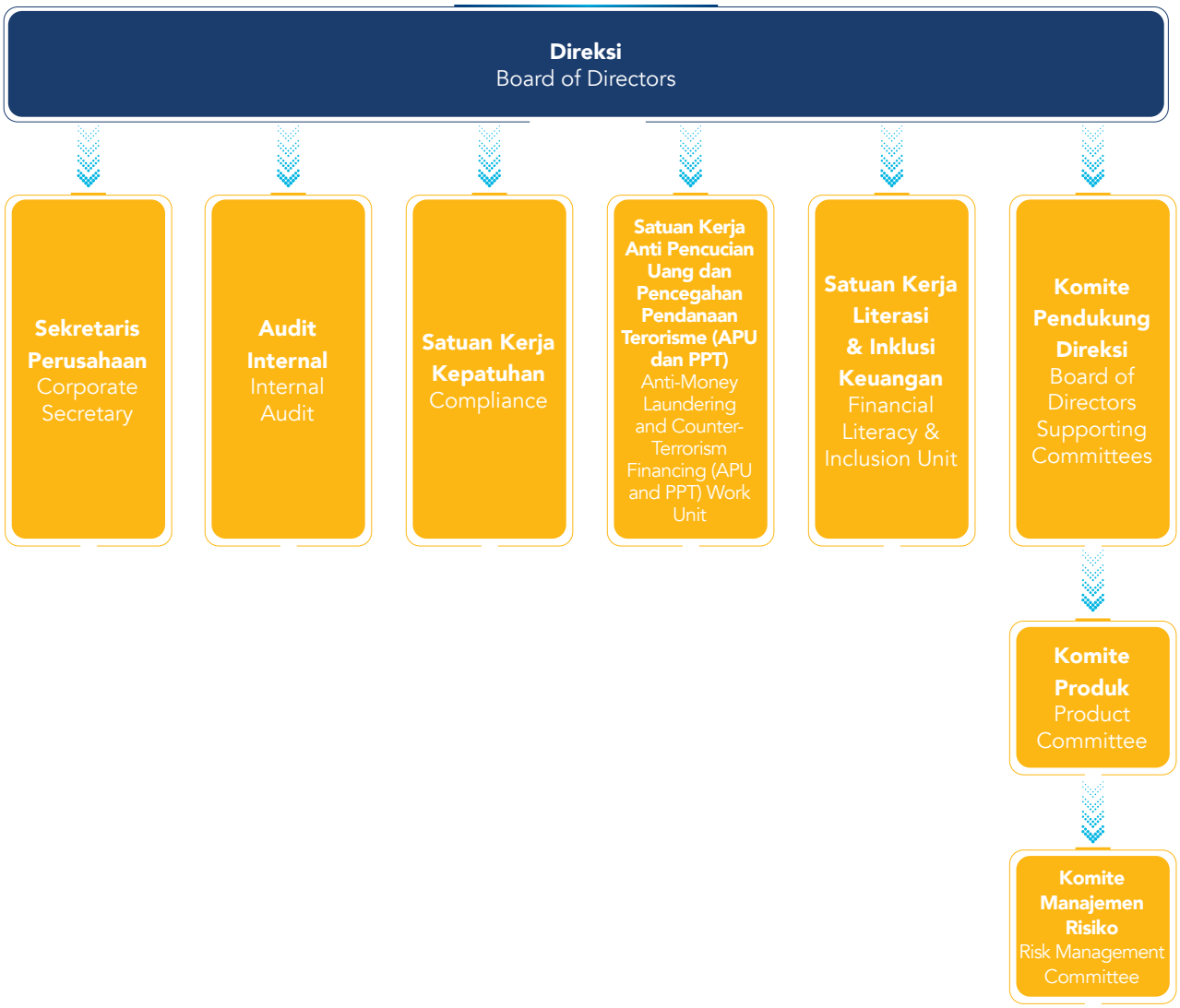

Hingga akhir tahun 2022, Direksi Perusahaan telah membentuk dua Komite yang bersifat *ad-hoc* dan tiga Unit Kerja Khusus yang bertugas untuk membantu Direksi pada bidang yang sesuai dengan tanggung jawabnya, yaitu Komite Produk dan Pengembangan (Konvensional dan Unit Usaha Syariah), Komite Manajemen Risiko, Unit Kerja Khusus dan/atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Unit Kerja Khusus dan/atau Penanggung Jawab Pengendalian Gratifikasi dan Unit Kerja dan Pejabat Penanggung Jawab Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

Until the end of 2022, the Board of Directors of the Company has formed two ad-hoc Committees and three Special Work Units whose task is to assist the Board of Directors in areas that are in accordance with their responsibilities, namely the Product and Development Committee (Conventional and Sharia Business Unit), Risk Management Committee , Special Work Unit and/or Officer Responsible for Implementation of Anti-Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorism Financing (PPT) Programs, Special Work Unit and/or Person in Charge of Gratification Control and Work Unit and Officer in Charge of Consumer and Community Protection.

KOMITE PRODUK DAN PENGEMBANGAN

Komite Produk dan Pengembangan terbagi menjadi Komite Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Pembiayaan Konvensional dan Komite Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah. Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk membantu Direksi dalam menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk Pembiayaan Konvensional dan Syariah serta mengevaluasi kesesuaian produk yang akan dipasarkan. Penetapan pembentukan Komite Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi.

PRODUCT AND DEVELOPMENT COMMITTEE

The Product and Development Committee is divided into the Product & Development Committee for Conventional Financing Business Activities and the Product & Development Committee for Sharia Financing Business Activities. This committee was formed and is responsible to the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board to assist the Board of Directors in preparing strategic plans for the development and marketing of Conventional and Sharia Financing products and evaluating the conformity of products to be marketed. Determination of the formation of the Product & Development Committee for Conventional Financing and Sharia Financing Business Activities is carried out through a Decree of the Board of Directors.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PRODUK

Struktur dan keanggotaan Komite Produk di Perusahaan dikembangkan lebih lanjut untuk fokus kepada pengembangan kegiatan usaha Pembiayaan Konvensional yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020.

Demikian pula Perusahaan juga mengembangkan lebih lanjut untuk juga fokus kepada pengembangan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/MUF/II /2020.

Adapun susunan keanggotaan Komite Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Pembiayaan Konvensional adalah sebagai berikut:

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF PRODUCT COMMITTEE

The structure and membership of the Product Committee in the Company were further developed to focus on the development of Conventional Financing business activities which were formed based on Directors Decree No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020.

Likewise, the Company also developed further to also focus on developing Sharia Financing business activities which were formed based on Directors Decree No. 003/SK-DIR/MUF/II/2020.

The composition of the membership of the Conventional Financing Product & Business Activity Development Committee is as follows:

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Information
Marketing Senior Executive Vice President (SEVP)	Yanto Tjia	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Ketua Komite Committee Chairman
Marketing Used Vehicle Senior Executive Vice President (SEVP)	Nugroho Budy Prasetyo	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Wakil Ketua Vice Chairman
Operation Director	Rita Mustika	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Anggota Member
Credit & Risk Management Senior Executive Vice President (SEVP)	Gede Bayu Kurniawan	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Anggota Member
Finance & ICT Senior Executive Vice President (SEVP)	Ary Zulman	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Anggota Member
Corporate President Office Executive Vice President (EPV)	Zakaria Halim	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Anggota Member
Regional Operation, Credit & Collection Senior Vice President (SVP)	Abdul Rochim	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Anggota Member
NCAR Marketing Division Head	Asep Aleh Saepuloh	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Anggota Member
NMCY Marketing Division Head	Donny Ardianto P	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Anggota Member
Business Relationship Retail Division Head	Robby Agoes Setiawan	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Anggota Member
ICT Division Head	Wirawan Dwyananto	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Anggota Member
Process Improvement Deputy Division Head	Hari Bintoro	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Anggota Member
Policy, System & Procedure Deputy Division Head	Liauw Rendy Hartono	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Anggota Member
Marketing Development Deputy Division Head	Andy Kwet Bun	SKD No. 004/SK-DIR/MUF/II/2020	Anggota Member

Sementara susunan keanggotaan Komite Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah adalah sebagai berikut:

While the composition of the membership of the Sharia Financing Product and Business Activities Development Committee is as follows:

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Information
Pimpinan UUS	Yanwar Arifin	SKD No. 003/SK-DIR/MUF/II /2020	Ketua Komite Committee Chairman
Syariah & AR Management Executive Vice President (EVP)	Judy Lesmana	SKD No. 003/SK-DIR/MUF/II /2020	Wakil Ketua Vice Chairman
Operation Director	Rita Mustika	SKD No. 003/SK-DIR/MUF/II /2020	Anggota Member
Credit & Risk Management Senior Executive Vice President (SEVP)	Gede Bayu Kurniawan	SKD No. 003/SK-DIR/MUF/II /2020	Anggota Member

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Information
Finance & ICT Senior Executive Vice President (SEVP)	Ary Zulman	SKD No. 003/SK-DIR/MUF/II /2020	Anggota Member
Corporate President Office Executive Vice President (EPV)	Zakaria Halim	SKD No. 003/SK-DIR/MUF/II /2020	Anggota Member
NCAR Marketing Division Head	Asep Aleh Saepuloh	SKD No. 003/SK-DIR/MUF/II /2020	Anggota Member
NMCY Marketing Division Head	Donny Ardianto P	SKD No. 003/SK-DIR/MUF/II /2020	Anggota Member
Business Relationship Retail Division Head	Robby Agoes Setiawan	SKD No. 003/SK-DIR/MUF/II /2020	Anggota Member
ICT Division Head	Wirawan Dwyananto	SKD No. 003/SK-DIR/MUF/II /2020	Anggota Member
Process Improvement Deputy Division Head	Hari Bintoro	SKD No. 003/SK-DIR/MUF/II /2020	Anggota Member
Policy, System & Procedure Deputy Division Head	Liauw Rendy Hartono	SKD No. 003/SK-DIR/MUF/II /2020	Anggota Member

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB: FUNGSI POKOK KOMITE PRODUK

Fungsi pokok sebagai rumusan tugas dan tanggung jawab adalah:

1. Melakukan kajian dan analisis pengembangan produk, kegiatan usaha baru Pembiayaan Konvensional dan Syariah yang akan dilakukan atau dipasarkan;
2. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas setiap produk atau kegiatan usaha Pembiayaan Konvensional dan Syariah yang telah dijalankan;
3. Memberikan rekomendasi, saran, dan masukan serta evaluasi atas kegiatan usaha Pembiayaan Konvensional dan Syariah serta mitigasi risiko;
4. Merumuskan dan mengusulkan capaian kinerja bulanan dan tahunan untuk kegiatan usaha Pembiayaan Konvensional dan Syariah.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PRODUK

Sepanjang tahun 2022, Komite Produk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain dengan menyelenggarakan rapat sebanyak 3 kali. Komite Produk juga telah menyampaikan rekomendasi sebanyak 3 rekomendasi, antara lain:

1. Memberikan rekomendasi kepada Perusahaan agar melakukan penyempurnaan definisi produk di Perusahaan agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES: MAIN FUNCTIONS OF PRODUCT COMMITTEE

The main functions as a formulation of duties and responsibilities are:

1. Conduct studies and analysis of product development, new business activities of Conventional and Sharia Financing that will be carried out or marketed;
2. Evaluate and improve each product or business activity of Conventional and Sharia Financing that has been carried out;
3. Provide recommendations, suggestions, and input as well as evaluation of Conventional and Sharia Financing business activities and risk mitigation;
4. Formulate and propose monthly and annual performance achievements for Conventional and Sharia Financing business activities.

PRODUCT COMMITTEE DUTIES IMPLEMENTATION REPORT

Throughout 2022, the Product Committee has carried out its duties and responsibilities, including by holding 3 meetings. The Product Committee has also submitted recommendations, including:

1. Provide recommendations to the Company to make improvements to the product definition in the Company so that can comply with the applicable Financial Services Authority Regulations.

2. Memberikan rekomendasi kepada Perusahaan agar melakukan evaluasi terhadap produk atau kegiatan usaha Perusahaan baik Konvensional maupun Syariah, sehingga produk atau kegiatan usaha Perusahaan lebih optimal dalam mencapai target yang telah ditentukan Perusahaan di tahun 2022.
3. Melakukan *monitoring* terhadap Pelaksanaan penggunaan Akad Ijarah untuk Penyaluran pembiayaan produk Jasa Syariah.

2. Provide recommendations to the Company to evaluate the Company's products or business activities, both Conventional and Sharia, so that the Company's products or business activities are more optimal in achieving the targets set by the Company in 2022.
3. Monitoring the implementation of the use of Ijarah contracts for the distribution of financing for Sharia services products.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi untuk bertanggung jawab terhadap sistem pengawasan internal yang mengawasi proses identifikasi, evaluasi dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dengan tujuan untuk melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko yang mungkin timbul dari aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan. Penetapan pembentukan Komite Manajemen Risiko dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/MUF/V/2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee was formed by and is responsible to the Board of Directors to be responsible for an internal control system that oversees the process of identifying, evaluating and managing risks faced by the Company with the aim of protecting the Company through managing risks that may arise from its activities and maintaining the level of risk in accordance with predetermined directions. Determination of the establishment of the Risk Management Committee is carried out through the Decree of the Board of Directors.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee was formed based on the Decree of the Board of Directors No. 002/SK-DIR/MUF/V/2021 with the following membership structure:

Jabatan Position	**Nama** Name	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Keterangan** Information
Risk Management Senior Executive Vice President	Gede Bayu Kurniawan	SKD No. 002/SK-DIR/MUF/V/2021	Ketua Chairman
Risk Management Deputy Division Head	Andi Setiawan	SKD No. 002/SK-DIR/MUF/V/2021	Wakil Ketua Vice Chairman
Operation Director	Rita Mustika	SKD No. 002/SK-DIR/MUF/V/2021	Anggota Member
Finance & Business Relationship Director	Rully Setiawan	SKD No. 002/SK-DIR/MUF/V/2021	Anggota Member
Marketing Senior Executive Vice President	Yanto Tjia	SKD No. 002/SK-DIR/MUF/V/2021	Anggota Member
Finance & ICT Senior Executive Vice President	Ary Zulman	SKD No. 002/SK-DIR/MUF/V/2021	Anggota Member
Corporate President Office Executive Vice President	Zakaria Halim	SKD No. 002/SK-DIR/MUF/V/2021	Anggota Member
Sharia & AR Management Executive Vice President	Judy Lesmana	SKD No. 002/SK-DIR/MUF/V/2021	Anggota Member

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Information
Regional Operation Senior Vice President	Abdul Rochim	SKD No. 002/SK-DIR/MUF/V/2021	Anggota Member
Operation Control Deputy Division Head	Evi Johanna	SKD No. 002/SK-DIR/MUF/V/2021	Anggota Member

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB: FUNGSI POKOK KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko yaitu memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko untuk pembiayaan Konvensional dan pembiayaan dengan prinsip Syariah;
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko untuk pembiayaan Konvensional dan pembiayaan dengan prinsip Syariah berdasarkan hasil pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
3. Penetapan hal-hal yang berhubungan dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Adapun tugas dan fungsi wajib Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Pelaksanaan rapat dapat dipimpin oleh Ketua Komite dan/atau Wakil Ketua dan minimal dihadiri oleh 50% Anggota Komite Manajemen Risiko;
3. Setiap hasil pelaksanaan harus didokumentasikan dalam risalah rapat dengan baik oleh Divisi *Corporate Secretary*. Selanjutnya risalah rapat tersebut didistribusikan kepada Divisi *Compliance* sebagai bahan pelaporan fungsi kepatuhan dalam pelaporan yang diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain dengan menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali. Komite Manajemen Risiko juga telah menyampaikan rekomendasi antara lain:

1. Merekomendasikan Perusahaan agar melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap keputusan bisnis baik yang berhubungan dengan program pemasaran maupun kualitas produk agar tetap sesuai dengan prosedur di internal.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES: MAIN FUNCTIONS OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The duties and functions of Risk Management Committee are to provide recommendations to the President Director, as follows:

1. Formulation of policies, strategies and guidelines for implementing Risk Management for Conventional financing and financing with Sharia principles;
2. Improvement or perfection of the implementation of Risk Management for Conventional financing and financing with Sharia principles based on the results of the implementation of Risk Management; And
3. Determination of matters related to business decisions that deviate from normal procedures.

The mandatory duties and functions of the Risk Management Committee are as follows:

1. Holding meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months;
2. Meetings can be chaired by the Committee Chair and/or Deputy Chair and attended by at least 50% of the Risk Management Committee Members;
3. Each implementation result must be properly documented in the minutes of meetings by the Corporate Secretary Division. Then the minutes of the meeting are distributed to the Compliance Division as material for reporting the compliance function in the required reporting in accordance with applicable regulations

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE DUTIES

Throughout 2022, the Risk Management Committee has carried out its duties and responsibilities, including by holding 4 meetings. The Risk Management Committee has also submitted recommendations including:

1. Recommended for the Company to evaluate and identify business decisions both related to marketing programs and product quality so that they remain in accordance with internal procedures.

2. Merekomendasikan Perusahaan agar melakukan evaluasi terhadap materi promosi dan publikasi agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

2. Recommended the Company to evaluate promotional materials and publications to comply with the applicable Financial Services Authority Regulations.

UNIT KERJA KHUSUS DAN/ATAU PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direksi berdasarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) di lingkup Perusahaan.

SPECIAL WORK UNIT AND/OR OFFICER RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING (APU) AND PREVENTION OF TERRORISM FUNDING (PPT) PROGRAMS

The Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Work Unit (APU PPT) was formed and is responsible to the Board of Directors based on OJK Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector, to prevent money laundering and counter-terrorism financing (APU and PPT) crimes within the Company.

KEANGGOTAAN UNIT KERJA KHUSUS APU DAN PPT

Pelaksanaan Program APU dan PPT wajib didukung oleh Unit Kerja/Divisi Lain agar penerapan program APU dan PPT tersebut terkontrol dengan baik dan sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, adapun secara lengkap susunan UKP2 APU PPT beserta peranannya adalah sebagai berikut:

MEMBERSHIP OF APU AND PPT SPECIAL WORK UNIT

The implementation of the APU and PPT Program must be supported by other Work Units/Divisions so that the implementation of the APU and PPT program is properly controlled and in accordance with applicable provisions or laws and regulations. Thus, the complete composition of UKP2 APU PPT and its roles are as follows:

1. Kantor Pusat

1. Headquarters

Aktivitas Activity	***Unit In Charge/Person In Charge***
Pelaksana Penerapan Program APU dan PPT di Kantor Pusat Implementer of APU and PPT Program Implementation at the Head Office	1. Div. *Compliance* qq Unit Kerja Pelaksanaan Program APU dan PPT 2. Komite Kredit Kantor Pusat 3. Div. *Human Capital* 1. Div. Compliance qq APU and PPT Program Implementation Work Unit 2. Head Office Credit Committee 3. Div. Human Capital
Koordinator Pelaksanaan Pelatihan Training Implementation Coordinator	Div. *Human Capital* qq Dept. *People Development*
Penatausahaan Dokumen dan Perjanjian Pembiayaan dengan Nasabah Administration of Documents and Financing Agreements with Customers	Div. *Operation*
Pelaksana Pengkinian Data Nasabah Implementer of Customer Data Updating	1. Div. *Operation* Kasir, *Customer Service, Customer Care* 2. Div. AR *Management & Asset Recovery* *Account Receivable Officer* (ARO), *Remedial Officer* 1. Div. Operation Cashier, Customer Service, Customer Care 2. Div. AR Management & Asset Recovery Account Receivable Officer (ARO), Remedial Officer

Aktivitas Activity	*Unit In Charge/Person In Charge*
Penyusunan Laporan Pengkinian Data Compilation of Data Update Reports	Div. *Operation* berkoordinasi dengan Div. AR *Management* & *Asset Recovery* Div. Operation coordinate with Div. AR Management & Asset Recovery
Persetujuan Penyampaian Laporan kepada dan/atau Pemenuhan Permintaan Data dari Regulator yang Berhubungan dengan Penerapan Program APU dan PPT Approval for Submission of Reports to and/or Fulfillment of Requests for Data from Regulators Relating to the Implementation of the APU and PPT Program	*Corporate President Office Executive Vice President* (CPO EVP)
Pemeriksa dan Pengawas Pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT Examiner and Superintendent of the Implementation of the APU and PPT Program Implementation	Div. Internal Audit

2. Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
2. Regional Offices and Branch Offices

Aktivitas Activity	*Unit In Charge/Person In Charge*
Penanggung jawab Penerapan APU dan PPT Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Responsible for APU and PPT Implementation for Regional Offices and Branch Offices	1. Kepala Wilayah | Head of Region 2. Kepala Cabang | Branch head
Pelaksana Penerapan Program APU dan PPT Implementer of the Implementation of the APU and PPT Programs	1. Komite Kredit Kantor Wilayah | Regional Office Credit Committee 2. Komite Kredit Kantor Cabang | Branch Credit Committee 3. *Marketing* 4. *Customer Service* 5. Kasir | Cashier 6. *Collection/Remedial*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT KERJA KHUSUS APU DAN PPT

Fungsi pokok Unit Kerja Khusus APU dan PPT adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melakukan pengkinian dan ketentuan terhadap Pedoman Penerapan Program APU dan PPT;
2. Menyusun rencana penerapan Program APU dan PPT yang berbasis sistem dan *database*;
3. Memastikan adanya kebijakan dan prosedur terkait identifikasi calon nasabah;
4. Memantau proses pengajuan/persetujuan pembiayaan dan pelaksanaan transaksi pembayaran angsuran nasabah;
5. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan/atau Transaksi Keuangan Tunai (TKT);
6. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi analisis transaksi nasabah;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE APU AND PPT SPECIAL WORK UNIT

The main functions of the APU and PPT Special Work Unit are as follows:

1. Compile and perform updates and provisions against the APU and PPT Program Implementation Guidelines;
2. Prepare a plan for the implementation of the AML and CFT Program based on data systems and databases;
3. Ensuring the existence of policies and procedures related to the identification of prospective customers;
4. Monitor the process of filing/approval of financing and implementation of customer installment payment transactions;
5. Evaluate the results of monitoring and analysis of customer transactions to identify Suspicious Financial Transactions (TKM) and/or Cash Financial Transactions (TKT);
6. Administering the results of monitoring and evaluation of customer transaction analysis;

7. Memantau pengkinian data dan profil nasabah;
8. Menerima dan melakukan analisis atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan/atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang disampaikan oleh Cabang sebagai Unit Kerja yang berhubungan dengan nasabah secara langsung;
9. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) kepada Regulator;
10. Melalui kerja sama dengan Unit Kerja Fungsional untuk memenuhi permintaan data dan/atau informasi yang diminta Regulator yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT KERJA KHUSUS APU DAN PPT TAHUN 2022

Satuan Kerja Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direksi berdasarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) di lingkup Perusahaan.

Di sepanjang tahun 2022 Satuan Kerja APU dan PPT telah menyelenggarakan aktivitas/kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya, sebagai berikut:

1. Monitoring dan Pelaporan TKM & TKT kepada PPATK dilakukan melalui GoAML.
2. Membuat laporan tindak lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) & laporan tindak lanjut atas daftar proliferasi senjata pemusnah massal. Sampai saat ini tidak ditemukan Data DTTOT & Proliferasi terhadap Debitur MUF (Nihil).
3. Melaksanakan Financial Integrity Rating (FIR) on Money Laundering/Terrorism. Pada tahun 2022 Nilai FIR MUF mencapai 7.16 atau termasuk kategori BAIK lebih tinggi dari pada nilai rata-rata industri 6,74.
4. Melakukan percepatan proses pengembangan sistem AML agar pelaksanaan penerapan APU dan PPT bisa lebih efektif.

7. Monitoring the updating of customer data and profiles;
8. Receiving and analyzing Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) and/or Cash Financial Transaction Reports (LTKT) submitted by Branches as Work Units that deal directly with customers;
9. Report Suspicious Financial Transactions (TKM) and Cash Financial Transactions (TKT) to Regulators;
10. Through cooperation with the Functional Work Unit to fulfill requests for data and/or information requested by Regulators relating to money laundering, terrorist financing crimes and proliferation of weapons of mass destruction.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE 2022 APU AND PPT SPECIAL WORK UNIT

The Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Work Unit (APU PPT) was formed and is responsible to the Board of Directors based on OJK Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector, to prevent money laundering and counter-terrorism financing (APU and PPT) crimes within the Company.

Throughout 2022 the APU and PPT Work Unit has carried out activities/activities in the context of carrying out its duties, responsibilities and functions, as follows:

1. TKM & TKT Monitoring and Reporting to PPATK is carried out through GoAML
2. Prepare follow-up reports on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) & follow-up reports on the list of proliferation of weapons of mass destruction. Until now there is no DTTOT & Proliferation Data on MUF Debtors (Nil).
3. Implement a Financial Integrity Rating (FIR) on Money Laundering/Terrorism. In 2022, the MUF FIR score reached 7.16 or is included in the GOOD category, higher than the industry average score of 6.74.
4. Accelerating the process of developing the AML system so that the implementation of APU and PPT implementation can be more effective.

UNIT KERJA KHUSUS DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kegiatan bisnis MUF yang melibatkan banyak pihak, dimana untuk menjalin kerja sama yang baik dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) seringkali tidak terhindarkan adanya pemberian dan/atau permintaan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Karena itu, Direksi memutuskan untuk membentuk dan menetapkan Penanggung Jawab Pengendalian Gratifikasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penerimaan/pemberian Gratifikasi yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan, mempengaruhi keputusan perusahaan dan mengakibatkan kerugian perusahaan baik secara materiil dan imateriil.

KEANGGOTAAN UNIT KERJA KHUSUS DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. *Compliance Division Head/Compliance Deputy Division Head, Human Capital Operation Division Head/Human Capital Operation Deputy Division Head*, dan *Human Capital Development Division Head/Human Capital Development Deputy Division Head* ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Pengendalian Gratifikasi di MUF;
2. *Enterprise Risk Division Head/Enterprise Risk Deputy Division Head* ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Korupsi dan Pengelolaan WBS yang akan bekerja sama untuk memberikan data Gratifikasi yang diterima kepada *Compliance Division Head/Compliance Deputy Division Head* dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Pengendalian Gratifikasi (UKPG);
3. Unit Kerja Pengendalian Gratifikasi (UKPG) dirangkap oleh Unit Kerja APU dan PPT *Deputy Dept. Head* yang bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Pengendalian Gratifikasi di MUF;
4. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi wajib didukung oleh Unit Kerja/Divisi lain agar pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi tersebut dapat berjalan lancar dan terkontrol dengan baik serta sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dengan demikian, secara lengkap susunan Unit Kerja Pengendalian Gratifikasi (UKPG) beserta peranannya adalah sebagai berikut:

SPECIAL WORK UNIT AND/OR PERSON IN CHARGE OF GRATIFICATION CONTROL

MUF's business activities involve many parties, where in order to establish good and sustainable cooperation in accordance with the principles of Good Corporate Governance, gifts and/or requests from one party to another are unavoidable. Because of that, the Board of Directors decides to form and determine the Insurer Responsible for Gratuity Control in charge of conducting supervision of the receipt/granting of gratuities that can be resulting in a conflict of interest, influence corporate decisions and result in losses Company both materially and immaterially.

MEMBERSHIP OF SPECIAL WORK UNIT AND/OR PERSON IN CHARGE OF GRATIFICATION CONTROL

1. Compliance Division Head/Compliance Deputy Division Head, Human Capital Operations Division Head/Human Capital Operations Deputy Division Head, and Human Capital Development Division Head/Human Capital Development Deputy Division Head appointed as Person in Charge of Gratification Control at MUF;
2. Enterprise Risk Division Head/Enterprise Risk Deputy Division Head is designated as Person in Charge of Corruption Management and WBS Management who will work together to provide Gratification data received to the Compliance Division Head/Compliance Deputy Division Head and then followed up by the Gratification Control Work Unit (UKPG);
3. The Gratification Control Work Unit (UKPG) is concurrently the APU and PPT Deputy Dept. Work Unit. Head who acts as the Executive Coordinator of Gratification Control at MUF;
4. The implementation of Gratification Control must be supported by other Work Units/Divisions so that the implementation of Gratification Control can run smoothly and be well controlled and in accordance with the applicable provisions or laws and regulations;
5. Thus, the complete composition of the Gratification Control Work Unit (UKPG) and their roles are as follows:

1.

1. Kantor Pusat
Headquarters

No	Aktivitas Activity	*Unit in Charge/Person in Charge*
1	Penanggung Jawab Pengendalian Gratifikasi Person in Charge of Gratification Control	1. *Compliance Division Head/Compliance Deputy Division Head* 2. *Human Capital Operation Division Head/Human Capital Operation Deputy Division Head* 3. *Human Capital Development Division Head/Human Capital Development Deputy Division Head*
2	Koordinator Pelaksana Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Implementation Coordinator	Unit Kerja Pengendalian Gratifikasi (UKPG) Gratification Control Work Unit (UKPG)
3	Penyusun Laporan Penerimaan I Pemberian Gratifikasi kepada UKPG Compiler of Acceptance Report I of Giving Gratification to UKPG	Divisi *Corporate Secretary* Corporate Secretary Division
4	Persetujuan tindak lanjut (penggunaan/pemanfaatan) barang/uang Gratifikasi sesuai batas kewenangan Approval of follow-up (use/utilization) of Gratification goods/money according to authority limits	1. *Corporate President Office Executive Vice President* (CPO EVP) 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 1. Corporate President Office Executive Vice President (CPO EVP) 2. Corruption Eradication Commission (KPK)
5	Pengelolaan dan *Monitoring email* Laporan Gratifikasi yang diterima dari Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Management and Monitoring of Gratification Report emails received from Regional Offices and Branch Offices	Unit Kerja Pengendalian Gratifikasi (UKPG) Gratification Control Work Unit (UKPG)
6	Penyusunan Laporan Konsolidasi: 1. Penerimaan Gratifikasi kepada KPK 2. Penerimaan/Pemberian Gratifikasi kepada Bank Mandiri Preparation of Consolidated Reports: 1. Acceptance of Gratification to KPK 2. Acceptance of Gratification /Giving to Bank Mandiri	
7	Persetujuan Penyampaian Laporan Konsolidasi Penerimaan I Pemberian Gratifikasi kepada Bank Mandiri Approval for Submission of Acceptance Consolidated Report I for the Granting of Gratuities to Bank Mandiri	*Compliance Division Head I Compliance Deputy Division Head*
8	Persetujuan Penyampaian Laporan Konsolidasi Penerimaan Gratifikasi kepada KPK Approval for Submission of Gratification Acceptance Consolidated Reports to the KPK	*Corporate President Office Executive Vice President (CPO EVP)*
9	Disiplin dan Pelaksanaan Pakta Integritas Larangan Gratifikasi Discipline and Implementation of the Integrity Pact on the Prohibition of Gratification	Divisi *Human Capital Operation*

No	Aktivitas Activity	*Unit in Charge/Person in Charge*
10	Pemeriksa dan Pengawas Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Examiner and Supervisor of the Implementation of Gratification Control	Divisi *Internal Audit* Internal Audit Division
11	Pelaksana Penerapan Pengendalian Gratifikasi Implementer of Implementation of Gratification Control	Seluruh Karyawan* di Kantor Pusat All Employees* at Head Office

* Seluruh Karyawan dalam hal ini adalah dengan status: Permanen, Kontrak, Percobaan, Magang, baik yang berstatus Karyawan MUF maupun Karyawan *Outsourcing*/Mitra.
* All employees in this case are with status: Permanent, Contract, Trial, Internship, both those with the status of MUF Employees and Outsourcing Employees/Partners.

2. Kantor Wilayah dan Kantor Cabang (termasuk Kantor Selain Kantor Cabang)
Regional Offices and Branch Offices (including Offices Other than Branch Offices)

No	Aktivitas Activity	*Unit in Charge/Person in Charge*
1	Penanggung Jawab Pengendalian Gratifikasi Person in Charge of Gratification Control	1. Kepala Wilayah 2. Kepala Cabang 3. MUFNet *Head* 1. Head of Region 2. Branch Head 3. MUFNet Head
2	Koordinator Pelaksana Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Implementation Coordinator	Unit Kerja Pengendalian Gratifikasi (UKPG) Gratification Control Work Unit (UKPG)
3	Penyusunan Laporan Penerimaan I Pemberian Gratifikasi kepada HCBP *Manager* Compilation of Acceptance Report I Giving Gratification to HCBP Manager	1. Kepala Cabang 2. MUFNet *Head* 1. Branch Head 2. MUFNet Head
4	Distribusi Laporan Penerimaan/Pemberian Gratifikasi kepada Pihak Menyetujui Tindak Lanjut (penggunaan/pemanfaatan) barang/uang Gratifikasi Distribution of Gratification Receiving/Giving Reports to Approving Parties Follow-up (use/utilization) of Gratification goods/money	HCBP Manager
5	Persetujuan Tindak Lanjut (penggunaan/pemanfaatan) barang/uang Gratifikasi sesuai batas kewenangan Approval of follow-up (use/utilization) of Gratification goods/money according to authority limits	*1. Regional Division Head* *2. Compliance Division Head/Compliance Deputy Division Head* 3. CPO EVP
6	Disiplin dan Pelaksanaan Pakta Integritas Larangan Gratifikasi Discipline and Implementation of the Integrity Pact on the Prohibition of Gratification	HCBP *Manager*
7	Pemeriksa dan Pengawas Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Examiner and Supervisor of the Implementation of Gratification Control	1. Divisi *Operation* qq QA & Opr. *Development* Dept. 2. Divisi *Internal Audit*

No	Aktivitas Activity	*Unit in Charge/Person in Charge*
8	Pelaksana Penerapan Pengendalian Gratifikasi Implementer of Implementation of Gratification Control	Seluruh Karyawan* di Area dan Cabang (termasuk Kantor Selain Kantor Cabang) All Employees* in Areas and Branches (including Offices Other Than Branch Offices)

* Seluruh Karyawan dalam hal ini adalah dengan status: Permanen, Kontrak, Percobaan, Magang, baik yang berstatus Karyawan MUF maupun Karyawan *Outsourcing*/Mitra.
* All employees in this case are with status: Permanent, Contract, Trial, Internship, both those with the status of MUF Employees and Outsourcing Employees/Partners.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA PENGENDALI GRATIFIKASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF GRATIFICATION CONTROL WORK UNIT

Jabatan Position	Tanggung Jawab Responsibility	PIC
UKPG *Deputy Dept. Head*	Koordinator Pelaksanaan Penerapan Pengendalian Gratifikasi Coordinator of Implementation of Gratification Control Implementation	UKPG *Deputy Dept. Head*. Sementara waktu dirangkap oleh UKP2 APU dan PPT *Deputy Dept. Head* UKPG Deputy Dept. heads. Meanwhile, UKP2 APU and PPT Deputy Dept. heads
UKPG *Monitoring & Reporting Sect. Head*	Melakukan pemantauan, analisis dan validasi nilai kewajaran termasuk penyampaian Laporan Gratifikasi kepada Regulator dan Bank Mandiri sebagai Perusahaan Induk. Perform monitoring, analysis and validation of fairness values including submission of Gratification Reports to Regulators and Bank Mandiri as the Parent Company.	UKPG *Monitoring & Reporting Sect. Head*. Sementara waktu dirangkap oleh APU dan PPT *Development Sect. Head* UKPG Monitoring & Reporting Sect. heads. Meanwhile, the APU and PPT Development Sect concurrently concurrently. heads
UKPG *Development Sect. Head*	Mengembangkan sistem manajemen pengendalian Gratifikasi. Develop Gratification control management system.	UKPG *Development Sect. Head*. Sementara waktu di rangkap oleh APU dan PPT *Development Sect. Head* UKPG Development Sect. heads. Meanwhile, the APU and PPT Development Sect concurrently concurrently. heads

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DARI PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Kantor Pusat
   a. *Compliance Division Head/Compliance Deputy Division Head;*
   b. *Human Capital Operation Division Head/Human Capital Operation Deputy Division Head;* dan
   c. *Human Capital Development Division Head/Human Capital Development Deputy Division Head.*

   Secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Pengendalian Gratifikasi di MUF sesuai dengan fungsi dan jabatannya dan memiliki tugas untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Pengendalian

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE GRATUITY CONTROL PERSON IN CHARGE

1. Headquarters
   a. Compliance Division Head/Compliance Deputy Division Head;
   b. Human Capital Operation Division Head/Human Capital Operation Deputy Division Head; And
   c. Human Capital Development Division Head/Human Capital Development Deputy Division Head.

Together they are responsible for the implementation of Gratification Control at MUF in accordance with their functions and positions and have the duty to evaluate the implementation of Gratification Control through

Gratifikasi melalui *meeting* koordinasi yang dilakukan secara periodik untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direksi.

2. Kantor Wilayah dan Kantor Cabang (termasuk Kantor Selain Kantor Cabang)
   a. Kepala Wilayah;
   b. Kepala Cabang;
   c. MUFNet *Head*.

   Bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan fungsi dan jabatannya dan memiliki tugas bekerja sama dengan HCBP *Manager* untuk memastikan setiap penerimaan/pemberian Gratifikasi di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang (termasuk Kantor Selain Kantor Cabang) ditindaklanjuti/dilaporkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT KERJA KHUSUS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Laporan Penerimaan/Pemberian Gratifikasi dapat disampaikan melalui *email*: lapor.gratifikasi@muf.co.id Laporan Pelanggaran Gratifikasi dapat disampaikan melalui email WBS: integrity@muf.co.id

Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui rapat dengan periode triwulan.

UNIT KERJA DAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tertanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Direksi membentuk unit kerja dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Perlindungan Konsumen dan masyarakat.

coordination meetings which are held periodically for further reporting to the Board of Directors.

2. Regional Offices and Branch Offices (including Offices Other than Branch Offices)
   a. Head of Region;
   b. Branch head;
   c. MUFNet Head.

   Responsible for the implementation of the implementation of Gratification Control in their respective work environments in accordance with their functions and positions and has the task of working closely with the HCBP Manager to ensure that every receipt/granting of Gratification within Regional Offices and Branch Offices (including Offices Other than Branch Offices) is followed up/reported in accordance with applicable regulations.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SPECIAL WORKING UNIT FOR GRATIFICATION CONTROL

Reports of Gratification Acceptance/Giving can be submitted via email: lapor.gratifikasi@muf.co.id Gratification Violation Reports can be submitted via WBS email: integrity@muf.co.id

Report on the Implementation of Gratification Control is submitted to the Board of Directors and the Board of Commissioners through meeting quarterly.

WORK UNITS AND OFFICERS IN CHARGE FOR CONSUMER AND COMMUNITY PROTECTION

To realize a financial system that grows sustainably, is stable, and is able to protect the interests of consumers and society, by creating a reliable consumer protection system, increasing consumer and community empowerment. And Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.07/2022 dated April 14, 2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, the Board of Directors establishes work units and appoints officials who are responsible for Consumer and community protection.

KEANGGOTAAN UNIT KERJA DAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

1. *Corporate Secretary Division Head/Corporate Secretary Deputy Division Head* ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Unit Kerja Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat (UK PKM);
2. Unit Kerja Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dibawahi oleh *Corporate Communication Department Head* yang bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dengan memperhatikan pentingnya menghindari benturan kepentingan pada pegawai sebagaimana tercantum pada POJK No. 6/POJK.07/2022 Pasal 5.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT KERJA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

1. Memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai MUF mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat;
2. Mengkoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan MUF terhadap ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan;
3. Berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan MUF terhadap ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan;
4. Melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat; dan
5. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT KERJA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

MUF menyadari, untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, maka Perusahaan salah satunya harus mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Karena itu, MUF berupaya menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal guna meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tertanggal 14 April 2022 perihal "Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan".

MEMBERSHIP OF WORK UNITS AND OFFICERS IN CHARGE FOR CONSUMER AND COMMUNITY PROTECTION

1. Corporate Secretary Division Head/Corporate Secretary Deputy Division Head is appointed as the person in charge of the Consumer and Community Protection Implementation Work Unit (UK PKM);
2. The Consumer and Community Protection Work Unit is managed by the Corporate Communication Department Head who acts as the Implementing Coordinator for Consumer and Community Protection by taking into account the importance of avoiding conflicts of interest with employees as stated in POJK No. 6/POJK.07/2022 Article 5.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER AND COMMUNITY PROTECTION WORK UNIT

1. Provide socialization to all MUF employees regarding consumer and community protection;
2. Coordinate the planning process and implementation of MUF's compliance with the provisions concerning Consumer and Community Protection in the financial services sector;
3. Coordinate with related units for monitoring and evaluating the implementation of MUF's compliance with the provisions concerning Consumer and Community Protection in the financial services sector;
4. Report to the Board of Directors regarding the implementation of Consumer and Community Protection and provide recommendations for improvement and development of Consumer and Community Protection; And
5. Coordinate the preparation and submission of reports related to Consumer and Community Protection in the financial services sector in accordance with statutory provisions in the financial services sector.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER AND COMMUNITY PROTECTION WORK UNIT

MUF realizes that for creating a financial system that grows in a sustainable and stable manner, the Company must be able to protect the interests of consumers and society. Therefore, MUF seeks to create a reliable consumer protection system to increase consumer and community empowerment as mandated by Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.07/2022 dated 14 April 2022 concerning "Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector".

MUF telah membentuk unit kerja dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang menetapkan *Corporate Secretary Division Head/Corporate Secretary Deputy Division Head* ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Unit Kerja Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat (UK PKM). Hal ini tertuang secara resmi dan tertulis dalam Surat Keputusan Direksi No.006/SK-DIR/MUF/X/2022.

Tahun 2022, Unit Kerja Perlindungan Konsumen dan Masyarakat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

a. Memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai MUF mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat;
b. Mengkoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan MUF terhadap ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan;
c. Berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan MUF terhadap ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan;
d. Melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, seta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan perlindungan konsumen;
e. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

MUF memiliki Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pejabat Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

MUF has formed a work unit and appointed an official responsible for Consumer and Community Protection who appointed the Corporate Secretary Division Head/ Corporate Secretary Deputy Division Head appointed as the person in charge of the Work Unit for Implementing Consumer and Community Protection (UK PKM). This is stated officially and written in the Decree of the Board of Directors No.006/SK-DIR/MUF/X/2022.

In 2022, the Consumer and Community Protection Work Unit has carried out its duties and responsibilities as follows:

a. Provide the socialization to all MUF Employees regarding Consumer and Community Protection;
b. Coordinate the planning process and implementation of MUF's compliance with the provisions concerning Consumer and Community Protection in the financial services sector;
c. Coordinate with related units for monitoring and evaluating the implementation of MUF's compliance with provisions regarding Consumer and Community Protection in the financial services sector;
d. Report to the Board of Directors regarding the implementation of Consumer and Community Protection, as well as provide recommendations for consumer improvement and protection;
e. Coordinate the preparation and submission of reports related to Consumer and Community Protection in the financial services sector in accordance with statutory provisions in the financial services sector.

CORPORATE SECRETARY

MUF has a Corporate Secretary who functions as a liaison between the Company and Shareholders and other Stakeholders, as well as ensuring the Company's compliance with laws and regulations.

PARTIES APPOINTING AND DISMISSING CORPORATE SECRETARY OFFICERS

Corporate Secretary officers are appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY PROFILE

Nama Name	Zakaria Halim
Jabatan Position	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Menjabat sejak Served since	21 Januari 2015 January 21, 2015
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	53 tahun 53 Years Old
Domisili Domicile	Tangerang Selatan Banten South Tangerang, Banten
Riwayat Pendidikan Educational background	1. (2010) S2 Prasetiya Business School – Strategic Management 2. (1993) S1 Universitas Trisakti – Industrial Engineering
Riwayat Profesi Professional History	1. (2019-sekarang) *Corporate President Office Executive Vice President* – Mandiri Utama Finance 2. (2017-2018) *Corporate President Office Senior Vice President* – Mandiri Utama Finance 3. (2015-2016) *Corporate President Office Division Head* – Mandiri Utama Finance 4. (2013-2014) *Corporate President Office Division Head* – Palma Group 5. (2012-2013) *System Procedure Division Head* – Triputra Agro Persada 6. (2006-2011) *Senior Manager System Procedure & Compliance* – Adira Finance 1. (2019-present) Corporate President Office Executive Vice President – Mandiri Utama Finance 2. (2017-2018) Corporate President Office Senior Vice President – Mandiri Utama Finance 3. (2015-2016) Corporate President Office Division Head – Mandiri Utama Finance 4. (2013-2014) Corporate President Office Division Head – Palma Group 5. (2012-2013) System Procedure Division Head – Triputra Agro Persada 6. (2006-2011) Senior Manager System Procedure & Compliance – Adira Finance
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Ada None

Sertifikasi	1. Sertifikasi Dasar Pembiayaan – Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia – 2016 2. Sertifikasi Keahlian Pembiayaan – Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia – 2018 3. Sertifikat OJK - Sosialisasi Peraturan Perusahaan – OJK - 2019 4. Sertifikat OJK - Sosialisasi SEOJK No. 15 Tahun 2019 – OJK 2019 5. Profesional Coach Indonesia – The Coach Indonesia - PCPP Batch 67 – 2019 6. Sertifikat Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Perusahaan Pembiayaan Batch 2 – APPI – 2019 7. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan 2020 – APPI – 2019 8. Seminar International Multifinance IndonesiaThe Opportunities & Challenges – APPI - 2019 9. Seminar *Online* Strategi *Multifinance* Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia – APPI – 2020 10. Seminar *Online Multifinance Road to Recovery* – APPI – 2020 11. Seminar *Online Multifinance* 2021 Bertumbuh di Tengah Pandemi – APPI – 2021 12. Sertifikat OJK Webinar - Tantangan & Strategi Penerapan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi – OJK – 2021 13. Sertifikat Program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan – BSMR – 2021 14. Sertifikat OJK *Webinar* - Kesiapan SDM SJK Menyongsong Tahun 2022 – OJK - 2021 1. Funding Basic Certification – Indonesian Financing Company Certification – 2016 2. Financing Expertise Certification - Indonesian Financing Company Certification - 2018 3. OJK Certificate - Dissemination of Company Regulations - OJK - 2019 4. OJK Certificate - Socialization of SEOJK No. 15 of 2019 – OJK 2019 5. Profesional Coach Indonesia – The Coach Indonesia - PCPP Batch 67 – 2019 6. Certificate of Implementation of Sustainable Finance for Batch 2 Financing Companies – APPI – 2019 7. National Seminar on Opportunities and Challenges 2020 – APPI – 2019 8. Seminar on International Multifinance Indonesia The Opportunities & Challenges – APPI - 2019 9. Online Seminar on Multifinance Strategies to Survive Amid Indonesia's Economic Recession – APPI – 2020 10. Online Multifinance Road to Recovery Seminar – APPI – 2020 11. Multifinance Online Seminar 2021 Growing in the Middle of a Pandemic – APPI – 2021 12. Webinar OJK Certificate - Challenges & Strategies for Implementing Credit and Financing Restructuring in the Context of Economic Recovery – OJK – 2021 13. Risk Management Certification Executive Program Certificate for Financing Companies – BSMR – 2021 14. OJK Webinar Certificate - Readiness of FSS Human Resources for 2022 – OJK - 2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Mengatur dan melaksanakan rapat Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite yang di bawah Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Hasil pelaksanaan rapat didokumentasikan dalam bentuk risalah *meeting* per rapat dan telah ditandatangani lengkap untuk ditindaklanjuti pada rapat berikutnya sesuai dengan hasil rapat. Apabila hasil pelaksanaan rapat bersifat keputusan, maka keputusan telah dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan POJK yang berlaku.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY

Organize and carry out meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and committees under the directors and board of commissioners in accordance with OJK Regulation No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies. The results of the meeting are documented in the form of minutes of meetings per meeting and have been signed in full to be followed up at the next meeting in accordance with the results of the meeting. If the outcome of the meeting is in the form of a decision, then the decision has been made in writing in accordance with the applicable POJK provisions.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY ORGANIZATIONAL STRUCTURE

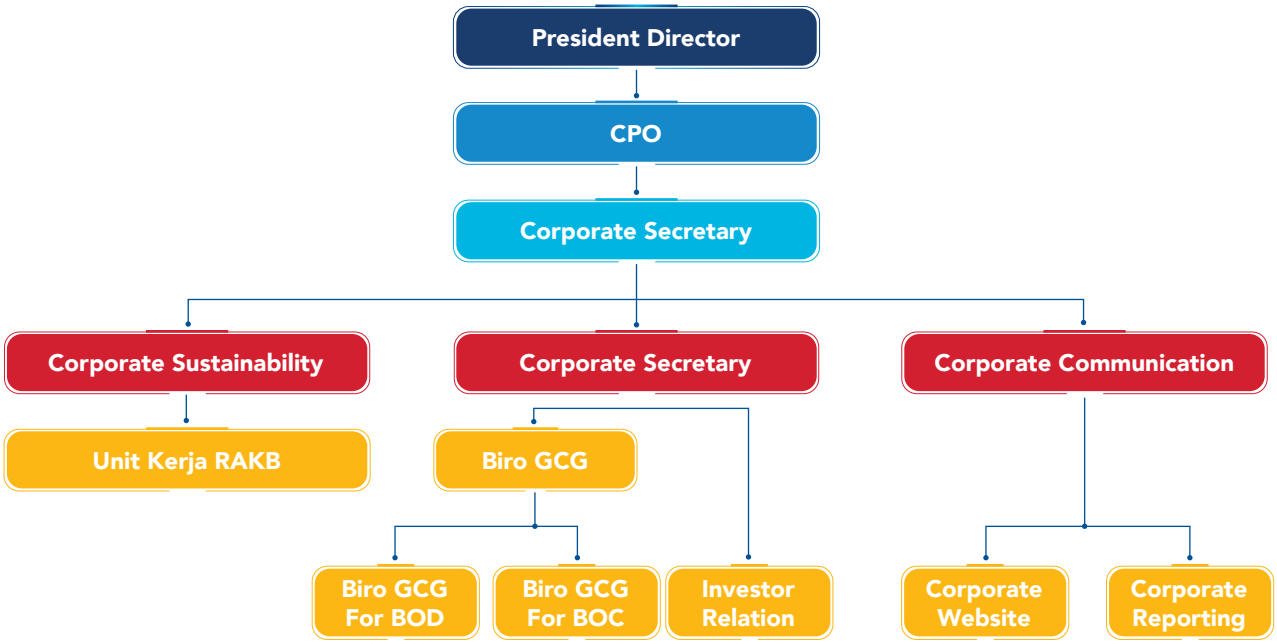

STRUKTUR ORGAN DAN JUMLAH KARYAWAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Berikut disampaikan struktur organisasi Sekretaris Perusahaan yang menggambarkan fungsi dan tugasnya.

Per 31 Desember 2022, dibawah Sekretaris Perusahaan terdapat 8 (delapan) karyawan yang bertugas pada fungsi-fungsi seperti yang telah dijelaskan pada bagan di atas.

ORGAN STRUCTURE AND TOTAL EMPLOYEES OF CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is directly responsible to the President Director. The following is the organizational structure of the Corporate Secretary which describes its functions and duties.

As of December 31, 2022, under the Corporate Secretary there is 8 (eight) employees in charge of the functions as described in the chart above.

Jabatan Position	**Jumlah Personil** Number of Personnel
EVP *Corporate President Office*	1
Deputy Division Head	1
Manager	2
Assistant Manager	2
Section Head	2
Jumlah Total	**8**

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Perusahaan mengikutsertakan personel Sekretaris Perusahaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi, untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Company includes Corporate Secretary personnel in competency development activities, to support the implementation of the duties of the Corporate Secretary.

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/ Tanggal** Place/ Date	**Penyelenggara** Organizer
Zakaria Halim	Dapat dilihat pada profil Sekretaris Perusahaan Can be seen on the profile of the Corporate Secretary			
Ary Andana	*Training* Analisis Laporan Keuangan Industri Industry Financial Report Analysis Training	Analisis Keuangan pada Perusahaan Pembiayaan Financial Analysis on Financing Companies	*Online*	Mandiri University
	Webinar PPATK PPATK Webinar	1. Tren dan Tantangan Penerapan Program APU PPT pada Industri Keuangan Non-Bank - Perusahaan Pembiayaan di Era Digital 2. Mitigasi Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Era Ekonomi Digital 1. Trends and Challenges of Implementing the APU PPT Program in the Non-Bank Financial Industry - Financing Companies in the Digital Age 2. Mitigating the Risk of Money Laundering and Terrorism Financing in the Digital Economy Era	*Offline*	*Compliance* – APU PPT Mandiri Utama Finance
	Idea Talk Volume 2	*Toward Financial Stability Through the use of Digital Technology, ESG, and Green Economy*	*Online*	OJK FSA
	Penerapan GCG untuk Industri Keuangan GCG Implementation for the Financial Industry	GCG di Industri Keuangan GCG in The Financial Industry	*Online*	IICG
G. Guruh Perbowo	*Training* Analisis Laporan Keuangan Industri Industry Financial Report Analysis Training	Analisis Keuangan pada Perusahaan Pembiayaan Financial Analysis on Financing Companies	*Online*	
	Penerapan GCG untuk Industri Keuangan GCG Implementation for the Financial Industry	GCG di Industri Keuangan GCG in the Financial Industry	*Online*	IICG
	Idea Talk Volume 2	*Toward Financial Stability Through the use of Digital Technology, ESG, and Green Economy*	*Online*	OJK

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/ Tanggal** Place/ Date	**Penyelenggara** Organizer
Maman Surahman	*Training* Analisis Laporan Keuangan Industri Industry Financial Report Analysis Training	Analisis Keuangan pada Perusahaan Pembiayaan Financial Analysis on Financing Companies	*Online*	
	Webinar PPATK PPATK Webinar	1. Tren dan Tantangan Penerapan Program APU PPT pada Industri Keuangan Non-Bank - Perusahaan Pembiayaan di Era Digital 2. Mitigasi Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Era Ekonomi Digital 1. Trends and Challenges of Implementing the APU PPT Program in the Non-Bank Financial Industry - Financing Companies in the Digital Age 2. Mitigating the Risk of Money Laundering and Financing of Terrorism in the Digital Economy Era	*Offline*	Compliance – APU PPT Mandiri Utama Finance
	Private MC Session	MC	*Offline*	Bicara itu Mudah Talk is Easy
	Pelatihan Komunikasi Efektif, Pembuatan Vlog & Mengelola Aset Digital Effective Communication Training, Blogging and Managing Digital Assets	Komunikasi efektif, pembuatan Vlog & Mengelola Aset Digital Effective communication, blogging and managing digital assets	*Hybrid*	Dreya Communication
	Training Penerapan Corsec untuk Industri Keuangan Corsec Implementation Training for the Financial Industry		*Online*	
	Penerapan GCG untuk Industri Keuangan GCG Implementation for the Financial Industry	GCG di Industri Keuangan GCG in the Financial Industry	*Online*	IICG
	Idea Talk Volume 2	*Toward Financial Stability Through the use of Digital Technology, ESG, and Green Economy*	*Online*	OJK

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/ Tanggal** Place/ Date	**Penyelenggara** Organizer
Pamela Oktaviani	*Webinar* PPATK PPATK Webinar	1. Tren dan Tantangan Penerapan Program APU PPT pada Industri Keuangan Non-Bank - Perusahaan Pembiayaan di Era Digital 2. Mitigasi Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Era Ekonomi Digital 1. Trends and Challenges of Implementing the APU PPT Program in the Non-Bank Financial Industry - Financing Companies in the Digital Age 2. Mitigating the Risk of Money Laundering and Terrorism Financing in the Digital Economy Era	*Offline*	Compliance – APU PPT Mandiri Utama Finance
Elga Dina	*Training* Analisis Laporan Keuangan Industri Industry Financial Report Analysis Training	Analisis Keuangan pada Perusahaan Pembiayaan Financial Analysis on Financing Companies	*Online*	
	Webinar PPATK PPATK Webinar	1. Tren dan Tantangan Penerapan Program APU PPT pada Industri Keuangan Non-Bank - Perusahaan Pembiayaan di Era Digital 2. Mitigasi Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Era Ekonomi Digital 1. Trends and Challenges of Implementing the APU PPT Program in the Non-Bank Financial Industry - Financing Companies in the Digital Age 2. Mitigating the Risk of Money Laundering and Terrorism Financing in the Digital Economy Era	*Offline*	Compliance – APU PPT Mandiri Utama Finance
	Private MC Session	MC	*Offline*	Bicara itu Mudah Talk is Easy
	Penerapan GCG untuk Industri Keuangan GCG Implementation for the Financial Industry	GCG di Industri Keuangan GCG in the Financial Industry	*Online*	IICG
	Idea Talk Volume 2	*Toward Financial Stability Through the use of Digital Technology, ESG, and Green Economy*	*Online*	OJK

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/ Tanggal** Place/ Date	**Penyelenggara** Organizer
Soraya Moudina	*Training* Analisis Laporan Keuangan Industri Industry Financial Report Analysis Training	Analisis Keuangan pada Perusahaan Pembiayaan Financial Analysis on Financing Companies	*Online*	Mandiri University
	Private MC Session	MC	*Offline*	Bicara itu Mudah Talk is Easy
	Penerapan GCG untuk Industri Keuangan GCG Implementation for the Financial Industry	GCG di Industri Keuangan GCG in the Financial Industry	*Online*	IICG
	Idea Talk Volume 2	*Toward Financial Stability Through the use of Digital Technology, ESG, and Green Economy*	*Online*	OJK
Desi Purnamasari	Pelatihan Komunikasi Efektif, Pembuatan Vlog & Mengelola Aset Digital Effective Communication Training, Blogging and Managing Digital Assets	Komunikasi efektif, pembuatan Vlog & Mengelola Aset Digital Effective communication, blogging and managing digital assets	*Hybrid*	Dreya Communication

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2022

Di sepanjang tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan aktivitas/kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsi Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, RUPS dan Komite-Komite di bawah Koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* ke Pemegang Saham.
3. Menindaklanjuti setiap keputusan rapat kepada pihak terkait.
4. Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021.
5. Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda Persetujuan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Bapak Abdul Ghofarrozin.
6. Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

A BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY OF 2022

Throughout 2022 the Corporate Secretary has carried out activities/activities in the framework of carrying out the duties, responsibilities and functions of the Corporate Secretary, as follows:

1. Organizing meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, GMS and Committees under the Coordination of the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Delivering unaudited financial reports to Shareholders.
3. Follow up every meeting decision to related parties.
4. Carrying out the Annual General Meeting of Shareholders for the 2021 Fiscal Year.
5. Conducting an Extraordinary General Meeting of Shareholders with the agenda of Approving the Appointment of the Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board, Mr. Abdul Ghofarrozin.
6. Carrying out the Extraordinary General Meeting of Shareholders with the agenda of Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dibentuk dengan tujuan memberikan pendapat profesional, independen dan objektif kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris terkait aktivitas dan operasi Perusahaan dengan meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi guna memastikan bahwa kegiatan operasional sudah berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan.

Divisi Audit Internal membantu organisasi MUF mencapai tujuannya melalui aktivitas internal audit (*assurance* dan *consulting*) dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas *internal control*, penerapan *risk management* dan proses *governance* dalam organisasi MUF.

PIAGAM AUDIT INTERN

Perusahaan telah mengesahkan Piagam Audit Internal terbaru pada 1 Desember 2021 yang telah disetujui oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. Piagam Audit Internal berisi tentang visi, misi, fungsi, kedudukan dalam organisasi, ruang lingkup, kode etik profesi, aktivitas audit internal, investigasi dan *quality assurance*.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Pejabat atau Kepala Satuan Kerja Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

PEJABAT SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL DAN DASAR PENGANGKATAN

Di tahun 2022, Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perusahaan dijabat oleh :

INTERNAL AUDIT WORK UNIT

The Internal Audit Work Unit (SKAI) was formed with the aim of providing professional, independent and objective opinions to the President Director and the Board of Commissioners regarding the Company's activities and operations by improving the integrated control function to ensure that operational activities are running well so as to increase added value for the Company .

The Internal Audit Division assists the MUF organization in achieving its goals through internal audit activities (assurance and consulting) and investigative activities in order to provide an independent assessment of internal control, risk management implementation and governance processes within the MUF organization.

INTERNAL AUDIT CHARTER

The Company ratified the latest internal audit charter on December 1, 2021 which was approved by the President Commisioner and President Director. The internal audit charter contains the vision, mission, function, position in the organization, scope, professional Code of Conducts, internal audit activities, investigations and quality assurance..

PARTIES APPOINTING AND DISMISSING HEAD OF INTERNAL AUDIT WORK UNIT

The official or head of the internal audit work unit was appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

INTERNAL AUDIT WORK UNIT OFFICIALS AND APPOINTMENT BASIS

In 2022, the Head of the Company's Internal Audit Work Unit was held by :

Nama Name	Deddy Zulfachrie
Jabatan Position	Kepala Satuan Kerja Audit Internal Head of Internal Audit Work Unit
Menjabat sejak Served since	Menjabat sejak: 1 Oktober 2020 Served since: October 1, 2020
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	56 tahun 56 Years old

Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Prof Dr Moestopo, 1998 Bachelor of Management Economics, Prof. Dr. Moestopo University, 1998
Riwayat Profesi	1. (2018-2020) *Lead Auditor* pada Unit Kerja *Wholesale & Corporate Center Audit Group*, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2. (2016–2018) *Lead Auditor* pada Unit Kerja Retail Audit Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3. (2015–2016) *Department Head Unit* Kerja Internal Audit, PT Mandiri Tunas Finance 4. (2008–2015) *Senior Auditor* pada Unit Kerja Retail Audit Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 5. (2004–2008) *Junior Manager* pada Unit Kerja Kartu Kredit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6. (1998-2004) Senior Pelaksana pada Unit Kerja *Clearing & Settlement*, PT Bank Mandiri (Persero) 7. (1990–1998) Pelaksana pada Unit Kerja Kredit, Dana/Kas, Valuta Asing, Pengawasan Internal, Accounting, PT Bank Dagang Negara. 1. (2018-2020) Lead Auditor in Work Unit Wholesale & Corporate Center Audit Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2. (2016-2018) Lead Auditor in the Retail Audit Group Work Unit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3. (2015-2016) Department Head of Internal Audit Work Unit, PT Mandiri Tunas Finance 4. (2008-2015) Senior Auditor in the Retail Audit Group Work Unit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 5. (2004-2008) Junior Manager in the Credit Card Work Unit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6. (1998-2004) Senior Implementing in the Clearing & Settlement Work Unit, PT Bank Mandiri (Persero) 7. (1990-1998) Implementers in Credit, Funds/Cash, Foreign Currency, Internal Supervision, Accounting, PT Bank Dagang Negara.
Rangkap Jabatan Concurrent position	-
Sertifikasi Certification	1. Qualified Internal Auditor (QIA), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), (2010) 2. Sertifikasi Profesi sebagai Auditor Internal, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, (2010) 3. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, (2016) 4. Certified Fraud Examiner (CFE), Association of Certified Fraud Examiners, (2013). 1. Qualified Internal Auditor (QIA), Internal Audit Education Foundation (YPIA), (2010) 2. Professional Certification as an Internal Auditor, National Professional Certification Agency, (2010) 3. Level 2 Risk Management Certification, National Professional Certification Agency, (2016) 4. Certified Fraud Examiner (CFE), Association of Certified Fraud Examiners, (2013).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Tugas Satuan Kerja Audit Internal

Divisi Audit Internal membantu organisasi MUF mencapai tujuannya melalui aktivitas internal audit (*assurance* dan *consulting)* dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas *internal control*, penerapan *risk management* dan proses *governance* dalam organisasi MUF.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT WORK UNITS

Internal Audit Work Unit Duties

The Internal Audit Division assists the MUF organization in achieving its goals through internal audit activities (assurance and consulting) and investigative activities in order to provide an independent assessment of internal control, risk management implementation and governance processes within the MUF organization.

Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal

1. Menyusun Rencana Audit Tahunan atau *Annual Audit Plan* dan menyampaikan rencana tersebut kepada Direktur Utama dan Komite Audit untuk mendapat persetujuan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Rencana Audit Tahunan yang telah mendapatkan persetujuan selanjutnya dilaporkan kepada Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi dengan tetap mengacu pada ketentuan pelaksanaan audit dalam POJK/SEOJK yang mengatur Perusahaan Pembiayaan dan Unit Usaha Syariah, serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
3. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas hasil audit internal kepada Manajemen.
4. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi kegiatan dan meningkatkan kualitas Internal Audit.
5. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan melakukan monitoring tindak lanjut hasil aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
6. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
7. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.
8. Menyampaikan hasil audit internal maupun eksternal beserta tindak lanjutnya kepada SKAIT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam rangka Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.

Responsibilities of the Internal Audit Work Unit

1. Prepare an Annual Audit Plan and submit the plan to the President Director and the Audit Committee for approval as part of the Company's Work Plan and Budget (RKAP). The Annual Audit Plan that has received approval is then reported to the Integrated Internal Audit Work Unit (SKAIT) of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Plan and carry out Internal Audit activities with an emphasis on areas/activities that have a high risk while still referring to the audit implementation provisions in POJK/SEOJK governing Financing Companies and Sharia Business Units, as well as evaluating existing procedures/control systems to gain confidence that the objectives and the Company's goals can be achieved optimally and sustainably.
3. Carry out steps in order to gather information (investigation), report, and submit recommendations/conclusions on the results of internal audits to Management.
4. Develop and run programs to evaluate activities and improve the quality of Internal Audit.
5. Provide recommendations on audit results and monitor follow-up on the results of internal audit activities and investigative activities.
6. Cooperate with the Audit Committee in carrying out the oversight function.
7. Coordinating its activities with external audit activities and other assurance provider units/functions, so that comprehensive and optimal audit results can be achieved. Coordination can be carried out, among others, through periodic meetings to discuss matters deemed important to both parties.
8. Delivering the results of internal and external audits and their follow-up actions to SKAIT of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, within the framework of the Integrated Internal Audit Work Unit.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTERNAL AUDIT WORK UNIT

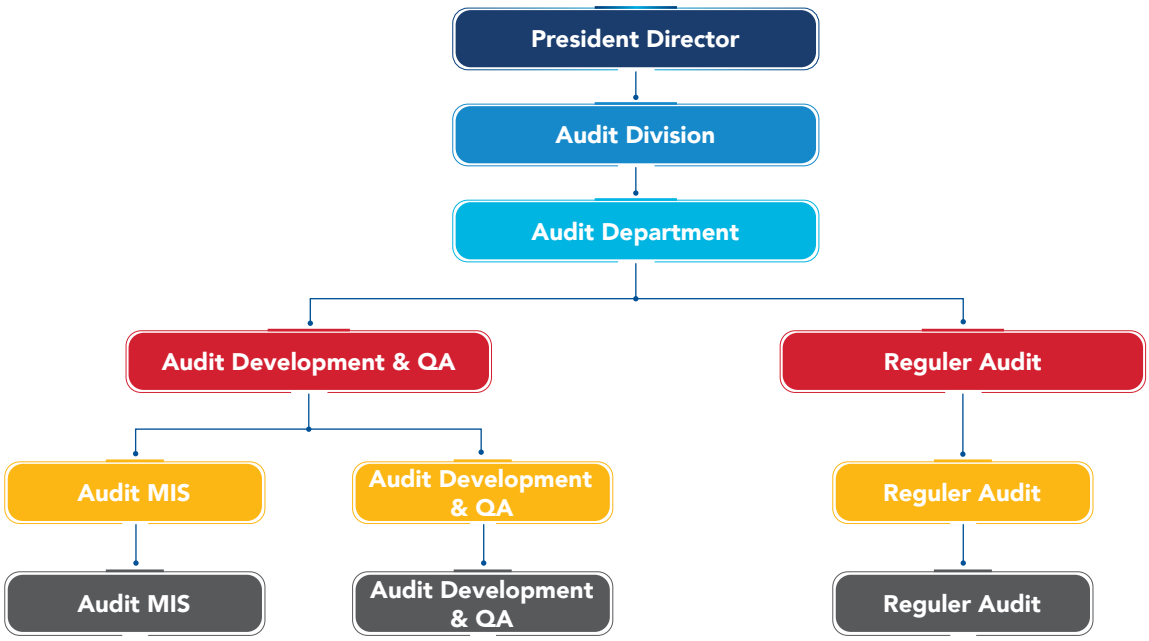

STRUKTUR ORGAN DAN JUMLAH KARYAWAN SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Berikut disampaikan struktur organisasi SKAI yang menggambarkan fungsi dan tugasnya.

Per 31 Desember 2022, SKAI memiliki 24 (dua puluh empat) karyawan yang bertugas pada fungsi-fungsi seperti yang telah dijelaskan pada bagan di atas.

ORGAN STRUCTURE AND TOTAL EMPLOYEES OF INTERNAL AUDIT WORK UNITS

SKAI is responsible directly to the President Director. The following is a SKAI organizational structure that describes its functions and duties.

As of December 31, 2022, SKAI has 24 (twenty four) employees on duty in the functions as described in the chart above.

Jabatan Position	**Jumlah Personil** Number of Personnel
Kepala Satuan Kerja Audit Internal | Head of Internal Audit Work Unit	1
Manager Audit Internal | Internal Audit Manager	1
Assistant Manager Audit Internal	2
Section Head Audit Internal	3
Staff Audit Internal	17
Total	**24**

KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI PROFESI

Dalam rangka terus meningkatkan mutu dan kompetensi auditor internal, Perusahaan melakukan program program sertifikasi. Daftar karyawan SKAI yang telah mengikuti program sertifikasi adalah sebagai berikut:

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND CERTIFICATION

In order to continue to improve the quality and competence of internal auditors, the Company conducts a certification program. The SKAI employee list that has participated in the certification program is as follows:

Level Sertifikasi Certification Level	**Jumlah Pemegang Sertifikasi** Total Certification Holders	**Persentase** Percentage
Sertifikasi Dasar Pembiayaan Funding Basic Certification	2	8%

RAPAT SKAI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI juga mengadakan rapat bersama Direksi dan rapat bersama Dewan Komisaris/Komite Audit. Sepanjang tahun 2022, SKAI mengadakan rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris/Komite Audit sebanyak 7 kali.

SKAI MEETING

In carrying out the duties and responsibilities, SKAI also holds meetings with the Board of Directors and joint meetings with the Board of Commissioners/Audit Committee. Throughout 2022, SKAI held 7 meetings with the Board of Directors and the Board of Commissioners/ Audit Committee.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk meningkatkan kompetensi dalam hal pengetahuan dan pemahaman dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi, sepanjang 2022 SKAI mengikuti seminar, pendidikan dan/atau pelatihan. Program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan SKAI di sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

To improve competence in terms of knowledge and understanding in helping the implementation of the directors' tasks, throughout 2022 SKAI attended seminars, education and/or training. The competency development program followed by SKAI employees throughout 2022 is as follows:

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Educational and Training Materials	**Tempat/ Tanggal** Place/ Date	**Penyelenggara** Organizer
Manager Audit Internal Internal Audit Manager	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Funding Basic Certification	*Online* 18 - 25 April 2022 Online April 18 - 25, 2022	APPI
Semua karyawan Audit Internal All Internal Audit employees	*Workshop*	*Business Judgement Rules* dalam Sudut Pandang Praktisi Hukum Business Judgment Rules from the Perspective of a Legal Practitioner	*Online* 7 Juni 2022 Online June 7, 2022	SKAI BMRI
Manager dan 1 *Assistant Manager* Audit Internal Manager and 1 Assistant Manager of Internal Audit	*Training*	Praktik *Good Corporate Governance* Good Corporate Governance Practices	*Online* 14 - 15 Juli 2022 Online July 14-15, 2022	HC MUF
Semua karyawan Audit Internal All Internal Audit employees	*Workshop*	Aspek Hukum dalam Investigasi dan Studi Kasus Legal Aspects in Investigations and Case Studies	*Online* 29 November 2022 Online November 29, 2022	SKAI BMRI

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Educational and Training Materials	**Tempat/ Tanggal** Place/ Date	**Penyelenggara** Organizer
Semua karyawan Audit Internal All Internal Audit employees	*Sharing Session*	Hasil Audit BMRI BMRI Audit Results	Kantor MUF Cideng 2 Desember 2022 MUF Cideng Office December 2, 2022	Audit MUF MUF audits
Semua karyawan Audit Internal All Internal Audit employees	*Sharing Session*	Ruang Lingkup Audit Audit Scope	*Online* 5 Desember 2022 Online December 5, 2022	Audit MUF MUF audits
Semua karyawan Audit Internal All Internal Audit employees	*Workshop*	*Strengthening Cyber Security to Prevent Cyber Threat in Financial Industry*	*Online* 6 Desember 2022 Online December 6, 2022	SKAI BMRI
Semua karyawan Audit Internal All Internal Audit employees	*Sharing Session*	Evaluasi Internal Audit tahun 2022 Evaluation of Internal Audit in 2022	*Online* 7 Desember 2022 Online December 7, 2022	Audit MUF MUF audits
Semua karyawan Audit Internal All Internal Audit employees	*Sharing Session*	Kertas Kerja Pemeriksaan Examination Working Paper	*Online* 8-9 Desember 2022 Online December 8-9, 2022	Audit MUF MUF audits
Semua karyawan Audit Internal All Internal Audit employees	*Sharing Session*	Proses Bisnis *Credit* Credit Business Process	*Online* 12 Desember 2022 Online December 12, 2022	Audit MUF MUF audits
Semua karyawan Audit Internal All Internal Audit employees	*Sharing Session*	Sistem yang ada di MUF The existing system at MUF	*Online* 14 Desember 2022 Online December 14, 2022	Audit MUF MUF audits
Semua karyawan Audit Internal All Internal Audit employees	*Sharing Session*	Proses *Operation* Process Operations	*Online* 15 Desember 2022 Online December 15, 2022	Audit MUF MUF audits
Semua karyawan Audit Internal All Internal Audit employees	*Sharing Session*	Proses Bisnis *Collection* Collections Business Process	*Online* 15 Desember 2022 Online December 15, 2022	Audit MUF MUF audits

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Audit Internal Perusahaan telah melaksanakan sebanyak 70 (61 Cabang, 3 *Recovery Area*, 2 *Area Inventory* dan 4 *review* tematik) penugasan dari 66 (59 Cabang, 3 *Recovery Area*, 1 *Inventory Area* dan 3 *review* tematik) target penugasan atau 106,06%. Dari 70 penugasan audit tersebut, sebanyak 39 penugasan dilaksanakan secara *offline*. Jumlah Cabang yang diperiksa mencakup 94% dari jumlah Kantor Cabang dan KC-US Perusahaan yang telah mendapat izin sampai dengan akhir Desember 2021, yaitu 65 Cabang dikarenakan 1 Cabang baru *live* pada tahun 2021 dan 3 Cabang memiliki audit rating yang baik pada tahun 2021, dengan cakupan Pembiayaan Debitur, Pengelolaan Dokumen Jaminan, Penanganan Debitur, Pelaksanaan Program Restrukturisasi COVID-19, Program Restrukturisasi Berulang (Re-Restrukturisasi) COVID-19, Penarikan Unit, Pengajuan Biaya Tarik/Tebus, Penerimaan dan Administrasi Unit Tarikan, Penjualan dan Pengeluaran Unit Tarikan, Penanganan Layanan Pengaduan Konsumen, APU PPT dan SLIK. Untuk Tahun 2023, Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh penugasan audit secara *offline*.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT WORK UNIT IN 2022

In 2022, the Company's Internal Audit has carried out 70 (61 Branches, 3 Recovery Areas, 2 Inventory Areas and 4 thematic reviews) assignments out of 66 (59 Branches, 3 Recovery Areas, 1 Inventory Area and 3 thematic reviews) assignment targets or 106.06%. Of the 70 audit assignments, 39 were carried out offline. The number of examined branches covers 94% of the Company's number of Branch Offices and KC-US which have received permits until the end of December 2021, namely 65 branches because 1 new branch went live in 2021 and 3 branches have a good audit rating in 2021, with Coverage of Debtor Financing, Management of Collateral Documents, Handling of Debtors, Implementation of the COVID-19 Restructuring Program, COVID-19 Re-Restructuring Program, Withdrawal of Units, Submission of Withdrawal/Redeem Fees, Receipt and Administration of Withdrawal Units, Sales and Withdrawal of Withdrawal Units , Handling of Consumer Complaint Services, APU PPT and SLIK. For 2023, the Company is committed to carrying out all audit assignments offline.

SATUAN KERJA KEPATUHAN

Perusahaan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sebagai unit independen yang membantu pelaksanaan tugas dari Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan Lembaga Pembiayaan seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan, maka hal ini berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Lembaga Pembiayaan. Untuk memitigasi risiko tersebut, maka Lembaga Pembiayaan disamping melakukan upaya kuratif (*ex-post*) juga melakukan berbagai upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*).

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlunya peningkatan peran dan fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan yang memerlukan peran aktif Direksi dan Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan, dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang ditunjuk.

COMPLIANCE WORK UNIT

The Company forms a compliance work unit as an independent unit that helps carry out the duties of the director who oversees the compliance function and is directly responsible to the director who is in charge of the compliance function.

With the increasing complexity of financing institutions along with the development of information technology, globalization and financial market integration, this has an impact on risk exposure faced by financing institutions. To mitigate the risk, the finance institution besides making curative efforts (ex-post) also makes various preventive efforts (ex-anten).

To realize the above, the need for an increase in the role and function of compliance and work units that require the active role of the Board of Directors and Active Supervision of the Board of Commissioners as follows:

1. Directors must foster and realize the implementation of compliance culture at all levels of organization and business activities. Compliance Director in carrying out functions to encourage the creation of compliance culture and the implementation of the implementation of compliance functions, assisted by the appointed compliance work unit.

2. Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan.
3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

2. Directors are required to ensure the implementation of compliance functions.
3. The Board of Commissioners must supervise the implementation of compliance functions.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

Pejabat atau Kepala Satuan Kerja Kepatuhan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

PARTIES WHO LIFT AND DISMISS THE HEAD OF THE COMPLIANCE WORK UNIT

Officials or Head of Compliance Work Unit are appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

PEJABAT SATUAN KERJA KEPATUHAN DAN DASAR PENGANGKATAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SKD/MUF/I/2022 tertanggal 10 Januari 2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Kerja Kepatuhan, Direksi mengangkat *Compliance Division Head / Compliance Deputy Division Head* sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan.

COMPLIANCE WORK UNIT OFFICER AND APPOINTMENT BASIS

Based on Directors Decree No. 001/SKD/MUF/I/2022 dated January 10, 2022 concerning the Establishment and Appointment of the Compliance Work Unit, the Board of Directors appointed the Compliance Division Head/Compliance Deputy Division Head as Head of the Compliance Work Unit.

Nama Name	Roni Masdi
Jabatan Position	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Head of Compliance Work Unit
Menjabat sejak Served since	01 September 2022 September 01, 2022
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	44 Tahun 44 Years
Domisili Domicile	Jakarta Timur, DKI Jakarta East Jakarta, DKI Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Universitas Andalas, 2001 Bachelor of Economics, Development Economics, Andalas University, 2001
Riwayat Profesi Professional History	1. *Compliance Deputy Division Head*, Mandiri Utama Finance, 2022 – Now 2. *Compliance Dept. Head*, Mandiri Utama Finance, 2018 –2022 3. *System, Procedures and Compliance Dept. Head*, Mandiri Utama Finance, 2016 –2017 4. *Policy Department Head*, PT Tri Putra Agro Persada, 2012 – 2015 5. *Community Operation Support Manager*, PT Adira Dinamika Multi Finance, 2010 – 2012 6. *System Procedure and Compliance Deputy Department Head*, PT Adira Dinamika Multi Finance, 2009 – 2010 7. *Insurance Support Section Head*, PT Adira Dinamika Multi Finance, 2007 – 2008 8. *Operation Development Section Head*, PT. Olympindo Multi Finance, 2003 – 2007 9. *Management Trainee*, PT. Olympindo Multi Finance, 2003 – 2003 10. *Administration Staff*, CV Karya Mulia Abadi, 2001 - 2002

Rangkap Jabatan Double job	-
Sertifikasi Certification	1. Sertifikat Dasar Manajerial Perusahaan Pembiayaan (APPI) 2. Sertifikat Pembiayaan Syariah 1. Financing Company Managerial Fundamental Certificate (APPI) 2. Sharia Financing Certificate

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan menjalankan fungsi kepatuhan, dan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penyediaan, pengkinian dan mensosialisasikan atas ketentuan OJK yang berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan.
2. Identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan OJK yang berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan dan Pedoman Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Perusahaan.
3. *Reminder* dan *monitoring* atas penyampaian Laporan kepada OJK dan *monitoring* permintaan yang disampaikan oleh OJK serta tindak lanjutnya kepada Pelaksana Fungsi Kepatuhan.
4. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada setiap jenjang organisasi.
5. Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi manajemen risiko kepatuhan.
6. Menjadi anggota komite yang dibentuk oleh Direksi maupun Dewan Komisaris yang berhubungan dengan kepatuhan, mengikuti rapat yang diadakan oleh komite tersebut serta melaporkannya kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
7. Membangun Sistem Informasi kepatuhan.
8. Menjadi petugas penghubung untuk OJK dan pihak otoritas lainnya dan mengkomunikasikan, menyusun dan menyampaikan informasi dari OJK kepada Internal Perusahaan.
9. Pelaporan kinerja kepatuhan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku perusahaan induk turun dalam kerangka Konglomerasi Keuangan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF COMPLIANCE WORK UNITS

The compliance work unit carries out the compliance function, and is grouped as follows:

1. Provision, update and dissemination of OJK provisions that apply to Financing Companies.
2. Identification, measurement, monitoring and control of Compliance Risk with reference to OJK regulations that apply to Financing Companies and Risk Management Guidelines issued by the Company.
3. Reminder and monitoring of Report submission to OJK and monitoring of requests submitted by OJK as well as follow-up to the Compliance Function Executor.
4. Make steps in order to support the creation of a Compliance Culture at every level of the organization.
5. Develop and implement a compliance risk management methodology.
6. Become a member of a committee established by the Board of Directors and Board of Commissioners related to compliance, attend meetings held by the committee and report it to the Director in charge of the Compliance Function.
7. Building a compliance information system.
8. Become a liaison officer for OJK and other authorities and communicate, compile and convey information from OJK to the Company's internal.
9. Compliance performance reporting to the Director in charge of the Compliance Function and including PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the holding Company went down within the framework of the Financial Conglomerate.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA KEPATUHAN

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF COMPLIANCE WORK UNIT

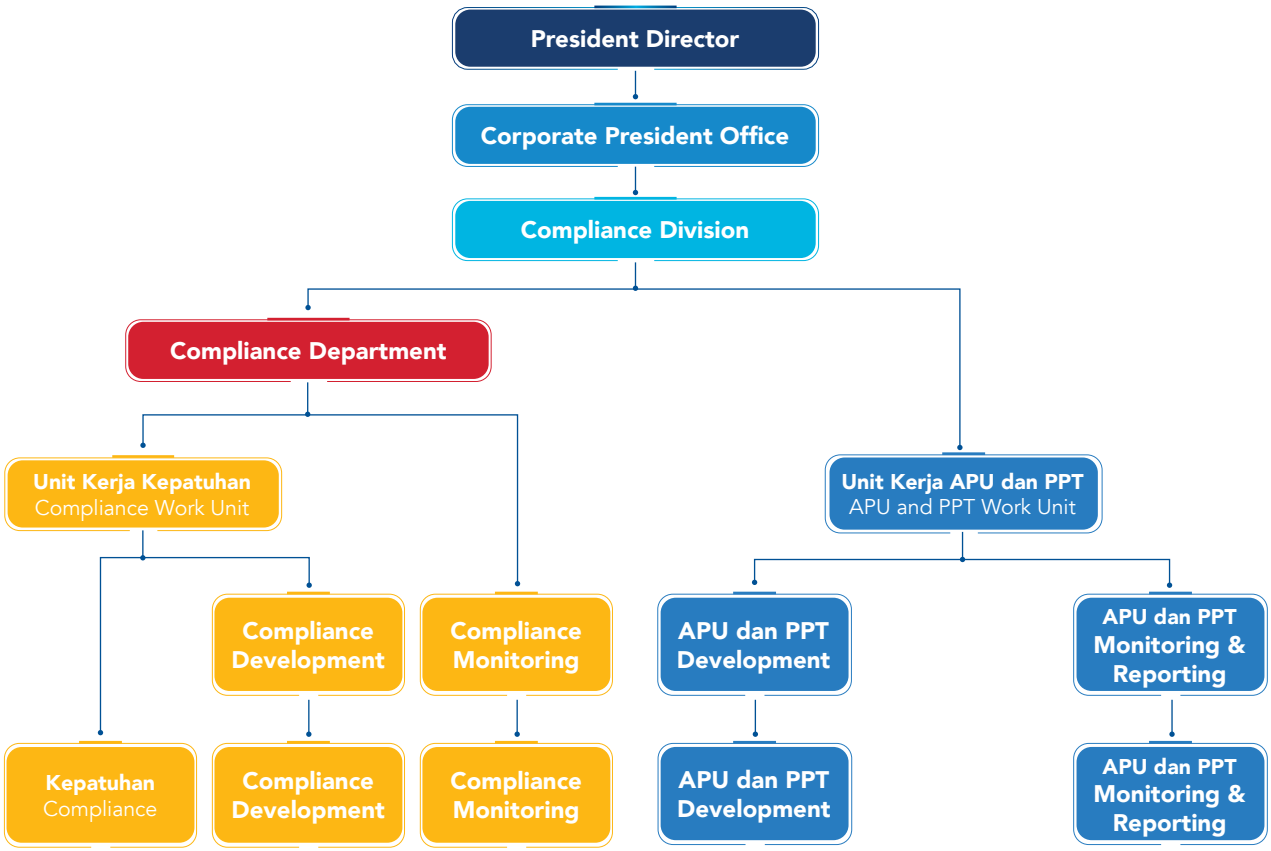

STRUKTUR ORGAN DAN JUMLAH KARYAWAN SATUAN KERJA KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Berikut disampaikan struktur organisasi Satuan Kerja Kepatuhan yang menggambarkan fungsi dan tugasnya.

Per 31 Desember 2022, Satuan Kerja Kepatuhan memiliki 6 (enam) karyawan yang bertugas pada fungsi-fungsi seperti yang telah dijelaskan pada bagan di atas.

ORGAN STRUCTURE AND TOTAL EMPLOYEES OF COMPLIANCE WORK UNITS

The compliance work unit is directly responsible to the President Director. The following is the organizational structure of the compliance work unit that describes its functions and duties.

As of December 31, 2022, the Compliance Work Unit has 6 (six) Employees on duty in the functions as described in the chart above.

Jabatan Position	**Jumlah Personil** Number of personnel
Satuan Kerja Kepatuhan I Compliance Work Unit	1
Manager Satuan Kerja Kepatuhan I Compliance Work Unit Manager	-
Assistant Manager Satuan Kerja Kepatuhan I Compliance Work Unit Assistant Manager	1
Section Head Satuan Kerja Kepatuhan I Section Head of Compliance Work Unit	3
Staff Satuan Kerja Kepatuhan I Compliance Work Unit Staff	1
Jumlah I Amount	**6**

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk meningkatkan kompetensi dalam hal pengetahuan dan pemahaman dalam membantu pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kepatuhan, sepanjang 2022 Satuan Kerja Kepatuhan mengikuti seminar, pendidikan dan/atau pelatihan. Program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Satuan Kerja Kepatuhan di sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

To improve competence in terms of knowledge and understanding in assisting the implementation of the Compliance Work Unit tasks, throughout 2022 Compliance Work Unit attended seminars, education and/or training. Competency Development Program followed by employees of compliance work units throughout 2022 are as follows:

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Zakaria Halim	*Webinar*	PPATK *3rd Legal Forum*: Menyambut Pemberlakuan Pajak Karbon (*Carbon Tax*)" Mewujudkan *Green Economy* Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang pada Pajak Karbon PPATK 3rd Legal Forum: Welcoming the Implementation of Carbon Tax (Carbon Tax) "Creating a Green Economy with Integrity Through Money Laundering Disruption Efforts on Carbon Tax	*Zoom Meeting*, Rabu 6 Maret 2022 Zoom Meeting, Wednesday March 6, 2022	PPATK
	Sosialisasi Socialization	Sistem Manajemen Anti-Suap (SMAP) ISO 37001 dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di Sektor IKNB ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP) and Gratification Control Program (PPG) in the IKNB Sector	*Zoom Meeting* / Kamis, 24 Maret 2022 Zoom Meeting / Thursday, March 24, 2022	OJK
	Webinar	Kegiatan Dukungan 20 Tahun Gerakan APU PPT Indonesia 20 Years Support Activities of the Indonesian APU PPT Movement	*Zoom Meeting* / Rabu, 18 April 2022 Zoom Meeting / Wednesday, April 18, 2022	APPTK
	Webinar	Menuju Kehidupan yang Lebih Bermakna dan Bahagia Towards a More Meaningful and Happier Life	*Zoom Meeting* / Kamis, 21 April 2022 Zoom Meeting / Thursday, April 21, 2022	OJK
	Webinar	Tantangan Peningkatan Kompetensi Penyidik TPPU Di Era Ekonomi Digital Challenges to Increasing the Competence of ML Investigators in the Digital Economy Era	*Zoom Meeting* / Selasa, 24 Mei 2022 Zoom Meeting / Tuesday, 24 May 2022	PPATK
	Webinar	Tren dan Tantangan *Anti-Money Laundering* di Era Digital Trends and Challenges of Anti-Money Laundering in the Digital Age	*Zoom Meeting* / Kamis, 25 Agustus 2022 Zoom meeting / Thursday, 25 August 2022	OJK
	Webinar	Peluang dan Tantangan Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Opportunities and Challenges of the Financial Services Industry in Supporting Battery-Based Electric Motorized Vehicles (KBLBB) Financing	*Zoom Meeting* / Kamis, 17 November 2022 Zoom meeting / Thursday, 17 November 2022	OJK

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Roni Masdi	Sosialisasi Socialization	Aplikasi APOLO OJK/Modul *Self-Assessment* TKS LJNKB APOLO OJK Application / TKS LJNKB Self-Assessment Module	*Zoom Meeting* / Kamis, 27 Januari 2022 Zoom Meeting / Thursday, January 27, 2022	OJK
	Sosialisasi Socialization	Penyesuaian Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah Adjustment of Monthly Reports of Financing Companies and Sharia Financing Companies	*Zoom Meeting* / Kamis, 10 Februari 2022 Zoom Meeting / Thursday, February 10, 2022	OJK
	Webinar	Peluang dan Tantangan Dampak Pemanfaatan Teknologi Baru untuk Penguatan Rezim APU PPT Opportunities and Challenges Impact of Utilizing New Technology to Strengthen the APU PPT Regime	*Zoom Meeting* / Rabu-Kamis, 23-24 Februari 2022 Zoom Meeting / Wednesday-Thursday, February 23-24, 2022	OJK
	Webinar	Tantangan dan Mitigasi Kejahatan serta Peningkatan Keamanan *Cyber* di Industri Jasa Keuangan Challenges and Mitigation of Crime and Enhancement of Cyber Security in the Financial Services Industry	*Zoom Meeting* / Kamis, 10 Maret 2022 Zoom Meeting / Thursday, March 10, 2022	OJK
	Sosialisasi Socialization	APOLO OJK Modul Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan *Self-Assessment* APOLO OJK Health Level Self-Assessment Module of Self-Assessment	*Zoom Meeting* / Rabu, 6 April 2022 Zoom Meeting / Wednesday, April 6, 2022	OJK
	Webinar	*Preventing and Combating Financial Crime in Financial Services Industry*	*Zoom Meeting* / Kamis, 9 Juni 2022 Zoom Meeting / Thursday, June 9, 2022	PPATK
	Webinar	*Anti-Bribery Management System: Experience Though Integrity*	*Zoom Meeting* / Kamis, 16 Juni 2022 Zoom Meeting / Thursday, June 16, 2022	OJK
	Webinar	Peran Digitalisasi dalam Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan The Role of Digitalization in Encouraging Increased Financial Inclusion	*Zoom Meeting* / Kamis, 23 Juni 2022 Zoom Meeting / Thursday, June 23, 2022	OJK

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
	Training	*Skill Up Digital Monitoring Transaction*: Pencegahan dan Pemberantasan *Green Financial Crime* dan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Digital Skill Up Digital Transaction Monitoring: Prevention and Eradication of Green Financial Crime and Money Laundering through Digital Transactions	Zoom *Meeting* / Kamis, 23 Juni 2022 Zoom Meeting/ Thursday, June 23, 2022	BMRI
	Training	Pelatihan Praktik *Good Corporate Governance* Good Corporate Governance Practice Training	*Zoom Meeting* / Kamis-Jumat, 14-15 Juli 2022 Zoom Meeting / Thursday-Friday, July 14-15, 2022	Mandiri Utama Finance
	Sosialisasi Socialization	Peraturan OJK No. 6 / POJK.02 / 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan OJK Regulation No. 6 / POJK.02 / 2022 Concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector	*Zoom Meeting* / Selasa, 9 Agustus 2022 Zoom Meeting / Tuesday, August 9, 2022	OJK
	Training	Analisis Laporan Keuangan Analysis of financial statements	*Zoom Meeting* / Kamis, 25 Agustus 2022 Zoom Meeting / Thursday, August 25, 2022	Mandiri University Group
	Webinar	Perlindungan Konsumen di Era Digital Consumer Protection in the Digital Era	*Zoom Meeting* / Kamis, 6 Oktober 2022 Zoom Meeting / Thursday, October 6, 2022	OJK
	Webinar	Tren dan Tantangan Penerapan Program APU PPT pada Industri Keuangan Non-Bank - Perusahaan Pembiayaan di Era Digital dan Mitigasi Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Era Ekonomi Digital Trends and Challenges of Implementing the APU PPT Program in the Non-Bank Financial Industry - Financing Companies in the Digital Age and Mitigating the Risk of Money Laundering and Terrorism Financing in the Digital Economy Era	*Offline* / Senin, 3 Oktober 2022 Offline / Monday, October 3, 2022	Mandiri Utama Finance

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
	Webinar	Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan melalui Pengembangan IJK yang Sehat, Efisien dan Berintegritas Creating Financial System Stability through the Development of a Healthy, Efficient and Integrity IJK	*Zoom Meeting* / Jumat, 4 November 2022 Zoom Meeting / Friday, November 4, 2022	OJK
	Webinar	Peran Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Inklusi dan Digitalisasi UMKM The Role of the Financial Services Industry in Supporting MSME Inclusion and Digitalization	*Zoom Meeting* / Selasa, 8 November 2022 Zoom Meeting / Tuesday, November 8, 2022	OJK
	Webinar	Peluang dan Tantangan Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Opportunities and Challenges of the Financial Services Industry in Supporting the Financing of Battery-Based Electric Motorized Vehicles (KBLBB)	*Zoom Meeting* / Kamis, 17 November 2022 Zoom Meeting / Thursday, 17 November 2022	OJK
	Webinar	Diseminasi Petunjuk Teknis Operasional untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas Dissemination of Operational Technical Guidelines for Financial Services for Persons with Disabilities	*Zoom Meeting* / Selasa, 6 Desember 2022 Zoom Meeting / Tuesday, December 6, 2022	OJK
	Webinar	Membangun *Personal Branding*: Kunci Sukses dalam Berkarier dan Berkinerja Building Personal Branding: The Key to Success in Career and Performance	*Zoom Meeting* / Kamis, 8 Desember 2022 Zoom Meeting / Thursday, 8 December 2022	OJK
	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Penerapan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Dissemination of Application of National Identity Number as Taxpayer Identification Number	*Zoom Meeting* / Rabu, 21 Desember 2022 Zoom Meeting / Wednesday, 21 December 2022	OJK
M. Harfi Ramdan	*Webinar*	*Big Data Analytics For Money Laundering Detection*	Zoom *Meeting* / Kamis, 10 Februari 2022 Zoom Meeting / Thursday, February 10, 2022	PPATK
	Webinar	Peluang, Tantangan, dan Dampak Pemanfaatan Teknologi Baru untuk Penguatan Rezim APU PPT Opportunities, Challenges, and Impacts of Using New Technology to Strengthen the APU PPT Regime	Zoom *Meeting* / Kamis-Jumat, 23-24 Februari 2022 Zoom Meeting / Thursday-Friday, February 23-24, 2022	OJK

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
	Webinar	Tantangan dan Mitigasi Kejahatan Serta Peningkatan Keamanan Siber di Industri Jasa Keuangan Crime Challenges and Mitigation and Enhancement of Cyber Security in the Financial Services Industry	Zoom *Meeting* / Kamis, 10 Maret 2022 Zoom Meeting / Thursday, March 10, 2022	OJK
	Training	Peningkatan Kemampuan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan pada Transaksi Aset Kripto Increasing the Ability to Analyze Suspicious Financial Transactions in Crypto Asset Transactions	Zoom *Meeting* / Selasa, 22 Maret 2022 Zoom Meeting / Tuesday, March 22, 2022	BMRI
	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Sistem Manajemen Anti-Suap (SMAP) ISO 37001 dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Sektor IKNB Dissemination of ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP) and Gratification Control Program (PPG) for the IKNB Sector	Zoom *Meeting* / Kamis, 24 Maret 2022 Zoom Meeting / Thursday, March 24, 2022	OJK
	Webinar	PPATK 3rd *Legal Forum*"Menyambut Pemberlakuan Pajak Karbon (*Carbon Tax*)": Mewujudkan *Green Economy* Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang pada Pajak Karbon PPATK 3rd Legal Forum"Welcoming the Implementation of Carbon Tax (Carbon Tax)": Realizing Green Economy with Integrity Through Money Laundering Disruption Efforts on Carbon Tax	Zoom *Meeting* / Kamis, 31 Maret 2022 Zoom Meeting / Thursday, March 31, 2022	PPATK
	Webinar	Strategi dan Inovasi dalam Memperkuat Branding Produk Keuangan Syariah Strategi dan Inovasi dlm Memperkuat Branding Produk Keuangan Syariah	Zoom *Meeting* / Kamis, 7 April 2022 Zoom Meeting / Thursday, April 7, 2022	OJK
	Webinar	Menelusuri Jejak *Binary Option* dan *Robot Trading* Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan Tracing the Traces of Illegal Binary Options and Trading Robots, Ensnaring Fraudsters	Zoom *Meeting* / Senin, 18 April 2022 Zoom Meeting / Monday, April 18, 2022	PPATK
	Webinar	Tantangan Peningkatan Kompetensi Penyidik TPPU Di Era Ekonomi Digital Challenges to Increasing the Competence of ML Investigators in the Digital Economy Era	Zoom *Meeting* / Selasa, 24 Mei 2022 Zoom Meeting / Tuesday, May 24, 2022	PPATK
	Webinar	*Preventing & Combating Financial Crime in Financial Services Industry*	Zoom *Meeting* / Kamis, 9 Juni 2022 Zoom Meeting / Thursday, June 9, 2022	OJK

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
	Webinar	*Anti-Bribery Management System Experience Through Integrity Confirmation*	Zoom *Meeting* / Kamis, 16 Juni 2022 Zoom Meeting / Thursday, June 16, 2022	OJK
	Training	*Training Skill Up Digital Monitoring Transaction*	Zoom *Meeting* / Kamis-Jumat, 23-24 Juni 2022 Zoom Meeting / Thursday-Friday, June 23-24 2022	BMRI
	Training	Pelatihan Praktik GCG (*Good Corporate Governance*) GCG (Good Corporate Governance) Practice Training	Zoom *Meeting* / Kamis-Jumat, 14-15 Juli 2022 Zoom Meeting / Thursday-Friday, July 14-15 2022	Mandiri Utama Finance
	Webinar	Tren dan Tantangan Anti-*Money Laundering* di Era Digital Trends and Challenges of Anti-Money Laundering in the Digital Age	Zoom *Meeting* / Kamis, 25 Agustus 2022 Zoom Meeting / Thursday, August 25, 2022	OJK
	Training	Analisis Laporan Keuangan Analysis of financial statements	Zoom *Meeting* / Kamis, 25 Agustus 2022 Zoom Meeting / Thursday, August 25, 2022	Mandiri University
	Training	Program *Virtual Skill Up Training* Mengenai "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Transaksi *Telegrafic Transfer* (TT) dan Transaksi Kustodian" Virtual Skill Up Training Program Regarding "Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes Related to Telegraphic Transfer (TT) Transactions and Custodian Transactions"	Zoom *Meeting* / Selasa, 6 September 2022 Zoom Meeting / Tuesday, September 6, 2022	BMRI
	Training	Pelatihan Tipologi TPPU TPPT bagi Penyedia Jasa Keuangan TPPU TPPT Typology Training for Financial Service Providers	Zoom *Meeting* / Senin-Rabu, 3-5 Oktober 2022 Zoom Meeting / Monday-Wednesday, October 3-5, 2022	PPATK
	Webinar	Keterbukaan Informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) pada Rezim APU PPT Information Disclosure of Beneficial Owners in the APU PPT Regime	Zoom *Meeting* / Kamis-Jumat, 27-28 Oktober 2022 Zoom Meeting / Thursday-Friday, October 27-28, 2022	OJK

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
	Diseminasi Dissemination	Diseminasi Kebijakan dan Regulasi: Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Lintas Batas dan Wilayah Pabean Indonesia Dissemination of Policies and Regulations: Carrying Cash and Other Payment Instruments Across Borders and Indonesian Customs Areas	Zoom *Meeting* / Rabu, 23 November 2022 Zoom Meeting / Wednesday, November 23, 2022	PPATK
	Sosialisasi Socialization	Konvensi Nasional RKKNI Bidang APU PPT SKKNI National Convention on APU PPT	Zoom *Meeting* / Senin, 23 November 2022 Zoom Meeting / Monday, November 23, 2022	OJK
	Webinar	Webinar dalam Rangka Hakordia 2022 - Proaktif dan Kolaboratif Dalam Mencegah Korupsi di Indonesia Webinar in the Context of Hakordia 2022 - Proactive and Collaborative in Preventing Corruption in Indonesia	Zoom *Meeting* / Rabu, 20 Desember 2022 Zoom Meeting / Wednesday, December 20, 2022	OJK
Choirul Dedy K	*Webinar*	Tren dan Tantangan Penerapan Program APU PPT pada Industri Keuangan Non-Bank - Perusahaan Pembiayaan di Era Digital dan Mitigasi Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Era Ekonomi Digital Trends and Challenges of Implementing the APU PPT Program in the Non-Bank Financial Industry - Financing Companies in the Digital Age and Mitigating the Risk of Money Laundering and Terrorism Financing in the Digital Economy Era	*Zoom Meeting* / Senin 3 Oktober 2022 Zoom Meeting / Monday 3 October 2022	Mandiri Utama Finance
	Webinar	Perlindungan Konsumen di Era Digital Consumer Protection in the Digital Age	*Zoom Meeting* / Kamis, 6 Oktober 2022 Zoom Meeting / Thursday, October 6, 2022	OJK
	Webinar	Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan melalui Pengembangan IJK yang Sehat, Efisien dan Berintegritas Creating Financial System Stability through the Development of a Healthy, Efficient and Integrity IJK	*Zoom Meeting* / Jumat, 4 November 2022 Zoom Meeting / Friday, November 4, 2022	OJK
	Webinar	Peran Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Inklusi dan Digitalisasi UMKM The Role of the Financial Services Industry in Supporting MSME Inclusion and Digitalization	*Zoom Meeting* / Selasa, 8 November 2022 Zoom Meeting / Tuesday, November 8, 2022	OJK

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
	Webinar	Peluang dan Tantangan Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Opportunities and Challenges of the Financial Services Industry in Supporting the Financing of Battery-Based Electric Motorized Vehicles (KBLBB)	*Zoom Meeting* / Kamis, 17 November 2022 Zoom Meeting / Thursday, 17 November 2022	OJK
	Webinar	Diseminasi Petunjuk Teknis Operasional untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas Dissemination of Operational Technical Guidelines for Financial Services for Persons with Disabilities	*Zoom Meeting* / Selasa, 6 Desember 2022 Zoom Meeting / Tuesday, December 6, 2022	OJK
	Webinar	Membangun *Personal Branding*: Kunci Sukses dalam Berkarir dan Berkinerja Building Personal Branding: The Key to Success in Career and Performance	*Zoom Meeting* / Kamis, 8 Desember 2022 Zoom Meeting / Thursday, 8 December 2022	OJK
	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Penerapan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Dissemination of Application of National Identity Number as Taxpayer Identification Number	*Zoom Meeting* / Rabu, 21 Desember 2022 Zoom Meeting / Wednesday, 21 December 2022	OJK
Niky Pangesti Ayuningtyas	Sosialisasi Socialization	Aplikasi APOLO OJK / Modul *Self-Assessment* TKS LJNKB APOLO OJK Application / TKS LJNKB Self-Assessment Module	*Zoom Meeting* / Kamis, 27 Januari 2022 Zoom Meeting / Thursday, January 27, 2022	OJK
	Webinar	Bedah Buku OJKI Tahun 2022 OJKI Book Review 2022	*Zoom Meeting* / Kamis, 10 Februari 2022 Zoom Meeting / Thursday, 10 February 2022	OJK
	Sosialisasi Socialization	APOLO OJK Modul Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan *Self-Assessment* APOLO OJK Health Level Self-Assessment Module by Self-Assessment	*Zoom Meeting* / Rabu, 6 April 2022 Zoom Meeting / Wednesday, April 6, 2022	OJK
	Webinar	*Anti-Bribery Management System: Experience Though Integrity*	*Zoom Meeting* / Kamis, 16 Juni 2022 Zoom Meeting / Thursday, 16 June 2022	OJK
	Webinar	Peran Digitalisasi dalam Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan The Role of Digitalization in Encouraging Increased Financial Inclusion	*Zoom Meeting* / Kamis, 23 Juni 2022 Zoom Meeting / Thursday, 23 June 2022	OJK

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
	Training	Pelatihan Praktik *Good Corporate Governance* Good Corporate Governance Practice Training	*Zoom Meeting* / Kamis-Jumat, 14-15 Juli 2022 Zoom Meeting / Thursday-Friday, 14-15 July 2022	Mandiri Utama Finance
	Sosialisasi Socialization	Peraturan OJK No. 6 / POJK.02 / 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan OJK Regulation No. 6 / POJK.02 / 2022 Concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector	*Zoom Meeting* / Selasa, 9 Agustus 2022 Zoom Meeting / Tuesday, August 9, 2022	OJK
	Training	Analisis Laporan Keuangan Analysis of financial statements	*Zoom Meeting* / Kamis, 25 Agustus 2022 Zoom Meeting / Thursday, 25 August 2022	Mandiri University Group
	Webinar	Tren dan Tantangan Penerapan Program APU PPT pada Industri Keuangan Non-Bank - Perusahaan Pembiayaan di Era Digital dan Mitigasi Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Era Ekonomi Digital Trends and Challenges of Implementing the APU PPT Program in the Non-Bank Financial Industry - Financing Companies in the Digital Age and Mitigating the Risk of Money Laundering and Terrorism Financing in the Digital Economy Era	*Offline* / Senin 3 Oktober 2022 Offline / Monday 3 October 2022	Mandiri Utama Finance
	Webinar	Perlindungan Konsumen di Era Digital Consumer Protection in the Digital Era	*Zoom Meeting* / Kamis, 6 Oktober 2022 Zoom Meeting / Thursday, October 6, 2022	OJK
	Webinar	Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan melalui Pengembangan IJK yang Sehat, Efisien dan Berintegritas Creating Financial System Stability through the Development of a Healthy, Efficient and Integrity IJK	*Zoom Meeting* / Jumat, 4 November 2022 Zoom Meeting / Friday, November 4, 2022	OJK
	Webinar	Peran Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Inklusi dan Digitalisasi UMKM The Role of the Financial Services Industry in Supporting MSME Inclusion and Digitalization	*Zoom Meeting* / Selasa, 8 November 2022 Zoom Meeting / Tuesday, November 8, 2022	OJK

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
	Webinar	Peluang dan Tantangan Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Opportunities and Challenges of the Financial Services Industry in Supporting the Financing of Battery-Based Electric Motorized Vehicles (KBLBB)	*Zoom Meeting* / Kamis, 17 November 2022 Zoom Meeting / Thursday, November 17, 2022	OJK
	Webinar	Diseminasi Petunjuk Teknis Operasional untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas Dissemination of Operational Technical Guidelines for Financial Services for Persons with Disabilities	*Zoom Meeting* / Selasa, 6 Desember 2022 Zoom Meeting / Tuesday, December 6, 2022	OJK
	Webinar	Membangun *Personal Branding*: Kunci Sukses dalam Berkarir dan Berkinerja Building Personal Branding: The Key to Success in Career and Performance	*Zoom Meeting* / Kamis, 8 Desember 2022 Zoom Meeting / Tuesday, December 8, 2022	OJK
	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Penerapan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Dissemination of Application of National Identity Number as Taxpayer Identification Number	*Zoom Meeting* / Rabu, 21 Desember 2022 Zoom Meeting / Wednesday, December 21, 2022	OJK
Monica Rachmawati	*Webinar*	*Big Data Analytics for Money Laundering Detection*	Zoom *Meeting* / Kamis, 10 Februari 2022 Zoom Meeting / Thursday, February 10, 2022	PPATK
	Sosialisasi Socialization	Pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) 2022 Implementation of Information System Development Socialization for Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (SIGAP) Program in 2022	Zoom *Meeting* / Selasa, 15 Februari 2022 Zoom Meeting / Tuesday, February 15, 2022	OJK
	Training	Peningkatan Kemampuan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan pada Transaksi Aset Kripto Increasing the Ability to Analyze Suspicious Financial Transactions in Crypto Asset Transactions	Zoom *Meeting* / Selasa, 22 Maret 2022 Zoom Meeting / Tuesday, March 22, 2022	BMRI
	Webinar	Kegiatan Dukungan 20 Tahun Gerakan APU PPT Indonesia : "*Fight Against Financial Crime*" Support Activities for 20 Years of APU PPT Indonesia Movement: "Fight Against Financial Crime"	Zoom *Meeting* / Senin, 18 April 2022 Zoom Meeting / Monday, April 18, 2022	PPATK

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
	Webinar	Menelusuri Jejak *Binary Option* dan *Robot Trading* Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan Tracing the Traces of Illegal Binary Options and Trading Robots, Ensnaring Fraudsters	Zoom *Meeting* / Senin, 18 April 2022 Zoom meeting / Monday, April 18, 2022	PPATK
	Webinar	Tantangan Peningkatan Kompetensi Penyidik TPPU Di Era Ekonomi Digital Challenges to Increasing the Competence of ML Investigators in the Digital Economy Era	Zoom *Meeting* / Selasa, 24 Mei 2022 Zoom Meeting / Tuesday, May 24, 2022	PPATK
	Webinar	*Preventing & Combating Financial Crime in Financial Services Industry*	Zoom *Meeting* / Kamis, 9 Juni 2022 Zoom Meeting / Thursday, June 9, 2022	OJK
	Webinar	*Anti-Bribery Management System Experience Through Integrity Confirmation*	Zoom *Meeting* / Kamis, 16 Juni 2022 Zoom Meeting / Thursday, June 16, 2022	OJK
	Training	*Training Skill Up Digital Monitoring Transaction*	Zoom *Meeting* / Kamis-Jumat, 23-24 Juni 2022 Zoom Meeting / Thursday-Friday, June 23-24 2022	BMRI
	Training	Pelatihan Praktik GCG (*Good Corporate Governance*) GCG (Good Corporate Governance) Practice Training	Zoom *Meeting* / Kamis-Jumat, 14-15 Juli 2022 Zoom Meeting / Thursday-Friday, July 14-15 2022	Mandiri Utama Finance
	Webinar	Tren dan Tantangan Anti-*Money Laundering* di Era Digital Trends and Challenges of Anti-Money Laundering in the Digital Age	Zoom *Meeting* / Kamis, 25 Agustus 2022 Zoom Meeting / Thursday, August 25, 2022	OJK
	Training	Analisis Laporan Keuangan Analysis of financial statements	Zoom *Meeting* / Kamis, 25 Agustus 2022 Zoom Meeting / Thursday, August 25, 2022	Mandiri University
	Training	Program *Virtual Skill Up Training* Mengenai "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Transaksi *Telegrafic Transfer* (TT) dan Transaksi Kustodian" Virtual Skill Up Training Program Regarding "Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes Related to Telegraphic Transfer (TT) Transactions and Custodian Transactions"	Zoom *Meeting* / Selasa, 6 September 2022 Zoom Meeting / Tuesday, September 6, 2022	BMRI

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
	Training	Undangan Pelatihan Tipologi TPPU TPPT bagi Penyedia Jasa Keuangan Invitation to TPPU TPPT Typology Training for Financial Service Providers	Zoom *Meeting* / Senin-Rabu, 3-5 Oktober 2022 Zoom Meeting / Monday-Wednesday, October 3-5, 2022	PPATK
	Webinar	Keterbukaan Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) pada Rezim APU PPT Information Disclosure of Beneficial Owners in the APU PPT Regime	Zoom *Meeting* / Kamis-Jumat, 27-28 Oktober 2022 Zoom Meeting / Thursday-Friday, October 27-28, 2022	OJK
	Diseminasi Dissemination	Diseminasi Kebijakan dan Regulasi: Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Lintas Batas dan Wilayah Pabean Indonesia Dissemination of Policies and Regulations: Carrying Cash and Other Payment Instruments Across Borders and Indonesian Customs Areas	Zoom *Meeting* / Rabu, 23 November 2022 Zoom Meeting / Wednesday, November 23, 2022	PPATK
	Sosialisasi Socialization	Konvensi Nasional RKKNI Bidang APU PPT SKKNI National Convention on APU PPT	Zoom *Meeting* / Senin, 23 November 2022 Zoom Meeting / Monday, November 23, 2022	OJK
	Webinar	Webinar dalam Rangka Hakordia 2022 - Proaktif dan Kolaboratif Dalam Mencegah Korupsi di Indonesia Webinar in the Context of Hakordia 2022 - Proactive and Collaborative in Preventing Corruption in Indonesia	Zoom *Meeting* / Rabu, 20 Desember 2022 Zoom Meeting / Wednesday, December 20, 2022	OJK
Ike Nurmala Sari	*Webinar*	Strategi Penyiapan Digital Talent Guna Mendukung Transformasi Digital Di IJK digital talent preparation strategy to support digital transformation in IJK	*Zoom Meeting* / Kamis, 6 Januari 2022 Zoom Meeting / Thursday, January 6, 2022	OJK
	Webinar	Kesiapan Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Literasi Digital Konsumen Jasa Keuangan Readiness of the Financial Services Industry in Supporting Financial Services Consumer Digital Literacy	*Zoom Meeting* / Kamis, 13 Januari 2022 Zoom Meeting / Thursday, January 13, 2022	OJK
	Webinar	Bedah Buku OJKI Tahun 2022 OJKI Book Review 2022	*Zoom Meeting* / Kamis, 10 Februari 2022 Zoom Meeting / Thursday, 10 February 2022	OJK
	Webinar	Kesiapan IJK Syariah dalam Mendukung *Sustainable Finance* Readiness of Sharia IJK in Supporting Sustainable Finance	*Zoom Meeting* / Kamis, 17 Maret 2022 Zoom Meeting / Thursday, 17 March 2022	OJK

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
	Webinar	Menyambut Pemberlakuan Pajak Carbon (*Carbon Text*) Welcoming the Implementation of Carbon Tax (Carbon Text)	*Zoom Meeting* / Kamis, 31 Maret 2022 Zoom Meeting / Thursday, 31 March 2022	PPATK
	Sosialisasi Socialization	Penyedia Data Piutang Negara kepada Pelapor SLIK Provider of State Receivable Data to SLIK Reporters	*Zoom Meeting* / Kamis, 7 April 2022 Zoom Meeting / Thursday, April 7, 2022	OJK
	Webinar	*Anti-Bribery Management System: Experience Though Integrity*	*Zoom Meeting* / Kamis, 16 Juni 2022 Zoom Meeting / Thursday, 16 June 2022	OJK
	Training	Pelatihan Praktik *Good Corporate Governance* Good Corporate Governance Practice Training	*Zoom Meeting* / Kamis-Jumat, 14-15 Juli 2022 Zoom meeting / Thursday-Friday, 14-15 July 2022	Mandiri Utama Finance

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN TAHUN 2022

Di sepanjang tahun 2022 Unit Kerja Kepatuhan telah menyelenggarakan aktivitas/kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya. Seluruh kewajiban pelaporan kepada OJK selama tahun 2022 telah disampaikan sepenuhnya 100% tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan OJK dengan rincian sebagai berikut:

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE WORK UNIT OF COMPLIANCE YEAR 2022

Throughout 2022 the Compliance Work Unit has organized activities/activities in the context of carrying out its duties, responsibilities and functions. All reporting obligations to OJK during 2022 have been submitted in full 100% on time in accordance with the provisions set by OJK with the following details:

Jenis Laporan Kepada OJK Tahun 2022 Types of Reports to OJK in 2022	**POJK/SEOJK**	**Periode** Period
Laporan Rencana Bisnis Tahunan Tahun 2023 2023 Annual Business Plan Report	24/POJK.05/2019	November

Jenis Laporan Kepada OJK Tahun 2022 Types of Reports to OJK in 2022	POJK/SEOJK	Periode Period
Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semester 2 Tahun 2021 & Semester 1 Tahun 2022 Business Plan Realization Report Semester 2 of 2021 & Semester 2 of 2022	24/POJK.05/2019	Januari & Juli January & July
Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester 2 Tahun 2021 & Semester 1 Tahun 2022 Business Plan Oversight Report Semester 2 of 2021 & Semester 2 of 2022	24/POJK.05/2019	Januari & Juli January & July
Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2023 2023 Sustainable Finance Action Plan Report	51/POJK.03/2017	November
Laporan Keberlanjutan Tahun 2021 2021 Sustainability Report	51/POJK.03/2017	April
Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Finance Company Monthly Report	03/POJK.05/2013	Bulanan Monthly
Laporan Keuangan Tahunan *Audited* (LKTA) Tahun 2021 Audited Annual Financial Report (LKTA) for 2021	35/POJK.05/2018	April
Pembayaran Biaya Tahunan Annual Fee Payment	03/POJK.02/2014	April, Juli, Oktober, Desember April, July, October, December
Pengumuman LKTA Periode 2021 di 1 (satu) Surat Kabar Announcement of LKTA 2021 Period in 1 (one) Newspaper	35/POJK.05/2018	April
Laporan Bukti Pengumuman LKTA 2021 di Surat Kabar Proof of 2021 LKTA Announcement Report in Newspapers	35/POJK.05/2018	Setelah pengumuman After announcement
Laporan Penunjukan AP dan KAP 2022 AP and KAP Appointment Report 2022	13/POJK.03/2017	Setelah RUPST After AGMS
Laporan Evaluasi Penggunaan Jasa AP dan KAP Tahun 2021 Evaluation Report on the Use of AP and KAP Services for 2021	13/POJK.03/2017	Mei May
Laporan Evaluasi Pemenuhan Prinsip Syariah Tahun 2021 oleh Dewan Pengawas Syariah Evaluation Report on Fulfillment of Sharia Principles in 2021 by the Sharia Supervisory Board	10/POJK.05/2020	Maret March
Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Service Report and Settlement of Consumer Complaints	01/POJK.07/2013	Januari, April, Juli, Oktober January, April, July, October
Laporan *Self-Assessment* Pemenuhan Ketentuan Perlindungan Konsumen Tahun 2022 Self-Assessment Report on Compliance with Consumer Protection Provisions Year 2022	6/POJK.06/2022	September
PENGEMBANGAN KARYAWAN EMPLOYEE DEVELOPMENT		
Laporan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 Human Resources Development Report 2021	28/POJK.05/2014	Januari January
Laporan Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Tahun 2021 2021 Sustainability Requirement Fulfillment Report	4/POJK.05/2013	Januari January
APU PPT APU PPT		

Jenis Laporan Kepada OJK Tahun 2022 Types of Reports to OJK in 2022	**POJK/SEOJK**	**Periode** Period
Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data Nasabah Tahun 2023 Report on Planned Customer Data Updating Activities for 2023	23/POJK.01/2019	Desember December
Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah Tahun 2021 Report on Realization of Updating Customer Data in 2021	23/POJK.01/2019	Januari January
RISIKO RISK		
Laporan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2021 Company Health Level Report 2021	28/POJK.05/2020	Februari February
SLIK SLIK		
Laporan Penyampaian Data Debitur Debtor Data Submission Report	18/POJK.03/2017	Bulanan Monthly
TATA KELOLA GOVERNANCE		
Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2021 2021 Good Corporate Governance Implementation Report	30/POJK.05/2014	April
LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION		
Laporan Rencana Kegiatan Literasi Keuangan 2023 Report on the 2023 Financial Literacy Activity Plan	76/POJK.07/2016	November
Laporan Realisasi Kegiatan Literasi Keuangan Semester 2 Tahun 2021 & Semester 1 Tahun 2022 Realization Report of Financial Literacy Activities Semester 2 of 2021 & Semester 1 of 2022	76/POJK.07/2016	Januari, Juli January, July
Laporan Rencana Kegiatan Inklusi Keuangan 2023 Report on the 2023 Financial Inclusion Activity Plan	76/POJK.07/2016	November
Laporan Realisasi Kegiatan Inklusi Keuangan Semester 2 Tahun 2021 & Semester 1 Tahun 2022 Realization Report of Financial Inclusion Activities Semester 2 of 2021 & Semester 1 of 2022	76/POJK.07/2016	Januari, Juli January, July
RESTRUKTURISASI COVID-19 RESTRUCTURING COVID-19		
Laporan Restrukturisasi COVID-19 (OJK Pusat, OJK Syariah dan OJK Wilayah) COVID-19 Restructuring Report (Central OJK, Sharia OJK and Regional OJK)	58/POJK.05/2020	Mingguan Weekly

SATUAN KERJA LITERASI & INKLUSI KEUANGAN

Satuan Kerja Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direksi berdasarkan Peraturan OJK No. 76/POJK/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, untuk merencanakan, menjalankan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

LITERACY WORK UNIT & FINANCIAL INCLUSION

The Financial Literacy Work Unit and Financial Clusias are formed and responsible to the Board of Directors based on OJK Regulation No. 76/POJK/2016 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for consumers and/or the community, to plan, carry out, supervise and evaluate activities aimed at increasing financial literacy and inclusion.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN KERJA LITERASI & INKLUSI KEUANGAN

Pejabat atau Kepala Satuan Kerja Literasi & Inklusi Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

PARTIES WHO APPOINT AND DISMISS THE HEAD OF THE LITERACY WORK UNIT & FINANCIAL INCLUSION

Officials or Head of Literacy & Financial Inclusion Work Unit are appointed and dismissed by the President Director.

PEJABAT SATUAN KERJA LITERASI & INKLUSI KEUANGAN DAN DASAR PENGANGKATAN

OFFICIAL WORK UNIT LITERACY & FINANCIAL INCLUSION AND APPOINTMENT BASIS

Nama Name	Andy Kwet Bun
Jabatan Position	Kepala Satuan Kerja Literasi & Inklusi Keuangan Head of Financial Literacy & Inclusion Unit
Menjabat sejak Served since	02 Januari 2019 January 02, 2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	41 Tahun 41 Years Old
Domisili Domicile	Jakarta Barat, DKI Jakarta West Jakarta, DKI Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 *Marketing Communication*, London School of Public Relation (2022) • S1 Sistem Informasi, Universitas Bina Nusantara (2004) • S1 Teknik Industri, Universitas Bina Nusantara (2004) • Master of Marketing Communication, London School of Public Relation (2022) • Bachelor of Information Systems, Bina Nusantara University (2004) • Master of Industrial Engineering, Bina Nusantara University (2004)

Riwayat Profesi Professional History	1. *Marketing Development Division Head* Mandiri Utama Finance (2020- sekarang) 2. *Marketing Development Deputy Division Head* Mandiri Utama Finance (2017-2020) 3. *Marketing Division Head* PT Asco Prima Mobilindo (Asco Automotive) (2009-2017) 4. *General Manager* PT Asco Media Utama (Ascomaxx Magazine) (2015-2017) 5. *Marketing Dept. Head* PT Asco Prima Mobilindo (Asco Automotive) (2007-2009) 6. *Sales Head Branch* PT Astra Sedaya Finance (ACC) (2005-2007) 1. Marketing Development Division Head Mandiri Utama Finance (2020- present) 2. Marketing Development Deputy Division Head Mandiri Utama Finance (2017-2020) 3. Marketing Division Head PT Asco Prima Mobilindo (Asco Automotive) (2009-2017) 4. General Manager PT Asco Media Utama (Ascomaxx Magazine) (2015-2017) 5. Marketing Dept. Head PT Asco Prima Mobilindo (Asco Automotive) (2007-2009) 6. Sales Head Branch PT Astra Sedaya Finance (ACC) (2005-2007)
Rangkap Jabatan Double job	-
Sertifikasi Certification	• *Training* dan Sertifikasi Pembiayaan Syariah Mandiri Utama Finance, 13-14 November 2017, Jakarta • Sertifikasi Dasar Manajerial PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia, 29 Jul 2021, Jakarta • Sharia Financing Training and Certification Mandiri Utama Finance, November 13-14, 2017, Jakarta • Basic Managerial Certification for PT Indonesian Financing Professional Certification, July 29, 2021, Jakarta

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA LITERASI & INKLUSI KEUANGAN

Fungsi pokok Satuan Kerja Literasi & Inklusi Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Literasi Keuangan
   a. Membuat dan menyerahkan Rencana Kegiatan Tahunan Literasi Keuangan kepada Satuan Kerja Kepatuhan.
   b. Melaksanakan kegiatan Literasi Keuangan.
   c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Literasi Keuangan.
   d. Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Literasi Keuangan.
   e. Membuat dan menyerahkan Laporan Tahunan Realisasi Kegiatan Literasi Keuangan kepada Satuan Kerja Kepatuhan.
2. Sehubungan dengan Inklusi Keuangan
   a. Membuat dan menyerahkan Rencana Kegiatan Tahunan Inklusi Keuangan kepada Satuan Kerja Kepatuhan.
   b. Melaksanakan kegiatan Inklusi Keuangan.
   c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE WORK UNIT LITERACY & FINANCIAL INCLUSION

The main functions of the Literacy & Financial Inclusion Work Unit are as follows:

1. In connection with Financial Literacy
   a. Prepare and submit an Annual Financial Literacy Activity Plan to the Compliance Work Unit.
   b. Carry out Financial Literacy activities.
   c. Monitor and evaluate the implementation of Financial Literacy activities.
   d. Provide input to business units that conduct research on product and/or financial services development to develop financial products and/or services that are in accordance with the needs and capabilities of consumers and/or the community based on the results of monitoring and evaluation of Financial Literacy activities.
   e. Make and submit an Annual Report on the Realization of Financial Literacy Activities to the Compliance Work Unit.
2. In connection with the Financial Inclusion
   a. Prepare and submit the Annual Financial Inclusion Activity Plan to the Compliance Work Unit.
   b. Carry out Financial Inclusion activities.
   c. Monitor and evaluate the implementation of

pelaksanaan kegiatan Inklusi Keuangan.

d. Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Inklusi Keuangan.
e. Memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan dalam rangka penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan.
f. Membuat dan menyerahkan Laporan Tahunan Realisasi Kegiatan Inklusi Keuangan kepada Satuan Kerja Kepatuhan.

STRUKTUR ORGAN DAN JUMLAH KARYAWAN SATUAN KERJA LITERASI & INKLUSI KEUANGAN

Satuan Kerja Literasi & Inklusi Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Berikut disampaikan struktur organisasi Satuan Kerja Literasi & Inklusi Keuangan yang menggambarkan fungsi dan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA LITERASI & INKLUSI KEUANGAN

Financial Inclusion activities.

d. Provide input to business units that conduct research and/or development of financial products and/or financial services to develop financial products and/or services that are in accordance with the needs and abilities of consumers and/or the community based on the results of monitoring and evaluation of Financial Inclusion activities.
e. Provide input to the function or unit of Financial Literacy In order to preparing Financial Education materials related to the products and/or financial services developed.
f. Make and submit an Annual Report on the Realization of Financial Inclusion Activities to the Compliance Work Unit.

ORGAN STRUCTURE AND TOTAL EMPLOYEES OF LITERACY & FINANCIAL INCLUSION WORK UNIT

Literacy & Financial Inclusion Work Unit is directly responsible to the Compliance Director. The following is the organizational structure of the Literacy & Financial Inclusion Work Unit that describes its functions and duties.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF LITERACY & FINANCIAL INCLUSION WORK UNIT

STRUKTUR ORGAN DAN JUMLAH KARYAWAN SATUAN KERJA LITERASI & INKLUSI KEUANGAN

Satuan Kerja Literasi & Inklusi Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Berikut disampaikan struktur organisasi Satuan Kerja Literasi & Inklusi Keuangan yang menggambarkan fungsi dan tugasnya.

Per 31 Desember 2022, Satuan Kerja Literasi & Inklusi Keuangan memiliki 5 (lima) karyawan yang bertugas pada fungsi-fungsi seperti yang telah dijelaskan pada bagan di atas.

ORGAN STRUCTURE AND TOTAL EMPLOYEES OF THE LITERACY & FINANCIAL INCLUSION WORK UNIT

Literacy & Financial Inclusion Work Unit is directly responsible to the Compliance Director. The following is the organizational structure of the Literacy Work Unit & Financial Inclusion that describes its functions and duties.

As of December 31, 2022, the Financial Literacy & Inclusion Work Unit has 5 (five) employees who serve the functions as described in the chart above.

Jabatan Position	**Jumlah Personel** Number of personnel
Kepala Satuan Kerja Literasi & Inklusi Keuangan | Head of Work Unit Literacy & Financial Inclusion	1
Pengembangan Literasi Keuangan | Development of financial literacy	1
Pengembangan Inklusi Keuangan | Development of financial inclusion	1
Publikasi Literasi Keuangan | Financial literacy publication	1
Monitoring dan Pelaporan | Monitoring and reporting	1
Jumlah | Amount	**5**

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk meningkatkan kompetensi dalam hal pengetahuan dan pemahaman dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi, sepanjang 2022 Satuan Kerja Literasi & Inklusi Keuangan mengikuti seminar, pendidikan dan/atau pelatihan. Program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Satuan Kerja Literasi & Inklusi Keuangan di sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

To improve competence in terms of knowledge and understanding in helping the implementation of the Board of Directors' tasks, throughout 2022 the Financial Literacy & Inclusion Work Unit participated in seminars, education and/or training. The competency development program followed by employees of the Financial Literacy & Inclusion Work Unit throughout 2022 is as follows:

Peserta Participant	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Andi Kwet Bun	*Webinar*	PPATK *Toward Financial Stability Through the Use of Digital Technology, ESG, and the Green Economy*	*Offline*/Senin, 3 Oktober 2022 Offline/Monday, October 3, 2022	PPATK
Nurina Yustidiana	Pelatihan	Pelatihan Dasar Pembiayaan Syariah Sharia Financing Basic Training	*Zoom Meeting*/ Senin, 14 November 2021 Zoom Meeting/ Monday, November 14, 2021	OJK FSA

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA LITERASI & INKLUSI KEUANGAN TAHUN 2022

Tahun 2022 Satuan Kerja Literasi & Inklusi Keuangan telah menyelenggarakan aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya. Di antaranya adalah melakukan sosialisasi melalui Media Elektronik (Instagram, Facebook, TikTok, dan Youtube), dengan rincian sebagai berikut:

Semester 1 Tahun 2022

1. Perusahaan telah menyampaikan 89 materi Edukasi melalui Instagram, Facebook, Tiktok dan Youtube.
2. Selama periode pelaksanaan, jumlah *viewer* yang terjangkau adalah sebanyak 661.322 untuk *channel* Instagram Perusahaan, 26.073 untuk *channel* Facebook Perusahaan, 1.610.900 untuk *channel* TikTok Perusahaan, serta 11.100 untuk *channel* Youtube Perusahaan, sehingga total keseluruhan *viewer* pada Semester 1 Tahun 2022 sebesar 2.309.395.

Semester 2 Tahun 2022

1. Perusahaan telah menyampaikan 104 materi Edukasi dengan 5 topik utama melalui Instagram, Facebook, Tiktok dan Youtube.
2. Selama periode pelaksanaan, jumlah *viewer* yang terjangkau adalah sebanyak 817.313 untuk *channel* Instagram Perusahaan, 275.554 untuk *channel* Facebook Perusahaan, 3.160.100 untuk *channel* TikTok Perusahaan, serta 715 untuk *channel* Youtube Perusahaan, sehingga total keseluruhan *viewer* pada Semester 2 Tahun 2022 sebesar 4.253.682.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE OF LITERACY & FINANCIAL INCLUSION WORK UNIT OF 2022

In 2022 the Financial Literacy & Financial Inclusion Work Unit has organized activities in the context of carrying out its duties, responsibilities and functions. Among them is conducting socialization through Electronic Media (Instagram, Facebook, TikTok, and Youtube), with the following details:

Semester 1 of 2022

1. The Company has delivered 89 educational materials via Instagram, Facebook, Tiktok and Youtube.
2. During the implementation period, the number of viewers that were reachable was 661,322 for the Company's Instagram channel, 26,073 for the Company's Facebook channel, 1,610,900 for the Company's TikTok channel, and 11,100 for the Company's Youtube channel, bringing the total viewers in Semester 1 of 2022 to 2,309,395.

Semester 2 of 2022

1. The Company has delivered 104 educational materials with 5 main topics via Instagram, Facebook, Tiktok and Youtube.
2. During the implementation period, the number of viewers reached was 817,313 for the Company's Instagram channel, 275,554 for the Company's Facebook channel, 3,160,100 for the Company's TikTok channel, and 715 for the Company's Youtube channel, bringing the total viewers in Semester 2 of 2022 to 4,253,682.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa pihak yang menjalankan kegiatan jasa keuangan wajib menggunakan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik bertujuan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan yang memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku dan memiliki tujuan untuk menyatakan pendapat, dalam semua hal yang material, apakah laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

PROSEDUR DAN MEKANISME PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SERTA STANDAR AUDIT

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak eksternal diatur dalam RUPS Tahunan atas usulan Komite Audit dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris untuk kemudian disetujui oleh Para Pemegang Saham. KAP bekerja secara independen untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan perusahaan dan memberikan opini atas kesesuaian penyajian laporan keuangan tersebut dengan Standar Akuntansi Keuangan

In accordance with OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Firm in Financial Services Activities, it is stated that those who carry out financial services activities are required to use the services of public accountants and public accounting firms. The use of public accounting services and public accounting firms aims to increase transparency of financial conditions that meet the applicable laws and regulations and have the aim to express opinions, in all material matters, whether the Company's consolidated financial statements are in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia.

PROCEDURES AND MECHANISMS FOR THE APPOINTMENT OF A PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND AUDIT STANDARDS

The appointment of the Public Accounting Firm (KAP) as an external party is regulated in the Annual GMS on the Audit Committee proposal by considering the opinion of the Board of Commissioners and then approved by the shareholders. The KAP works independently to audit the Company's annual financial statements and provide an opinion on the conformity of the presentation of the financial statements with the financial accounting standards

(SAK) yang berlaku di Indonesia dan untuk menjaga objektivitas dan kualitas dari hasil pemeriksaan audit eksternal, maka dalam menentukan KAP dan Akuntan Publik, Perusahaan memastikan bahwa auditor yang ditunjuk adalah pihak independen yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam melakukan kerja sama dengan KAP dan Akuntan Publik, Perusahaan telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan telah didasarkan pada perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan Akuntan Publik;
2. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP oleh Perusahaan harus memenuhi aspek-aspek yang diatur dalam ketentuan, antara lain:
   a. Nama KAP;
   b. Kapasitas KAP yang ditunjuk;
   c. Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (*partner in charge*);
   d. Kewajiban Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik;
   e. Legalitas perjanjian kerja;
   f. Ruang lingkup audit;
   g. Jangka waktu penyelesaian audit;
   h. Komunikasi Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik.
3. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan harus mampu melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan.

KAP yang ditunjuk untuk melakukan audit harus memenuhi minimum kriteria sebagai berikut:

1. Berafiliasi sebagai member, bukan korespondensi dengan Kantor Akuntan Internasional/*International Accounting Firm* yang termasuk 4 (empat) besar;
2. Mempunyai izin praktik dari Departemen Keuangan yang masih berlaku;
3. Terdaftar sebagai KAP di OJK;
4. Akuntan Publik yang menjadi *signing partner* terdaftar di OJK;

(SAK) in force in Indonesia and to maintain the objectivity and quality of the results of external audit examinations, then in determining the KAP and Accountants The public, the Company ensures that the designated auditors are independent parties who do not have a conflict of interest with every level of Company officials. This is in accordance with the provisions of POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountants in Financial Services Activities.

In collaborating with KAP and Public Accountants, the Company has noted the following matters:

1. Appointment of Public Accountants and KAP in the context of auditing the Company's annual financial statements has been based on cooperation agreements that have been signed by the Company and public accountants;
2. Audit assignments to public accountants and KAP by companies must meet the aspects stipulated in the provisions, including:
   a. KAP name;
   b. Designated KAP capacity;
   c. Public accountants who are responsible for audits (partners in charge);
   d. The obligation to the public accountant to carry out audits according to the professional standards of public accountants;
   e. The legality of the work agreement;
   f. Audit scope;
   g. The period of audit completion;
   h. Communication of Public Accountants to carry out audits according to public accountant professional standards.
3. Public Accountants who audit the annual financial statements of the Company must be able to conduct audits in accordance with the professional standards of public accountants as well as work agreements and the scope of audit specified.

The KAP appointed to conduct an audit must meet the minimum criteria as follows:

1. Affiliate as a member, not a correspondence with an international accounting office/International accounting firm which is included in 4 (four) large;
2. Having a practice permit from the Department of Finance that is still valid;
3. Registered as a KAP at OJK;
4. Public Accountants who become signing partners registered in OJK;

5. Kantor Akuntan dan pimpinan serta rekan pimpinan kantor akuntan yang bersangkutan tidak pernah memperoleh sanksi dari Bank Indonesia, OJK dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
6. Mempunyai pengetahuan tentang industri pembiayaan;
7. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 28 Februari 2008 dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-86 BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 yaitu "Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut".

Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah Indonesia, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Tahapan mekanisme penunjukan Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perusahaan;
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan;
3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut;
4. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perusahaan;
5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku;
6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

5. Accounting Firm and Leaders and Fellow of the Leadership of the Accounting Firm concerned have never received sanctions from Bank Indonesia, OJK and Indonesian Accountant (IAI);
6. Having knowledge about the financing industry;
7. In accordance with Minister of Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008 dated February 28, 2008 and Decree of the Chairperson of Bapepam-LK No. Kep-86 BL/2011 dated February 28, 2011 namely "Provision of General Audit Services on Financial Statements from an Entity carried out by a maximum of 6 (six) consecutive financial years and by the latest Public Accountant Office for 3 (three) years consecutive".

If there is financial assistance from the Indonesian government, the audit is carried out based on the State Financial Inspection Standards (SPKN) issued by the Indonesian Financial Supervisory Agency (BPK).

THE MECHANISM FOR THE APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANTS

The stages of the mechanism for the appointment of Public Accountants are as follows:

1. The Board of Commissioners through the Audit Committee conducts the process of appointing prospective external auditors by asking for the assistance of the Board of Directors in the process of appointment in accordance with the provisions of the procurement of goods/services in force in the Company;
2. The Board of Commissioners can re-appoint an external auditor based on the evaluation results of the performance of external auditors to conduct audits of financial statements;
3. The Board of Commissioners conveyed the reasons for the nomination to the GMS and the amount of honorarium/service rewards proposed for the external auditor;
4. The proposal to the GMS can be submitted through a separate letter which is part of the Board of Commissioners' response letter to the Company's annual performance;
5. The Board of Commissioners evaluates the performance of external auditors through the Audit Committee in accordance with applicable provisions and standards;
6. For the process of appointing prospective external auditors and/or re-appointment of external auditors conducted by the GMS, the Board of Commissioners simply give power to the GMS to establish the auditor.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik
Appointment to Determination Mechanism of Public Accountants

Penyampaian arahan dan penugasan dari Dewan Komisaris kepada Komite Audit.
Direction and assignments submission from the Board of Commissioners to Audit Committee.

Tindak lanjut Komite Audit:
1. **Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit eksternal.**
2. **Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.**

Audit Committee follows up the following:
1. Evaluating the implementation of external audit.
2. Submitting report to the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris menyampaikan surat rekomendasi kepada pemegang saham. Dewan Komisaris melakukan telaah atas rekomendasi Komite Audit, melakukan pembahasan dengan organ Dewan Komisaris dan calon auditor Eksternal/Akuntan Publik.
The Board of Commissioners submits recommendation letter to the GMS. The Board of Commissioners reviews the recommendations from Audit Committee, discusses with the Board of Commissioners organs and prospective external auditors/Public Accountant.

Penetapan Akuntan Publik oleh RUPS. (Jika pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk auditor eksternal/Akuntan Publik, maka Dewan Komisaris akan melakukan penunjukan auditor eksternal/Akuntan Publik).
Determination of a Public Accountant by the GMS. (If the Shareholders give power of attorney to the Board of Commissioners to appoint an external auditor/Public Accountant, the Board of Commissioners will appoint the external auditor/Public Accountant).

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TAHUN BUKU 2022

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan No. 28 tanggal 16 Juni 2022, Pemegang Saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) dan Akuntan Publik Arief Somantri untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

PUBLIC ACCOUNTING FIRM FOR FISCAL YEAR 2022

In accordance with the deed of decision statement outside the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company No. 28 dated June 16, 2022, the shareholders decided the following matters:

1. Determine Purwantoro, Sungkoro & Surja Public Accountant Firm (A Firm of Ernst & Young Global Limited) and Public Accountant Arief Somantri to audit the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2022;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Purwantoro, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) dan Akuntan Publik Arief Somantri karena sebab apa pun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). Apabila terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke pemegang saham.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SP-DEKOM/MUF/II/2022 tentang Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Mandiri Utama Finance Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Dewan Komisaris menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dan Akuntan Publik Arief Somantri untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan audit *fee* sebesar Rp840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta Rupiah) belum termasuk PPN.

2. Giving authority and power to the Board of Commissioners to determine honorariums and other requirements for the replacement Public Accounting Firm in terms of the Purwantoro, Sungkoro & Surja office (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited) and Public Accountant Arief Somantri because of anything cannot complete The Company's financial statement audit process for the financial year ended 31-12-2022 (thirty-one December two thousand twenty-one). If there is a replacement of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant, the Board of Commissioners gives a report to shareholders.

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 001/SP-DEKOM/MUF/II/2022 concerning Approval of the Appointment of a Public Accounting Firm to audit Mandiri Utama Finance's financial statements for the financial year ended December 31, 2022, the Board of Commissioners approved the appointment of the Purwantono Public Accountant Firm, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) and Public Accountant Arief Somantri to audit the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2022 with an audit fee of IDR840,000,000 (with hundreds of four million Rupiah) not including VAT.

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2022

PUBLIC ACCOUNTANT 2022

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young/*EY*)
No. Izin KAP No. KAP Permit	603/KM.1/2015
Akuntan Accountant	Arief Somantri
No. Izin Akuntan Publik Number of Public Accountant Permit	AP.1174
Tahun Audit Audit Year	Tahun Buku 2022 Fiscal Year 2022
Periode Penugasan Assignment Period	2022
Jasa Audit Audit services	Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Company Financial Statement Audit Services
Jasa Non-Audit Non -Audit Services	-
Biaya Fee	Rp840.000.000

Berikut adalah nama Kantor Akuntan Publik dan Akuntan yang mengaudit laporan keuangan Perusahaan dalam 5 tahun terakhir:

The following is the name of the Public Accountant and Accountants who audit the Company's financial statements in the last 5 years:

Tahun Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Akuntan Publik** Public Accountant	**Lingkup Penugasan** Scope of Assignment	**Jasa Lainnya** Other Services
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young/EY) No. Izin: 603/KM.1/2015 Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young/Ey) No. Permit: 603/KM.1/2015	Arief Somantri No. Izin: AP.1174 Arief Somantri No. Permit: AP.1174	Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Company Financial Statement Audit Services	-
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young/EY) No. Izin: 603/KM.1/2015 Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young/Ey) No. Permit: 603/KM.1/2015	Arief Somantri No. Izin: AP.1174 Arief Somantri No. Permit: AP.1174	Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Company Financial Statement Audit Services	-
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1.2015 Tanudiredja, Wibisana, Pintis & Partners (PricewaterhouseCoopers) No. Permission: KEP-241/KM.1.2015	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA No. Izin: AP.0222 Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA No. Permit: AP.0222	Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Company Financial Statement Audit Services	*Review* Penerapan PSAK 71 Tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Review of The Implementation of PSAK 71 Regarding Reserves of Impairment Losses
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1.2015 Tanudiredja, Wibisana, Pintis & Partners (Pricewaterhousecoopers) No. Permission: KEP-241/KM.1.2015	Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA No. Izin: AP.0229 Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA No. Permit: AP.0229	Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Company Financial Statement Audit Services	-
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1.2015 Tanudiredja, Wibisana, Pintis & Partners (Pricewaterhousecoopers) No. Permission: KEP-241/KM.1.2015	Jimmy Pangestu, S.E No. Izin: AP.1124 Jimmy Pangestu, S.E No. Permit: AP.1124	Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Company Financial Statement Audit Services	-

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan (*on going basis*) dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perusahaan, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Pengendalian internal dimaksudkan untuk mendukung kinerja Perusahaan agar tetap tumbuh berkelanjutan dengan memastikan efektivitas kegiatan operasional, kehandalan sistem informasi, kepatuhan perusahaan terhadap regulator dan perundang-undangan serta menekan potensi risiko usaha maupun praktik penyimpangan etika bisnis yang berdampak negatif pada kinerja Perusahaan dengan mengedepankan *risk awareness* di setiap level organisasi. Upaya pengendalian internal secara khusus diterapkan dalam aspek-aspek penting seperti aspek operasional, keuangan, SDM, dan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan.

The Internal Control System is a monitoring mechanism established by the Company's management with the approval of the Board of Commissioners on an ongoing basis (on going basis) with the aim of safeguarding and securing the Company's assets, ensuring the availability of more accurate reports, increasing compliance with applicable regulations, reducing the financial impact/losses, irregularities including fraud, and violations of prudential aspects, as well as increasing organizational effectiveness and increasing cost efficiency.

Internal control is intended to support the Company's performance in order to continue to grow sustainably by ensuring the effectiveness of operational activities, the reliability of information systems, compliance with regulators and legislation and suppressing the potential of business risks and practices of business ethics deviations that have a negative impact on the Company's performance by promoting risk awareness in every level of the organization. Internal control efforts are specifically applied in important aspects such as operational aspects, finance, human resources, and also compliance with legislation.

KERANGKA PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

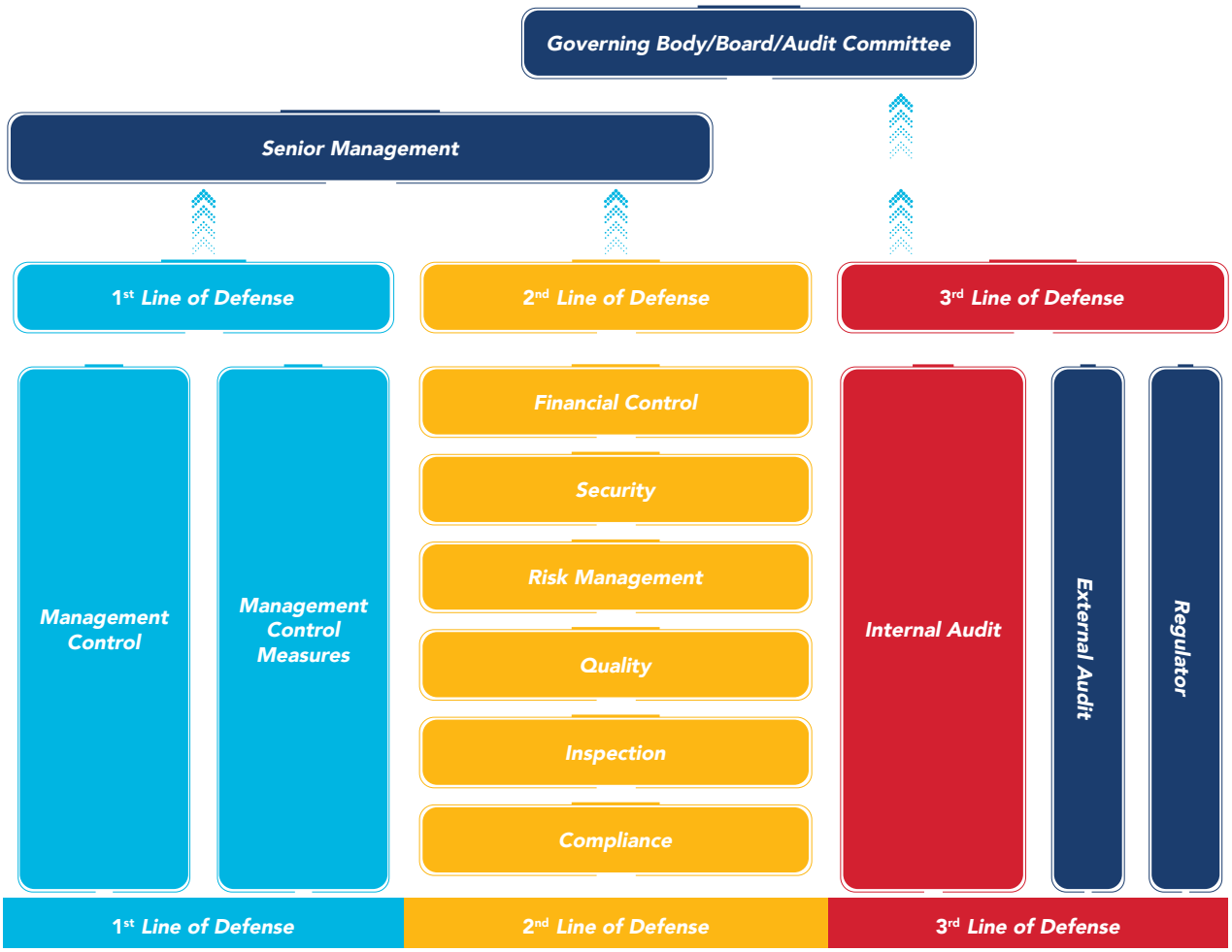

Fungsi yang secara langsung berhadapan dengan risiko
Functions that are directly opposite at risk

Fungsi yang berperan dalam melakukan pemantauan risiko dan proses manajemen risiko. Selain itu, fungsi ini bertugas untuk memberikan panduan atas manajemen risiko, kerangka manajemen risiko, identifikasi risiko, serta memonitor terhadap risiko yang terjadi dan memberikan dampak pada *1st line of defense*
Functions that play a role in monitoring risks and risk management processes. Besides that, This function is responsible for providing guidance on risk management, risk management framework, identification of risks, as well as monitoring of risks that occur and have an impact on the 1st line of defense

Fungsi yang bersifat independen secara objektif mampu memberikan masukan terhadap perbaikan kontrol risiko yang terjadi di Perusahaan
Functions that are objectively independent able to provide suggestions for improvement risk control that occurs in the Company

Kerangka pengendalian internal Perusahaan dengan menerapkan *three lines of defense*, di mana pemilik risiko atau *risk owner* sebagai pertahanan pertama dalam hal ini adalah unit-unit operasional, keuangan, SDM memiliki peran menangani risiko-risiko yang timbul. Kecukupan kebijakan dan identifikasi risiko yang berpotensi timbul serta *monitoring* terhadap risiko yang timbul mempunyai peran penting dalam hal menjaga agar sistem pertahanan

The Company's internal control framework by implementing Three Lines of Defense, which the risk owner or risk owner as the first defense in this case is operational units, finance, HR has a role in handling risks that arise. Adequacy of policies and potential risk identification and monitoring of risks that arise have an important role in terms of keeping the first defense system well managed. The second defense is carried out by the Risk Management, Compliance and

pertama tetap terkelola dengan baik. Pertahanan kedua dijalankan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan *Quality Assurance*, di mana masing-masing berperan untuk memantau implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal yang dijalankan unit operasional (*risk owner*). Pertahanan ketiga dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal yang memantau efektivitas manajemen risiko baik di level *risk owner* maupun di level pertahanan kedua.

Direksi berkomitmen terhadap pelaksanaan budaya pengendalian yang terus ditingkatkan melalui peningkatan *risk culture* untuk semua aspek operasional di seluruh level organisasi serta berperan aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan yang berpotensi menimbulkan risiko bagi Perusahaan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan pengendalian. Terdapat Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi yang telah menjalankan fungsi masing-masing sebagai media untuk pengawasan terhadap efektivitas pengendalian internal di Perusahaan.

TINJAUAN/EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Pelaksanaan pengendalian internal oleh Audit Internal Perusahaan dilakukan secara rutin melalui evaluasi terhadap aktivitas Perusahaan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan standar operasi yang berlaku di Perusahaan telah berjalan dengan baik.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa sistem pengendalian internal yang sudah berjalan saat ini telah memenuhi standar minimal untuk memastikan tingkat efektivitas, efisiensi, keandalan, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Namun demikian, masih dan selalu terbuka ruang-ruang untuk penyempurnaan. Berbagai perubahan yang terjadi, baik yang dilakukan secara internal maupun yang didorong oleh situasi dan kondisi eksternal, mengharuskan Perusahaan senantiasa siap dan bersedia melakukan perbaikan-perbaikan guna memastikan tersedianya sistem pengendalian internal yang andal bagi Perusahaan.

Quality Assurance Work Unit, each of which has a role in monitoring the implementation of risk management and internal controls carried out by the Operational Unit (Risk Owner). The third defense is carried out by an Internal Audit Work Unit that monitors the effectiveness of risk management both at the risk owner and at the second defense level.

The Board of Directors is committed to the implementation of control culture that continues to be improved through increasing risk culture for all operational aspects at all levels of the organization and plays an active role to ensure improvement of problems that have the potential to cause risks for the Company. The Board of Commissioners is responsible for ensuring the Board of Directors to monitor the effectiveness of the implementation of control. There is a Risk Monitoring Committee, Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee that has carried out their respective functions as a medium for supervision of the effectiveness of internal control in the Company.

REVIEW/EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

The implementation of internal control by the Company's internal audit is carried out routinely through an evaluation of Company activities to ensure the implementation of business activities in accordance with applicable regulations. Based on the results of supervision carried out throughout 2022, the Board of Commissioners considers that the Company's internal control system for the implementation of policies and operating standards in force in the Company has been running well.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS FOR THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Commissioners and The Board of Directors considers that the current internal control system has met with minimal standards to ensure the level of effectiveness, efficiency, reliability, security, and compliance with regulations. However, still and always open spaces for improvement. Various changes that occur, both carried out internally and are driven by external situations and conditions, requires the Company to always be ready and willing to make improvements to ensure the availability of reliable internal control systems for the Company.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Perusahaan menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis yang dijalankan Perusahaan. Dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat memengaruhi stabilitas dan kelangsungan usaha Perusahaan, yang tentu saja melekat pada semua aktivitas dan pengambilan keputusan dalam menjalankan bisnis.

KERANGKA DAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DIKEMBANGKAN

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik Perusahaan yang sehat dan juga memperhatikan ketentuan 5 (lima) Pilar Manajemen Risiko, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko;
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko;
4. Sistem Informasi Manajemen Risiko
5. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh.

Manajemen telah menyusun kerangka kerja manajemen risiko yang mencakup sistem dan kebijakan yang mengelola risiko guna mendukung kesehatan dan pencapaian pertumbuhan Perusahaan, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan budaya perusahaan. Kerangka kerja yang berupa Panduan Penerapan Manajemen Risiko yang disusun mengatur:

1. Organisasi dan Kewenangan (Dewan Komisaris dan Direksi);
2. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko;
3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko;
4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh;
5. Penerapan Manajemen Risiko untuk Masing-Masing Risiko;
6. Penilaian Penerapan Manajemen Risiko (*Self-Assessment*);
7. Penilaian Tingkat Risiko.

The Company realizes that risk has become an inseparable part of every business process run by the Company. The impact of these risks can significantly affect the stability and continuity of the Company's business, which of course is inherent in all activities and decision making in running a business.

FRAMEWORK AND RISK MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPED

The implementation of effective risk management must be supported by a framework that includes policies and risk management procedures and risk limits that are clearly determined in line with the Company's vision, mission, and business strategy. The preparation of risk management policies and procedures is carried out by paying attention, among others, the complexity of business activities, risk profiles, and the level of risk to be taken as well as the rules set by the authority and/or practices of a healthy Company and also pay attention to the provisions of 5 (five) Pillars of Risk Management, that is:

1. Active Supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Adequacy of Policies, Procedures and Determination of Risk Limits;
3. Adequacy of the Process of Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Control;
4. Risk Management Information System
5. Comprehensive Internal Control Systems.

Management has compiled a risk management framework that includes systems and policies that manage risk to support the health and achievement of Company growth, compliance with statutory provisions, human resource development and corporate culture development. The framework in the form of a Risk Management Application Guide prepared regulates:

1. Organization and Authority (Board of Commissioners and Board of Directors);
2. Policies and Procedures for Risk Management Implementation;
3. Identification, Measurement, Monitoring and Risk Control;
4. Comprehensive Internal Control System;
5. Implementation of Risk Management for Each Risk;
6. Assessment of the Implementation of Risk Management (Self-Assessment);
7. Assessment of Risk Levels.

Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Perusahaan didasarkan pada strategi manajemen risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko dan *limit* risiko. Penetapan toleransi risiko dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), dan strategi Perusahaan secara keseluruhan.

Direksi dan Dewan Komisaris juga bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris meliputi:

Kewenangan dan Tanggung Jawab

1. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko perusahaan.
2. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan.
3. Dalam mendukung penerapan manajemen risiko, Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa masing-masing satuan kerja di Perusahaan menerapkan manajemen risiko.
4. Direksi bertanggung jawab terhadap penilaian risiko Perusahaan.
5. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
   a. Mengarahkan dan menyetujui kebijakan manajemen risiko, termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Perusahaan;
   b. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;
   c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Perusahaan secara efektif;
   d. Membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi.

In order to effectively control risk, policies and procedures owned by the Company are based on risk management strategies and are equipped with risk tolerance and risk limits. Determination of risk tolerance and risk limit is carried out by taking into account the level of risk to be praised (risk appetite), risk tolerance, and overall Company strategy.

Board of Directors and Board of Commissioners are also responsible for the effectiveness of the implementation of risk management in the Company. Things that need to be considered in the implementation of the active supervision of the Directors and the Board of Commissioners include:

Authority and Responsibility

1. Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible for ensuring the implementation of risk management is adequate in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the Company.
2. Board of Directors and Board of Commissioners must understand well the types and levels of risk inherent in the Company's business activities.
3. In supporting the implementation of risk management, Board of Directors and the Board of Commissioners must ensure that each work unit in the Company implements risk management.
4. Board of Directors are responsible for the Company's risk assessment.
5. Authority and responsibility of the Board of Commissioners, at least includes:
   a. Directing and approved of risk management policies including risk management strategies and frameworks in accordance with the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance (risk tolerance) of the Company;
   b. Evaluating risk management policies and strategies at least once a year or in more frequent frequencies in terms of changes in factors that influence the Company's business activities significantly;
   c. Evaluating the accountability of the Board of Directors and provide direction for improvement in the implementation of risk management policies on a regular basis. Evaluation is carried out in order to ensure that the Board of Directors is managing the Company's activities and risks effectively;
   d. Forming a Risk Monitoring Committee in charge of assisting the Board of Commissioners in monitoring the implementation of risk management compiled by the Board of Directors.

6. Wewenang dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi:
   a. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko sesuai kondisi Perusahaan serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;
   b. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;
   c. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
   d. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;
   e. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam Perusahaan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Perusahaan, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan manajemen risiko kepada masing-masing satuan kerja di Perusahaan;
   f. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;
   g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko termasuk laporan mengenai profil risiko;
   h. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.

6. Authority and responsibility of the Board of Directors, at least including:
   a. Develop policies, strategies, and risk management frameworks in writing and comprehensively including overall risk limit and per type of risk, by taking into account the level of risk to be taken and risk tolerance according to Company conditions and calculate the impact of risk on capital adequacy. After obtaining approval from the Board of Commissioners, the Board of Directors established policies, strategies, and framework of the risk management in question;
   b. Compile, determine, and target procedures and tools to identify, measure, monitor, and control risks;
   c. Compile and determine the mechanism of transaction approval, including those that exceed the limit and authority for each level of position;
   d. Evaluate and/ or issue policies, strategies, and risk management frameworks at least once a year or in more frequent frequencies in terms of changes in factors that affect Company business activities, risk exposure, and/ or risk profile;
   e. Have an adequate understanding of the risks inherent in all business activities in the Company and are able to take the necessary actions in accordance with the Company's risk profile, among others by providing recommendations or proposals related to the implementation of risk management to each work unit in the Company;
   f. Establishing an organizational structure including clear authority and responsibility at each level of position related to the implementation of risk management;
   g. Responsible for the implementation of policies, strategies, and risk management frameworks that have been approved by the Board of Commissioners and evaluating and providing direction based on reports submitted by work units that carry out risk management functions including reports on risk profiles;
   h. Ensuring all material risks and impacts caused by the risk referred to have been followed up and submit accountability reports to the Board of Commissioners regularly. Reports referred to among others contain reports on development and problems related to material risk accompanied by improvement steps that have been, moderate, and will be carried out.

i. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Perusahaan yang ditemukan oleh satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal;
j. Mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;
k. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;
l. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain:
   - Adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian internal;
   - Penerapan manajemen risiko bebas dari benturan kepentingan antar satuan kerja;
m. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait SDM, maka Direksi harus:

1. Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;
2. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Perusahaan dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk satuan kerja bisnis, satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko maupun satuan kerja pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko;
3. Mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang manajemen risiko;
4. Memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan, personel satuan kerja bisnis Perusahaan, satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko dan satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal, dengan memperhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman/rekam jejak dan kemampuan yang

i. Ensuring the implementation of improvement steps for problems or deviations in Company business activities found by work units that carry out internal audit functions;
j. Developing a risk management culture including risk awareness at all levels of the organization, including adequate communication to all levels of organizations about the importance of effective internal control;
k. Ensure the adequacy of financial and infrastructure support for managing and controlling risks;
l. Ensure that the risk management function has been applied independently which is reflected, among others:
   - The separation of functions between work units that perform risk management functions that identify, measure, monitor and control risk with work units that perform internal control functions;
   - Implementation of risk management free from conflict of interests between work units;
m. Ensure that all policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Company are in accordance with applicable laws and regulations.

Human Resources (HR)

In order to implement the responsibility of implementing risk management related to human resources, the Board of Directors must:

1. Establish clear HR qualifications for each level of position related to the implementation of risk management;
2. Ensuring the adequacy of the quantity and quality of human resources in the Company and ensuring the HR intended to understand the duties and responsibilities, both for business work units, work units that carry out risk management functions and supporting work units responsible for the implementation of risk management;
3. Developing employee acceptance systems, development and training including managerial succession plans and adequate remuneration to ensure the availability of competent employees in the field of risk management;
4. Ensuring the increase in the competency and integrity of the leadership, personnel of the Company's business unit, work units that carry out risk management functions and work units that carry out internal audit functions, by taking into account factors such as knowledge, experience/track record and adequate ability in the

memadai di bidang manajemen risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, untuk menjamin efektivitas proses manajemen risiko;

5. Menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada masing-masing satuan kerja sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan;
6. Memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing satuan kerja memiliki:
   a. Pemahaman mengenai risiko yang melekat pada setiap kegiatan usaha/aktivitas Perusahaan;
   b. Pemahaman mengenai faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang memengaruhi produk/aktivitas Perusahaan, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Perusahaan;
   c. Kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko Perusahaan kepada Direksi dan komite yang melakukan fungsi manajemen risiko secara tepat waktu.
7. Memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, dan kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui/diketahui oleh Dewan Komisaris serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

Organisasi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Direksi Perusahaan menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan;
2. Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian internal dan satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko independen terhadap satuan kerja bisnis Perusahaan;
3. Struktur organisasi sebaiknya dirancang agar satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko memiliki akses dan dapat melaporkan langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris antara lain mengenai penilaian sendiri (*self-assessment*) atas risiko Perusahaan serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko tersebut; penilaian perubahan profil risiko Perusahaan; dan pengelolaan risiko yang berhubungan dengan strategi, misalnya strategi Perusahaan, merger dan akuisisi, dan investasi;

field of risk management through continuous education and training program, to ensure the effectiveness of the risk management process;

5. Placing competent officials and staff in each work unit in accordance with the nature, number and complexity of the Company's business activities;
6. Ensure that officials and staff who are placed in each work unit have:
   a. Understanding of the inherent risks in every Company's business activities/activities;
   b. Understanding of relevant risk factors and market conditions that affect Company products/activities, as well as the ability to estimate the impact of changes in these factors on the continuity of the Company's business;
   c. The ability to communicate the implications of Company risk exposure to Board of Directors and committees that perform risk management functions in a timely manner.
7. Ensuring that all human resources understand the strategy, the level of risk to be taken and risk tolerance, and the risk management framework that has been determined by the Board of Directors and approved/known by the Board of Commissioners and implement it consistently in the activities handled.

Risk Management Organization

In order to implement effective risk management, the Company's Board of Directors set the organizational structure by taking into account the following:

1. The organizational structure compiled must be accompanied by the clarity of duties and responsibilities in general and related to the implementation of risk management to all work units that are tailored to the purpose and policy of business, the size and complexity of the Company's business activities;
2. Organizational structure must be designed to ensure that work units that carry out internal control functions and work units that carry out independent risk management functions on the Company's business work unit;
3. Organizational structure should be designed so that the work unit that carries out risk management functions has access and can report directly to the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others, regarding self-assessment of the Company's risks and the steps to be taken to manage the risk; assessment of changes in Company risk profile; and risk management related to strategies, for example Company strategy, merger and acquisition, and investment;

4. Pimpinan dari satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas kejadian apa pun yang mungkin berdampak material pada sistem manajemen risiko Perusahaan;
5. Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil Perusahaan, serta pengalaman dan keahlian personel yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus dikaji secara rem untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pejabat terkait.

4. The leadership of the work unit who performs the risk management function must have the authority and obligation to inform the Board of Directors and the Board of Commissioners for any event that might have a material impact on the Company's risk management system;
5. Adequacy of the Delegation of Authority is adjusted to the characteristics and complexity of business activities, the level of risk to be taken by the Company, as well as the experience and expertise of the personnel concerned. The delegated authority must be reviewed in a brake to ensure that the authority is in accordance with the latest conditions and the level of performance of related officials.

Jenis Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Upaya untuk Mengelola Risiko

Agar seluruh pemangku kepentingan dan anggota organisasi memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang jenis risiko yang dihadapi Perusahaan, memudahkan dalam pengelolaan risiko dan menentukan skala prioritas dan fokus untuk mengelola potensi risiko yang berdampak signifikan terhadap sasaran Perusahaan, Perusahaan menentukan jenis atau kategori risiko sebagai berikut:

Types of Risks Faced by Companies and Efforts to Manage Risk

In order for all stakeholders and organizational members to have the same understanding and perception of the types of risks faced by the Company, facilitate the management of risk and determine the priority scale and focus on managing the potential risk that has a significant impact on the Company's targets, the Company determines the type or risk category as follows:

Jenis Risiko Type of Risk	Penjelasan	Explanation
Risiko Kredit Credit Risk	Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan	Risk due to failure of other parties in fulfilling obligations to the Company
Risiko Pasar Market Risk	Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar	Risk in the position of assets, liabilities, equity, and/or administrative accounts due to overall changes in market conditions
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan	Risk due to the inability of the Company to meet the maturity liabilities from the source of cash flow funding and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disturbing the Company's financial activities and conditions
Risiko Operasional Operational Risk	Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan	Risks due to inadequate and/or non-functioning of internal processes, human errors, system failures, and/or external events that affect the Company's operations
Risiko Hukum Legal Risk	Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum	Risks due to lawsuits and/or weaknesses of legal aspects
Risiko Stratejik Strategic Risk	Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis	Risks due to inaccuracy in taking and/or implementing a strategic decision and failure in anticipating changes in the business environment

Jenis Risiko Type of Risk	Penjelasan	Explanation
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	Risk due to the Company does not comply with and/or does not implement the laws and regulations and provisions
Risiko Reputasi Reputation Risk	Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan	Risks due to decreased levels of stakeholder confidence originating from negative perceptions of the Company
Rentabilitas Rentability	Penilaian dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif	Assessment by considering the level, trend, structure, stability of profitability, both through quantitative aspects and qualitative aspects
Permodalan Capital	Penilaian dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan, serta kecukupan manajemen permodalan Perusahaan	Assessment by considering the level, trend, structure, stability of profitability, both through quantitative aspects and qualitative aspects

Tinjauan/Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Hasil penilaian sistem manajemen risiko periode tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Review/Evaluation of the Effectiveness of the Company's Risk Management System

The results of the assessment of the risk management system for the period of 2022, are as follows:

Risiko Risk	Risiko Inheren Inherent Risk	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Quality of Implementation of Risk Management	Tingkat Risiko Risk level
Risiko Kredit Credit Risk	1 Rendah I Low	2 Agak Kuat I Satisfactory	1 Rendah I Low
Risiko Pasar Market Risk	1 Rendah I Low	1 Kuat I Strong	1 Rendah I Low
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	2 Sedang Rendah I Low to Moderate	2 Agak Kuat I Satisfactory	2 Sedang Rendah I Low to Moderate
Risiko Operasional Operational Risk	1 Rendah I Low	2 Agak Kuat I Satisfactory	1 Rendah I Low
Risiko Hukum Legal Risk	1 Rendah I Low	1 Kuat I Strong	1 Rendah I Low
Risiko Stratejik Strategic Risk	1 Rendah I Low	2 Agak Kuat I Satisfactory	1 Rendah I Low
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	1 Rendah I Low	2 Agak Kuat I Satisfactory	1 Rendah I Low
Risiko Reputasi Reputation Risk	1 Rendah I Low	2 Agak Kuat I Satisfactory	1 Rendah I Low
Peringkat Komposit Composite Rating	1 Rendah I Low	2 Agak Kuat I Satisfactory	1 Rendah I Low

Risiko Risk	Risiko Inheren Inherent risk
Rentabilitas Rentability	2 Sedang Rendah I Low to Moderate
Permodalan Capital	1 Rendah I Low

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan hasil analisis pencapaian profil risiko tahun 2022, Dewan Komisaris mengarahkan Perusahaan agar terus konsisten menjaga tingkat risiko Perusahaan agar terkelola dan terkontrol dengan baik atas Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Rentabilitas dan Permodalan, sehingga Perusahaan mampu secara optimal meningkatkan kinerja bisnisnya di masa depan secara berkelanjutan.

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS FOR THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

Based on the results of the analysis of the 2022 risk profile, the Board of Commissioners directed the Company to continue to consistently maintain the level of risk of the Company to be managed and well controlled on Credit Risk, Liquidity Risk, Profitability and Capital, so that the Company is able to optimally improve its business performance in the future.

PERMASALAHAN HUKUM
LEGAL ISSUES

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Problems and/or legal cases faced by the Company, as well as members of the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2022 are as follows:

Permasalahan Hukum Legal Issues	**Perdata** Civil		**Pidana** Criminal	
	Selesai Settled	**Dalam Proses** On Process	**Selesai** Settled	**Dalam Proses** On Process
Sumatera	11	1	1	1
Jabodetabek	4	3	0	0
Jawa Barat I West Java	6	1	0	0
Jawa Tengah I Central Java	15	2	0	1
Jawa Timur I East Java	5	1	3	3
Kalimantan dan Sulawesi Kalimantan and Sulawesi	2	2	3	1
Jumlah Total	**43**	**10**	**7**	**6**

Penyimpangan Internal dalam 1 (Satu) Tahun Internal Deviation within 1 (One) Year	**Jumlah kasus yang dilakukan oleh** Total cases committed by		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors	**Pegawai Tetap** Permanent Employees	**Pegawai Tidak Tetap** Non-Permanent Employees
Telah Diselesaikan Settled	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal In the Process of Internal Completion	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian Completion Not Yet Attempted	-	-	-
Telah menindaklanjuti melalui Proses Hukum Has Followed Up Through Legal Process	-	-	2
Total Penyimpangan Total Deviation	-	-	2

Sepanjang Tahun 2022 tidak ada kasus penyimpangan baru. Kasus penyimpangan sebagaimana tercantum dalam daftar tersebut merupakan kasus di tahun 2021 yang hingga saat ini masih dalam tahapan proses hukum.
Throughout 2022, there were no new cases of irregularities. Cases of irregularities as listed in the list are cases in 2021 which are currently still in the legal process stage.

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perkara hukum yang terkait dengan MUF, Dewan Komisaris dan Direksi MUF.

IMPORTANT CASES OUTSIDE OF LEGAL ASPECTS

Throughout 2022, there were no legal cases related to MUF, the Board of Commissioners and Board of Directors of MUF.

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat aktivitas MUF yang dilaporkan terindikasi mencemari lingkungan.

REPORTS ON COMPANY ACTIVITIES THAT POLLUTE THE ENVIRONMENT

Throughout 2022, there were no MUF activities reported that indicated pollution to the environment.

SANKSI ADMINISTRATIF
ADMINISTRATIVE SANCTIONS

No	Kategori Category	Nomor Surat OJK OJK Letter Number	Perihal Subject	Tanggal Date	Penyebab Pengenaan Sanksi Cause for Sanctions	Keterangan Information
1	Peringatan Warning	S-720/ NB.221/2022	Peringatan Pertama yang Berakhir dengan Sendirinya The First Warning That Ends by Itself	11 Maret 2022 March 11, 2022	Melewati batas waktu penyampaian bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris MUF telah memenuhi syarat keberlanjutan. Past the deadline for submitting evidence of certificates or other evidence showing that members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of MUF have fulfilled the sustainability requirements.	OJK menyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah memenuhi syarat keberlanjutan (surat OJK nomor S-949/NB.111/2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal "Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Tahun 2021 Mandiri Utama Finance") OJK states that the Board of Directors, Board of Commissioners and DPS have fulfilled the sustainability requirements (OJK letter number S-949/ NB.111/2022 dated March 14, 2022 regarding "Fulfillment of Mandiri Utama Finance's 2021 Sustainability Requirements")

No	Kategori Category	Nomor Surat OJK OJK Letter Number	Perihal Subject	Tanggal Date	Penyebab Pengenaan Sanksi Cause for Sanctions	Keterangan Information
2	Peringatan Warning	S-1360/ NB.221/2022	Peringatan Pertama Terkait Penyampaian Laporan Strategi Anti-*Fraud* 2021 First Warning Regarding Submission of the 2021 Anti-Fraud Strategy Report	2 Juni 2022 June 2, 2022	Belum menyampaikan laporan strategi anti-*fraud* untuk periode 2021 sebagai bagian dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Has not submitted the anti-fraud strategy report for the 2021 period as part of the report on the implementation of Good Corporate Governance.	Dicabut oleh surat nomor S-1670/ NB.221/2022 tertanggal 23 Juni 2022 perihal "Pencabutan Peringatan Pertama-Anti *Fraud*" Revoked by letter number S-1670/ NB.221/2022 dated June 23, 2022 regarding "Revocation of First Anti-Fraud Warning"
3	Peringatan Warning	S-1755/ NB.221/2022	Peringatan Tertulis - Laporan Perubahan RBT Written Warning - RBT Change Report	7 Juli 2022 July 7, 2022	Melewati batas waktu penyampaian laporan Perubahan Rencana Bisnis. Past the deadline for submitting a Change of Business Plan report.	-
4	Sanksi Denda Fine Sanctions	S-980/ NB.213/2022	Sanksi Administratif berupa Denda atas Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Periode Februari 2022 Administrative Sanctions in the form of Fines for Reporting on the Financial Information Service System (SLIK) for the February 2022 Period	22 September 2022 September 22, 2022	Melewati batas waktu penyampaian Koreksi Laporan Debitur Periode Februari 2022. Past the deadline for submitting Corrections to Debtor Reports for the February 2022 period.	Sanksi kewajiban membayar denda sebesar Rp50.000 The penalty for paying a fine of IDR50.000
5	Sanksi Denda Fine Sanctions	S-2787/ NB.221/2022	Sanksi Administratif berupa Denda Atas Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Periode Maret 2022 Administrative Sanctions in the form of Fines for Reporting the Financial Information Service System (SLIK) for the March 2022 period	31 Oktober 2022 October 31, 2022	Melewati batas waktu penyampaian Koreksi Laporan Debitur Periode Maret 2022. Past the deadline for submitting Corrections to Debtor Reports for the March 2022 period.	Sanksi kewajiban membayar denda sebesar Rp50.000 The penalty for paying a fine of IDR50.000

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO INFORMATION AND COMPANY DATA

Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari penerapan GCG yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan akses informasi dan data Perusahaan sebagai bagian dari keterbukaan informasi Perusahaan dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

Salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam menjaga keterbukaan informasi, khususnya kepada pemegang saham dan regulator, Perusahaan secara berkala melakukan korespondensi kepada pemegang saham regulator. Berikut adalah daftar korespondensi yang dilakukan Perusahaan kepada pemegang saham dan regulator:

The Company is always committed to applying information disclosure as part of the implementation of transparent and accountable GCG. Management of infomation and data access of the Company as part of the Company's information disclosure is carried out by the Corporate Secretary.

One form of the Company's commitment to maintain the information disclosure, especially to shareholders and regulators, the Company regularly corresponds with regulatory shareholders. The following is a list of correspondence conducted by the Company to shareholders and regulators:

Bentuk Korespondensi	Frekuensi Frequency	Correspondence form
Korespondensi dengan Dewan Komisaris	9	Correspondence with the Board of Commissioners
Korespondensi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	5	Correspondence with the Sharia Supervisory Board (DPS)
Korespondensi dengan Lembaga Publik Correspondence with Public Institutions		
Informasi	1	Information
Permohonan	2	Application
Pelaporan	11	Reporting
Tanggapan	20	Response
Korespondensi dengan Mitra Kerja dan Rekanan Correspondence with Business Partners and Partners		
Informasi	2	Information
Pemberitahuan	5	Announcement
Permohonan	2	Application
Tanggapan	19	Response
Korespondensi dengan Pemegang Saham/RUPS Correspondence with Shareholders/GMS		
Informasi	6	Information
Pelaporan	55	Reporting
Pemberitahuan	23	Announcement
Permohonan	32	Application
Undangan	3	Invitation
Korespondensi dengan Regulator Correspondence with Regulators		
Informasi	2	Information
Pelaporan	29	Reporting
Permohonan	17	Application
Tanggapan	2	Response

SITUS WEB PERUSAHAAN

Akses informasi yang komprehensif mengenai kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan serta berbagai informasi lain yang diperlukan oleh pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat diakses melalui situs web Perusahaan dengan alamat www.muf.co.id. Keberadaan situs web memiliki peran yang signifikan atas tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada pemegang saham, nasabah, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan lainnya. Situs web Perusahaan memungkinkan penyampaian informasi tidak terbatas yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah dan membantu seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mengenal Perusahaan.

COMPANY WEBSITE

Access to comprehensive information regarding operational activities and Company performance as well as various other information needed by shareholders and interested parties can be accessed through the Company's website with the address www.muf.co.id. The existence of a website has a significant role in the governance of information disclosure. Disclosure and availability of information on the Company's website will provide benefits to shareholders, customers, the general public, and other stakeholders. The Company's website allows the delivery of unlimited information that can be done quickly, precisely, affordably and helps all stakeholders to get to know the Company.

HUBUNGAN MEDIA

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif, Perusahaan melakukan hubungan media melalui rilis media maupun aktivitas hubungan dengan sejumlah media baik nasional maupun lokal untuk membantu penyampaian informasi Perusahaan kepada publik dapat tersampaikan.

MEDIA RELATIONSHIP

To be able to convey information comprehensively, the Company conducts media relations through media releases and media activities with a number of media both national and local to help the delivery of Company information to the public can be conveyed.

KODE ETIK
CODE OF CONDUCTS

Kode Etik merupakan pedoman perilaku Insan MUF dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan maupun rekan kerja. Adanya aturan dasar yang dimuat dalam Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) Edisi Tahun 2020 menjadikan salah satu komitmen Perusahaan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang mendukung Perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

KEBERADAAN PEDOMAN PERILAKU SEBAGAI KODE ETIK

Pedoman Kode Etik bertujuan untuk menjadi pedoman berperilaku pada aspek-aspek etika bisnis dan etika kerja bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan seluruh Insan MUF dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Etika kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Insan MUF dalam melaksanakan tugasnya. Etika bisnis merupakan prinsip moral yang berhubungan dengan perilaku individu, perlindungan terhadap harta milik Perusahaan, dan penyelenggaraan bisnis Perusahaan, salah satunya dalam berinteraksi dengan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan, sebagai dasar perilaku Insan MUF dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hal ini merupakan standar perilaku yang harus diterapkan oleh seluruh level organisasi.

Pedoman ini juga merupakan suatu bentuk kebijakan untuk mendorong perbaikan pengelolaan Perusahaan melalui pengembangan nilai-nilai atau budaya positif yang pada akhirnya akan meningkatkan reputasi Perusahaan yang berdampak positif pada kinerja Perusahaan. Pedoman Kode Etik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

Insan MUF

1. Memberikan pedoman kepada seluruh Insan MUF tentang perilaku yang baik sesuai dengan standar etika bisnis dan etika kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan.
2. Menumbuhkan hubungan yang harmonis, bersinergi antara Insan MUF dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan.

Perusahaan

Membantu meningkatkan citra Perusahaan dan mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan nasabah, masyarakat, Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya serta pemegang saham memiliki standar etika yang harus diperhatikan oleh Perusahaan.

The Code of Conducts Is a guideline for the behavior of MUF People in carrying out daily duties and activities and in conducting business relations with customers, partners and coworkers. The basic rules contained in the Code of Conduct 2020 Edition guidelines make one of the Company's commitments to the principles of governance that support the Company to achieve the vision and mission that has been set.

THE EXISTENCE OF BEHAVIORAL GUIDELINES AS A CODE OF CONDUCTS

The Code of Conducts Guidelines aim to be a guideline for behaving in aspects of business ethics and work ethics for the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Supporting Organs of the Board of Commissioners and all MUF People in carrying out tasks both inside and outside the Company. Work ethics is a translation of the basic principles of personal and professional behavior that is expected to be carried out by MUF People in carrying out their duties. Business ethics is a moral principle related to individual behavior, protection of Company property, and the implementation of the Company's business, one of which is in interacting with shareholders and stakeholders, as a basis for the behavior of human beings in carrying out business activities. This is a standard of behavior that must be applied by all levels of the organization.

This guideline is also a form of policy to encourage improvement in Company management through the development of positive values or cultures which will ultimately increase the Company's reputation that has a positive impact on the Company's performance. Guidelines for the Code of Conducts are expected to provide benefits for:

MUF People

1. Provide guidelines to all MUF People about good behavior in accordance with business ethical standards and work ethics in carrying out their duties and functions in realizing the Company's vision and mission.
2. Foster a harmonious relationship, synergizing between MUF People in carrying out all Company activities.

Company

Help improve the Company's image and encourage Company operational activities to be more efficient and effective considering relations with customers, the community, government and other stakeholders and shareholders have ethical standards that must be considered by the Company.

Pemegang Saham

Meningkatkan kepercayaan kepada pemegang saham bahwa Perusahaan telah dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabilitas, dan adil untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan oleh pemegang saham.

Pemangku Kepentingan

Memberikan kepastian dan perlindungan serta menciptakan kesejahteraan ekonomi sosial bagi kepada pemangku kepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan.

VISI, MISI, DAN NILAI PERUSAHAAN SEBAGAI LANDASAN UTAMA

Perusahaan telah menetapkan Kode Etik sesuai dengan visi dan misi Perusahaan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai dalam berinteraksi, baik dengan pihak di dalam lingkungan Perusahaan maupun pihak luar. Kode Etik Perusahaan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di lingkungan Perusahaan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan pegawai yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh pegawai. Seluruh pegawai diharapkan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Perusahaan dan menerapkan Kode Etik dalam kegiatan sehari-hari.

Shareholders

Increase confidence to shareholders that the Company has been managed carefully (prudent), efficient, transparent, accountability, and fair to achieve the level of performance expected by shareholders.

Stakeholders

Provide certainty and protection and create social economic welfare for stakeholders in dealing with the Company.

VISION, MISSION, AND COMPANY VALUE AS THE MAIN FOUNDATION

The Company has set a Code of Conducts in accordance with the Company's vision and mission that functions as a guideline for all employees in interacting, both with parties within the Company and outsiders. The Company's ethics code is introduced to all levels within the Company and written in the employee recruitment contract that must be understood and signed by all employees. All employees are expected to behave according to Company values and apply a Code of Conducts in daily activities.

VISI
VISION

To be the most reputable Company in offering innovative financing solutions and enabling value creation for our ecosystem through digitalization

MUF didirikan untuk menjadi perusahaan pembiayaan yang memiliki reputasi terbaik melalui penyediaan solusi pembiayaan yang inovatif serta mewujudkan penciptaan nilai bagi ekosistem industri pembiayaan melalui pengembangan digitalisasi.
MUF was established to become a finance Company that has the best reputation through the provision of innovative financing solutions and realize the creation of values to the financing industry ecosystem through digitalization development.

MISI
MISSION

Brings Tomorrow Today

Misi tersebut memiliki maksud dan harapan agar konsumen dapat memiliki kendaraan saat ini juga tanpa menunggu hari esok melalui pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan. Adapun misi Perusahaan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- Memberikan peningkatan nilai investasi kepada shareholder dan manfaat yang optimal kepada seluruh stakeholder.
- Memenuhi kebutuhan pembiayaan khususnya otomotif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
- Memberdayakan komunitas masyarakat untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kelestarian alam dan lingkungan.

This mission has the purpose and hope that consumers can own a vehicle today without waiting for tomorrow through financing provided by the Company. The complete mission of the Company is as follows:

- Providing the increase of investment value to shareholders and optimal benefits for all stakeholders.
- Fulfilling the financing needs, especially for automotive, so that it can improve the welfare for the community.
- Empowering the communities to care and responsible more for nature and environmental preservation

NILAI-NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN "AKHLAK"

AMANAH bermakna "memegang teguh kepercayaan yang diberikan".
1. Memenuhi janji dan komitmen.
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

KOMPETEN bermakna "terus belajar dan mengembangkan kapabilitas".
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas baik.

HARMONIS bermakna "saling peduli dan menghargai perbedaan".
1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

LOYAL bermakna "berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara".
1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

ADAPTIF bermakna "terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan".
1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
3. Bertindak proaktif.

KOLABORATIF bermakna "membangun kerja sama yang sinergis".
1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

COMPANY VALUES AND CULTURE "MORALS"

TRUSTWORTHY The mandate means "upholding the trust given".
1. Meet promises and commitments.
2. Responsible for the duties, decisions and actions taken.
3. Hold fast to moral and ethical values.

COMPETENT means "continue to learn and develop capability".
1. Improve self -competence to answer challenges that are always changing.
2. Helping others learn.
3. Complete tasks with good quality.

HARMONIOUS means "caring and respecting differences".
1. Appreciate everyone whatever the background.
2. Like to help others.
3. Build a conducive work environment.

LOYAL means "dedicated and prioritizes the interests of the nation and state".
1. Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and countries.
2. Willing to sacrifice to achieve greater goals.
3. Obey the leaders as long as it does not conflict with law and ethics.

ADAPTIVE means "continues to innovate and enthusiastic in moving or facing change".
1. Quickly adjust to be better.
2. Continue to make improvements to follow technological developments.
3. Act proactively.

COLLABORATIVE means "building synergistic cooperation".
1. Give opportunities to various parties to contribute.
2. Open in working together to produce added value.
3. Move the use of various resources for common purposes.

ISI PEDOMAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Pedoman Perilaku atau Kode Etik Perusahaan menjelaskan kebijakan berperilaku di Perusahaan, jenis-jenis pelanggaran, mekanisme pengaduan pelanggaran maupun sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Kebijakan dalam Pedoman Perilaku mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perusahaan, individu jajaran Perusahaan maupun pihak lain yang melakukan hubungan bisnis dengan Perusahaan.

Kode Etik Perusahaan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan dan Manfaat Pedoman Kode Etik
2. Standar Etika
3. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan
4. Etika Kerja
   a. Kepatuhan terhadap Hukum
   b. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
   c. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi/Donasi, Larangan Suap dan Korupsi
   d. Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
   e. Kerahasiaan Data dan Informasi
   f. *Insider Trading*
   g. Integritas Keuangan dan Perlindungan Aset Perusahaan
   h. Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan
5. Etika Bisnis
   a. Hubungan dengan Konsumen
   b. Hubungan dengan Mitra Bisnis
   c. Hubungan dengan Pemegang Saham
   d. Hubungan dengan Pemerintah (Regulator)
   e. Hubungan dengan Karyawan
   f. Hubungan dengan Kompetitor
   g. Hubungan dengan Organisasi/Pihak Lain
   h. Hubungan dengan Masyarakat
   i. Hubungan dengan Media Massa
   j. Komitmen atas Lingkungan
   k. Komitmen atas Kegiatan Politik
   l. Keselamatan Kesehatan dan Lingkungan Kerja
   m. Integritas Pribadi
6. Penerapan Kode Etik
   a. Kepatuhan Kode Etik
   b. Sosialisasi Kode Etik
   c. Pernyataan Kepatuhan Insan Perusahaan
   d. Solidaritas Insan Perusahaan
   e. Pengkinian Pedoman
   f. Komitmen Pencegahan Gratifikasi, Suap dan Korupsi
7. Pakta Integritas

GUIDELINES CONTENTS OF COMPANY CODE OF CONDUCT

Code of Behavior or Code of Conduct of the Company explains the policy of behaving in the Company, types of violations, complaints mechanisms of violations and sanctions for the conducted violations. Policies in the Behavior Guidelines regulate the matters that are the responsibility of the Company, individual members of the Company and other parties who engage in business relations with the Company.

The Company's Code of Conducts regulates the following matters:

1. Objectives and Benefits of Code of Conducts Guidelines
2. Ethical Standards
3. Vision, Mission and Company Values
4. Work Ethics
   a. Compliance with Law
   b. Conflict of Interest
   c. Giving and Receiving Gratification/Donation, Bribery and Corruption Prohibition
   d. Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding
   e. Data Confidentiality and Information
   f. Insider Trading
   g. Financial Integrity and Company Asset Protection
   h. Ethical behavior towards fellow employees
5. Business Ethics
   a. Relationship with Consumers
   b. Relationship with Business Partners
   c. Relationship with Shareholders
   d. Relations with the Government (Regulator)
   e. Relationship with Employees
   f. Relationship with Competitors
   g. Relationship with other Organizations/Parties
   h. Relationship with Society
   i. Relationship with Mass Media
   j. Commitment to the Environment
   k. Commitment to Political Activities
   l. Health Safety and Work Environment
   m. Personal Integrity
6. Code of Conducts Implementation
   a. Code of Conducts Compliance
   b. Socialization of Code of Conducts
   c. Statement of Compliance with Company People
   d. Solidarity of Company People
   e. Guidelines Update
   f. Commitment to Prevent Gratification, Bribery and Corruption
7. Integrity Pact

PEMBERLAKUAN KODE ETIK BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Dalam Pedoman Kode Etik Perusahaan telah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh Insan MUF. Kode Etik berlaku bagi seluruh Insan MUF baik karyawan kontrak maupun tetap, serta berlaku untuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Diharapkan dalam penerapan Kode Etik ini dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan setiap hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para mitra bisnis.

UPAYA PENYEBARAN PEDOMAN PERILAKU KEPADA KARYAWAN, PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Perusahaan berupaya untuk menyebarkan dan mensosialisasikan Pedoman Kode Etik kepada seluruh Insan MUF, termasuk kepada karyawan baru. Setiap Insan MUF dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pertanyaan seputar Pedoman Kode Etik kepada atasan langsung. Media/sarana dalam sosialisasi Pedoman Kode Etik dilakukan melalui:

1. Situs web Perusahaan.
2. Email *wistleblowing* Perusahaan yang disampaikan kepada seluruh Insan MUF.
3. Pada saat penandatanganan perjanjian kerja dengan karyawan.
4. *Standing banner, flyer* dan media-media lainnya pada area kantor.

ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCTS FOR ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

In the guidelines of the Company's ethics code, it has been explained about the basic principles of personal and professional behavior carried out by MUF People. The Code of Conducts applies to all MUF People both contract and permanent employees, as well as apply to the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors. It is hoped that the implementation of this Code of Conducts can encourage the realization of professional, responsible, reasonable, decent and trustworthy behavior in doing every business relationship with fellow colleagues and business partners.

EFFORTS TO DISSEMINATE CODE OF CONDUCT TO EMPLOYEE, IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF CODE OF CONDUCT

The Company seeks to spread and socialize the Code of Conducts Guidelines to all MUF People, including new employees. Every MUF person can ask for an explanation or submit questions about the Code of Conducts Guidelines to the Direct Supervisory. Media/Facilities In the socialization of the Code of Conducts Guidelines carried out through:

1. Company website.
2. The Company's whistleblowing email delivered to all MUF People.
3. At the time of signing the work agreement with employees.
4. Standing banners, flyers and other media in the office area.

FORMULIR PERNYATAAN KEPATUHAN OLEH PEGAWAI DALAM BUKU *CODE OF CONDUCT*

COMPLIANCE STATEMENT FORM BY EMPLOYEES IN CODE OF CONDUCT BOOK

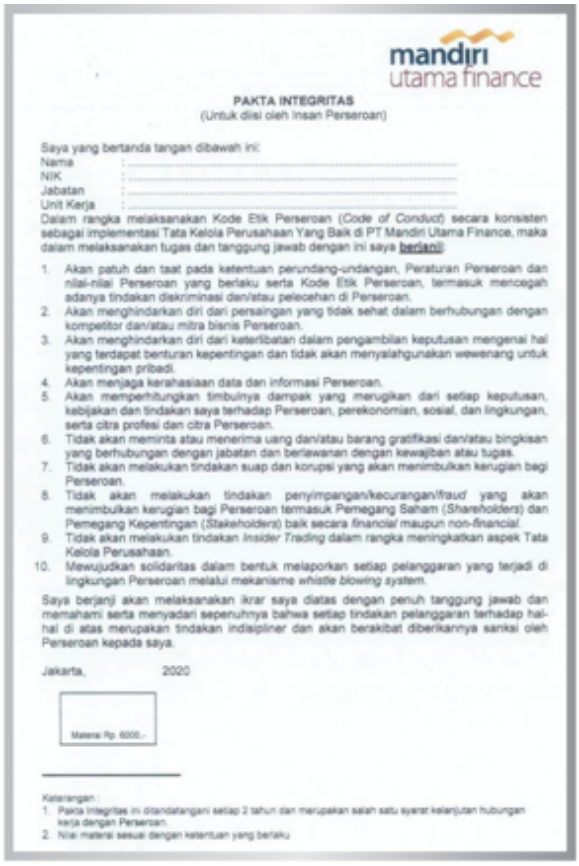

mandiri utama finance

PAKTA INTEGRITAS
(Untuk diisi oleh Insan Perseroan)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : .....
NIK : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Dalam rangka melaksanakan Kode Etik Perseroan (*Code of Conduct*) secara konsisten sebagai implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di PT Mandiri Utama Finance, maka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan ini saya berjanji:

1. Akan patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan, Peraturan Perseroan dan nilai-nilai Perseroan yang berlaku serta Kode Etik Perseroan, termasuk mencegah adanya tindakan diskriminasi dan/atau pelecehan di Perseroan.
2. Akan menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat dalam berhubungan dengan kompetitor dan/atau mitra bisnis Perseroan.
3. Akan menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan mengenai hal yang terdapat benturan kepentingan dan tidak akan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
4. Akan menjaga kerahasiaan data dan informasi Perseroan.
5. Akan memperhitungkan timbulnya dampak yang merugikan dari setiap keputusan, kebijakan dan tindakan saya terhadap Perseroan, perekonomian, sosial, dan lingkungan, serta citra profesi dan citra Perseroan.
6. Tidak akan meminta atau menerima uang dan/atau barang gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.
7. Tidak akan melakukan tindakan suap dan korupsi yang akan menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
8. Tidak akan melakukan tindakan penyimpangan/kecurangan/fraud yang akan menimbulkan kerugian bagi Perseroan termasuk Pemegang Saham (*Shareholders*) dan Pemegang Kepentingan (*Stakeholders*) baik secara *financial* maupun *non-financial*.
9. Tidak akan melakukan tindakan *Insider Trading* dalam rangka meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan.
10. Mewujudkan solidaritas dalam bentuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan melalui mekanisme *whistle blowing system*.

Saya berjanji akan melaksanakan ikrar saya diatas dengan penuh tanggung jawab dan memahami serta menyadari sepenuhnya bahwa setiap tindakan pelanggaran terhadap hal-hal di atas merupakan tindakan indisipliner dan akan berakibat diberikannya sanksi oleh Perseroan kepada saya.

Jakarta, 2020

Materai Rp. 6000,-

Keterangan :
1. Pakta Integritas ini ditandatangani setiap 2 tahun dan merupakan salah satu syarat kelanjutan hubungan kerja dengan Perseroan.
2. Nilai materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PENEGAKAN PEDOMAN KODE ETIK

Sanksi pelanggaran Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Setiap pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan, termasuk sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat kasus pelanggaran Kode Etik yang melibatkan Insan Perusahaan.

ENFORCEMENT OF CODE OF CONDUCTS GUIDELINES

Sanctions Violations of Code of Conduct are categorized in 3 (three) types, namely mild, medium and severe sanctions. Every violation of the Code of Conducts will be subject to sanctions in accordance with Company regulations, including criminal sanctions set in the applicable laws and regulations.

NUMBER OF CODE OF CONDUCTS VIOLATIONS

Throughout 2022, there were no cases of violation of the code of ethics involving the Company's personnel.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY

Pengadaan barang dan jasa di lingkup Perusahaan, meliputi seluruh pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Divisi *Network*, GA & *Procurement* (Divisi NGAP) QQ *Procurement Department*.

Procurement of goods and services in the scope of the Company, covering all procurement of goods and services whose implementation is under the supervision of the Network Division, GA & Procurement (NGAP Division) QQ Procurement Department.

Pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi:

1. Barang
   a. Semua barang modal (baik terdepresiasi atau tidak)
   b. Pembelian ATK
   c. Barang Cetakan
   d. Kegiatan *Integrated Dealer Benefit*
   e. Semua barang yang menggunakan logo Mandiri Utama Finance
2. Jasa
   a. Reparasi
   b. Renovasi
   c. Konsultansi
   d. *Outsource*

Pengajuan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan membuat *Form* Permintaan Barang Kantor (FPBK) dengan lengkap, jelas dan disetujui oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan. Divisi *Network*, GA & *Procurement* (Divisi NGAP) melakukan registrasi dan penetapan tempat pengadaan dan melakukan pencarian vendor untuk memenuhi permintaan barang dan jasa. Metode pemilihan vendor di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Inquiry quotation approach* untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak terlalu spesifik serta adanya jaminan perbaikan atas barang dan jasa tersebut dengan melakukan komparasi dari beberapa penawaran vendor/rekanan.
2. Tender formal yakni pendekatan secara khusus dan spesifik untuk pengadaan barang dan jasa yang bersifat investasi dengan nilai yang cukup besar dan kritikal, serta adanya jaminan perbaikan atas barang dan jasa tersebut.

The procurement of goods and services in question includes:

1. Goods
   a. All capital goods (whether depreciated or not)
   b. Purchase of ATK
   c. Printed goods
   d. Integrated Dealer Benefit Activities
   e. All items that use the Mandiri Main Finance logo
2. Service
   a. Repair
   b. Renovation
   c. Consultancy
   d. Outsource

Submission of procurement of goods and services is carried out by making the Office Goods Request Form (FPBK) completely, clearly and approved by the authorized official in accordance with the provisions in force in the Company. Network Division, GA & Procurement (NGAP Division) registered and determine the place of procurement and search for vendors to meet the demands of goods and services. The vendor selection methods include the following:

1. Inquiry Quotation Approach for procurement of goods and services that are not too specific and the guarantee of improvement of these goods and services by comparing several vendor/partner offers.
2. Formal Tender Namely a specific and specific approach for the procurement of goods and services that are investment in nature with a significant and critical value, as well as a guarantee of improvement of these goods and services.

Untuk kondisi tertentu, di mana dalam kondisi mendesak dapat dilakukan pembelian secara cepat dengan syarat vendor yang ditunjuk adalah vendor yang sudah menjadi rekanan dan sudah terverifikasi serta sesuai dengan standar yang berlaku di Perusahaan.

Perusahaan senantiasa melakukan penilaian terhadap keseluruhan vendor yang menjadi mitra pengadaan barang atau jasa di lingkungan MUF, minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam hal ini, Perusahaan senantiasa ikut serta mendukung program pemerintah untuk mendukung Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) melalui Pasar Digital (PaDi) dalam pengadaan barang dan Jasa.

For certain conditions, in which in urgent conditions, there can be a quick purchase with the condition that the designated vendor is a vendor that has become a partner and has been verified and in accordance with the applicable standards in the Company.

The Company always evaluates the entire vendor which is a partner of procurement of goods or services in the MUF environment, at least 1 time in a period of 1 (one) year.

In this case, the Company always participates in supporting government programs to support Middle -Class Micro Business (MSMEs) through the Digital Market (PADI) in the procurement of goods and services.

KEBIJAKAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN

TRANSPARENCY POLICY OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN

Perusahaan harus menyediakan informasi yang bersifat materil dan relevan baik terkait kondisi keuangan dan non-keuangan Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepetingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal penting lainnya yang memengaruhi pengambilan keputusan pemangku kepentingan.

Implementasi prinsip keterbukaan informasi ditujukan agar para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dapat melihat bagaimana pengelolaan Perusahaan, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat oleh Direksi. Implementasi prinsip keterbukaan tersebut meliputi:

1. Penyampaian informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan yang disampaikan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan OJK sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan oleh Perusahaan meliputi pengungkapan yang tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi, kondisi keuangan dan nonkeuangan, susunan dan kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhan dalam penerapannya, dan kejadian-kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi Perusahaan secara proporsional.
3. Keterbukaan dalam memberi penjelasan tentang transaksi dengan pihak terafiliasi (pihak yang mempunyai hubungan istimewa).

Bentuk implementasi keterbukaan kondisi keuangan dan non-keuangan dilakukan melalui penyampaian laporan-laporan yang mencerminkan kondisi keuangan Perusahaan kepada pemangku kepetingan dan OJK. Bentuk informasi-informasi yang disampaikan termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Informasi Kondisi Keuangan
   a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Direksi, profil Perusahaan dan tata kelola Perusahaan.

TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

The Company must provide material that is material and relevant both related to the financial and non-financial conditions of the Company in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. The Company must take the initiative to reveal not only the information required by the Articles of Association and the applicable laws and regulations, but also other important matters that affect the decision making of stakeholders.

The implementation of the principle of information disclosure is intended so that shareholders and other stakeholders can see how the management of the Company, the decision making process, and the implementation of accountability for the decisions made by the Board of Directors. The implementation of the principle of Disclosure includes:

1. Delivery of material information and relevant regarding companies delivered in a timely, adequate, clear, accurate, and easily accessible manner by stakeholders and OJK in accordance with their rights.
2. Information that must be disclosed by the Company includes disclosure that is not limited to the vision, mission, business targets, strategies, financial and non -financial conditions, the composition and compensation of Board of Directors and the Board of Commissioners and their families in other companies and companies, risk management systems, supervision systems and Internal control, system and implementation of GCG as well as the level of compliance in its implementation, and important events that can affect the Company's condition proportionally.
3. Transparency in giving an explanation of transactions with affiliated parties (those who have special relationships).

The form of implementation of financial and non-financial conditions disclosure is carried out through the delivery of reports that reflect the Company's financial condition to stakeholders and OJK. The forms of information conveyed include but are not limited to:

1. Information on Financial Conditions
   a. Summary of important financial data including summary support, diversity reports, Company profile and corporate governance.

b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia, Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
c. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada OJK dan pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK.
d. Laporan Tahunan Publikasi yang dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.
e. Laporan Bulanan ke OJK yang meliputi posisi keuangan, laba rugi komprehensif, perhitungan hasil usaha, arus kas, analisis kesesuaian aset dan liabilitas, dan laporan lain sesuai karakteristik bisnis Perusahaan.

2. Informasi Non-Keuangan
   a. Laporan Tahunan Penerapan GCG yang disampaikan kepada OJK setiap 1 (satu) tahun sekali.
   b. Laporan Penilaian Sendiri Manajemen Risiko yang disampaikan kepada OJK setiap 1 (satu) tahun sekali.
   c. Laporan Penyelesaian Keluhan Konsumen yang disampaikan kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sekali.
   d. Informasi-informasi seputar produk dan/atau layanan pemasaran Perusahaan yang disampaikan melalui media/situs web Perusahaan.

TRANSPARANSI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Perusahaan wajib mengungkapkan kepada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan Penerapan GCG mengenai:

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan/atau pada Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat. Hubungan keluarga adalah hubungan suami/istri dan hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar.

b. Annual Financial statements that have been audited by public accountants and public accounting firms registered with Bank Indonesia, the annual financial statements are made for 1 (one) financial year and are presented with a ratio of 1 (one) previous financial year.
c. Annual Report submitted to OJK and shareholders in accordance with OJK regulations.
d. Annual Publication Reports published through Indonesian newspapers that have national circulation.
e. Monthly Reports to OJK which include financial position, comprehensive profit and loss, calculation of operating outcomes, cash flows, asset and liability conformity analysis, and other reports according to the Company's business characteristics.

2. Non-Financial Information
   a. Annual Report on the Implementation of GCG submitted to OJK every 1 (one) year.
   b. Risk Management Self-Assessment Report submitted to OJK every 1 (one) year.
   c. Consumer Complaint Settlement Reports submitted to OJK every 3 (three) months.
   d. Information about the Company's products and/or marketing services delivered through the Company's media/website.

TRANSPARENCY OF SHAREHOLDING OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

The Company is required to reveal to the Company where the members of the Board of Directors referred to serving and stated in the GCG implementation report on:

1. Shareholding that reaches 5% or more of the Company where the members of the Board of Directors referred to serves and/or to other companies domiciled at and abroad.
2. Financial Relations and Family Relations with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or shareholders of the Company where the members of the Board of Directors are in office. Family relationships are husband/wife relationships and family relationships until the second degree, both vertical and horizontal, including in laws, son in law and brother in law.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

1. Kebijakan dan strategi komunikasi Perusahaan harus memungkinkan informasi yang dibutuhkan diberikan kepada OJK secara lengkap, tepat waktu, dan dengan cara yang efisien.
2. Perusahaan wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Perusahaan wajib mengungkapkan kepada OJK mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi:
   a. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal.
   b. Transaksi material dengan pihak terkait.
   c. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi.
   d. Informasi material lain mengenai Perusahaan.
4. Pengungkapan hal-hal penting tersebut dimuat dalam Laporan Penerapan GCG.

INFORMATION DISCLOSURE TO FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK)

1. Communication strategies and policies of the Company must allow the information needed to be given to OJK in full, on time, and in an efficient way.
2. Companies must have a reliable financial reporting system for supervision and other stakeholders.
3. The Company is required to reveal to the OJK regarding important matters, at least including:
   a. Resignation or dismissal of external auditors.
   b. Material transactions with related parties.
   c. The ongoing conflict of interest and/or that might occur.
   d. information on other materials regarding the Company.
4. Disclosure of these important things contained in the GCG implementation report.

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI DAN GRATIFIKASI

ANTI-CORRUPTION AND GRATIFICATION POLICIES

Untuk mengendalikan gratifikasi, Perusahaan telah menetapkan kebijakan antara lain dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Kode Etik dan kebijakan Perusahaan lainnya yang mana pada prinsipnya Perusahaan melarang pemberian atau penerimaan hadiah dan/atau perjamuan kepada atau pihak lain sebagai balas jasa dan/atau ungkapan simpati antar pribadi terkait dengan pekerjaan dan/atau jabatannya.

To control gratification, the Company has established policies including in the Corporate Governance Guidelines, Code of Ethics and other Company policies which in principle the Company prohibits giving or receiving gifts and/or entertainment to or other parties as remuneration and/or expressions of interpersonal sympathy related to work and/or position.

WHISTLEBLOWING SYSTEM/SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Dalam upaya meningkatkan sistem pelaporan oleh *whistle blower* dengan menjamin kerahasiaan, identitas pelapor dan informasi pelaporan, Mandiri Utama Finance telah menyediakan media pelaporan *whistle blower system* melalui alamat email **integrity@muf.co.id**.

The Whistleblowing System (WBS) is part of the internal control system in preventing irregular practices. In order to improve the whistle blower reporting system by ensuring confidentiality, reporter identity and reporting information, Mandiri Utama Finance has provided whistle blower system reporting media via the email address **integrity@muf.co.id**.

WBS adalah mekanisme pelaporan pelanggaran untuk memudahkan siapa pun yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan terkait dengan tindakan *fraud*, penyalahgunaan wewenang, perbuatan asusila di dalam lingkungan kerja, pelecehan dalam lingkungan kerja, penggunaan/peredaran narkoba, terlibat dalam kegiatan masyarakat/organisasi yang terlarang, gratifikasi dan pelanggaran kode etik lainnya yang melibatkan karyawan dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan Mandiri Utama Finance.

WBS is a violation reporting mechanism to make it easier for anyone who has information and wants to report an act related to acts of fraud, abuse of authority, immoral acts in the work environment, harassment in the work environment, drug use/circulation, involvement in prohibited community/organizational activities, gratuities and other violations of the code of ethics involving employees and/or parties related to Mandiri Utama Finance.

Sosialisasi *whistleblowing system* dan *fraud hotline* dilakukan secara periodik, minimal setahun sekali dengan menggunakan media *e-mail*, *training* ataupun media komunikasi lainnya. Tindakan ini untuk menciptakan budaya pencegahan *fraud* di antara karyawan Mandiri Utama Finance.

Socialization of the whistleblowing system and fraud hotline is carried out periodically, at least once a year by using e-mail, training or other communication media. This action is to create a culture of fraud prevention among Mandiri Utama Finance employees.

Pada tahun 2022 Perusahaan telah memiliki pedoman dan sistem WBS yang terkelola secara mandiri dan indipenden. Pedoman Kode Etik perusahaan mengatur tentang Solidaritas Insan MUF melalui pelaporan setiap penyimpangan melalui:

1. Email dengan alamat milis: integrity@muf.co.id.
2. Melalui surat (amplop tertutup) dengan memberi kode "*Whistleblowing System*" pada bagian kanan atas amplop, dengan alamat:

   Mandiri Utama Finance
   Menara Mandiri 1 Lantai 26-27
   Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55
   Jakarta Selatan 12190 DKI Jakarta, Indonesia

In 2022 the Company already had WBS guidelines and systems that are managed autonomously and independently. The Company's Code of Conduct guidelines regulate MUF's Personnel Solidarity through reporting any irregularities through:

1. Email with the mailing list address: integrity@muf.co.id.
2. Through a letter (closed envelope) by giving the code "Whistleblowing System" at the upper right of the envelope, with the address:

   Mandiri Utama Finance
   Mandiri Menara 1 Floor 26-27
   Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55
   South Jakarta 12190 DKI Jakarta, Indonesia

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

Perusahaan menyadari bahwa di berbagai bidang usaha saat ini, Teknologi Informasi (TI) tidak lagi dipandang hanya sebagai pelengkap kegiatan operasional. Dengan perkembangan dan inovasi yang pesat, peran TI pun bergeser dan semakin diakui sebagai salah satu faktor penentu yang penting bagi keberhasilan dan keberlangsungan sebuah bisnis.

Tujuan pengembangan TI di Perusahaan antara lain untuk mendukung pengelolaan Perusahaan secara strategis; menyediakan dan mengembangkan proses bisnis yang efisien dan efektif dengan senantiasa memperhatikan keselarasan dengan tujuan Perusahaan; memastikan pelaksanaan proses manajemen risiko yang kuat dan komprehensif; memastikan penyediaan layanan berkualitas berbasis teknologi informasi yang andal dan inovatif; serta mendukung sekaligus menjadi faktor pendorong untuk pengembangan usaha Perusahaan.

STRATEGI, FOKUS, DAN KEBIJAKAN 2022

1. Tahun 2022 Perusahaan berencana untuk melakukan pengembangan infrastruktur untuk memperkuat keamanan informasi data Perusahaan dan melakukan pengembangan aplikasi antar muka agar dapat lebih mudah dalam interkoneksi dengan bisnis digital. Selain itu, Perusahaan merencanakan pengembangan sistem AML untuk meningkatkan penerapan program APU dan PPT agar lebih sistematis dan efektif.
2. Perusahaan belum memiliki rencana untuk melakukan pengadaan aplikasi inti baru.
3. Perusahaan memiliki rencana untuk menjalin kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi untuk menyediakan *software* dan *hardware* demi menunjang efektivitas kinerja sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
4. Perusahaan belum memiliki rencana untuk melakukan pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Perusahaan.

The Company realizes that in various fields of business today, Information Technology (IT) is no longer seen as a complement to operational activities. With rapid development and innovation, the role of IT is shifting and increasingly recognized as one of the important determinants for the success and sustainability of a business.

The objectives of IT development in companies include to support the Company's strategic management; Provide and develop efficient and effective business processes by always paying attention to harmony with Company goals; Ensuring the implementation of a strong and comprehensive risk management process; Ensure the provision of quality and innovative information technology based on information technology; as well as supporting as well as a driving factor for the development of the Company's business.

STRATEGY, FOCUS, AND POLICY 2022

1. In 2022 the Company plans to develop infrastructure to strengthen the security of the Company's data information and develop interface applications to make it easier to interconnect with digital business. In addition, the Company plans to develop an AML system to improve the implementation of the AML & CFT program to make it more systematic and effective.
2. The Company has no plans to procure new core applications.
3. The Company plans to collaborate with information technology service providers to provide software and hardware to support performance effectiveness in accordance with Company regulations.
4. The Company has no plans to develop and procure other basic information technology that can increase and/or increase the Company's risks.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

Tata kelola teknologi informasi (TI) dilaksanakan untuk memastikan penggunaan teknologi informasi dalam mencapai tujuan perusahaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Mandiri Utama Finance menerapkan tata kelola TI dalam proses pengelolaan organisasi, investasi dan pemilihan teknologi, implementasi, serta operasional.

Secara struktural pengelola teknologi informasi dibantu oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi yang dipimpin oleh SEVP Finance & ICT. Komite ini bertanggung jawab menentukan arah dan kebijakan TI, menentukan dan mengawasi proyek yang stratejik, melakukan pemantauan kinerja TI, dan mitigasi risiko TI. Komite melakukan aktivitas pemantauan dan evaluasi secara periodik. Dalam hal pengawasan proyek stratejik, komite bersama dengan jajaran Direksi lain melakukan pemantauan dan evaluasi setiap bulan, agar proyek dapat berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, tetap mengedepankan kualitas, dan melakukan mitigasi risiko dengan baik.

Perusahaan juga telah melengkapi sistem TI dengan mekanisme pemulihan jika terjadi gangguan karena bencana atau kerusakan sistem produksi. Mekanisme pemulihan bencana ini sudah mengacu pada Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023

1. Pada Tahun 2023, Perusahaan berencana untuk melakukan perbaikan tata kelola keamanan informasi, pengembangan infrastruktur untuk memperkuat keamanan informasi, dan perbaikan operasional keamanan informasi. Selain itu Perusahaan berencana melakukan pengembangan aplikasi pengelolaan antar muka agar dapat lebih mudah dalam membuat interkoneksi dengan bisnis digital.

2. Pada Tahun 2023, Perusahaan belum memiliki rencana untuk melakukan pengadaan aplikasi inti baru.

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

Information technology (IT) governance is carried out to ensure the use of information technology in achieving Company goals can be done effectively and efficiently. Mandiri Utama Finance applies information technology governance in the process of organizational management, investment and selection of technology, implementation, and operations.

Structurally, the Management of IT is assisted by the Information Technology Steering Committee led by SEVP Finance & ICT. This committee is responsible for determining the direction and policy of IT, determining and overseeing strategic projects, monitoring IT performance, and mitigation of IT risk. The committee conducts periodic monitoring and evaluation activities. In the case of strategic project supervision, the Committee together with other board of directors conducts monitoring and evaluating every month, so that the project can run on time, according to the budget, still prioritize quality, and mitigate risk well.

The Company has also equipped IT systems with a recovery mechanism in the event of disaster or damage of the production system. This disaster recovery mechanism has referred to OJK Regulation No. 4/POJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions.

STRATEGIC PLAN FOR 2023

1. In 2023, the Company plans to improve information security governance, develop infrastructure to strengthen information security, and improve information security operations. In addition, the Company plans to develop an interface management application to make it easier to make interconnections with digital businesses.

2. In 2023, the Company has plans to procure new core applications.

3. Pada Tahun 2023, Perusahaan memiliki rencana untuk menjalin kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi untuk menyediakan *software* dan *hardware* demi menunjang efektivitas kinerja sesuai dengan ketentuan Perusahaan. Salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama perbaikan dan perawatan perangkat *software* maupun *hardware*, pengembangan sistem AML untuk meningkatkan penerapan program APU dan PPT agar lebih sistematis dan efektif.

4. Pada Tahun 2023 Perusahaan belum memiliki rencana untuk melakukan pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Perusahaan.

3. In 2023, the Company plans to collaborate with information technology service providers to provide software and hardware to support performance effectiveness in accordance with Company regulations. One of them is by collaborating on the repair and maintenance of software and hardware devices, the development of an AML system to improve the implementation of the AML & CFT program to make it more systematic and effective.

4. In 2023 the Company has no plans to develop and procure other basic information technology that can increase and/or increase the Company's risks.

EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

EVALUATION, MONITORING AND INCREASING THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

MUF melakukan evaluasi penerapan prinsip GCG guna melihat efektivitas dari implementasi GCG yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap seluruh kebijakan penerapan GCG di lingkup Perusahaan. Sebagai perusahaan pembiayaan yang memiliki kepatuhan terhadap ketentuan OJK, penilaian penerapan GCG yang dilakukan oleh Perusahaan adalah penilaian berkala dengan menggunakan pendekatan *self-assessment* yang mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, dan terintegrasi dengan Bank Mandiri sebagai entitas induk MUF.

MUF evaluates the implementation of the GCG principle to see the effectiveness of the implementation of the GCG that has been implemented. The evaluation results are the basis for companies to make improvements to all GCG implementation policies in the Company's scope. As a finance Company that has compliance with OJK provisions, the assessment of the implementation of GCG carried out by the Company is a periodic assessment using the self-assessment approach that refers to the rules set by the OJK, and is integrated with Bank Mandiri as MUF parent entity.

DASAR DAN METODE PENILAIAN

Penilaian GCG melalui *self-assessment* ini mengacu kepada 2 (dua) ketentuan, yaitu:

1. Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan
2. Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Untuk kriteria penilaian Tata Kelola Perusahaan untuk ketentuan di atas, dapat dilihat di bawah ini:

BASIS AND METHOD OF ASSESSMENT

GCG assessment through this self-assessment refers to 2 (two) conditions, namely:

1. OJK Regulation No. 28/POJK.05/2020 concerning Assessment of the Health Level of Non -Bank Financial Services Institutions; and
2. OJK Circular Letter No. 11/SEOJK.05/2020 concerning Assessment of the Health Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.

Corporate Governance Assessment Criteria For the above provisions, can be seen below:

Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 serta Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020
OJK Regulation No. 28/POJK.05/2020 and OJK Circular Letter No. 11/SEOJK.05/2020

No.	Tindak Lanjut atas Keputusan	Follow up on the Decision
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Entitas Induk untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah	Implementation of the Duties and Responsibilities of the Parent Entity for the Company of Islamic Financing
4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pemegang Saham atau yang Setara	Implementation of the Duties and Responsibilities of Shareholders or Equivalent
5	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Completeness and Implementation of the Committee's Duties
6	Penanganan Benturan Kepentingan	Handling conflict of interest
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Perusahaan	Implementation of Company Compliance Functions
8	Penerapan Fungsi Audit Internal	The Implementation of the Internal Audit Function
9	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	Implementation of External Audit Functions
10	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Internal	Implementation of Risk Management Including an Internal Control System

Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 serta Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020

OJK Regulation No. 28/POJK.05/2020 and OJK Circular Letter No. 11/SEOJK.05/2020

No.	Tindak Lanjut atas Keputusan	Follow up on the Decision
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pelaporan Internal	Transparency of Financial and Non-Financial Conditions, Reports on the Implementation of Good Corporate Governance and Internal Reporting
12	Rencana Strategis Perusahaan	Company Strategic Plan

Penilaian atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan oleh internal MUF, yang tentunya untuk melakukan penilaian tersebut, dilakukan secara independen agar hasil dari penilaian tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Assessment of the implementation of Good Corporate Governance is carried out by internal MUF, which of course to conduct the assessment is carried out independently so that the results of the assessment reflect the actual conditions.

Penilaian Penerapan GCG Tahun Buku 2022

Assessment of GCG Implementation Fiscal Year 2022

Jenis Penilaian Type of Assessment	*Self-Assessment*
Assessor Assessor	Internal Perusahaan Internal Company
Periode Penerapan Implementation Period	01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 January 1, 2022 to December 31, 2022
Tahun Ukur Measuring Year	Tahun Buku 2022 Fiscal Year 2022

Rincian hasil *self-assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

Details of the results of the self-assessment of the implementation of the Company's GCG for the 2022 fiscal year as follows:

No.	Tindak Lanjut atas Keputusan Follow up on the Decision	Nilai Mark
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors	1,03
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	1,00
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Entitas Induk untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah Implementation of the Duties and Responsibilities of the Parent Entity for the Company of Islamic Financing	1,00
4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pemegang Saham atau yang Setara Implementation of the Duties and Responsibilities of Shareholders or Equivalent	1,00
5	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Completeness and Implementation of the Committee's Duties	1,00
6	Penanganan Benturan Kepentingan Handling Conflict of Interest	1,00
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Implementation of Company Compliance Functions	1,10

No.	Tindak Lanjut atas Keputusan Follow up on the Decision	Nilai Mark
8	Penerapan Fungsi Audit Internal The Implementation of the Internal Audit Function	1,18
9	Penerapan Fungsi Audit Eksternal Implementation of External Audit Functions	1,00
10	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Internal Implementation of Risk Management Including an Internal Control System	1,13
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pelaporan Internal Transparency of Financial and Non-Financial Conditions, Reports on Good Corporate Governance and Internal Reporting	1,00
12	Rencana Strategis Perusahaan Company Strategic Plan	1,08
Total Nilai Total Value		12,50
Rata-Rata Nilai Average Value		1,04
Peringkat Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik Ranking of Good Corporate Governance Factors		**1,00**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun Buku 2022

Self-Assessment Results of Corporate Governance Implementation for Fiscal Year 2022

Nilai dan Peringkat Value and Rank	Definisi Peringkat/Analisis Definition Of Ranking/Analysis
12,50	Mencerminkan manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik maka, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perusahaan. Reflecting that the management of the Company has implemented Good Corporate Governance which is generally very good. This is reflected in the very adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are not significant and can be corrected immediately by the Company's management.

Penilaian Penerapan GCG Tahun Buku 2021

Assessment of GCG Implementation Fiscal Year 2021

Jenis Penilaian Type of Assessment	*Self-Assessment*
Assessor Assessor	Internal Perusahaan Internal Company
Periode Penerapan Implementation Period	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 January 1, 2021 to December 31, 2021
Tahun Ukur Measuring Year	Tahun Buku 2021 Fiscal Year 2021

Rincian hasil *self-assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk Tahun Buku 2021 sebagai berikut:

Details of the results of the self-assessment of the implementation of the Company's GCG for the Fiscal Year 2021 as follows:

No.	**Tindak Lanjut atas Keputusan** Follow up on the Decision	**Nilai** Mark
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors	1.21
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	1.06
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab entitas induk untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah Implementation of the Duties and Responsibilities of the Parent Entity for the Company of Islamic Financing	1.17
4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pemegang Saham atau yang Setara Implementation of the Duties and Responsibilities of Shareholders or Equivalent	1.00
5	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Completeness and Implementation of the Committee's Duties	1.14
6	Penanganan Benturan Kepentingan Handling Conflict of Interest	1.20
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Implementation of Company Compliance Functions	1.40
8	Penerapan Fungsi Audit Internal The Implementation of the Internal Audit Function	1.29
9	Penerapan Fungsi Audit Eksternal Implementation of External Audit Functions	1.00
10	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Internal Implementation of Risk Management Including An Internal Control System	1.50
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pelaporan Internal Transparency of Financial and Non-Financial Conditions, Reports on Good Corporate Governance and Internal Reporting	1.47
12	Rencana Strategis Perusahaan Company Strategic Plan	1.23
Total Nilai Total Value		14.67
Rata-Rata Nilai Average Value		1.22
Peringkat Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik Ranking of Good Corporate Governance Factors		**1.00**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun Buku 2021

The Results of the Self-Assessment of the Implementation of Corporate Governance for the Fiscal Year 2021

Nilai dan Peringkat Value and rank	Definisi Peringkat/Analisis	Definition of Ranking/Analysis
14,67 1 (Sangat Baik) (Very good)	Mencerminkan manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik maka, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perusahaan.	Reflecting that Company management has implemented a good Company governance that is generally very good. This is reflected in the fulfillment of very adequate compliance with the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, in general these weaknesses are not significant and can be immediately improved by Company management.

KEPATUHAN TERHADAP PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES FOR FINANCING

Peta Jalan atau *Roadmap* GCG yang diterbitkan OJK pada tahun 2014 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan GCG di masa-masa berikutnya. Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan penyampaian informasi yang wajar menjadi bahasan yang dapat menjadi pegangan bagi entitas usaha, tak terkecuali bagi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) khususnya Perusahaan Pembiayaan.

Sebagai perusahaan pembiayaan, MUF telah melaksanakan seluruh peraturan yang dikeluarkan OJK, dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dalam hal pedoman penerapan GCG yang diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, MUF berupaya untuk mengembangkan prinsip GCG sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun uraian penerapannya dapat dilihat di bawah ini.

Road maps or GCG roadmaps issued by OJK in 2014 have a significant influence on the development of GCG in the next periods. Emphasis on transparency, accountability, and delivery of reasonable information is a discussion that can be a guide for business entities, including the Non-Bank Financial Industry (IKNB), especially finance companies.

As a finance company, MUF has implemented all regulations issued by the OJK, and will continue to strive to make improvements to create added value for shareholders and stakeholders. In the case of guidelines for the implementation of GCG which are regulated based on OJK Regulation No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, MUF seeks to develop the GCG principles in accordance with the regulation. The description of its implementation can be seen below.

KESESUAIAN PERKEMBANGAN PENERAPAN GCG DI LINGKUP MUF DENGAN PERATURAN OJK NO. 29/POJK.05/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 30/POJK.05/2014 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

CONFORMITY OF THE DEVELOPMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GCG IN THE SCOPE OF MUF WITH OJK REGULATION NO. 29/POJK.05/2020 CONCERNING AMENDMENTS TO OJK REGULATIONS NO. 30/POJK.05/2014 CONCERNING GOOD CORPORATE GOVERNANCE FOR FINANCING COMPANIES

	Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles		**Status**
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Implementation of Good Corporate Governance	Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).	The principles of Good Corporate Governance include: transparency, accountability, responsibility, independence, and equality and fairness.	√
	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bertujuan untuk: 1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi pemangku kepentingan, khususnya Debitur, Kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya; 2. Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien; 3. Meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan; 4. Mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif, dan memenuhi prinsip perlindungan konsumen; dan 5. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.	Implementation of Good Corporate Governance aims to: 1. Optimizing the value of the Company for Stakeholders, especially Debtors, Creditors and/or other Stakeholders; 2. Improve the management of the Company in a professional, effective and efficient manner; 3. Improve the compliance of the Company Organs and the Sharia Supervisory Board and their subordinates so that in making decisions and carrying out actions based on high ethics, compliance with laws and regulations, and awareness of the Company's social responsibility towards Stakeholders and environmental sustainability; 4. Creating a healthier, more reliable, trustworthy, competitive Company that meets the principles of consumer protection; and 5. Increasing the Company's contribution to the national economy.	√

	Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles		Status
	Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal; 3. Penanganan benturan kepentingan; 4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal; 5. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal; 6. Penerapan kebijakan remunerasi; 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan 8. Rencana bisnis.	The implementation of the principles of Good Corporate Governance must be set in a guideline which at least outlines the following matters: 1. Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board; 2. Completeness and implementation of the duties of committees and work units that carry out the internal control function; 3. Handling conflict of interest; 4. Implementation of compliance function, internal audit, and external audit; 5. Implementation of risk management, including internal control systems; 6. Application of remuneration policies; 7. Transparency of financial and non-financial conditions; and 8. Business plan.	√
	Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.	In carrying out business activities, the Company is required to carry out its business activities in a healthy manner and comply with all laws and regulations on the financial services industry which are under the supervision of the FSA.	√
	Perusahaan wajib memiliki standar operasi dan prosedur yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.	The Company is required to have adequate operating standards and procedures for all business activities of the Company determined by the Board of Directors.	√
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	RUPS Perusahaan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.	The Company's GMS must be held in accordance with the provisions of laws and regulations and the Company's articles of association which are transparent and accountable.	√
	Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, Kreditur, dan kepentingan pemegang saham minoritas.	In making decisions, the GMS must safeguard the interests of all parties, especially the interests of debtors, creditors and the interests of minority shareholders.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles			Status
Pemegang Saham Shareholders	Setiap pihak yang menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.	Each party who becomes the Controlling Shareholder of the Company must comply with the fit and proper test requirements. Provisions regarding fit and proper test regulated by OJK Regulations regarding fit and proper test.	√
	Pemegang saham Perusahaan melalui RUPS harus memastikan Perusahaan dijalankan berdasarkan praktik usaha pembiayaan yang sehat.	The Company's shareholders through the GMS must ensure that the Company is run based on sound financing business practices.	√
	Pemegang saham harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan.	Shareholders must have a commitment to the development of the Company's operations.	√
	Pemegang saham Perusahaan dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.	The Company's shareholders are prohibited from interfering in the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's articles of association and laws and regulations, except in the context of exercising the rights and obligations as the GMS.	√
	Pemegang saham Perusahaan yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan yang sama harus mendahulukan kepentingan Perusahaan.	Company shareholders who serve as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or members of the Sharia Supervisory Board in the same Company must prioritize the interests of the Company.	√
Direksi Board of Directors	Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.	Companies that have assets of more than IDR200,000,000.00 (two hundred billion rupiah) must have at least 3 (three) members of the Board of Directors.	√
	Seluruh anggota Direksi dari Perusahaan yang seluruh pemegang sahamnya: warga negara Indonesia; dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, wajib berkewarganegaraan Indonesia.	All members of the Board of Directors of the Company whose shareholders are: Indonesian citizens; and/or Indonesian legal entities that are owned directly or indirectly by Indonesian citizens, must be Indonesian citizens.	√
	Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.	Companies in which there is direct or indirect foreign ownership must have at least 50% of the members of the Board of Directors who are Indonesian citizens.	√
	Anggota Direksi Perusahaan wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.	Members of the Company's Board of Directors must be domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles		Status
Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki surat izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang.	For members of the Board of Directors with foreign nationality, they must have a residence permit and work permit from the competent authority.	√
Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.	All members of the Company's Board of Directors must have knowledge relevant to their position.	√
Anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.	Members of the Company's Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as Directors in other companies except as members of the Board of Commissioners in a maximum of 3 (three) other companies. Does not include concurrent positions if a member of the Board of Directors who is responsible for supervising participation in a subsidiary that has a business in the financing sector, carries out functional duties as a member of the Board of Commissioners in a subsidiary controlled by the Company, as long as the concurrent positions do not result in the concerned neglecting the implementation of duties and authority as a member of the Board of Directors of the Company.	√
Setiap anggota Direksi Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.	Each member of the Company's Board of Directors is required to pass a fit and proper test. Provisions regarding fit and proper test are regulated by OJK Regulations regarding fit and proper test.	√
Anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Mampu untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur dan profesional; 2. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya; 3. Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi; 4. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan Debitur, Kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya; dan 5. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.	Members of the Company's Board of Directors are required meet the following criteria: 1. Able to act in good faith, honestly and professionally; 2. Able to act for the benefit of the Company and/or other Stakeholders; 3. Prioritize the interests of the Company and/or other Stakeholders over personal interests; 4. Able to make decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company and Debtors, Creditors, and/or other Stakeholders; And 5. Able to avoid abuse of authority to gain personal advantage that is not appropriate or cause harm to the Company.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles		Status
Direksi Perusahaan wajib: 1. Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya; 2. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; 3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS; 4. Memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, Kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya; 5. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu dan lengkap; dan 6. Membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang Organ Perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah.	The Board of Directors of the Company must: 1. Comply with laws and regulations, articles of association, and other internal regulations of the Company in carrying out their duties; 2. Manage the Company in accordance with their authority and responsibility; 3. To be responsible for carrying out their duties to the GMS; 4. Ensure that the Company pays attention to the interests of all parties, especially the interests of Debtors, Creditors and/or other Stakeholders; 5. Ensure that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board in a timely and complete manner; and 6. Assist and provide facilities and/or resources for the smooth implementation of the duties and authorities of the Company Organs and the Sharia Supervisory Board.	√
Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran dan fungsi keuangan, kecuali Direktur Utama.	The Company is required to have a member of the Board of Directors in charge of the compliance function. The Compliance Function is a series of actions or steps to ensure that policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Company are in accordance with laws and regulations and ensure the Company's compliance with the commitments made by the Company to OJK and/or other competent supervisory authority. Members of the Board of Directors who are in charge of the compliance function cannot be held concurrently by members of the Board of Directors who are in charge of the financing, marketing and financial functions, except for the President Director.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles		Status
Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Satuan kerja atau pegawai yang bertugas melaksanakan fungsi kepatuhan bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.	Companies are required to have work units or employees who carry out the compliance function. The work unit or employee in charge of carrying out the compliance function is tasked with assisting the Board of Directors in ensuring the Company's compliance with laws and regulations in the field of financing business and other laws and regulations. The work units or employees who carry out the Compliance Function are responsible to the members of the Board of Directors who are in charge of the Compliance Function.	√
Anggota Direksi Perusahaan dilarang: 1. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; 2. Memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; 3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan 4. Memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang ditetapkan dalam RUPS.	Members of the Company's Board of Directors are prohibited from: 1. Carry out transactions that have a conflict of interest, with the activities of the Company where the said member of the Board of Directors is serving; 2. Take advantage of his position at the Company where the member of the Board of Directors is serving for personal, family and/or other party interests that may harm or reduce the profits of the Company where the member of the Board of Directors is serving; 3. Taking and/or receiving personal benefits from the Company where the member of the Board of Directors is serving other than the remuneration and facilities determined based on the resolution of the GMS; and 4. Fulfill the request of shareholders related to the operational activities of the Company where the member of the Board of Directors serves other than those specified in the GMS.	√

	Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles		Status
	Direksi Perusahaan wajib: 1. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 2. Menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun. 3. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.	The Company's Board of Directors are required to: 1. Hold regular meetings of the Board of Directors at least 1 (one) time in 1 (one) month. 2. Attend at least 50% of the number of Board of Directors meetings in a period of 1 (one) year. 3. The results of the Board of Directors meeting must be stated in the minutes of the Board of Directors meeting and properly documented.	√
	Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.	Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Directors meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Directors meeting along with the reasons for the dissenting opinions. Members of the Company's Board of Directors who are present or who are not present at the Board of Directors meeting are entitled to receive a copy of the minutes of the Board of Directors meeting.	
	Jumlah rapat Direksi yang diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	The number of Board of Directors meetings held and the number of attendance of each member of the Company's Board of Directors must be included in the report on the implementation of Good Corporate Governance.	√
	Direksi Perusahaan harus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.	The Board of Directors of the Company must guarantee effective, precise and fast decision making and can act independently, not having interests that could interfere with their ability to carry out their duties independently and objectively.	√
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1. Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. 2. Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.	1. Companies that have assets of more than IDR200,000,000,000.00 (two hundred billion rupiah) must have at least 2 (two) members of the Board of Commissioners. 2. The Company must have at least 1 (one) member of the Board of Commissioners domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.	√
	Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki: surat izin menetap; dan surat izin bekerja, dari instansi berwenang.	For members of the Board of Commissioners who are foreign nationals domiciled in the territory of the Republic of Indonesia, they must have: a residence permit; and a work permit from the competent authority.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles		Status
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Perusahaan lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila: 1. Anggota Dewan Komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau 2. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan. 3. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan tidak pernah menjadi anggota Direksi pada Perusahaan yang sama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.	Members of the Company's Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners in more than 3 (three) other companies. Does not include concurrent positions if: 1. Non-independent members of the Board of Commissioners carry out the functional duties of the Company's shareholders in the form of legal entities in the business group; and/or 2. Members of the Board of Commissioners occupy positions in non-profit organizations or institutions as long as those concerned do not neglect the implementation of their duties and responsibilities as members of the Company's Board of Commissioners. 3. Members of the Board of Commissioners must meet the requirements of never being a member of the Board of Directors in the same Company within the last 6 (six) months.	√
Setiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.	Each member of the Company's Board of Commissioners is required to pass the fit and proper test. Provisions regarding fit and proper test are regulated by OJK Regulations regarding fit and proper test.	√
Dewan Komisaris Perusahaan wajib: 1. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi; 2. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak; 3. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 4. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 5. Memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan 6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit Internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	The Company's Board of Commissioners must: 1. Carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors; 2. Supervising the Board of Directors in maintaining a balance of interests of all parties; 3. Prepare a report on the activities of the Board of Commissioners which is part of the report on the implementation of Good Corporate Governance; 4. Monitor the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance; 5. Give approval in the event that the Sharia Supervisory Board requires the assistance of a committee member whose organizational structure is under the Board of Commissioners; and 6. Ensuring that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company's Internal Audit work unit, external auditors, results of OJK supervision and/or results of supervision by other authorities.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles		Status
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang: 1. Melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat; 2. Memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat; 3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan 4. Mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.	Members of the Company's Board of Commissioners are prohibited from: 1. Carry out transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company where the said member of the Board of Commissioners serves; 2. Take advantage of his position in the Company where the said member of the Board of Commissioners serves for personal, family and/or other party interests that may harm or reduce the profits of the Company where the said member of the Board of Commissioners serves; 3. Taking and/or receiving personal benefits from the Company where the member of the Board of Commissioners is serving, other than the remuneration and facilities determined based on the resolution of the GMS; and 4. Interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles		Status
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.	Members of the Company's Board of Commissioners are entitled to obtain complete and timely information from the Board of Directors regarding the Company.	√
Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen. Komisaris Independen Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah, pada Perusahaan yang sama; 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; 3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 4. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat; 5. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; 6. Berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.	Companies with assets of more than IDR200,000,000,000.00 must have at least 1 (one) Independent Commissioner. The Company's Independent Commissioners must meet the following requirements: 1. Has no affiliation with shareholders, members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or members of the Sharia Supervisory Board, in the same Company; 2. Have never served as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board or held a position 1 (one) level below the Board of Directors in the same Company or other Company that has an affiliated relationship with the Company within the last 6 (six) months; 3. Understand the laws and regulations in the field of financing and other relevant laws and regulations; 4. Have good knowledge of the financial condition of the Company where the Independent Commissioner is appointed; 5. Have Indonesian citizenship; 6. Domiciled in Indonesia. Independent Commissioners have the main task of carrying out the oversight function to voice the interests of debtors, creditors and other stakeholders.	
Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 hari kalender sejak ditemukannya: 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.	Independent Commissioners are required to report to OJK no later than 10 calendar days from the discovery of: 1. Violation of laws and regulations in the field of financing; 2. Circumstances or predictions of circumstances that could jeopardize the continuity of the Company's business.	√
Perusahaan dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugasnya.	Companies are prohibited from dismissing Independent Commissioners because of the actions of Independent Commissioners in carrying out their duties.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles		Status
Dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib membentuk: 1. Komite Audit; 2. Komite Pemantau Risiko; dan 3. Komite Remunerasi dan Nominasi. Selain komite tersebut di atas, Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	In assisting the implementation of their duties and responsibilities, the Board of Commissioners of a Company that has total assets of more than IDR200,000,000,000.00 (two hundred billion rupiah) is required to establish: 1. Audit Committee; 2. Risk Monitoring Committee; and 3. Remuneration and Nomination Committee. In addition to the committees mentioned above, the Company's Board of Commissioners may form other committees to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.	√
Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan mengevaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, dan melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in monitoring and evaluating audit planning and implementation, and monitoring follow-up audit results in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.	√
Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan, serta dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.	The Risk Oversight Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in evaluating the suitability of risk management policies and the implementation of Company policies, as well as in monitoring and evaluating the implementation of the duties of the risk management committee and the risk management work unit.	√
Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi.	The Remuneration and Nomination Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in evaluating and making recommendations regarding remuneration policies, as well as formulating and providing recommendations regarding nomination policies.	√
Perusahaan yang memiliki total aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.	Companies with total assets of up to IDR200,000,000,000.00 must have a function that assists the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of the duties of internal auditors and external auditors by monitoring and evaluating audit planning and implementation in order to assess adequacy of internal control including the process of financial reporting.	√

	Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles		Status
	Dewan Komisaris Perusahaan wajib: 1. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 2. Menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun. 3. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.	The Company's Board of Commissioners is required to: 1. Hold a Board of Commissioners meeting at least 1 (one) time in 3 (three) months. 2. Attend at least 75% of the Board of Commissioners' meetings in a 1 (one) year period. 3. The results of the Board of Commissioners' meeting must be recorded in the minutes of the Board of Commissioners' meeting and properly documented.	√
	Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.	Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Commissioners meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Commissioners meeting along with the reasons for the difference of opinion.	√
	Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.	Members of the Company's Board of Commissioners who are present or not present at the meeting of the Board of Commissioners are entitled to receive a copy of the minutes of the meeting of the Board of Commissioners.	√
	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	The number of Board of Commissioners meetings that have been held and the number of attendance of each member of the Board of Commissioners must be included in the report on the implementation of Good Corporate Governance.	√
	Dewan Komisaris Perusahaan wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.	The Company's Board of Commissioners is obliged to ensure effective, appropriate and fast decision making and can act independently in carrying out their duties.	√
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta mengawasi aspek Syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.	The Sharia Supervisory Board is tasked with providing advice and suggestions to the Board of Directors, as well as overseeing the Sharia aspects of the operational activities of Sharia Financing Companies or UUS so that they comply with Sharia Principles. In the event that the Sharia Supervisory Board assesses that there are policies or actions of members of the Board of Directors that are not in accordance with Sharia Principles, the Sharia Supervisory Board is required to ask for explanations from members of the Board of Directors on policies or actions of members of the Board of Directors that are not in accordance with Sharia Principles.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles			Status
Transparansi Kepemilikan Saham Share Ownership Transparency	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengungkapkan mengenai: 1. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan 2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan atau grup usaha tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, kepada Perusahaan tempat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners must disclose regarding: 1. Share ownership that reaches 5% (five percent) or more in the Company where the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in question serve and/or in other companies domiciled inside and outside the country; and 2. Financial relationships and family relationships with other members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, and/or shareholders of the Company or business group where the said members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners serve, to the Company where the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners intended to hold office and be listed in the report on the implementation of Good Corporate Governance.	√
Auditor Eksternal External Auditors	Auditor eksternal Perusahaan wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit. Pencalonan auditor eksternal wajib disertai: 1. Alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut; dan 2. Pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada OJK.	The Company's external auditor must be appointed by the GMS from external auditor candidates proposed by the Board of Commissioners based on the audit committee's proposal. The nomination of the external auditor must be accompanied by: 1. Reasons for nomination and the amount of honorarium or compensation proposed for the external auditor; and 2. A statement of commitment signed by the external auditor, to be free from the influence of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and interested parties in the Company and willingness to provide information related to the audit results to the OJK.	√
	Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang auditor eksternal sehingga auditor eksternal dapat memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan standar audit yang berlaku.	The Company is required to provide all accounting records and supporting data for the external auditor so that the external auditor can provide his opinion on the fairness and conformity of the Company's financial statements with the applicable auditing standards.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles			Status
Praktik dan Kebijakan Remunerasi Remuneration Practices and Policies	Perusahaan wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan perlakuan adil terhadap Debitur, Kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan remunerasi harus memperhatikan paling sedikit: 1. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Prestasi kerja individual; 3. Kewajaran dengan Perusahaan dan/atau level jabatan yang setara (*peer group*); dan 4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.	Companies are required to implement a remuneration policy for members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and employees that encourage prudent behavior that is in line with the long-term interests of the Company and fair treatment of Debtors, Creditors and/or Stakeholders. Other interests. The remuneration policy must at least pay attention to: 1. Financial performance and fulfillment of the Company's obligations as stipulated in the applicable laws and regulations; 2. Individual work performance; 3. Fairness with the Company and/or equivalent position level (peer group); And 4. Consideration of the Company's long-term goals and strategies.	√
Tata Kelola Pembiayaan Financing Governance	Perusahaan wajib menyusun kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan Perusahaan. Kebijakan dan rencana pembiayaan wajib: 1. Ditetapkan oleh Direksi; dan 2. Disetujui Dewan Komisaris; 3. Mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada dalam Perusahaan.	Companies are required to develop policies and financing plans as outlined in the Company's annual business plan. Mandatory financing policies and plans: 1. Determined by the Board of Directors; and 2. Approved by the Board of Commissioners; 3. Communicating to Shareholders and all organizational levels within the Company.	√
	Direksi wajib mengambil keputusan pembiayaan secara profesional dan mengoptimalkan nilai tambah kekayaan Perusahaan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Debitur dan kepentingan bagi pemangku kepentingan lainnya.	The Board of Directors must make professional financing decisions and optimize the added value of the Company's assets while taking into account the protection of Debtors and the interests of other Stakeholders.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles		Status
Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab: 1. Menyelenggarakan fungsi pemasaran, penerapan prinsip mengenal nasabah, analisis pembiayaan, pemantauan kualitas piutang pembiayaan, penagihan, penanganan pengaduan Debitur; 2. Menyusun dan menerapkan standar dan prosedur operasional pembiayaan; dan 3. Menyusun dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi pembiayaan, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut, Perusahaan wajib memiliki pegawai yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang pembiayaan.	The Company must have a work unit or employee who is responsible for: 1. Carry out marketing functions, apply the principle of knowing your customer, financing analysis, monitoring the quality of financing receivables, billing, handling Debtor complaints; 2. Preparing and implementing standards and operational procedures for financing; and 3. Develop and implement internal control systems and procedures to ensure that the process of providing financing is carried out in accordance with financing policies and strategies, and does not violate laws and regulations. To perform these functions, the Company is required to have employees who have knowledge and experience in the field of financing.	√
Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur. Perusahaan harus menuangkan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum; 2. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan 3. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain. Perusahaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain yang melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.	Companies can cooperate with other parties to perform billing functions to debtors. Companies must express cooperation with other parties in the form of a stamped written agreement. Cooperation with other parties referred to must comply with the following conditions: 1. The other party is a legal entity; 2. The other party has a permit from the competent authority; And 3. The other party has human resources who have obtained professional certification in the field of billing from an institution appointed by the Association of Indonesian Financing Companies. The Company is fully responsible for all impacts arising from cooperation with other parties. The Company is required to periodically evaluate the cooperation with other parties who perform the billing function for debtors.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles			Status
Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Risk Management and Internal Control	Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko usaha secara efektif. Manajemen risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan.	Companies are required to implement risk management by identifying, assessing and monitoring business risks effectively. Risk management must be adjusted to the goals, business policies, size and complexity of the business and the capabilities of the Company.	√
	Direksi Perusahaan wajib menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur; 2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha; 3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset perusahaan; 4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan; 5. Tata cara *monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan 6. Mekanisme pelaporan kepada Direksi dengan tembusan kepada komite audit, dalam hal terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan.	The Board of Directors of the Company must establish effective and efficient internal controls to provide adequate assurance that business activities are carried out in accordance with business goals and strategies as well as the articles of association and other internal rules of the Company, and laws and regulations. Internal control includes at least the following: 1. Disciplined and structured internal control environment within the Company; 2. Business risk assessment and management, namely a process to identify, analyze, assess, and manage business risks; 3. Control activities, namely actions carried out in a process of controlling the Company's activities at each level and unit in the Company's organizational structure, among others regarding authority, authorization, verification, reconciliation, assessment of work performance, division of tasks and security of Company assets; 4. Information and communication system, namely a process of presenting reports regarding operational, financial activities, and compliance with laws and regulations in the field of financing business; 5. Monitoring procedures, namely the process of evaluating the quality of the internal control system including the internal audit function at each level and unit of the Company's organizational structure, so that it can be implemented optimally; and 6. Reporting mechanism to the Board of Directors with a copy to the audit committee, in the event of deviations in the quality of the internal control system including the internal audit function at every level and unit of the Company's organizational structure.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles			Status
Rencana Bisnis Tahunan Annual Business Plan	Perusahaan wajib menyusun rencana bisnis tahunan. Rencana bisnis tahunan paling sedikit meliputi: 1. Ringkasan eksekutif; 2. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya; 3. Visi, misi, dan strategi bisnis; 4. Kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; c. Rencana investasi bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi Syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, dan badan penyelenggara jaminan sosial; d. Rencana permodalan, kecuali bagi dana pensiun; e. Rencana pendanaan, kecuali bagi lembaga penjamin dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; f. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; g. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan h. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan Syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura Syariah, perusahaan pegadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan Syariah; 5. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; 6. Proyeksi rasio dan pos tertentu; dan 7. Informasi lainnya.	The Company is required to prepare an annual business plan. The annual business plan at least includes: 1. Executive summary; 2. Evaluation of the implementation of the previous period's Business Plan; 3. Vision, mission and business strategy; 4. Management policies and plans, including: a. Business activity plan; b. Plan for development or expansion of business activities; c. Investment plans for insurance companies, Sharia insurance companies, reinsurance companies, Sharia reinsurance companies, pension funds, guarantee institutions, and social security administering bodies; d. Capital plans, except for pension funds; e. Funding plans, except for guarantee institutions and providers of information technology-based money lending services; f. Development plans and/or changes to office networks or distribution channels; g. Organizational development plan, human resources, and/or information technology; And h. Activity plans in order to increase financial literacy and inclusion for insurance companies, Sharia insurance companies, pension funds of financial institutions, finance companies, Sharia finance companies, venture capital companies, Sharia venture capital companies, pawnshop companies, guarantee companies, and Sharia guarantee companies; 5. Projection of financial statements along with the assumptions used; 6. Projection of certain ratios and headings; and 7. Other information.	√
	Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.	Companies are required to submit a Business Plan to the Financial Services Authority no later than November 30 before the Business Plan year begins.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles			Status
Keterbukaan Informasi Information Disclosure	Kebijakan dan strategi komunikasi Perusahaan harus memungkinkan informasi yang dibutuhkan diberikan kepada OJK secara lengkap, tepat waktu, dan dengan cara yang efisien.	The Company's communication policy and strategy must enable the required information to be provided to OJK in a complete, timely and efficient manner.	√
	Perusahaan wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.	Companies are required to have a reliable financial reporting system for monitoring purposes and other Stakeholders.	√
	Perusahaan wajib mengungkapkan kepada OJK mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi: 1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal; 2. Transaksi material dengan pihak terkait; 3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan 4. Informasi material lain mengenai Perusahaan.	Companies are required to disclose to OJK regarding important matters, at least includes: 1. Resignation or dismissal of the external auditor; 2. Material transactions with related parties; 3. Conflict of Interest that is ongoing and/or that may occur; And 4. Other material information about the Company.	√
	Pengungkapan hal-hal penting dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	Disclosure of important matters is contained in the report on the implementation of Good Corporate Governance.	√
Etika Bisnis Business Ethics	Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan Perusahaan dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	The Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and employees of the Company are prohibited from offering or giving anything, either directly or indirectly to other parties, to influence decision-making related to financing transactions, by violating the provisions of the applicable laws and regulations.	√
	Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan Perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapa pun, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.	The Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and employees of the Company are prohibited from accepting anything for personal gain by violating applicable laws and regulations, either directly or indirectly, from anyone who may influence decision-making related to financing transactions.	
	Perusahaan wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Organ Perusahaan dan seluruh karyawan Perusahaan.	Companies are required to make guidelines on ethical behavior, which contain business ethics values, as a guide for the Company's Organs and all employees of the Company.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles			Status
Pelaporan Reporting	Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling sedikit memuat: 1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang paling kurang meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 2. Rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	The Company is required to prepare a report on the implementation of Good Corporate Governance at the end of each financial year. Report on the implementation of Good Corporate Governance at least contains: 1. Transparency of the implementation of Good Corporate Governance which at least includes the disclosure of all aspects of the implementation of the principles of Good Corporate Governance; 2. Action plan which includes the necessary corrective actions and time for completion as well as obstacles/ obstacles for resolution, if there are still deficiencies in the implementation of Good Corporate Governance.	√
	Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.	The report on the implementation of Good Corporate Governance is submitted no later than April 30 of the following year.	√
Sanksi Penalty	Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK, akan dikenakan sanksi antara lain: 1. Peringatan; dan/atau 2. Pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*). Sanksi administratif berupa peringatan dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku paling lama masing-masing 2 (dua) bulan, yaitu: 1. Peringatan pertama; 2. Peringatan kedua; dan 3. Peringatan ketiga. Perusahaan yang melanggar ketentuan namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.	Violations committed by the Company against the provisions of Good Corporate Governance as stipulated in the provisions of the OJK, will be subject to sanctions including: 1. Warning; and/or 2. Re-assessment of fit and proper (fit and proper test). Administrative sanctions in the form of warnings can be given a maximum of 3 (three) times in a row with a maximum validity period of 2 (two) months each, namely: 1. First warning; 2. Second warning; and 3. Third warning. Companies that violate the provisions but the violation has been resolved, are still subject to the first warning sanction which ends automatically.	√
	Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga, Perusahaan tidak juga memenuhi ketentuan, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.	In the event that until the end of the third warning period, the Company does not comply with the provisions, the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders are subject to a fit and proper test reassessment.	√

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan Contents of Regulations as Compliance Principles		Status
Dalam hal Perusahaan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara kumulatif sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Pemegang Saham Pengendali dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.	In the event that the Company receives administrative sanctions in the form of a cumulative warning of 5 (five) times or more within a period of 2 (two) years, the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and/or Controlling Shareholders are subject to a fit and proper test.	√

KETERBUKAAN PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*

BAD GOVERNANCE PRACTICE DISCLOSURE

Keterbukaan Perusahaan terhadap praktik *bad corporate governance* menjadi salah satu bentuk komitmen terbaik yang diberikan Perusahaan untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi para Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan meyakini bahwa kegiatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan dalam perusahaan.

The Company's disclosure to the practice of bad corporate governance is one of the best forms of commitment given by the Company to always provide the best for shareholders and other stakeholders. The Company believes that Good Corporate Governance activities have been implemented in the Company.

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan tidak terlepas dari interaksi secara langsung dan tidak langsung dengan masyarakat dan lingkungan sekitar area operasional. Interaksi antara Perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dapat menimbulkan beberapa isu bila tidak dikelola dengan baik.

Hingga akhir tahun 2022, Perusahaan tidak pernah mendapatkan adanya laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

REPORTS ON COMPANY ACTIVITIES THAT POLLUTE THE ENVIRONMENT

The Company realizes that the business activities carried out are inseparable from direct and indirect interaction with the community and the environment around the operational area. The interaction between the Company and the community and the environment can cause several issues if not managed properly.

Until the end of 2022, the Company never received a report on Company activities that pollute the environment.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak memiliki kasus yang berkaitan dengan perpajakan. Perusahaan taat dan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai kewajibannya dan telah dilaporkan sebagaimana tercatat di dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.

DISCLOSURE OF FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

Throughout 2022, the Company did not have cases related to taxation. The Company is obedient and obedient in paying and reporting taxes according to its obligations and has been reported as recorded in the Company's Annual Financial Statements.

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Berbagai informasi, analisis dan pembahasan kinerja pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

Laporan Keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia.

NONCONFORMITY OF PRESENTATION OF ANNUAL REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

Various information, analysis and discussion of performance in this annual report refers to the Company's financial statements for the years ended December 31, 2021 and December 31, 2022 which have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja.

The Company's Financial Statements are prepared and presented according to Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes statements and interpretations issued by the Financial Accounting Standards Council (DSAK) The Indonesian Accountant Association.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Laporan Tahunan Perusahaan baik yang disampaikan kepada pemegang saham, investor, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

THE CONFORMITY OF THE ANNUAL REPORT AND THE DIGITAL ANNUAL REPORT

The Company's Annual Reports both submitted to shareholders, investors, stakeholders, and those that have been uploaded on the Company's official website are in accordance with the Annual Report book printed and issued by the Company.

REFERENSI SILANG SEOJK NO. 16 /SEOJK.04/2021: BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

CROSS-REFERENCE NO. 16/SEOJK.04/2021: FORMAT AND COMPLETING THE ANNUAL REPORT OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

KETERANGAN DESCRIPTION	**HALAMAN** PAGE
Bentuk Laporan Report Format	
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.	v
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	v
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	v
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	v
Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents	
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	
a. ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	24-31
b. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	32
c. laporan Direksi; report of the Board of Directors;	50-59
d. laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	40-49
e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	64-128
f. analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	130-180
g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	182-445
h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	SR
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	61
2. Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	
• pendapatan/penjualan; income/sales;	24
• laba bruto; gross profit;	25
• laba (rugi); profit (loss);	25
• jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	25
• total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	25
• jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	25
• laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	25
• jumlah aset; total assets;	26
• jumlah liabilitas; total liabilities;	26
• jumlah ekuitas; total equity;	27
• rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	28
• rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	28
• rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales;	28
• rasio lancar; current ratio;	28

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
• rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	28
• rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	28
• informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	28
b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:	32
• saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	-
a. jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding;	-
b. kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	-
c. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	-
d. volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	-
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	
1. dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	33
a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;	-
b. rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	-

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;	-
d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and	-
e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;	-
2. dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	-
3. dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	-
a. Laporan Direksi Board of Directors' Report	50-59
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
1. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	52-54
b. peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	56
c. proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	57
d. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	54-55
e. kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies;	52
2. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	55-56
3. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	57

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
a. Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	40-49
• penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	42-45
• pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	45
• pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	46-47
b. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Profile	64-128
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	
1. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	64
2. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	
a. alamat; address;	64
b. nomor telepon; telephone number;	64
c. alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	64
d. alamat situs web; website address;	64
e. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	65
f. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	66-67
3. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	69-74

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
4. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the Company's operational activities.	76-84
5. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	86-87
6. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	85
7. profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	96-101
a. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities;	v
b. foto terbaru; recent photograph;	v
c. usia; age;	v
d. kewarganegaraan; nationality;	v
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	v
f. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
• dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	v
• rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	v
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	v

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
g. hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	v
h. perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	-
8. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:	90-95
a. nama dan jabatan; name and position;	v
b. foto terbaru; recent photograph;	v
c. usia; age;	v
d. kewarganegaraan; nationality;	v
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	v
f. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
• dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	v
• dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	v
• rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	v
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	v

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
a. hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	v
b. pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	v
c. perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	v
9. dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	-
10. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	114-117
11. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	118-122
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	v
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	v

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	v
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	
1. persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	v
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	
2. jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	
a. kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	-
b. kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	-
c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	-
d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	-
3. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	v
4. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture Company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated Company, joint venture Company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	123

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
5. kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	123
6. informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	123
7. informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:	352-357
a. nama dan alamat; name and address;	v
b. periode penugasan; assignment period;	v
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;	v
d. biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	v
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	v
Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/aliances can be presented in tabular form.	v
8. nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	124
a. Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion	130-180
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
1. tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	136-144
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;	v
b. pendapatan/penjualan; dan income/sales; and	v
c. profitabilitas; profitability;	v
1. kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	148-159
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	149-151
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	152-153
c. ekuitas; equity;	154
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	155-157
e. arus kas; cash flows;	158-159
2. kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	159
3. tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	160
4. struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	160-161
5. bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	162
a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	-
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	-

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	-
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	-
6. bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	162
a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	v
b. tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	v
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	v
7. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	162
8. prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	164-166
9. perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	163
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	v
b. laba (rugi); profit (loss);	v
c. struktur modal (capital structure); atau capital structure; or	v
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	v
10. target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	164-166
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	-
b. laba (rugi); profit (loss);	-
c. struktur modal (capital structure); capital structure;	-

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or	-
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	v
11. aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	145-147
12. uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	167
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	v
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	v
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	v
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	v
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	-
13. realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	169
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	-
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	-
14. informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	169
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;	-

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;	171-172
c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);	171-172
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;	172
e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and	170
f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	
• pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	172
• peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	172
g. untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	172
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	175
h. untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	175

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
i. dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	-
• perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	176
• perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	177
j. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance	182-445
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	
1. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	195-209
a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	197
• keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	198-201
• keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	201-209
b. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	-
2. Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	229-242
a. tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	233-238
b. pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; a statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	229

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	255-258
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	239
• kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	v
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	v
e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	240-242
• prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	v
• kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	v
f. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	
• Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	210-219
i. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	212-213
ii. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	210
iii. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	250-255

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	250-255
a. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	214
• kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	v
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	v
b. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	261
• prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals;	v
• kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	v
• pihak yang melakukan penilaian; dan party conducting the assessment; and	v
c. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	215
• prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	v
• kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	v
• Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	262-266
d. prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	262-266
e. prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	264-266

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
• prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	v
• struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	v
• besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	v
• Dewan pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The Sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on Sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:	220-228
i. nama; name;	v
ii. dasar hukum pengangkatan dewan pengawas Syariah; legal basis for the appointment of the Sharia supervisory board;	v
iii. periode penugasan dewan pengawas Syariah; period of assignment of the Sharia supervisory board;	v
iv. tugas dan tanggung jawab dewan pengawas Syariah; dan duties and responsibilities of the Sharia supervisory board; and	v
v. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip Syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of Sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	v
• Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:	267-279
i. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	v
ii. usia; age;	v
iii. kewarganegaraan; nationality;	v
iv. riwayat pendidikan; educational history;	v
v. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	v
• dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	v

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
• rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and	v
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	v
f. periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;	v
g. pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee;	v
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	v
i. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and	v
j. pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	v
• komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	279-283
i. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	v
ii. usia; age;	v
iii. kewarganegaraan; nationality;	v
iv. riwayat pendidikan; educational history;	v
v. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	v
• dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	v
• rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan oncurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	v
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	v

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
k. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	v
l. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	v
m. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	v
n. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	v
o. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); a statement that it has a guideline or charter;	v
p. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	v
q. uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	v
r. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	-
• alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and	v
• pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; (2) the party carrying out the nomination and remuneration function;	v
6. komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	284-298
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	v
b. usia; age;	v
c. kewarganegaraan; nationality;	v
d. riwayat pendidikan; educational history;	v
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	v
• dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	v

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
• rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	v
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	v
f. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	v
g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	v
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	v
i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	v
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	v
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	v
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	v
7. Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:	313-320
a. nama; name;	v
b. domisili; domicile;	v
c. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	v
• dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as Company secretary; and	v
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	v
d. riwayat pendidikan; educational history;	v
e. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	v
f. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	v
8. Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	321-327

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
a. nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	v
b. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	v
• dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	v
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	v
c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	v
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	v
e. struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	v
f. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	v
g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	v
h. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	v
9. uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	358-360
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	v
b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	v
c. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	v
10. sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	361-368
a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	v
b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	v
c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	v

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
d. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	v
11. perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	369-371
a. pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	v
b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	v
c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company;	v
12. informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	370-371
13. informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes:	373-380
a. pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics;	v
b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and	v
c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	v
14. uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/ MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ ESOP); a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);	243
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	243
a. jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	-
b. jangka waktu pelaksanaan; plementation period;	-

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	-
d. harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	-
15. uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	243
a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	-
b. pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;	-
16. uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:	387-390
a. cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;	v
b. perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers;	v
c. penanganan pengaduan; complaint handling;	v
d. pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and	v
e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	v
• jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; and	v
• tindak lanjut pengaduan; follow-up on complaints;	v
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.	v
17. uraian mengenai kebijakan antikorupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	386
a. program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and	v

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. pelatihan/sosialisasi antikorupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan antikorupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	v
18. penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	-
a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or	-
b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).	-
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	
c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies	SR
1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:	SR
a. penjelasan strategi keberlanjutan; explanation of the sustainability strategy;	SR
b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	SR
c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief profile of the Issuer or Public Company;	SR
d. penjelasan Direksi; explanation of the Board of Directors;	SR
e. tata kelola keberlanjutan; sustainability governance;	SR
f. kinerja keberlanjutan; sustainability performance;	SR
g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; written verification from an independent party, if any;	SR
h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan feedback sheet for readers, if any; and	SR
i. tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;	SR

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	SR
3. informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: information on the Sustainability Report in number 1) can:	SR
a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or	SR
b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	SR
4. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;	SR
5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	SR
a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan contains all the information as referred to in number 1); and	SR
b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	SR
6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and	SR

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.	SR
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities Company.	
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	61

RANGE ROVER

06

LAPORAN Keuangan

Financial Report

PT Mandiri Utama Finance

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of 31 December 2022 and
for the year then ended
with independent auditors' report

mandiri
utama finance

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022

PT Mandiri Utama Finance

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Stanley Setia Atmadja
   Alamat Kantor : Menara Mandiri I Lt. 26-27
   Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55
   Jakarta, 12190
   Alamat Rumah : Jl. Dharmawangsa VIII No.5
   Jakarta, 12160
   Nomor Telepon : (021) 527 8038
   Jabatan : Presiden Direktur

2. Nama : Rully Setiawan
   Alamat Kantor : Menara Mandiri I Lt. 26-27
   Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55
   Jakarta, 12190
   Alamat Rumah : Jl.Timbul IV Raya No.B/4A
   Jagakarsa, 12630
   Nomor Telepon : (021) 527 8038
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Mandiri Utama Finance;
2. Laporan keuangan PT Mandiri Utama Finance telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Mandiri Utama Finance telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan PT Mandiri Utama Finance tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Mandiri Utama Finance.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTORS STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 DECEMBER 2022
AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022

PT Mandiri Utama Finance

We, the undersigned:

1. *Name* : Stanley Setia Atmadja
   Office address : Menara Mandiri I Lt. 26-27
   Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55
   Jakarta, 12190
   Domicile address : Jl. Dharmawangsa VIII No.5
   Jakarta, 12160
   Phone number : (021) 527 8038
   Title : *President Director*

2. *Name* : Rully Setiawan
   Office address : Menara Mandiri I Lt. 26-27
   Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55
   Jakarta, 12190
   Domicile address : Jl.Timbul IV Raya No.B/4A
   Jagakarsa, 12630
   Phone number : (021) 527 8038
   Title : *Director*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Mandiri Utama Finance;*
2. *The Financial Statements of PT Mandiri Utama Finance have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the financial statements of PT Mandiri Utama Finance have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The Financial statements of PT Mandiri Utama Finance do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. *We are responsible for PT Mandiri Utama Finance's internal control system.*

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 23 Januari/*January* 2023
atas nama dan mewakili Dewan Direksi/*For and on behalf of the board of Directors.*

Stanley Setia Atmadja
Presiden Direktur / *President Director*

METERAI TEMPEL
10000
4A7AJX988427820

Rully Setiawan
Direktur / *Director*

PT Mandiri Utama Finance
Menara Mandiri I 26-27th floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Tel. (62-21) 527 8038
Fax. (62-21) 527 8039
www.mandiriutamafinance.co.id

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2022
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3-4	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	5	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	6-7	*Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	8-105	*Notes to the Financial Statements*

****

Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Mandiri Utama Finance

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mandiri Utama Finance ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report

Report No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Mandiri Utama Finance

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Mandiri Utama Finance (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2022 ("Laporan Tahunan"). Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini audit kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2022 Annual Report (the "Annual Report"). The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditors' report.

Our audit opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan dan, dalam pelaksanaannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023 (continued)

Other information (continued)

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini audit kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease its operations or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditors' report that includes our audit opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of such financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini audit kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan suatu opini audit atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an audit opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini audit kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our audit opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang kami identifikasi selama audit kami.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, serta mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan dan hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00032/2.1032/AU.1/09/1174-2/1/I/2023 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Arief Somantri

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1174/*Public Accountant Registration No. AP.1174*

23 Januari 2023/*January 23, 2023*

00032

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of 31 December 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *31 December* 2022	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *31 December* 2021	
ASET				***ASSETS***
Kas dan kas di bank	336.940.586.694	4,26	188.431.650.830	*Cash on hands and cash in banks*
Piutang pembiayaan konsumen (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai)	6.121.237.675.034	5	5.139.101.819.028	*Consumer financing receivables (net of allowance for impairment losses)*
Piutang pembiayaan murabahah (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai)	659.981.921.379	6	439.490.207.473	*Murabahah financing receivables (net of allowance for impairment losses)*
Piutang sewa pembiayaan (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai)	89.727.085.415	7	40.409.333.898	*Finance lease receivables (net of allowance for impairment losses)*
Piutang lain-lain		8,26		*Other receivables*
Pihak ketiga	102.915.142.590		54.406.175.249	*Third parties*
Pihak berelasi	2.484.712.500		4.620.000.000	*Related party*
Beban dibayar di muka		9,26		*Prepaid expenses*
Pihak ketiga	28.560.338.999		21.780.640.570	*Third parties*
Pihak berelasi	35.303.467.384		20.682.101.749	*Related party*
Aset pajak tangguhan	67.888.031.601	10d	52.351.458.520	*Deferred tax assets*
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp128.436.384.512 (2021:Rp108.586.248.906))	36.062.226.174	11	36.279.273.269	*Fixed assets (net of accumulated depreciation of Rp128,436,384,512 (2021:Rp108,586,248,906))*
Aset hak-guna		12,26		*Right-of-use assets*
Pihak ketiga	46.010.592.455		53.578.356.381	*Third parties*
Pihak berelasi	15.866.586.625		23.799.879.938	*Related party*
Aset lain-lain	23.785.827.586	13	22.342.781.352	*Other assets*
TOTAL ASET	**7.566.764.194.436**		**6.097.273.678.257**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *31 December* 2022	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *31 December* 2021	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Utang usaha		14,26		*Trade payables*
Pihak ketiga	300.515.199.598		221.768.573.926	*Third parties*
Pihak berelasi	2.303.594.947		2.815.649.703	*Related party*
Utang lain-lain	30.049.771.331	15	18.465.168.984	*Other payables*
Utang pajak	80.799.236.906	10a	49.171.836.477	*Tax payables*
Beban yang masih harus dibayar		16,26		*Accrued expenses*
Pihak ketiga	199.120.422.543		172.351.732.321	*Third parties*
Pihak berelasi	6.006.955.626		4.691.965.045	*Related parties*
Pinjaman bank		17,26		*Bank loans*
Pihak ketiga	3.422.913.281.401		3.233.307.103.756	*Third parties*
Pihak berelasi	2.385.574.389.717		1.626.000.190.978	*Related parties*
Liabilitas sewa pembiayaan		18,26		*Finance lease liabilities*
Pihak ketiga	9.514.927.501		18.433.800.243	*Third parties*
Pihak berelasi	16.588.812.227		23.799.879.938	*Related party*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	156.841.102.051	19	106.068.898.467	*Employee benefits obligations*
TOTAL LIABILITAS	**6.610.227.693.848**		**5.476.874.799.838**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
nilai nominal Rp100 per saham				*par value Rp100 per share*
Modal dasar - 5.000.000.000 lembar saham				*Authorised capital - 5,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.000.000.000 lembar saham	500.000.000.000	20	500.000.000.000	*Issued and fully paid up capital - 5,000,000,000 ordinary shares*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan - bersih	1.761.438.074	2m	(1.373.077.366)	*Remeasurement of employee benefits obligations - net*
Laba ditahan		20		*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	15.852.517.756		5.616.416.512	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	438.922.544.758		116.155.539.273	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS	**956.536.500.588**		**620.398.878.419**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**7.566.764.194.436**		**6.097.273.678.257**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended 31 December 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended 31 December*			
	2022	**Catatan/ *Notes***	**2021*)**	
PENDAPATAN				***REVENUES***
Pembiayaan konsumen		21a,26		*Consumer financing income*
Pihak ketiga	1.799.840.846.231		1.289.740.651.340	*Third parties*
Pihak berelasi	-		878.128	*Related parties*
Marjin murabahah	144.829.387.680	21b	58.493.638.617	*Murabahah margin*
Sewa Pembiayaan	10.626.424.880	21c	2.191.754.910	*Finance leases*
Bunga dan marjin		21d,26		*Interest and margin*
Pihak ketiga	382.080.788		212.680.886	*Third parties*
Pihak berelasi	5.727.561.821		3.078.817.755	*Related parties*
Lain-lain	252.060.028.810	21e	193.532.870.464	*Others*
Total pendapatan	2.213.466.330.210		1.547.251.292.100	*Total revenue*
BEBAN				***EXPENSES***
Gaji dan tunjangan		23,26		*Salaries and benefits*
Pihak ketiga	(557.029.273.190)		(295.346.782.251)	*Third parties*
Pihak berelasi	(23.786.508.173)		(26.505.503.435)	*Related parties*
Umum dan administrasi		24,26		*General and administrative*
Pihak ketiga	(261.561.366.495)		(210.388.404.891)	*Third parties*
Pihak berelasi	(7.933.293.313)		(11.407.525.146)	*Related parties*
Beban keuangan		22,26		*Finance charges*
Pihak ketiga	(271.624.482.480)		(251.253.676.414)	*Third parties*
Pihak berelasi	(137.476.277.517)		(134.631.336.516)	*Related parties*
Penyisihan kerugian penurunan nilai				*Allowance for impairment losses*
Pembiayaan konsumen	(303.349.639.476)	5	(295.628.041.329)	*Consumer financing*
Pembiayaan murabahah	(33.357.988.656)	6	(14.142.774.700)	*Murabahah financing*
Sewa pembiayaan	(1.222.076.394)	7	(174.915.898)	*Finance lease*
Pemasaran	(148.838.513.295)	25	(96.874.897.979)	*Marketing*
Lain-lain	(36.149.891.851)	25	(78.269.918.874)	*Others*
Total beban	(1.782.329.310.840)		(1.414.623.777.433)	*Total expenses*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**431.137.019.370**		**132.627.514.667**	***INCOME BEFORE FINAL TAX EXPENSE AND* INCOME TAX EXPENSE**
BEBAN PAJAK FINAL	**(1.221.928.522)**	**21d**	**(658.299.728)**	***FINAL TAX EXPENSE***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**429.915.090.848**		**131.969.214.939**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(96.911.984.119)**	**10b**	**(29.608.202.501)**	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN	**333.003.106.729**		**102.361.012.438**	***INCOME FOR THE YEAR***

*) Direklasifikasi, lihat catatan 32

*) *Reclassified, see note 32*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended 31 December 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended 31 December*			
	2022	**Catatan/ *Notes***	**2021*)**	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items will not be reclassified to profit or loss:*
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	4.018.609.539	19	3.122.421.948	*Remeasurement of employee benefit's obligations*
Pajak penghasilan terkait	(884.094.099)	10d	(686.932.829)	*Related income tax*
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	3.134.515.440		2.435.489.119	*Other comprehensive income - net of tax*
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**336.137.622.169**		**104.796.501.557**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

*) Direklasifikasi, lihat catatan 32

*) *Reclassified, see note 32*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

T MANDIRI UTAMA FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended 31 December 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan/ *Remeasurement of employee benefits obligations - net*	Laba ditahan/*Retained earnings*		Total ekuitas/ *Total equity*	
				Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2020		**500.000.000.000**	**(3.808.566.485)**	**5.616.416.512**	**13.794.526.835**	**515.602.376.862**	***Balance as of 31 December 2020***
Laba tahun berjalan		-	-	-	102.361.012.438	102.361.012.438	*Profit for the year*
Pengukuran kembali liabilitas Imbalan kerja karyawan - neto	19	-	2.435.489.119	-	-	2.435.489.119	*Remeasurement of employee benefit obligations- net*
Saldo 31 Desember 2021		**500.000.000.000**	**(1.373.077.366)**	**5.616.416.512**	**116.155.539.273**	**620.398.878.419**	***Balance as of 31 December 2021***
Laba tahun berjalan		-	-	-	333.003.106.729	333.003.106.729	*Profit for the year*
Pengukuran kembali liabilitas Imbalan kerja karyawan - neto	19	-	-	-	-	-	*Remeasurement of employee benefit obligations- net*
		-	3.134.515.440	-	-	3.134.515.440	
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	20	-	-	10.236.101.244	(10.236.101.244)	-	*Appropiated retained earnings*
Saldo 31 Desember 2022		**500.000.000.000**	**1.761.438.074**	**15.852.517.756**	**438.922.544.758**	**956.536.500.588**	***Balance as of 31 December 2022***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended 31 December 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended 31 December*			
	2022	**Catatan/ *Notes***	**2021**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari konsumen:				*Cash received from customers:*
Pembiayaan konsumen	12.438.883.148.054		9.317.033.064.362	*Consumer financing*
Premi asuransi	694.206.490.215		457.680.992.438	*Insurance premiums*
Penalti	59.135.889.402		37.592.595.833	*Penalty*
Bunga dan marjin	4.882.525.030		2.633.198.911	*Interest and margin*
Penerimaan terkait pembiayaan bersama *without recourse*	14.428.379.812.143		8.839.749.872.117	*Cash received from joint financing without recourse*
Penerimaan lain-lain	90.894.462.443		92.752.576.864	*Others*
Pengeluaran kas untuk:				*Cash disbursements for:*
Pembayaran kepada penyalur kendaraan	(17.201.449.717.138)		(12.233.577.389.449)	*Payments to car dealers*
Pembayaran gaji dan tunjangan	(766.063.279.755)		(606.300.867.967)	*Payments for salaries and allowances*
Pembiayaan bersama *without recourse*	(9.002.217.939.619)		(5.136.189.082.986)	*Joint financing without recourse*
Pembayaran kepada perusahaan asuransi	(475.598.378.168)		(444.615.163.529)	*Payments to insurance companies*
Pembayaran beban keuangan	(408.113.229.124)		(386.575.954.277)	*Payments for financial charges*
Pembayaran beban umum dan administrasi	(234.688.692.093)		(191.962.011.688)	*Payments for general and administrative expenses*
Pembayaran pajak penghasilan	(174.449.192.468)		(13.764.900.169)	*Payments for income tax*
Pembayaran terkait fidusia	(47.409.194.000)		(38.178.789.977)	*Payments for fiduciary*
Pembayaran beban pemasaran	(118.639.819.277)		(80.482.796.301)	*Payments for marketing expenses*
Pengeluaran untuk lain-lain	(35.259.864.429)		(166.276.943.625)	*Others*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi	**(747.506.978.784)**		**(550.481.599.443)**	***Net cash used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian aset tetap	(16.104.743.206)		(13.433.332.177)	*Purchases of fixed assets*
Penjualan aset tetap	9.940.623	11	4.772.728	*Sales of fixed assets*
Pembayaran atas aset hak-guna	(37.929.380.565)		(38.661.181.738)	*Payment to right-of-use-assets*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(54.024.183.148)**		**(52.089.741.187)**	***Net cash used in investing activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI UTAMA FINANCE
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended 31 December 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended 31 December*			
	2022	**Catatan/ *Notes***	**2021**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman bank	4.204.966.501.828		3.814.362.061.153	*Proceeds from bank loan*
Pembayaran pinjaman bank	(3.254.926.404.032)		(3.153.179.982.106)	*Payments of bank loan*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**950.040.097.796**		**661.182.079.047**	***Net cash provided by financing activities***
KENAIKAN NETO KAS DAN KAS DI BANK	**148.508.935.864**		**58.610.738.417**	***NET INCREASE CASH ON HANDS AND CASH IN BANKS***
KAS DAN KAS DI BANK AWAL TAHUN	**188.431.650.830**		**129.820.912.413**	***CASH ON HANDS AND CASH IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN KAS DI BANK AKHIR TAHUN	**336.940.586.694**	4	**188.431.650.830**	***CASH ON HANDS AND CASH IN BANKS AT END OF YEAR***
Kas	27.850.415.955		12.443.412.479	*Cash on hand*
Kas pada bank	309.090.170.739		175.988.238.351	*Cash in banks*
JUMLAH KAS DAN KAS DI BANK	**336.940.586.694**	4	**188.431.650.830**	***TOTAL CASH ON HANDS AND CASH IN BANKS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1. INFORMASI UMUM

PT Mandiri Utama Finance ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 21 Januari 2015 berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, No. 19. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0003452.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., di Jakarta, No. 45 pada tanggal 26 Juli 2021, tentang perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Perubahan akta ini telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0431921 Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, yang meliputi:

a. Pembiayaan investasi
b. Pembiayaan modal kerja
c. Pembiayaan multi guna
d. Pembiayaan lain diluar kegiatan dalam butir a, b, and c setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan komersial Perusahaan dimulai pada tahun 2015. Perusahaan memperoleh ijin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-81/D.05/2015 tanggal 25 Juni 2015. Dengan diperolehnya izin tersebut, maka Perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan konsumen, anjak piutang dan sewa guna usaha. Saat ini, Perusahaan bergerak dalam kegiatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan.

Perusahaan memperoleh izin pembukaan unit usaha syariah dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-36/NB.223/2018 tanggal 27 April 2018. Dengan diperolehnya izin tersebut, maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan pembiayaan syariah.

1. GENERAL

PT Mandiri Utama Finance (the "Company") was established on 21 January 2015 based on Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, No. 19. The Company's Articles of Association were approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0003452.AH.01.01 Year 2015 dated 26 January 2015.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest by the Deed of Establishment which was covered by Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, No. 45 dated 26 July 2021, regarding changes on Board of Commissioners and Directors composition. The notification receipt of the change in article association was received and recorded in the administration system of legal entity in the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0431921 Year 2021 dated 27 July 2021.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company are providing financing for purchases goods and/or services which covers:

a. Investment financing
b. Working capital financing
c. Multi purpose financing
d. Other financing activities other than those stated in point a, b, and c, after receiving approval from Financial Services Authority.

The Company commenced its commercial operations in 2015. The Company obtained a business license as a Finance Company from the Board of Commissioner of Financial Services Authority of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-81/D.05/2015 dated 25 June 2015. With this license, the Company is allowed to engage in consumer financing, factoring and leasing activities. Currently, the Company is engaged in consumer financing activities and finance lease.

The Company obtained a business license for sharia consumer financing as a Finance Company from the Board of Commissioner of Financial Services Authority of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-36/NB.223/2018 dated April 27, 2018. With this license, the Company is allowed to engage in sharia consumer financing.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Menara Mandiri I, lantai 26-27, Jalan Jendral Sudirman Kavling 54-55, Jakarta dan memiliki 145 jaringan yang terdiri dari kantor cabang dan selain kantor cabang pada tahun 2022 (2021:119 jaringan) (tidak diaudit) yang berlokasi di beberapa kota di Indonesia.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

The Company's registered office is located in Menara Mandiri I, 26-27th floor, Jalan Jendral Sudirman Kavling 54-55, Jakarta and has 145 networks which consist of branches and other networks in 2021 (2021:119 networks) (unaudited) located in number of cities throughout Indonesia.

The members of the Company`s Board of Commissioners and Board of Directors as of 31 December 2022 and 2021 are as follows:

		2022	2021		
Dewan Komisaris					***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	:	Ignatius Susatyo Wijoyo	Ignatius Susatyo Wijoyo	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Erida	Erida	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Mansyur Syamsuri Nasution	Mansyur Syamsuri Nasution	:	*Commissioner*
Dewan Direksi					***Board of Directors***
Direktur Utama	:	Stanley Setia Atmadja	Stanley Setia Atmadja	:	*President Director*
Direktur	:	Rully Setiawan	Rully Setiawan	:	*Director*
Direktur	:	Rita Mustika Ruchtje	Rita Mustika Ruchtje	:	*Director*

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan masing-masing memiliki 7.688 karyawan dan 6.233 karyawan (tidak diaudit).

As of 31 December 2022 and 2021, the Company had 7,688 and 6,233 employees (unaudited).

Entitas induk langsung dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

The direct and ultimate holding entity of the Company is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, State-Owned Company majorly owned by the Government of the Republic of Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan-kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan oleh Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (”SAK”) di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dan menggunakan konsep harga perolehan kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies applied by the Company in the preparation of its financial statements as follows:

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The Company’s financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (”SAK”) which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have been prepared on the accrual basis except for the statements of cash flows, and using the historical cost convention of accounting except as disclosed in the relevant notes herein.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas kedalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas mencakup kas dan kas pada bank, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi penggunaannya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi pada tahun sebelumnya.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Mata uang fungsional dan penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Perusahaan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2022 yang dianggap relevan:

- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian “10 persen” untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan”, berlaku efektif 1 Januari 2022.

  Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purposes of the statement of cash flows, cash include cash on hand and cash in banks, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

The accounting policies applied in the preparation of the financial statements 31 December 2022, are consistent with those of the previous financial year.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and asumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

The functional and presentation currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, unless otherwise specified.

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

The Company adopted the following accounting standards, which are considered relevant, starting on 1 January 2022:

- *2020 Annual Adjustment – SFAS No. 71, “Financial Instruments - Fee under testing “10 percent” for the derecognition of a financial liability”, effective 1 January 2022.*

  The amendments clarifiy the costs included in the entity when assessing whether the terms of the new or modified financial liabilities are substantially different from the terms of the original financial liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Perusahaan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2022 yang dianggap relevan (lanjutan):

- Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK No. 73: Sewa.

  Amandemen terhadap Contoh Ilustrasi 13 yang merupakan bagian dari PSAK No. 73 dengan menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian perbaikan properti sewaan oleh pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan mengenai perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena cara insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

- Amendemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi tentang Kontrak Merugi-Biaya Memenuhi Kontrak

  Amendemen PSAK No. 57 mengatur biaya-biaya untuk memenuhi kontrak merugi terdiri dari biaya yang terkait langsung dengan kontrak, dimana terdiri dari:
  - biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
  - alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Perusahaan telah menganalisa penerapan standar akuntansi di atas dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

c. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan kas di bank, piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah, piutang sewa pembiayaan, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, pinjaman bank, beban yang masih harus dibayar, dan utang lain-lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards (continued)

The Company adopted the following accounting standards, which are considered relevant, starting on 1 January 2022 (continued):

- *2020 Annual Improvements – SFAS No. 73: Leases*

  The amendment to Illustrative Example 13 accompanying SFAS No. 73 removes from the example the illustration of the reimbursement of leasehold improvements by the lessor in order to resolve any potential confusion regarding the treatment of lease incentives that might arise because of how lease incentives are illustrated in that example.

- *Amendments to SFAS No. 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets - Onerous Contract Fulfillment Costs*

  These amendments provide that costs to fulfill an onerous contract consist of costs that are directly related to the contract, which consist of:
  - *incremental costs to fulfill the contract, and*
  - *allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.*

The Company has assessed that the adoption of the above mentioned accounting standards and does not have significant impact to the financial statements.

c. Financial assets and liabilities

The Company's financial assets consist of cash on hands and cash in banks, consumer financing receivables, consumer financing receivables sharia, finance lease receivables, other receivables and other assets.

The Company's financial liabilities consist of trade payables, bank loan, accrued expenses, other payables.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Klasifikasi

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

i. Biaya perolehan diamortisasi;
ii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
iii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual *(held to collect)*; dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Suatu instrumen utang diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan *(held to collect and sell)*; dan

- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Classification

In accordance with SFAS 71, there are three measurement classifications for financial assets:

i. Amortised cost;
ii. Fair value through profit or loss ("FVTPL");
iii. Fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

A financial asset is measured at amortised cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as of FVTPL:

- *The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*

- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

A debt instruments measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as of FVTPL:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (held to collect and sell); and*

- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Klasifikasi (lanjutan)

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di penghasilan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch*.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Perusahaan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Classification (continued)

All financial assets not classified as measured at amortised cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Unrealized gains or losses of financial assets held at FVOCI deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces accounting mismatch.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI")

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") (lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Perusahaan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan (lanjutan):

- Ketentuan yang membatasi klaim Perusahaan atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Perusahaan. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Perusahaan menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat *desk* yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Classification (continued)

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI") (continued)

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers (continued):

- *Terms that limit the Company's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates)*

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Company. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Company assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e. sub-portfolios or sub-business lines).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 71 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Perusahaan dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Perusahaan untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/*conscious*.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Classification (continued)

Business model assessment (continued)

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- *how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 71 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*
- *the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Company reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Company did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

The Targeting Operating Model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Perusahaan dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

(a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal dan selanjutnya dicatat pada nilai wajar.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short-term profit-taking) yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai instrumen diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Classification (continued)

Business model assessment (continued)

The Company can reclassified all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

The Company classifies its financial liabilities in categories (a) financial liabilities at fair value through profit or loss and (b) financial liabilities measured at amortised cost.

The Company classifies its financial liabilities in the category of (a) financial liabilities at fair value through profit or loss and (b) financial liabilities measured at amortised cost. Financial liabilities are derecognised when they have redeemed or otherwise extinguished.

(a) Financial liabilities at fair value through profit or loss

This category comprises two sub-categories: financial liabilities classified as held for trading and financial liabilities designated by the Company as of fair value through profit or loss upon initial recognition. At the initial and subsequent recognition, this is recorded at fair value.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking. Derivatives are also categorised as held for trading instrument unless they are designated and effective as hedging instruments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. (lanjutan)

(a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat dalam laporan laba rugi sebagai "Keuntungan/ (kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan". Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat sebagai "Beban bunga".

Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui di dalam "Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan".

(b) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Classification (continued)

Business model assessment (continued)

The Company classifies its financial liabilities in the category of (a) financial liabilities at fair value through profit or loss and (b) financial liabilities measured at amortised cost. Financial liabilities are derecognised when they have redeemed or otherwise extinguished. (continued)

(a) Financial liabilities at fair value through profit or loss (continued)

Gains and losses arising from changes in fair value of financial liabilities classified held for trading are included in the statement of profit or loss and reported as "Gains/(losses) from changes in fair value of financial instruments". Interest expenses on financial liabilities held for trading are included in "Interest expenses".

Fair value changes relating to financial liabilities designated at fair value through profit or loss are recognised in "Gains/(losses) from changes in fair value of financial instruments".

(b) Financial liabilities measured at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as of fair value through profit and loss fall into this category and are measured as amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. (lanjutan)

(b) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Selama tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan - tanggal dimana Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Classification (continued)

Business model assessment (continued)

The Company classifies its financial liabilities in the category of (a) financial liabilities at fair value through profit or loss and (b) financial liabilities measured at amortised cost. Financial liabilities are derecognised when they have redeemed or otherwise extinguished. (continued)

(b) Financial liabilities measured at amortised cost (continued)

During the year and at the date of statement of financial position, the Company only has financial assets classified as measured at amortised cost and financial liabilities measured at amortised cost.

Measurement

Regular purchases and sale of financial assets are recognised on the trade-date - the date on which the Company commits to purchase or sell the asset.

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Klasifikasi (lanjutan)

Pengukuran (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

c.2. Penghentian pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, yang ditentukan sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Classification (continued)

Measurement (continued)

At initial recognition, financial liability at amortised cost measured at fair value plus transaction costs (if any). Those transaction costs are amortised over the lifetime of the instrument based on effective interest rate method and recognised as part of interest expense.

After initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

c.2. Derecognition

The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any rights and obligation in transferred financial assets that is created or retained by the Company is recognised as a separate asset or liability.

The Company derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In transactions where the Company neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Company derecognises the asset if the Company does not retain control over that asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers where control over the asset is retained, the Company continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.2. Penghentian pengakuan (lanjutan)

Perusahaan juga menghentikan pengakuan aset keuangan tertentu pada saat Perusahaan menghapusbukukan saldo aset keuangan yang dianggap tidak dapat ditagih lagi. Penerimaan atau pemulihan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada periode berjalan dilakukan dengan menyesuaikan akun cadangan. Penerimaan atau pemulihan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada periode sebelumnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

c.3. Modifikasi aset keuangan

Perusahaan terkadang melakukan renegosiasi atau dalam hal lain modifikasi atas arus kas kontraktual dari pinjaman kepada konsumen. Saat ini terjadi, Perusahaan menilai apakah syarat-syarat pinjaman yang baru berbeda secara substansial dibanding dengan syarat-syarat pinjaman sebelumnya. Perusahaan melakukan hal ini dengan mempertimbangkan, antara lain, faktor-faktor di bawah ini:

- Jika peminjam berada dalam kesulitan keuangan, apakah modifikasi tersebut mengurangi arus kas kontraktual ke nilai yang diharapkan dapat dibayarkan oleh peminjam
- Perpanjangan signifikan dari waktu pinjaman di mana peminjam tidak berada dalam kesulitan keuangan
- Perubahan signifikan dari suku bunga
- Perubahan mata uang pinjaman

Apabila syarat-syarat tersebut berbeda secara substansial, Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan awal dan mengakui aset keuangan yang 'baru' pada nilai wajarnya dan menghitung kembali suku bunga efektif yang baru untuk aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.2. Derecognition (continued)

The Company also derecognises certain financial assets when it writes off balances of the financial assets deemed to be uncollectible. Collection or recovery of financial assets which had been written off in the current period are recorded by adjusting the allowance accounts. Collection or recovery of financial assets written off in the previous period are recorded as other income.

c.3. Modification of financial assets

The Company sometimes renegotiates or otherwise modifies the contractual cash flows of loans to customers. When this happens, the Company assesses whether or not the new terms are substantially different to the original terms. The Company does this by considering, among others, the following factors:

- *If the borrower is in financial difficulty whether the modification merely reduces the contractual cash flows to amounts the borrower is expected to be able to pay*
- *Significant extension of the loan term when the borrower is not in financial difficulty*
- *Significant change in the interest rate*
- *Change in the loan currency*

If the terms are substantially different, the Company derecognises the original financial asset and recognises a 'new' asset at fair value and recalculates a new effective interest rate for the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.3. Modifikasi aset keuangan (lanjutan)

Tanggal renegosiasi syarat pinjaman dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk keperluan perhitungan penurunan nilai, termasuk untuk menentukan apakah terdapat kenaikan signifikan risiko kredit. Namun, Perusahaan juga menilai apakah aset keuangan baru dianggap sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal, terutama dalam keadaan di mana renegosiasi didorong oleh peminjam yang tidak dapat melakukan pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya. Selisih dari nilai tercatat juga diakui pada laba rugi sebagai laba rugi dari penghentian pengakuan aset keuangan.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak berbeda secara substansial, renegosiasi atau modifikasi tidak menghasilkan penghentian pengakuan, dan Perusahaan menghitung kembali nilai tercatat bruto berdasarkan arus kas yang sudah dimodifikasi dari aset keuangan dan mengakui laba atau rugi modifikasian di laporan laba rugi. Nilai tercatat bruto yang baru dihitung kembali dengan mendiskontokan arus kas yang telah dimodifikasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal.

c.4. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan pihak lawan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.3. Modification of financial assets (continued)

The date of renegotiation is consequently considered to be the date of initial recognition for impairment calculation purposes, including for the purpose of determining whether a significant increase in credit risk has occured. However, the Company also assesses whether the new financial asset recognised is deemed to be credit-impaired at initial recognition, especially in circumstances where the renegotiation was driven by the debtor being unable to make the originally agreed payments. Differences in the carrying amount are also recognised in profit or loss as a gain or loss on derecognition.

If the terms are not substantially different, the renegotiation or modification does not result in derecognition, and the Company recalculates the gross carrying amount based on the revised cash flows of the financial asset and recognises a modification gain or loss in profit or loss. The new gross carrying amount is recalculated by discounting the modified cash flows at the original effective interest rate.

c.4. Offsetting

Financial assets and financial liabilities shall be offset and the net amount is presented in the statement of financial position when and only when, the Company has a legal enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and the event of default, insolvency or bankrupt of the counterparty.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.5. Penurunan nilai dari aset keuangan

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Losses* (“ECL“) diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

Perusahaan menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks *probability of default* (“PD”), *loss given default* (“LGD”) dan *exposure at default* (“EAD”), yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

a) *Probability of Default* (“PD”)

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana konsumen mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*Stage* 1) atau sepanjang umur (*Stage* 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.5. Impairment of financial assets

SFAS 71 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month expected credit losses (“ECL”) or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

Expected Credit Losses (ECL) are recognised for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as hold to collect/hold to collect and sell and have cash flows that are solely payments of principal and interest. Expected credit losses are not recognised for equity instruments designated at FVOCI.

The Company primarily uses sophisticated models that utilize the probability of default (“PD”), loss given default (“LGD”) and exposure at default (“EAD”) metrics, discounted using the effective interest rate.

a) Probability of Default (“PD”)

The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the product (Stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.5. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

b) *Loss Given Default ("LGD")*

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari konsumen yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Perusahaan mengestimasikan LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan periode observasi 48 bulan.

c) *Exposure at Default ("EAD")*

Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)

Kerugian kredit ekspektasian diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka kerugian kredit ekspektasian dihitung kembali berdasarkan basis dua belas bulan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.5. Impairment of financial assets (continued)

b) Loss Given Default ("LGD")

The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Company expects to receive. The Company estimates LGD based on the historical recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets with observation period 48 months.

c) Exposure at Default ("EAD")

The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of repayments of principal and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

12 month expected credit losses (Stage 1)

Expected credit losses are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months into the future from the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, expected credit losses will revert to being determined on a twelve month basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.5. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Peningkatan risiko kredit yang signifikan (*Stage* 2)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ("SICR") sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam cadangan kerugian kredit ekspektasian. Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dinilai menggunakan sejumlah faktor kuantitatif dan kualitatif, yang bobotnya bergantung pada tipe produk dan pihak lawan. Aset keuangan dengan tunggakan 30 hari ("DPD") atau lebih dan tidak mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (Stage 3)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok, aset yang telah dihapusbukukan dan mengalami proses aset tarikan.

Aset hanya akan dianggap mengalami penurunan nilai dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, jika terdapat bukti objektif penurunan nilai yang dapat diobservasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.5. Impairment of financial assets (continued)

Significant increase in credit risk (Stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk ("SICR") since initial recognition, an expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor is it assessed in the context of changes in expected credit loss. Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using a number of quantitative and qualitative factors, the weight of which depends on the type of product and counterparty. Financial assets that are 30 or more days past due and not credit-impaired will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk.

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3)

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due, are written off and has been proceed as repossessed assets.

An asset is only considered credit impaired and lifetime expected credit losses recognised, if there is observed objective evidence of impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.5. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (Stage 3) (lanjutan)

Faktor-faktor yang diobservasi ini serupa dengan indikator bukti objektif penurunan nilai pada PSAK 55, termasuk antara lain aset gagal bayar atau mengalami kesulitan keuangan yang signifikan atau mengalami *forbearance* atas piutang yang mengalami penurunan nilai (disebut sebagai 'aset *Stage 3*'). Pengukuran kerugian kredit ekspektasian di seluruh tahapan aset diperlukan untuk mencerminkan jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan yang dapat terjadi menggunakan informasi yang wajar dan dapat didukung dengan peristiwa di masa lampau, kondisi saat ini dan proyeksi terkait dengan kondisi ekonomis di masa depan.

Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana konsumen kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. ECL akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.5. Impairment of financial assets (continued)

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3) (continued)

These factors are similar to the indicators of objective evidence of impairment under SFAS 55, this includes, amongst other factors, assets in default or experiencing significant financial difficulty, or experiencing forbearance on impaired receivables (mentioned as 'Stage 3 asset'). The measurement of expected credit losses across all stages is required to reflect an unbiased and probability weighted amount that is determined by evaluating a range of reasonably possible outcomes using reasonable and supportable information about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

Financial assets are also considered to be credit impaired where the customers are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset. Loss provisions against credit impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realisation of any collateral held where appropriate. The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.5. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (Stage 3) (lanjutan)

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah umur kontrak aset keuangan.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada pendapatan komprehensif lain.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif.

c.6. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.5. Impairment of financial assets (continued)

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3) (continued)

The period considered when measuring expected credit loss is the the contractual term of the financial asset.

For assets measured at amortised cost, the balance sheet amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the balance sheet amount reflects the instrument's fair value, with the expected credit loss allowance held as a separate reserve within other comprehensive income.

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the balance sheet date using the effective interest rate as the discount rate.

c.6. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if the quoted prices are readily and regularly available and represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.6. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima, kecuali jika nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut ditentukan dengan perbandingan dengan transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi dari suatu instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi atau pengemasan ulang), atau berdasarkan suatu teknik penilaian yang variabelnya hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Jika harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara harga transaksi dan nilai yang sebelumnya diperoleh dari model penilaian diakui dalam laporan laba rugi setelah pengakuan awal tergantung pada masing-masing fakta dan keadaan dari transaksi tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

d. Kas dan kas di bank

Kas mencakup kas dan kas di bank, yang tidak dibatasi penggunaannya, tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang sangat signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.6. Fair value measurement (continued)

If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received, unless the fair value of that instrument is evidenced by comparison with the other observable current market transactions in the same instrument (i.e., without modification or repackaging), or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets. When transaction price provides the best evidence of fair value at initial recognition, the financial instrument is initially measured at the transaction price and any difference between this price and the value initially obtained from a valuation model is subsequently recognised in the statement of profit or loss depending on the individual facts and circumstances of the transaction but not later than when the valuation is supported wholly by observable market data or the transaction is closed out.

d. Cash on hands and cash in banks

Cash include cash on hand and cash in banks, which are not restricted and are not pledged as collateral for any borrowing and that are readily convertible to known amounts of cash which are subject to insignificant risk of changes in value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Piutang pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar dikurangi biaya-biaya transaksi dan ditambah *yield enhancing income* yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pelunasan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif.

Piutang pembiayaan konsumen akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Consumer financing receivables

Consumer financing receivables are recognised initially at fair value deducted by directly attributable transactions costs and added with yield enhancing income, and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Consumer financing receivables are classified as financial assets measured at amortised cost.

Early termination is treated as a full repayment of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year statement of profit or loss at the transaction date.

Unearned consumer financing income is the difference between total installments to be received from customers and the total financing which is recognised as income over the term of the contract using the effective interest rate.

Consumer financing receivables will be written-off when they are overdue for more than 180 (one hundred eighty) days. Recoveries from receivables previously written-off are recognised as other income upon receipt.

f. Piutang pembiayaan murabahah

Kontrak Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perusahaan mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen. Pada saat akad murabahah, piutang pembiayaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (marjin). Keuntungan murabahah diakui sebagai aset keuangan yang diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi.

Piutang pembiayaan murabahah akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 180 hari. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

f. Murabahah financing receivables

Murabahah contract is sell-buy goods contract with selling price amounted to acquisition cost plus agreed margin, and the Company must disclose the acquisition cost to consumer. When the murabahah contract is signed, murabahah financing receivables are recognised at acquisition cost plus agreed margin. Murabahah margin is recognised as financial assets measured at amortised cost.

Murabahah financing receivables will be written-off when they are overdue for more than 180 days. Recoveries from written-off receivables are recognised as other income upon receipt.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Piutang sewa pembiayaan

Piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan tangguhan, simpanan jaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara nilai piutang usaha bruto dan nilai tunai piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan tangguhan. Pendapatan sewa pembiayaan tangguhan dialokasikan sebagai pendapatan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian konstan atas investasi bersih dengan menggunakan suku bunga efektif.

Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa-pembiayaankan pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan.

Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

h. Pembiayaan bersama

Dalam pembiayaan bersama *without recourse* Perusahaan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada pelanggan dari tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pemberi pembiayaan bersama. Selisihnya, diakui sebagai pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan diakui sebagai pendapatan pembiayaan konsumen sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Seluruh kontrak pembiayaan bersama yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan pembiayaan bersama tanpa tanggung renteng (*without recourse*) dimana hanya porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perusahaan yang dicatat sebagai piutang pembiayaan konsumen di laporan posisi keuangan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan pada laporan laba rugi setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak pihak-pihak lain yang berpartisipasi pada transaksi pembiayaan bersama tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Finance lease receivables

Finance lease receivables represent lease receivables plus the residual value at the end of the lease period and stated at net of unearned lease income, security deposits and allowances for impairment losses. The difference between the gross lease receivable and the present value of the lease receivable is recognised as unearned lease income. Unearned lease income is allocated to current year statement of profit or loss and other comprehensive income based on a constant rate of return on the net investment using effective interest rates.

The lessee has the option to purchase the leased asset at the end of the lease period at a price mutually agreed upon at the commencement of the agreement.

Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

h. Joint financing

For joint financing without recourse, the Company has the right to set higher interest rates to customers than those as stated in the joint financing agreements with joint financing providers. The difference is recognised as part of unearned consumer financing income and recognised as consumer financing income over the term of the contract using effective interest method.

All joint financing agreements entered by the Company are joint financing without recourse in which only the Company's financing portion of the total installments are recorded as consumer financing receivables in the statement of financial position (net approach). Consumer financing income is presented in the statement of profit or loss after deducting the portions belong to other parties participated to these joint financing transactions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Cadangan kerugian penurunan nilai

Perusahaan melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dengan menggunakan metode *expected credit losses* (Catatan 2c).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Allowance for impairment losses

The Company calculates the allowance for impairment losses using the expected credit losses methodology (Note 2c).

j. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight-line method.

k. Aset tetap dan penyusutan

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

k. Fixed assets and depreciation

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation.

Acquisition cost covers all expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Construction in progress is stated at cost and transferred to the respective fixed asset account when completed and ready to use.

Depreciation on fixed assets is calculated using the straight-line method over their estimated useful lives as follows:

Golongan	Masa manfaat (tahun)/ *Useful life (years)*	*Classification*
Perabotan dan peralatan kantor	4 tahun/years	*Furniture and office equipments*
Kendaraan	4 tahun/years	*Vehicles*

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana seharusnya, hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai yang terkait dengan penggantian komponen tidak diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Amounts in respect of replaced parts are derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income during the period in which they are incurred.

Nilai residu dan umur manfaat aset ditelaah dan disesuaikan, setiap tanggal pelaporan jika diperlukan.

The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur masa manfaatnya.

l. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Fixed assets and depreciation (continued)

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and the resulting gain or loss on the disposal of fixed assets is recognised in the profit or loss.

When the carrying amount of a fixed asset is greater than its estimated recoverable amount, the amount will be written down immediately to its recoverable amount.

An assessment is made at each reporting period as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses recognised may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognised impairment losess is reversed ony if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

Reversal of an impairment loss is recognised in the statements of profit or loss as incurred. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

l. Taxation

The income tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income.

Management periodically evaluates positions taken in Corporate Income Tax Returns (CITR) with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. Where appropriate, management determines provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yang berasal dari selisih antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Rugi pajak yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

m. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan pasca-kerja

Imbalan pasca-kerja, seperti pensiun, uang pisah, uang penghargaan, dan imbalan lainnya, ditentukan sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Karena undang-undang ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Taxation (continued)

Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Tax loss carryforward is recognised as a deferred tax asset when it is probable that there will be future taxable profit available against which the unused tax losses can be utitilised. Deferred income tax is determined using tax rates pursuant to laws or regulations that have been enacted or substantially enacted by the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

m. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised on accrual basis when the benefits liable to the employees.

Post-employment benefits

Post-employment employee benefits, such as pensions, severance pay, service pay, and other benefits are provided in accordance with the Company's Regulations and applicable Labor Law.

Since the labor law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under this labor law represent defined benefit plans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Pesangon pemutusan hubungan kerja

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Perusahaan memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon.

Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berasal dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Termination benefits

Actuarial gains and losses arising from experience adjustment sand changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Company before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits.

The Company recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS 57 and involves the payment of termination benefits.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Imbalan kerja (lanjutan)

Pesangon pemutusan hubungan kerja (lanjutan)

Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

n. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

a. orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   (iii) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Employee benefits (continued)

Termination benefits (continued)

In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

n. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with SFAS No. 7 "Related Party Disclosures".

The Company considers the following as its related parties:

a. a person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   (i) has control or joint control of the reporting entity;
   (ii) has significant influence over the reporting entity; or
   (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. an entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   (i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika: (lanjutan)

b. suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

(ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
(iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
(iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
(v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
(vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
(vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Dalam kegiatan usaha normalnya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7, ”Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” termasuk entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Transactions with related parties (continued)

The Company considers the following as its related parties: (continued)

b. an entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)

(ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
(iii) both entities are joint ventures of the same third party;
(iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
(v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
(vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
(vii) a person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

In its normal course of business, the Company enter into transactions with related parties as defined under PSAK No. 7, “Related Party Disclosures”, include the entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government, through the Minister of Finance.

Transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest bearing*, masing-masing dicatat dalam "pendapatan pembiayaan konsumen dan penghasilan bunga" serta "beban keuangan" di dalam laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

Termasuk dalam pendapatan pembiayaan konsumen adalah komisi asuransi, pendapatan provisi dan biaya jasa dealer yang diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi dan pendapatan administrasi.

Pendapatan denda keterlambatan pembayaran dan pinalti diakui pada saat penerimaan dapat dipastikan. Pendapatan bunga bank disajikan secara bruto pada laporan laba rugi.

Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, menggunakan dasar akrual.

p. Transaksi Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Perusahaan dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Income and expense recognition

Interest income and expense for all interest bearing financial instruments are recognised within "consumer financing income and interest income" and "financial charges" respectively in the profit or loss using the effective interest rate method.

Included in the consumer financing income are insurance commission, provision fee and dealers incentive fee which are amortised using effective interest rate method.

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but does not consider future credit losses. These calculations include transaction costs and administration income.

Late charges and penalty income are recognised when the realisation in certain. Interest income is presented on a gross basis in the profit or loss.

Income and expense are recognised as incurred on an accrual basis.

p. Leases transaction

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Company can choose not to recognize the right-of-use asset and lease liabilities for:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Transaksi Sewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Perusahaan dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk: (lanjutan)

- Sewa jangka-pendek; dan
- Sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Leases transaction (continued)

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Company can choose not to recognize the right-of-use asset and lease liabilities for: (continued)

- *Short term lease; and*
- *Low value asset*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assess whether:

- *The Company has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  1. *The Company has the right to operate the asset;*
  2. *The Company has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.*

The Company recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred.The right-of-use asset is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Transaksi Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa pembiayaan sebagai akun tersendiri di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Leases transaction (continued)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company presents right-of-use assets and financial leases liabilities as separate accounts in the statement of financial position.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognised in the financial statements:

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2c.

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Perusahaan membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

a. Cadangan kerugian penurunan nilai

Perusahaan melakukan review atas piutang yang diberikan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas cadangan penurunan nilai yang telah dicatat. Justifikasi manajemen diperlukan dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies as disclosed in Note 2c.

Going Concern

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Critical accounting estimates and assumptions

The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

a. Allowance for impairment losses

The Company reviews its receivables at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management's judgment is applied in the estimation when determining the level of allowance required.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan konsumen dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut, namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi. Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif.

b. Imbalan pasca kerja

Imbalan pasca kerja ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja (Catatan 2m).

c. Penentuan umur sewa

Dalam menentukan umur sewa, manajemen mempertimbangkan beberapa fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomi untuk mengambil opsi perpanjangan, atau tidak mengambil opsi pembatalan. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi pembatalan) hanya dimasukkan dalam masa sewa jika secara meyakinkan diperpanjang (atau tidak dibatalkan).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Critical accounting estimates and assumptions (continued)

a. Allowance for impairment losses (continued)

Evaluation on collective impairment allowance covers credit losses inherent in portfolios of consumer financing receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired receivables, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for allowance for collective impairment losses, management considers factors such as credit quality, portfolio size, concentrations, and economic factors. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining allowance for collective impairment losses.

b. Post-employment benefits

Post-employment benefits are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return, on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits obligations (Note 2m).

c. Determining lease term

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

c. Penentuan umur sewa (lanjutan)

Untuk sewa bangunan, faktor-faktor berikut biasanya yang paling relevan:

- Jika ada penalti signifikan untuk membatalkan (atau untuk memperpanjang), Perusahaan yakin untuk memperpanjang (atau tidak membatalkan).
- Jika ada *leasehold improvement* yang diperkitakan memiliki nilai sisa yang signifikan, Perusahaan yakin untuk memperpanjang (atau tidak membatalkan).
- Selain dari itu, Perusahaan mempertimbangkan faktor mencakup sejarah durasi sewa dan biaya serta halangan bisnis untuk menggantikan aset sewa.

Seluruh opsi perpanjangan untuk sewa kantor dan kendaraan tidak dimasukkan ke dalam liabilitas sewa, karena Perusahaan dapat mengganti aset tanpa biaya signifikan atau halangan bisnis

Umur sewa dinilai kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau Perusahaan menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang mempengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

d. Penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap seperti diungkapkan pada Catatan 2k. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Critical accounting estimates and assumptions (continued)

c. Determining lease term (continued)

For leases of properties, the following factors are normally the most relevant:

- *If there are significant penalties to terminate (or not extend), the Company is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *If any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value, the Company is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *Otherwise, the Company considers other factors including historical lease durations and the costs and business disruption required to replace the leased asset.*

All extension options in offices and vehicles leases have not been included in the lease liability, because the Company could replace the assets without significant cost or business disruption.

The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the Company becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs, which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

d. Depreciation and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets as disclosed in Note 2k. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

e. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

f. Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 2l).

g. Nilai wajar instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perusahaan menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup *feedback* model atas likuiditas volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Critical accounting estimates and assumptions (continued)

e. Income tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transaction and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

f. Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognised for the future recoverable taxable income arising from temporary difference.

Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning (Note 2l).

g. Fair values of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Company uses the valuation techniques as described in Note 2c. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

The input for this model comes from observable market data. When observable market data is not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

4. KAS DAN KAS DI BANK / *4. CASH ON HANDS AND CASH IN BANKS*

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Kas	27.850.415.955	12.443.412.479	*Cash on hand*
Kas pada bank			*Cash in banks*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Permata Tbk	17.850.614.310	8.342.204.735	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	13.175.052.549	5.323.271.249	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.109.090.913	1.766.490.752	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.078.860.040	222.021.566	*PT Bank JTrust Indonesia Tbk*
PT Bank Mega Tbk	3.845.354.632	2.765.681.037	*PT Bank Mega Tbk*
PT Maybank Indonesia Tbk	3.232.910.720	5.277.791.962	*PT Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	1.243.495.356	-	*PT Bank China Construction Bank Indonesia*
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	1.237.446.800	-	*PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk*
PT Bank BCA Syariah	708.645.321	2.488.933.171	*PT Bank BCA Syariah*
PT Bank KEB Hana Indonesia	69.527.272	64.910.578	*PT Bank KEB Hana Indonesia*
PT Bank UOB Indonesia	51.383.981	50.000.000	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Victoria Internasional Tbk	49.122.149	841.316.444	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT Bank Resona Perdania	48.560.812	38.533.778	*PT Bank Resona Perdania*
PT Bank BPD DIY	45.669.120	3.158.011.201	*PT Bank BPD DIY*
PT Bank Oke Indonesia Tbk	36.144.697	-	*PT Bank Oke Indonesia Tbk*
Subtotal	51.781.878.672	30.339.166.473	*Subtotal*
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	167.250.371.249	127.279.407.421	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	88.708.877.637	17.847.258.768	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.283.042.553	456.536.920	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	66.000.628	65.868.769	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Subtotal	257.308.292.067	145.649.071.878	*Subtotal*
Total	**336.940.586.694**	**188.431.650.830**	***Total***

Tingkat suku bunga giro untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berkisar sebagai berikut:

The interest rates for current accounts for the year ended 31 December 2022 and 2021, are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Giro	1,00% - 2,50%	1,00% - 2,50%	*Current accounts*

Lihat Catatan 26 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of balances and transaction with related parties.

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN / *5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES*

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Piutang pembiayaan konsumen - bruto:			*Consumer financing receivables - gross:*
Pihak ketiga	29.005.096.969.153	21.073.136.689.286	*Third parties*
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(6.755.781.517.016)	(4.767.464.810.699)	*Unearned income on consumer financing*
	22.249.315.452.137	16.305.671.878.587	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai - neto	(15.895.977.272.099)	(11.016.695.038.159)	*Joint financing - net*
	6.353.338.180.038	5.288.976.840.428	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(232.100.505.004)	(149.875.021.400)	*Allowance for impairment losses*
Piutang pembiayaan konsumen - neto	**6.121.237.675.034**	**5.139.101.819.028**	***Consumer financing receivables - net***

Seluruh kontrak pembiayaan yang disalurkan Perusahaan adalah untuk kendaraan bermotor.

All consumer financing contracts provided by the Company are for motor vehicles.

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan atas kendaraan bermotor berkisar antara 12-60 bulan.

The period of consumer financing contracts for motor vehicles ranged between 12-60 months.

Angsuran dari saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto per 31 Desember 2022 dan 2021 yang akan diterima dari konsumen berdasarkan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Installments of consumer financing receivables - gross balance as of 31 December 2022 and 2021 which will be received from customers based on the maturity dates are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Tahun			*Year*
2022	-	8.744.218.303.403	*2022*
2023	11.758.921.795.077	6.371.140.020.061	*2023*
2024	8.659.885.323.092	3.807.181.383.052	*2024*
2025	5.188.324.136.202	1.668.735.752.575	*2025*
2026	2.544.564.694.881	481.861.230.195	*2026*
2027	853.401.019.901	-	*2027*
Total piutang pembiayaan konsumen - bruto	**29.005.096.969.153**	**21.073.136.689.286**	***Total consumer financing receivables - gross***

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Average effective interest rates charged to customers for the year ended 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Mobil	17,10%	16,57%	*Car*
Sepeda motor	32,31%	32,56%	*Motorcycle*

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Analisis umur piutang pembiayaan konsumen - bruto adalah sebagai berikut:

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

The aging analysis of consumer financing receivables - gross are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Belum jatuh tempo	26.690.902.991.291	19.498.097.755.770	*Current*
Telah jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 90 hari	2.026.711.027.212	1.381.966.568.516	*1 - 90 days*
91 - 120 hari	106.388.865.915	60.856.939.552	*91 - 120 days*
121 - 180 hari	181.094.084.735	132.215.425.448	*121 - 180 days*
Total	**29.005.096.969.153**	**21.073.136.689.286**	***Total***

Perubahan nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The changes in the carrying value of consumer financing receivables classified as amortised cost by stages for the year ended 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember/31 *December* 2022				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah/ *Total***	
Saldo. awal tahun	4.838.010.096.074	343.920.498.133	107.046.246.221	5.288.976.840.428	*Balance, beginning of the year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	57.148.993.478	(55.730.811.346)	(1.418.182.132)	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(70.592.881.593)	75.535.373.232	(4.942.491.639)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(28.370.172.502)	(5.310.207.441)	33.680.379.943	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur	1.417.367.011.576	(142.797.953.225)	10.916.437.131	1.285.485.495.482	*Net change in exposure*
Penghapusan	(103.882.251.616)	(43.051.101.223)	(74.190.803.033)	(221.124.155.872)	*Written-off*
Saldo akhir tahun	**6.109.680.795.417**	**172.565.798.130**	**71.091.586.491**	**6.353.338.180.038**	***Balance end of year***

	31 Desember/31 *December* 2021				
	***Stage* 1*)**	***Stage* 2*)**	***Stage* 3*)**	**Jumlah/ *Total***	
Saldo. awal tahun	4.460.917.774.940	122.356.619.590	47.144.982.094	4.630.419.376.624	*Balance, beginning of the year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	3.739.569.110	(3.125.032.000)	(614.537.110)	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(213.679.874.261)	213.707.819.678	(27.945.417)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(40.199.401.542)	(5.929.438.720)	46.128.840.262	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur	791.285.413.651	47.877.145.266	58.425.603.135	897.588.162.052	*Net change in exposure*
Penghapusan	(164.053.385.824)	(30.966.615.681)	(44.010.696.743)	(239.030.698.248)	*Written-off*
Saldo akhir tahun	**4.838.010.096.074**	**343.920.498.133**	**107.046.246.221**	**5.288.976.840.428**	***Balance end of year***

*) Termasuk dalam *stage* 1, 2 dan 3 adalah piutang pembiayaan konsumen yang masih dalam program restrukturisasi.

*) *Included in stage 1, 2 and 3 are consumer financing receivables which still in the restructuring program.*

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Saldo awal	149.875.021.400	93.277.678.319	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	303.349.639.476	295.628.041.329	*Allowance made during the year*
Penghapusan piutang	(221.124.155.872)	(239.030.698.248)	*Receivables written-off*
Saldo akhir	**232.100.505.004**	**149.875.021.400**	***Ending balance***

	31 Desember/*31 December* 2022				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal tahun	73.784.850.504	45.906.495.545	30.183.675.351	149.875.021.400	*Balance beginning of the year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	1.278.892.406	(1.231.539.890)	(47.352.516)	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(12.144.187.868)	12.668.798.655	(524.610.787)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(13.931.068.830)	(2.498.549.763)	16.429.618.593	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur	220.039.228.612	18.542.527.813	64.767.883.051	303.349.639.476	*Net change in exposure*
Penghapusan	(103.882.251.616)	(43.051.101.223)	(74.190.803.033)	(221.124.155.872)	*Written-off*
Saldo akhir tahun	**165.145.463.208**	**30.336.631.137**	**36.618.410.659**	**232.100.505.004**	***Balance end of year***

	31 Desember/*31 December* 2021				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal tahun	67.155.219.718	14.881.369.417	11.241.089.184	93.277.678.319	*Balance beginning of the year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	100.176.557	(85.010.452)	(15.166.105)	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(27.889.344.906)	27.892.330.993	(2.986.087)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(10.587.518.970)	(1.557.448.989)	12.144.967.959	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur	209.059.703.929	35.741.870.257	50.826.467.143	295.628.041.329	*Net change in exposure*
Penghapusan	(164.053.385.824)	(30.966.615.681)	(44.010.696.743)	(239.030.698.248)	*Written-off*
Saldo akhir tahun	**73.784.850.504**	**45.906.495.545**	**30.183.675.351**	**149.875.021.400**	***Balance end of year***

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Seluruh piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dievaluasi terhadap penurunan nilai dan Perusahaan telah mencadangkan cadangan kerugian penuruan nilai.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, piutang pembiayaan konsumen yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diterima oleh Perusahaan seperti yang dijelaskan pada Catatan 17 adalah sejumlah Rp5.371.286.539.037 dan Rp4.296.999.827.604.

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

All consumer financing receivables as of 31 December 2022 and 2021 are evaluated for impairment and the Company has provided allowance for impairment losses.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover any possible losses from uncollectible consumer financing receivables.

As of 31 December 2022 and 2021, total consumer financing receivables pledged as collateral for bank loans as disclosed in Note 17 amounted to Rp5,371,286,539,037 and Rp4,296,999,827,604.

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH / *6. MURABAHAH FINANCING RECEIVABLES*

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Piutang pembiayaan murabahah - bruto:			*Murabahah financing receivables - gross:*
Pihak ketiga	3.553.939.745.645	983.272.288.416	*Third parties*
Dikurangi:			*Less:*
Marjin murabahah yang belum diakui	(811.339.077.135)	(234.924.321.151)	*Unearned margin murabahah*
	2.742.600.668.510	748.347.967.265	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian piutang pembiayaan murabahah yang dibiayai - neto	(2.055.095.131.992)	(298.549.941.478)	*Joint financing - net*
	687.505.536.518	449.798.025.787	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.523.615.139)	(10.307.818.314)	*Allowance for impairment losses*
Piutang pembiayaan murabahah - neto	**659.981.921.379**	**439.490.207.473**	***Murabahah financing receivables - net***

Seluruh kontrak pembiayaan murabahah yang disalurkan Perusahaan adalah untuk kendaraan bermotor.

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan atas kendaraan bermotor berkisar antara 12-60 bulan.

All murabahah financing contracts provided by Company are for motor vehicles.

The period of consumer financing contracts for motor vehicles ranged between 12-60 months.

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH (lanjutan)

Angsuran dari saldo piutang pembiayaan murabahah - bruto pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang akan diterima dari konsumen berdasarkan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

6. MURABAHAH FINANCING RECEIVABLES (continued)

Installments of murabahah financing receivables - gross balance as of 31 December 2022 and 2021 which will be received from customers based on the maturity dates are as follows:

Tahun	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	*Year*
2022	-	334.320.755.534	*2022*
2023	1.164.536.413.535	281.459.903.878	*2023*
2024	989.988.613.879	207.983.493.480	*2024*
2025	738.958.883.045	119.170.816.863	*2025*
2026	458.666.757.824	40.337.318.661	*2026*
2027	201.789.077.362	-	*2027*
Total piutang pembiayaan murabahah - bruto	**3.553.939.745.645**	**983.272.288.416**	***Total murabahah financing receivables - gross***

Rata-rata tingkat pendapatan marjin efektif yang dikenakan kepada nasabah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut:

Average effective yield margin charged to customers for the year ended 31 December 2022 and 2021, are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Mobil	11,35%	14,33%	*Car*
Sepeda motor	28,07%	33,47%	Motorcycle

Analisa umur piutang pembiayaan murabahah - bruto adalah sebagai berikut:

The aging analysis of murabahah financing receivables - gross are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Belum jatuh tempo	3.453.768.008.804	950.595.603.787	*Current*
Telah jatuh tempo:			Overdue:
1 - 90 hari	90.561.004.204	26.720.770.664	1 - 90 days
91 - 120 hari	4.318.501.184	3.031.133.887	91 - 120 days
121 - 180 hari	5.292.231.453	2.924.780.078	121 - 180 days
Total	**3.553.939.745.645**	**983.272.288.416**	***Total***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Saldo awal	10.307.818.314	3.597.026.499	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	33.357.988.656	14.142.774.700	*Allowance made during the year*
Penghapusan piutang	(16.142.191.831)	(7.431.982.885)	*Receivables written-off*
Saldo akhir	**27.523.615.139**	**10.307.818.314**	***Ending balance***

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH (lanjutan)

Seluruh piutang pembiayaan murabahah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dievaluasi terhadap penurunan nilai dan Perusahaan telah mencadangkan cadangan kerugian penuruan nilai.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan murabahah.

Pada tanggal 31 Desesember 2022 dan 2021 piutang pembiayaan murabahah yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diterima oleh Perusahaan seperti yang dijelaskan pada Catatan 17 adalah masing-masing sejumlah Rp447.923.487.559 dan Rp282.170.509.413.

6. MURABAHAH FINANCING RECEIVABLES (continued)

All murabahah financing receivables as of 31 December 2022 and 2021 are evaluated for impairment and the Company has provided allowance for impairment losses.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover any possible losses from uncollectible murabahah financing receivables.

As of 31 December 2022 and 2021 total murabahah financing receivables pledged as collateral for bank loans as disclosed in Note 17 amounted to Rp447,923,487,559 and Rp282,170,509,413, respectively.

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN / *7. FINANCE LEASE RECEIVABLES*

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Piutang sewa pembiayaan - bruto:			*Finance lease receivables - gross:*
Pihak ketiga	103.804.742.289	45.732.746.666	*Third parties*
Nilai Sisa yang terjamin	39.944.076.280	20.476.319.979	*Guaranteed residual value*
	143.748.818.569	66.209.066.645	
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan piutang sewa pembiayaan yang belum diakui	(13.270.450.844)	(5.148.496.870)	*Unearned income on finance lease*
Simpanan jaminan	(39.944.076.280)	(20.476.319.979)	*Security deposit*
	90.534.291.445	40.584.249.796	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(807.206.030)	(174.915.898)	*Allowance for impairment losses*
Piutang sewa pembiayaan - neto	**89.727.085.415**	**40.409.333.898**	***Finance lease receivables - net***

Seluruh kontrak sewa pembiayaan yang disalurkan Perusahaan adalah untuk kendaraan bermotor. Jangka waktu kontrak sewa pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan atas kendaraan bermotor berkisar antara 12-48 bulan.

All finance lease contracts provided by the Company are for motor vehicles. The period of finance lease contracts for motor vehicles ranged between 12-48 months.

Angsuran dari saldo piutang sewa pembiayaan - bruto per 31 Desember 2022 dan 2021 yang akan diterima dari konsumen berdasarkan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Installments of finance lease receivables - gross balance as of 31 December 2022 and 2021 which will be received from customers based on the maturity dates are as follows:

Tahun	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	*Year*
2022	-	29.479.244.882	*2022*
2023	48.866.388.767	8.968.504.303	*2023*
2024	34.218.909.438	5.721.138.410	*2024*
2025	17.764.047.598	1.563.859.071	*2025*
2026	2.955.396.486	-	*2026*
Total piutang sewa pembiayaan - bruto	**103.804.742.289**	**45.732.746.666**	***Total Finance lease receivables - gross***

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Analisa umur piutang sewa pembiayaan - bruto adalah sebagai berikut:

7. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

The aging analysis of finance lease receivables - gross are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Belum jatuh tempo	103.804.742.289	44.828.336.336	*Current*
Telah jatuh tempo:			Overdue:
1 - 90 hari	-	904.410.330	1 - 90 days
Total	**103.804.742.289**	**45.732.746.666**	***Total***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

Perubahan nilai tercatat piutang sewa pembiayaan dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The changes in the carrying value of finance lease receivables classifiied as amortised cost by stages for the year ended 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember/*31 December* 2022				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal tahun	40.584.249.796	-	-	40.584.249.796	*Balance beginning of the year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur	50.539.827.911			50.539.827.911	*Net change in exposure*
Penghapusan	(589.786.262)	-	-	(589.786.262)	*Written-off*
Saldo akhir tahun	**90.534.291.445**	**-**	**-**	**90.534.291.445**	***Balance end of year***

	31 Desember/*31 December* 2021				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal tahun	-	-	-	-	*Balance beginning of the year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur	40.584.249.796	-	-	40.584.249.796	*Net change in exposure*
Penghapusan	-	-	-	-	*Written-off*
Saldo akhir tahun	**40.584.249.796**	**-**	**-**	**40.584.249.796**	***Balance end of year***

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

7. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Saldo awal	174.915.898	-	*Beginning balance*
Penyisihan selama periode berjalan	1.222.076.394	174.915.898	*Allowance made during the period*
Penghapusan piutang ragu-ragu	(589.786.262)	-	*Receivables written-off*
Saldo akhir	**807.206.030**	**174.915.898**	***Ending balance***

	31 Desember/31 *December* 2022				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah/ *Total***	
Saldo. awal tahun	174.915.898	-	-	174.915.898	*Balance, beginning of the year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur	1.222.076.394	-	-	1.222.076.394	*Net change in exposure*
Penghapusan	(589.786.262)	-	-	(589.786.262)	*Written-off*
Saldo akhir tahun	**807.206.030**	**-**	**-**	**807.206.030**	***Balance end of year***

	31 Desember/31 *December* 2021				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah/ *Total***	
Saldo. awal tahun	-	-	-	-	*Balance, beginning of the year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur	174.915.898	-	-	174.915.898	*Net change in exposure*
Penghapusan	-	-	-	-	*Written-off*
Saldo akhir tahun	**174.915.898**	**-**	**-**	**174.915.898**	***Balance end of year***

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Seluruh piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dievaluasi terhadap penurunan nilai dan Perusahaan telah mencadangkan cadangan kerugian penurunan nilai.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan.

7. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

All finance lease receivables as of 31 December 2022 and 2021are evaluated for impairment and the Company has provided allowance for impairment losses.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover any possible losses from uncollectible finance lease receivables.

8. PIUTANG LAIN-LAIN / *8. OTHER RECEIVABLES*

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Jasa pengelolaan asuransi	43.607.941.200	23.485.000.000	*Insurance handling services*
Payment point	41.517.195.265	21.059.445.232	*Payment point*
Pinjaman karyawan	14.257.167.894	8.024.290.780	*Employee loans*
Klaim asuransi	1.273.318.753	478.411.386	*Claim insurance*
Lain-lain	2.259.519.478	1.359.027.851	*Others*
	102.915.142.590	54.406.175.249	
Pihak berelasi			***Related party***
Jasa pengelolaan asuransi	2.484.712.500	4.620.000.000	*Insurance handling services*
Total	**105.399.855.090**	**59.026.175.249**	***Total***

Lihat Catatan 26 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain selama tahun berjalan, dan tidak ada penyisihan khusus yang dibuat untuk kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain pada akhir tahun.

Refer to Note 26 for details of balances and transactions with related parties.

Management believes that there is no impairment losses on other receivables during the year, and no specific allowance has been made for impairment losses on other receivables at the end of the year.

9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA / *9. PREPAID EXPENSES*

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Pemeliharaan	25.010.163.493	19.869.772.905	*Maintenance*
Administrasi dan promosi	1.306.074.741	812.593.271	*Administration and promotion*
Provisi terkait pembiayaan *Joint Finance* dan *Customer Asset Purchase*	1.177.429.799	605.785.165	*Provision related to Joint Finance and Customer Asset Purchase*
Sewa	283.333.186	321.388.724	*Rent*
Lain-lain	783.337.780	171.100.505	*Others*
	28.560.338.999	21.780.640.570	
Pihak berelasi			***Related party***
Provisi terkait pembiayaan *Joint Finance* dan *Customer Asset Purchase*	35.303.467.384	20.682.101.749	*Provision related to Joint Finance and Customer Asset Purchase*
Total	**63.863.806.383**	**42.462.742.319**	***Total***

9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA (lanjutan)

Lihat Catatan 26 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

9. PREPAID EXPENSES (continued)

Refer to Note 26 for details of balances and transactions with related parties.

10. PERPAJAKAN / *10. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Tax payables*

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Pajak penghasilan:			*Corporate income taxes:*
Pasal 29	62.414.445.839	36.299.873.244	*Article 29*
Pajak lain-lain:			*Other taxes:*
Pasal 21	13.821.988.550	6.979.320.207	*Article 21*
Pajak Pertambahan Nilai	1.941.954.576	4.377.676.515	*Value Added Tax*
Pasal 23	1.335.421.121	817.240.240	*Article 23*
Pasal 4(2)	1.285.426.820	697.726.271	*Article 4(2)*
Total	**80.799.236.906**	**49.171.836.477**	***Total***

b. Beban pajak penghasilan / *b. Income tax expense*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Kini	(113.332.651.299)	(53.425.830.040)	*Current*
Tangguhan	16.420.667.180	23.817.627.539	*Deferred*
Total	**(96.911.984.119)**	**(29.608.202.501)**	***Total***

Perhitungan beban pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 tersebut di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan.

The above calculation of corporate income tax expense for the year ended 31 December 2022 will be used as basis for filling the Annual Tax Return ("SPT") of Corporate Income Tax.

Perhitungan beban pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sama dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan Perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak.

The calculation of corporate income tax expense for the year ended 31 December 2021 is same as the Annual Tax Return filed by the Company to the Tax Office.

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

10. TAXATION (continued)

c. Tax expense

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Company's income before income tax expense and the applicable tax rate are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	429.915.090.848	131.969.214.939	*Income before income tax expense*
Pajak dihitung pada tarif pajak	(94.581.319.987)	(29.033.227.287)	*Tax calculated at tax rate*
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	1.075.297.099	579.303.760	*Interest income subject to final tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(3.405.961.231)	(1.154.278.974)	*Non-deductible expenses*
Beban pajak	**(96.911.984.119)**	**(29.608.202.501)**	***Tax expense***

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before income tax expense, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income, and taxable income is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	429.915.090.848	131.969.214.939	*Income before income tax expense*
Koreksi fiskal:			***Fiscal corrections:***
Beda temporer			***Temporary differences***
Penyisihan imbalan kerja karyawan	44.764.050.270	35.739.212.504	*Provision for employee benefits*
Penyisihan gaji dan tunjangan	22.618.321.935	49.698.582.815	*Provision on salary and allowances*
Promosi	6.549.280.057	22.746.664.315	*Promotion*
Beban sewa	688.994.012	77.483.721	*Rent expense*
Biaya penyusutan kendaraan	18.750.000	-	*Depreciation expense of vehicle*
Beda tetap			***Permanent differences***
Beban yang tidak dapat dikurangkan	15.481.641.961	5.246.722.616	*Non-deductible expenses*
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(4.887.714.086)	(2.633.198.911)	*Interest income subject to final tax*
Penghasilan kena pajak	515.148.414.997	242.844.681.999	*Taxable income*
Beban pajak	113.332.651.299	53.425.830.040	*Corporate income tax*
Dikurangi:			*Less:*
Pajak dibayar di muka			*Prepaid taxes*
Pasal 25	(46.049.657.967)	(13.379.548.968)	*Article 25*
Pasal 23	(4.868.547.493)	(3.746.407.828)	*Article 23*
Utang pajak penghasilan badan	**62.414.445.839**	**36.299.873.244**	***Corporate income tax payable***

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax assets

	31 Desember/*31 December* 2022				
	31 Desember 2021/ *31 December 2021*	**Diakui pada laba rugi/ *Recognised in profit or loss***	**Diakui pada pendapatan komprehensif lain/ *Recognised in other comprehensive income***	**31 Desember 2022/ *31 December 2022***	
Aset pajak tangguhan:					*Deferred tax assets:*
Penyisihan imbalan kerja karyawan	26.799.572.934	9.848.091.059	(884.094.099)	35.763.569.894	*Provision for employee benefits*
Penyisihan gaji dan tunjangan	18.796.230.454	4.976.030.825	-	23.772.261.279	*Provision on salary and allowance*
Promosi	6.612.419.646	1.440.841.613	-	8.053.261.259	*Promotion*
Biaya sewa	143.235.486	151.578.683	-	294.814.169	*Rent expense*
Biaya Penyusutan	-	4.125.000	-	4.125.000	*Depreciation expense*
Total	**52.351.458.520**	**16.420.667.180**	**(884.094.099)**	**67.888.031.601**	***Total***

	31 Desember/*31 December* 2021				
	31 Desember 2020/ *31 December 2020*	**Diakui pada laba rugi/ *Recognised in profit or loss***	**Diakui pada pendapatan komprehensif lain/ *Recognised in other comprehensive income***	**31 Desember 2021/ *31 December 2021***	
Aset pajak tangguhan:					*Deferred tax assets:*
Penyisihan imbalan kerja karyawan	19.623.879.012	7.862.626.751	(686.932.829)	26.799.572.934	*Provision for employee benefits*
Penyisihan gaji dan tunjangan	7.862.542.235	10.933.688.219	-	18.796.230.454	*Provision on salary and allowance*
Promosi	1.608.153.496	5.004.266.150	-	6.612.419.646	*Promotion*
Biaya sewa	126.189.067	17.046.419	-	143.235.486	*Rent expense*
Total	**29.220.763.810**	**23.817.627.539**	**(686.932.829)**	**52.351.458.520**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer kemungkinan besar dapat direalisasi pada tahun - tahun mendatang.

Management believes that the total deferred tax assets arising from temporary difference are probable to be realised in the future years.

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

e. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

11. ASET TETAP / *11. FIXED ASSETS*

	31 Desember/*31 December* 2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additional***	**Pelepasan/ *Disposal***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Harga perolehan						*Cost*
Perabotan dan peralatan kantor	144.629.492.175	19.517.034.211	(333.945.700)	-	163.812.580.686	*Furniture and office equipments*
Kendaraan	236.030.000	450.000.000	-	-	686.030.000	*Vehicles*
	144.865.522.175	19.967.034.211	(333.945.700)	-	164.498.610.686	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Perabotan dan peralatan kantor	(108.413.034.526)	(20.096.474.014)	333.945.700	-	(128.175.562.840)	*Furniture and office equipments*
Kendaraan	(173.214.380)	(87.607.292)	-	-	(260.821.672)	*Vehicles*
	(108.586.248.906)	(20.184.081.306)	333.945.700	-	(128.436.384.512)	
Nilai Buku neto	**36.279.273.269**				**36.062.226.174**	***Net Book Value***

	31 Desember/*31 December* 2021					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additional***	**Pelepasan/ *Disposal***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Harga perolehan						*Cost*
Perabotan dan peralatan kantor	126.489.066.064	17.775.030.311	(161.200.000)	526.595.800	144.629.492.175	*Furniture and office equipments*
Kendaraan	236.030.000	-	-	-	236.030.000	*Vehicles*
Aset dalam penyelesaian	528.030.800	-	-	(528.030.800)	-	*Construction in progress*
	127.253.126.864	17.775.030.311	(161.200.000)	(1.435.000)	144.865.522.175	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Perabotan dan peralatan kantor	(84.300.582.764)	(24.273.651.762)	161.200.000	-	(108.413.034.526)	*Furniture and office equipments*
Kendaraan	(114.206.880)	(59.007.500)	-	-	(173.214.380)	*Vehicles*
	(84.414.789.644)	(24.332.659.262)	161.200.000	-	(108.586.248.906)	
Nilai Buku neto	**42.838.337.220**				**36.279.273.269**	***Net Book Value***

Seluruh aset tetap kepemilikan langsung, telah diasuransikan dengan, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk dengan jumlah pertanggungan asuransi sebesar Rp208.521.746.696 pada tanggal 31 Desember 2022 dan telah diasuransikan dengan, PT Asuransi Wahana Tata dengan jumlah pertanggungan asuransi sebesar Rp1.139.046.195.334 pada tanggal 31 Desember 2021, yang menurut manajemen cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian karena semua risiko properti dan gempa bumi.

Directly owned fixed assets are insured by, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, for a sum insured of Rp208,521,746,696 as of 31 December 2022 and insured by, PT Asuransi Wahana Tata for a sum insured of Rp1,139,046,195,334 as of 31 December 2021, respectively, which according to the management, is sufficient to cover possible losses due to property all risks and earthquake.

Rincian keuntungan atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of gain on disposal of fixed assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Hasil pelepasan aset tetap	9.940.623	4.772.728	*Proceed from disposal of fixed assets*
Laba atas pelepasan aset tetap	**9.940.623**	**4.772.728**	***Gain on disposal of fixed assets***

11. ASET TETAP (lanjutan)

Kerugian atau keuntungan atas pelepasan aset tetap diakui sebagai bagian dari "pendapatan lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan melakukan reklasifikasi akun perabotan dan peralatan kantor dengan nilai buku Rp1.435.000 ke beban yang diakui sebagai bagian dari akun "Beban umum dan administrasi" selama tahun berjalan.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

11. FIXED ASSETS (continued)

Loss or gain on disposal of fixed assets is recognised as part of "other income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

For the year ended 31 December 2021, the Company reclassed the furniture and office equipment account with net book value of Rp1,435,000 to expense and recognised the expense as part of "General and administrative expenses" account during the year.

Management believes that there is no impairment of Company's fixed assets as of 31 December 2022 and 2021.

12. ASET HAK-GUNA / *12. RIGHT-OF-USE ASSETS*

	31 Desember/*December 31,* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additional***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset Hak Guna					***Right-of-use assets***
Harga perolehan					***Acquisition cost***
Kendaraan bermotor	31.718.858.662	-	-	31.718.858.662	*Vehicles*
Bangunan	122.727.348.195	20.952.833.333	-	143.680.181.528	*Buildings*
	154.446.206.857	20.952.833.333	-	175.399.040.190	
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Kendaraan bermotor	(16.008.573.162)	(6.813.215.224)	-	(22.821.788.386)	*Vehicles*
Bangunan	(61.059.397.376)	(29.640.675.348)	-	(90.700.072.724)	*Buildings*
	(77.067.970.538)	(36.453.890.572)	-	(113.521.861.110)	
Nilai Buku Neto	**77.378.236.319**			**61.877.179.080**	***Net Book Value***

	31 Desember/*December 31,* 2021				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additional***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset Hak Guna					***Right-of-use assets***
Harga perolehan					*Acquisition cost*
Kendaraan bermotor	22.833.747.650	8.885.111.012	-	31.718.858.662	*Vehicles*
Bangunan	79.896.135.014	42.831.213.181	-	122.727.348.195	*Buildings*
	102.729.882.664	51.716.324.193	-	154.446.206.857	
Akumulasi Penyusutan					*Accumulated Depreciation*
Kendaraan bermotor	(8.450.397.039)	(7.558.176.123)	-	(16.008.573.162)	*Vehicles*
Bangunan	(29.031.138.137)	(32.028.259.239)	-	(61.059.397.376)	*Buildings*
	(37.481.535.176)	(39.586.435.362)	-	(77.067.970.538)	
Nilai Buku Neto	**65.248.347.488**			**77.378.236.319**	***Net Book Value***

12. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Selama tahun berjalan, Perusahaan telah mengkapitalisasi biaya pinjaman sebesar Rp1.475.489.993 (2021: Rp1.408.362.953) atas aset hak-guna. Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum yaitu sebesar 7,35%.

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

12. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

During the year, the Company has capitalised borrowing costs amounted to Rp1,475,489,993 (2021: Rp1,408,362,953) *on right-of-use assets. Borrowing costs were capitalised at the weighted average rate of its general borrowings of 7.35%.*

The total cash outflow for leases for the year ended 31 December 2022 and 2021 are as follows :

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Beban penyusutan aset hak-guna			*Depreciation expense of right-of-use assets:*
Kendaraan bermotor	6.813.215.224	7.558.176.123	*Vehicles*
Bangunan	29.640.675.348	32.028.259.239	*Buildings*
	36.453.890.572	39.586.435.362	
Beban bunga:			*Interest expense*:
Beban berkaitan dengan sewa dengan aset yang bernilai rendah yang bukan sewa jangka pendek	1.475.489.993	1.408.362.953	*Expense relating to leases of low value assets that are not short term leases*

Pengungkapan lebih lanjut mengenai transaksi pihak berelasi terdapat pada Catatan 26.

Further disclosures on related party transactions are disclosed in Note 26.

13. ASET LAIN-LAIN

13. OTHER ASSETS

	31 Desember/ 31 *December* 2022	**31 Desember/ 31 *December* 2021**	
Uang muka:			*Advances:*
Dealer	6.005.350.053	9.520.352.011	*Dealer*
Pembelian aset tetap	1.733.830.113	2.355.789.225	*Acquisition of fixed asset*
Renovasi kantor	908.693.390	1.114.277.765	*Office renovation*
Uang jaminan	4.089.167.044	3.904.919.044	*Security deposit*
Lain-lain	11.048.786.986	5.447.443.307	*Others*
Total	**23.785.827.586**	**22.342.781.352**	***Total***

Lain-lain terdiri dari uang muka proyek IT, uang muka sewa gedung, uang muka sewa properti, uang muka perjalanan dinas dan aset lainnya.

Others consist of IT project advances, building rental advances, property rental advances, travel advances, and other assets.

14. UTANG USAHA / *14. TRADE PAYABLES*

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Utang kepada *dealer*	210.213.189.191	141.038.800.974	*Payables to dealer*
Utang asuransi	90.241.510.408	80.717.272.953	*Insurance payables*
Lain-lain	60.499.999	12.499.999	*Others*
	300.515.199.598	221.768.573.926	
Pihak berelasi			***Related party***
Utang asuransi	2.303.594.947	2.815.649.703	*Insurance payables*
Total	**302.818.794.545**	**224.584.223.629**	***Total***

Lihat Catatan 26 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of balances and transactions with related parties.

Utang usaha terdiri dari utang kepada *dealer* atas pembiayaan kendaraan bermotor, utang kepada perusahaan asuransi yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor serta utang usaha lainnya.

Trade payables represent payables to dealers for motor vehicle financing, payables to insurance companies in relation to motor vehicle financing and other payables.

15. UTANG LAIN-LAIN / *15. OTHER PAYABLES*

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Utang titipan konsumen	11.154.312.055	7.409.957.640	*Customer deposits*
Penerimaan lelang	4.908.967.437	323.655.600	*Auction receipt*
Utang fidusia	3.898.215.000	1.968.165.000	*Fiduciary payables*
Utang klaim dan pengembalian asuransi	1.275.384.699	1.308.270.608	*Claim and refund insurance payables*
Utang karoseri	723.610.000	322.855.000	*"Karoseri" payables*
Lain-lain	8.089.282.140	7.132.265.136	*Others*
Total	**30.049.771.331**	**18.465.168.984**	***Total***

Lain-lain terutama terdiri dari utang kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan klaim asuransi.

Others mainly consist of payables to third parties related to insurance claims.

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *16. ACCRUED EXPENSE*

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Gaji dan tunjangan	108.423.315.314	95.831.756.236	*Salaries and allowances*
Cadangan promosi	42.605.582.999	36.056.302.942	*Accrued promotion payables*
Beban bunga yang masih harus dibayar	11.121.304.891	11.270.414.191	*Accrued interest expenses*
Outsourcing	8.981.814.497	6.813.760.742	*Outsourcing*
Pemeliharaan	7.811.747.173	5.878.565.409	*Maintenance*
Asuransi tenaga kerja	5.339.027.163	4.168.589.571	*Employee insurance*
Lain-lain	14.837.630.506	12.332.343.230	*Others*
	199.120.422.543	172.351.732.321	

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR (lanjutan)

16. ACCRUED EXPENSE (continued)

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Pihak berelasi			***Related parties***
Beban bunga yang masih harus dibayar			*Accrued interest expenses*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.199.729.483	4.040.426.657	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.807.226.143	651.538.388	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	6.006.955.626	4.691.965.045	
Total	**205.127.378.169**	**177.043.697.366**	***Total***

Lihat Catatan 26 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of balances and transactions with related parties.

17. PINJAMAN BANK

17. BANK LOANS

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Pan Indonesia Tbk	763.888.888.821	883.124.999.992	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	409.722.222.198	420.833.333.321	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Mega Tbk	379.166.666.659	541.666.666.667	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	372.916.666.653	595.833.333.334	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	351.154.010.009	296.384.957.392	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	258.934.497.583	30.000.000.000	*PT Bank JTrust Indonesia Tbk*
PT Bank BCA Syariah	235.156.728.291	245.712.131.449	*PT Bank BCA Syariah*
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	211.741.582.859	-	PT Bank China Construction Bank *IndonesiaTbk*
PT Bank Oke Indonesia Tbk	177.916.666.660	-	*PT Bank Oke Indonesia Tbk*
PT Bank BPD DIY	100.000.000.000	13.852.578.963	*PT Bank BPD DIY*
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	98.183.425.935	-	*PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	70.833.333.331	-	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank KEB Hana Indonesia	1.578.150.499	36.351.895.555	*PT Bank KEB Hana Indonesia*
PT Bank Victoria Internasional Tbk	-	150.000.000.000	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT Bank Resona Perdania	-	26.388.888.888	*PT Bank Resona Perdania*
Subtotal	3.431.192.839.498	3.240.148.785.561	*Subtotal*

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

17. BANK LOANS (continued)

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.148.294.957.462	1.434.576.691.369	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.239.722.222.185	194.444.444.418	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Subtotal	2.388.017.179.647	1.629.021.135.787	*Subtotal*
Total pinjaman bank dengan bagian yang belum diamortisasi	**5.819.210.019.145**	**4.869.169.921.348**	***Total bank loans with unamortised portion***
Bagian yang belum diamortisasi			***Unamortised portion***
Pihak ketiga	(8.279.558.097)	(6.841.681.805)	*Third parties*
Pihak berelasi	(2.442.789.930)	(3.020.944.809)	*Related parties*
Subtotal	(10.722.348.027)	(9.862.626.614)	*Subtotal*
Total pinjaman bank	**5.808.487.671.118**	**4.859.307.294.734**	***Total bank loans***
Terdiri dari			***Consists of***
Pihak ketiga	3.422.913.281.401	3.233.307.103.756	*Third parties*
Pihak berelasi	2.385.574.389.717	1.626.000.190.978	*Related parties*
Total	**5.808.487.671.118**	**4.859.307.294.734**	**Total**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pinjaman- pinjaman di atas dikenakan suku bunga antara 6,50% - 9,50% per tahun (2021: 5,00% - 9,75%).

For the year ended 31 December 2022, the above borrowings bear interest rates ranging between 6.50% - 9.50% per annum (2021: 5.00% - 9.75%).

Rincian pinjaman bank (tanpa beban provisi dan administrasi yang belum di amortisasi) sesuai dengan tahun jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The details of bank loans (gross of unamortised portion of provision and administration expenses) by the year of maturity are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Tahun			***Year***
2022	-	2.392.113.861.550	*2022*
2023	2.406.362.013.357	1.408.151.207.440	*2023*
2024 dan sesudahnya	3.412.848.005.788	1.068.904.852.358	*2024 and there after*
Total	**5.819.210.019.145**	**4.869.169.921.348**	***Total***

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Pada tanggal 21 Maret 2018, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja *non-revolving* dari Bank Panin dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp1.000.000.000.000 ("Fasilitas III") dengan tingkat suku bunga 9,0% - 9,5% dan jatuh tempo tanggal 22 Juni 2022.

Pada tanggal 15 April 2019, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Panin berupa fasilitas pinjaman tetap *non revolving* dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp500.000.000.000 (“Fasilitas IV”) dengan tingkat suku bunga 9,0% - 9,75% pada saat penarikan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 November 2022. Perusahaan juga memperoleh tambahan fasilitas pinjaman *money market loan revolving* dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp200.000.000.000 (“Fasilitas V”) dengan suku bunga tetap pada saat penarikan mengacu pada suku bunga acuan ditambah 1,25% - 2,25% per tahun sesuai jangka waktu pinjaman. Pada tanggal yang sama perusahaan juga memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp50.000.000.000 (“Fasilitas VI”) dengan suku bunga 10% pada saat penarikan. Fasilitas V dan Fasilitas VI berakhir pada tanggal 26 Mei 2020.

Pada tanggal 22 Juli 2020, Perusahaan memperoleh perpanjangan jangka waktu pinjaman Fasilitas V dan Fasilitas VI hingga 26 Mei 2021.

Pada tanggal 4 Desember 2020, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja non-revolving dari Bank Panin dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp500.000.000.000 ("Fasilitas VII") dengan tingkat suku bunga 8,25% dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2024.

Pada tanggal 24 Mei 2021, Perusahaan memperoleh perpanjangan jangka waktu pinjaman atas Fasilitas V dan Fasilitas VI hingga 26 Agustus 2021. Atas Fasilitas VI yang jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2021, Perusahan tidak melakukan perpanjangan.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk

On 21 March 2018, the Company obtained additional non-revolving working capital facility from Bank Panin with a maximum credit limit amounted to Rp1,000,000,000,000 ("Facility III") with interest rate of 9.0 % - 9.5% and the due date on 22 June 2022.

On 15 April 2019, the Company obtained additonal working capital facilities from Bank Panin for non revolving term loan facility with a maximum credit limit amounted to Rp500,000,000,000 (“Facility IV”) with interest rate of 9.0% - 9.75% on withdrawal date and will be due on 27 November 2022. The Company also obtained additional revolving money market loan facility with a maximum credit limit amounted to Rp200,000,000,000 (“Facility V”) with fix interest rate on withdrawal date based on referred interest rate plus 1.25% - 2.25% per annum depending on loan term. On the same date the Company also obtained a bank account loan facility with a maximum credit limit of Rp50,000,000,000 (“Facility VI”) with interest rate 10% on withdrawal date. Facility V and Facility VI which due on 26 May 2020.

On 22 July 2020, the Company obtained an extension of the loan term of Facility V and Facility VI until 26 May 2021.

On 4 December 2020, the Company obtained additional non-revolving working capital facility from Bank Panin with credit limit amounted to Rp500,000,000,000 (“Facility VII”) with interest rate of 8.25% and will be due on 18 March 2024.

On 24 May 2021, the Company obtained an extension of the loan term of Facility V and Facility VI until 26 August 2021. For facility VI which due on 26 August 2021, the Company not extended the facility of the loan.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 25 Agustus 2021, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja *non-revolving* dari Bank Panin dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp500.000.000.000 ("Fasilitas VIII") dengan tingkat suku bunga 7,25% - 8,00% dan jatuh tempo maksimumnya 42 bulan sejak tanggal efektif perjanjian ditandatangani yaitu 25 Februari 2025. Perusahaan juga memperoleh tambahan dan perpanjangan waktu pinjaman fasilitas V dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp250.000.000.000 yang jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022.

Pada tanggal 23 Mei 2022, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja *non-revolving* dari Bank Panin dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp500.000.000.000 ("Fasilitas IX") dengan tingkat suku bunga 6,50% - 7,50% dan jatuh tempo maksimumnya 45 bulan sejak tanggal efektif perjanjian ditandatangani yaitu 23 Mei 2026. Perusahaan juga memperoleh perpanjangan waktu pinjaman fasilitas V dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp100.000.000.000 yang akan jatuh tempo tanggal 26 Mei 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas pinjaman tetap dari Bank Panin masing-masing sebesar Rp763.888.888.821 dan Rp803.124.999.992. Saldo pinjaman untuk fasilitas *Money Market Loan* masing-masing sebesar Rpnihil dan Rp80.000.000.000.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti rasio jumlah utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10:1, maksimal piutang pembiayaan konsumen dengan umur piutang > 90 hari sebesar 3% dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan di atas.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (continued)

On 25 August 2021, the Company obtained additional non-revolving working capital facility from Bank Panin with credit limit amounted to Rp500,000,000,000 ("Facility VIII") with interest rate of 7.25% - 8.00% and the maximum maturity period is 42 months from the effective date of the agreement being signed which is 25 February 2025. The Company also obtained an additional and extension facility of the loan term of Facility V with a maximum credit limit amounted to Rp250,000,000,000 which the due date on 26 May 2022.

On 23 Mei 2022, the Company obtained additional non-revolving working capital facility from Bank Panin with credit limit amounted to Rp500,000,000,000 ("Facility IX") with interest rate of 6.50% - 7.50% and the maximum maturity period is 45 months from the effective date of the agreement being signed which is 23 May 2026. The Company also obtained an extension facility of the loan term of Facility V with a maximum credit limit amounted to Rp100,000,000,000 which will be due on 26 May 2023.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of the term loan facility from Bank Panin amounted to Rp763,888,888,821 and Rp803,124,999,992, respectively. The outstanding balance of Money Market Loan facility amounted to Rpnil and Rp80,000,000,000, respectively.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants such as debt-to-equity ratio not exceeding 10:1, maximum account receivable with overdue more than 90 days is 3% and other reporting requirements. As of 31 December 2022 and 2021, the Company has complied with the loan covenants referred above.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (lanjutan)

Keseluruhan fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan piutang pembiayaan konsumen secara fidusia.

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 1 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") berupa fasilitas *non-revolving term loan* dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp200.000.000.000 ("Fasilitas I"), dengan tingkat suku bunga 9% yang jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2021. Perusahaan juga memperoleh fasilitas *uncommitted revolving Money Market Loan* dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp100.000.000.000 ("Fasilitas II"), dengan tingkat suku bunga 7,00% - 7,25%. Jangka waktu fasilitas II berakhir pada tanggal 15 November 2018. Jangka waktu Fasilitas II ini sudah dilakukan perpanjangan beberapa kali dan untuk perpanjangan terakhir dilakukan pada tanggal 25 November 2021, di mana jangka waktu Fasilitas II ini akan berakhir pada tanggal 15 November 2022.

Pada tanggal 13 Desember 2018 Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Permata dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp300.000.000.000 ("Fasilitas III") dengan tingkat suku bunga 9,75%. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2022.

Pada tanggal 25 November 2020, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Permata dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp250.000.000.000 ("Fasilitas IV") dengan tingkat suku bunga 8,75% dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2024.

Pada tanggal 25 November 2021, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Permata dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp300.000.000.000 ("Fasilitas V") dengan tingkat suku bunga 7,15% dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2026.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan sebagai berikut:

a. Gearing ratio tidak melebihi 9 kali.
b. Persentase *net write-off* tidak melebihi 2% untuk mobil dan 5% untuk sepeda motor.
c. Maksimal piutang pembiayaan konsumen dengan umur piutang > 90 hari untuk mobil sebesar 2% dan untuk motor sebesar 3%.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (continued)

These loan facilities are collateralised by consumer financing receivables on a fiduciary basis.

PT Bank Permata Tbk

On 1 November 2017, the Company obtained loan facilities from PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata"), i.e. non-revolving term loan facility with a maximum credit limit amounted to Rp200,000,000,000 ("Facility I"), with interest rate of 9% which due on 26 February 2021. The Company also obtained uncommitted revolving Money Market Loan facility with maximum credit limit amounted to Rp100,000,000,000 ("Facility II"), with interest rate of 7,00% - 7.25%. The due date of facility II is on 15 November 2018. The due date of Facility II has been extended a few times and for the last extention on 25 November 2021, which the due date of Facility II is on 15 November 2022.

On 13 December 2018, the Company obtained additional working capital facility from Bank Permata with a maximum credit limit amounted to Rp300,000,000,000 ("Facility III") with interest rate of 9.75%. This facility due date on 14 February 2022.

On 25 November 2020, the Company obtained additional working capital facility from Bank Permata with a maximum credit limit amounted to Rp250,000,000,000 ("Facility IV") with interest rate of 8.75% and will be due on 1 December 2024.

On 25 November 2021, the Company obtained additional working capital facility from Bank Permata with a maximum credit limit amounted to Rp300,000,000,000 ("Facility V") with interest rate of 7.15% and will be due on 25 May 2026.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants as follow:

a. Gearing ratio not exceeding 9 times.
b. Net write-off percentage should be less than 2% for car and 5% for motorcycle.
c. Maximum account receivable with overdue more than 90 days is 2% for car and 3% for motorcycle.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas

Seluruh fasilitas dijaminkan dengan piutang pembiayaan konsumen atas pembiayaan mobil baru dan bekas serta motor baru dengan umur piutang kurang dari 30 hari dengan nilai jaminan minimal sebesar 100% dari total fasilitas pinjaman yang terutang (Catatan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas I, II, III, IV dan V masing-masing sebesar Rp351.154.010.009 dan Rp296.384.957.392.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 30 Desember 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas *non-revolving Term Loan* dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Danamon") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp350.000.000.000 (“Fasilitas I”), dengan tingkat suku bunga 9% dan jangka waktu penarikan sampai dengan tanggal 30 Desember 2020. Fasilitas ini akan jatuh tempo tanggal 12 Oktober 2024. Perusahaan juga memperoleh fasilitas *revolving Working Capital* dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp100.000.000.000 (“Fasilitas II”), dengan tingkat suku bunga indikasi 8% dan jangka waktu penarikan fasilitas sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.

Jangka waktu Fasilitas II ini sudah dilakukan perpanjangan beberapa kali dan untuk perpanjangan terakhir dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2022, dan jangka waktu fasilitas II ini akan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2023.

Pada tanggal 5 November 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja *Mudharabah non-revolving* untuk pembiayaan Syariah dari Danamon dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp50.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo tanggal 16 November 2024.

Pada tanggal 27 September 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas *non-revolving Term Loan* dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp300.000.000.000 (“Fasilitas III”), dengan tingkat suku bunga 7,00% - 7,25% dan fasilitas ini akan jatuh tempo tanggal 21 Februari 2026.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Permata Tbk (continued)

As of 31 December 2022 and 2021, the Company has complied with the loan covenants referred above.

All loan facility is collateralised by consumer financing receivables of new car, new and used motorcycle financing with aging less than 30 days with minimum collateral value representing 100% of the total outstanding loan facility. (Note 5).

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of loan facility I, II, III, IV, and V amounted to Rp351,154,010,009 and Rp296,384,957,392, respectively.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

On 30 December 2019, the Company obtained a non-revolving Term Loan facility from PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Danamon") with a maximum credit limit Rp350,000,000,000 (“Facility I”), with interest rate of 9% and the drawdown period is up to 30 December 2020. This facility will be due on 12 October 2024. The Company also obtained a revolving Working Capital facility with maximum credit limit amounted to Rp100,000,000,000 (“Facility II”), with an interest rate of 8% indication and the drawdown period of the facility is up to 30 December 2020.

The due date of Facility II has been extended a few times and for the last extention on 30 August 2022, and the due date of Facility II is on 30 August 2023.

On 5 November 2020, the Company obtained a non-revolving Mudharabah working capital facility for Sharia financing from Danamon with a maximum credit limit amounted to Rp50,000,000,000. This facility will be due on 16 November 2024.

On 27 September 2021, the Company obtained non-revolving Term Loan facility from with a maximum credit limit Rp300,000,000,000 (“Facility III”), with interest rate of 7.00% - 7.25% and this facility will be due on 21 February 2026.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 21 Desember 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas *non-revolving Term Loan* dan *Mudharabah* dengan batas maksimum kredit masing-masing sejumlah Rp400.000.000.000 dan Rp100.000.000.000 ("Fasilitas IV"). Jangka waktu penarikan sampai dengan tanggal 21 Desember 2023.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan sebagai berikut:

a. Gearing ratio tidak melebihi 10 kali.
b. Persentase NCL tidak melebihi 5%.
c. Maksimal piutang pembiayaan konsumen dengan umur piutang > 90 hari sebesar 3,5%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas dari Danamon masing-masing sebesar Rp372.916.666.653 dan Rp595.833.333.334.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan piutang pembiayaan konsumen dengan umur piutang kurang dari 90 hari secara fidusia dengan nilai jaminan minimal 100% dari total fasilitas pinjaman yang terutang untuk fasilitas *Term Loan* dan *Mudharabah*, dan *Clean Collateral* untuk fasilitas *Working Capital*.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 10 Mei 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *uncommitted revolving Money Market Loan* dan fasilitas pinjaman berjangka dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank") dengan batas maksimum kredit masing-masing sejumlah Rp100.000.000.000 dan Rp600.000.000.000. Tingkat suku bunga untuk fasilitas *Money Market Loan* ditentukan pada saat penarikan yang jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2020. Sedangkan, fasilitas pinjaman berjangka dikenakan tingkat suku bunga 9,5% dengan jangka waktu penarikan sampai dengan 20 Mei 2020 dan maksimum tenor pinjaman 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 9 Maret 2024.

Jangka waktu Fasilitas *Money Market Loan* ini sudah dilakukan perpanjangan beberapa kali dan untuk perpanjangan terakhir dilakukan pada tanggal 21 April 2022, di mana jangka waktu penarikan fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 10 Mei 2023.

Pada tanggal 6 September 2021, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Pinjaman Berjangka II sejumlah Rp200.000.000.000,- dengan tingkat suku bunga 7,75% dan jangka waktu penarikan sampai dengan tanggal 6 Maret 2022.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (continued)

On 21 December 2022, the Company obtained non-revolving Term Loan and Mudharabah facility from with a maximum credit limit amounted to Rp400,000,000,000 and Rp100,000,000,000 ("Facility IV") respectively. The drawdown period is up to 21 December 2023.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants as follow:

a. Gearing ratio not exceeding 10 times.
b. NCL percentage should be less than 5%.
c. Maximum account receivable with overdue more than 90 days is 3.5%.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of facility from Danamon amounted to Rp372,916,666,653 and Rp595,833,333,334, respectively.

This loan facility is collateralised by consumer financing receivables with aging less than 90 days on fiduciary basis with minimum collateral 100% of total outstanding loan facility for Term Loan and Mudharabah, and clean collateral basis for Working Capital Facility.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

On 10 May 2019, the Company obtained uncommitted revolving Money Market Loan facility and term loan facility from PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank") with the maximum credit limit amounted to Rp100,000,000,000 and Rp600,000,000,000, respectively. The Money Market Loan facility's interest rate is determined on withdrawal which due on 10 May 2020. Meanwhile, the term loan facility's interest rate is 9.5% with withdrawal period until 20 May 2020 and maximum installment period of 48 months since the withdrawal date. This facility will be due on 9 March 2024.

The due date of Facility Money Market Loan has been extended a few times and for the last extension on 21 April 2022, which the due date of Facility is on 10 May 2023.

On 6 September 2021, the Company's new term loan II facility with a maximum credit limit Rp200,000,000,000 and interest rate is 7.75% with withdrawal period until 6 March 2022.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 27 Juli 2022, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Pinjaman Berjangka III sejumlah Rp350.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 7% dan jangka waktu penarikan sampai dengan tanggal 27 Januari 2023. Fasilitas ini bersifat hybrid yang dapat digunakan sebagai modal kerja konvensional maupun syariah.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan sebagai berikut:

a. *Gearing ratio* tidak melebihi 8 kali.
b. Minimal *current ratio* adalah 1 kali.
c. Maksimal piutang pembiayaan konsumen dengan umur piutang > 90 hari sebesar 3%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas dari Maybank masing-masing sebesar Rp409.722.222.198 dan Rp420.833.333.321.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan piutang pembiayaan konsumen dengan umur piutang < 90 hari secara fidusia dengan nilai jaminan minimal 100% dari total fasilitas pinjaman yang terutang.

PT Bank BCA Syariah

Pada tanggal 20 Mei 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Modal Kerja *Mudharabah revolving* untuk pembiayaan Syariah dari PT Bank BCA Syariah (“BCAS”) dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp100.000.000.000.

Pada tanggal 18 November 2020, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman Modal Kerja *Mudharabah revolving* dari BCAS dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp200.000.000.000. Masa penarikan fasilitas ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.

Pada tanggal 25 Agustus 2021, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman Modal Kerja *Mudharabah revolving* dari BCAS dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp300.000.000.000. Masa penarikan fasilitas ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan sebagai berikut:

a. *Gearing ratio* tidak melebihi 10 kali.
b. Maksimal piutang pembiayaan konsumen dengan umur piutang > 90 hari sebesar 5%.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (continued)

On 27 Juli 2022, the Company’s new term loan III facility with a maximum credit limit Rp350,000,000,000 and interest rate is 7% with withdrawal period until 27 January 2023. This facility is a hybrid which can be used as conventional or sharia working capital.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants as follow:

a. Gearing ratio not exceeding 8 times.
b. Minimum current ratio of 1 times.
c. Maximum account receivable with overdue more than 90 days is 3%.

As of 31 December 2022 and 2021, the Company has complied with the loan covenants referred above.

As of 31 December 2022, and 2021, the outstanding balance of facility from Maybank amounted to Rp409,722,222,198 and Rp420,833,333,321, respectively.

This loan facility is collateralised by consumer financing receivables with aging less than 90 days on fiduciary basis with minimum collateral 100% of total outstanding loan facility.

PT Bank BCA Syariah

On 20 May 2019, the Company obtained a revolving Mudharabah working capital facility for Sharia financing from PT Bank BCA Syariah (“BCAS”) with a maximum credit limit amounted to Rp100,000,000,000.

On 18 November 2020, the Company obtained an additional revolving Mudharabah working capital facility from BCAS with a maximum credit of Rp200,000,000,000. The withdrawal period for this facility is until 31 August 2021.

On 25 August 2021, the Company obtained an additional revolving Mudharabah working capital facility from BCAS with a maximum credit of Rp300,000,000,000. The withdrawal period for this facility is until 31 August 2022.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants as follow:

a. Gearing ratio not exceeding 10 times.
b. Maximum account receivable with overdue more than 90 days is 5%

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank BCA Syariah (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas dari BCAS masing-masing Rp235.156.728.291 dan Rp245.712.131.449.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan piutang pembiayaan konsumen dengan umur piutang kurang dari 60 hari secara fidusia dengan nilai jaminan minimal 100% dari total fasilitas pinjaman yang terutang.

PT Bank KEB Hana Indonesia

Pada tanggal 13 Juli 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja *non-revolving* dari PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank KEB Hana") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp200.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9%. Fasilitas ini sudah lunas pada tanggal 7 September 2020.

Pada tanggal 8 Februari 2018, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja *non-revolving* dari Bank KEB Hana dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp200.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9%. Fasilitas ini sudah lunas pada tanggal 21 Mei 2021.

Pada tanggal 21 Agustus 2019, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja *non-revolving* dari Bank KEB Hana dengan batas maksimum kredit sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,5%. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank KEB Hana masing-masing sebesar Rp1.578.150.499 dan Rp36.351.895.555.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dengan nilai jaminan minimal 100% dari total fasilitas pinjaman yang terutang atau nilai tertinggi sebesar Rp300.000.000.000 dan didaftarkan di Kantor Pencatatan Fidusia.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank BCA Syariah (continued)

As of 31 December 2022 and 2021, the Company has complied with the loan covenants referred above.

As of 31 December 2022, and 2021, the outstanding balance of facility from BCAS amounted to Rp235,156,728,291 and Rp245,712,131,449, respectively.

This loan facility is collateralised by consumer financing receivables with aging less than 60 days on fiduciary basis with minimum collateral 100% of total outstanding loan facility.

PT Bank KEB Hana Indonesia

On 13 July 2017, the Company obtained non-revolving working capital facility from PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank KEB Hana") with credit limit amounted to Rp200,000,000,000 with interest rate of 9%. This facility was paid off on 7 September 2020.

On 8 February 2018, the Company obtained additional non-revolving working capital facility from Bank KEB Hana with credit limit amounted to Rp200,000,000,000 with interest rate of 9%. This facility was fully paid on 21 May 2021.

On 21 August 2019, the Company obtained an additional non-revolving working capital facility from Bank KEB Hana with a maximum credit of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 9.5%. This facility will be due on 17 January 2023.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of the working capital facility from Bank KEB Hana amounted to Rp1,578,150,499 and Rp36,351,895,555, respectively.

This loan facility is collateralised by consumer financing receivables with minimum collateral value representing 100% of the total outstanding loan facility or at the highest amounted to Rp300,000,000,000 and registered in Fiduciary Registration Office.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Resona Perdania

Pada tanggal 3 September 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja *non-revolving* dari PT Bank Resona Perdania ("Resona") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 8,83%. Fasilitas ini telah lunas pada tanggal 3 Oktober 2022.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan sebagai berikut:

a. *Gearing ratio* tidak melebihi 10 kali.
b. Minimal *current ratio* adalah 1 kali.
c. Maksimal piutang pembiayaan konsumen dengan umur piutang > 90 hari sebesar 5%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas dari Resona masing-masing sebesar Rpnihil (lunas) dan Rp26.388.888.888.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan piutang pembiayaan konsumen dengan umur piutang < 90 hari secara fidusia dengan nilai jaminan minimal 100% dari total fasilitas pinjaman yang terutang.

PT BPD DIY

Pada tanggal 19 Mei 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja *non-revolving* dari PT BPD DIY untuk pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat (baru maupun bekas pakai) dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9%. Fasilitas pinjaman ini telah lunas pada tanggal 22 Mei 2020.

Pada tanggal 30 April 2019, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja non-revolving dari BPD DIY dengan maksimum kredit sebesar Rp100.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 9,5% pada saat penarikan. Fasilitas pinjaman ini telah lunas pada tanggal 3 Mei 2022.

Pada tanggal 15 Desember 2022, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja non-revolving dari BPD DIY dengan maksimum kredit sebesar Rp100.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 6,8% pada saat penarikan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2025

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Resona Perdania

On 3 September 2019, the Company obtained a non-revolving working capital facility from PT Bank Resona Perdania ("Resona") with a maximum credit limit amounted to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 8.83%. This facility was fully paid on 3 October 2022.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants as follow:

a. Gearing ratio not exceeding 10 times.
b. Minimum current ratio of 1 times.
c. Maximum account receivable with overdue more than 90 days is 5%.

As of 31 December 2022 and 2021, the Company has complied with the loan covenants referred above.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of facility from Resona amounted to Rpnil (fully paid) and Rp26,388,888,888, respectively.

This loan facility is collateralised by consumer financing receivables with aging less than 90 days on fiduciary basis with minimum collateral 100% of total outstanding loan facility.

PT BPD DIY

On 19 May 2017, the Company obtained non-revolving working capital facility from PT BPD DIY for the financing of two-wheel and fourwheel vehicle (new and used) with a maximum credt limit amounted to Rp50,000,000,000 with interest rate of 9%. This loan facility was fully paid on 22 May 2020.

On 30 April 2019, the Company obtained additional non-revolving working capital facility from BPD DIY with a maximum credit limit amounted to Rp100,000,000,000, with interest rate of 9.5% at the time of withdrawal. This loan facility was fully paid on 3 May 2022.

On 15 December 2022, the Company obtained additional non-revolving working capital facility from BPD DIY with a maximum credit limit amounted to Rp100,000,000,000, with interest rate of 6.8% at the time of withdrawal. This facility will be due on 19 December 2025.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT BPD DIY (lanjutan)

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan sebagai berikut:

a. *Gearing ratio* tidak melebihi 9 kali.
b. Jumlah minimal pembiayaan adalah 40% dari total asset.
c. Maksimal piutang pembiayaan dengan umur piutang > 90 hari sebesar 3,5%.
d. Persentase *net write-off* tidak melebihi 5%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas pinjaman modal kerja dari BPD DIY masing-masing sebesar Rp100.000.000.000 dan Rp13.852.578.963.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan piutang pembiayaan konsumen dengan nilai jaminan minimal 100% dari total fasilitas pinjaman yang terutang.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 1 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja *revolving* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" Bank Mandiri") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp25.000.000.000 ("Fasilitas I") dan Rp225.000.000.000 ("Fasilitas II"). Jangka waktu penarikan Fasilitas II hingga 30 September 2016.

Pada tanggal 10 Desember 2015, Perusahaan dan Bank Mandiri menyetujui untuk menambah batas maksimum kredit Fasilitas I menjadi sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu kredit adalah sampai dengan tanggal 9 Desember 2016. Fasilitas I ini sudah dilakukan perpanjangan beberapa kali dan atas perpanjangan terakhir, jangka waktu kredit fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk Fasilitas I masing-masing sebesar Rpnihil dan Rp200.000.000.000.

Pada tanggal 7 Desember 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Mandiri dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp450.000.000.000 ("Fasilitas V"). Fasilitas pinjaman modal kerja *revolving* selama masa penarikan dan menjadi pinjaman modal kerja *non-revolving* apabila jangka waktu penarikan telah berakhir atau terdapat tambahan fasilitas baru dari Bank Mandiri. Jangka waktu penarikan Fasilitas V adalah sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 dan fasilitas ini telah lunas pada tanggal 19 Januari 2022.

17. BANK LOANS (continued)

PT BPD DIY (lanjutan)

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants as follows:

a. Gearing ratio not exceeding 9 times.
b. Minimum total financing according to total asset is 40%.
c. Maximum account receivable with overdue more than 90 days is 3.5%.
d. Net write-off percentage shoud be less than 5%.

As of 31 December 2022 and 2021, the Company has complied with the loan covenants referred above.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of the working capital facility from BPD DIY amounted to Rp100,000,000,000 and Rp13,852,578,963, respectively.

This loan facility is collateralised by consumer financing receivables with minimum collateral 100% of total outstanding loan facility.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On 1 October 2015, the Company obtained revolving working capital facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") with a maximum credit limit amounted to Rp25,000,000,000 ("Facility I") and Rp225,000,000,000 ("Facility II"). The drawdown period of Facility II is up to 30 September 2016.

On 10 December 2015, the Company and Bank Mandiri agreed to increase the maximum credit limit for Facility I to become Rp200,000,000,000 with drawdown period is up to 9 December 2016. Facility I has been extended a few times and for the last extend, the drawdown period of this facility will be ended on 9 December 2022.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of Facility I amounted to Rpnill and Rp200,000,000,000, respectively.

On 7 December 2017, the Company obtained working capital facility from Bank Mandiri with a maximum credit limit amounted to Rp450,000,000,000 ("Facility V"). This facility is a revolving working capital facility during drawdown period and will be a non-revolving working capital facility after the drawdown period is ended or a new facility is obtained from Bank Mandiri. The drawdown period of Facility V is up to 6 December 2018 and this facility was fully paid on 19 January 2022.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk Fasilitas V masing-masing sebesar Rpnihil dan Rp2.458.722.142.

Pada tanggal 19 Juli 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Mandiri dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp500.000.000.000 ("Fasilitas VI"). Fasilitas pinjaman modal kerja *revolving* selama masa penarikan dan menjadi pinjaman modal kerja *non-revolving* apabila jangka waktu penarikan telah berakhir atau terdapat tambahan fasilitas baru dari Bank Mandiri. Jangka waktu penarikan Fasilitas VI adalah sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 dengan jumlah periode cicilan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal penarikan dari fasilitas pinjaman. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, saldo pinjaman untuk Fasilitas VI masing-masing sebesar Rp93.113.045.589 dan Rp226.222.906.136.

Pada tanggal 4 November 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Mandiri dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp400.000.000.000 ("Fasilitas VII"). Fasilitas pinjaman modal kerja *revolving* selama masa penarikan dan menjadi pinjaman modal kerja *non-revolving* apabila jangka waktu penarikan telah berakhir atau terdapat tambahan fasilitas baru dari Bank Mandiri. Jangka waktu penarikan Fasilitas VII adalah sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 dengan jumlah periode cicilan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal penarikan dari fasilitas pinjaman. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk Fasilitas VII masing-masing sebesar Rp109.755.702.931 dan Rp213.926.762.674.

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Mandiri dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp300.000.000.000 ("Fasilitas VIII"). Fasilitas pinjaman modal kerja *revolving* selama masa penarikan dan menjadi pinjaman modal kerja *non-revolving* apabila jangka waktu penarikan telah berakhir atau terdapat tambahan fasilitas baru dari Bank Mandiri. Jangka waktu penarikan Fasilitas VIII adalah sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 dengan jumlah periode cicilan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal penarikan dari fasilitas pinjaman. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 6 November 2024.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

As of 31 December 2022 and 2021 the outstanding balance of Facility V amounted to Rpnil dan Rp2,458,722,142, respectively.

On 19 July 2019, the Company obtained the working capital facility from Bank Mandiri with a maximum credit limit to Rp500,000,000,000 ("Facility VI"). This facility is a revolving working capital facility during drawdown period and will be a non-revolving working capital facility after the drawdown period is ended or a new facility is obtained from Bank Mandiri. The drawdown period of Facility VI is up to 19 January 2020 with total installment period of 48 months calculated since the withdrawal date of the credit facility. This facility will be due on 7 October 2023.

As of 31 December 2022 and 2021 the outstanding balance of Facility VI amounted to Rp93,113,045,589 and Rp226,222,906,136, respectively.

On 4 November 2019, the Company obtained the working capital facility from Bank Mandiri with a maximum credit limit to Rp400,000,000,000 ("Facility VII"). This facility is a revolving working capital facility during drawdown period and will be a non-revolving working capital facility after the drawdown period is ended or a new facility is obtained from Bank Mandiri. The drawdown period of Facility VII is up to 19 July 2020 with total installment period of 48 months calculated since the withdrawal date of the credit facility. This facility will be due on 16 December 2023.

As of 31 December 2022 and 2021 the outstanding balance of Facility VII amounted to Rp109,755,702,931 and Rp213,926,762,674, respectively.

On 19 December 2019, the Company obtained the working capital facility from Bank Mandiri with a maximum credit limit to Rp300,000,000,000 ("Facility VIII"). This facility is a revolving working capital facility during drawdown period and will be a non-revolving working capital facility after the drawdown period is ended or a new facility is obtained from Bank Mandiri. The drawdown period of Facility VIII is up to 19 December 2020 with total installment period of 48 months calculated since the withdrawal date of the credit facility. This facility will be due on 6 November 2024.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk Fasilitas VIII masing-masing sebesar Rp117.171.440.425 dan Rp205.746.374.339.

Pada tanggal 21 April 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Mandiri dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp500.000.000.000 ("Fasilitas IX"). Fasilitas pinjaman modal kerja *revolving* selama masa penarikan dan menjadi pinjaman modal kerja *non-revolving* apabila jangka waktu penarikan telah berakhir atau terdapat tambahan fasilitas baru dari Bank Mandiri. Jangka waktu penarikan Fasilitas IX adalah sampai dengan tanggal 21 April 2022 dengan jumlah periode cicilan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal penarikan dari fasilitas pinjaman. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk Fasilitas IX masing-masing sebesar Rp356.671.436.051 dan Rp486.221.926.078.

Pada tanggal 21 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Mandiri dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp500.000.000.000 ("Fasilitas X"). Fasilitas pinjaman modal kerja *revolving* selama masa penarikan dan menjadi pinjaman modal kerja *non-revolving* apabila jangka waktu penarikan telah berakhir atau terdapat tambahan fasilitas baru dari Bank Mandiri. Jangka waktu penarikan Fasilitas X adalah sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah periode cicilan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal penarikan dari fasilitas pinjaman. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk Fasilitas X masing-masing sebesar Rp471.583.333.081 dan Rp100.000.000.000.

Pada tanggal 9 Desember 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Mandiri dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp1.075.000.000.000 ("Fasilitas XI") dengan sublimit fasilitas bridging dengan limit sejumlah Rp.200.000.000.000. Fasilitas pinjaman modal kerja *revolving* selama masa penarikan dan menjadi pinjaman modal kerja *non-revolving* apabila jangka waktu penarikan telah berakhir atau terdapat tambahan fasilitas baru dari Bank Mandiri. Jangka waktu penarikan Fasilitas XI adalah sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 dengan jumlah periode cicilan selama 72 bulan terhitung sejak tanggal penarikan dari fasilitas pinjaman.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

As of 31 December 2022 and 2021 the outstanding balance of Facility VIII amounted to Rp117,171,440,425 and Rp205,746,374,339, respectively.

On 21 April 2021, the Company obtained the working capital facility from Bank Mandiri with a maximum credit limit to Rp500,000,000,000 ("Facility IX"). This facility is a revolving working capital facility during drawdown period and will be a non-revolving working capital facility after the drawdown period is ended or a new facility is obtained from Bank Mandiri. The drawdown period of Facility IX is up to 21 April 2022 with total installment period of 48 months calculated since the withdrawal date of the credit facility. This facility will be due on 30 November 2025.

As of 31 December 2022 and 2021 the outstanding balance of Facility IX amounted to Rp356,671,436,051 and Rp486,221,926,078, respectively.

On 21 December 2021, the Company obtained the working capital facility from Bank Mandiri with a maximum credit limit to Rp500,000,000,000 ("Facility X"). This facility is a revolving working capital facility during drawdown period and will be a non-revolving working capital facility after the drawdown period is ended or a new facility is obtained from Bank Mandiri. The drawdown period of Facility X is up to 21 December 2022 with total installment period of 60 months calculated since the withdrawal date of the credit facility. This facility will be due on 27 October 2026.

As of 31 December 2022 and 2021 the outstanding balance of Facility X amounted to Rp471,583,333,081 and Rp100,000,000,000, respectively.

On 9 December 2022, the Company obtained the working capital facility from Bank Mandiri with a maximum credit limit to Rp1,075,000,000,000 ("Facility XI") with sublimit bridging facility with a maximum credit limit to Rp200,000,000,000. This facility is a revolving working capital facility during drawdown period and will be a non-revolving working capital facility after the drawdown period is ended or a new facility is obtained from Bank Mandiri. The drawdown period of Facility XI is up to 9 December 2023 with total installment period of 72 months calculated since the withdrawal date of the credit facility.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk Fasilitas XI masing-masing sebesar Rpnihil dan Rpnihil.

Keseluruhan fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen secara fidusia dengan nilai jaminan minimal sebesar 100% dari total fasilitas pinjaman yang terutang.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti rasio jumlah utang terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 9:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 9 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja *revolving* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp250.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% - 9,25%. Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 8 Oktober 2019. Fasilitas pinjaman modal kerja tersebut sudah diperpanjang sampai dengan 8 Oktober 2020 dengan tenor pinjaman maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan.

Pada tanggal 7 Oktober 2020, fasilitas pinjaman modal kerja tersebut kembali diperpanjang sampai dengan 8 Oktober 2021.

Pada tanggal 25 Oktober 2021, fasilitas pinjaman modal kerja tersebut kembali diperpanjang sampai dengan 8 Januari 2022.

Pada tanggal 25 Maret 2022, fasilitas pinjaman modal kerja tersebut kembali diperpanjang sampai dengan 8 Oktober 2022.

Pada tanggal 18 April 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja non revolving dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp1.250.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,50% - 6,80%. Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 18 April 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas pinjaman modal kerja dari BNI sebesar Rp1.239.722.222.185 dan Rp194.444.444.418.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

As of 31 December 2022 and 2021 the outstanding balance of Facility XI amounted to Rpnil and Rpnil, respectively.

These loan facilities are collateralised by consumer financing receivables on a fiduciary basis with minimum collateral value representing 100% of the total outstanding loan facilities.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants such as gearing ratio not exceeding 9:1 and other reporting requirements. As of 31 December 2022 and 2021, the Company has complied with the loan covenants referred above.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

On 9 October 2018, the Company obtained revolving working capital facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") with a maximum credt limit amounted to Rp250,000,000,000 with interest rate for 8.75% - 9.25%. The drawdown period of credit facility is up to 8 October 2019. The facility has been extended on 8 October 2020 with maximum installment period of 48 months since the withdrawal date.

On 7 October 2020, the facility has been extended up to 8 October 2021.

On 25 October 2021, the facility has been extended up to 8 January 2022.

On 25 March 2022, the facility has been extended up to 8 October 2022.

On 18 April 2022, the Company obtained non revolving working capital facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") with a maximum credt limit amounted to Rp1,250,000,000,000 with interest rate for 6.50% - 6.80%. The drawdown period of credit facility is up to 18 April 2023.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of the working capital facility from BNI amounted to Rp1,239,722,222,185 and Rp194,444,444,418.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti:
a). Minimal *current ratio* adalah 1x.
b). Maksimal *debt to equity ratio* adalah 9x.
c). Maksimal 5% *NPL* 90 up *gross*.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan piutang pembiayaan konsumen dengan nilai jaminan minimal 100% dari total fasilitas pinjaman yang terutang.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Pada tanggal 1 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja *non revolving* dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("JTrust") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% - 7,75% dengan tenor pinjaman maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2026.

Pada tanggal 22 Februari 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja *non revolving* dari JTrust dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp200.000.000.000 (“Fasilitas II”) dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% dengan tenor pinjaman maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas pinjaman modal kerja dari JTrust sebesar Rp258.934.497.583 dan Rp30.000.000.000.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti:
a. Maksimal *debt to equity ratio* adalah 10x.
b. Maksimal 5% *NPL* 90 up *gross*.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan piutang pembiayaan konsumen dengan nilai jaminan minimal 100% dari total fasilitas pinjaman yang terutang.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants, such as:

a). Minimum current ratio of 1 times.
b). Maximum debt to equity ratio 9 times.
c). Maximum 5% NPL 90 up gross.

As of 31 December 2022 and 2021, the Company has complied with the loan covenants referred above.

This loan facility is collateralised by consumer financing receivables with minimum collateral 100% of total outstanding loan facility.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

On 1 December 2021, the Company obtained non revolving working capital facility from PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("JTrust") with a maximum credt limit amounted to Rp100,000,000,000 with interest rate for 7.00% - 7.75% with maximum installment period of 48 months since the withdrawal date. This facility will be due on 14 February 2026.

On 22 February 2022, the Company obtained non revolving working capital facility from JTrust with a maximum credt limit amounted to Rp200,000,000,000 (“Facility II”) with interest rate for 7.00% with maximum installment period of 48 months since the withdrawal date. This facility will be due on 8 September 2026.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of the working capital facility from JTrust amounted to Rp258,934,497,583 and Rp30,000,000,000.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants, such as:

a. Maximum debt to equity ratio 10 times.
b. Maximum 5% NPL 90 up gross.

As of 31 December 2022, the Company has complied with the loan covenants referred above.

This loan facility is collateralised by consumer financing receivables with minimum collateral 100% of total outstanding loan facility.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Mega Tbk

Pada tanggal 25 Februari 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja non revolving dari PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") untuk pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat (baru maupun bekas) dengan batas maksimum kredit sebesar Rp.1.000.000.000.000, yang dikenakan tingkat suku bunga 8,75%. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Mega sebesar Rp379.166.666.659 dan Rp541.666.666.667.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti:

a. Maksimal *debt to equity ratio* adalah 10x.
b. Maksimal 2% *NPL* 90 up *gross*.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas.

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan piutang pembiayaan konsumen dengan nilai jaminan minimal 100% dari total fasilitas pinjaman yang terutang.

PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 22 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja non *revolving* dari PT Bank UOB Indonesia ("UOB") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp100.000.000.000 yang dikenakan tingkat suku bunga sesuai rekomendasi *treasury* bank. Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 22 Desember 2022 dengan tenor pinjaman maksimal 3 tahun sejak tanggal penarikan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas pinjaman modal kerja dari UOB sebesar Rp70.833.333.331 dan Rpnihil.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan maksimal *debt to equity ratio* adalah 9 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Mega Tbk

On 25 February 2021, the Company obtained non revolving working capital facility from PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") for financing of two-wheel and four-wheel vehicle (new and used vehicle) with a maximum credit limit amounted to Rp1,000,000,000,000 with interest rate for 8.75%. This facility will be due on 20 August 2025.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of the working capital facility from Bank Mega amounted to Rp379,166,666,659 and Rp541,666,666,667.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants, such as:

a. Maximum debt to equity ratio 10 times.
b. Maximum 2% NPL 90 up gross.

As of 31 December 2022 and 2021, the Company has complied with the loan covenants referred above.

This loan facility is collateralised by consumer financing receivables with minimum collateral 100% of total outstanding loan facility.

PT Bank UOB Indonesia

On 22 December 2021, The Company obtained non revolving working capital facility from PT Bank UOB Indonesia ("UOB") with a maximum credt limit amounted to Rp100,000,000,000 which subject to interest rate based on recommedation from treasury of the bank. The drawdown period of credit facility is up to 22 December 2022 with maximum installment period of 3 years since the withdrawal date. This facility will be due on 14 February 2025.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of the working capital facility from UOB amounted to Rp70,833,333,331 and Rpnil.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with maximum debt to equity ratio 9 times.

As of 31 December 2022 and 2021, the Company has complied with the loan covenants referred above.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Victoria Internasional Tbk

Pada tanggal 23 Juni 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas *Demand Loan revolving* dari PT Bank Victoria Internasional, Tbk ("Victoria") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp150.000.000.000 yang dikenakan tingkat suku bunga mengikuti suku bunga pasar yang berlaku. Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 22 Juni 2022.

Pada tanggal 22 Juni 2022, Perusahaan memperoleh perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 24 Juni 2023

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas *Demand Loan* dari Victoria sebesar Rpnihil dan Rp150.000.000.000.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti:
a). Maksimal *debt to equity ratio* adalah 10x.
b). Maksimal 5% *NPL* 90 up *gross*.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas.

Fasilitas pinjaman ini tidak memiliki jaminan atau *clean collateral*.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Pada tanggal 22 Februari 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja *non revolving* dari PT Bank CCB Indonesia ("CCBI") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp250.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 6,50%. Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 22 Agustus 2022 dengan tenor pinjaman maksimal 4 tahun sejak tanggal penarikan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas pinjaman modal kerja dari CCBI sebesar Rp211.741.582.859 dan Rpnihil.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti:
a). Maksimal *debt to equity ratio* adalah 9x.
b). Maksimal 5% *NPL* 90 up *gross*.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Victoria Internasional Tbk

On 23 June 2021, the Company obtained revolving Demand Loan facility from PT Bank Victoria Internasional, Tbk ("Victoria") with a maximum credit limit amounted to Rp150,000,000,000 with interest rate are charges follow applicable market interest rate. The drawdown period of credit facility is up to 22 June 2022.

On 22 June 2022, the Company obtained an extension of the loan term until 24 June 2023.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of the Demand Loan facility from Victoria amounted to Rpnil and Rp150,000,000,000.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants, such as:

a). Maximum debt to equity ratio 10 times.
b). Maximum 5% NPL 90 up gross.

As of 31 December 2022 and 2021, the Company has complied with the loan covenants referred above.

This loan facility has no collateral or clean collateral.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

On 22 February 2022, The Company obtained non revolving working capital facility from PT Bank CCB Indonesia ("CCBI") with a maximum credt limit amounted to Rp250,000,000,000 with interest rate for 6.50%. The drawdown period of credit facility is up to 22 August 2022 with maximum installment period of 4 years since the withdrawal date. This facility will be due on 20 May 2026.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of the working capital facility from CCBI amounted to Rp211,741,582,859 and Rpnil.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants, such as:

a). Maximum debt to equity ratio 9 times.
b). Maximum 5% NPL 90 up gross.

As of 31 December 2022, the Company has complied with the loan covenants referred above.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Pada tanggal 22 Februari 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja *non revolving* dari PT Bank Oke Indonesia ("OK Bank") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp200.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 7%. Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 23 September 2022 dengan tenor pinjaman maksimal 4 tahun sejak tanggal penarikan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas pinjaman modal kerja dari OK Bank sebesar Rp 177.916.666.660 dan Rpnihil.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti:
a. Maksimal *debt to equity ratio* adalah 10x.
b. Maksimal 3% *NPL* 90 up *gross*.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Pada tanggal 27 Oktober 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja *non revolving* dari PT Bank Panin Dubai Syariah ("PDSB") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp450.000.000.000, yang dikenakan tingkat suku bunga sesuai rekomendasi treasury bank. Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 27 Oktober 2023 dengan tenor pinjaman maksimal 4 tahun sejak tanggal penarikan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2027.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas pinjaman modal kerja dari PDSB sebesar Rp 98.183.425.935 dan Rpnihil.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti:
a. Maksimal *debt to equity ratio* adalah 10x.
b. Maksimal 3% *NPL* 90 up *gross*.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan di atas.

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank Oke Indonesia Tbk

On 22 February 2022, the Company obtained non revolving working capital facility from PT Bank Oke Indonesia ("OK Bank") with a maximum credt limit amounted to Rp200,000,000,000 with interest rate for 7%. The drawdown period of credit facility is up to 23 September 2022 with maximum installment period of 4 years since the withdrawal date. This facility will be due on 7 October 2026.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of the working capital facility from OK Bank amounted to Rp 177,916,666,660 and Rpnil.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants, such as:

a. Maximum debt to equity ratio 10 times.
b. Maximum 3% NPL 90 up gross.

As of 31 December 2022, the Company has complied with the loan covenants referred above.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

On 27 October 2022, The Company obtained non revolving working capital facility from PT Bank Panin Dubai Syariah ("PDSB") with a maximum credt limit amounted to Rp450,000,000,000, which subject to interest rate based on recommedation from treasury of the bank. The drawdown period of credit facility is up to 27 October 2023 with maximum installment period of 4 years since the withdrawal date. This facility will be due on 27 October 2027.

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of the working capital facility from PDSB amounted to Rp 98,183,425,935 and Rpnil.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants, such as:

a. Maximum debt to equity ratio 10 times.
b. Maximum 3% NPL 90 up gross.

As of 31 December 2022, the Company has complied with the loan covenants referred above.

17. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank BTPN Tbk

Pada tanggal 19 April 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas *revolving Money Market Loan* dari PT Bank BTPN Tbk ("BTPN") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp200.000.000.000 atau nilainya setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), yang dikenakan tingkat suku bunga sesuai rekomendasi *treasury* bank. Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 31 Oktober 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman untuk fasilitas *Money Market Loan* dari BTPN sebesar Rpnihil dan Rpnihil.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan jika mendistribusikan dividen seperti:

a. Maksimal rasio *gearing* 9x.
b. Maksimal 5% atas *Non-Performing Financing* (bruto)

17. BANK LOANS (continued)

PT Bank BTPN Tbk

On 19 April 2022, the Company obtained revolving Money Market Loan facility from PT Bank BTPN Tbk ("BTPN") with a maximum credt limit amounted to Rp200,000,000,000 or its equivalent to United States Dollar (USD), which subject to interest rate based on recommedation from treasury of the bank. The drawdown period of credit facility is up to 31 October 2022

As of 31 December 2022 and 2021, the outstanding balance of the Money Market Loan facility from BTPN amounted to Rpnil and Rpnil.

Under the loan agreements, the Company is obliged to comply with financial covenants, such as:

a. Maximum gearing ratio 9 times.
b. Maximum 5% of Non-Performing Financing (gross)

18. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN / *18. FINANCE LEASE LIABILITIES*

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Liabilitas sewa pembiayaan bruto-pembayaran sewa:			*Gross finance lease liabilities minimum lease payments:*
Tidak lebih dari 1 tahun	13.040.737.320	17.605.430.446	*Less than 1 year*
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	14.664.035.084	27.704.772.404	*More than 1 year and less than 5 years*
	27.704.772.404	45.310.202.850	
Beban keuangan di masa depan atas sewa pembiayaan	1.601.032.676	3.076.522.669	*Future finance changes on finance leases*
Nilai kini liabilitas sewa	**26.103.739.728**	**42.233.680.181**	***Present value of lease liabilities***
Nilai kini liabilitas sewa adalah:			*The present value of lease liabilities as follows:*
Tidak lebih dari 1 tahun	12.099.540.153	16.129.940.452	*Less than 1 year*
Lebih dari satu tahun dan kurang dari 5 tahun	14.004.199.575	26.103.739.729	*More than 1 year and less than 5 years*
	26.103.739.728	**42.233.680.181**	

Tidak ada pembatasan signifikan yang ditetapkan oleh lessor dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan Perusahaan terkait dengan penggunaan aset atau pencapaian kinerja keuangan tertentu.

There is no significant restriction imposed by lease arrangements between lessor and the Company on use of the assets or maintenance of certain financial performance.

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

19. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the profit or loss are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Beban jasa kini	37.030.740.952	21.871.668.560	*Current service cost*
Beban bunga	6.808.024.959	5.843.520.953	*Interest cost*
Biaya jasa lalu - *vested*	13.883.831.925	-	*Past Service cost - vested*
Total	**57.722.597.836**	**27.715.189.513**	***Total***

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements in employee benefits obligation in the statements of financial position are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	**31 Desember/ 31 *December* 2021**	
Saldo awal	106.068.898.467	83.478.870.763	*Beginning balance*
Penyisihan pada laporan laba rugi	57.722.597.836	27.715.189.513	*Charged to profit or loss*
(Keuntungan) pengukuran kembali imbalan kerja pada penghasilan komprehensif lain	(4.018.609.539)	(3.122.421.948)	(Gain) loss on remeasurement of employee *benefit in other comprehensive income*
Pembayaran manfaat	(2.931.784.713)	(2.002.739.861)	*Benefit paid*
Saldo akhir	**156.841.102.051**	**106.068.898.467**	***Ending balance***

Mutasi nilai kini dari liabilitas imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements of present value of employee benefit obligations in the statement of financial position are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	**31 Desember/ 31 *December* 2021**	
Saldo awal	106.068.898.467	83.478.870.763	*Beginning balance*
Beban jasa kini	37.030.740.952	21.871.668.560	*Current service costs*
Pembayaran manfaat	(2.931.784.713)	(2.002.739.861)	*Benefit paid*
Beban bunga	6.808.024.959	5.843.520.953	*Interest costs*
Biaya Jasa lalu	13.883.831.925	-	*Past Service cost*
Kerugian/(keuntungan) actuarial:			*Actuarial loss/(gain):*
kewajiban aktuaria:			*on obligation:*
Perubahan demografi	-	2.093.308	*change in demographic*
Perbedaan historis	(1.886.923.730)	(3.124.515.256)	*Experience adjustment*
Asumsi keuangan	(2.131.685.809)	-	*Financial assumption*
Saldo akhir	**156.841.102.051**	**106.068.898.467**	***Ending balance***

Mutasi kerugian aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, bruto pajak tangguhan sebagai berikut:

The movements in the balance of actuarial loss charged to other comprehensive income, gross deferred tax, are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Saldo awal	1.660.944.123	4.783.366.071	*Beginning balance*
Keuntungan aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	(4.018.609.539)	(3.122.421.948)	*Actuarial gains charged to other comprehensive income*
Saldo akhir	**(2.357.665.416)**	**1.660.944.123**	***Ending balance***

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja karyawan dihitung oleh aktuaris independen PT Kompujasa Aktuaria Indonesia dengan menggunakan metode *projected unit credit* dalam laporan aktuarianya masing-masing tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 untuk posisi pelaporan 31 Desember 2022 dan 2021. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan aktuaris independen adalah sebagai berikut:

19. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS (continued)

The liability for employee benefits is calculated by independent actuary PT Kompujasa Aktuaria Indonesia which used the projected unit credit method in its report dated 31 December 2022 and 31 December 2021 for reporting as of 31 December 2022 and 2021, respectively. The principal actuarial assumptions used by the independent actuary were as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2022	**31 Desember/ *31 December* 2021**	
Tingkat diskonto	7,27%	7,00%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	7,00%	7,00%	*Salary increment rate*
Tingkat kematian	TMI - 2019	TMI - 2019	*Rate of mortality*
Tingkat cacat	10,00% TMI - 2019	10,00% TMI - 2019	*Rate of disability*
Umur pensiun	55 tahun/years	55 tahun/*years*	*Retirement age*
Tingkat pengunduran diri	15 - 29 tahun/*years* 6,00% 30 - 34 tahun/years 3,00% 35 - 39 tahun/*years* 1,80% 40 - 50 tahun/*years* 1,20% 51 - 52 tahun/years 0,60% >52 tahun/ *years* 0,00%		*Rate of resignations*

Rata-rata durasi liabilitas imbalan pasti adalah 10,92 tahun (2021: 12,72 tahun).

The weighted average duration of the defined benefit obligation is 10.92 years (2021:12.72 years).

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits are as follows:

	31 Desember/ 31 *December* 2022	**31 Desember/ 31 *December* 2021**	
Kurang dari satu tahun	51.544.859.478	16.389.407.645	*Less than a year*
Antara satu dan dua tahun	33.524.499.249	972.909.878	*Between one and two years*
Antara dua dan lima tahun	37.161.478.030	26.290.277.093	*Between two and five years*
Antara lima dan sepuluh tahun	105.866.714.802	79.838.669.175	*Between five and ten years*
Di atas 10 tahun	1.474.788.659.734	1.241.562.183.058	*Over ten years*

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1%, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kewajiban imbalan kerja karyawan dan biaya jasa kini dan biaya bunga: (tidak diaudit)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in discount rates and salary increment rate of 1%, with all other variables held constant, of the present value of employee benefits obligations and current service cost and interest cost: (unaudited)

	31 Desember/*31 December* 2022				
	Tingkat diskonto/ *Discount rate*		**Tingkat kenaikan gaji/ *Salary increment rate***		
	Kenaikan/ *Increase*	**Penurunan/ *Decrease***	**Kenaikan/ *Increase***	**Penurunan/ *Decrease***	
Liabilitas imbalan kerja	(9.706.937.454)	11.094.567.491	11.008.753.251	(9.810.224.365)	*Employee benefits obligations*
Biaya jasa kini dan biaya bunga	(2.222.494.859)	2.563.454.838	2.542.455.345	(2.244.970.589)	*Current service cost and interest cost*

	31 Desember/*31 December* 2021				
	Tingkat diskonto/ *Discount rate*		**Tingkat kenaikan gaji/ *Salary increment rate***		
	Kenaikan/ *Increase*	**Penurunan/ *Decrease***	**Kenaikan/ *Increase***	**Penurunan/ *Decrease***	
Liabilitas imbalan kerja	(9.623.752.054)	11.292.520.194	11.179.279.280	(9.707.561.542)	*Employee benefits obligations*
Biaya jasa kini dan biaya bunga	(2.119.318.230)	2.495.206.088	2.470.143.841	(3.137.742.202)	*Current service cost and interest cost*

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Analisis sensitivitas diatas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 Employee Benefits. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS *Intepretation Committee* ("IFRIC") *Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19). Perusahaan telah menerapkan materi penjelasan tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari yang kebijakan yang diterapkan sebelumnya pada laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

19. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS (continued)

The above sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit pension obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit pension obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied when calculating the pension liability recognised within the statements of financial position.

In April 2022, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 24: Imbalan Kerja which was adopted from IAS 19 Employee Benefits. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Intepretation Committee (IFRIC) Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19). The Company has adopted the said explanatory material and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied in the financial statements of the Company as of December 31, 2021 and for the year then ended.

20. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

20. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholders as of 31 December 2022 and 2021 is as follows:

	31 Desember 2022 dan 2021/ *31 December 2022 and 2021*			
Pemegang saham	**Jumlah saham/ *Number of shares***	**Nilai/ *Value***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)***	***Shareholders***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.550.000.000	255.000.000.000	51,00	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Asco Investindo	1.850.000.000	185.000.000.000	37,00	*PT Asco Investindo*
PT Tunas Ridean Tbk	600.000.000	60.000.000.000	12,00	*PT Tunas Ridean Tbk*
	5.000.000.000	**500.000.000.000**	**100,00**	

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Tahunan Pemegang saham pada tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., di Jakarta, No.28, para pemegang saham menyepakati pembentukan cadangan umum sebesar 10% dari laba tahun berjalan 2021 sejumlah Rp10.236.101.244, sehingga laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp15.852.517.756.

20. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Annual General Meeting Shareholders on 16 June 2022 which was notarized by Notarial Deed of Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notary in Jakarta, No. 28, the Company's shareholder agreed to provide general reserve for 10% of the annual net income of 2021 amounting to Rp10,236,101,244; therefore, the appropriated retained earnings as of 31 December 2022 amounted to Rp15,852,517,756.

21. PENDAPATAN / *21. REVENUES*

a. Pembiayaan konsumen / *a. Consumer financing income*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Pendapatan pembiayaan konsumen	1.799.840.846.231	1.289.740.651.340	*Consumer financing income*
Pihak berelasi			**Related parties**
Pendapatan pembiayaan konsumen	-	878.128	*Consumer financing income*
Subtotal	**1.799.840.846.231**	**1.289.741.529.468**	***Subtotal***

b. Marjin Murabahah / *b. Murabahah margin*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Marjin murabahah	144.829.387.680	58.493.638.617	*Murabahah margin*
Subtotal	**144.829.387.680**	**58.493.638.617**	***Subtotal***

c. Sewa Pembiayaan / *c. Finance leases*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Pendapatan sewa pembiayaan	10.626.424.880	2.191.754.910	*Finance lease income*
Subtotal	**10.626.424.880**	**2.191.754.910**	***Subtotal***

21. PENDAPATAN (lanjutan) / *21. REVENUES (continued)*

d. Bunga dan marjin / *d. Interest and margin*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Giro	382.080.788	212.680.886	*Current account*
Pihak berelasi			***Related parties***
Giro	5.727.561.821	3.078.817.755	*Current account*
Subtotal	**6.109.642.609**	**3.291.498.641**	***Subtotal***

e. Lain-lain / *e. Others*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Pendapatan atas *handling fee*	103.865.635.702	71.707.813.587	*Handling fee*
Penalti pelunasan pembiayaan	59.135.889.402	37.592.595.833	*Termination financing charges*
Denda keterlambatan	46.715.533.850	45.250.995.360	*Late payment charges*
Pendapatan atas aset tarikan dan penghapusbukuan	38.502.026.077	35.679.760.749	*Recovery of repossessed and written off*
Lain-lain	3.840.943.779	3.301.704.935	*Others*
Subtotal	**252.060.028.810**	**193.532.870.464**	***Subtotal***
Total	**2.213.466.330.210**	**1.547.251.292.100**	***Total***

Lihat Catatan 26 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of balances and transactions with related parties.

22. BEBAN KEUANGAN / *22. FINANCE CHARGES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Bunga pinjaman bank	264.888.175.343	244.877.546.759	*Interest on bank loans*
Administrasi dan provisi bank	5.658.853.433	5.175.514.365	*Administration and bank provisions*
Utang sewa	1.077.453.704	1.200.615.290	*Lease liabilities*
	271.624.482.480	251.253.676.414	
Pihak berelasi			***Related parties***
Bunga pinjaman bank	134.672.586.349	131.753.427.455	*Interest on bank loans*
Administrasi dan provisi bank	2.405.654.880	2.670.161.397	*Administration and bank provisions*
Utang sewa	398.036.288	207.747.664	*Lease liabilities*
	137.476.277.517	134.631.336.516	
Total	**409.100.759.997**	**385.885.012.930**	***Total***

Lihat Catatan 26 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of balances and transactions with related parties.

23. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

23. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Gaji dan tunjangan	499.306.675.354	267.631.592.738	*Salaries and allowances*
Imbalan pasca kerja karyawan	57.722.597.836	27.715.189.513	*Post employment benefits*
Pihak berelasi			***Related parties***
Gaji dan tunjangan	23.786.508.173	26.505.503.435	*Salaries and allowances*
Total	**580.815.781.363**	**321.852.285.686**	***Total***

Lihat Catatan 26 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of balances and transactions with related parties.

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Jasa pihak ketiga	51.661.359.362	45.753.489.032	*Third parties services*
Alat tulis dan cetakan	29.024.571.625	18.216.918.783	*Stationeries and printings*
Perbaikan dan pemeliharaan	28.721.444.125	26.672.160.258	*Repairs and maintenance*
Penyusutan aset hak-guna	28.520.597.259	28.178.910.216	*Depreciation of right-of-use assets*
Rekrutmen dan pelatihan	20.220.537.538	7.727.478.114	*Recruitment and training*
Penyusutan aset tetap (catatan 11)	20.184.081.306	24.332.659.262	*Depreciation of fixed assets (note 11)*
Perjalanan dinas	12.801.619.280	5.445.444.253	*Travelling*
Administrasi	11.547.884.987	10.160.295.051	*Administration*
Listrik dan air	10.218.160.981	8.777.402.922	*Electricity and water*
Komunikasi	8.952.735.511	11.252.812.523	*Communications*
Sewa	5.783.154.024	5.438.927.676	*Rent*
Jamuan bisnis	4.642.324.629	1.887.545.081	*Corporate entertainment*
Keperluan dapur	2.232.681.961	1.727.369.640	*Household*
Lain-lain	27.050.213.907	14.816.992.080	*Others*
Subtotal	**261.561.366.495**	**210.388.404.891**	***Subtotal***
Pihak berelasi			***Related party***
Penyusutan aset hak-guna	7.933.293.313	11.407.525.146	*Depreciation of right-of-use assets*
Total	**269.494.659.808**	**221.795.930.037**	***Total***

Lain-lain merupakan beban legal, perijinan, keanggotaan, administrasi, dan gedung.

Others represent legal, permits, membership, administrations and building expenses.

Lihat Catatan 26 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of balances and transactions with related parties.

25. BEBAN PEMASARAN DAN LAIN-LAIN

25. MARKETING AND OTHER EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Lain-lain	36.149.891.851	78.269.918.874	*Others*
Pemasaran	148.838.513.295	96.874.897.979	*Marketing*

Lain-lain merupakan *refund* biaya asuransi, beban pengurusan aset tarikan dan biaya pengurusan penghapusbukuan.

Pemasaran merupakan beban promosi, pameran, dan hiburan.

Others represent insurance expense refund, repossessed asset administration expenses, and write-off administration expenses.

Marketing represent promotion, exhibition, and entertainment expenses.

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

The nature of relationships with related parties

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of relationships with related parties are as follows:

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan dengan pihak berelasi/** ***Nature of relationship with the related parties***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemegang saham mayoritas/*Controlling shareholder*
PT Asco Investindo	Pemegang saham minoritas/*Minority shareholder*
PT Tunas Ridean Tbk	Pemegang saham minoritas/Minority *shareholder*
PT Mandiri AXA General Insurance	Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/*Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/*Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan BUMN/*State-owned Company*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan BUMN/*State-owned Company*
PT Bumi Daya Plaza	Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/*Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*

Personil manajemen kunci Perusahaan/ key management personnel of the Company

Dalam kegiatan normal usaha, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan, termasuk didalamnya adalah transaksi pembiayaan bersama, transaksi pengalihan sebagian porsi piutang pembiayaan konsumen (“transaksi CAP”), transaksi penempatan deposito, utang dan piutang asuransi dan pinjaman bank.

Personil manajemen kunci Perusahaan/ key management personnel of the Company

In normal course of business, the Company enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder, including joint financing, transferred of consumer financing receivables portions (“CAP transactions”), deposits placement, insurance payables and receivables and bank loans.

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan)

The nature of relationships with related parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Balances and transactions with related parties are as follows (continued):

a. Aset

a. Assets

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Kas dan kas di bank (Catatan 4)			***Cash on hands and cash in banks*** *(Note 4)*
Kas pada bank			*Cash in Banks*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	167.250.371.249	127.279.407.421	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	88.708.877.637	17.847.258.768	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.283.042.553	456.536.920	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	66.000.628	65.868.769	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	257.308.292.067	145.649.071.878	

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Piutang lain-lain (Catatan 8)			***Other receivables*** *(Note 8)*
PT Mandiri AXA General Insurance	2.484.712.500	4.620.000.000	*PT Mandiri AXA General Insurance*
Beban dibayar di muka (Catatan 9)			***Prepaid expenses*** *(Note 9)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.303.467.384	20.682.101.749	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Aset hak-guna (Catatan 12)			***Right-of-use assets*** *(Note 12)*
PT Bumi Daya Plaza	15.866.586.625	23.799.879.938	*PT Bumi Daya Plaza*
Total aset kepada pihak berelasi	**310.963.058.576**	**194.751.053.565**	***Total assets associated with related parties***
Persentase terhadap total aset	4,11%	3,19%	*Percentage to total assets*

b. Liabilitas

b. Liabilities

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Utang usaha (Catatan 14)			***Trade payables*** *(Note 14)*
PT Mandiri AXA General Insurance	2.303.594.947	2.815.649.703	*PT Mandiri AXA General Insurance*
Beban yang masih harus dibayar (Catatan 16)			***Accrued expenses*** *(Note 16)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.199.729.483	4.040.426.657	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.807.226.143	651.538.388	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	6.006.955.626	4.691.965.045	
Pinjaman bank (Catatan 17)			***Bank loans*** *(Note 17)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.148.294.957.462	1.434.576.691.369	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.239.722.222.185	194.444.444.418	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Bagian yang belum diamortisasi	(2.442.789.930)	(3.020.944.809)	*Unamortised portion*
	2.385.574.389.717	1.626.000.190.978	

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan)

The nature of relationships with related parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Balances and transactions with related parties are as follows: (continued)

b. Liabilitas (lanjutan)

b. Liabilities (continued)

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Liabilitas sewa pembiayaan (Catatan 18)			***Finance lease liabilities*** *(Note 18)*
PT Bumi Daya Plaza	16.588.812.227	23.799.879.938	*PT Bumi Daya Plaza*
Total liabilitas kepada pihak berelasi	2.410.473.752.517	1.657.307.685.664	*Total liabilities associated with related parties*
Persentase terhadap total liabilitas	36,47%	30,26%	*Percentage to total liabilities*

c. Pendapatan

c. Revenues

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Pendapatan pembiayaan konsumen (Catatan 21a)	-	878.128	*Consumer financing income (Note 21a)*
Bunga dan marjin (Catatan 21d)			*Interest and margin (Note 21d)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.671.941.093	3.041.737.316	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)	55.620.728	37.080.439	*Others (below Rp500 million)*
	5.727.561.821	3.078.817.755	
Total pendapatan dari pihak berelasi	**5.727.561.821**	**3.079.695.883**	***Total revenue associated with related parties***
Persentase terhadap total pendapatan	0,25%	0,19%	*Percentage to total revenue*

Pendapatan bunga berkaitan dengan penempatan dana dengan tingkat bunga berkisar antara 1,00% - 2,50% per tahun (2021: 1,00% - 2,50%).

Interest income relates to funds placement with interest rate ranging from 1.00% - 2.50% per annum (2021: 1.00% - 2.50%).

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

d. Beban

26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Balances and transactions with related parties are as follows: (continued)

d. Expenses

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2022	**2021**	
Beban keuangan (Catatan 22)			***Financial charges*** *(Note 22)*
Bunga pinjaman bank			*Interest on bank loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	103.303.624.122	106.957.552.649	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	31.368.962.227	17.570.597.030	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	7.225.277.776	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Administrasi dan provisi bank			*Administration and bank provisions*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.102.319.171	1.830.004.665	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	550.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	303.335.709	290.156.732	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Sewa			*Lease*
PT Bumi Daya Plaza	398.036.288	207.747.664	*PT Bumi Daya Plaza*
	137.476.277.517	134.631.336.516	
Beban gaji dan tunjangan (Catatan 23)			***Salaries and benefits*** *(Note 23)*
Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi			*Boards of Commisioners and Boards of Directors compensation*
Gaji dan tunjangan	23.786.508.173	26.505.503.435	*Salaries and allowances*
Beban umum dan administrasi (Catatan 24)			***General and administrative expenses*** *(Note 24)*
Penyusutan aset hak guna			*Depreciation of right of use asset*
PT Bumi Daya Plaza	7.933.293.313	11.407.525.146	*PT Bumi Daya Plaza*
Total beban kepada pihak berelasi	**169.196.079.003**	**172.544.365.097**	***Total expenses associated with related parties***
Persentase terhadap total beban	9,49%	12,19%	*Percentage to total expenses*

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Pendahuluan dan gambaran umum

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko pasar
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Introduction and overview

The Company has exposure to the following risks:

- *Market risk*
- *Credit risk*
- *Liquidity risk*
- *Operational risk*

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko

Konsep manajemen risiko Perusahaan adalah mengacu dari konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) yang digunakan oleh induk entitas Perusahaan yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Perusahaan. ERM adalah sebuah proses pengelolaan risiko yang melekat dalam proses bisnis Perusahaan, artinya pengelolaan risiko menjadi bagian yang menyatu dalam pengambilan keputusan bisnis Perusahaan sehari-hari. Dengan ERM, Perusahaan akan memiliki kerangka kerja pengelolaan risiko yang sistematis dan menyeluruh (risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional) dengan menghubungkan pengelolaan modal dan proses bisnis dengan risiko yang dihadapi secara utuh.

Perusahaan melaksanakan "Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Entitas Anak", dalam kapasitasnya sebagai entitas anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pemegang saham pengendali Perusahaan.

Kerangka pengelolaan risiko ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kerangka ini tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri (KMRBM) agar sejalan dengan rencana penerapan Basel II Accord secara bertahap di Indonesia. Dalam kerangka pengelolaan risiko tersebut diatur berbagai kebijakan agar manajemen risiko berfungsi sebagai *business enabler* sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor prinsip kehati-hatian dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan - pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

Lebih lanjut, kemitraan antara Perusahaan dengan entitas induk merupakan hal yang sangat penting, mengingat keduanya menghadapi tantangan regional dan global yang sama dalam mengelola pertumbuhan bisnis yang cepat dan dalam suasana kompetisi yang ketat, namun pada saat yang bersamaan Perusahaan harus tetap mampu menyelenggarakan praktik bisnis tersebut berdasarkan dan mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management framework

The concept of risk management of the Company refers to Enterprise Risk Management (ERM) implemented by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as a parent company which were adopted to the needs of business and operation of the Company. ERM is an inherent business risk management process in the Company's business process, which means, risk management becomes part of daily business decision making. By using ERM, the Company will have systematic and comprehensive framework for risk management (credit risk, market risk and operational risk) by connecting capital management and business risk encountered as whole.

The Company implemented "Implementation of Consolidated Risk Management for Bank's Controlling Subsidiary Companies", in its capacity as the subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the controlling shareholder of the Company.

This risk management framework refers to Bank Indonesia regulation (PBI) No 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 concerning the Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by PBI No.11/25/PBI/2009 dated on 1 July 2009 concerning the Amendment on Bank Indonesia Regulation No.5/8/PBI/2003 concerning the Application of Risk Management for Commercial Bank. This framework is included in the Risk Management Policy of Bank Mandiri (KMRBM) in line with the plan to apply Basel II Accord gradually in Indonesia. Within this risk management framework, the Company sets up a range of policies in order for risk management to function as a business enabler so that business can still grow within the corridor of prudential principle by applying the ideal risk management process (risk identification - measurement - monitoring - management risk) at all level of organisation.

Further, the partnership between the Company and the parent company is a very important considering both have to face the same regional and global challenge in managing fast business growth and strict competition, but at the same time the Company must implement business practices based on prudential principle.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, manajemen Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perusahaan. Divisi Manajemen Risiko yang berperan secara aktif dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan pencegahan, proaktif dan responsif dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan yang ada di dalam Perusahaan untuk mendukung penerapan manajemen risiko ini, karena semua bagian di dalam Perusahaan masing-masing akan memainkan peranan penting.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Perusahaan memiliki suatu mekanisme yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Direksi; dan
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala.

Pilar 2: Kebijakan dan Penerapan Batasan

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar dan Memo Internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management framework (continued)

As a company that engages in financing activities, the Company's management is fully committed to implement risk management comprehensively, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and risk management methodology; hence, the Company's business activities could remain be directed and controlled at an acceptable risk limit and at the same time the Company can still be profitable. Risk Management Division is playing an active role in coordinating preventive, proactive and responsive actions with all employees from various levels within the Company in order to support the implementation of risk management, because all divisions of the Company will play their respective important roles.

In the implementation of risk management, the Company realises the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 3 (three) risk management pillars, which could be described as follows:

Pillar 1: Active Supervision by Boards of Commissioners and Directorsss

Active supervision is reflected since annual business planning, which includes:

- *Approving and evaluating risk management policies on a regular basis;*
- *Evaluating and approving activities that require approval from the Board of Commissioners or Board of Directors; and*
- *Establishing risk management policies and strategies, which include determining the authorisation in limits and reviewing the quality of portfolio on a regular basis.*

Pillar 2: Policy and Implementation of Limits

The Company develops policies related to risk management, which are assessed periodically and aligned constantly to fit the most recent business situation. The policy is translated into Standard Operating Procedures and Internal Memo, which are being socialised to all employees. The Company also has policies regarding limitation on approval/authorisation for both credit and non-credit transactions.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Perusahaan memiliki suatu mekanisme yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut: (lanjutan)

Pilar 3: Identifikasi, Pengukuran, Pengawasan dan Sistem Informasi Manajemen

Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko kredit dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada serta melalui pertemuan berkala *Forum Enterprise Risk Management* (FERMA) dengan Entitas Induk. Selain itu, sistem teknologi informasi utama Perusahaan mampu menyediakan data/informasi secara cepat dan akurat kepada pihak manajemen, entitas induk atau pihak ketiga yang terkait lainnya.

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan entitas induk terlaksana melalui penyampaian paparan risiko Perusahaan yang ada secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko entitas induk, termasuk penyampaian laporan berkala terkait aspek kepatuhan, hukum dan lainnya kepada entitas induk.

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan entitas induk juga dicerminkan dengan dilaksanakannya audit reguler/audit teknologi informasi/audit terintegrasi atas unit-unit di Perusahaan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) entitas induk.

Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan. Dalam perencanaan usaha Perusahaan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perusahaan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga.

Perubahan tingkat bunga acuan akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat bunga dinaikkan, yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perusahaan meningkat. Untuk itu, Perusahaan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management framework (continued)

In the implementation of risk management, the Company realises the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 3 (three) risk management pillars, which could be described as follows: (continued)

Pillar 3: Identification, Measurement, Monitoring and Management Information System

The Company has a set of tools to identify, measure and monitor risks, especially credit risk and operational risk through the existing reporting and management information system mechanism, as well as through the regular meetings of the Company's Enterprise Risk Management Forum (ERMF) with Parent Company. In addition, the Company's major information technology system is capable of providing instant and accurate data/information to the management, parent company or other related third parties.

The consolidated risk management framework with parent company is conducted through the reporting of the Company's risk exposure periodically to parent company's Risk Management Committee, including the periodic reporting in relation to the compliance, legal and other aspects to the parent company.

The consolidated risk management framework with parent company is also reflected in the implementation of regular audit/information technology audit/integrated audit on the business units in the Company by parent company's Internal Audit Unit (IAU).

Market risk

Market risk is the risk which is primarily caused by the changes in interest rates, exchange rate of Rupiah currency, commodity prices and the price of capital or loans, which could expose to the Company. In the Company's business planning, market risk with direct impact to the Company is in terms of interest rates management.

Changes in interest rates would become a risk at the point of change, especially when the interest rate is raised, which would cause losses to the Company, hence resulting in increased Company's credit risk. Therefore, the Company consistently implements fixed interest rate management by doing adjustment on lending interest rate and cost of funds.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perusahaan saat ini, risiko pasar terkait nilai tukar mata uang Perusahaan adalah minimal. Perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan konsumen dalam mata uang asing.

Tabel berikut menggambarkan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

With the pattern of business activity currently operated by the Company, the market risk related to exchange rate of the Company is minimal. The Company does not have consumer financing transactions in foreign currency.

The following tables summarise the Company's financial assets and liabilities at carrying amounts, categorised by the maturity dates to see the impact of changes in interest rates:

	31 Desember/*31 December* 2022								
		Tingkat bunga tetap/*Fixed rate*							
	Bunga mengambang <3 bulan/ *Floating Rate < 3 months*	Kurang dari 1 bulan/*Less than 1 month*	1 bulan sampai 3 bulan/ *1 month to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun/*Over 3 months to 1 year*	Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun/ *Over 1 year to 2 years*	Lebih dari 2 tahun/ *Over 2 years*	Tidak dikenakan bunga/*No interest rate charges*	Total/ *Total*	
Aset keuangan									***Financial assets***
Kas dan kas di bank	336.940.586.694	-	-	-	-	-	-	336.940.586.694	Cash on hands and *cash in banks*
Piutang pembiayaan konsumen	-	204.775.350.901	449.372.684.777	1.721.406.620.918	1.899.468.543.945	2.078.314.979.497	-	6.353.338.180.038	*Consumer financing receivables*
Piutang pembiayaan murabahah	-	-	-	-	-	-	687.505.536.518	687.505.536.518	*Murabahah Financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	-	4.577.904.083	9.236.569.117	27.089.016.082	46.785.597.715	2.845.204.448	-	90.534.291.445	*Finance Lease receivables*
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	105.399.855.090	105.399.855.090	*Other receivables*
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	4.089.167.044	4.089.167.044	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	336.940.586.694	209.353.254.984	458.609.253.894	1.748.495.637.000	1.946.254.141.660	2.081.160.183.945	796.994.558.652	7.577.807.616.829	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan									***Financial liabilities***
Utang usaha	-	-	-	-	-	-	302.818.794.545	302.818.794.545	*Trade payables*
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	-	30.049.771.331	30.049.771.331	*Other payables*
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	17.128.260.517	-	-	-	-	-	17.128.260.517	*Accrued interest expenses*
Pinjaman bank	-	203.969.200.133	403.893.052.349	1.792.585.502.286	1.851.766.750.355	1.556.273.165.995	-	5.808.487.671.118	*Bank loans*
Jumlah liabilitas keuangan	-	221.097.460.650	403.893.052.349	1.792.585.502.286	1.851.766.750.355	1.556.273.165.995	332.868.565.876	6.158.484.497.511	*Total financial liabilities*
Jumlah selisih penilaian bunga	**336.940.586.694**	**(11.744.205.666)**	**54.716.201.545**	**(44.089.865.286)**	**94.487.391.305**	**524.887.017.950**	**464.125.992.776**	**1.419.323.119.318**	***Total interest repricing gap***

	31 Desember/*31 December* 2021								
		Tingkat bunga tetap/*Fixed rate*							
	Bunga mengambang <3 bulan/ *Floating Rate < 3 months*	Kurang dari 1 bulan/*Less than 1 month*	1 bulan sampai 3 bulan/ *1 month to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun/*Over 3 months to 1 year*	Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun/ *Over 1 year to 2 years*	Lebih dari 2 tahun/ *Over 2 years*	Tidak dikenakan bunga/*No interest rate charges*	Total/ *Total*	
Aset keuangan									***Financial assets***
Kas dan kas di bank	188.431.650.830	-	-	-	-	-	-	188.431.650.830	Cash on hands and *cash in banks*
Piutang pembiayaan konsumen	-	175.242.062.707	367.875.294.281	1.477.353.665.707	1.607.703.235.627	1.660.802.582.106	-	5.288.976.840.428	*Consumer financing receivables*
Piutang pembiayaan murabahah	-	-	-	-	-	-	449.798.025.787	449.798.025.787	*Murabahah Financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	-	2.155.684.477	4.387.772.708	19.411.409.054	13.096.738.021	1.532.645.536	-	40.584.249.796	*Finance Lease receivables*
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	59.026.175.249	59.026.175.249	*Other receivables*
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	3.931.391.044	3.931.391.044	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	188.431.650.830	177.397.747.184	372.263.066.989	1.496.765.074.761	1.620.799.973.648	1.662.335.227.642	512.755.592.080	6.030.748.333.134	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan									***Financial liabilities***
Utang usaha	-	-	-	-	-	-	224.584.223.629	224.584.223.629	*Trade payables*
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	-	18.465.168.984	18.465.168.984	*Other payables*
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	15.962.379.236	-	-	-	-	-	15.962.379.236	*Accrued interest expenses*
Pinjaman bank	-	397.853.614.417	536.652.386.323	1.451.478.984.568	1.405.614.809.130	1.067.707.500.296	-	4.859.307.294.734	*Bank loans*
Jumlah liabilitas keuangan	-	413.815.993.653	536.652.386.323	1.451.478.984.568	1.405.614.809.130	1.067.707.500.296	243.049.392.613	5.118.319.066.583	*Total financial liabilities*
Jumlah selisih penilaian bunga	**188.431.650.830**	**(236.418.246.469)**	**(164.389.319.334)**	**45.286.090.193**	**215.185.164.518**	**594.627.727.346**	**269.706.199.467**	**912.429.266.551**	***Total interest repricing gap***

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit

Pengelolaan risiko kredit Perusahaan diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit secara *prudent* agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi *Non Performing Finance* (*NPF*), serta mengelola penggunaan modal untuk memperoleh *return* yang optimal. Dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses survei dan analisa kredit sebelum disetujui oleh Komite Kredit. Perusahaan juga menerapkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan Peraturan Ketua Bapepam-LK No.PER-05/BL/2011 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Pembiayaan.

Untuk setiap kategori aset keuangan, Perusahaan harus mengungkapkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit.

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayan konsumen, piutang pembiayaan murabahah, dan piutang sewa pembiayaan dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan).

Untuk setiap kategori aset keuangan, Perusahaan harus mengungkapkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit. (lanjutan)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk

The Company's credit risk management is directed to improve the balance between healthy credit expansion with a prudent credit management to avoid from the decline in the quality or being Non Performing Finance (NPF), also to manage the used of capital to received optimal return. It starts from the process of receiving credit applications selectively and handling them with prudence principle, whereby the credit application would go through survey and credit analysis process before being approved by the Credit Committee. The Company also implements the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles as regulated in the Ministry of Finance Regulation No.30/PMK.010/2010 regarding the Implementation of Know Your Customer Principles for Non-Banking Financial Institutions and the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) Regulation No.PER-05/BL/2011 regarding the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles for Multifinance Companies.

For each financial asset category, the Company should disclose maximum exposure to credit risk and concentration of credit risk analysis.

i. Maximum exposure to credit risk

The Company's exposure to credit risk mainly comes from the consumer financing receivables, murabahah financing receivables, and finance lease receivables of which the maximum exposure to credit risk equals to the carrying amount (without taking into account any collateral held).

For each financial asset category, the Company should disclose maximum exposure to credit risk and concentration of credit risk analysis. (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

	31 Desember 2022/ *31 December 2022*			
	Motor/ *Motorcycles*	**Mobil/ *Cars***	**Total/ *Total***	
Piutang pembiayaan konsumen	1.641.990.836.506	4.711.347.343.532	6.353.338.180.038	*Consumer financing receivables*
Piutang pembiayaan Murabahah	180.347.977.692	507.157.558.826	687.505.536.518	*Murabahah financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	-	90.534.291.445	90.534.291.445	*Finance lease receivables*
	1.822.338.814.198	5.309.039.193.803	7.131.378.008.001	

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko kredit (lanjutan) / *Credit risk (continued)*

	31 Desember 2021/ *31 December 2021*			
	Motor/ *Motorcycles*	**Mobil/ *Cars***	**Total/ *Total***	
Piutang pembiayaan konsumen	1.514.551.445.888	3.774.425.394.540	5.288.976.840.428	*Consumer financing receivables*
Piutang pembiayaan Murabahah	91.594.789.691	358.203.236.096	449.798.025.787	*Murabahah financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	-	40.584.249.796	40.584.249.796	*Finance lease receivables*
	1.606.146.235.579	4.173.212.880.432	5.779.359.116.011	

Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan / *Based on quality of financial assets*

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 eksposur risiko kredit atas aset keuangan tanpa memperhitungkan agunan (setelah memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai) adalah:

As of 31 December 2022 and 2021 credit risk exposure of financial assets without considering collateral (net of allowance for impairment losses) are as follows:

	31 Desember/*31 December* 2022						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		**Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses***	**Total/ *Total***	
	High grade	***Standard grade***					
Kas di bank	309.090.170.739	-	-	-	-	309.090.170.739	*Cash in banks*
Piutang pembiayaan konsumen	2.932.951.380.844	2.919.294.488.844	437.341.243.642	63.751.066.708	(232.100.505.004)	6.121.237.675.034	*Consumer financing receivables*
Piutang pembiayaan murabahah	343.942.362.292	297.906.052.759	40.105.093.618	5.552.027.849	(27.523.615.139)	659.981.921.379	*Murabahah financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	55.818.982.467	34.715.308.978	-	-	(807.206.030)	89.727.085.415	*Finance lease receivables*
Piutang lain-lain	105.399.855.090	-	-	-	-	105.399.855.090	*Other receivables*
Aset lain-lain	4.089.167.044	-	-	-	-	4.089.167.044	*Other assets*
	3.751.291.918.476	3.251.915.850.581	477.446.337.260	69.303.094.557	(260.431.326.173)	7.289.525.874.701	

	31 Desember/*31 December* 2021						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		**Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses***	**Total/ *Total***	
	High grade	***Standard grade***					
Kas di bank	175.988.238.351	-	-	-	-	175.988.238.351	*Cash in banks*
Piutang pembiayaan konsumen	2.519.169.025.881	2.324.516.950.245	389.022.756.564	56.268.107.738	(149.875.021.400)	5.139.101.819.028	*Consumer financing receivables*
Piutang pembiayaan Murabahah	251.210.282.980	174.555.094.637	19.607.054.427	4.425.593.743	(10.307.818.314)	439.490.207.473	*Murabahah financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	27.222.029.094	12.543.145.122	819.075.580		(174.915.898)	40.409.333.898	*Finance lease receivables*
Piutang lain-lain	59.026.175.249	-	-	-	-	59.026.175.249	*Other receivables*
Aset lain-lain	3.931.391.044	-	-	-	-	3.931.391.044	*Other assets*
	3.036.547.142.599	2.511.615.190.004	409.448.886.571	60.693.701.481	(160.357.755.612)	5.857.947.165.043	

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Penjelasan pembagian kualitas kredit yang diberikan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:

- *High grade*, yaitu tidak terdapat keraguan atas pengembalian aset keuangan.
- *Standard grade*, yaitu terdapat pertimbangan tertentu terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, termasuk yang pernah terjadi keterlambatan namun telah dilunasi pada tanggal pelaporan.

Piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah, dan piutang sewa pembiayaan yang pembayaran angsurannya menunggak lebih dari 90 hari diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai.

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah, dan piutang sewa pembiayaan yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perusahaan.

Asumsi dan pertimbangan utama dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian

Lifetime

Kerugian kredit ekspektasian diestimasikan berdasarkan periode dimana Perusahaan terpapar pada risiko kredit. Untuk produk *non-revolving*, hal ini sama dengan rata-rata periode kontrak.

Variabel Makro Ekonomi ("MEV")

Lingkungan ekonomi yang berkembang adalah penentu utama dari kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban mereka saat jatuh tempo. Ini adalah prinsip dasar PSAK 71 bahwa potensi kerugian kredit di masa depan harus bergantung tidak hanya pada kesehatan ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan perubahan pada lingkungan ekonomi. Misalnya, jika Perusahaan mengantisipasi perlambatan tajam dalam ekonomi dunia, Perusahaan harus membentuk lebih banyak cadangan hari ini untuk menyerap kerugian kredit yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

Based on quality of financial assets (continued)

The explanation of loan under quality neither past due nor impaired were as follows:

- *High grade, which is no - doubt over the repayment of financial asset.*
- *Standard grade, which is there is - certain consideration related to the ability of the customer in making payment at maturity date, include those that have been over dued but have been paid off at reporting date.*

Consumer financing receivables, murabahah financing receivables, and finance lease receivables which installments are overdue for more than 90 days are classified as impaired financial assets.

As collateral to the consumer financing receivables, murabahah financing receivables, and financing lease receivables the Company receives the Certificates of Ownership ("BPKB") of the motor vehicles financed by the Company.

Key assumptions and judgments in determining expected credit loss

Lifetime

Expected credit loss is estimated based on the period over which the Company is exposed to credit risk. For non-revolving product, this equates to the average contractual period.

Macro Economic Variable ("MEV")

The developing economic environment is the key determinant of the ability of customer to meet their obligations as they fall due. It is a fundamental principle of SFAS 71 that the potential future credit losses should depend not just on the health of the economy today, but should also take into account potential changes to the economic environment. For example, if the Company was to anticipate a sharp slowdown in the world economy, Company should make more provisions today to absorb the credit losses likely to occur in the near future.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Untuk menangkap efek perubahan pada lingkungan ekonomi, model PD digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, dengan memasukkan informasi *forward looking* dalam bentuk perkiraan nilai-nilai variabel ekonomi yang kemungkinan akan berdampak pada kemampuan pembayaran kembali konsumen.

Berbagai MEV digunakan untuk setiap model PD, tergantung pada hasil analisis statistik kesesuaian MEV dengan PD serta konsensus dari pakar kredit. Diantaranya adalah indeks harga konsumen, suku bunga BI, harga minyak, pengeluaran konsumsi pribadi.

Sensitivitas MEV terhadap ECL

Perhitungan ECL bergantung pada beberapa variabel dan pada dasarnya tidak linier dan tergantung pada portofolio, yang menyiratkan bahwa tidak ada analisis tunggal yang dapat sepenuhnya menunjukkan sensitivitas kerugian kredit ekspektasian terhadap perubahan dalam MEV. Perusahaan berkeyakinan bahwa sensitivitas harus dilakukan terhadap seluruh variabel, alih-alih variabel tunggal, karena hal ini sejalan dengan sifat multi-variabel dari perhitungan ECL.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

Based on quality of financial assets (continued)

To capture the effect of changes to the economic environment, PD model is used to calculate expected credit loss, by incorporating forward-looking information in the form of forecasts of the values of economic variables that are likely to have an effect on the repayment ability of the customer.

Various of MEVs are used for each PD model, depending on the statistical analysis result of appropriateness of the MEV with PD as well as consensus from credit expert. Amongst others are Customer Price Index (CPI), BI interest rate, oil price, personal consumption expenditure.

Sensitivity of MEV to ECL

The ECL calculation relies on multiple variables and is inherently non-linear and portfolio-dependent, which implies that no single analysis can fully demonstrate the sensitivity of the expected credit loss to changes in the MEVs. The Company believes that sensitivity should be performed to all variables, instead of single variable, as this aligns with the multi-variable nature of the ECL calculation.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan aset keuangan berdasarkan staging dan peringkat kredit sesuai PSAK 71:

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

Based on quality of financial assets (continued)

The following table presents the financial assets based on stage and credit grading in accordance with SFAS 71:

	31 Desember/*31 December* 2022					
	Kas di bank/ *Cash in banks*	**Piutang pembiayaan konsumen/ *Consumer financing receivables***	***Piutang sewa* pembiayaan/ *Finance lease***	**Piutang lain-lain/ *Other receivables***	**Aset lain-lain/ *Other assets***	
Aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi						***Financial assets at amortised cost***
Stage 1						*Stage 1*
Belum jatuh tempo	309.090.170.739	26.630.390.570.786	103.804.742.289	105.399.855.090	4.089.167.044	*Not yet overdue*
Lewat jatuh tempo:						*Past due:*
1 - 30 hari	-	1.456.727.019.555	-	-	-	*1 - 30 days*
	309.090.170.739	28.087.117.590.341	103.804.742.289	105.399.855.090	4.089.167.044	
Stage 2						*Stage 2*
Belum jatuh tempo	-	60.330.475.696	-	-	-	*Not yet overdue*
Lewat jatuh tempo:						*Past due:*
1 - 30 hari	-	143.495.739.404	-	-	-	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	-	247.631.460.729	-	-	-	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	-	132.933.643.972	-	-	-	*61 - 90 days*
	-	584.391.319.801	-	-	-	
Stage 3						*Stage 3*
Belum jatuh tempo	-	181.944.809	-	-	-	*Not yet overdue*
Lewat jatuh tempo:						*Past due:*
1 - 30 hari	-	10.217.537.920	-	-	-	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	-	20.743.494.357	-	-	-	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	-	14.962.131.275	-	-	-	*61 - 90 days*
91 - 120 hari	-	106.388.865.915	-	-	-	*91 - 120 days*
>120 hari	-	181.094.084.735	-	-	-	*>120 days*
	-	333.588.059.011	-	-	-	
Jumlah aset keuangan	309.090.170.739	29.005.096.969.153	103.804.742.289	105.399.855.090	4.089.167.044	*Total financial assets*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui						*Unearned income on consumer financing*
Stage 1	-	(6.567.055.670.135)	(13.270.450.844)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	-	(116.476.624.270)	-	-	-	*Stage 2*
Stage 3	-	(72.249.222.611)	-	-	-	*Stage 3*
Jumlah pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	-	(6.755.781.517.016)	(13.270.450.844)	-	-	*Total unearned income on consumer financing*
Bagian piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai	-		-	-	-	*Joint financing*
Stage 1	-	(15.410.381.124.789)	-	-	-	*Stage 1*
Stage 2	-	(295.348.897.401)	-	-	-	*Stage 2*
Stage 3	-	(190.247.249.909)	-	-	-	*Stage 3*
Jumlah piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai	-	(15.895.977.272.099)	-	-	-	*Total joint financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai						*Allowance for impairment losses*
Stage 1	-	(165.145.463.208)	(807.206.030)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	-	(30.336.631.137)	-	-	-	*Stage 2*
Stage 3	-	(36.618.410.659)	-	-	-	*Stage 3*
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	-	(232.100.505.004)	(807.206.030)	-	-	*Total allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**309.090.170.739**	**6.121.237.675.034**	**89.727.085.415**	**105.399.855.090**	**4.089.167.044**	***Total - net***

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan aset keuangan berdasarkan staging dan peringkat kredit sesuai PSAK 71: (lanjutan)

Based on quality of financial assets (continued)

The following table presents the financial assets based on stage and credit grading in accordance with SFAS 71: (continued)

	31 Desember/*31 December* 2021					
	Kas di bank/ *Cash in banks*	Piutang pembiayaan konsumen/ *Consumer financing receivables*	*Piutang sewa* pembiayaan/ *Finance lease*	Piutang lain-lain/ *Other receivables*	Aset lain-lain/ *Other assets*	
Aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi						***Financial assets at amortised cost***
Stage 1						*Stage 1*
Belum jatuh tempo	175.988.238.351	18.862.767.281.397	44.828.336.336	59.026.175.249	3.931.391.044	*Not yet overdue*
Lewat jatuh tempo:						*Past due:*
1 - 30 hari	-	885.731.422.970	904.410.330	-	-	*1 - 30 days*
	175.988.238.351	19.748.498.704.367	45.732.746.666	59.026.175.249	3.931.391.044	
Stage 2						*Stage 2*
Belum jatuh tempo	-	576.650.553.827	-	-	-	*Not yet overdue*
Lewat jatuh tempo:						*Past due:*
1 - 30 hari	-	224.340.871.659	-	-	-	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	-	151.823.934.622	-	-	-	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	-	64.250.568.492	-	-	-	*61 - 90 days*
	-	1.017.065.928.600	-	-	-	
Stage 3						*Stage 3*
Belum jatuh tempo	-	58.679.919.857	-	-	-	*Not yet overdue*
Lewat jatuh tempo:						*Past due:*
1 - 30 hari	-	28.751.063.690	-	-	-	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	-	18.020.583.219	-	-	-	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	-	9.048.124.619	-	-	-	*61 - 90 days*
91 - 120 hari	-	60.856.939.535	-	-	-	*91 - 120 days*
>120 hari	-	132.215.425.408	-	-	-	*>120 days*
	-	307.572.056.328	-	-	-	
Jumlah aset keuangan	175.988.238.351	21.073.136.689.295	45.732.746.666	59.026.175.249	3.931.391.044	*Total financial assets*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui						*Unearned income on consumer financing*
Stage 1	-	(4.513.064.571.917)	(5.148.496.870)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	-	(190.924.102.880)	-	-	-	*Stage 2*
Stage 3	-	(63.476.135.902)	-	-	-	*Stage 3*
Jumlah pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	-	(4.767.464.810.699)	(5.148.496.870)	-	-	*Total unearned income on consumer financing*
Bagian piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai						*Joint financing*
Stage 1	-	(10.397.424.036.377)	-	-	-	*Stage 1*
Stage 2	-	(482.221.327.589)	-	-	-	*Stage 2*
Stage 3	-	(137.049.674.202)	-	-	-	*Stage 3*
Jumlah piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai	-	(11.016.695.038.168)	-	-	-	*Total joint financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai						*Allowance for impairment losses*
Stage 1	-	(73.784.850.504)	(174.915.898)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	-	(45.906.495.544)	-	-	-	*Stage 2*
Stage 3	-	(30.183.675.352)	-	-	-	*Stage 3*
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	-	(149.875.021.400)	(174.915.898)	-	-	*Total allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**175.988.238.351**	**5.139.101.819.028**	**40.409.333.898**	**59.026.175.249**	**3.931.391.044**	***Total - net***

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Dalam menentukan kualitas kredit, eksposur berdasarkan dianalisis berdasarkan hari tunggakan (*days past due*) sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2.c.5

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko, yang mana Perusahaan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Mengingat Perusahaan memperoleh dukungan keuangan yang kuat dari Entitas Induk, maka risiko ini dapat dikelola dengan baik.

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flows* pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

In determining credit quality, exposures are analysed by based on days past due as explained in Note 2.c.5

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk, whereby the Company does not have sufficient financial resources to discharge its matured liabilities. As the Company receives strong financial support from Parent Company, this risk could be managed properly.

The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cash flows as of 31 December 2022 and 2021.

	31 Desember/*31 December* 2022						
	Kurang dari satu bulan/ *Less than one month*	1-6 bulan/ *months*	Lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun/*Over than 6 month to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *Over than 1 year*	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/*No contractual maturity*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Utang usaha	210.213.189.191	92.605.605.354	-	-	-	302.818.794.545	*Trade payables*
Utang lain-lain	-	3.898.215.000	26.151.556.331	-	-	30.049.771.331	*Other payables*
Beban bunga yang masih harus dibayar	17.128.260.517	-	-	-	-	17.128.260.517	*Accrued interest expenses*
Pinjaman bank	241.366.603.177	1.176.567.533.497	1.334.965.724.129	3.673.651.643.635	-	6.426.551.504.438	*Bank loans*
Total	**468.708.052.885**	**1.273.071.353.851**	**1.361.117.280.460**	**3.673.651.643.635**	**-**	**6.776.548.330.831**	***Total***

	31 Desember/*31 December* 2021						
	Kurang dari satu bulan/ *Less than one month*	1-6 bulan/ *months*	Lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun/*Over than 6 month to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *Over than 1 year*	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/*No contractual maturity*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Utang usaha	141.038.800.974	83.545.422.655	-	-	-	224.584.223.629	*Trade payables*
Utang lain-lain	-	1.968.165.000	16.497.003.984	-	-	18.465.168.984	*Other payables*
Beban bunga yang masih harus dibayar	15.962.379.236	-	-	-	-	15.962.379.236	*Accrued interest expenses*
Pinjaman bank	439.089.819.954	1.120.705.948.789	1.135.957.229.148	2.684.925.622.095	-	5.380.678.619.986	*Bank loans*
Total	**596.091.000.164**	**1.206.219.536.444**	**1.152.454.233.132**	**2.684.925.622.095**	**-**	**5.639.690.391.835**	***Total***

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko operasional

Perusahaan juga sangat peduli terhadap risiko operasional, karena permasalahan yang timbul sehubungan dengan risiko ini dapat berdampak dan berpengaruh luas terhadap kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Secara umum, risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perusahaan. Penanganan risiko operasional dalam Perusahaan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Langkah di atas telah diterjemahkan Perusahaan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut:

Manajemen permodalan

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perusahaan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perusahaan memonitor permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk

The Company is also very concerned about the operational risk, because the problems arised in relation with this risk could bring significant impact and affect to the overall Company's performance. In general, operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations. The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

- *Risk identification*
- *Risk measurement*
- *Risk management, supervision and control*

The three steps above are inseparable unified process. The steps above have been converted to the Company's operational risk management mechanism as follows:

Capital management

The Company's objectives when managing capital are to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares to reduce debt.

Consistent with other players in the industry, the Company monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt divided by total capital. Total capital is calculated as 'equity' as shown in the statements of financial position.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen permodalan (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, jumlah maksimum *gearing ratio* adalah sebesar 10 kali dari total modal.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Capital management (continued)

Based on Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.05/2018 regarding Business Operation of Multifinance Company, the maximum gearing ratio is 10 times from total capital.

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Pinjaman yang diterima	5.819.210.019.145	4.869.169.921.348	*Debt borrowings*
Jumlah modal	956.536.500.588	620.398.878.419	*Total capital*
***Gearing ratio* (tidak diaudit)**	**6,08**	**7,85**	***Gearing ratio (unaudited)***

Perusahaan senantiasa menjaga jumlah maksimum gearing ratio lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan melalui analisa alternatif pembiayaan baik melalui pinjaman bank. Perusahaan juga menghitung biaya dana dari pembiayaan yang dipilih untuk memastikan biaya dana tersebut dapat menghasilkan pendapatan maksimum bagi Perusahaan.

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.35/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi sejumlah rasio keuangan tertentu. Rasio-rasio ini dibuat oleh Perusahaan berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan dimana rasio tersebut dapat berbeda jika rasio tersebut dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia. Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Peraturan OJK: (tidak diaudit)

The Company always maintains the maximum amount of gearing ratio at smaller level than the applicable regulation by performing an analysis to determine financing alternative whether through the bank loans. The Company also calculates the cost of fund of financing selected by the Company to ensure it could generate a maximum income for the Company.

Based on POJK No. 35/POJK.35/2018 dated 31 December 2018 regarding the Organisation of Financing Company Business, the Company is required to comply with several financial ratios. These ratios have been prepared by the Company based on the formula as prescribed in the said OJK regulation for regulatory compliance purposes, where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian financial accounting standards. The following are the financial ratios based on OJK Regulation: (unaudited)

	31 Desember/ 31 *December* 2022	31 Desember/ 31 *December* 2021	
Rasio piutang pembiayaan terhadap total asset - neto	90,80%	92,16%	*Net financing to asset ratio*
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pendanaan yang diterima	122,78%	118,93%	*Net financing receivables to funding ratio*
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	28,15%	19,69%	*Net financing receivables for investment and working capital financing to total financing reveivable ratio*
Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) - gross	0,97%	1,05%	*Non-performing financing (NPF) ratio - gross*
Rasio permodalan	14,48%	12,32%	*Capital ratio*
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	191,31%	124,08%	*Equity to paid-up capital ratio*
Rasio penyertaan langsung	0,00%	0,00%	*Direct participation ratio*

28. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan analisis atas instrumen keuangan yang tidak dinyatakan dalam nilai wajar sesuai dengan masing-masing level dalam hirarki nilai wajar:

28. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The tables below present the analysis of the above financial instruments which are not stated in fair value by the level in the fair value hierarchy:

	31 Desember/*31 December* 2022					
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Tingkat 1/ *Level 1***	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Total**	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Kas dan kas di bank	336.940.586.694	336.940.586.694	-	-	336.940.586.694	*Cash on hands and cash in banks*
Piutang pembiayaan konsumen	6.353.338.180.038	-	-	4.798.519.764.671	4.798.519.764.671	*Consumer financing receivables*
Piutang pembiayaan murabahah	687.505.536.518	-	-	558.248.306.614	558.248.306.614	*Murabahah financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	90.534.291.445	-	-	78.686.556.334	78.686.556.334	Finance lease receivables
Piutang lain-lain	105.399.855.090	-	105.399.855.090	-	105.399.855.090	*Other receivables*
Aset lain-lain	4.089.167.044		4.089.167.044	-	4.089.167.044	*Other assets*
Total	**7.577.807.616.829**	**336.940.586.694**	**109.489.022.134**	**5.435.454.627.619**	**5.881.884.236.447**	***Total***
LIABILITAS KEUANGAN						***FINANCIAL LIABILITIES***
Utang usaha	302.818.794.545	-	302.818.794.545	-	302.818.794.545	*Trade payables*
Utang lain-lain	30.049.771.331	-	30.049.771.331	-	30.049.771.331	*Other payables*
Beban bunga yang masih harus dibayar	17.128.260.517	-	17.128.260.517	-	17.128.260.517	*Accrued interest expenses*
Pinjaman bank	5.808.487.671.118	-	5.835.464.793.518	-	5.835.464.793.518	*Bank loans*
Total	**6.158.484.497.511**	**-**	**6.185.461.619.911**	**-**	**6.185.461.619.911**	***Total***

	31 Desember/*31 December* 2021					
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Tingkat 1/ *Level 1***	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Total**	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Kas dan kas di bank	188.431.650.830	188.431.650.830			188.431.650.830	*Cash on hands and cash in banks*
Piutang pembiayaan konsumen	5.288.976.840.428	-	-	4.040.019.966.557	4.040.019.966.557	*Consumer financing receivables*
Piutang pembiayaan murabahah	449.798.025.787	-	-	345.408.615.969	345.408.615.969	*Murabahah financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	40.584.249.796	-	-	35.814.476.175	35.814.476.175	Finance lease receivables
Piutang lain-lain	59.026.175.249	-	51.001.884.468	8.024.290.780	59.026.175.248	*Other receivables*
Aset lain-lain	3.931.391.044	-	3.931.391.044	-	3.931.391.044	*Other assets*
Total	**6.030.748.333.134**	**188.431.650.830**	**54.933.275.512**	**4.429.267.349.481**	**4.672.632.275.823**	***Total***
LIABILITAS KEUANGAN						***FINANCIAL LIABILITIES***
Utang usaha	224.584.223.629	-	224.584.223.629	-	224.584.223.629	*Trade payables*
Utang lain-lain	18.465.168.984	-	18.465.168.984	-	18.465.168.984	*Other payables*
Beban bunga yang masih harus dibayar	15.962.379.236	-	15.962.379.236	-	15.962.379.236	*Accrued interest expenses*
Pinjaman bank	4.859.307.294.734	-	4.917.629.706.423	-	4.917.629.706.423	*Bank loans*
Total	**5.118.319.066.583**	**-**	**5.176.641.478.272**	**-**	**5.176.641.478.272**	***Total***

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

Nilai wajar kas, piutang lain-lain, aset lain-lain, utang usaha, beban bunga yang masih harus dibayar dan utang lain-lain termasuk utang lain-lain terkait sewa mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah, piutang sewa pembiayaan, dan pinjaman bank yang diterbitkan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Perusahaan tidak memiliki perpindahan di antara tingkat hirarki pada tahun 2022 dan 2021.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair values:

The fair value of cash on hands and cash in banks, other receivables, other assets, trade payables, accrued interest expenses and other payables including other payables related to lease approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.

The fair value of consumer financing receivables, murabahah financing receivables, finance lease receivables, and bank loans are determined by discounting cash flows using market interest rate as of 31 December 2022 and 2021.

The Company has no transfer between hierarchy level in 2022 and 2021.

29. PERJANJIAN KERJASAMA

Asuransi

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan bekerja sama dalam penyediaan asuransi kendaraan pembiayaan konsumen dengan PT Mandiri Axa General Insurance, PT Asuransi Wahana Tata, PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, PT Asuransi Total Bersama, PT Asuransi Cakrawala Proteksi, PT Sompo Insurance Indonesia, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, PT Asuransi Maximus Graha Persada, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, dan PT Asuransi Multi Artha Guna.

29. COOPERATION AGREEMENTS

Insurance

In the course of business, the Company entered into insurance agreements of motor vehicle under consumer financing with PT Mandiri Axa General Insurance, PT Asuransi Wahana Tata, PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, PT Asuransi Total Bersama, PT Asuransi Cakrawala Proteksi, PT Sompo Insurance Indonesia, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, PT Asuransi Maximus Graha Persada, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, and PT Asuransi Multi Artha Guna.

30. LIABILITAS KONTINJENSI

Perusahaan tidak memiliki liabilitas kontinjensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

30. CONTINGENT LIABILITIES

The Company does not have any significant contingent liabilities as of 31 December 2022 and 2021.

31. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Berikut ini adalah beberapa Standar Akuntansi Keuangan, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan dan amandemen yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2022:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

  Amandemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

31. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The following are several Financial Accounting Standards, Interpretations of Financial Accounting Standards and amendment issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Company but are not yet effective for 2022 financial statements:

- *Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies*

  This amendments provides guidance and examples to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendment aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

31. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Berikut ini adalah beberapa Standar Akuntansi Keuangan, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan dan amandemen yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2022: (lanjutan)

- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

  Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

- Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

  Amandemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

  Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Manajemen masih melakukan persiapan dalam penerapan standar baru tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi sampai tanggal laporan keuangan.

31. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

The following are several Financial Accounting Standards, Interpretations of Financial Accounting Standards and amendment issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Company but are not yet effective for 2022 financial statements: (continued)

- *Amendments to PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use.*

  The amendments prohibit entities to deduct from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

- *Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – Definition of Accounting Estimates*

  The amendments introduces a definition of 'accounting estimates' and clarify the distinction between changes in accounting estimates and changes in accounting policies and the correction of errors. Also, they clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

- *Amendment of PSAK 46: Income Taxes – Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*

  This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in current practice for such transactions and similar transactions.

The management intends to adopt these new standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated until the report date.

32. REKLASIFIKASI AKUN

Perusahaan melakukan reklasifikasi akun-akun tertentu pada laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 agar sesuai dengan klasifikasi penyajian pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

32. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

The Company made reclassification to the following accounts on the financial statements for the year ended 31 December 2021 to conform with the presentation for the year ended 31 December 2022:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/ *For the year ended 31 December 2022*			
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Setelah direklasifikasi/ *As reclassified***	
PENDAPATAN				***REVENUES***
Pembiayaan konsumen				*Consumer financing income*
Pihak ketiga	1.305.314.586.091	(15.573.934.751)	1.289.740.651.340	*Third parties*
Marjin murabahah	58.543.397.906	(49.759.289)	58.493.638.617	*Murabahah margin*
Lain-lain	157.853.109.715	35.679.760.749	193.532.870.464	*Others*
BEBAN				***EXPENSES***
Beban keuangan				*Finance charges*
Pihak ketiga	(251.546.916.349)	293.239.935	(251.253.676.414)	*Third parties*
Pihak berelasi	(149.961.790.621)	15.330.454.105	(134.631.336.516)	*Related parties*
Lain-lain	(42.590.158.125)	(35.679.760.749)	(78.269.918.874)	*Others*

33. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Perusahaan diselesaikan dan diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2023.

33. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's financial statements were completed and authorised for issue by the Directors on 23 January 2023.

Laporan Tahunan
Annual Report
2022

INCREASING OPTIMISM, GROWING STRONGER

MENINGKATKAN OPTIMISME, TUMBUH LEBIH KUAT

mandiri utama finance

Menara Mandiri 1
Lt. 26 - 27, Jl. Jend. Sudirman Kav 54 - 55
Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12190
Telp.: (021) 5278 038

www.muf.co.id

www.muf.co.id @MUF_MOAS MUF_MOAS